

bank
btpn

A MEMBER OF
SMBC Group

ready for
**FUTURE
GROWTH**

Laporan Tahunan 2019

Ready For Future Growth

Dengan diselesaikannya penggabungan antara bank BTPN dan SMBCI di tanggal 1 Februari 2019 menjadi Bank BTPN, Bank telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan integrasi proses-proses operasional utama dan menjaga stabilisasi kualitas pelayanan kepada nasabah.



Bank BTPN juga meluncurkan sejumlah inisiatif ‘sinergi’ untuk memanfaatkan perluasan cakupan layanan keuangan yang diberikan dan basis pelanggan yang dilayani. Di akhir tahun, Bank BTPN berada dalam posisi yang baik untuk meraih pertumbuhan lebih tinggi di masa depan.



Kinerja 2019

Total Aset

79%

Bank terbesar ke-9
di Indonesia

Bank membukukan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp1,6 triliun, naik 160% dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp600,1 miliar.

Pendapatan bunga bersih Bank pada tahun 2019 sebesar Rp11,0 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang Rp9,6 triliun.

Laba tahun berjalan sebelum pajak Bank pada tahun 2019 sebesar Rp4,0 triliun, jauh di atas pencapaian tahun 2018 yang Rp2,9 triliun.

Pendapatan bunga Bank tahun 2019 sebesar Rp19,1 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang Rp14,1 triliun.

108%

Kredit pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp141,8 triliun, tumbuh sebesar 108% dibandingkan akhir tahun 2018 yang sebesar Rp68,1 triliun.



Setelah merger dengan SMBCI, Bank BTPN menjadi bank yang lebih solid dengan bertambahnya unit usaha korporasi dan dukungan dari pemegang saham utama, yaitu SMBC.



213%

Porsi terbesar penyaluran kredit adalah untuk modal kerja, yaitu senilai Rp72,6 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang Rp23,2 triliun, tumbuh 213%

830%

Kredit investasi tahun 2019 senilai Rp30,1 triliun, naik sebesar 830% dibandingkan tahun 2018.

0,4%

Tingkat kredit bermasalah bersih Bank pada tahun 2019 sebesar 0,4%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang 0,5% dan jauh di bawah rata-rata industri perbankan,

Upaya Bank dalam menjaga rasio kredit bermasalah tersebut merupakan hasil dari pengembangan atas penerapan manajemen risiko yang terus dilakukan, baik dari aspek pengembangan kerangka kerja, pembaharuan kebijakan dan prosedur, serta memastikan modal Bank dapat mengakomodasi risiko kredit yang mungkin timbul dari strategi bisnis yang dilakukan.

23%

Total simpanan nasabah yang dibukukan oleh Bank hingga berakhirnya tahun buku 2019 sebesar Rp86,9 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang Rp70,8 triliun, mengalami kenaikan 23%.

Simpanan Nasabah

Dari sisi mata uang, sebagian besar simpanan dalam denominasi rupiah, yaitu mencapai Rp74,9 triliun atau 86% dari total simpanan. Sedangkan dalam bentuk valuta asing mencapai Rp12,1 triliun atau dengan porsi 14%.

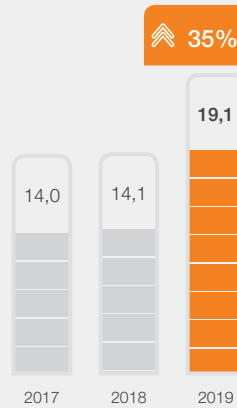
173%

CASA tumbuh sebesar 173%

CASA

Current Account Saving Account (CASA) meningkat dari Rp8,96 triliun di 2018 menjadi Rp24,43 triliun di 2019. Rasio CASA meningkat dari 13% di 2018 menjadi 28% di 2019

Kinerja Bunga Bersih (dalam triliun Rupiah)



2,6 Triliun

Bank BTPN berhasil membukukan laba bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,6 triliun, lebih tinggi 40% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp1,8 triliun.

Pencapaian Laba

Pencapaian laba Bank tersebut didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga bersih serta pendapatan transaksi valuta asing dan keuntungan revaluasi.

24,2%

KPMM (CAR) tercatat sebesar 24,2%

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/Capital Adequacy Ratio (CAR) di tahun 2019 tercatat sebesar 24,2% dari sebelumnya 24,6% di tahun 2018. Bank dapat memastikan kecukupan modal setelah memperhitungkan dampak dari PSAK 71.

Daftar Isi

1 Tema Ready For Future Growth



Ikhtisar Utama

- 6 Ikhtisar Keuangan
- 10 Ikhtisar Saham
- 12 Aksi Korporasi
- 12 Penerbitan Obligasi/Sukuk
- 13 Ikhtisar Obligasi dan Sukuk
- 16 Peristiwa Penting
- 20 Penghargaan & Sertifikasi



Laporan Manajemen

- 24 Laporan Komisaris Utama
- 32 Laporan Direktur Utama
- 50 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi



Profil Perusahaan

- 54 Informasi Umum Perusahaan
- 56 Riwayat Singkat Perusahaan
- 58 Jejak Langkah
- 60 Bidang Usaha
- 61 Produk dan Layanan
- 62 Struktur Organisasi
- 64 Visi, Misi & Nilai-nilai Utama
- 66 Profil Dewan Komisaris
- 71 Profil Direksi
- 80 Profil Anggota Komite Audit
- 82 Profil Anggota Komite Pemantau Risiko
- 84 Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
- 85 Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
- 88 Profil Pejabat Eksekutif
- 92 Statistik Karyawan
- 96 Komposisi dan Profil Pemegang Saham
- 98 Informasi Entitas Induk Terakhir
- 99 Informasi Pemegang Saham Utama
- 100 Daftar Entitas Anak
- 100 Kantor Cabang
- 101 Struktur Kepemilikan
- 102 Kronologi Pencatatan Saham
- 103 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
- 104 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal
- 105 Informasi pada *Website* Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen

- 108 Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan
- 109 Perkembangan Perekonomian
- 110 Perkembangan Industri
- 112 Tinjauan Bisnis dan Operasional
- 113 Kinerja Bisnis Per Segmen Usaha
- 115 Retail Banking
- 116 BTPN Sinaya
- 117 BTPN Wow
- 118 Retail Lending
- 119 Jenius
- 120 Business Banking
- 121 Corporate Banking
- 123 Treasury
- 124 Perbankan Syariah
- 125 Profitabilitas Per Segmen Usaha
- 126 Tinjauan Kinerja Keuangan
- 148 Manajemen Risiko

148 Manajemen Risiko

- 150 Prioritas Tahun 2019
- 150 Sistem Pengendalian Internal
- 150 Pengungkapan Permodalan
- 153 Pengungkapan Eksposur

194 Tinjauan Unit Pendukung

- 196 Sumber Daya Manusia
- 200 Teknologi Informasi dan Operasional
- 200 Teknologi Informasi
- 206 Operasional

208 Tata Kelola Perusahaan

- 210 Prinsip-Prinsip dan Dasar Hukum Pelaksanaan GCG
- 212 Tujuan Penerapan GCG
- 212 Struktur GCG
- 213 Penerapan dan Komitmen GCG
- 219 Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019
- 298 Penilaian Sendiri GCG

300 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- 304 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 306 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia
- 307 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil
- 308 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
- 309 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 311 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nasabah
- 312 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

313 Laporan Keuangan 2019

- 319 Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Tahun Buku 2019
- 529 Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik
- 535 Kriteria Annual Report Awards

Ikhtisar Keuangan

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2019	2018 ⁹⁾	2017 ⁹⁾
Neraca Keuangan			
Jumlah Aset	181.631.385	101.341.224	95.041.593
Aktiva Produktif ¹⁾	173.854.020	94.345.608	88.263.211
Pinjaman yang Diberikan ²⁾	141.760.183	68.136.780	65.351.837
Simpanan Nasabah ³⁾	86.939.479	70.844.712	67.918.073
Pinjaman yang Diterima	44.086.343	8.442.765	5.208.640
Efek-efek yang Diterbitkan	3.190.628	1.197.442	2.543.401
Penyertaan Saham	22.522	22	22
Jumlah Liabilitas ³⁾	150.159.457	82.554.894	78.289.053
Jumlah Ekuitas ⁴⁾	31.471.928	18.786.330	16.752.540
Jumlah Lembar Saham yang Disetor dan Dibayar Penuh (dalam satuan)	8.148.928.869	5.851.646.757	5.840.287.257
Informasi Hasil Usaha			
Pendapatan Bunga	19.084.410	14.126.651	14.046.062
Beban Bunga	(8.036.646)	(4.526.243)	(4.524.452)
Pendapatan Bunga Bersih	11.047.764	9.600.408	9.521.610
Pendapatan Operasional Lainnya	1.560.509	600.139	469.537
Beban Operasional Lainnya	(7.129.872)	(5.877.519)	(6.915.102)
Biaya CKPN	(1.445.882)	(1.375.272)	(1.097.619)
Pendapatan Operasional - Bersih	4.032.519	2.947.756	1.978.426
Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak	4.018.922	2.919.428	1.936.845
Laba Bersih Tahun Berjalan	2.992.418	2.128.064	1.421.940
Laba (rugi) Tahun Berjalan			
- Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.572.528	1.838.471	1.220.886
- Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	419.890	289.593	201.054
Laba/Rugi Komprehensif Lain	(14.596)	238.280	(13.449)
Jumlah Laba Komprehensif	2.977.822	2.366.344	1.408.491
Laba Komprehensif Tahun Berjalan			
- Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.555.357	2.065.220	1.211.719
- Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	422.465	301.124	196.772
Laba (rugi) Bersih per Saham (Nilai Penuh)	327	320	213

Catatan:

1. Termasuk pinjaman pembiayaan/piutang syariah yang diberikan, giro pada BI dan bank lain, penempatan pada BI dan bank lain, efek-efek, penyertaan, tagihan akseptasi, *reverse repo* dan tagihan derivatif
2. Termasuk pembiayaan/piutang Syariah
3. Termasuk dana syirkah temporer
4. Termasuk kepentingan non-pengendali
5. Termasuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional
6. RoA sebelum pajak
7. Termasuk *Payment Service Points* & Kantor Fungsional Operasional
8. Termasuk BTPN Syariah
9. Informasi komparatif yang disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 2019 telah disajikan kembali untuk akun beban dibayar dimuka asuransi kredit, beban asuransi kredit dan saldo laba, yang disebabkan oleh revisi atas perhitungan biaya asuransi kredit pensiun dan proses rekonsiliasi atas beban dibayar di muka asuransi kredit *pension*. Untuk laba rugi tahun 2017 tidak disajikan kembali.

Keterangan	2019	2018 ⁹⁾	2017 ⁹⁾
Rasio Keuangan (dalam %)			
Permodalan			
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ⁵⁾	24,2	24,6	24,1
Aset Produktif			
Aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif	0,5	0,9	0,7
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,7	1,0	0,7
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,9	1,3	1,0
NPL-Bruto	0,8	1,2	0,9
NPL-Neto	0,4	0,5	0,4
Profitabilitas			
Imbal Hasil Aset (ROA) ⁶⁾	2,3	3,0	2,1
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	9,9	11,6	8,2
Margin Pendapatan Bunga Bersih (NIM)	6,9	11,3	11,6
Liabilitas terhadap Aktiva	82,7	81,5	82,4
Liabilitas terhadap Ekuitas	502,7	468,9	486,8
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,5	80,1	86,5
Biaya Dana	5,4	5,9	6,1
Likuiditas			
Loan to Deposit Ratio (LDR)	163,1	96,2	96,2
Kepatuhan			
Persentase Pelanggaran BMPK			
Pihak Terkait	-	-	-
Pihak Tidak Terkait	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPK			
Pihak Terkait	-	-	-
Pihak Tidak Terkait	-	-	-
Giro Wajib Minimum Utama Rupiah	6,2	6,6	6,6
Giro Wajib Minimum Utama Valuta Asing	8,0	8,3	8,4
Posisi Devisa Neto	0,1	0,4	0,4
Lain-lain			
Jumlah Kantor Cabang ⁷⁾	579	795	939
Jumlah ATM dan TCR	226	227	207
Jumlah Karyawan ⁸⁾	19.235	19.175	20.912

↑↑ 108%

Pertumbuhan Kredit

↓↓ 0,4%

Kualitas Pinjaman
(Rasio NPL-Bersih)

Rp 31,5 triliun

Total Ekuitas

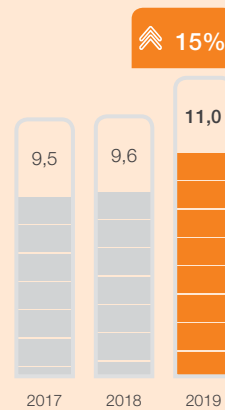
69,7%

Pertumbuhan
Total Ekuitas yang
Diatribusikan kepada
Pemilik Bank

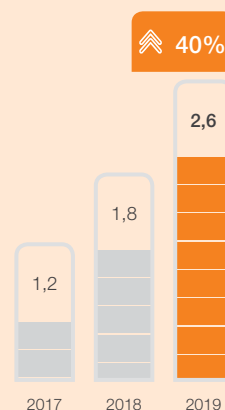
24,2%

Rasio Kecukupan Modal
(CAR)

Pendapatan Bunga Bersih
(dalam triliun rupiah)

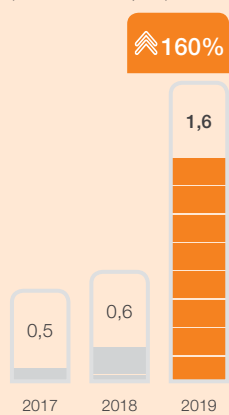


Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
(dalam triliun rupiah)



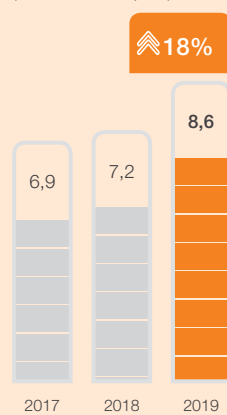
Pendapatan Operasi Lainnya

(dalam triliun rupiah)



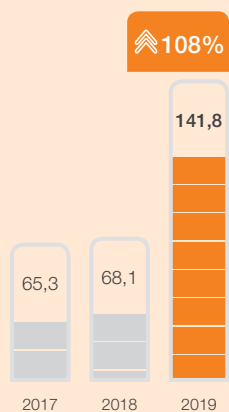
Beban Operasional Lainnya

(dalam triliun rupiah)



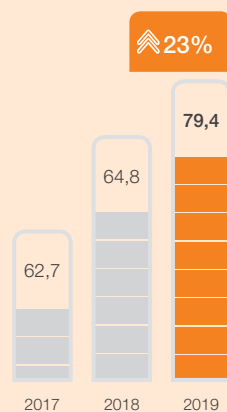
Pinjaman yang Diberikan

(dalam triliun rupiah)



Simpanan Nasabah

(dalam triliun rupiah)



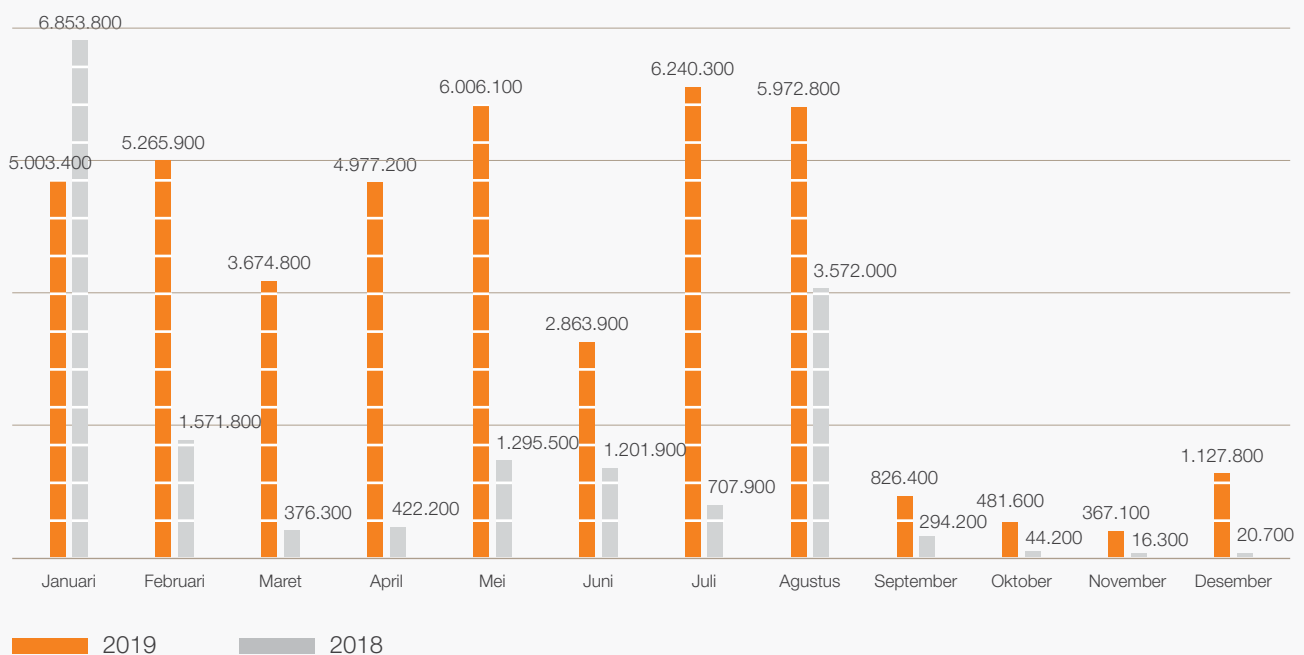
Ikhtisar Saham

PENAWARAN UMUM PERDANA

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Juni 2007, telah disetujui oleh para pemegang saham atas rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia. Bank melakukan penawaran umum perdana atas 267.960.220 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp2.850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 12 Maret 2008.

PERKEMBANGAN SAHAM BULANAN (2018-2019)

Volume

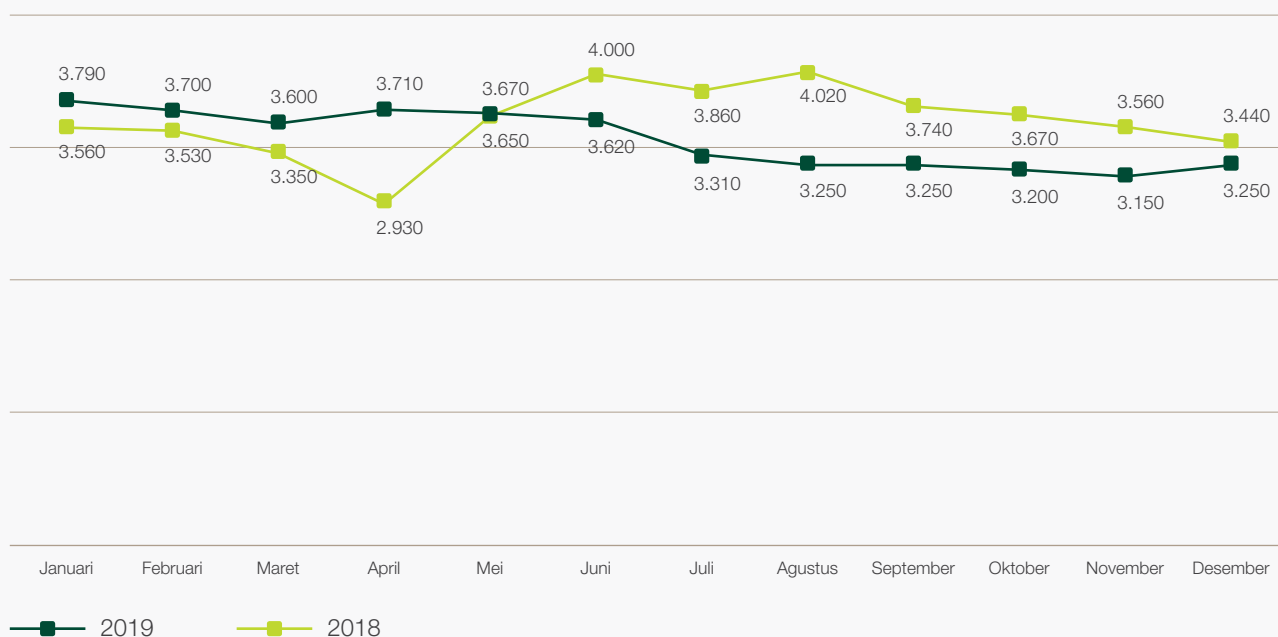


PERKEMBANGAN KINERJA SAHAM TRIWULANAN 2019 & 2018

Periode	Tertinggi (Rp)		Terendah (Rp)		Penutupan (Rp)		Volume (Saham)	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Maret	3.750	3.350	3.550	3.190	3.600	3.350	3.674.800	376.300
Juni	3.670	4.000	3.400	3.880	3.620	4.000	2.863.900	1.201.900
September	3.250	3.750	3.190	3.700	3.250	3.740	826.400	294.200
Desember	3.150	3.470	3.050	3.440	3.250	3.440	1.127.800	20.700

Periode	Jumlah Saham Tercatat		Kapitalisasi Pasar	
	2019	2018	2019	2018
Maret	8.148.916.869	5.781.884.384	13.229.280.000	1.260.605.000
Juni	8.148.916.869	5.783.455.807	10.367.318.000	4.807.600.000
September	8.148.928.869	5.792.554.984	2.685.800.000	1.100.308.000
Desember	8.148.928.869	5.851.646.757	3.665.350.000	71.208.000

Harga Penutupan (Rp)



Aksi Korporasi

PENGGABUNGAN USAHA

Pada awal 2019, Bank melakukan Penggabungan Usaha (*Merger*) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI"). Merger tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2019. Hal ini merupakan lanjutan atas perjanjian penggabungan usaha antara Bank dengan SMBCI berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 09 tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. SMBCI bertindak sebagai bank yang menggabungkan diri dan Bank bertindak sebagai bank penerima penggabungan. Selanjutnya setelah terjadi penggabungan usaha antara Bank dan SMBCI, hingga kemudian Bank berganti nama sehingga menjadi PT Bank BTPN Tbk.

FREE FLOAT

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Sumitomo Mitsui Banking Corporation telah melepas 400.000.000 sahamnya ke publik. Hal ini merupakan pemenuhan atas ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama (*free float*).

Penerbitan Obligasi/Sukuk

Bank menerbitkan Obligasi/Sukuk yang efektif per tanggal 26 November 2019, adapun Bank melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Seri A** Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp799.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri A sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A.
- Seri B** Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp201.000.000.000,- (dua ratus satu miliar Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri B sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B.

Ikhtisar Obligasi dan Sukuk

Pada tahun 2019, Bank menerbitkan 1 (satu) Obligasi/SUKUK yaitu Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019.

Keterangan	Tanggal Pencatatan	Jumlah Obligasi (Rp)	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding (Rp)
Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016					
Seri B	11 Juli 2016	300.000.000.000	8	1 Juli 2019	Telah dilakukan pelunasan pada tanggal 1 Juli 2019
Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017					
Seri B	18 Oktober 2017	900.000.000.000	7,50	17 Oktober 2020	900.000.000.000
Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019					
Seri A	26 November 2019	799.000.000.000	7,55%	26 November 2022	799.000.000.000
Seri B	26 November 2019	201.000.000.000	7,75%	26 November 2024	201.000.000.000
Surat Utang Jangka Menengah II Tahun 2017 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia					
MTN 11	14 Juni 2017	1.302.000.000.000	8,25%	14 Juni 2020	1.302.000.000.000

Peringkat Obligasi Bank BTPN

Obligasi	Peringkat 2017	Peringkat 2018	Peringkat 2019
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 seri B	AAA (idn)	AAA (idn)	AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017	AAA (idn); Outlook Stabil	AAA (idn)	AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019			AAA (idn); Outlook Stabil
Surat Utang Jangka Menengah II Tahun 2017 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	idAAA	idAAA	idAAA

PEMBAYARAN BUNGA DAN POKOK TAHUN 2019

Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 seri B

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Bersih)
Bunga ke-1	1 Oktober 2016	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-2	1 Januari 2017	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-3	1 April 2017	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-4	1 Juli 2017	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-5	1 Oktober 2017	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-6	1 Januari 2018	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-7	1 April 2018	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-8	1 Juli 2018	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-9	1 Oktober 2018	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-10	1 Januari 2019	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-11	1 April 2019	Rp6.000.000.000,-
Bunga ke-12	1 Juli 2019	Rp306.000.000.000,-

Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 seri B

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Bersih)
Bunga ke-1	17 Januari 2018	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-2	17 April 2018	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-3	17 Juli 2018	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-4	17 Oktober 2018	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-5	17 Januari 2019	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-6	17 April 2019	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-7	17 Juli 2019	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-8	17 Oktober 2019	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-9	17 Januari 2020	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-10	17 April 2020	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-11	17 Juli 2020	Rp16.875.000.000,-
Bunga ke-12	17 Oktober 2020	Rp916.875.000.000,-

Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 seri A

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Bersih)
Bunga ke-1	26 Februari 2020	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-2	26 Mei 2020	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-3	26 Agustus 2020	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-4	26 November 2020	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-5	26 Februari 2021	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-6	26 Mei 2021	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-7	26 Agustus 2021	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-8	26 November 2021	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-9	26 Februari 2022	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-10	26 Mei 2022	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-11	26 Agustus 2022	Rp15.081.125.000,-
Bunga ke-12	26 November 2022	Rp814.081.125.000,-

Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 seri B

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Bersih)
Bunga ke-1	26 Februari 2020	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-2	26 Mei 2020	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-3	26 Agustus 2020	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-4	26 November 2020	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-5	26 Februari 2021	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-6	26 Mei 2021	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-7	26 Agustus 2021	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-8	26 November 2021	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-9	26 Februari 2022	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-10	26 Mei 2022	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-11	26 Agustus 2022	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-12	26 November 2022	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-13	26 Februari 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-14	26 Mei 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-15	26 Agustus 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-16	26 November 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-17	26 Februari 2024	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-18	26 Mei 2024	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-19	26 Agustus 2024	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-20	26 November 2024	Rp204.894.375.000,-

Medium Term Notes (MTN) II Tahun 2017 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Bersih)
Bunga ke-1	14 September 2017	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-2	14 Desember 2017	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-3	14 Maret 2018	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-4	14 Juni 2018	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-5	14 September 2018	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-6	14 Desember 2018	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-7	14 Maret 2019	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-8	14 Juni 2019	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-9	14 September 2019	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-10	14 Desember 2019	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-11	14 Maret 2020	Rp26.853.750.000,-
Bunga ke-12	14 Juni 2020	Rp1.328.853.750.000,-

Peristiwa Penting 2019



1 Februari

PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) resmi beroperasi sebagai bank baru hasil penggabungan usaha (*merger*) antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Bank BTPN menjadi suatu bank universal yang memiliki bisnis lebih lengkap dan melayani segmen nasabah lebih luas, mulai dari segmen *mass market* (ritel) hingga korporasi.



15 Februari

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) untuk periode tahun buku 2018. RUPST juga menyepakati untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham sebagai refleksi komitmen jangka panjang agar Bank dapat tumbuh berkelanjutan.



20 Februari

Jenius, solusi *life finance* untuk masyarakat melek digital (*digital savvy*) resmi hadir di Medan pada 20 Februari 2019 dan Makassar pada 20 Maret 2019. Bank BTPN berkomitmen memperluas layanan Jenius untuk membantu masyarakat di kota terbesar di Sumatera dan Sulawesi dalam mengelola keuangan lebih baik.



9 Mei

Jenius berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), memberikan kemudahan dalam membayar zakat dan berdonasi melalui aplikasi di ponsel pintar.



18 Oktober

Bank BTPN mengumumkan penerbitan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV Tahap I senilai Rp1 triliun. Seluruh dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai ekspansi kredit ke semua segmen, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ritel, hingga korporasi.



8 November

Bank BTPN menandatangani kerja sama bisnis pembayaran gaji karyawan (*payroll*) dengan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (Indomobil Group). Lebih dari 3.000 karyawan yang berasal dari 25 anak perusahaan Indomobil Group di Jakarta, Batam, dan Surabaya dibayarkan gajinya melalui layanan perbankan digital Jenius. Kerja sama ini merupakan salah satu sinergi penjualan silang (*cross-selling*) produk dan layanan ritel dengan nasabah korporasi pasca penggabungan usaha antara BTPN dan SMBCI.



21 November

Jenius meluncurkan Tech Hub pertama sebagai "rumah" bagi *tech enthusiast* di Bandung dan pengembangan layanan finansial. Kehadiran Jenius Tech Hub di Bandung merupakan upaya bagi Jenius agar semakin adaptif melihat perkembangan teknologi serta kebutuhan sehingga dapat diterapkan menjadi solusi *life finance* yang semakin lengkap.



21 & 22 November

Bank BTPN mengadakan Bank BTPN Economic Outlook 2019 pada 21 November 2019 dengan menghadirkan ekonom Chatib Basri dan pengamat pajak Yustinus Prastowo pada 21 November 2019. Acara ini merupakan acara seminar ekonomi pertama yang dilakukan pasca penggabungan usaha antara BTPN dan SMBCI dengan mempertemukan seluruh nasabah dari berbagai unit bisnis, mulai dari nasabah ritel BTPN Sinaya, nasabah usaha kecil dan menengah BTPN Mitra Bisnis, nasabah komersial, sampai dengan nasabah korporasi. Bank BTPN juga mengadakan Bank BTPN Economic Outlook 2019 untuk nasabah Jepang pada 22 November 2019 dengan menghadirkan pengamat ekonomi dan politik Takashi Shiraishi serta Kepala Ekonom SMBC Singapura Yoichiro Yamaguchi.



28 November

Jenius berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia dalam memperkenalkan aplikasi Safe Travel pada acara Safe Travel Fest 2019. Kolaborasi strategis antara Jenius dan Kemenlu ini merupakan komitmen kami dalam memberikan pengalaman cerdas, simpel, dan aman bagi masyarakat *digital savvy*, termasuk saat mereka melakukan perjalanan (*traveling*).



18 Desember

Bank BTPN resmi membuka layanan perbankan korporasi di Medan untuk melayani nasabah korporasi di pusat perekonomian terbesar di Sumatera tersebut.

Penghargaan & Sertifikasi

PENGHARGAAN

No	Tanggal	Nama Penghargaan	Kategori	Penyelenggara
1	Februari 2019	The World's Best Bank	Rank 2 – Indonesia	Forbes
2	Maret 2019	Public Retaliation Awards 2019	Gold Winner of the Digital PR Program	Majalah PR Indonesia
			Silver Winner of the Social Media PR Program	Majalah PR Indonesia
3	Maret 2019	Indonesia Content Marketing Awards 2019	The Best Use of a Brand Website in Content Marketing Implementation	Indonesia Content Marketing Forum
			The Best Content Marketing Implementation in Industry - First Winner in the Financial Category	Indonesia Content Marketing Forum
4	April 2019	11th Annual Global CSR Summit and Awards	Gold Award untuk Best Community Programme	-
5	Juni 2019	Infobank Banking Service Excellence Awards 2019	Peringkat IX Performa Terbaik Digital Banking	Majalah Infobank
			Peringkat III Performa Opening Account Mobile Application	Majalah Infobank
			Peringkat III Performa Digital Lounge	Majalah Infobank
6	Juni 2019	Bank Terbaik tahun 2019	Bank Terbaik Kelompok BUKU III (Modal Inti Rp5-30 Triliun)	Majalah Investor
7	Juli 2019	Indonesia Original Brands 2019	Top 20 Indonesia's Rising Star Brands	Majalah SWA
8	Agustus 2019	Infobank Awards 2019	Predikat "Sangat Bagus" dan Predikat "Sangat Bagus selama 15 Tahun Berturut-turut"	Majalah Infobank
9	September 2019	IDC Digital Transformation Awards 2019	Omni-Experience Innovator (Indonesia)	-
10	Desember 2019	Indonesia's PR Program of the Year 2019	Marketing and Public Relations Program	Marketing MIX
11	Desember 2019	The Asset Asian Awards 2019 - Country Awards 2019	Best Advisers by Country - Indonesia	-



1 IDC Digital Transformation Awards 2019

Omni-Experience Innovator (Indonesia)

2 11th Annual Global CSR Summit and Awards

Gold Award untuk Best Community Programme

3 Bank Terbaik tahun 2019

Bank Terbaik Kelompok BUKU III (Modal Inti Rp5-30 Triliun)

Majalah Investor

4 Infobank Awards 2019

Predikat “Sangat Bagus” dan Predikat “Sangat Bagus” selama 15 Tahun Berturut-turut

Majalah Infobank

SERTIFIKASI

No	Nama Sertifikasi	Waktu Pemberian	Masa Berlaku	Pihak Pemberi
1	Corporate Procurement Management ISO 9001:2015	28 Oktober 2019	28 Oktober 2022	SGS



Laporan Manajemen

“

Sejak penggabungan, Bank BTPN dinakhodai oleh tim manajemen yang baru.

”

24	Laporan Komisaris Utama
32	Laporan Direktur Utama
50	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi



Laporan Komisaris Utama

Mari Elka Pangestu

Komisaris Utama (Independen)



Penggabungan usaha menjadi awal dari suatu perubahan besar dalam perjalanan usaha Bank. Proses integrasi bukan hanya terkait perubahan di bidang usaha dan menuju universal bank, namun juga penyesuaian untuk menggabungkan dua kultur yang berbeda.



Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan berkenaan dengan tugas utama Dewan Komisaris sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Tugas dimaksud adalah terkait dengan pelaksanaan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi.

Berkenaan dengan tugas tersebut, pada tahun buku 2019, Dewan Komisaris memberikan perhatian penuh pada aksi korporasi Bank BTPN yang sangat penting, yaitu penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Penggabungan usaha ini, selanjutnya melahirkan nama baru, yaitu PT Bank BTPN Tbk.

Peristiwa tersebut merupakan tonggak penting bagi Bank BTPN, yaitu penggabungan dua bank dengan konsentrasi usaha yang berbeda, ritel, UKM dan korporasi. Selain itu, dengan penggabungan, BTPN menjadi anak perusahaan dari kelompok usaha global ternama di Asia, yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Penggabungan usaha menjadi awal dari suatu perubahan besar dalam perjalanan usaha Bank. Proses integrasi bukan hanya terkait perubahan di bidang usaha dan menuju universal bank, namun juga penyesuaian untuk menggabungkan dua kultur yang berbeda. Penggabungan ini juga memulai babak baru sinergi usaha dalam Grup SMBC di Indonesia.

Kondisi Makro

Di tengah peristiwa penting yang sedang dialami oleh Bank BTPN, yaitu penggabungan usaha dengan SMBCI, manajemen dihadapkan dengan kondisi politik nasional yang cukup berwarna, selain juga dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang cukup menantang.

Dari pandangan global, kinerja ekonomi nasional mengalami perlambatan karena mengalami berbagai macam tekanan, misalnya dengan lesunya perdagangan internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang 2019, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar USD3,2 miliar. Tekanan defisit tersebut, terutama disebabkan oleh sektor minyak dan gas bumi (migas) dengan defisit mencapai USD9,3 miliar.

Perlambatan pada kinerja perekonomian nasional juga sebagai akibat kurang bergairahnya kegiatan dunia usaha. Tingkat produksi mengalami perlambatan, sehingga kemampuan untuk melakukan ekspansi bisnis mengalami keterbatasan. Bagi bisnis perbankan, dunia usaha merupakan mitra yang sangat penting. Ketika dunia usaha sedang mengalami perlambatan, maka pinjaman juga akan mengalami tantangan besar.

Bank Indonesia merespons perkembangan dunia usaha di 2019 melalui kebijakan relaksasi suku bunga acuan. Dalam kurun waktu enam bulan sepanjang 2019, Bank Indonesia telah melakukan empat kali penurunan suku bunga, yaitu dari 6,00% pada bulan Juni menjadi 5,00% pada Desember 2019. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan gairah dunia usaha makin meningkat.

Menyikapi situasi ini, manajemen menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kinerja Direksi Selama Tahun Buku 2019

Fokus Bank di tahun 2019 adalah menyelesaikan penggabungan antara Bank BTPN dengan SMBCI, integrasi dan stabilisasi operasi di samping juga melanjutkan pengembangan usaha Bank pasca merger.

Dewan Komisaris menilai bahwa proses penggabungan usaha yang dijalankan Direksi secara umum telah berjalan dengan baik. Penggabungan usaha telah diselesaikan dengan baik dan secara tepat waktu di tanggal 1 Februari 2019.

Bank telah pula menyiapkan Rencana Bisnis bagi bank hasil penggabungan, yang menjadi acuan untuk Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi. Dewan Komisaris juga menilai kinerja Direksi dari kelancaran konsolidasi kedua entitas tersebut, sehingga memungkinkan Direksi dapat lebih fokus pada upaya peningkatan profitabilitas. Bank BTPN setelah penggabungan menjadi universal bank, yang melayani segmen ritel hingga

korporasi, dan dengan dukungan produk dan layanan yang lengkap atau *end to end*.

Sejak penggabungan, Bank BTPN memiliki bisnis inti yang terdiversifikasi, dari yang semula berfokus pada segmen pensiun, ritel, dan UKM sampai pembiayaan komersial hingga korporasi, dengan dukungan *platform-platform* digital. Bank BTPN kini memiliki kekuatan baru, yaitu sebagai bank yang merupakan anggota dari kelompok usaha dengan jaringan global dan dengan berbagai bentuk bidang usaha keuangan yang memberikan kapabilitas kepada Bank BTPN untuk menawarkan beragam inovasi produk dan jasa, melakukan *cross selling* termasuk *supply chain* dan memberikan dukungan terhadap segmen usaha syariah melalui anak perusahaan. Semua ini memberi kontribusi positif dan mendukung kinerja usaha Bank BTPN secara berkesinambungan

Hal ini tercermin dari pertumbuhan kinerja di 2019, dimana Bank BTPN secara fundamental memiliki rasio kecukupan modal yang menguat di posisi 24,24%, di atas ketentuan regulator.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi kinerja manajemen terhadap kualitas kredit. Tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) bruto menjadi 0,8% dari 1,2% tahun sebelumnya.

Bank berhasil mencatat laba bersih setelah pajak (*net profit after tax/ NPAT*) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,6 triliun untuk tahun 2019, dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,8 triliun, atau mengalami kenaikan 32%.

Penerapan Kebijakan dan Prosedur

Bank BTPN setelah penggabungan usaha telah menetapkan sebuah visi baru yaitu, menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan digital.

Dewan Komisaris percaya bahwa perubahan visi tersebut menjadi pijakan penting bagi Bank dalam menentukan arah perkembangannya ke depan.

Penerapan visi ini didukung dengan infrastruktur berupa kebijakan dan prosedur yang berlaku di setiap tingkat organisasi. Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah berhasil melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur yang berasal dari bank peserta penggabungan, dan mengeluarkan kebijakan dan prosedur yang dibuat dari kombinasi ketentuan yang berlaku pada kedua bank dan telah diperbaharui.

Penerapan kebijakan dan prosedur menjadi tantangan sendiri bagi Bank BTPN yang saat ini fokus kepada pertumbuhan usaha dengan sepenuhnya memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dari regulator maupun secara kebijakan internal.

Penerapan GCG

Dewan Komisaris memandang bahwa komitmen kuat atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan fundamental yang kokoh dalam menjaga kesinambungan usaha Bank, mengingat perbankan merupakan bisnis di sektor jasa

keuangan yang menjadikan kepercayaan para pemangku kepentingan sebagai fundamental dalam bisnis.

Dewan Komisaris sebagai bagian dari struktur GCG yang memegang peran penting dalam penerapan GCG, memandang bahwa Bank BTPN telah melakukan kemampuan yang terbaik dalam menerapkan pelaksanaan GCG. Hal ini termasuk pelaksanaan fungsi oleh Direksi, Dewan Komisaris, beserta komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan rapat-rapat dari organ-organ tersebut telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, panduan dan tata tertib kerja (*charter*). Kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dianggap telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dan Komite-komite telah memberikan rekomendasi yang relevan dan membangun kepada Dewan Komisaris di sepanjang tahun.

Penunjukan Bank BTPN sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan SMBC, menggantikan SMBCI merupakan langkah strategis bagi Bank BTPN dalam mensinergikan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk dalam hal audit, keuangan, risiko, kepatuhan dan tata kelola.

Selama 2019, telah dilakukan pendalaman terhadap materi kebijakan mengenai pemberian hadiah dan hiburan, *anti fraud* serta prosedur mengenai informasi orang dalam dan transaksi orang dalam. Selain itu dikenalkan kebijakan baru terkait alur komunikasi antara SMBC dengan Bank serta kedatangan tamu asing serta pemenuhan pelaporan karena SOX yang bertujuan untuk kontrol atas independensi dan transparansi serta akuntabilitas manajemen.

Menjadi bank yang merupakan anggota suatu kekuatan ekonomi global Asia, menyebabkan Bank wajib memenuhi standar kepatuhan yang lebih tinggi dan berlaku lintas negara. Standar kepatuhan hal ini akan memiliki pengaruh bagi perkembangan Bank BTPN menjadi bank yang bersih dan terpercaya.

Penerapan Whistleblowing System

Penerapan *whistle blowing system* (WBS) di lingkungan Bank merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dan bermanfaat sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya *fraud* dalam praktik bisnis Bank. Bank BTPN telah menjalankan kebijakan ini sejak lama dan akan melakukan segala usaha untuk senantiasa melakukan perbaikan.

Penerapan WBS ini sejalan dengan nasihat yang senantiasa disampaikan kepada manajemen agar selalu menerapkan prinsip kepatuhan dalam praktik bisnis. Kehadiran WBS menjadi saluran yang sangat mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

WBS bukan sekadar saluran pelaporan kasus, tetapi juga merupakan sarana untuk mengingatkan manajemen bahwa mereka harus menerapkan pengelolaan perusahaan, dengan prinsip-prinsip kepatuhan yang benar. WBS juga merupakan alat ukur bagaimana keberhasilan manajemen dalam mengoperasikan Bank dimana dengan rendahnya jumlah kasus yang dilaporkan dapat berarti bahwa Bank telah dikelola dengan baik.

Mekanisme WBS telah ditingkatkan baik dalam hal kegiatan pengawasan oleh Dewan Komisaris, penanganan keluhan serta perbaikan alur pelaporan yang melibatkan Komite Pemantau Risiko.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) termasuk bagian penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas.

Di lingkungan organisasi Bank BTPN, pelaksanaan CSR dilakukan, melalui satu unit bisnis khusus, yaitu Daya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen manajemen dalam mengimplementasikan CSR, sekaligus merupakan kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan antara bisnis dengan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.

Program yang dijalankan oleh Daya merupakan antara usaha Bank, misi sosial dan *corporate shared value*. Sejak penggabungan, program Daya yang awalnya memiliki tiga pilar, berubah menjadi empat pilar agar lebih relevan dengan posisi Bank yang telah berubah menjadi bank universal.

Empat pilar dimaksud berkaitan dengan: pengembangan kompetensi nasabah, pengelolaan keuangan, kehidupan yang berkesinambungan, serta kapasitas untuk tumbuh.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pilar-pilar tersebut merupakan pondasi penting yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sepanjang 2019, kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh manajemen, yang antara lain ditunjukkan melalui jutaan usaha kecil dan menengah yang dibantu melalui program Daya tersebut.



Program yang dijalankan oleh Daya merupakan integrasi antara misi bisnis dengan misi sosial Bank BTPN atau *corporate share value*.



Pola hubungan antara pengelola Daya dengan masyarakat dan nasabah juga sangat dekat, dan bahkan cenderung bersifat berkesinambungan. Bentuk kegiatannya, tidak hanya di bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, tetapi juga di bidang kesehatan.

Model pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial yang berkesinambungan ini, menurut kami sangat bagus untuk terus dikembangkan. Dewan Komisaris berharap agar daya jangkauannya ke depan akan semakin luas.

Perubahan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini adalah sesuai dengan Rancangan Penggabungan Usaha yang mulai berlaku efektif menjabat sejak tanggal 1 Februari 2019, dan diangkat kembali dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 15 Februari 2019. Melalui RUPS Luar Biasa pada bulan September 2019, telah disetujui pengangkatan Hanna Tantani sebagai Direktur Keuangan untuk memperkuat jajaran Direksi Bank BTPN, dan Irwan Mahjudin Habsjah sebagai Komisaris Independen, menggantikan Tony Prasetyantono, yang meninggal dunia pada bulan Januari 2019 sebelum penggabungan usaha berlaku efektif.

Tantangan atas Prospek Usaha 2020

Pada saat Laporan Tahunan ini dibuat, sedang terjadi penyebaran virus COVID19 di seluruh pelosok dunia. Dewan Komisaris berpandangan bahwa selain faktor perlambatan ekonomi secara global, faktor pandemi ini akan membawa pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan tahun 2020, yang sementara waktu telah terlihat dari penurunan Index Harga Saham Gabungan (IHSG) serta peningkatan nilai tukar mata uang dolar terhadap Rupiah.

Tantangan lain yang dihadapi Bank BTPN adalah datang dari pesaing dalam segmen usaha yang mulai mengalami perlambatan dan juga sebaliknya dari segmen yang tengah menjadi primadona saat ini, yaitu digital banking. Tantangan tak hanya datang dari bank namun juga dari perusahaan-perusahaan *financial technology (fintech)* yang dianggap lebih memiliki kemudahan dibandingkan dengan bank yang *highly regulated*.

Kami percaya bahwa peningkatan komitmen Bank terhadap pelaksanaan GCG serta kepatuhan untuk mencapai *zero penalties* adalah strategi-strategi utama untuk menjamin bahwa Bank BTPN tetap mendapatkan kepercayaan dalam bisnis perbankan.

Terkait dengan hal itu, Dewan Komisaris percaya bahwa pertimbangan dalam menyusun prospek usaha yang dibuat oleh Direksi sudah sesuai. Manajemen juga telah mempertimbangkan kondisi eksternal sebagai suatu faktor yang penting dalam menyusun rencana usaha Bank ke depan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga melihat bahwa manajemen telah menyeimbangkan antara prospek bertumbuh dengan potensi risiko yang dihadapi. Karenanya Dewan Komisaris tetap mengingatkan kepada Direksi untuk konsisten dalam menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam upaya mencapai target.

Apresiasi

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan usaha Bank BTPN hingga pada 2019. Begitu pun dengan arahan dan bimbingan yang telah disampaikan oleh pemegang saham.

Kepada seluruh anggota Direksi, pihak independen komite beserta seluruh karyawan Bank BTPN, Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya yang telah dilakukan dan prestasi yang diperoleh di 2019. Terutama, atas pencapaian kinerja usaha yang baik di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi.

Kepada para pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris turut mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang diberikan selama ini. Dengan dukungan para pemangku kepentingan pula, manajemen mampu menyajikan kinerja usaha yang baik untuk Tahun Buku 2019.



Mari Elka Pangestu
Komisaris Utama (Independen)

Dewan Komisaris



«
1

»
2



1. **Mari Elka Pangestu** | Komisaris Utama (Independen)
2. **Chow Ying Hoong** | Wakil Komisaris Utama



3. **Irwan Mahjudin Habsjah** | Komisaris Independen
4. **Takeshi Kimoto** | Komisaris
5. **Ninik Herlani Masli Ridhwan** | Komisaris Independen



Laporan Direktur Utama

Ongki Wanadjati Dana

Direktur Utama

“

Jika sebelum ini Bank lebih fokus pada segmen ritel atau *mass market* dan Usaha Kecil Menengah (UKM), saat ini dan selanjutnya Bank masuk ke segmen korporasi, yang merupakan bisnis inti SMBCI.

”

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat

Salam sejahtera untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019. Laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab atas pengelolaan usaha oleh manajemen dalam kurun waktu satu tahun.

Laporan tahunan yang kami sampaikan sejalan dengan arahan dan ketentuan yang diberikan regulator, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Di antaranya adalah POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, ketentuan-ketentuan wajib lainnya, serta standar praktik terbaik di lingkungan industri.

Seluruh isi laporan ini telah sejalan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen serta yang disampaikan kepada regulator, baik laporan berkala seperti laporan keuangan maupun waktu tertentu, yang berkenaan dengan aksi korporasi dan pemenuhan kewajiban lain.

Babak Baru Bank BTPN

Tahun 2019 merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang berubah nama menjadi PT Bank BTPN Tbk (“Bank BTPN” atau “Bank”) sejak tanggal 1 Februari 2019, yang menjadi identitas resmi sejak Bank bergabung dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI).

Seluruh proses penggabungan usaha yang terjadi, baik dari sisi legal maupun sisi operasional telah berjalan dengan baik. Tidak ada dinamika yang secara substansial berpengaruh terhadap kegiatan operasional Bank.

Bagi kami, penyelesaian penggabungan usaha ini dinilai penting, karena menjadi penanda atas lahirnya babak baru perjalanan bisnis Bank BTPN. Jika sebelum ini Bank lebih fokus pada segmen ritel atau *mass market* dan Usaha Kecil Menengah (UKM), saat ini dan selanjutnya Bank masuk ke segmen korporasi, yang merupakan bisnis inti SMBCI. Unit usaha korporasi melayani perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, perusahaan multinasional dan perusahaan lokal besar lainnya. Bisnis korporasi juga telah secara aktif terlibat dalam pembiayaan terstruktur (*Structured Financing*) dan pemberian pinjaman sindikasi (*Syndicated Lending*) di pasar Indonesia. Dengan demikian, Bank BTPN menjadi bank universal dengan layanan yang lebih lengkap.

Setelah penggabungan usaha, Bank telah memiliki visi baru:

“Menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital.”

Begitu pun dengan misi, yang mengalami penyesuaian, yang mencerminkan arah pengembangan program dan kebijakan Bank ke depan:

- Menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen ritel, mikro, UKM dan bisnis korporasi di Indonesia, serta bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;
- Memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan Bank BTPN;
- Menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi *stakeholder* termasuk masyarakat Indonesia;
- Memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada nasabah dan mitra Bank BTPN.

Perubahan pada visi dan misi tersebut, antara lain untuk menyesuaikan dengan kondisi Bank yang telah menjelma menjadi entitas bisnis besar. Dari sisi aset, setelah penggabungan usaha, Bank mengalami pertumbuhan tinggi, dari Rp101,3 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp181,6 triliun atau meningkat 79% di akhir tahun 2019. Dengan demikian, kini Bank BTPN menjadi satu dari 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset.

Dengan dukungan global dari induk usaha, yaitu Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC) dan kemampuan perbankan digital, Bank BTPN memiliki kemampuan dan peluang lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan. Begitu juga dengan segmentasi yang dijangkau semakin luas, sehingga kemampuan memberikan layanan terbaik bagi nasabah meningkat.

Kondisi Makro

Di tengah proses konsolidasi dan integrasi yang dijalankan Bank selama tahun 2019, kondisi perekonomian global berjalan kurang mulus. Kinerja ekonomi masih terjadi perlambatan, yang antara lain disebabkan oleh ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang masih berlangsung. Situasi tersebut membuat kinerja perekonomian global cenderung melemah dan harga komoditas tertekan.

Akibat ketidakpastian pada pergerakan ekonomi global, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (Internasional Monetary Fund/IMF) sempat merevisi target pertumbuhan yang dicanangkan di awal tahun, sehingga menjadi lebih rendah dari target. Perubahan tersebut, terutama disebabkan oleh perang dagang dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang cenderung belum reda. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2019 melambat menjadi tumbuh 2,9% yoy dari tahun sebelumnya tumbuh 3,6% yoy

Kondisi perekonomian dunia yang masih belum stabil dan cenderung melambat, memberikan tekanan kepada perekonomian nasional. Hal itu, terutama berimplikasi kepada pelemahan perdagangan internasional dan penurunan harga komoditas, sehingga mempengaruhi kegiatan bisnis dunia usaha.

Merespons kondisi tersebut, sepanjang tahun 2019, Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 75 bps menjadi 1,50%-1,75% dari sebelumnya 2,25%-2,50%. Bank Indonesia juga melakukan respons yang sama dengan meluncurkan sejumlah kebijakan relaksasi. Suku bunga acuan sepanjang tahun 2019 telah empat kali turun dalam kurun waktu enam bulan, dari 6,00% pada Juni menjadi 5,00% pada Desember.

Bank Indonesia juga menurunkan Giro Wajib Minimum perbankan sebesar 50 basis poin. Melalui kebijakan tersebut, likuiditas perbankan diharapkan bertambah, sehingga ikut mendorong pergerakan ekonomi melalui penyaluran kredit.

Otoritas di bidang perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyadari bahwa kondisi perekonomian yang terjadi pada 2019 ikut menekan industri perbankan. Karena itu, target pertumbuhan kredit pun diturunkan menjadi 9-11% dari sebelumnya diharapkan dapat tumbuh sebesar 10-12%. Namun target tersebut tetap lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 11,8%.

Kendati demikian, kinerja dan stabilitas perbankan pada tahun 2019, secara umum masih terjaga. Data OJK menyebutkan, rasio kecukupan modal perbankan konvensional pada Desember mencapai 23,4% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 23,0%.

Sementara itu, laba sebelum pajak per Desember 2019 tercatat Rp200,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan Desember 2018 yang Rp190,7 triliun. Padahal, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank pada periode tersebut mengalami kenaikan, yaitu menjadi 79,4% pada 2019, dari 77,9% tahun sebelumnya.

Informasi Kinerja Usaha 2019

Tantangan dan Kendala

Sejak penggabungan, Bank BTPN dinahkodai oleh tim manajemen yang baru. Tugas penting tim manajemen yang baru ini adalah membangun budaya baru sehingga semua karyawan dapat termotivasi untuk bersama-sama membangun Bank BTPN yang lebih besar skala usahanya dengan segmen bisnis yang lebih beragam.

Secara eksternal, Bank menghadapi tantangan kondisi makro ekonomi yang mengalami tekanan yang menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi global dan domestik mengalami perlambatan seperti telah dipaparkan di atas. Selain itu tahun 2019 merupakan tahun politik dengan adanya Pemilu termasuk pemilihan Presiden.

Pada awal 2019, suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masih bertahan pada posisi 6%, setelah mengalami kenaikan dari 4,25% di Triwulan I 2018. Posisi suku bunga yang relatif tinggi itu bertahan hingga Juni.

Kenaikan suku bunga tersebut berpengaruh terhadap biaya dana Bank (*cost of fund*), yaitu menjadi lebih mahal. Suku bunga deposito ikut terangkat. Pada akhirnya, perubahan tersebut mempengaruhi suku bunga kredit atau kalau dipertahankan, sehingga marjin bersih perbankan berpotensi menurun. Selain itu, untuk mendukung *merger*, Bank memelihara jumlah dana lebih untuk memastikan likuiditas bank terjaga dengan baik, sehingga berdampak pada lebih tingginya biaya dana Bank.

Dari sisi pertumbuhan asset, tantangan utama yang dihadapi oleh Bank BTPN antara lain penurunan pinjaman bisnis pensiun yang signifikan karena faktor eksternal. Sementara dalam segmen ritel, lini bisnis tersebut memiliki peran yang cukup penting, sehingga upaya mempertahankannya menjadi sangat penting.

Kondisi makro tersebut diatas juga dapat menimbulkan dampak negatif pada tingkat pertumbuhan dan kualitas pinjaman pada segmen UMKM dan nasabah individual

Kebijakan dan Strategi Mengatasi Kendala

Memastikan bahwa proses integrasi dan sinergi kedua bank berjalan dengan lancar menjadi fokus pertama yang dilakukan oleh manajemen sepanjang tahun 2019. Kedua, mengembangkan bisnis-bisnis inti yang telah dimiliki oleh kedua bank sebelumnya.

Dalam rangka menciptakan Bank Hasil Penggabungan yang *sustainable*, Bank BTPN menerapkan strategi prioritas ke depan paska *merger*, yang dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu: Stabilisasi (*Stabilize*), Bersinergi (*Synergize*), dan Berkembang (*Scale up*).

Tahapan Stabilisasi dilakukan pada tahun 2019 yang bertujuan untuk memperkuat kapabilitas dan bisnis inti yang ada dengan fokus utama, yaitu: Memastikan keberhasilan integrasi proses-proses kunci yang telah diidentifikasi saat pengkajian merger, mengimplementasikan inisiatif-inisiatif “stabilisasi” dan merencanakan inisiatif-inisiatif “sinergi” untuk tahapan berikutnya, serta melibatkan secara aktif semua *stakeholder* kunci, yang terdiri dari: nasabah, karyawan, mitra bisnis, regulator dan pemegang saham.

Tahapan Bersinergi merupakan tahap lanjutan dengan tujuan menciptakan sinergi-sinergi di semua bagian dengan fokus utama, yaitu mengimplementasi dan mengembangkan inisiatif-inisiatif sinergi bisnis yang ada, melanjutkan stabilisasi dari proses-proses baru paska integrasi, serta mempersiapkan peluncuran bisnis-bisnis baru.

Tahapan *Scale up* merupakan tahap lanjutan berikutnya yang bertujuan untuk membangun bisnis-bisnis baru, dengan fokus utama yaitu meningkatkan sinergi-sinergi yang telah dikembangkan dan meluncurkan bisnis-bisnis baru, mengidentifikasi *S-curve* pertumbuhan/*value creation* selanjutnya agar Bank dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Untuk itu, fokus Bank di tahun 2019 yang merupakan tahun pertama setelah penggabungan adalah proses konsolidasi dan stabilisasi di samping juga mengembangkan usahanya. Stabilisasi adalah fondasi untuk membangun kinerja berkesinambungan bagi Bank BTPN ke depan karena keberhasilan pada tahapan ini akan memudahkan Bank untuk mengimplementasikan tahapan selanjutnya yaitu *Synergize* dan *Scale Up*.

Beberapa proses penyalarsan (*alignment*) telah dilakukan dengan baik sepanjang tahun 2019, yaitu:

- Penyalarsan strategis (*strategic alignment*) dari kedua bank peserta merger dengan melakukan formulasi visi dan misi perusahaan, pendefinisian segmen-segmen yang jelas dan membangun strategi untuk melayani segmen-segmen tersebut. Tujuan dari formulasi visi, misi, dan strategi secara bersama ini adalah agar ada proses *buy-in* dari seluruh karyawan kunci yang akan mengimplementasikan kesepakatan bersama tersebut.
- Penyalarsan organisasi (*organization alignment*) pada area-area proses (*process*), sumber daya manusia dan teknologi informasi.
- Penyalarsan terhadap kepemimpinan dan budaya (*leadership and culture alignment*) yang akan berdampak pada proses kerja dan interaksi (*engagement*) antar insan BTPN.

Segmen usaha Bank terbagi menjadi dua, yaitu *Growing Business* dan *Mature Business*. *Growing Business* merupakan bisnis penyaluran kredit yang masih akan berkembang secara berkesinambungan, terdiri dari bisnis korporasi, kredit usaha kecil dan menengah, pembiayaan konsumen, serta pembiayaan Syariah. Sedangkan *Mature Business* merupakan bisnis penyaluran kredit yang sudah stagnan dengan lebih rendahnya penyaluran kredit Pensiun yang baru dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bisnis mikro (Mitra Usaha Rakyat) yang memang ditransformasikan oleh Bank menjadi bisnis Mitra Usaha Rakyat (MUR) yang baru sehingga portfolio yang lama mengalami *run down*. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang moderat, maka Bank secara *prudent* fokus untuk menjaga pertumbuhan bisnis dengan tingkat pertumbuhan yang relatif moderat dengan pertumbuhan utama berada pada *Growing Business*. Dalam melaksanakan pertumbuhan bisnis, Bank juga tetap menjaga kualitas portofolio kredit.

Paska merger, Bank memiliki kapabilitas untuk memberikan jasa *Trade, Cash Management* dan FX kepada nasabah korporasi.

Dan dalam rangka mendapatkan dana murah dan sekaligus mendorong pengembangan nasabah digital sehingga semakin banyak nasabah yang bertransaksi melalui layanan digital yang disediakan, Bank terus meningkatkan kemampuan *platform digital banking* yang sudah ada yaitu BTPN Wow! dan Jenius. Selain itu, Bank terus memperkuat transaksi

bisnis bank khususnya dengan menjajaki peluang *Supply Chain Financing* untuk *principal* dan *supplier/distributor* yang disesuaikan dengan *credit appetite* Bank, meningkatkan peluang *cross-selling*, meningkatkan pemberdayaan hubungan antar lembaga keuangan (*Financial Institution*) serta terus melakukan pengembangan produk.

Bank juga menyelaraskan infrastruktur untuk mendukung perkembangan bisnis baik dari sisi manajemen risiko, operasi, teknologi informasi, platform dan program Daya, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kinerja Bisnis

Mengingat penggabungan usaha telah terjadi sejak 1 Februari 2019, maka kinerja bisnis yang disampaikan untuk tahun buku tersebut merupakan kinerja hasil konsolidasi sejak tanggal penggabungan. Dengan demikian, laporan yang disampaikan menjadi lebih luas dari sebelumnya, terutama berkenaan dengan mulai masuknya Bank ke segmen korporasi.

A. Bidang Operasional

Pada bidang operasional, penggabungan usaha yang terjadi ikut memberikan dampak pada perluasan kemampuan Bank BTPN dalam memberikan layanan kepada nasabah. Melalui jaringan global, Bank mampu melayani kebutuhan *advisory* bagi nasabah yang ingin melakukan ekspansi usaha ke luar negeri dan mampu memberikan layanan lebih bagi para nasabah melalui jaringan yang dimiliki Bank. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ekspansi ke luar negeri.

Dalam layanan *advisory* tersebut, Bank mampu menawarkan solusi *business matching* berupa informasi peluang usaha termasuk mencarikan mitra di luar negeri. Satu kekuatan di bidang operasional lainnya adalah berkenaan dengan pengembangan *digital banking* untuk segmen *retail banking* awalnya untuk yang *digital savvy*. Bank telah berhasil mengembangkan *branchless banking*, sehingga layanan atau transaksi perbankan dapat dilakukan melalui *smartphone*. Dengan demikian, kinerja operasional dapat menjadi lebih efisien. Jadi pada intinya, Bank BTPN telah berhasil mengubah cara nasabah berhubungan dengan bank, dari layanan melalui jaringan fisik ke digital.

Pengembangan dalam dunia digital dan *internet of things (IOT)* yang dilakukan oleh Bank BTPN ikut mengubah cara kerja dalam lingkungan organisasi. Manajemen telah berhasil melakukan penyesuaian seiring dengan inovasi yang dikembangkan secara berkesinambungan.

B. Bidang Keuangan

Perkembangan yang terjadi sebagai dampak dari penggabungan usaha juga terlihat pada bidang keuangan. Ruang gerak Bank BTPN di bidang keuangan menjadi lebih luas, terutama karena tidak terbatas pada ritel, tetapi juga korporasi.

Selain itu, manajemen juga lebih fleksibel dalam melakukan diversifikasi sumber dana. Jika sebelumnya lebih banyak berasal dari deposito, sekarang dapat mengandalkan sumber lain, mengingat posisi Bank yang saat ini lebih besar dan kuat sebagai anak usaha SMBC. Saat ini Bank memiliki plafon pinjaman jangka panjang dari SMBC sebesar USD2,8 miliar. Selain itu, Bank juga berpotensi mendapatkan tingkat bunga lebih rendah akibat kemampuan yang lebih baik, sehingga biaya perolehan dana menjadi lebih murah.

Kinerja Bank tahun 2019 mencerminkan dinamika usaha Bank pasca merger baik di unit-unit usaha yang berasal dari Bank BTPN sebelum merger maupun pertumbuhan di bisnis korporasi yang berasal dari Bank SMBCI sebelum merger.

Jumlah kredit yang diberikan tumbuh sebesar 108% YoY (kredit korporasi tumbuh sebesar 16% dibandingkan kredit korporasi SMBCI 2018 sebelum merger, UKM 8%, TUR sebesar 24%), sedangkan jumlah kredit unit bisnis Purna Bakti Bank yang sudah mature mengalami penurunan sebesar 7%, demikian juga dengan pembiayaan mikro karena sejak beberapa tahun lalu Bank melakukan *shifting* ke segmen UKM. Dengan dinamika ini, terdapat pergeseran *yield* Bank dari segmen usaha dengan tingkat

yield yang lebih tinggi di segmen usaha retail lending ke korporasi.

Dinamika lain yang mempengaruhi kinerja keuangan Bank di tahun 2019 adalah meningkatnya suku bunga acuan sejak paruh kedua tahun 2018, meningkatnya jumlah pendanaan yang dibentuk oleh Bank untuk memastikan kecukupan dana untuk mendukung merger serta upaya-upaya yang dilakukan pasca merger.

Bank senantiasa menjaga rasio likuiditas dan pendanaan dengan baik dan melakukan optimalisasi jumlah dana pihak ketiga. Seiring dengan penurunan suku bunga, Bank melakukan penyesuaian suku bunga dan memangkas sejumlah deposito berjangka yang berbiaya tinggi (*high cost Time Deposit*). Suku bunga biaya dana deposito berjangka Rupiah turun dari 7,9% di Februari 2019 menjadi 6,5% di Desember 2019. Selain itu, Bank melakukan berbagai upaya dan inisiatif untuk meningkatkan jumlah *current account saving account* (CASA) yang menghasilkan pertumbuhan CASA sebesar 173%. Rasio likuiditas atau *liquidity coverage ratio* (LCR) dan rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) berada di tingkat yang sehat di 229,14% dan 113,04%.

Penurunan suku bunga acuan di kuartal ketiga turut membantu penurunan biaya dana pihak ketiga Bank, namun di sisi lain, *yield* dari kredit yang diberikan juga mengalami penurunan suku bunga,

Total simpanan nasabah yang dibukukan oleh Bank hingga berakhirnya tahun buku 2019 sebesar Rp86,9 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang Rp70,8 triliun, mengalami kenaikan 23%. Sebagian besar simpanan nasabah tersebut dalam bentuk deposito berjangka, dengan porsi 72% dari total simpanan nasabah di Bank. Rasio CASA telah mengalami peningkatan, yaitu dari 13% di tahun 2018 menjadi sebesar 28% di tahun 2019.

Pasca merger Bank memiliki fasilitas pendanaan jangka panjang dari SMBC, IFC serta pendanaan bilateral dari beberapa institusi lainnya.

Dalam rangka diversifikasi pendanaan dan manajemen risiko suku bunga (*interest rate in the banking book*), Bank menerbitkan surat berharga. Di samping Medium Term Notes (MTN), Negotiable Certificate of Deposits (NCD), NCD, dan obligasi yang telah dimiliki Bank, di kuartal 4 tahun 2019 Bank meluncurkan obligasi sebesar Rp1 triliun. Bank sebelumnya secara berkelanjutan menerbitkan obligasi, dan penerbitan obligasi di kuartal 4 tersebut merupakan Penerbitan Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap I tahun 2019.

Berbagai dinamika di atas membentuk Net Interest Margin (NIM) Bank di tahun 2019. Bergabungnya unit bisnis korporasi (di mana kredit yang diberikan dari

unit bisnis ini terdiri dari mata uang Rupiah dan valuta asing) dan yang secara wajar mempunyai *yield* yang lebih rendah dari unit-unit bisnis bank BTPN sebelum merger (yaitu ritel dan UKM), dinamika pertumbuhan di masing-masing unit bisnis, perubahan suku bunga acuan serta perubahan struktur dan biaya pendanaan menjelaskan pergerakan NIM Bank dari tahun lalu sebesar 11,27% menjadi 6,92% di tahun 2019.

C. Profitabilitas

Dari sisi profitabilitas, Bank berhasil membukukan laba bersih yang baik. Hingga akhir 2019, Bank BTPN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp3,0 triliun, lebih tinggi 41% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp2,1 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh upaya manajemen *margin* yang baik, perolehan *fee* dan keuntungan revaluasi dari transaksi valuta asing terutama dari unit bisnis korporasi. Biaya operasi dapat dijaga dengan baik dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang stabil.

Secara keseluruhan, Bank berhasil membukukan kinerja yang sesuai dengan target Bank, di antaranya tercermin dari pencapaian rasio *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang masing-masing sebesar 2,3%, 9,9% dan 24,2% yang melebihi target.

D. Permodalan

Penggabungan usaha yang telah resmi dilakukan memberikan dampak positif bagi Bank BTPN dari sisi permodalan, sehingga lebih besar dan kuat. CAR pada akhir tahun buku mencapai 24,2%.

Posisi tersebut jauh di atas ketentuan minimal yang telah ditetapkan oleh regulator.

Dengan demikian Bank dapat beroperasi dengan solid dan mempunyai kemampuan lebih besar untuk dapat mendukung kebutuhan pinjaman nasabah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Prospek Usaha 2020

Pada tahun 2020, kondisi perekonomian, baik di tingkat global maupun nasional masih akan bergerak dinamis. Situasi tersebut, antara lain berpotensi akan mempengaruhi kinerja perdagangan internasional, yang pada akhirnya menjadi tantangan bagi industri keuangan.

Selain itu, karena kejadian luar biasa terkait *Coronavirus Desease* 2019 (“COVID-19”), di bulan Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menyatakan pandemi, dan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian atas COVID-19 telah berlangsung di Indonesia. Situasi ini telah mengganggu aktivitas usaha dan ekonomi global, termasuk Indonesia.

Perseroan terus memantau situasi terkait COVID-19 tersebut, menilai dan merespons secara aktif atas dampaknya ke posisi keuangan dan hasil operasi. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, penilaian tersebut masih berlangsung. Perseroan akan mempertimbangkan dampak dan tingkat probabilitas skenario ekonomi yang memburuk akibat situasi terkait COVID-19 tersebut terhadap kinerja Bank di tahun 2020.

Kendati demikian, Bank BTPN terus berupaya untuk mencapai visinya untuk menjadi bank pilihan utama di Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, dengan dukungan teknologi digital. Bank BTPN diyakini dapat menjadi sebuah bank yang lebih besar dan lebih kuat, sehingga mampu meningkatkan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Visi tersebut dapat ditempuh dengan melalui beberapa strategi dimulai dari tahapan stabilisasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan memitigasi risiko dengan dukungan regulasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 dan akan dilanjutkan pada tahun 2020. Selanjutnya melalui tahapan Sinergi bertujuan untuk menggabungkan aset-aset yang ada saat ini untuk mendukung *cross-sell* yang lebih kuat, melayani segmen baru dan mengurangi biaya dan tahapan *Scale up* yang bertujuan untuk membuat mesin baru untuk pertumbuhan dan profitabilitas entitas gabungan.

Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sejak terjadi penggabungan usaha, Bank BTPN menjadi bagian dari jaringan Bank Global Systemic International Bank – G-SIB. Karena itu, dalam menjalankan bisnis, Bank juga harus mengacu pada aturan di berlakukannya pada perusahaan induk, yaitu SMBC, terutama di bidang tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Dengan demikian, regulasi yang diikuti bukan hanya yang berlaku di Indonesia, melainkan juga mengadopsi standar yang berlaku di dunia internasional. Seperti pada Fungsi Kepatuhan misalnya, Bank ikut memenuhi standar yang diberlakukan oleh otoritas di Jepang, yaitu Japan Financial Agency. Begitu juga dengan Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) untuk kebijakan anti korupsi yang berlaku di Amerika Serikat maupun UK Bribery Act (UKBA) untuk yang berlaku di Inggris.

Peraturan-peraturan tersebut, yang berlaku di Indonesia maupun di dunia internasional, menjadi dasar dan acuan bagi Bank BTPN dalam melakukan aktivitas bisnis. Sehingga, Bank tidak hanya dilihat lebih besar dan kuat dari sisi permodalan, tetapi juga lebih ketat dalam tata kelola dan manajemen risiko.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di Bank BTPN pada tahun 2019 merupakan kolaborasi antara pengelolaan risiko di bidang korporasi dengan di bidang ritel. Mengingat model bisnis dan segmentasi kedua lini bisnis tersebut berbeda, maka pengelolaannya pun menjadi berbeda, begitu pun dengan *risk appetite*.

Perbedaan tersebut menghajatkan agar Bank memerlukan kebijakan manajemen risiko yang mencakup semua secara terintegrasi. Baik dalam bentuk kelengkapan prosedur maupun kebijakannya. Semua itu telah berhasil dilalui oleh manajemen, yaitu integrasi dua kultur yang berbeda tersebut dengan baik tanpa ada gangguan berarti.

Bersamaan dengan upaya manajemen melakukan integrasi, terutama terkait dengan kultur manajemen risiko pada dua model bisnis yang berbeda, Bank juga memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan dari regulator. Di antaranya, terkait kebijakan penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book* atau Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 dan mulai direalisasikan untuk tahun buku 2019.

Selain itu, Bank juga terus melakukan penyempurnaan sistem berkaitan dengan kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih atau Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang sudah diberlakukan sejak 2017. Regulasi lainnya adalah persiapan menghadapi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 71 yang mulai berlaku pada Januari 2020.

Melalui kerja sama yang baik dari unit-unit yang ada di Bank BTPN, semua persiapan tersebut berhasil diselesaikan dengan baik.

Mulai 2019, Bank BTPN juga telah memiliki *risk appetite* untuk bank hasil penggabungan. Dengan demikian, besaran risiko kredit, pasar, maupun operasional yang menjadi batas toleransi Bank telah berhasil diselesaikan.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2019, terjadi perubahan susunan anggota Direksi. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada 11 September 2019 menyetujui pengangkatan Hanna Tantani sebagai Direktur Keuangan.

Dengan demikian, komposisi Direksi hingga 31 Desember 2019 adalah:

Direktur Utama	: Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	: Kazuhisa Miyagawa
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Dini Herdini
Direktur	: Yasuhiro Daikoku
Direktur	: Henocho Munandar
Direktur	: Adrianus Dani Prabawa
Direktur	: Hiromichi Kubo
Direktur	: Merisa Darwis
Direktur	: Hanna Tantani

Pengembangan Teknologi Informasi

Perbankan digital (digital banking) di lingkungan Bank BTPN merupakan keunggulan utama yang terus dikembangkan secara berkesinambungan. Bank telah memiliki *master plan* tiga tahun dalam setiap rencana strategis yang ditetapkan.

Semua kegiatan yang dijalankan di bidang pengembangan teknologi informasi (TI), selain dilaporkan kepada Direksi juga dilaporkan dan dikaji oleh Komite Pengarah (*Steering Committee*). Kegiatan tersebut dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan. Hal ini merupakan bagian dari tata kelola di bidang TI yang berlaku dan sudah berjalan di Bank.

Sedangkan terkait dengan proyek pengembangan sistem di lingkungan internal, Bank telah memiliki forum dengan nama *Enterprise Management of IT* (EMIT), yang diisi oleh manajemen di bidang TI. Forum inilah yang memberikan persetujuan atas strategi dan pendekatan dalam pengembangan proyek di bidang TI.

Pengembangan penting yang telah berjalan di Bank BTPN, antara lain adalah *Robotic Process Automation (RPA)*, yang memungkinkan seluruh proses bisnis yang sifatnya berulang, ditangani oleh sistem. Misalnya adalah layanan *pension loan termination* yang sudah menggunakan sistem tersebut. RPA akan terus dikembangkan untuk proses bisnis yang lain.

Selain itu, Bank BTPN juga terus mengembangkan infrastruktur di bidang TI, baik dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Pada saat bersamaan, pengembangan sumber daya manusia juga terus dilakukan untuk mengimbangi kebutuhan Bank.

Untuk pengembangan ke depan, Bank masih akan fokus pada upaya mendigitalkan seluruh layanan kepada nasabah. Kemudian, digitalisasi proses bisnis di bidang operasional. Selanjutnya, melanjutkan proses integrasi sebagai konsekuensi dari penggabungan usaha yang telah terjadi.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Bank BTPN memandang bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting bagi Bank dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Karena itu, pengelolaan serta pengembangan SDM yang tepat seiring dengan perkembangan kegiatan bisnis Bank menjadi sangat penting.

Bergabungnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) pada 1 Februari 2019 menghadirkan tantangan dan kesempatan yang baru dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Unit Sumber Daya Manusia berperan penting dalam memastikan tercapainya proses integrasi yang harmonis baik integrasi dalam struktur dan proses, maupun integrasi budaya dari bank-bank yang digabung guna mencapai kinerja yang optimal.

Di tahun 2019 aktivitas pengelolaan SDM difokuskan pada stabilisasi paska-penggabungan kedua bank menjadi Bank BTPN baru. Program-program yang dilakukan meliputi:

1. Program Informasi dan Komunikasi, yang bertujuan menyampaikan informasi secara jelas, transparan dan terstruktur kepada seluruh karyawan BTPN.
2. Program *Onboarding* karyawan ke Bank BTPN baru hasil merger. Program *onboarding* tersebut diberi nama "*Life at BTPN*" dan dilakukan pada 20-21 Februari 2019. Dari program tersebut diharapkan terciptanya pemahaman karyawan atas sejarah, pencapaian, dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank baru hasil penggabungan.
3. Program penguatan *post-merger*. Program-program ini dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Program komunikasi.
 - b. Program-program internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai, serta peningkatan kompetensi
 - c. Program peningkatan motivasi dan *engagement* (keterikatan) karyawan
4. Integrasi sistem dan proses-proses pengelolaan SDM, untuk memastikan karyawan yang berasal dari dua bank mendapat pelayanan dan perlakuan yang setara.

Pada kuartal terakhir tahun 2019 dimulai inisiatif baru yaitu pengkajian dan redefinisi *Employee Value Proposition* (EVP) Bank BTPN. Kajian dan redefinisi EVP ini dilakukan agar BTPN dapat merumuskan langkah-langkah yang sesuai untuk menarik talenta dari luar, serta *me-retain* dan *engage* talenta yang ada di dalam. Diharapkan EVP yang baru dapat lebih mencerminkan kekuatan, cara kerja, dan budaya yang dimiliki oleh BTPN saat ini.

Melalui pilar-pilar EVP Bank BTPN kemudian dibuat perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperkuat identitas Bank BTPN baik di dalam maupun diluar bank. Aktivitas-aktivitas ini akan mulai dilakukan pada tahun 2020, bertepatan dengan ulang tahun pertama bergabungnya BTPN dan SMBCI menjadi Bank BTPN baru. Melalui aktivitas ini diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang dapat mendukung pencapaian strategi Bank BTPN.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama direalisasikan melalui program Daya. Pada prinsipnya, program ini mengintegrasikan antara misi bisnis dengan misi sosial Bank BTPN atau *corporate shared value*.



Unit Sumber Daya Manusia berperan penting dalam memastikan tercapainya proses integrasi yang harmonis baik integrasi dalam struktur dan proses, maupun integrasi budaya dari bank-bank yang digabung guna mencapai kinerja yang optimal.



Sejak terjadi penggabungan usaha, program Daya yang awalnya memiliki tiga pilar, berubah menjadi empat pilar agar lebih relevan dengan bisnis Bank yang telah berubah menjadi bank universal. Pertama adalah *Competence Development*, yaitu pengembangan kompetensi bagi para nasabah.

Kedua, *Personal Finance Help*, yaitu upaya untuk mengembangkan kemampuan keuangan nasabah. Ketiga, *Sustainable Living*, yang berkenaan kesinambungan terkait dengan kehidupan nasabah serta proses bisnis Bank. Sedangkan keempat, *Capacity to Growth*, yaitu memberdayakan nasabah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha, memberikan peluang usaha baru serta akses pasar.

Dari sisi segmentasi, jika selama ini Daya lebih banyak ke nasabah secara personal yang dikelola, antara lain berdasarkan wilayah, maka saat ini telah berkembang. Di antaranya melalui kerja sama dengan korporasi untuk memberdayakan para karyawan melalui peningkatan keterampilan.

Sepanjang tahun 2019, Bank menyediakan anggaran yang untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan di bidang pengembangan kapasitas diri, literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha dan kehidupan yang berkelanjutan.

Apresiasi bagi Pemangku Kepentingan

Perjalanan penggabungan usaha yang antara lain berimplikasi pada integrasi dua kultur dari dua entitas bisnis yang memiliki fokus bisnis berbeda telah berhasil dijalankan dengan baik. Semua proses, baik dari aspek regulasi maupun operasional jalan berkesinambungan antara upaya integrasi dengan proses bisnis yang terus berjalan dalam rangka meningkatkan kinerja usaha.

Kami menyadari, semua itu dapat terjadi berkat dukungan dari para pemangku kepentingan, baik arahan dari regulator maupun bimbingan pemegang saham, serta kepercayaan penuh dari pemegang saham. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih tak terhingga atas segala yang sudah dilakukan.

Begitu juga kepada para karyawan yang kami yakini telah mencurahkan seluruh sumber daya, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Termasuk juga kepada para pemangku kepentingan lain, seperti mitra usaha yang telah bekerja sama dengan baik selama ini, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya.

Kami berharap tahun depan dan yang akan datang akan lebih baik lagi. Bagi kami, tahun 2019 adalah merupakan babak baru dalam perjalanan bisnis Bank BTPN untuk berkembang lebih besar dan kuat di masa mendatang.

Atas nama Direksi,



Ongki Wanadjati Dana
Direktur Utama

Direksi



1. **Ongki W. Dana** | Direktur Utama
2. **Kazuhisa Miyagawa** | Wakil Direktur Utama
3. **Dini Herdini** | Direktur Kepatuhan (Independen)
4. **Yasuhiro Daikoku** | Direktur

»
5



»
7

»
8

- 5. **Henoch Munandar** | Direktur
- 6. **Adrianus Dani Prabawa** | Direktur
- 7. **Hiromichi Kubo** | Direktur
- 8. **Merisa Darwis** | Direktur
- 9. **Hanna Tantani** | Direktur

6
»



»
9



Board of Management



1

2



3

4



1. **Darmadi Sutanto** | Chief of Retail Banking Officer
2. **Vincentius Hidayat** | Head of Retail Lending Business
3. **Nurhajati Soerjo Hadi** | Head of Internal Audit
4. **Irwan Sutjipto Tisnabudi** | Head of Digital Banking
5. **Steffano Ridwan** | Head of Business Banking
6. **Pratomo Soedarsono** | Head of Human Capital
7. **YB Hariantono** | Head of Information Technology
8. **Hadi Wibowo** | Head of Branchless Banking
9. **Helena** | Head of Retail Funding Business



5



6

7

8



9

Pejabat Eksekutif





Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Bank BTPN Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank BTPN Tbk tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank BTPN Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2020

Dewan Komisaris



Mari Elka Pangestu *
Komisaris Utama (Independen)



Chow Ying Hoong
Wakil Komisaris Utama



Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen



Takeshi Kimoto
Komisaris



Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen

* **catatan:** Ibu Mari Elka Pangestu telah mengajukan pengunduran diri melalui surat resmi tertanggal 30 Januari 2020, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2020. Namun demikian, pengunduran diri termasuk pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sebagai Komisaris Utama kepada yang bersangkutan akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank untuk tahun buku 2019.

Direksi



Ongki Wanadjati Dana
Direktur Utama



Kazuhisa Miyagawa
Wakil Direktur Utama



Dini Herdini
Direktur Kepatuhan (Independen)



Yasuhiro Daikoku
Direktur



Henoch Munandar
Direktur



Adrianus Dani Prabawa
Direktur



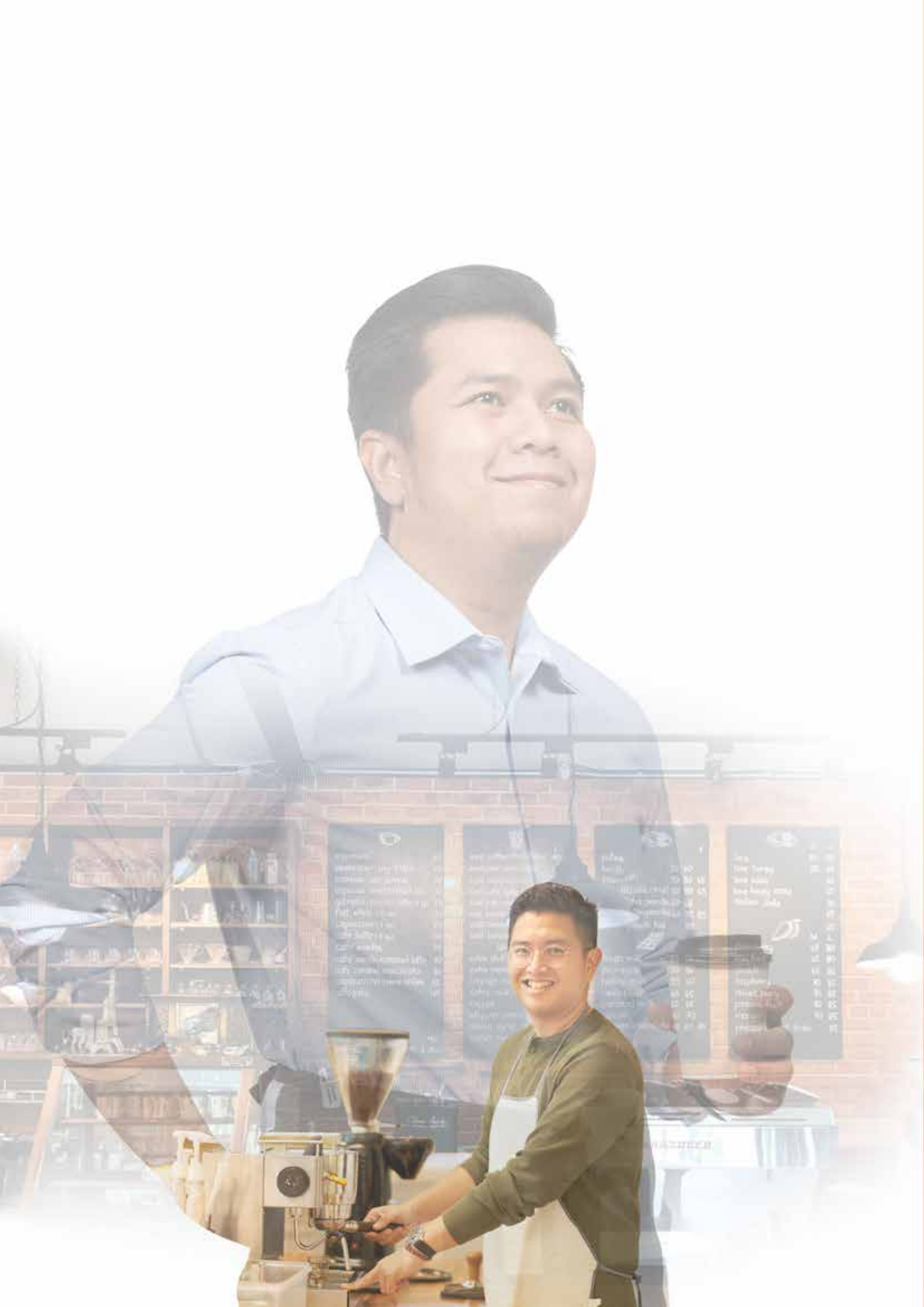
Hiromichi Kubo
Direktur



Merisa Darwis
Direktur



Hanna Tantani
Direktur



Profil Perusahaan

“

Merger Bank BTPN dengan SMBCI yang efektif pada 1 Februari 2019 semakin memperkuat kemampuan Bank dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih lengkap kepada nasabah.

”

54	Informasi Umum Perusahaan	88	Profil Pejabat Eksekutif
56	Riwayat Singkat Perusahaan	92	Statistik Karyawan
58	Jejak Langkah	96	Komposisi dan Profil Pemegang Saham
60	Bidang Usaha	98	Informasi Entitas Induk Terakhir
61	Produk dan Layanan	99	Informasi Pemegang Saham Utama
62	Struktur Organisasi	100	Daftar Entitas Anak
64	Visi, Misi & Nilai-nilai Utama	100	Kantor Cabang
66	Profil Dewan Komisaris	101	Struktur Kepemilikan
71	Profil Direksi	102	Kronologi Pencatatan Saham
80	Profil Anggota Komite Audit	103	Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
82	Profil Anggota Komite Pemantau Risiko	104	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal
84	Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	105	Informasi pada <i>Website</i> Perusahaan
85	Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi		

Informasi Umum Perusahaan



Nama Perusahaan

PT Bank BTPN Tbk



A MEMBER OF
SMBC Group

Informasi Perubahan Nama

- 1958:** Nama awal adalah Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil)
- 1986:** Bapemil berubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
- 2019:** PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berubah menjadi PT Bank BTPN Tbk

Tanggal Pendirian

1958

Bidang Usaha

Layanan Perbankan

Dasar Hukum Pendirian

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 dari Notaris Noezar S.H. Akta ini mengalami perubahan yang termuat pada Akta tanggal 31 Mei 1960 No. 203 dan akta tertanggal 7 November 1960 No. 53 Notaris Noezar S.H., Telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14 Februari 1961 No. 13, tambahan No. 5.

Modal Dasar

Rp300.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp162.978.578.229

Nama Bursa Efek dan Tanggal Pencatatan

Bursa Efek Indonesia (12 Maret 2008)

Kode Saham

BTPN

ISIN Code

101000118508

Komposisi Pemegang Saham

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (92,43%)
PT Bank Central Asia Tbk (1,02%)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (0,15%)
Publik (5,23%)
Treasury Stock (1,17%)

Alamat Kantor Pusat

Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950

Website dan Email

www.btpn.com

corporate.communication@btpn.com

Peringkat (Fitch)

Peringkat oleh PT Fitch Rating Indonesia AAA(idn),
Outlook Stabil Peringkat oleh PEFINDO idAAA
(Triple A, Outlook Stabil)

Riwayat Singkat Perusahaan

Pada awalnya, BTPN merupakan bank yang memfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta komunitas prasejahtera produktif (*mass market*). Saat ini BTPN berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia.

BTPN menawarkan berbagai layanan perbankan melalui enam unit bisnisnya. Pertama, BTPN Purna Bakti yang fokus pada segmen pensiunan dan prapensiunan. Kedua, BTPN Mitra Usaha Rakyat yang melayani para nasabah wirausaha mikro. Ketiga, BTPN Mitra Bisnis yang melayani para nasabah wirausaha kecil dan menengah. Keempat, BTPN Sinaya yang fokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga dari segmen institusi dan individu berpenghasilan menengah ke atas.

Dua unit bisnis terakhir adalah kedua platform *mobile banking* BTPN. BTPN Wow!, sebagai unit bisnis kelima, merupakan platform yang melayani segmen *mass market* dengan menggunakan telepon seluler sederhana. Sedangkan yang terakhir, Jenius, tersedia untuk menjawab kebutuhan nasabah *urban* yang lebih fasih menggunakan *smartphone*.

Sebagian besar perusahaan melaksanakan kegiatan kemasyarakatannya melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang berjalan terpisah dari kegiatan bisnisnya. BTPN mengintegrasikan program sosialnya sebagai bagian dari kegiatan bisnis.

Dengan demikian, semboyan “Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti” tidak hanya merupakan kegiatan sosial Bank. Namun, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis Bank sehari-hari hingga ke tingkat cabang.

Di tahun 2019, setelah merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI), BTPN akan menjadi bank yang lengkap. Bank menawarkan berbagai layanan keuangan bagi seluruh spektrum nasabah individu dan nasabah bisnis, dari korporasi besar di daerah urban utama hingga usaha-usaha mikro dan masyarakat di pedesaan.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Bank didirikan di Bandung, Jawa Barat, pada 1958 dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil). Kemudian, Bank berubah nama menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional di tahun 1986.

Setelah merger dengan SMBCI, pada tahun 2019 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berubah menjadi PT Bank BTPN Tbk.



Jejak Langkah

- Didirikan di Bandung, Jawa Barat, dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil).
- Pada 1960, BTPN memperoleh izin sebagai bank komersial.
- Pada 1986, berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

Pada 2008, TPG Nusantara S.a.r.l. mengakuisisi saham BTPN sebesar 71,6% melalui pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. BTPN menjadi bank publik dengan nilai aset Rp13,7 triliun.

- BTPN meluncurkan bisnis usaha mikro dan kecil (UMK) dengan nama BTPN Mitra Usaha Rakyat dengan membuka 539 kantor cabang dan berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit yang mencapai Rp2,3 triliun.
- BTPN menerbitkan obligasi rupiah jangka panjang yang pertama, dengan peringkat A+ (*National Scale Rating*) dari Fitch Ratings dan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dalam mata uang rupiah dari *International Finance Corporation*, anak perusahaan Bank Dunia.

Nilai aset BTPN tumbuh menjadi Rp34,5 triliun dibandingkan Rp13,7 triliun dua tahun sebelumnya. Menjadi bank ke-10 terbesar dalam kapitalisasi pasar, serta menduduki peringkat ke-5 dalam jumlah cabang dan peringkat ke-6 dalam jumlah karyawan.

1958-1986

2008

2009

2010

2014

2015

2016

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Jepang telah meningkatkan kepemilikan sahamnya di BTPN dan menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 40,0%. SMBC merupakan bank terbesar kedua di Jepang berdasarkan nilai pasar dengan aset sebesar USD1,3 triliun.

BTPN secara resmi meluncurkan BTPN Wow!, sebuah layanan perbankan bagi *mass market* yang memanfaatkan telepon seluler dan didukung jasa agen sebagai perpanjangan tangan Bank untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Transaksi yang dapat dilakukan yaitu simpanan, tarik tunai, transfer dana, pembayaran tagihan dan pengajuan permohonan kredit mikro serta pembelian produk asuransi mikro.

- Februari 2016 BTPN mulai beroperasi sebagai Bank devisa setelah memperoleh izin pada bulan Desember 2015, yang memungkinkan Bank untuk melakukan transaksi dalam valuta asing dan lebih fleksibel untuk mulai menawarkan produk simpanan liabilitas dalam mata uang asing.
- Jenius, yang merupakan *platform mobile phone* kedua, diluncurkan. Layanan telepon seluler Jenius menggunakan *smart phone* untuk menghubungkan rekening nasabah dengan Bank dan melakukan transaksi perbankan. Hingga Desember 2016, Jenius telah memiliki 70.000 pengikut di situs media sosial dan ditonton lebih dari 3 juta kali di YouTube.

- BTPN meluncurkan Daya, program pemberdayaan *mass market* yang berkelanjutan serta menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis BTPN. Bisnis Pendanaan memperkenalkan *brand* Sinaya, yang terhubung dengan inisiatif Daya.
- Menyelesaikan uji coba bisnis Perbankan Komunitas Syariah (BTPN Syariah – Tunas Usaha Rakyat).
- BTPN memperluas jaringan layanan ATM dengan jaringan ATM Prima selain jaringan ATM Bersama yang sudah ada. Total jaringan yang terhubung mencapai lebih dari 57.331 ATM di seluruh Indonesia.

- BTPN Syariah - Tunas Usaha Rakyat tumbuh pesat, sampai akhir tahun telah melayani 28.927 sentra komunitas di Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur serta memberdayakan 444.000 nasabah di sentra komunitas.
- BTPN menyelesaikan program uji coba *mobile banking* baru yang diberi nama BTPN Wow!. Program ini kemudian diluncurkan pada 2015.

- Pembiayaan BTPN Syariah – Tunas Usaha Rakyat tumbuh dua kali lipat mencapai sekitar Rp1,4 triliun dan menyumbang 3% dari total kredit BTPN. Jaringan Unit Usaha Syariah mencapai 69.500 sentra di seluruh nusantara, yang memberdayakan lebih dari 931.500 nasabah di daerah pedesaan.
- BTPN mengakuisisi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang dikonversikan menjadi bank syariah sebelum BTPN memisahkan unit syariah ke dalam entitas baru di 2014.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dari Jepang memiliki 24,3% saham BTPN melalui transaksi pembelian saham yang sebelumnya dimiliki oleh TPG Nusantara S.a r.l. dan pemegang saham lainnya.

2011

2012

2013

2017

2018

BTPN telah memperluas fitur aplikasi *mobile banking* BTPN Wow! dan Jenius untuk mengembangkan basis nasabah dan meningkatkan transaksi perbankan. Fokus kepada *customer centric* dari dua layanan *mobile banking* ini telah membawa perubahan yang signifikan pada pengalaman nasabah (*customer experience*) dan berdampak pada operasional Unit Pendukung. Transformasi yang disebut “Gemilang” meliputi struktur organisasi Bank, teknologi, sumber daya manusia dan pengendalian risiko. Jaringan cabang Bank telah mengalami transformasi yang cukup besar dimana seluruh cabang dapat menyediakan layanan perbankan kepada semua segmen nasabah.

BTPN berhasil menyelesaikan dua aksi korporasi penting. Pertama, pencatatan saham perdana (IPO) BTPN Syariah, anak usaha dengan kepemilikan saham mayoritas. Kedua, proses merger BTPN dengan SMBCI. Sebagai hasil proses merger tersebut, Bank kini menawarkan ragam layanan keuangan yang lebih luas ke seluruh spektrum nasabah, mulai dari nasabah individu hingga nasabah perusahaan, yang meliputi nasabah korporasi besar sampai usaha-usaha mikro dan masyarakat di daerah. Hasil dari proyek Gemilang yang dilakukan tahun lalu serta *platform* perbankan *mobile* BTPN Wow! dan Jenius mulai akan dapat dinikmati di tahun 2019.

2019

Merger Bank BTPN dengan SMBCI resmi efektif pada 1 Februari. Penggabungan usaha ini akan memperkuat kemampuan Bank dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih lengkap untuk basis nasabah yang lebih luas. Kami sekarang adalah *universal bank*.

Bidang Usaha

SESUAI ANGGARAN DASAR

A. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:
 1. Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- c. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- g. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- i. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- k. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan

- usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
- l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan. Seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - p. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
 - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Produk dan Layanan

CORPORATE/ WHOLESALE BANKING

- » **Produk Lindung Nilai**
IRS/CCS dan transaksi valas
- » **Produk pinjaman**
 - Bilateral dan Syndication Loans (IDR, USD dan, JPY)
 - Project/Structured Finance
 - ECA
- » **Produk Manajemen Kas**
 - Current account dan Term Deposits
 - Payment (ACH, RTGS, Payroll, Wires)
 - E-Tax Payment (pajak non-import dan import)
 - Collections (ACH, RTGS, Payroll, Wires, Cheque/Cash Deposit, Giro)
 - Virtual Account
 - Internet Banking/ Host to Host
 - Liquidity Management (domestic cash polling)
- » **Domestik, Export dan Import Produk Trade**
 - Import LC Issuance/Import Bill Negotiation
 - Export LC Advising/ Confirmation/Export Bill Collection
 - Documentary Collection (DP, DA)
 - Trust Receipt/Trade Loan
 - Structured Trade Finance
 - Receivable Purchase
 - Bank Guarantees/SBLC

BTPN WOW!

- » Funding Wow!
- » Produktif dan Konsumtif
- » Student Loan
- » Supply Chain

JENIUS

- » Fund it Flexi Cash

TREASURY & FI

- » Foreign Exchange
- » Derivatif
- » Pasar Uang

RETAIL FUNDING BUSINESS

- » Taseto Premium
- » Taseto Bisnis
- » Tabungan Pasti
- » Giro Sinaya
- » Deposito Berjangka
- » Deposito Fleksi
- » Reksadana
- » Bancassurance
- » Kartu ATM/Debit Sinaya
- » Sinaya Online dan Sinaya Mobile
- » Safe Deposit Box
- » Layanan Syariah Bank
- » Weekend Banking
- » Sinaya Prioritas

UMK/MIKRO

- » Kredit Angsuran Berjangka
- » Kredit Usaha Rakyat
- » Tabungan Mitra Usaha
- » Tabungan Setara Deposito
- » Pembiayaan Petani Kelapa Sawit
- » Upper Micro

RETAIL LENDING BUSINESS

- » Kredit Pensiun
- » Kredit Pegawai Aktif
- » Kredit Cross Over

BUSINESS BANKING

- » Cash Management
- » CPP Mitra Bisnis
- » BPR Financing
- » ABF
- » Commercial

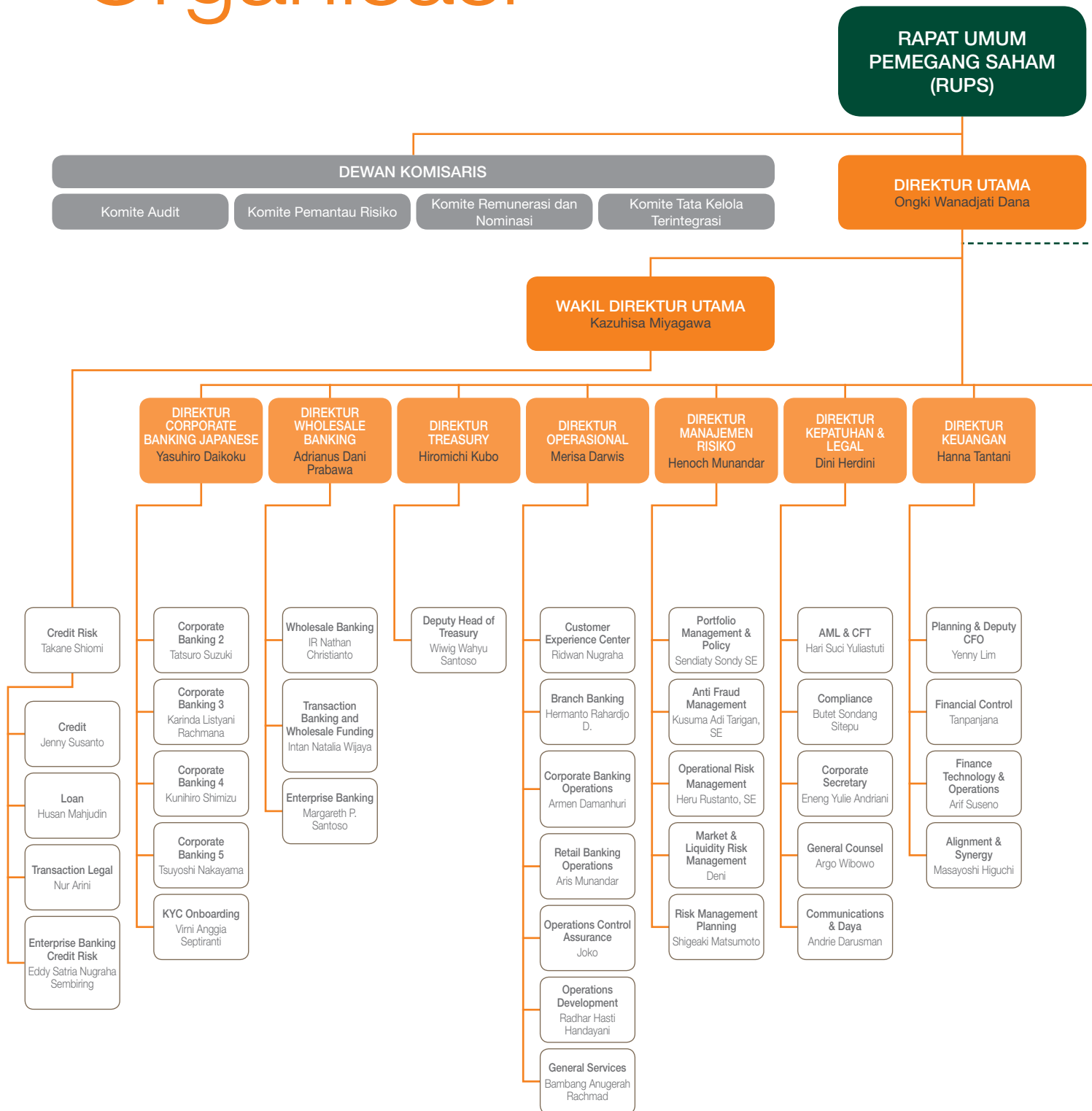
SUPPLY CHAIN AND STRUCTURED PROGRAM

- » Supply Chain
- » Lending Program

CONSUMER ASSETS

- » Asset Based Financing (A/R Financing)
- » Fintech
- » Pembiayaan dengan MF

Struktur Organisasi



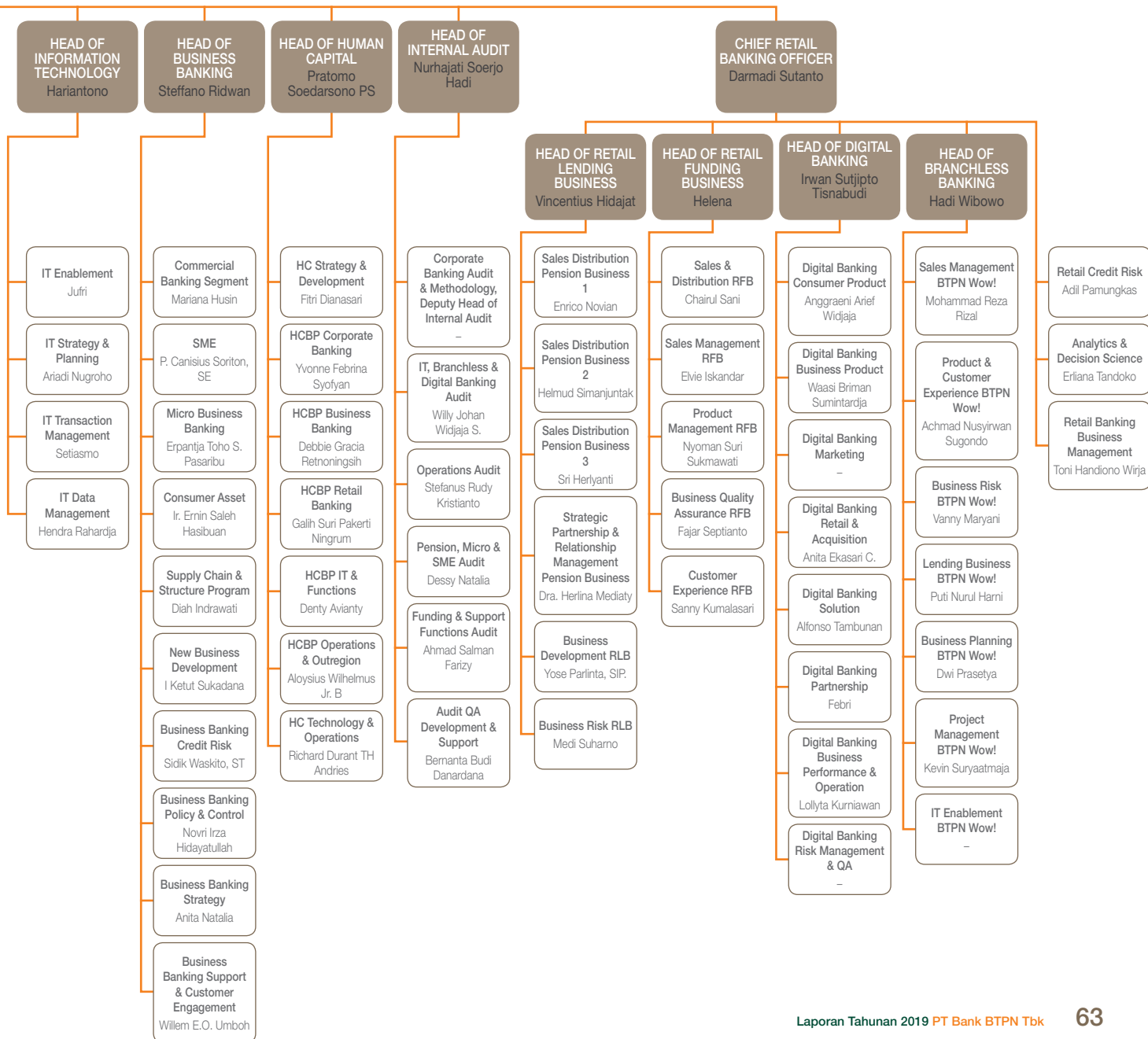
Board of Management



Direktur



Komite Dewan Komisaris & Komite Direksi



Visi

Menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan digital.



Misi

- Menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen ritel, mikro, UKM dan korporat bisnis di Indonesia, serta Bangsa dan Negara Indonesia secara keseluruhan;
- Memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan Bank BTPN;
- Menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi *stakeholder* termasuk masyarakat Indonesia;
- Memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada nasabah dan mitra Bank BTPN.

Nilai-nilai Utama

Nilai-nilai yang kami anut merupakan pedoman kami dalam menjalankan bisnis. Ada 5 (lima) nilai, seperti dijelaskan berikut ini:

- *Customer-centric* : Fokus pada kepentingan *stakeholder*
- Proaktif & Inovatif : Berani bertindak dan berinovasi tanpa henti
- Gesit (*Agile*) : Merangkul perubahan dan bergerak cepat
- Mencapai yang Terbaik : Menjaga dan memberikan kualitas layanan terbaik
- Sinergi : Berkolaborasi sebagai satu tim

Berkaitan dengan Visi dan Misi, landasan dasar integrasinya adalah untuk melayani nasabah SMBCI dan BTPN agar mereka dapat mencapai tujuan dan aspirasi mereka dengan cara yang terbaik, serta diharapkan juga memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, Bank Penerima Penggabungan akan menjadi mitra yang dapat diandalkan dan dipercaya, yang mampu memahami dan memenuhi secara efektif kebutuhan finansial nasabah Bank Penerima Penggabungan yang terus berkembang.

Visi dan Misi yang ditetapkan telah sesuai dengan rancangan penggabungan usaha sebagaimana tercermin pada ringkasan rencana penggabungan usaha.

Profil Dewan Komisaris



Mari Elka Pangestu
Komisaris Utama (Independen)

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	66 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Sarjana Ekonomi dari Australian National University (1978)• Master of Economics dari Australian National University (ANU) (1979)• Ph.D. dari Department of Economy - University of California, Davis, Amerika Serikat (1986)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) BTPN sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019.
Rangkap Jabatan	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011–2014)• Menteri Perdagangan (2004–2011)• Anggota <i>Board of Trustee</i> di CSIS Foundation (2015-2019)• Wakil Direktur pada Pusat Antar Universitas – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1988-1990),• Ketua Bidang Internasional di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (1988-1998)• Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (1986-1999, 2007-2019)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Chow Ying Hoong

Wakil Komisaris Utama



Warga Negara	Singapura
Domisili	Singapura
Usia	59 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Business Administration bidang Finance dari National University of Singapore (1984)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BTPN sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019.
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN • <i>Managing Executive Officer, Co-Head of Asia Pacific Division and Head of Asia Growing Markets Division</i> di SMBC
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Director and Executive Officer SMBC, Singapore (2013-2014) • General Manager of Planning Department Asia Pacific Division SMBC (2011-2013) • General Manager of Debt Markets Department SMBC, Singapore (2010-2013) • Branch Manager/Managing Director di Societe Generale Bank (1997-2000) • Head of Syndication for Asia di ABN Amro Singapura (1996-1997) • Bank Officer, United Overseas Bank (1984-1987)
Hubungan Afiliasi	Hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali

Profil Dewan Komisaris

Takeshi Kimoto

Komisaris



Warga Negara	Jepang
Domisili	Singapura
Usia	49 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Art di bidang Bisnis dan Commerce dari KEIO University
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Komisaris BTPN sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN• <i>General Manager of Asia Growing Markets Division</i> SMBC• Komisaris PT Summit Oto Finance• Komisaris PT Oto Multiartha
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Vice President, International Finance Department, Sumitomo Bank Ltd (2000-2001).• Vice President untuk Global Institutional Banking Department ("GIBD") di SMBC• Vice President untuk GIBD Singapura, Group Head & Senior Vice President untuk Global Trade Finance Department, Senior Vice President untuk Emerging Market Business Division ("EMBD"), Joint General Manager untuk EMBD Tokyo dan Joint General Manager untuk Business Development Department pada International Banking Unit di SMBC (2007-2018).
Hubungan Afiliasi	Hubungan Kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali



Irwan Mahjudin Habsjah

Komisaris (Independen)

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	72 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ekonomi dari Erasmus University Rotterdam, Belanda (1974) • Master di bidang Monetary & International Economics dari University of Amsterdam (1978)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Komisaris Independen BTPN sesuai hasil RUPSLB tanggal 11 September 2019.
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Pemantau Risiko BTPN • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi BTPN • Komisaris Utama PT Sriboga Marugame Indonesia
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Sari Melati Kencana/Pizza Hut (2013-2016) • Anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan mewakili Indonesian Financial Executives Association (IFEA) (2000-2004) • Direktur Utama PT ING Indonesia Bank (2000-2004) • Komisaris Independen PT Bank Universal (1999-2000) • Direktur Utama PT BT Securities Indonesia (1996-1999)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Profil Dewan Komisaris



Ninik Herlani Masli Ridhwan

Komisaris (Independen)

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	62 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1983)• Magister bidang Keuangan dari Universitas Indonesia (2008)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Komisaris Independen BTPN sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Ketua Komite Audit BTPN• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Senior Auditor di Kantor Akuntan Utomo (SGV - Utomo) (1981-1985)• Bergabung pada PT Bank Central Asia Tbk dengan jabatan terakhir Kepala Pengembangan Audit dan Pengendalian Mutu (1985-2012)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Profil Direksi



Ongki Wanadjati Dana
Direktur Utama

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	62 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Mesin dari ITB (1981)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Direktur Utama BTPN sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-Januari 2019)• Direktur Perbankan Wholesale Bank Permata (2002-2008)• Wakil Direktur Utama di Bank Universal (2000-2002)• Direktur Utama Bank Subentra (1993-1998)• Senior Advisor, Bank Universal (1999-2000)• Credit Cycle Manager – Consumer Banking, Citibank, N.A (1987-1990)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Kazuhisa Miyagawa

Wakil Direktur Utama



Warga Negara	Jepang
Domisili	Jakarta
Usia	54 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Law dari Gakushuin University, Jepang (1988)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTPN sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Direktur Utama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-Januari 2019)• Seoul Branch, Joint General Manager, Korea di SMBC (2009-2013)• Tokyo Corporate Business Office 1 and Global Corporate Banking Dept. after merger, Staff (and Group Head later on) in Corporate Business, Japan di SMBC (2000-2009)• Seoul Branch, Head of Planning Group, Korea di Sakura Bank (1998-1999)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



Dini Herdini
Direktur Kepatuhan (Independen)

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	54 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta (1987)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-Jan 2019) • General Counsel & Corporate Secretary PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2014) • Partner/Konsultan Hukum di Firma Hukum Herdini & Partners (2000-2004) • Kepala Divisi Legal PT Bank PDFCI Tbk (1996-1999) • Legal Manager PT ING Bank (1993-1996) • Legal Officer PT Bank Sumitomo Niaga (1989-1993)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Yasuhiro Daikoku
Direktur



Warga Negara	Jepang
Domisili	Jakarta
Usia	50 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Law dari Keio University, Jepang (1992)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Wakil Direktur Utama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2015-Januari 2019)• Senior Vice President Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Jepang (2011-2015)• Section Head, Senior Vice President, SMBC Bangkok Branch (2006-2008)• Vice President, Sumitomo Bank (1999-2001)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



Henoch Munandar
Direktur

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	53 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta (1989)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014 Januari 2019) • Deputy Head of Credit/Credit Risk Management Head SMEC Bank DBS Indonesia (2010-2013) • Deputy SMEC Risk + Remedial Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2006-2010) • Co-Dept Head of Corporate Banking, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (2006-2006) • Local Corporate Head-Senior Manager, Sanwa Bank Indonesia/Bank United Financial of Japan (UFJ) (1995-2006) • Account Manager PT Bogor Multifinance (1995-1995) • Account Manager Panin Bank (1993-1995) • Sub Branch Manager Bank Susila Bakti (1991-1993)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



Adrianus Dani Prabawa

Direktur

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	52 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Financial Administration dari University of New England, Armidale, Australia (1989)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Wakil Direktur Utama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-Jan 2019)• Direktur PT Bank DBS Indonesia (2006-2014)• Senior Manager - Vice President ING Bank (1996-2003)• Senior Marketing Manager, PT BII Lend Lease (1995-1996)• Account Relationship Manager, Standard Chartered Bank (1992-1995)• Account Officer PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) (1990-1992)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



Hiromichi Kubo
Direktur

Warga Negara	Jepang
Domisili	Jakarta
Usia	49 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Commercial Science dari Kobe University, Hyogo, Jepang (1992)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Treasury, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2016-Januari 2019) • Joint General Manager, Planning Department, Treasury Unit SMBC, Tokyo (2015-2016) • Deputy General Manager, Head of Treasury Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Kantor Cabang Sydney (2014-2015) • Head of Treasury, Treasury Department, Kantor Cabang Sydney, SMBC (2011-2104) • Senior Vice President, Trading Group, Treasury Department SMBC Kantor Cabang New York (2006-2009) • Manager of Foreign Exchange Group Trading Department Sakura Bank (1999-2001)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



Merisa Darwis

Direktur

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	52 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Informatika dari ITB (1991)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Direktur sejak Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPST tanggal 15 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Head of Operation, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2017-Januari 2019)• Kepala Satuan Kerja Audit Internal, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2011-2016)• HR & Internal Control Director, Bank Barclays Indonesia (2010-2011)• Operations - Control & Reporting Head, Transaction Services Head, Control & Support Head, Consumer IT Head & Country IT Financial Head, serta IT QA Head, Privacy Officer and BISO (Business Information Security Officer) Citibank, N.A., Indonesia (1996-2009)• Programmer/Analyst, USI/IBM Jakarta (1992-1993) .
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Hanna Tantani

Direktur



Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	52 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga (1990) • Master of Business Administration dari Australian Graduate School of Management, University of New South Wales, Australia (1993)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Direktur sesuai hasil RUPSLB tanggal 11 September 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Chief Financial Officer, PT Bank BTPN Tbk (2018-2019) • Direktur Keuangan, PT Bank HSBC Indonesia (2014-2018) • SVP MI Planning & Analysis, KCBA HSBC Indonesia (2009-2014) • Financial Controller, Standard Chartered Bank (2008-2009) • Market Controller, American Express Bank (2004-2008) • Staff, Credit Operations & Trade Services, Management Accountant, Manager Treasury OperationS, AVP Treasury Services, VP Global Payment & Cash Management, VP Credit Operation VP Area Finance, HSBC (1990-2004)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Profil Anggota Komite Komite Audit



Kanaka Puradireja

Anggota (Pihak Independen) Komite Audit

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Bogor, Jawa Barat
Usia	75 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1971)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Audit sejak 1 Februari 2019
Rangkap Jabatan	Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko sejak 1 Februari 2019
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Managing Partner dan Chairman KPMG Indonesia (1978-1999)• Pendiri dan Senior Partner KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (2000-2007).• Ketua Majelis Kehormatan IAI (2002-2010)• Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2004-2010)• Saat ini masih menjabat sebagai Ketua Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia• Saat ini masih menjabat Anggota Dewan Kehormatan Professionals in Risk Management Association (PRIMA)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



Ivan Purnama Sanoesi

Anggota (Pihak Independen) Komite Audit

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	58 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanegara • Master Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi PPM (2004)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Audit sejak 1 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Audit di PT Bank BCA Tbk (1986) • Wakil Kepala Divisi Audit PT Bank BCA Tbk (2016)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Profil Anggota Komite Komite Pemantau Risiko



Kanaka Puradireja

Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Bogor, Jawa Barat
Usia	75 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Padjajaran (1971)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko sejak 1 Februari 2019
Rangkap Jabatan	Anggota (Pihak Independen) Komite Audit sejak 1 Februari 2019
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Managing Partner dan Chairman KPMG Indonesia (1978-1999)• Pendiri dan Senior Partner KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (2000-2007).• Ketua Majelis Kehormatan IAI (2002-2010)• Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2004-2010)• Saat ini masih menjabat sebagai Ketua Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia• Saat ini masih menjabat Anggota Dewan Kehormatan Professionals in Risk Management Association (PRIMA)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



Sofyan Rambey

Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	61 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> MBA di bidang Finance dari John. M. Olin School of Business, Washington University, St. Louis, USA (1993) Gelar profesi Financial Risk Manager (FRM®) dari Global Association of Risk Professional ("GARP")
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko sejak 1 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	Beliau memulai kariernya di PT Bank Exim sebagai Account Officer tahun 1984, selanjutnya sebagai Kepala Biro, Komisaris pada PT Exim Securities dan Group Head pada PT Bank Mandiri. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Regional GARP (2005), Wakil Kepala IRPA (2006) dan CEO & Presiden Direktur The Risk Forum School of Finance sejak tahun 2007 - sekarang
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Profil Anggota Komite Komite Remunerasi dan Nominasi



Pratomo Soedarsono

Anggota (Pejabat Eksekutif HC) Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	42 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Business School
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	2 November 2017 – 31 Januari 2019 HC Strategy & Development Head 1 Februari 2019 – 31 Juli 2019 HC Strategy, Deputy Head OF Human Capital 1 Agustus 2019 – Now Head of Human Capital
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	1 Juli 2006 – 1 November 2016 HSBC dengan jabatan terakhir sebagai sebagai Head of Performance & Reward
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Profil Anggota Komite Komite Tata Kelola Terintegrasi



Dewie Pelitawati

Anggota (Komisaris Independen BTPN Syariah)
Komite Tata Kelola Terintegrasi

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	60 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1984 dan Magister Hukum pada tahun 2005 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan mengikuti berbagai program pelatihan antara lain yang diselenggarakan oleh LSPP, Asosiasi Advokat Indonesia, Dubai International Finance Center, Corporate Leadership Development Institute dan <i>Training Social Innovation in Action</i> yang diadakan oleh The Economist
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak 1 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• PT Indosat (1985-1999)• Head of Chairman Office dari Indonesia Bank Restructuring Agency (1999-2000)• Secretary to Junior Minister dari Minister for National Economic Restructuring-RI (2001)• Komisaris dari PT Indosat Mega Media Mobile• Komisaris PT Satelindo (2002-2003)• Chief Legal and Compliance dari PT Indosat (2009-2010)• Partners pada Bahar and Partners Attorney At Law (2010-2013)• Senior GM Corporate Legal, Governance and Compliance and Advisor to CEO pada XL-Axiata Tbk (2013 - November 2018).
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi



Muhammad Faiz

Anggota (Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah)
Komite Tata Kelola Terintegrasi

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	45 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Meraih gelar sarjana di Universitas Islam Madinah jurusan Syariah pada tahun 1997 dan meraih gelar pasca sarjana di Universitas Kairo jurusan Daarul Ulum pada tahun 2013. Sertifikasi DPS Perbankan Syariah level I (2008) dan level II (2013) dari DSN-MUI dan BI serta Workshop Pra Ijtima Sanawi untuk peningkatan Kompetensi DPS Perbankan, Pembiayaan dan Modal Ventura Syariah (2016)
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak 1 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah• Ketua Dewan Pengawas Syariah di UUS PT Bank Permata, Tbk (2008-sekarang)• Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT IMFI Syariah (2012-sekarang)• Wakil Pengasuh PP Darul Rohman (2008-sekarang)• Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2010-sekarang)• Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail di PBNU (2015-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



Yosef Antonius Boliona Badilangoe

Anggota (Pihak Independen) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	60 tahun pada akhir Tahun Buku 2019
Riwayat Pendidikan	Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1983.
Riwayat Jabatan Dasar Hukum & Masa Jabatan	Menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak 1 Februari 2019
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Executive Director-Compliance & Human Resources PT Bank Niaga Tbk (2007-2008). Executive Vice President - Head of Retail Sales & Services (2006-2007) Executive Vice President-Head of Network & Services (2004-2005) dan Executive Vice President - Head of Subsidiaries & Special Asset Management (2002-2003) Advisor, Asset Restructuring and Recovery PT Bank CIMB Niaga Tbk (2011-2016) Executive Director - Compliance & Human Resources PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk (2009-2011)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Profil Pejabat Eksekutif

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Universitas	Bergabung di BTPN	Jabatan
1	Erliana Tandoko	S1	Institut Pertanian Bogor	2015	Analytic & Decision Head
2	Achmad Nusyirwan Sugondo	S1	University of Toledo	2011	Product & Customer Experience Head BTPN Wow!
3	Hadi Wibowo	S1	Institut Teknologi Bandung	2008	Head of Branchless Banking
4	Mohammad Reza Rizal	S1	Universitas Indonesia	2011	Sales Management Head BTPN Wow!
5	Vanny Maryani	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas	2016	Business Risk Head BTPN Wow!
6	Dwi Prasetya	S1	Others	2008	Business Planning Head BTPN Wow!
7	Kevin Suryaatmaja	S2	Universitas Bina Nusantara	2018	Project Management Head BTPN Wow!
8	Puti Nurul Harni	S1	Monash University	2019	Lending Business Head BTPN Wow!
9	I ketut Sukadana	S1	Universitas Brawijaya	2008	New Business Development Head
10	Ir. Ernin Saleh Hasibuan	S1	Institut Pertanian Bogor	2017	Consumer Asset Head
11	P Canisius Soriton, SE	S1	Universitas Sam Ratulangi	2013	SME Head
12	Sidik Waskito, ST	S1	Universitas Sebelas Maret	2012	Business Banking Credit Risk Head
13	Steffano Ridwan	S1	Oklahoma State University	2018	Head of Business Banking
14	Mariana Husin	S1	Universitas Trisakti	2018	Commercial Banking Segment Head
15	Diah Indrawati	S1	Universitas Satya Wacana	2018	Head of Supply Chain & Structure Program
16	Erpantja Toho S. Pasaribu	S1	Universitas Sumatera Utara	2019	Micro Business Banking Head
17	Willem E.O Umboh	S1	Universitas Sam Ratulangi	2015	Business Banking Support & Customer Engagement Head
18	Novri Irza Hidayatullah	S1	Universitas Gadjah Mada	2019	Business Banking Policy & Control Head
19	Anita Natalia	S1	Universitas Trisakti	2013	Business Banking Strategy Head
20	Tatsuro Suzuki	S1	Aoyama Gakuin University	2019	Corporate Banking 2 Head
21	Karinda Listyani Rachmana	S1	Ritsumeikan Asia Pacific University	2019	Corporate Banking 3 Head
22	Kunihiro Shimizu	S1	Keio University	2019	Corporate Banking 4 Head
23	Tsuyoshi Nakayama	S1	Kobe University	2019	Corporate Banking 5 Head
24	Virni Anggia Septiranti	S1	Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik	2019	KYC On Boarding Manager
25	Takane Shiomi	S1	Waseda University	2019	Credit Risk Head
26	Husan Mahjudin	S1	Universitas Trisakti	2019	Loan Head
27	Jenny Susanto	S1	Monash University	2019	Credit Head
28	Nur Arini	S1	Universitas Indonesia	2019	Transaction Legal Head
29	Eddy Satria Nugraha Sembiring	S2	Prasetya Mulya Business School	2019	Enterprise Banking Credit Risk Head
30	Febri	S2	Prasetya Mulya Business School	2015	Digital banking Partnership Head

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Universitas	Bergabung di BTPN	Jabatan
31	Irwan Sutjipto Tisnabudi	S1	The University Of New South Wales	2016	Head of Digital Banking
32	Lollyta Kurniawan	S2	Thunderbird An American Graduate School Of International Management	2017	Digital Banking Business Performance & Operation Head
33	Alfonso Tambunan	S1	Ohio State University	2016	Digital Banking Solution Head
34	Waasi Briman Sumintardja	S1	Universitas Padjadjaran	2010	Digital Banking Business Product Head
35	Anita Ekasari C	S1	Universitas Katolik Parahyangan	2016	Digital Banking Retail & Acquisition Head
36	Anggraeni Arief Widjaja	S2	University Of California	2016	Digital Banking Consumer Product Head
37	Debbie Gracia Retroningsih	S2	Thunderbird, Graduate School Of International Management	2015	HCBP Head Business Banking
38	Denty Avianty	S2	Universitas Indonesia	2015	HCBP Head IT & Function
39	Galih Suri Pakerti Ningrum	S1	Universitas Indonesia	2008	HCBP Head Retail Banking
40	Pratomo Soedarsono PS	S2	Prasetya Mulya Business School	2016	Head of Human Capital
41	Richard Durant TH Andries	S1	Macquarie University	2016	HC Technology & Operation Head
42	Yvonne Febrina Syofyan	S2	Golden Gate University	2019	HCBP Head Corporate Banking
43	Fitri Dianasari	S1	Universitas Indonesia	2015	HC Strategy & Development Head
44	Aloysius Wilhelmus JR. B	S2	Sekolah Tinggi Manajemen Ppm	2019	HCBP Head Operation & Outregion
45	Ahmad Salman Farizy	S1	Universitas Padjadjaran	2015	Funding & Support Functions Audit Head
46	Dessy Natalia	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara	2012	Pension, Micro & SME Audit Head
47	Nurhajati Soerjo Hadi	S1	Oregon State University	2015	Head of Internal Audit
48	Willy Johan Widjaja S	S2	Universitas Bina Nusantara	2016	IT, Branchless & Digital Banking Audit Head
49	Bernanta Budi Danardana	S1	Universitas Indonesia	2019	Audit QA Development & Support Head
50	Stefanus Rudy Kristianto	S1	Institut Pertanian Bogor	2013	Operations Audit Head
51	Andrie Darusman	S1	Universitas Indonesia	2015	Communication & Daya Head
52	Argo Wibowo	S2	Universitas Indonesia	2011	General Counsel
53	Butet Sondang Sitepu	S2	Universitas Gajah Mada	2009	Compliance Head
54	Hari Suci Yulastuti	S1	Universitas Gajah Mada	2019	Anti Money Laundering & CFT Head
55	Eneng Yulie Andriani	S2	Universitas Indonesia	2019	Corporate Secretary Head
56	Yenny Lim	S1	Oregon State University	2019	Planning & Deputy CFO
57	Arif Suseno	S1	Universitas Indonesia	2019	Finance Technology & Operations Head
58	Tanpanjana	S1	STIE Widya Wiwaha	2008	Financial Control Head
59	Masayoshi Higuchi	S2	University of Rochester	2019	Alignment & Synergy Head

Profil Pejabat Eksekutif

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Universitas	Bergabung di BTPN	Jabatan
60	Heru Rustanto, SE	S2	Universitas Tarumanagara	2014	Operational Risk Management Head
61	Kusuma Adi Tarigan, SE	S1	Universitas Sebelas Maret	2016	Anti Fraud Management Head
62	Sendiaty Sondy, SE	S1	Universitas Trisakti	2012	Portofolio Management & Policy Head
63	Deni	S2	Universitas Indonesia	2019	Market & Liquidity Risk Management Head
64	Shigeaki Matsumoto	S1	The University of Electro-Communications (Japan)	2019	Risk Management Planning
65	Aris Munandar	S2	Loughborough University	2017	Retail Banking Operations Head
66	Joko	S1	Atmajaya	2015	Operation Control Assurance Head
67	Radhar Hasti Handayani	S1	Others	2008	Operation Development Head
68	Ridwan Nugraha	S2	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta	2011	Customer Experience Center Head
69	Hermanto Rahardjo D	S1	Universitas Padjadjaran	2014	Branch Banking Head
70	Armen Damanhuri	S1	Universitas Indonesia	2019	Corporate Banking Operations Head
71	Bambang Anugerah Rachmad	S1	Universitas Trisakti	2019	General Services Head
72	Darmadi Sutanto	S2	University of Western Illinois Macomb	2019	Chief Retail Banking Officer
73	Toni Handiono Wirja	S2	Saint Louis University	2010	Retail banking Business Management Head
74	Adil Pamungkas	S1	Universitas Pembangunan Nasional Veteran	2013	Retail Credit Risk Head
75	Chairul Sani	S1	Universitas Islam Sumatera Utara	2009	Sales & Distribution Head RFB
76	Elvie Iskandar	S1	Others	2008	Sales Management Head RFB
77	Fajar Septianto	S1	Universitas Negeri Jenderal Sudirman	2009	Business Quality Assurance Head RFB
78	Helena	S1	IPB	2008	Head of Retail Funding Business
79	Nyoman Suri Sukmawati	S1	Institut Teknologi Bandung	2012	Product Management Head RFB
80	Sanny Kumalasari	S2	Universitas Katolik Atma Jaya	2019	Customer Experience Head RFB
81	Yose Parlinta	S1	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	2011	Business Development Head RFB
82	DRA Herlina Mediaty	S1	Others	2014	Strategic Partnership & Relationship Management Head Pension Business
83	Enrico Novian	S1	Others	2008	Sales Distribution Head Pension Business 1
84	Helmud Simanjuntak	S2	STIE IBEK Jakarta	1985	Sales Distribution Head Pension Business 2
85	Medi Suharno, SE	S2	Universitas Narotama Surabaya	2017	Business Risk Head RLB

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Universitas	Bergabung di BTPN	Jabatan
86	Sri Herlyanti	S1	Universitas Indonesia	2018	Sales Distributor Head Pension Business 3
87	Vincentius Hidajat	S1	Universitas Brawijaya	2019	Head of Retail Lending Business
88	Ariadi Nugroho	S3	Leiden University	2016	IT Strategy & Planning Head
89	Setiasmo	S2	Swiss German University	2017	IT Transaction Management Head
90	Jufri	D3	Edith Cowan University	2013	IT Enablement Head
91	Hariantono	S1	ITS Surabaya	2019	Head of Information Technology
92	Hendra Rahardja	S1	Universitas Gunadarma	2019	IT Data Management Head
93	Wiwig Wahyu Santoso	S1	CSU, Fullerton	2019	Deputy Head of Treasury
94	IR Nathan Christianto	S2	University of Tokyo	2019	Wholesale Banking Head
95	Intan Natalia Wijaya	S1	Sanata Dharma University	2019	Transaction Banking and Wholesale Funding Head
96	Margareth P. Santosa	S2	Universitas Indonesia	2019	Enterprise Banking Head

Statistik Karyawan

Per 31 Desember 2019, jumlah karyawan BTPN tercatat sebanyak 7.740, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2019	2018	2017
Permanen	6.948	6.437	6.672
Kontrak	792	1.365	1.480
TOTAL	7.740	7.802	8.152

Jumlah Karyawan berdasarkan Gender

Gender	2019	2018	2017
Laki-laki	4.584	4.751	5.124
Perempuan	3.156	3.051	3.028
TOTAL	7.740	7.802	8.152

Jumlah Karyawan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	2019	2018	2017
< D1-D3/Akademi	1.485	1.513	1.711
S1/Sarjana	5.970	6.025	6.160
S2-S3/Master	285	264	281
TOTAL	7.740	7.802	8.152

Jumlah Karyawan berdasarkan Direktorat

Adjust Direktorat	Jumlah
Analytics & Decision Science	16
Branchless Banking	232
Business Banking	1.831
Corporate Banking - Japanese	85
Credit Risk	42
Digital Banking	290
Human Capital	102
Internal Audit	57
Kepatuhan & Legal	98
Keuangan	59
Manajemen Risiko	51
Operations	2.311
Retail Banking	2
Retail Banking Business Management	2
Retail Credit Risk	434
Retail Funding Business	682
Retail Lending Business	895
Secretary To Deputy President Director	1
Teknologi Informasi	405
Treasury	33
Wholesale Banking	112
Grand Total	7.740

Jumlah Karyawan berdasarkan Level Jabatan

Level Jabatan	2019	2018	2017
Grade 2-7 (Clerical)	2.266	2.024	3.273
Grade 8-9 (Officer/Supervisor)	1.909	2.586	1.731
Grade 10-13 (Management)	2.692	2.418	2.404
Grade 14-15 (Senior Management)	706	649	630
Grade 16-17 (Top Management)	154	115	105
Grade 17 ke atas (Board Management)	13	10	8
TOTAL	7.740	7.802	8.152

Jumlah Karyawan berdasarkan Usia

Usia	2019	2018	2017
< 25 tahun	384	447	314
25-29 tahun	1.533	1.472	2.000
30-34 tahun	2.139	2.373	2.558
35-39 tahun	1.870	1.841	1.699
40-44 tahun	902	827	790
45-49 tahun	550	520	509
50-54 tahun	347	311	267
55-59 tahun	14	11	15
> 60 tahun	1	-	-
TOTAL	7.740	7.802	8.152

Jumlah Karyawan berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	2019	2018	2017
0 - < 1 Tahun	2.271	2.137	1.523
> 1 - < 3 Tahun	850	1.410	1.943
> 3 - < 5 Tahun	1.232	1.456	1.596
> 5 - < 10 Tahun	2.531	2.117	2.336
> 10 - < 20 Tahun	538	338	358
> 20 Tahun	318	344	396
TOTAL	7.740	7.802	8.152

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN**Biaya Pengembangan Kompetensi**

Sepanjang tahun 2019, BTPN telah menginvestasikan biaya pelatihan sebanyak Rp110,6 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp65,9 miliar. Sedangkan untuk tahun 2020, Bank menganggarkan sebesar 5% dari biaya tenaga kerja.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Ringkasan Pelaksanaan Pelatihan

	2019	2018	2017
Jumlah Program Pelatihan	279	207	360
Jumlah Peserta	77.743	26.263	16.928
Total Man-Days	28.267	18.734	16.291
Total Jam Pelatihan	226.137	221.655	130.326

Pelatihan berdasarkan Level Jabatan

Level Jabatan	Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Penyelenggara
First time leader (Setara Branch Head) - LDP P1	127	Classroom & coaching	Mengembangkan kompetensi kepemimpinan dasar	Dynargie
People leader (Setara Area Head) - LDP P2	129	Classroom & coaching	Mengembangkan kompetensi kepemimpinan tingkat menengah	Dynargie
Tactical leader (Setara Regional Head) - LDP P3	10	Classroom, studi kasus & kunjungan lokasi	Mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategic	Common Purpose

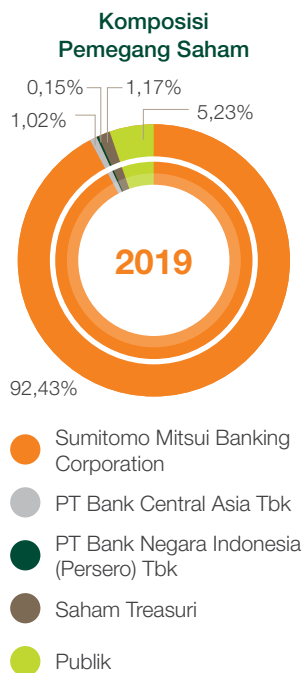
Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

No	Nama	Pelatihan	Waktu
1	Mari Elka Pangestu Komisaris Utama (Independen)	<i>Indonesia Market and Politic Update</i>	7 Mei 2019
2	Chow Ying Hoong Wakil Komisaris Utama	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019
3	Takeshi Kimoto Komisaris	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i> 3. <i>Senior Officer Economic and Political Outlook 2020</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019 3. 3 Desember 2019
4	Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019
5	Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris Independen	1. <i>Senior Officer Economic and Political Outlook 2020</i> 2. <i>Risk Beyond Conference</i>	1. 3 Desember 2019 2. 5-7 Desember 2019

Pengembangan Kompetensi Direksi

No	Nama	Pelatihan	Waktu
1	Ongki Wanadjati Dana Direktur Utama	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019
2	Kazuhisa Miyagawa Wakil Direktur Utama	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i> 3. <i>Senior Officer Economic and Political Outlook 2020</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019 3. 3 Desember 2019
3	Dini Herdini Direktur Kepatuhan (Independen)	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i> 3. <i>Senior Officer Economic and Political Outlook 2020</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019 3. 3 Desember 2019
4	Yasuhiro Daikoku Direktur	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i> 3. <i>Senior Officer Economic and Political Outlook 2020</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019 3. 3 Desember 2019
5	Henoch Munandar Direktur	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i> 3. <i>Senior Officer Economic and Political Outlook 2020</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019 3. 3 Desember 2019
6	Adrianus Dani Prabawa Direktur	1. <i>Indonesia Market and Politic Update</i> 2. <i>Refreshment of Risk Management Certification</i>	1. 30 April 2019 2. 20 Juli 2019
7	Merisa Darwis Direktur	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i> 3. <i>Senior Officer Economic and Political Outlook 2020</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019 3. 3 Desember 2019
8	Hirofumi Kubo Direktur	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i> 3. <i>Senior Officer Economic and Political Outlook 2020</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019 3. 3 Desember 2019
9	Hanna Tantani Direktur	1. <i>Risk Management Certification Refresher 2019</i> 2. <i>Indonesia Market and Politic Update</i> 3. <i>Senior Officer Economic and Political Outlook 2020</i>	1. 30 April 2019 2. 7 Mei 2019 3. 3 Desember 2019

Komposisi dan Profil Pemegang Saham



Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) adalah bagian dari Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) yang merupakan satu dari tiga grup finansial terbesar di Jepang. Per 30 September SMBC, memiliki total aset sebesar JPY 177,9 triliun, total dana pihak ketiga sebesar JPY 113,3 triliun dan total pinjaman dan piutang sebesar JPY 76,2 miliar. SMBC berkantor pusat di 1-1-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.

SMBC didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka, yaitu The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. SMFG didirikan pada bulan Desember 2002 melalui transfer saham sebagai perusahaan induk, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan kelompok usahanya menawarkan berbagai layanan keuangan yang terpusat pada bisnis perbankan. SMBC juga bergerak di bidang usaha leasing, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi kredit pemilikan rumah, venture capital dan bidang pemberian kredit lainnya.

Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2019

Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7.532.311.297	92,43%
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1,02%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	0,15%
Saham Treasuri	95.198.900	1,17%
Publik	426.359.127	5,23%
Total	8.148.928.869	100,00%

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
Dewan Komisaris			
1	Mari Elka Pangestu	Nil	0
2	Chow Ying Hoong	Nil	0
3	Takeshi Kimoto	Nil	0
4	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Nil	0
5	Irwan Mahjudin Habsjah	Nil	0
Direksi			
1	Ongki Wanadjati Dana	Nil	0
2	Kazuhisa Miyagawa	Nil	0
3	Dini Herdini	Nil	0
4	Yasuhiro Daikoku	Nil	0
5	Henoch Munandar	Nil	0
6	Adrianus Dani Prabawa	Nil	0
7	Hirromichi Kubo	Nil	0
8	Merisa Darwis	Nil	0
9	Hanna Tantani	Nil	0

Informasi Entitas Induk Terakhir

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (“SMFG”) didirikan pada tanggal 2 Desember 2002 dan merupakan induk perusahaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), Pemegang Saham Pengendali Bank. Saham SMFG terdaftar di *Tokyo Stock Exchange (First Section)* dan *Nagoya Stock Exchange (First Section)*. Misi Usaha SMFG adalah untuk tumbuh dan sejahtera bersama nasabah dengan menyediakan layanan yang mempunyai nilai yang lebih besar bagi mereka; memaksimalkan nilai pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan; serta menciptakan lingkungan kerja yang mendorong dan menghargai karyawan yang tekun dan mempunyai motivasi yang tinggi.

Berkantor Pusat di Tokyo, Jepang, SMFG bergerak dalam bidang manajemen anak perusahaan perbankan dan perusahaan lain yang dapat diperlakukan sebagai anak perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-undang Perbankan Jepang, serta melakukan fungsi-fungsi terkait (*ancillary functions*), serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan holding perbankan di bawah ketentuan Undang-undang Perbankan Jepang. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha SMFG terutama bergerak di bidang perbankan komersial melalui layanan keuangan berikut: *leasing*, sekuritas, pembiayaan konsumen, keuangan, pemrosesan data pengembangan sistem, dan manajemen asset.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smfg.co.jp.

Informasi Pemegang Saham Utama

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka, The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. didirikan pada bulan Desember 2002 sebagai perusahaan induk bank melalui transfer saham, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG. Pada Maret 2003, SMBC melakukan penggabungan usaha (merger) dengan The Wakashio Bank, Ltd.

Berkantor Pusat di Tokyo, Jepang, saat ini SMBC merupakan salah satu bank terbesar di Jepang dengan jaringan usaha yang telah menyebar ke beberapa wilayah di dunia, seperti Australia, Eropa, Kanada, Brasil dan Indonesia. SMBC dan kelompok perusahaannya menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan. SMBC memiliki bisnis perbankan di 16 negara selain negara asalnya Jepang. Mereka juga bergerak dalam bidang usaha leasing, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi KPR, modal ventura dan bisnis kredit terkait lainnya.

Di Indonesia, selain Bank, SMBC juga memiliki beberapa anak perusahaan lainnya yaitu PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia, PT Nikko Securities Indonesia, PT SBCS Indonesia, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smbc.co.jp.

Daftar Entitas Anak

Nama Perusahaan

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Kepemilikan

70%

Bidang Usaha

Perbankan Syariah

Jenis Badan Hukum

Perseroan Terbatas (PT)

Alamat Kantor Pusat

Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950

Total Aset

Rp15.383.038.000.000

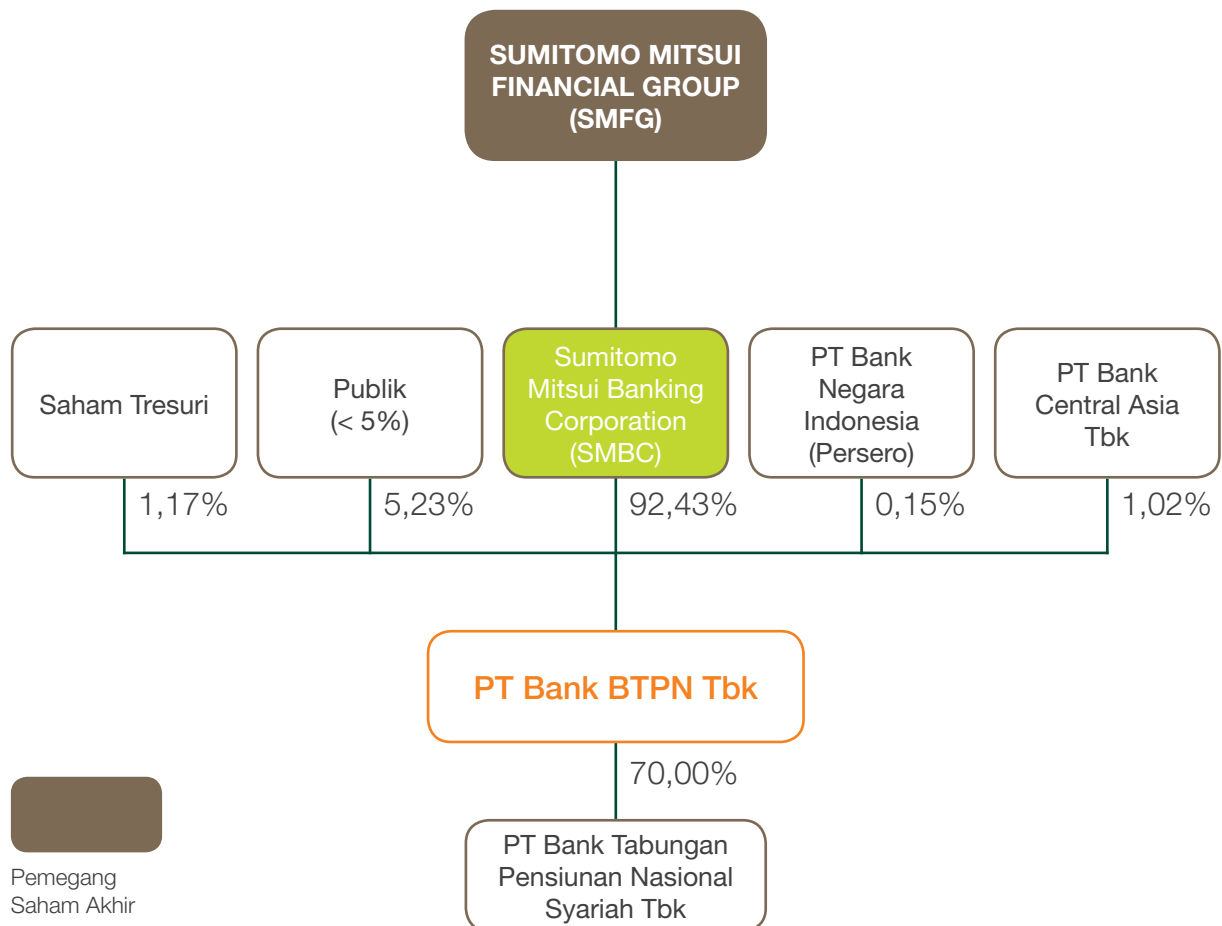
Status Operasi

Masih Beroperasi

Kantor Cabang

Keterangan	Jumlah
Kantor Pusat Operasional	1
Kantor Wilayah Non Operasional	9
Kantor Cabang	61
• Universal	55
• Sinaya	6
Kantor Cabang Pembantu	283
• Universal	249
• Sinaya	33
• Jenius	1
Kantor Fungsional	2
• Kantor Fungsional Operasional	1
• Kantor Fungsional Non Operasional	1
Kantor Kas	-
Payment Point	164
Total Jaringan Kantor	520
ATM	215
TCR	2
Total Jaringan Kantor & ATM	737

Struktur Kepemilikan



Posisi per 31 Desember 2019

Kronologi Pencatatan Saham

Tanggal Pencatatan	Aksi Korporasi	Nominal per Saham (Rp)	Harga Pelaksanaan	Tambahan Saham	Jumlah Saham
12 Maret 2008	Penawaran Perdana	100	2.850	267.960.220	943.936.190
10 Desember 2010	Penawaran Umum dengan <i>Right Issue</i> I	100	-	188.787.238	1.132.723.428
28 Maret 2011	<i>Stock Split</i>	20	-	-	5.663.617.140
14 Maret 2012	Penambahan Saham dari Konversi Utang IFC	20	-	176.670.117	5.840.287.257
23 Mei 2016	Pembelian Saham Kembali (<i>Buy Back</i>)	20	-	-	5.840.287.257
1 Februari 2019	Total Tambahan dari pemegang saham SMBCI	20	-	2.308.629.612	8.148.916.869
12 Agustus 2019	Pengalihan Saham SMBC	20	-	12.000	8.148.928.869
31 Desember 2019	MESOP 2015:		-	-	
	Tahap I	20	-	-	
	Tahap II	20	-	-	
	Tahap III	20	-	-	
	Tahap IV	20	-	-	
	Tahap V	20	-	-	
31 Desember 2019	ESOP 2016:				
	Tahap I	20	2.617	10.670.600	
	Tahap II	20	2.617	1.112.900	
	Tahap III	20	2.617	12.000	
	Tahap IV	20	-	-	

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Nama Obligasi	Tanggal Penerbitan	Nilai Pokok	Bunga (%)	Mata Uang	Jatuh Tempo	Peringkat		Periode Pemeringkatan
						2019	2018	
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 Seri B	11 Juli 2016	300.000.000.000	8,00	IDR	1 Jul 2019	AAA (idn)	AAA (idn)	21 Maret 2016 - 1 Juli 2019
Medium Term Notes (MTN) II Tahun 2017 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	14 Juni 2017	1.302.000.000.000	8,25	IDR	14 Juni 2020	idAAA	idAAA	9 Mei 2017 - 14 Juni 2020
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 Seri B	18 Oktober 2017	900.000.000.000	7,50	IDR	17 Oktober 2020	AAA (idn)	AAA (idn)	26 September 2017 - 17 Oktober 2020
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 Seri A	27 November 2019	799.000.000.000	7,55	IDR	26 November 2022	AAA (idn)	-	6 September 2019 - 26 November 2022
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 Seri B	27 November 2019	201.000.000.000	7,75	IDR	26 November 2024	AAA (idn)	-	6 September 2019 - 26 November 2024

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal

AUDITOR INDEPENDEN

Kantor Akuntan Publik Siddharta

Widjaja & Rekan

Wisma GKBI, Lantai 33
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210 – Indonesia
Tel. +62 21 574 2333,
+62 21 574 2888
Fax. +62 21 574 1777,
+62 21 574 2777

TRUSTEES

PT Bank Permata Tbk

Gedung WTC II, Lantai 21-30
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel. +62 21 772 89928
Fax. +62 21 772 89928

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega
Jl. Kapten P Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790 – Indonesia
Tel. +62 21 791 75000
Fax. +62 21 799 0720

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120 – Indonesia
Tel. +62 21 350 8077
Fax. +62 21 350 8078

LEMBAGA PEMERINGKAT

PT Fitch Rating Indonesia

DBS Bank Tower , Lantai 24,
Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940 – Indonesia
Tel. +62 21 2988 6800
Fax. +62 21 2988 6822

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Senayan City, Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270 – Indonesia
Tel. +62 21 7278 2380
Fax. +62 21 7278 2370

NOTARIS

Ashoya Ratam, SH, MKn

Notaris & PPAT Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Jl. Suryo No. 54
Jakarta 12180 – Indonesia
Telp. +62 21 2923 6060
Fax. +62 21 2923 6070

Informasi pada Website Perusahaan

Informasi yang termuat dalam website BTPN telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs web www.btpn.com

Informasi yang tersedia, antara lain:

PROFIL KORPORASI

- Informasi Pemegang Saham dan Pengurus Bank
- Sekilas BTPN
- Visi dan Misi
- Nilai-nilai Perusahaan
- Struktur Organisasi
- Karir

HUBUNGAN INVESTOR

- Laporan Tahunan
- Laporan Keuangan (terdiri dari Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Keuangan Tahunan)
- Ikhtisar Keuangan
- Leverage ratio & Pengungkapan Permodalan Sesuai Kerangka Basel
- Info Investor
- Komposisi Pemegang Saham dan Struktur Organisasi Grup
- Informasi RUPS
- Tata Kelola Perusahaan
- Keterbukaan Informasi
- Aksi Korporasi
- Lembaga Profesi dan Penunjang pasar Modal
- Laporan LCR NSFR



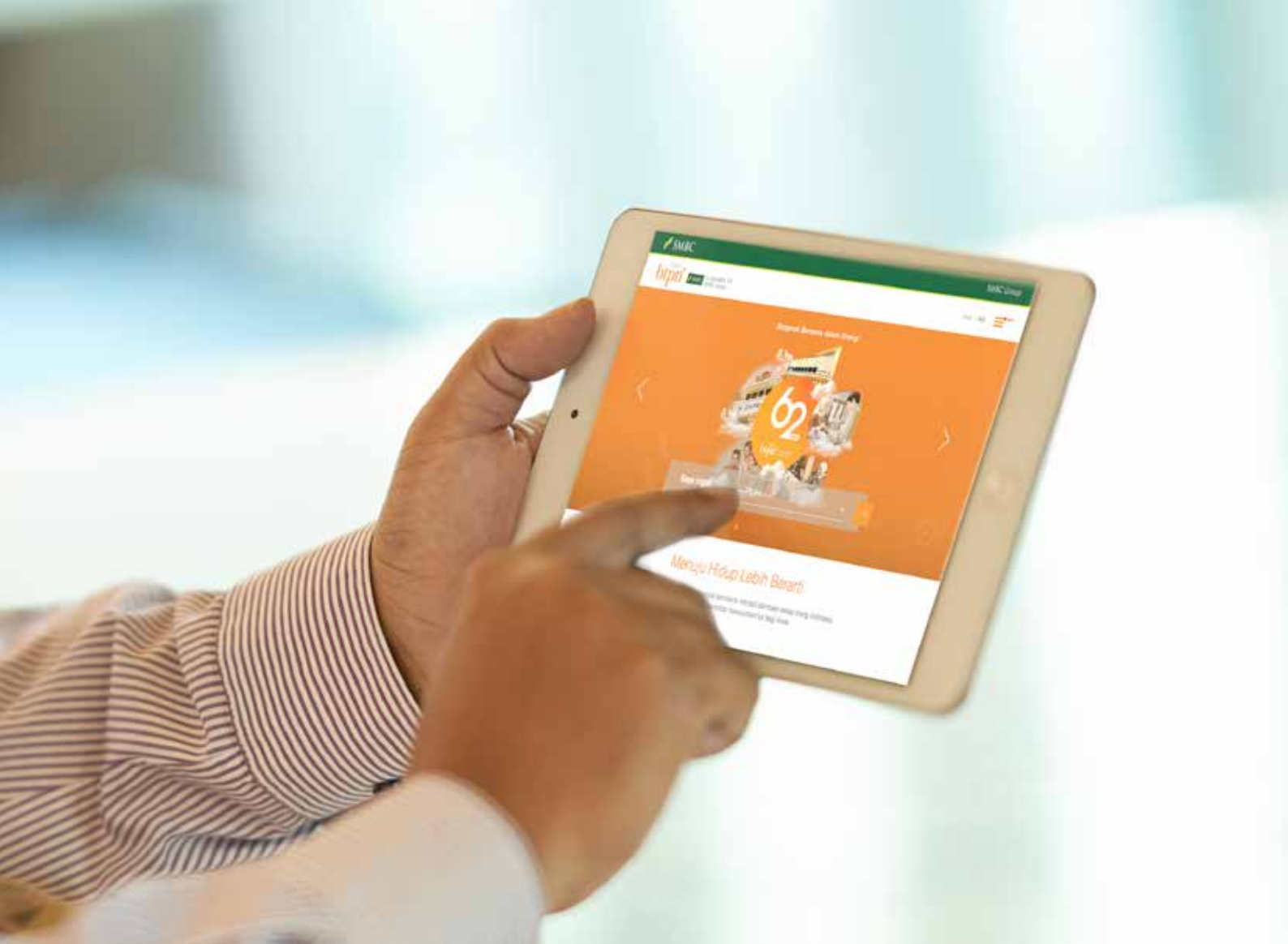
Analisa dan Pembahasan Manajemen

“

Di tengah kondisi perekonomian yang bergerak dinamis, kinerja Bank BTPN tetap tumbuh positif.

”

108	Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan
109	Perkembangan Perekonomian
110	Perkembangan Industri
112	Tinjauan Bisnis dan Operasional
113	Kinerja Bisnis Per Segmen Usaha
115	Retail Banking
116	BTPN Sinaya
117	BTPN Wow
118	Retail Lending
119	Jenius
120	Business Banking
121	Corporate Banking
123	Treasury
124	Perbankan Syariah
125	Profitabilitas Per Segmen Usaha
126	Tinjauan Kinerja Keuangan
148	Manajemen Risiko



Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan

 Rp **156,5**
Tiliun

Keuntungan bersih perbankan pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp150,0 triliun menjadi Rp156,5 triliun.

 **4,9%**

Marjin bunga bersih industri perbankan tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018, dari 5,1% menjadi 4,9%.

“

Walaupun pertumbuhan ekonomi domestik melambat, stabilitas perekonomian domestik terjaga dengan cukup baik di tengah adanya ketidakpastian dari perekonomian global.

”

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

Selama tahun 2019, perekonomian global diwarnai oleh ketidakpastian global seputar perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok (China) dan krisis geopolitik yang masih terjadi di beberapa negara dunia. Hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi dunia selama 2019 melambat menjadi tumbuh 2,9% yoy dari tahun sebelumnya tumbuh 3,6% yoy. Perselisihan tersebut juga membuat penurunan harga komoditas dan pelemahan pada perdagangan internasional. Sepanjang tahun 2019, Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 75 bps menjadi 1,50%-1,75% dari sebelumnya 2,25%-2,50%. Akan tetapi, dikarenakan adanya kesepakatan fase pertama dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok (China) pada penghujung akhir tahun 2019, optimisme terjadinya kesepakatan

tersebut membuat beberapa indikator dini global terkait indeks manufaktur, indeks pemesanan ekspor, indeks produksi, dan indeks keyakinan membaik dalam dua bulan terakhir 2019, didorong stimulus kebijakan yang ditempuh di banyak negara baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia selama 2019 tumbuh melambat menjadi 5,0% yoy dari sebelumnya 5,2% pada 2018 dikarenakan terjadinya perlambatan pertumbuhan permintaan domestik menjadi 5% yoy. Kontribusi konsumsi domestik masih bernilai paling besar dengan besaran kontribusi sebesar 56,1%. Selain itu, adanya pemilihan presiden pada 2019, turut membuat terjadinya perlambatan pertumbuhan pada investasi menjadi 2,5% yoy dari sebelumnya 6,6% yoy di 2018 dan perlambatan pertumbuhan konsumsi pemerintah menjadi 3,3% yoy dari sebelumnya 4,8% yoy di 2018. Kedua komponen berkontribusi sebesar 32,2% dan 9,1% yoy.

Selama 2019, Bank Indonesia turut memangkas tingkat suku bunga acuan domestik, *7-days reverse repo rate*, sebesar 100 bps menjadi 5% dari sebelumnya 6%. Walaupun pertumbuhan ekonomi domestik melambat, stabilitas perekonomian domestik terjaga dengan cukup baik di tengah adanya ketidakpastian dari perekonomian global. Indikator makroekonomi domestik lainnya menunjukkan perkembangan yang baik, terlihat dari terjaganya tingkat inflasi kisaran sasaran Bank Indonesia. Selain itu, nilai tukar Rupiah turut menunjukkan penguatan sebesar 3,6% yoy. Neraca pembayaran juga menunjukkan perbaikan dimana defisit neraca berjalan eksternal membaik menjadi defisit 2,7% terhadap PDB dari tahun sebelumnya defisit 3,3% terhadap PDB. Selain itu, cadangan devisa domestik meningkat menjadi USD129,2 miliar, naik USD8,5 miliar dari tahun sebelumnya.

Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi

Indikator	2019	2018	2017
Pertumbuhan PDB Nasional (% YoY)	5,0	5,2	5,1
PDB Per Kapita (USD) – Nominal	4.175	4.050	3.838
Neraca Berjalan Eksternal (% dari PDB)	(2,7)	(3,3)	(1,7)
Utang Pemerintah Pusat (% dari PDB)	30,2	30,3	28,9
Cadangan Devisa-IRFCL (USD Miliar)	129,2	120,7	130,2
Kemampuan Cadangan Devisa –(Jumlah bulan impor & utang eksternal)	7,3	7,7	8,3
Kebijakan suku bunga BI (% akhir tahun)	5,00	6,00	4,25
Indeks Harga Konsumen (% akhir tahun)	2,72	3,13	3,61
Neraca Fiskal (% dari PDB; Tahun Fiskal)	(2,2)	(1,8)	(2,5)
Peringkat S&P – Valuta Asing	BBB	BBB+	BBB-

Sumber: Riset BTPN

PERKEMBANGAN INDUSTRI

Merespons kondisi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan, Bank Indonesia sepanjang tahun 2019 telah empat kali menurunkan suku bunga acuan, *BI7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR). Jika pada Januari suku bunga masih di posisi 6,00%, maka pada Desember telah turun menjadi 5,00%.

Selain itu, Bank Indonesia juga menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) 50 basis poin. Melalui kebijakan tersebut, likuiditas bank di Tanah Air diharapkan bertambah, sehingga dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi.

Kendati demikian, BI berhasil menjaga inflasi yang sepanjang tahun 2019 di tingkat yang rendah, yaitu 2,72%.

Menurut catatan BPS, inflasi atau laju kenaikan harga itu merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan pergerakan laju kenaikan harga relatif terkendali.

Melalui kebijakan tersebut, otoritas di bidang moneter berharap kinerja industri keuangan tetap stabil, walaupun sejumlah target kinerja perbankan tetap mengalami revisi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada awalnya manargetkan pertumbuhan kredit 10-12%, kemudian merevisi menjadi 9-11%.

Target tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit tahun sebelumnya yang mencapai 11,8%. Perlambatan pertumbuhan kredit pada tahun 2019 tersebut, terutama dipicu oleh faktor eksternal, yaitu kondisi perekonomian yang

melambat, sehingga ikut menekan dunia usaha. Berdasarkan SPI per Desember 2019, realisasi pertumbuhan kredit perbankan hanya mencapai 6,1%.

Walaupun begitu, kinerja dan stabilitas perbankan secara umum masih terjaga. Data OJK menyebutkan, rasio kecukupan modal perbankan konvensional pada Desember 2019 masih 23,40%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 22,97%.

Sedangkan laba sebelum pajak per Desember 2019 tercatat Rp200,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan Desember 2018 yang Rp190,7 triliun. Padahal, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank pada periode tersebut mengalami kenaikan, yaitu menjadi 79,4% pada 2019, dari 77,9% tahun sebelumnya.

Kinerja Bank Umum Konvensional

Indikator	Hingga 31 Desember 2019	Hingga 31 Desember 2018	Hingga 31 Desember 2017
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	23,4%	23,0%	23,2%
Marjin Bunga Bersih (NIM)	4,9%	5,1%	5,3%
Rasio Kredit terhadap Simpanan (LDR)	94,4%	94,8%	90,0%
Kredit Bermasalah (NPL)	2,5%	2,4%	2,6%
Special Mention (SM)	5,1%	4,5%	4,7%
Pertumbuhan Kredit	6,1%	11,8%	8,2%
Pertumbuhan Simpanan	6,5%	6,4%	9,4%
Keuntungan Bersih Setelah pajak	Rp156,5 triliun	Rp150,0 triliun	Rp131,1 triliun

Sumber: OJK



Tinjauan Bisnis dan Operasional

 Rp **141,8**
Triliun

Total kredit yang disalurkan tahun 2019 mencapai Rp141,8 triliun, tumbuh 108% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp68,1 triliun.

 Rp **181,6**
Triliun

Total Aset Bank

“

Strategi di bidang digital banking yang sudah menjadi kekuatan Bank BTPN selama ini akan terus dikembangkan secara berkesinambungan.

”

KINERJA BISNIS PER SEGMENT USAHA

Bank BTPN membagi segmen usahanya menjadi lima lini: *Retail Banking, Business Banking, Corporate Banking, Treasury* dan Perbankan Syariah. Segmentasi ini sejalan dengan perubahan struktur organisasi Bank BTPN yang terjadi pada tahun 2019, sejak Bank melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI).

Khusus untuk bisnis perbankan Syariah, pelaksanaannya tetap dijalankan oleh anak perusahaan, PT Bank BTPN Syariah. Dengan demikian, laporan kinerja bisnis per segmen usaha yang disajikan merupakan laporan konsolidasi.

Sejak terjadinya penggabungan usaha tersebut, model bisnis Bank BTPN juga mengalami transformasi. Bisnis Retail Banking tidak lagi terkonsentrasi untuk melayani nasabah kelompok usia milenial, tetapi juga seluruh produk yang ada diarahkan memberikan layanan terbaik pada beragam segmen, termasuk eksekutif.

Inisiatif dan Strategi

Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank BTPN yang telah melakukan penggabungan usaha dengan SMBCI, secara umum mulai terjadi layanan terpadu antara bisnis di bidang korporasi dengan retail. Dengan demikian, terjadi sinergi yang kuat dan saling mendukung, sehingga layanan yang diberikan Bank kepada para nasabah menjadi lebih lengkap.

Bank BTPN terus merealisasikan inisiatif mendukung program-program prioritas pemerintah. Dengan penggabungan usaha yang sudah berjalan, kapabilitas Bank dalam



Bank BTPN berhasil menjaga rasio NPL gross yang rendah, yaitu 0,8% per akhir Desember 2019, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 1,2%.



pembiayaan proyek semakin besar, sehingga peluang yang dapat dikelola juga semakin banyak.

Bahkan Bank BTPN mampu menyediakan layanan lebih lengkap kepada para nasabah. Mengingat Bank sekarang masuk dalam jaringan global, yaitu menjadi bagian dari kelompok usaha Sumitomo Mitsui Banking Corporation Jepang yang telah beroperasi secara global, maka dapat memberikan nilai lebih dalam layanan Bank.

Strategi di bidang *digital banking* yang sudah menjadi kekuatan Bank BTPN selama ini akan terus dikembangkan secara berkesinambungan.

Pengembangan tersebut diarahkan pada perubahan dalam perilaku nasabah dalam berhubungan dengan perbankan, sehingga layanan dan produk perbankan di Bank BTPN dapat dilakukan melalui sistem digital, terutama menggunakan *smartphone*.

Dari sisi manajemen risiko, Bank BTPN tetap mempertahankan kinerja yang selama ini sudah sangat baik, khususnya di bidang pemantauan kredit bermasalah. Selain itu, Bank memastikan bahwa pengelolaan risiko akan lebih baik, mengingat Bank merupakan bagian dari grup SMBC, dimana SMBC dikategorikan sebagai *G-SIB*, maka Bank BTPN perlu melanjutkan upaya mengadopsi kepatuhan atas standar lokal dan global di samping senantiasa meningkatkan praktek-praktek kepatuhan dan manajemen risiko yang sehat serta upaya-upaya untuk meningkatkan *operational excellence* dengan didukung oleh IT dan teknologi digital.

Pencapaian Kinerja

Sampai dengan akhir Desember 2019, BTPN membukukan kinerja keuangan yang baik dari sisi rentabilitas, kualitas kredit, dan kecukupan modal. Kinerja bank banyak dipengaruhi



RASIO DANA MURAH MENINGKAT

Rasio CASA meningkat menjadi 28% pada tahun 2019 dari 13% pada tahun 2018.

oleh penurunan di portofolio *Mature Business* (dengan *yield* yang lebih tinggi) berdampak pada penurunan pendapatan dan kenaikan biaya dana seiring dengan kenaikan suku bunga acuan di tahun 2018. Sejak merger, BTPN telah memangkas jumlah dan suku bunga biaya dana yang mahal, biaya dana TD Rupiah telah turun dari 7,9% di Februari 2019 menjadi 6,5% di Desember 2019.

Penurunan suku bunga acuan turut membantu penurunan biaya dana tersebut, namun di sisi lain, aset juga mengalami penurunan suku bunga, khususnya kredit korporasi sehingga NIM Bank Konsolidasi menurun dari 11,3% menjadi 6,9% di Desember 2019. Namun demikian, Bank berhasil membukukan laba bersih setelah pajak (*net profit after tax/NPAT*) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,6 triliun pada tahun 2019 meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar

Rp1,8 triliun. Peningkatan laba bersih terutama didorong oleh lebih tingginya pencapaian *fee* dan keuntungan revaluasi dari transaksi valuta asing, sedangkan biaya operasi dan CKPN dapat dijaga dengan baik.

Sepanjang tahun 2019, total kredit yang disalurkan oleh Bank BTPN mencapai Rp141,8 triliun, tumbuh 108% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp68,1 triliun.

Peningkatan ini, terutama didorong oleh *Growing Business* (Korporasi, SME dan Komersial, Consumer Asset dan Syariah), yang memberikan kontribusi sebesar 74% dari total kredit yang disalurkan. Peningkatan pada *Growing Business* mengimbangi penurunan kredit pada *Mature Business* (Retail Lending-Pensiun dan Mikro) sebesar 10%.

Sepanjang tahun 2019 kualitas kredit dapat dijaga dengan baik. Rasio NPL *gross* mencapai 0,8%, per

akhir Desember 2019, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 1,2% dan rata-rata NPL sektor perbankan yang berada di kisaran 2,5% per Desember 2019. Sementara itu, rasio kredit Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*) BTPN mencapai 3,13% per Desember 2019 sedikit menurun dari 3,19% pada tahun sebelumnya, dan lebih rendah daripada rata-rata rasio sektor perbankan yang sebesar 5,1% per Desember 2019.

Sedangkan dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), jumlah DPK termasuk Dana Syirkah (dalam mata uang Rupiah dan valuta asing) adalah Rp86,9 triliun pada akhir Desember 2019, lebih tinggi 23% dibandingkan Desember 2018 sebesar Rp70,8 triliun. Pencapaian CASA tercatat mencapai Rp24,4 triliun lebih tinggi 173% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8,9 triliun. Rasio CASA meningkat menjadi 28% pada tahun 2019 dari 13% pada tahun 2018.



LABA BERSIH SYARIAH TUMBUH POSITIF

Di saat realisasi laba bersih segmen lain lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, segmen bisnis syariah tetap tumbuh positif.

Rasio LDR mencapai 163% pada akhir Desember 2019, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 96%. Namun, selain DPK, BTPN memiliki sumber pendanaan lainnya yang berasal dari MTN, NCD, obligasi, pinjaman bilateral dan pinjaman jangka panjang dari grup SMBC. Sementara LCR terjaga di 229,1% dan NSFR di 113,0%.

RETAIL BANKING

Hingga tahun 2019, unit bisnis Retail Banking Bank BTPN memiliki empat bisnis segmen, yaitu BTPN Sinaya, Retail Lending Business, BTPN Wow! dan Jenius. Seluruh segmen bisnis tersebut merupakan layanan lengkap Bank BTPN untuk untuk segmen ritel.

Sejak terjadi penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) per 1 Februari 2019, peluang bisnis Bank BTPN kian terbuka luas. Hal itu juga menjadi kesempatan bagi Retail Banking untuk meningkatkan peluang pasar.

Dengan demikian, kelebihan yang ada pada SMBCI, terutama pada segmen korporasi, membuka peluang masuknya segmen ritel. Kolaborasi ini merupakan kekuatan baru dalam bisnis Bank BTPN.

Kendati demikian, Bank menyadari bahwa bisnis pensiun yang merupakan portofolio pinjaman terbesar Retail Banking memberikan tantangan tersendiri, mengingat bisnis tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan maupun profitabilitas Bank. Bahkan sebelum adanya penggabungan usaha, produk pensiun merupakan tulang punggung bisnis Bank.

Mengingat Bank BTPN sebagai pioner dalam bisnis pensiun tersebut, maka upaya mempertahankannya

merupakan tantangan besar. Karena itu, Retail Banking akan tetap berusaha mempertahankannya sebagai yang terdepan. Sebab yang menjadi tantangan serius pada bisnis pensiun adalah makin banyaknya lembaga keuangan perbankan yang memberikan layanan tersebut.

Dalam kondisi seperti itu, Retail Banking menjalankan dua strategi yaitu: mempertahankan pasar yang telah ada melalui penambahan produk serta memperluas pasar ke segmen-segmen baru.

Selain itu, mengingat perkembangan bisnis digital di bidang perbankan begitu cepat, Bank BTPN khususnya Retail Banking harus terus beradaptasi dengan dua hal: perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah yang sama-sama berkembang cepat.

Berkeaan dengan dunia digital, dinamika di bidang sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Pada umumnya, pengembang digital adalah anak-anak muda yang dinamis, sehingga Bank BTPN juga harus terus menyesuaikan dengan situasi tersebut.

Terkait dengan perkembangan *financial technology*, Retail Banking tidak memandang sebagai pesaing melainkan mitra yang potensial untuk saling melengkapi dan berkolaborasi dalam menyediakan layanan yang komprehensif.

BTPN telah menjalankan serangkaian proses manajemen risiko utama yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang bertujuan untuk memperkuat penerapan manajemen risiko. Tantangan yang dihadapi oleh Bank antara lain menjaga agar tingkat kredit

bermasalah tetap rendah, selain itu, Bank juga terus meningkatkan upaya agar *cost of fund* juga rendah, sehingga kemampuan bersaing di industri semakin tinggi.

Inisiatif dan Strategi

Dalam rangka mendukung kinerja bisnis Bank BTPN, Retail Banking telah menjalankan sejumlah program dan inisiatif strategis untuk menjaga pertumbuhan yang positif secara berkesinambungan. Beberapa hal yang direalisasikan dalam mendukung kinerja Retail Banking, di antaranya:

1. Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Corporate Banking dalam rangka perluasan nasabah ritel melalui jaringan nasabah korporasi.
2. Melakukan kolaborasi dan integrasi layanan bisnis dalam Retail Banking, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan pengalaman nasabah dalam bertransaksi.
3. Meningkatkan pemanfaatan Jenius sebagai platform layanan perbankan bagi nasabah yang terintegrasi, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah, sekaligus meningkatkan kinerja Bank.
4. Melakukan diversifikasi segmen pasar untuk bisnis pensiun, sehingga daya jangkauan dan potensi perkembangan Bank makin luas.

Pencapaian Kinerja

Pada akhir Desember 2019, total dana yang dikelola dari seluruh unit bisnis Retail Banking mencapai Rp30,1 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp28,0 triliun, telah terjadi peningkatan 7,4%. Kontributor utama dari penghimpunan dana ini adalah unit BTPN Sinaya, dengan kontribusi sebesar 71,5%. Selanjutnya adalah unit Jenius dengan kontribusi sebesar 19,7%.

Dari sisi penyaluran dana Retail Banking, pada tahun 2019 mencapai Rp35,6 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp38,5 triliun, menurun 7,4%.

Kualitas kredit yang disalurkan tersebut pada umumnya sangat baik, dengan tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 0,7%, jauh di bawah industri yang sebesar 2,8%.

Fokus dan Strategi 2020

Pada tahun 2020, Retail Banking telah menyiapkan sejumlah rencana strategis untuk meningkatkan kinerja. Seluruh inisiatif strategis yang telah dijalankan pada tahun 2019, terutama berkenaan dengan kolaborasi dengan Corporate Banking akan terus berjalan. Di antara yang lainnya adalah:

1. Mengembangkan inovasi produk prioritas untuk kelompok menengah atas dengan beragam fasilitas dan manfaat serta produk-produk baru lainnya.
2. Menyiapkan ekosistem untuk mendukung pengembangan produk-produk ritel Bank BTPN, sehingga nasabah semakin banyak mendapatkan manfaat.
3. Memperkuat dan meningkatkan kolaborasi perencanaan dan layanan dalam antarproduk dalam Retail Banking.
4. Meningkatkan sinergi dengan pihak-pihak potensial, antara lain dalam pengembangan teknologi di bidang perbankan.
5. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, terutama dalam rangka akselerasi pengembangan *digital banking*.

BTPN Sinaya

BTPN Sinaya merupakan unit bisnis dalam segmen Retail Banking yang melayani segment *affluent* dengan produk simpanan dan investasi yang

disampaikan secara pribadi melalui 64 kantor cabang yang tersebar di 34 kota serta *platform digital* Sinaya Online dan Sinaya Mobile yang memberikan keleluasaan nasabah dalam bertransaksi kapan saja dan di mana saja.

Produk Deposito masih menjadi produk utama yang menjadi pilihan nasabah, dengan dua produk unggulan Deposito Berjangka dan Deposito Flexi. Deposito Berjangka memberikan kenyamanan pilihan jangka waktu penempatan dana, sedangkan Deposito Flexi memberikan fleksibilitas pemilihan waktu pencairan dana tanpa dikenakan biaya pinalti.

BTPN Sinaya juga menyediakan produk tabungan yang memberikan imbal hasil optimal serta mendukung kebutuhan transaksi nasabah perorangan melalui produk Taseto Premium dan Tabungan Pasti, serta Taseto Bisnis untuk nasabah perusahaan.

Selain produk tabungan BTPN Sinaya juga menawarkan produk Giro yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan bisnis nasabah perorangan maupun perusahaan.

Selain produk-produk tabungan dan deposito yang disediakan oleh BTPN Sinaya, nasabah Sinaya juga dapat menggunakan produk perbankan digital BTPN yaitu Jenius, yang dapat diakses melalui aplikasi mobile dan memiliki fitur yang beragam.

Di tahun 2019, BTPN Sinaya berhasil mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp21,5 triliun, turun sebesar 7,4% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp23,2 triliun. Dana pihak ketiga tersebut berhasil dikumpulkan dengan *cost of fund* yang turun secara signifikan.

BTPN Sinaya berhasil membukukan *fee income* sebesar Rp119 miliar di tahun 2019, naik 10% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp108 miliar. Adapun peningkatan *fee income* ini adalah berasal dari produk *Bancassurance* dan reksadana, yang mengalami peningkatan sebesar 25,6% di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

BTPN Sinaya menawarkan produk *Bancassurance*, bekerjasama dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Sementara untuk produk investasi, BTPN Sinaya bekerja sama dengan empat manajer investasi terkemuka yaitu PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Schroders Investment Management Indonesia, PT Ashmore Asset Management Indonesia, dan PT Maybank Asset Management.

Pencapaian positif BTPN Sinaya dari sisi *cost of fund* dan *fee based income* didukung oleh sejumlah program strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2019. Di antaranya adalah:

1. Melakukan *cross-selling* dengan produk-produk ritel lainnya, yaitu Jenius baik untuk nasabah baru maupun nasabah existing.
2. Meluncurkan 4 produk reksadana terproteksi bagi nasabah dengan imbal hasil yang menarik.
3. Meluncurkan produk reksadana dari partner manajer investasi untuk melengkapi deretan produk investasi yang sudah ada, untuk lebih dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam yaitu 2 reksadana saham dalam mata uang USD (Mandiri Global Sharia Equity Dollar dan Schroder Global Sharia Equity Fund) dan 2 reksadana pendapatan tetap (Mandiri Investasi Obligasi Nasional dan Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara)

4. Meluncurkan Guardia Wealth Link dalam mata uang IDR dan USD, yaitu produk *unit link* premi tunggal dengan manfaat asuransi jiwa yang menyediakan pilihan tipe investasi yang menarik dengan proses pembelian yang mudah.
5. Menggiatkan penawaran produk valuta asing kepada nasabah melalui produk tabungan, produk *bancassurance* maupun investasi
6. Penambahan 9 cabang devisa sehingga total menjadi 40 cabang devisa

Fokus dan Strategi 2020

Dengan lisensi Layanan Nasabah Prima yang diperoleh di tahun 2019, maka di tahun 2020, BTPN Sinaya akan lebih memfokuskan pada pengembangan produk dan layanan yang dapat memberikan solusi Wealth Management yang lebih terintegrasi kepada Nasabah, dengan dukungan teknologi digital sebagai UVP utamanya.

BTPN Wow

BTPN Wow! merupakan layanan perbankan dengan memanfaatkan teknologi telepon genggam dan didukung jasa Agen Laku Pandai yang berperan sebagai perpanjangan tangan Bank BTPN, yakni agen BTPN Wow!

Bank BTPN merupakan bank umum yang dipilih oleh pemerintah untuk menjadi salah satu pemberi layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif), yaitu program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani industri perbankan.

Karena itu, BTPN Wow! diakui sebagai pionir dari implementasi inisiatif Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang diperkenalkan oleh OJK. Di dunia internasional, BTPN dan BTPN Wow! merupakan salah satu di antara 50 perusahaan di seluruh dunia dengan prestasi dalam mengatasi permasalahan sosial, berdasarkan majalah Fortune edisi September 2016.

Melalui BTPN Wow! transaksi perbankan seperti pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai hanya membutuhkan telepon genggam dan dapat dilakukan di Agen Laku Pandai Bank BTPN. Transaksi dilakukan melalui jaringan selular yang cepat dengan proses gampang, murah, dan aman.

BTPN Wow! juga menyediakan layanan pembayaran untuk telepon, asuransi, listrik, air, TV berlangganan, internet, belanja online. Sedangkan untuk pembelian, dapat digunakan untuk membeli pulsa, token listrik dan tiket. Selain itu, pengiriman uang antarbank juga dapat dilakukan.

Pada tahun 2019, BTPN Wow! meluncurkan produk baru, yaitu supply chain loan. Produk ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada pedagang-pedagang kecil. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, Bank bekerja sama dengan mitra, di antaranya dengan perusahaan telekomunikasi.

Melalui produk tersebut, kios-kios pulsa mendapatkan pinjaman dari BTPN Wow! yang dananya langsung diberikan kepada perusahaan telekomunikasi agar mereka dapat membeli pulsa lebih banyak. Model pembayaran pinjaman tersebut dilakukan oleh kios-kios tersebut secara mingguan.

Secara keseluruhan, sejak diluncurkan pada Maret 2015 hingga akhir tahun buku 2019, BTPN Wow! telah menyediakan layanan perbankan bagi 4,7 juta nasabah. Jumlah tersebut meningkat 18,1% dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 4 juta nasabah.

Sedangkan jumlah agen mencapai 195 ribu yang berasal dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 156 ribu agen, telah terjadi penambahan 25,1%. Peningkatan jumlah agen ini bertujuan untuk perluasan akses dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

Fokus dan Strategi 2020

- Pemberian akses pinjaman bagi agen-agen BTPN Wow! untuk memberikan dana guna memperbesar usaha yang mereka miliki yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan mereka guna meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik
- Peningkatan *fee-based income* dengan menambah jumlah kemitraan yang dilakukan dengan berbagai perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan agen BTPN Wow! demi meningkatkan hubungan dengan agen dan nasabah serta menaikkan penghasilan agen yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup agen menjadi lebih baik

- Perluasan akses likuiditas untuk agen-agen BTPN Wow! dengan cara bekerjasama dengan partner yang memiliki *outlet-outlet* yang tersebar di banyak lokasi yang dekat dengan lokasi agen BTPN Wow! sehingga kebutuhan akan *cash-in* dan *cash-out* dapat terpenuhi tanpa mengganggu bisnis yang mereka lakukan.

Retail Lending

Segmen bisnis ini merupakan layanan jasa perbankan bagi para pensiunan, seperti pembayaran manfaat pensiun melalui produk tabungan. Sedangkan untuk pinjaman, tidak terbatas pada pensiunan tetapi juga untuk karyawan yang masih aktif, dengan tenor sesuai kebutuhan.

Hingga berakhirnya tahun buku 2019, total portofolio kredit yang dikelola bisnis Retail Lending mencapai Rp35,6 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp38,5 triliun, turun 7,4%. Hal ini disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan di bisnis pensiun, berdampak kepada menurunnya jumlah akuisisi nasabah baru, yang mengakibatkan portofolio kredit pensiun mengalami penurunan.

Untuk tabungan dari bisnis Retail Lending, yang dikelola Bank mencapai Rp2,50 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp2,64 triliun, turun 5,3%.

Dari sisi kualitas pinjaman, sepanjang tahun 2019 tingkat kredit bermasalahnya (NPL) sebesar 0,7%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,6%.

Kinerja Retail Lending Business didukung oleh sejumlah program strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2019. Di antaranya adalah:

1. Ekspansi bisnis kredit BTPN secara nasional dengan menawarkan fitur produk kredit yang lebih kompetitif bekerja sama dengan perusahaan swasta.
2. Fokus dalam melakukan akuisisi nasabah dari Asabri, TNI/Polri dan Dana Pensiun yang dimiliki oleh BUMN.
3. Melakukan digitalisasi proses kredit untuk memudahkan dan mempercepat proses pengajuan hingga pencairan kredit yang dapat dilakukan di rumah nasabah
4. Menggunakan *telemarketing* untuk meningkatkan produktivitas penjualan kredit
5. Mengembangkan jaringan *payment point* bekerja sama dengan PT Pos Indonesia yang meningkatkan level layanan kepada nasabah BTPN penerima pensiun

Fokus dan Strategi 2020

1. Memperluas model akuisisi, penagihan dan bentuk kerja sama baru dengan pihak ketiga.
2. Tetap memfokuskan bisnis ke pegawai BUMN, anggota TNI/POLRI, pegawai swasta, dan lainnya yang sesuai kriteria.
3. Melakukan pengembangan produk pinjaman, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif dan tabungan untuk meningkatkan layanan terhadap nasabah, termasuk pula melakukan sinergi dengan segmen korporasi dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah korporasi.
4. Meningkatkan layanan melalui perluasan jaringan dan bentuk kerja sama baru dengan pihak ketiga untuk pembayaran manfaat pensiun, pemberian fasilitas kartu ATM berbasis chip dan penerbitan kartu ATM dengan desain khusus serta menjadikan kantor cabang *Retail Lending - Pensiun* sebagai *one-stop-service* untuk hal-hal yang terkait dengan pensiunan.

Jenius

Jenius merupakan *platform* perbankan digital BTPN yang dapat diakses melalui aplikasi *mobile* yang diunduh ke *smartphone*. Melalui layanan Jenius yang memiliki fitur beragam, nasabah dapat mengelola kehidupan keuangannya secara digital, yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jenius menawarkan pengalaman perbankan yang revolusioner bagi nasabah.

Pengembangan dan perbaikan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Jenius dilakukan dengan melibatkan pengguna dan calon pengguna Jenius agar fitur yang diluncurkan selalu relevan sesuai dengan kebutuhan nasabah sejalan dengan aspirasi Jenius untuk menjadi solusi *life finance* bagi nasabah dalam mengatur keuangannya. Di Jenius, proses ini dikenal dengan konsep *co-creation*, yaitu suatu kegiatan pertemuan secara berkala untuk mendapatkan masukan (*input*) dari pengguna dan calon pengguna layanan Jenius.

Jenius telah dilengkapi dengan teknologi keamanan mutakhir yang selalu dikinikani secara berkala dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan preferensi nasabah. Nasabah Jenius dapat juga melakukan transaksi melalui kartu debit yang diterima secara internasional, serta mengelolanya melalui *mobile app* Jenius. Di samping melalui aplikasi, Jenius juga dapat diakses melalui website Jenius di <https://2secure.jenius.co.id> atau melalui Jenius Keyboard, yaitu salah satu fitur yang diluncurkan di 2019.

Produk Jenius memberikan dukungan besar bagi Bank BTPN untuk mendapatkan dana murah. Pada awalnya, Jenius yang memang

pertama kali diluncurkan pada Agustus 2016 dikembangkan dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana. Namun sejak 2019, Jenius mulai memperkenalkan produk pinjaman.

Dari sisi pendanaan, hingga akhir tahun buku 2019, dana pihak ketiga juga terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah nasabah Jenius, meningkat lebih dari 3x dibandingkan tahun 2018.

Sedangkan untuk pinjaman dilakukan melalui pemberian limit kredit yang dapat dicairkan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan dibayarkan kembali dalam bentuk cicilan tetap dalam jangka waktu pinjaman hingga 36 bulan.

Di tahun 2019, Jenius meneruskan fase *scale-up*, dengan meningkatnya aktivitas pemasaran yang menjangkau delapan kota baru yaitu Malang, Medan, Makassar, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Bali dan Cirebon, di mana Jenius hadir dengan layanan *offline* dan titik-titik penjualan. Di samping itu, akselerasi proses inovasi seperti layanan *Video Call KYC* yang diluncurkan di bulan April 2019 semakin memperluas jangkauan pasar Jenius ke seluruh Indonesia (*nationwide*). Sebagai hasilnya, di akhir tahun 2019, sudah ada lebih dari dua juta pengguna terdaftar dengan peningkatan saldo rata-rata dan aktivitas nasabah yang cukup signifikan.

Kinerja Jenius yang terus berkembang pada tahun 2019 didukung oleh sejumlah program strategis yang telah dijalankan. Di antaranya adalah:

1. Berinovasi dalam teknologi yang dimiliki sehingga dapat memberikan layanan dan pengalaman perbankan yang lebih

baik terhadap nasabah dalam proses pembukaan rekening melalui *Video Call KYC* nasabah Jenius.

2. Berinovasi dalam menyediakan produk perbankan konvensional di versi digital yaitu *Foreign Currency Account* yang dapat diaktivasi dan di-link dengan kartu debit Jenius melalui *mobile application* Jenius, termasuk dalam melakukan pembelian dan penjualan mata uang asing. Saat ini sudah ada tujuh mata uang asing yang tersedia yaitu USD, JPY, SGD, AUD, HKD, EUR, dan GBP.
3. Berinovasi dalam meluncurkan Jenius Keyboard sehingga nasabah dapat mengakses aplikasi Jenius langsung dari *keyboard smartphone* nasabah, yang saat ini tersedia khusus untuk *smartphone* berbasis Android
4. Melakukan *cross-selling* dengan unit bisnis lain, seperti BTPN Sinaya dan BTPN Wow! yang juga memasarkan Jenius.
5. Menjadikan Jenius sebagai *platform* untuk seluruh bisnis Bank BTPN, sehingga dapat dimanfaatkan untuk semua produk.
6. Kerjasama pembayaran gaji karyawan (*payroll*) nasabah korporasi menggunakan rekening Jenius.

Di sepanjang tahun 2019, Jenius telah meraih berbagai penghargaan dari beragam industri. Di antaranya, penghargaan IDC Digital Transformation Awards 2019, kategori Omni-Experience Innovator untuk solusi inovatif Jenius Foreign Currency Account, Top 20 Indonesia Rising Star Brands dari majalah SWA, First winner of Financial Category dan The Best Use of Brand Website in Content Marketing

Implementation dari Indonesia Content Marketing Awards 2019 dan Indonesia's PR Program of The Year 2019 dari Marketing MIX.

Fokus dan Strategi 2020

- Terus mengembangkan fitur fitur inovatif yang relevan dalam membantu nasabah mengelola keuangannya sehingga Jenius menjadi solusi *life finance* bagi nasabah.
- Meningkatkan laju pertumbuhan jumlah nasabah melalui pengembangan fitur *Video Call KYC* yang ada, sehingga dapat menjangkau nasabah baru yang melek digital di seluruh Indonesia, usaha ini akan terus dilakukan di tahun 2020 melalui *online* dan *offline channel*.
- Mengembangkan ekosistem melalui *partnership* baik dengan mitra *offline* dan *online* yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. *Partnership* dengan mitra *offline* juga dilakukan guna mendukung program pemerintah QRIS yang diluncurkan di awal tahun 2020 untuk meningkatkan *digital payment ecosystem* di Indonesia.
- Meningkatkan aktivitas dan *engagement* nasabah untuk mendorong pengguna aktif

BUSINESS BANKING

Unit *Business Banking* Bank BTPN memiliki tiga segmen bisnis, yaitu BTPN Mitra Usaha Rakyat dan BTPN Mitra Bisnis (SME & Komersial) dan Consumer Asset. Ketiga segmen tersebut memberikan layanan yang lengkap, dari kredit hingga layanan perbankan dan pelatihan.

Kinerja masing-masing segmentasi dijelaskan pada rincian di bawah ini:

A. BTPN Mitra Usaha Rakyat

Bank BTPN telah menjadi mitra usaha mikro dan kecil di Indonesia melalui bisnis BTPN Mitra Usaha Rakyat yang diperkenalkan sejak 2008. Produk ini tidak hanya memberikan pinjaman dana kepada nasabah, tetapi juga memberikan pelatihan peningkatan kualitas usaha agar dapat tumbuh secara berkualitas.

Hingga akhir tahun 2018, total pinjaman yang disalurkan melalui BTPN Mitra Usaha Rakyat mencapai Rp3,0 triliun kepada lebih dari 28.000 nasabah. Seiring dengan kondisi perekonomian yang penuh tantangan dan dalam rangka menjaga kualitas portofolio kredit maka BTPN melakukan transformasi bisnis model Mitra Usaha Rakyat sehingga berdampak pada penurunan kinerja sebesar 47,1% menjadi Rp1,6 triliun di akhir tahun 2019.

Dari segi kualitas, total kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2019 sebesar 2,8%. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 3,1%.

Kinerja BTPN Mitra Usaha Rakyat sepanjang tahun 2019 didukung oleh sejumlah program strategis yang telah dijalankan antara lain melalui optimalisasi jaringan distribusi dan implementasi *pilot* proyek transformasi bisnis.

Fokus dan Strategi 2020

Pada tahun 2020, BTPN Mitra Usaha Rakyat akan melanjutkan proses transformasi untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan pengusaha mikro. Pertumbuhan bisnis mikro di BTPN akan dilakukan dengan mempertimbangkan proses pembelajaran dari bisnis mikro yang lalu dan proses kredit yang lebih hati-hati untuk mempertimbangkan aspek risiko yang terukur oleh Bank. Perkembangan bisnis mikro juga akan menyesuaikan dengan proses konsolidasi jaringan kantor yang secara konsisten sebagai salah satu langkah efisiensi yang dilakukan oleh bank.

Diperlukan waktu untuk melakukan transformasi bisnis Mikro terutama dalam hal pelatihan dan penyesuaian proses bisnis yang baru dan hal ini akan menyebabkan pertumbuhan kredit mikro di BTPN Mitra Usaha Rakyat akan menyesuaikan.

B. BTPN Mitra Bisnis (SME & Komersial)

BTPN Mitra Bisnis menyediakan layanan keuangan berupa paket “3 in 1”, yang terdiri dari: produk-produk kredit dan layanan transaksi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, layanan akses dan informasi pasar serta akses ke jaringan rantai pasok, program peningkatan kapasitas bagi nasabah.

Unit usaha ini memberikan layanan bagi segmen usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk usaha mikro yang sedang tumbuh menjadi UMK skala kecil. Nasabah Mitra Bisnis terutama terdiri dari usaha-usaha keluarga yang sebagian besar bergerak di bidang perdagangan, sedangkan usaha lainnya bergerak di bidang jasa dan manufaktur yang telah beroperasi minimal 3 tahun.

Pada tahun 2019, total rekening nasabah yang dilayani oleh BTPN Mitra Bisnis mencapai lebih dari 3.100 nasabah. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang lebih dari 3.000 nasabah, meningkat 3%.

Dari jumlah nasabah tersebut, pembiayaan yang disalurkan hingga akhir tahun 2019 mencapai Rp13,9 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,9 triliun.

Kinerja BTPN Mitra Bisnis sepanjang tahun 2019 didukung oleh sejumlah program strategis yang telah dijalankan. Di antaranya adalah:

1. Kolaborasi internal melalui skema *supply chain*.
2. Bekerja sama melalui *cross-selling* dengan Jenius untuk pendanaan dan akun *payroll*
3. Layanan transaksi melalui platform digital “AksesBisnis@BTPN”.

Fokus dan Strategi 2020

1. Fokus pada pengembangan layanan yang ada melalui optimalisasi jaringan kantor beserta infrastrukturnya. Selain itu, BTPN Mitra Bisnis akan menjajaki kemungkinan inisiasi digital SME.
2. Mengembangkan *electronic channel* ke nasabah sehingga dapat menawarkan layanan yang lebih fleksibel guna membantu nasabah dalam menjalankan operasional usahanya.
3. Menambah program Daya khusus untuk nasabah dengan tujuan pemberdayaan melalui konsultasi pengembangan bisnis, perluasan jaringan bisnis dan penyediaan info bisnis untuk mendukung kesuksesan usaha nasabah.

4. Untuk memperluas pelayanan pada nasabah, akan dikembangkan skema *supply-chain financing*, termasuk kerja sama dengan bank lain. Selain itu, akan dilakukan kerja sama strategis untuk mendapatkan nasabah potensial baik untuk simpanan maupun pinjaman.

C. Consumer Asset

Penyaluran kredit kepada *end-user*, perusahaan atau lembaga pembiayaan baik melalui skema pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung hingga akhir tahun 2019 mencapai Rp5,6 triliun. Jumlah tersebut sama dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam penyaluran kredit BTPN tetap berpedoman pada asas-asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

Program strategis lainnya yang dilakukan di 2019 adalah:

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan perusahaan afiliasi.
2. Pengembangan aplikasi guna meningkatkan kualitas serta kecepatan layanan pada nasabah.

Fokus dan Strategi 2020

Pengembangan bisnis Consumer asset akan dilakukan melalui pembiayaan kepada *end-user*, perusahaan atau lembaga pembiayaan baik melalui skema pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung.

CORPORATE BANKING

Unit bisnis Corporate Banking melayani segmen korporasi dengan dua segmentasi, yaitu korporasi Jepang dan non-Jepang, yang terdiri dari perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, perusahaan multinasional,

BUMN, *Financial Institution*, *Non-Bank Financial Institution*, maupun perusahaan korporasi lokal yang besar.

Penggabungan usaha yang melahirkan Bank BTPN akan menyediakan layanan terbaik dan solusi menyeluruh kepada nasabah korporasi, dengan memanfaatkan produk keuangan lengkap dan jaringan internasional Sumitomo Mitsui Finansial Group (SMFG), dan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Posisi utama dalam pembiayaan terstruktur dan pinjaman sindikasi, akan terus dipertahankan, terutama untuk mendukung pertumbuhan negara dengan layanan yang dapat mendukung pertumbuhan berbagai sektor bisnis. Selain itu, hingga tahun 2019, secara umum, layanan yang diberikan berupa pembiayaan, penghimpunan dana, serta pengelolaan kas.

Di bidang pembiayaan, Bank BTPN tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja untuk jangka pendek, tetapi juga pembiayaan investasi yang berjangka menengah dan panjang. Pembiayaan tersebut tidak hanya dalam denominasi Rupiah, tetapi juga mata uang lain seperti Dolar Amerika Serikat maupun Yen Jepang. Selain itu, Bank juga memberikan pembiayaan terstruktur dengan proteksi yang diberikan oleh Lembaga Kredit Ekspor (*Export Kredit Agency/ECA*) internasional yang telah terakreditasi.

Di bidang penghimpunan dana korporasi, Bank BTPN menyediakan layanan Corporate Account dalam bentuk Rekening Giro. Layanan Rekening Giro ini dapat diakses melalui teknologi digital, sehingga tidak membatasi ruang dan waktu nasabah.

Untuk memudahkan transaksi, Bank BTPN menyediakan rekening dengan 12 mata uang. Sedangkan bagi keperluan penarikan dana, ada tiga jenis mata uang yang disediakan, yaitu Rupiah, Dolar Amerika Serikat dan Yen Jepang.

Bank BTPN juga melayani keperluan remitansi, mengingat Bank merupakan anggota kliring nasional dan anggota sistem SWIFT dengan beragam jaringan mitra bank koresponden di dalam dan luar negeri. Aktivitas terkait remitansi dapat dilakukan melalui *internet banking* maupun manual.

Fasilitas lain yang disediakan oleh Corporate Banking adalah pembiayaan *trade finance* (termasuk ekspor dan impor) dan pembayaran pajak ekspor dan impor. Dukungan terhadap kinerja operasional nasabah juga diberikan melalui pengelolaan kas atau *cash management*.

Pencapaian Kinerja

Dana yang dihimpun oleh Corporate Banking mencapai Rp46,8 triliun yang meliputi dana dari nasabah korporasi Jepang dan non-Jepang.

Hingga berakhirnya tahun buku 2019, total pembiayaan untuk pinjaman modal kerja yang jangka pendek mencapai Rp48,1 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan investasi, yang berhasil disalurkan mencapai Rp27,6 triliun .

BTPN aktif berpartisipasi dalam pembiayaan program pemerintah, terkait proyek infrastruktur dan industri pendukung, ketahanan energi, dan ketahanan pangan yang melibatkan BUMN dan berbagai perusahaan besar lainnya dengan pola *project finance* dan agen sindikasi, sebagai MLAB/*Coordinating MLAB (Mandated Lead Arranger Bookrunner)*.

Inisiatif dan Strategi

Perkembangan positif pada kinerja Corporate Banking didukung oleh sejumlah program dan strategi yang telah direalisasikan pada tahun 2019.

Di antaranya adalah:

1. Merger telah memberikan kekuatan bagi Bank BTPN, terutama karena ada integrasi antara layanan korporasi, ritel dan digital.
2. Layanan korporasi mendapatkan dukungan digital yang selama ini menjadi kekuatan segmen ritel dari BTPN.
3. Menggunakan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada klien dan mitra.

Fokus dan Strategi 2020

Pada tahun depan, Corporate Banking telah menyiapkan sejumlah program strategis guna mendukung pertumbuhan kinerja positif yang berkesinambungan. Di antaranya adalah:

1. Terus memperluas basis nasabah perusahaan-perusahaan Jepang dan Indonesia di segmen Corporate Banking dan mengimplementasikan rencana perluasan basis nasabah ke segment Commercial Banking dengan menargetkan *suppliers* dan pembeli/distributor dari nasabah-nasabah perusahaan Jepang dan perusahaan korporasi lokal yang besar lainnya.
2. Memperluas jaringan layanan Korporasi ke kota-kota besar, daerah industri dan daerah strategis lainnya dengan mempergunakan cabang BTPN yang telah tersedia dan/atau mendirikan kantor baru.

3. Mempertahankan posisi Top-3 Bank dalam peringkat *Project Finance and Syndication League Table* di Indonesia yang sekaligus dapat meningkatkan potensi pendapatan jasa (*scheme fee*) lebih tinggi dari *distribution/sell down*.
4. Meningkatkan transaksi *fee based* di antaranya melalui transaksi *Trade, Supply Chain Financing, Structured Finance (Project Finance, Sindikasi dan ECA)*, dan produk derivatif.
5. Perluasan aktivitas keagenan (*Facility Agent, Security Agent, Account Bank*) untuk mendukung aktivitas sindikasi BTPN.
6. Berkolaborasi dengan unit Retail Banking dan Business Banking untuk meningkatkan layanan perbankan menyeluruh dari produk korporasi sampai dengan produk ritel yang menunjang aktivitas *cross sell* bagi BTPN (*payroll, payroll loan, supply chain financing*).
7. Pengembangan dan peningkatan jumlah staf lokal dengan kemampuan berbahasa Jepang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
8. Mengembangkan kapabilitas jasa *cash management* dan *collection* (misalnya dengan Autodebit Function, ATM *Integration & Virtual Account* dll.)
9. Mempersiapkan implementasi *e-banking* SMAR&TS dengan solusi lokal.

Produk & Jasa Corporate Banking:

- Produk Lindung Nilai: IRS/CCS dan transaksi valas
- Produk pinjaman:
 - Pinjaman Bilateral dan Sindikasi (IDR, USD dan, JPY)
 - Project/Structured Finance
 - ECA

• **Produk Manajemen Kas:**

- Rekening Koran, Rekening Tabungan dan Deposito
- Pembayaran (SKN, RTGS, pembayaran gaji, telegraphic transfer)
- E-Tax Payment (pajak non-import dan import)
- Collections (ACH, RTGS, Payroll, Wires, Cheque/Cash Deposit, Giro)
- Virtual Account
- Internet Banking/Host to Host/ API
- Liquidity Management (domestic cash polling)

• **Produk Trade: Domestik/Ekspor dan Impor:**

- Penerbitan SKBDN/LC Impor
- Pembiayaan Dokumen Impor/ Forfaiting
- Export LC Advising/ Confirmation/Export Bill Collection
- Documentary Collection (DP, DA)
- Pembiayaan Transaksi Trade (Pinjaman Trade/Trust Receipt)
- Structured Trade Finance
- Pembelian Receivable/Surat Berharga
- Penerbitan Bank Garansi/ SBLC
- Pembiayaan Supply Chain

TREASURY

Unit bisnis Treasury Bank BTPN melayani kebutuhan nasabah dalam produk-produk Tresuri seperti produk valuta asing dan derivatif. Treasury senantiasa melakukan optimalisasi portofolio HQLA pada tingkat yang efisien dan proaktif dalam mengelola likuiditas Bank. Treasury juga berperan aktif dalam melakukan manajemen risiko dan pemenuhan rasio-rasio regulatori. Dengan selesainya proses merger di tahun 2019, layanan yang

diberikan kepada nasabah semakin beragam yaitu dengan produk-produk *Treasury* seperti transaksi jual beli valuta asing (Tod, Tom, Spot) transaksi menggunakan uang kertas/bank notes mata uang asing, transaksi derivatif (*Forward, Swap, Interest Rate Swap* dan *Cross Currency Swap*) Layanan valuta asing yang ditawarkan juga mencakup produk simpanan (seperti: giro, tabungan dan deposito valuta asing). Selain itu, *Treasury* turut mendukung pengembangan produk Digital Banking - Jenius dengan memberikan mata uang dunia utama terhadap mata uang domestik, termasuk USD, AUD, EUR, GBP, JPY, HKD, SGD. Terhitung sejak aksi korporasi merger pada tahun 2019, kinerja *Treasury* berhasil mencetak kenaikan yang cukup signifikan sebesar 216,1% yoy dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp2.19 triliun.

Fokus dan Strategi 2020

1. Treasury Bank BTPN senantiasa akan selalu mengutamakan standar profesionalisme dalam tata cara pelaksanaan transaksi produk Treasury dari proses di *front office* hingga di *back office* sesuai dengan kebijakan, *Standard Operating Procedure* (SOP) serta petunjuk teknis pelaksanaannya.
2. Treasury Bank BTPN terus melakukan kegiatan pengenalan pasar dan produk melalui kegiatan seminar ekonomi serta *customer gathering* secara berkala.

- Treasury Bank BTPN terus mengembangkan diversifikasi produk-produk Treasury sesuai perkembangan pasar dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi lindung nilai dan pengelolaan keuangan.
- Treasury Bank BTPN terus berpartisipasi aktif dalam pendalaman pasar uang di Indonesia, serta terus menjalin hubungan kerjasama antar institusi untuk meningkatkan aktivitas pasar uang.

PERBANKAN SYARIAH

Bisnis perbankan syariah Bank BTPN dijalankan oleh entitas usaha tersendiri, yaitu anak usaha yang bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah). Perusahaan ini telah menjadi perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018.

Segmen yang menjadi fokus BTPN Syariah adalah nasabah yang termasuk dalam kelompok prasejahtera produktif, yang selama ini digolongkan *unbankable*. Karena itulah, BTPN Syariah membangun sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan tersebut agar layanan perbankan dapat menyentuh mereka. Membangun sistem kerja, memanfaatkan *digital technology* dan melaksanakan aturan laku pandai (*Branchless Banking*) agar dapat memberikan layanan bank yang baik dan professional kepada para nasabah meskipun dari kalangan pra-sejahtera produktif.

Membangun produk dan ekosistem bagi nasabah agar dapat mengembangkan usaha bisnis yang sehat dan berkelanjutan agar dapat memberikan penghasilan yang memadai dan berdampak bagi lingkungannya selain bagi keluarga nasabah.

Layanan yang diberikan oleh BTPN Syariah termasuk empat perilaku penting: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS). Ini dilakukan oleh para karyawan lulusan SMA yang terlatih dan biasa disebut Melati Putih Bangsa.

BTPN Syariah juga mengukur perubahan dampak sosial nasabah setiap tahun, di antaranya tingkat penurunan konsentrasi Nasabah di bawah garis kemiskinan, peningkatan rasio Nasabah yang semua anaknya bersekolah, penurunan rasio Nasabah yang menggunakan kayu bakar/arang/briket dan penurunan rasio Nasabah tanpa jamban/hanya cemplung. Metode dan alat survei yang dipilih merupakan alat yang berlaku secara internasional, memiliki kredibilitas yang mapan, mudah dalam pelaksanaannya yaitu PPI (*Poverty Probability Index*) dari IPA (*Inovative for Poverty Action*).

Hasil pengukuran tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

Parameter*	2018	2019	Indikator
Penurunan konsentrasi Nasabah <i>Below Poverty Line</i>	-16,7%	-17,6%	↓
Peningkatan rasio Nasabah yang semua Anaknya bersekolah	5,9%	6,2%	↑
Penurunan rasio Nasabah yang menggunakan kayu bakar, arang briket	-45,1%	-47,1%	↓
Penurunan rasio Nasabah tanpa jamban/hanya memiliki jamban cemplung	-36,5%	-37,6%	↓

* Nasabah yang sama, pengukuran pembiayaan pertama vs pembayaran ke-3

Pencapaian Kinerja

Saat ini BTPN Syariah telah memiliki 25 kantor cabang dan 44 kantor fungsional untuk melayani 3,7 Juta nasabah, di mana jumlah ini meningkat 9% dari tahun 2018 sebesar 3,4 juta nasabah.

Pada tahun 2019, BTPN Syariah berhasil membukukan pembiayaan sebesar Rp9,0 triliun tumbuh 23,7% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp7,3 triliun. Pertumbuhan pembiayaan yang sehat disertai dengan kualitas pembiayaan yang baik, BTPN Syariah berhasil menjaga NPF di posisi 1,36% dibandingkan tahun sebelumnya di posisi 1,39%.

Pertumbuhan positif ini turut ditopang oleh digitalisasi di setiap lini proses yang dimulai sejak 2018 silam, baik di kantor pusat maupun dilapangan. Bank juga telah merancang proses automasi yang mudah untuk mendukung produktivitas para tim di lapangan dalam melayani nasabah. Selain itu, digitalisasi juga mampu mengoptimalkan fungsi jaringan kantor.

Pada tahun 2019 seluruh Tim di lapangan telah menggunakan aplikasi untuk melayani nasabah prasejahtera produktif. Selain itu tim juga dilengkapi

dengan aplikasi pelatihan internal dan aplikasi layanan pendukung lainnya. Dengan dukungan digitalisasi tersebut maka proses layanan kepada nasabah menjadi lebih cepat dan tepat.

Tercapainya pertumbuhan pembiayaan bank yang positif sepanjang tahun 2019 juga didukung tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai dengan rasio kecukupan modal sebesar 44,6% atau jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan regulator, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berada di posisi sehat sebesar 95,3%.

Adapun Dana Pihak Ketiga juga tumbuh sebesar 24,1%, mencapai Rp9,4 triliun dibanding posisi tahun 2018 sebesar Rp7,6 triliun. Kenaikan total aset BTPN Syariah menembus 27,8% dari Rp12,0 triliun pada akhir tahun 2019 menjadi Rp15,4 triliun.

Fokus dan Strategi 2020

1. Membangun *Operational Excellence*.
2. Meningkatkan Aset Bank.
3. Mengeksplorasi *fee-based income*.
4. Memperkuat Kemampuan Organisasi.

PROFITABILITAS PER SEGMENT USAHA

Tabel Kinerja Profitabilitas Per Segmen Usaha

(RpJuta)

Indikator	Retail Banking			Corporate Banking		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	3.449.047	3.542.223	3.396.547	1.519.206	-	-
Pendapatan/(Beban) Operasional Bersih	(2.097.508)	(1.931.192)	(2.519.023)	(37.965)	-	-
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.345.483	1.610.745	874.022	1.481.241	-	-
Laba/(Rugi Bersih)	1.001.118	1.155.818	639.065	1.102.128	-	-

Indikator	MSME			Funding & Treasury		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	785.909	1.042.545	1.423.902	1.359.837	1.936.046	2.154.536
Pendapatan/(Beban) Operasional Bersih	(1.303.368)	(1.309.200)	(1.249.440)	(1.523.703)	(1.635.215)	(2.136.320)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(517.556)	(266.778)	173.701	(168.495)	276.442	(19.576)
Laba/(Rugi Bersih)	(385.091)	(191.431)	127.006	(125.371)	198.366	(14.314)

Indikator	Perbankan Syariah		
	2019	2018	2017
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	3.933.765	3.079.594	2.905.253
Pendapatan/(Beban) Operasional Bersih	(2.052.701)	(1.777.045)	(1.996.992)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.878.249	1.299.019	908.698
Laba/(Rugi Bersih)	1.399.634	965.311	670.183



Tinjauan Kinerja Keuangan

 **23 %**

Total simpanan nasabah yang dibukukan oleh Bank hingga berakhirnya tahun buku 2019 sebesar Rp86,9 triliun, naik 23% dibandingkan dengan tahun 2018 yang Rp70,8 triliun.



108 %

Jumlah kredit yang berhasil disalurkan pada tahun buku 2019 meningkat 108% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp141,8 triliun.

“

Pada tahun 2019, Bank BTPN berhasil membukukan laba bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,6 triliun, lebih tinggi 40% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp1,8 triliun.

”

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Tahun 2019 adalah tahun pertama BTPN bergabung dengan SMBCI sejak merger di tanggal 1 Februari 2019. Setelah merger, Bank BTPN menjadi bank yang lebih solid dengan bertambahnya unit usaha korporasi dan dukungan dari pemegang saham utama yaitu SMBC. Unit usaha korporasi melayani perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, perusahaan multinasional dan perusahaan lokal besar lainnya. Bisnis korporasi juga secara aktif terlibat dalam pembiayaan terstruktur (*Structured Financing*) dan pemberian pinjaman sindikasi (*Syndicated Lending*) di pasar Indonesia. Dengan dukungan global dari SMBC dan kemampuan perbankan digital, Bank BTPN memiliki kemampuan dan peluang untuk memberikan pembiayaan kepada industri yang lebih luas dan pelayanan yang lebih fokus pada kebutuhan nasabah.

Fokus Bank di tahun pertama setelah penggabungan adalah proses konsolidasi dan stabilisasi di samping juga mengembangkan usahanya. Proses konsolidasi dan stabilisasi dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kapabilitas dan bisnis inti yang ada dengan fokus utama, yaitu memastikan keberhasilan integrasi proses-proses kunci yang telah diidentifikasi saat pengkajian merger, mengimplementasikan inisiatif-inisiatif “stabilisasi” dan merencanakan inisiatif-inisiatif “sinergi” untuk tahapan berikutnya, serta melibatkan secara aktif semua *stakeholder* kunci yang terdiri dari: nasabah, karyawan, mitra bisnis, regulator dan pemegang saham.

KINERJA BANK TAHUN 2019

Kinerja Bank tahun 2019 mencerminkan dinamika usaha Bank pasca merger baik di unit-unit usaha yang berasal dari Bank BTPN sebelum merger maupun pertumbuhan di bisnis korporasi yang berasal dari Bank SMBCI sebelum merger.

Bank BTPN membukukan kinerja yang baik dari sisi pertumbuhan usaha, maupun di kinerja keuangan antara lain rentabilitas, kualitas kredit, dan kecukupan modal.

Secara keseluruhan, jumlah kredit yang diberikan tumbuh sebesar 108% YoY (kredit korporasi tumbuh sebesar 16% dibandingkan kredit korporasi SMBCI 2018 sebelum merger, UKM 8%, TUR sebesar 24%), sedangkan jumlah kredit unit bisnis Purna Bakti Bank yang sudah *mature* mengalami penurunan sebesar 7%, demikian juga dengan pembiayaan mikro karena sejak beberapa tahun lalu Bank melakukan *shifting* ke segmen UKM. Dengan dinamika ini, terdapat pergeseran *yield* Bank dari segmen usaha dengan tingkat *yield* yang lebih tinggi di segmen usaha *retail lending* ke korporasi.

Dinamika lain yang mempengaruhi kinerja keuangan Bank di tahun 2019 adalah meningkatnya suku bunga acuan sejak paruh kedua tahun 2018, meningkatnya jumlah pendanaan yang dibentuk oleh Bank untuk memastikan kecukupan dana untuk mendukung merger serta upaya-upaya yang dilakukan pasca merger.

Bank senantiasa menjaga rasio likuiditas dan pendanaan dengan baik dan melakukan optimalisasi jumlah dana pihak ketiga. Seiring dengan penurunan suku bunga, Bank

melakukan penyesuaian suku bunga dan memangkas sejumlah deposito berjangka yang berbiaya tinggi (*high cost Time Deposit*). Suku bunga biaya dana deposito berjangka Rupiah dari 7,9% di Februari 2019 menjadi 6,5% di Desember 2019. Selain itu, Bank melakukan berbagai upaya dan inisiatif untuk meningkatkan jumlah CASA yang menghasilkan pertumbuhan *Current account saving account* (CASA) sebesar 173% dan meningkatnya rasio CASA dari 13% di 2018 menjadi 28% di 2019. Rasio likuiditas atau *liquidity coverage ratio* (LCR) dan rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) berada di tingkat yang sehat di 229,14% dan 113,04%.

Penurunan suku bunga acuan di kuartal ketiga turut membantu penurunan biaya dana pihak ketiga Bank, namun di sisi lain, *yield* dari kredit yang diberikan juga mengalami penurunan suku bunga,

Pasca merger Bank memiliki fasilitas pendanaan jangka panjang dari SMBC sebesar USD2,8 miliar (per tanggal 31 Desember 2019, pemakaian adalah sejumlah USD2,2 miliar, jumlah limit yang tersedia sebesar USD0,6 miliar). Selain itu, Bank juga memperoleh pendanaan jangka panjang dari IFC sebesar USD150 juta (pemakaian per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD50 juta). Bank juga memperoleh pendanaan bilateral dari beberapa institusi lainnya.

Di samping MTN, NCD, dan obligasi yang telah dimiliki Bank, di kuartal 4 tahun 2019 Bank meluncurkan obligasi sebesar IDR1T untuk diversifikasi pendanaan dan sebagai bagian dari manajemen risiko suku bunga (*interest rate in the banking book*). Bank sebelumnya secara berkelanjutan menerbitkan obligasi, dan penerbitan obligasi di kuartal 4 tersebut merupakan Penerbitan Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap I tahun 2019.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Berbagai dinamika di atas membentuk NIM Bank di tahun 2019. Dengan bergabungnya unit bisnis korporasi (di mana kredit yang diberikan dari unit bisnis ini terdiri dari mata uang Rupiah dan valuta asing) dan yang secara wajar mempunyai *yield* yang lebih rendah dari unit-unit bisnis bank BTPN sebelum merger (ritel dan UKM), dinamika pertumbuhan di masing-masing unit bisnis, perubahan suku bunga acuan serta perubahan struktur dan biaya pendanaan menjelaskan pergerakan *net interest margin* (NIM) Bank dari tahun lalu sebesar 11,27% menjadi 6,92% di tahun 2019 .

Dari sisi rentabilitas, Bank berhasil membukukan laba bersih yang baik. Pencapaian ini terutama didorong oleh upaya manajemen margin yang baik, perolehan *fee* dan keuntungan revaluasi dari transaksi valuta asing terutama dari unit bisnis korporasi. Biaya operasi dapat dijaga dengan baik dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) stabil.

Di sisi permodalan, Bank dapat memastikan kecukupan modal setelah memperhitungkan dampak dari PSAK 71. Bank melakukan persiapan penerapan PSAK 71 sejak bulan Desember 2017, simulasi disampaikan kepada manajemen sebagai bagian

dari update informasi terkait dengan *progress* dari tim *project* yang terdiri dari unit kerja Manajemen Risiko, Keuangan dan unit bisnis terkait secara berkala. Pada bulan Desember 2019 Bank telah memiliki estimasi nilai dampak penerapan PSAK 71 sebagai saldo awal CKPN menurut PSAK 71 dapat diserap pada pos laba ditahan.

Catatan:

Perlu kami sampaikan bahwa laba/rugi bulan Januari 2019 Bank SMBCI tidak menjadi komponen laba/rugi Bank BTPN di tahun 2019 (sebab porsi laba SMBCI bulan Januari 2019 ini menjadi bagian dari laba ditahan Bank BTPN sebagai bagian dari merger).

NERACA KEUANGAN

ASET

Per akhir tahun 2019, total aset yang dibukukan oleh Bank BTPN mencapai Rp181,6 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp101,3 triliun, telah terjadi peningkatan sebesar 79%. Hal itu terutama disebabkan oleh proses merger dengan SMBC Indonesia dan pertumbuhan kredit unit-unit bisnis Bank.

Tabel Perkembangan Aset

(RpJuta)

Uraian	2019	2018 ^{*)}	2017 ^{*)}
Kas	2.299.062	1.838.136	1.496.785
Giro pada Bank Indonesia	8.987.079	5.248.644	5.098.341
Giro pada bank-bank lain	1.056.904	841.464	487.942
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8.839.876	11.720.619	8.489.491
Efek-efek	10.654.624	6.806.407	6.337.831
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.591.672	2.495.409
Pinjaman yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah	141.760.183	68.136.780	65.351.837
Aset tetap – Net	1.893.746	1.786.727	1.660.120
Aset tak berwujud - Net	1.068.542	940.830	769.062
Aset lain-lain	5.071.369	2.429.945	2.854.775
Total Aset	181.631.385	101.341.224	95.041.593

*) Informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2019 telah disajikan kembali untuk akun beban dibayar dimuka asuransi kredit, beban asuransi kredit dan saldo laba, yang disebabkan oleh revisi atas perhitungan biaya asuransi kredit pensiun dan proses rekonsiliasi atas beban dibayar dimuka asuransi kredit pensiun. Untuk laba rugi tahun 2017 tidak disajikan kembali.

Posisi kas Bank BTPN pada tahun 2019 mencapai Rp2,3 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,8 triliun, mengalami peningkatan 25%.

Giro pada Bank Indonesia mengalami kenaikan 71%, sehingga menjadi Rp9,0 triliun. Hal ini sudah sejalan dengan kenaikan pendanaan dari pihak ketiga yang meningkat sebesar 23% meskipun terjadi penurunan yang berasal dari perubahan kebijakan dari Bank Sentral terkait dengan giro wajib minimum yang harus dipenuhi oleh Bank.

Aset Keuangan

Aset keuangan Bank BTPN terdiri atas giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, pinjaman yang diberikan dan penyertaan. Sebagian besar aset keuangan tersebut berupa pinjaman yang diberikan senilai Rp141,8 triliun atau memiliki porsi 82% dari total aset keuangan.

Hingga berakhirnya tahun buku 2019, aset keuangan yang dimiliki oleh Bank BTPN senilai Rp173,9 triliun, naik dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp94,3 triliun. Perubahan tersebut disebabkan oleh proses merger dengan SMBC Indonesia.

Efek-efek pada tahun 2019 nilainya meningkat menjadi Rp10,6 triliun atau naik 57% dibandingkan tahun 2018. Sebagian besar penambahan tersebut terjadi karena proses merger dengan SMBC Indonesia.

Penyaluran Kredit

Jumlah kredit yang berhasil disalurkan pada tahun buku 2019 adalah sebesar Rp141,8 triliun. Dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp68,1 triliun, terjadi kenaikan 108%. Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut ditopang oleh pembiayaan untuk segmen korporasi yang porsinya mencapai 53% dari total penyaluran kredit.

Segmen usaha yang mendapatkan penyaluran pembiayaan pada tahun 2019 adalah korporasi yaitu mencapai Rp75,7 triliun. Pembiayaan tersebut terutama berasal dari portofolio korporasi yang diperoleh melalui proses merger dengan SMBCI Indonesia.

Segmen usaha Bank terbagi menjadi dua, yaitu *Growing Business* dan *Mature Business*. *Growing Business* merupakan bisnis penyaluran kredit yang masih akan berkembang secara berkesinambungan, terdiri dari bisnis korporasi, kredit usaha kecil dan menengah, pembiayaan konsumen, serta pembiayaan Syariah. Sedangkan *Mature Business* merupakan bisnis penyaluran kredit yang sudah stagnan dan mengalami *run down*.

Selama tahun 2019, *Growing Business* di luar kredit korporasi mengalami pertumbuhan, terutama berasal dari Pembiayaan Syariah yang bertumbuh sebesar 24% dan Kredit UKM yang bertumbuh sebesar 8%. Sedangkan *Mature Business* telah mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan tahun 2018, di mana penyumbang terbesar berasal dari Kredit Pensiun.

Tabel Kredit Berdasarkan Segmen

(RpJuta)

Segmen	2019	2018	2017
Growing Business			
Korporasi	75.713.860	-	-
Usaha Kecil dan Menengah	13.883.980	12.898.289	11.570.531
Pembiayaan Konsumen	5.561.484	5.634.680	2.158.649
Pembiayaan/Piutang Syariah	8.999.574	7.277.162	6.053.273
Lain-Lain	378.871	823.006	690.858
Mature Business			
Pensiun	35.611.265	38.459.840	39.418.969
Mikro	1.611.149	3.043.802	5.459.556
Jumlah	141.760.183	68.136.780	65.351.837

Tinjauan Kinerja Keuangan

Sedangkan berdasarkan penggunaan, porsi terbesar penyaluran kredit adalah untuk modal kerja, yaitu senilai Rp72,6 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang Rp23,2 triliun, tumbuh 213%. Demikian pula dengan kredit investasi senilai Rp30,1 triliun, naik sebesar 830%. Kenaikan kredit modal kerja dan investasi ini terutama berasal dari portofolio korporasi.

Sementara untuk pemanfaatan lainnya, seperti kredit konsumsi, nilainya Rp39,1 triliun, turun 6% dibandingkan tahun 2018.

Tabel Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

(RpJuta)

Penggunaan	2019	2018	2017
Modal Kerja	72.622.684	23.208.258	20.456.936
Investasi	30.084.752	3.234.863	4.146.948
Konsumsi	39.052.746	41.693.660	40.747.953
Jumlah	141.760.183	68.136.780	65.351.837

Dari sisi kualitas, tingkat kredit bermasalah bersih Bank pada tahun 2019 sebesar 0,4%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang 0,5%. Kondisi tersebut jauh di bawah rata-rata industri perbankan, sehingga pencapaian Bank sangat bagus.

Upaya Bank dalam menjaga rasio kredit bermasalah tersebut merupakan hasil dari pengembangan atas penerapan manajemen risiko yang terus dilakukan, baik dari aspek pengembangan kerangka kerja, pembaharuan kebijakan dan prosedur, serta memastikan modal Bank dapat mengakomodasi risiko kredit yang mungkin timbul dari strategi bisnis yang dilakukan. Selain itu, manajemen risiko juga memastikan bahwa tingkat risiko sesuai dengan kemampuan Bank dalam menyerap risiko.

Tabel Kredit berdasarkan Kolektibilitas

(RpJuta, kecuali dinyatakan lain)

Penggunaan	2019	2018	2017
Lancar	136.164.728	65.838.753	62.819.951
Dalam Perhatian Khusus	4.442.850	1.453.471	1.942.103
Total Kredit Tidak Bermasalah	140.607.578	67.292.224	64.762.054
Kurang Lancar	326.913	193.589	220.369
Diragukan	280.541	281.207	188.739
Macet	545.151	369.760	180.675
NPL	1.152.605	844.556	589.783
Total Kredit	141.760.183	68.136.780	65.351.837
NPL-Kotor	0,8%	1,2%	0,9%
NPL-Bersih	0,4%	0,5%	0,4%
LLP/NPL	127,3%	134,3%	134,6%

LIABILITAS

Total liabilitas perusahaan pada tahun 2019 sebesar Rp150,2 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp82,6 triliun, mengalami kenaikan 82%. Kenaikan terutama disebabkan oleh proses merger dengan SMBC Indonesia, di mana salah satu komponennya adalah pinjaman dalam mata uang asing dari SMBC Singapura untuk mendukung penyaluran kredit korporasi dalam mata uang asing.

Tabel Perkembangan Liabilitas

(RpJuta)

Uraian	2019	2018	2017
Simpanan Nasabah	79.388.815	64.851.852	62.670.025
Dana Syirkah Temporer	7.550.664	5.992.860	5.248.048
Simpanan dari Bank-bank Lain	11.633.474	14.394	822.584
Efek-efek yang diterbitkan	3.190.628	1.197.442	2.543.401
Pinjaman Diterima	38.047.455	8.442.765	5.208.640
Lain-lain	10.348.421	2.055.581	1.796.355
Total Liabilitas	150.159.457	82.554.894	78.289.053

Simpanan Nasabah

Total simpanan nasabah yang dibukukan oleh Bank hingga berakhirnya tahun buku 2019 sebesar Rp86,9 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang Rp70,8 triliun, mengalami kenaikan 23%.

Sebagian besar simpanan nasabah tersebut dalam bentuk deposito berjangka, dengan porsi 72% dari total simpanan nasabah di Bank. Rasio CASA telah mengalami peningkatan, yaitu dari 13% di tahun 2018 menjadi sebesar 28% di tahun 2019.

Rincian Simpanan Nasabah (termasuk Dana Syirkah Temporer)

(RpJuta)

Uraian	2019	2018	2017
Giro	14.374.226	1.118.905	623.352
Tabungan	10.060.583	7.843.220	7.313.507
Deposito	62.504.670	61.882.587	59.981.214
Jumlah	86.939.479	70.844.712	67.918.073

Dari sisi mata uang, sebagian besar simpanan dalam denominasi rupiah, yaitu mencapai Rp74,9 triliun atau 86% dari total simpanan. Sedangkan dalam bentuk valuta asing mencapai Rp12,1 triliun atau dengan porsi 14%.

Simpanan Nasabah Berdasarkan Mata Uang (termasuk Dana Syirkah Temporer)

(RpJuta)

Uraian	2019	2018	2017
Rupiah	74.867.803	66.620.481	63.077.548
Valuta Asing	12.071.676	4.224.231	4.840.525
Jumlah	86.939.479	70.844.712	67.918.073

Pendanaan Jangka Panjang

Pendanaan jangka panjang, antara lain melalui penerbitan surat berharga (berupa obligasi dan MTN) dan pinjaman yang diterima (berupa pinjaman bilateral dan pinjaman dari SMBC Singapura). Upaya ini bertujuan untuk diversifikasi sumber pendanaan di samping juga untuk mengurangi risiko terjadinya *maturity mismatch* antara aset dengan liabilitas Bank. Pada tahun 2019, total pendanaan jangka panjang tercatat Rp41,2 triliun, naik 328% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama berasal dari pinjaman jangka panjang dari SMBC Singapura sebagai hasil dari proses merger dengan SMBCI Indonesia.

Pada bulan November 2019, Bank menerbitkan Obligasi PUB IV tahap I tahun 2019 sebesar Rp1 triliun sehingga surat Berharga bersaldo Rp3,2 triliun pada akhir Desember 2019. Dibandingkan posisi akhir bulan Desember 2018 yang berjumlah Rp1,2 triliun, saldo surat berharga yang diterbitkan mengalami peningkatan sebesar 166%.

Tinjauan Kinerja Keuangan

EKUITAS

Hingga berakhirnya tahun buku 2019, total ekuitas Bank BTPN sebesar Rp31,5 triliun, yang terdiri atas modal saham, tambahan modal disetor, cadangan revaluasi aset tetap, dan lain-lain. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp18,8 triliun, terjadi kenaikan 68% yang disebabkan oleh proses merger dengan SMBCI Indonesia, di mana terjadi kenaikan pada modal disetor sebesar Rp9,7 triliun di samping terjadi kenaikan pada saldo laba ditahan.

Tabel Perkembangan Ekuitas

(RpJuta)

Uraian	2019	2018 ^{*)}	2017 ^{*)}
Modal saham	162.979	117.033	116.806
Tambahan modal disetor	11.158.702	1.458.886	1.429.385
Cadangan revaluasi aset tetap	801.553	801.553	724.449
Cadangan pembayaran berbasis saham	244.012	281.748	254.496
Cadangan nilai wajar - bersih	12.176	3.527	12.875
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	-	-	-
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(24.267)	(24.267)	-
Saldo laba (dicadangkan & tidak dicadangkan)	17.775.292	15.228.584	13.805.629
Saham treasuri	(262.404)	(262.404)	(262.404)
Kepentingan non-pengendali	1.603.885	1.181.670	671.304
Total Ekuitas	31.471.928	18.786.330	16.752.540

^{*)} Informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2019 telah disajikan kembali untuk akun beban dibayar dimuka asuransi kredit, beban asuransi kredit dan saldo laba, yang disebabkan oleh revisi atas perhitungan biaya asuransi kredit pensiun dan proses rekonsiliasi atas beban dibayar dimuka asuransi kredit *pension*. Untuk laba rugi tahun 2017 tidak disajikan kembali.

KINERJA LABA RUGI

Hingga berakhirnya tahun buku 2019, Bank BTPN berhasil membukukan laba bersih setelah pajak (*net profit after tax/NPAT*) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,6 triliun, lebih tinggi 40% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp1,8 triliun. Pencapaian tersebut didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga bersih serta pendapatan transaksi valuta asing dan keuntungan revaluasi.

Tabel Perkembangan Laba-Rugi

(RpJuta)

Keterangan	2019	2018 ^{*)}	2017 ^{*)}
Pendapatan bunga	19.084.410	14.126.651	14.046.062
Beban Bunga	(8.036.646)	(4.526.243)	(4.524.452)
Pendapatan Bunga Bersih	11.047.764	9.600.408	9.521.610
Pendapatan Operasional Lainnya	1.560.509	600.139	469.537
Beban Operasional Lainnya	(8.575.754)	(7.252.791)	(6.915.102)
Laba bersih tahun berjalan	2.992.418	2.128.064	-
Laba Tahun Berjalan – Sebelum Pajak	4.018.922	2.919.428	1.936.845
Laba Bersih (net profit after tax/NPAT) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.572.528	1.838.471	1.220.886

^{*)} Informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2019 telah disajikan kembali untuk akun beban dibayar dimuka asuransi kredit, beban asuransi kredit dan saldo laba, yang disebabkan oleh revisi atas perhitungan biaya asuransi kredit pensiun dan proses rekonsiliasi atas beban dibayar dimuka asuransi kredit *pension*. Untuk laba rugi tahun 2017 tidak disajikan kembali.

Kinerja Bunga Bersih

Dari sisi pendapatan bunga, Bank berhasil membukukan sebesar Rp19,1 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14,1 triliun, terjadi kenaikan 35%. Perubahan ini, selain disebabkan oleh proses merger dengan SMBCI Indonesia yang terjadi pada bulan Februari 2019, meningkatnya volume kredit yang diberikan, juga dikontribusikan oleh lebih tingginya suku bunga acuan pada semester pertama tahun 2019.

Sedangkan beban bunga Bank sebesar Rp8,0 triliun, naik 78% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,5 triliun. Peningkatan beban bunga yang melampaui peningkatan pendapatan bunga banyak dipengaruhi oleh kenaikan biaya dana terutama pada semester pertama tahun 2019, karena kenaikan suku bunga acuan di tahun 2018, penambahan jumlah dana lebih yang dipelihara dalam rangka merger dan kompetisi suku bunga di pasar. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih Bank pada tahun 2019 sebesar Rp11,0 triliun.

Kinerja Laba Tahun Berjalan

Bank juga membukukan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp1,6 triliun, naik 160% dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp600,1 miliar. Kenaikan pendapatan ini terutama dikontribusikan oleh keuntungan transaksi *spot* dan derivatif bersih dan revaluasi, di mana transaksi dalam mata uang asing mengalami peningkatan setelah proses merger dengan SMBCI Indonesia.

Sedangkan beban operasional lainnya mencapai Rp8,6 triliun, naik 18% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp7,3 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban tenaga kerja seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja setelah proses merger dengan SMBCI Indonesia ditambah oleh kenaikan beban operasional yang berasal dari investasi *digital platform* produk Jenius dan IT.

Dengan demikian, laba sebelum pajak Bank pada tahun 2019 sebesar Rp4,0 triliun. Dibandingkan tahun 2018 yang Rp2,9 triliun, terjadi kenaikan sekitar Rp1,1 triliun

ARUS KAS

Bank BTPN membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun 2019 sebesar Rp19,8 triliun, turun 2% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp20,4 triliun.

Tabel Perkembangan Arus Kas

(RpJuta)

Uraian	2019	2018	2017
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(11.970.920)	4.585.807	1.125.968
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	11.301.087	(573.678)	(1.375.982)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	122.307	1.505.543	981.941
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(35.026)	(10.878)	703
(Penurunan) kenaikan bersih kas dan setara kas	(547.526)	5.517.672	731.927
Saldo kas dan setara kas awal tahun	20.424.211	14.917.417	14.184.787
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	19.841.659	20.424.211	14.917.417

Arus Kas untuk Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2019 mengalami kontraksi Rp12,0 triliun, menurun 361% dibandingkan tahun 2018 yang memperoleh Rp4,6 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo simpanan nasabah sejalan dengan upaya Bank untuk menyesuaikan jumlah dan komposisi pendanaan sebagaimana telah dijalankan di bagian terdahulu.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp11,3 triliun, meningkat 2.070% dibandingkan tahun 2018 yang minus sebesar Rp573,7 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh pengalihan kas dan setara kas sehubungan dengan penggabungan usaha.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp122,3 miliar, turun 92% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp1,5 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan pinjaman yang diterima.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Bank BTPN memiliki tingkat likuiditas dan solvabilitas yang baik. Hal ini tercermin pada kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo secara tepat waktu, baik terhadap pembayaran pokok utang maupun beban bunganya.

Dalam hal kemampuan Bank dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang juga telah dinilai sangat baik sebagaimana disampaikan oleh lembaga pemeringkat eksternal. PT Fitch Ratings Indonesia mempertahankan Peringkat Nasional untuk jangka panjang dan jangka pendek masing-masing AAA(idn), Outlook Stabil dan F1+(idn). Sementara, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) memberikan peringkat perusahaan idAAA (Triple A, Outlook Stabil).

Kolektibilitas Kredit

Bank BTPN senantiasa menjaga kualitas aset produktif agar kinerja usaha Bank yang berkualitas dapat berkesinambungan. Hal itu, antara lain ditunjukkan melalui tingkat kolektibilitas kredit seperti disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Perkembangan Kolektibilitas Kredit

(RpJuta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2019	2018	2017
Belum jatuh tempo	136.164.728	65.838.753	62.819.951
Tunggakan 1-90 hari	4.442.850	1.453.471	1.942.103
Tunggakan >90 hari	1.152.605	844.556	589.783
Jumlah kredit yang menunggak	5.595.455	2.298.027	2.531.886
Jumlah kredit yang diberikan – kotor	141.760.183	68.136.780	65.351.837
% Jumlah tunggakan terhadap jumlah kredit yang diberikan – kotor	3,95%	3,37%	3,87 %

Pada tahun 2019, jumlah tunggakan pada kredit yang diberikan oleh BTPN– kotor sebesar Rp5,6 triliun dengan persentase terhadap total kredit sebesar 3,95%. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,37% disebabkan oleh penambahan portofolio kredit di tahun 2019. BTPN terus melakukan upaya dalam hal pengendalian risiko kredit sehingga tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan tetap terjaga.

Sementara itu, kualitas kredit juga dapat dilihat dari tingkat NPL, per 31 Desember 2019 rasio NPL-gross sebesar 0,81% rasio NPL-net sebesar 0,43%, membaik dibandingkan tahun 2018 masing-masing sebesar 1,24% dan 0,51%.

SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, seluruh bank umum wajib memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Publikasi ini, antara lain untuk memberikan kejelasan dan memudahkan nasabah dalam menimbang manfaat, biaya dan risiko kredit yang ditawarkan. Selain itu, SBDK juga merupakan upaya peningkatan tata kelola perusahaan yang baik serta mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan.

Bank mengelompokkan SBDK berdasarkan segmentasi kredit menjadi 4 kelompok, yaitu Korporasi, Ritel, Mikro, dan Konsumsi. Rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (*Prime Lending Rate*) BANK BTPN Periode: 31 Desember 2019

(efektif % per tahun)

	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (<i>Prime Lending Rate</i>) Berdasarkan Segmen Kredit				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	7,09%	11,28%	16,01%	-	13,21%

STRUKTUR MODAL

Dasar dan Kebijakan Struktur Modal

Bank BTPN terus mempertahankan kecukupan modalnya untuk mendukung pertumbuhan usaha dan melindungi Bank dari gejolak pasar. Dalam mengelola permodalannya, Bank terus menjaga keseimbangan antara efisiensi modal dan tingkat pengembalian investasi pemegang saham, dengan menjaga tersedianya modal tambahan yang mencukupi untuk menutupi potensi risiko yang dihadapi.

Sejalan dengan implementasi modal Basel II, Bank telah menyampaikan laporan kepada OJK tentang proses yang dilakukan untuk menetapkan kecukupan modal Bank (ICAAP), yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Bank juga terus memastikan tersedianya modal yang cukup sejalan dengan profil risikonya.

Dalam hal pengelolaan modal atas risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan standar yang menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (RWA) berdasarkan pedoman Bank Indonesia dan peringkat dari lembaga pemeringkatan.

BTPN mengukur kecukupan modal untuk risiko operasional berdasarkan Metode Pendekatan Indikator Dasar dari Bank Indonesia. Metode ini memungkinkan BTPN untuk mengalokasikan modal bagi risiko operasional, berdasarkan data historis, yang sama jumlahnya dengan rata-rata pendapatan kotor 3 tahun terakhir, dikalikan dengan faktor koefisien yang berlaku sebesar 15,0%.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang perubahan dari

POJK No. 11/POJK.03/2016, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Penyediaan modal minimum Bank berdasarkan profil risiko yang berlaku saat ini adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Selain kebutuhan untuk memenuhi modal minimum berdasarkan profil risiko, Bank juga berkewajiban untuk menyediakan tambahan modal penyangga (*buffer*) dengan rincian sebagai berikut: (i) *Capital Conservation Buffer*, (ii) *Countercyclical Buffer*, dan (iii) *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB).

Pada tahun 2019, tambahan modal penyangga yang berlaku bagi Bank adalah *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5%, *Countercyclical Buffer* sebesar 0% dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebesar 1,00%. Persyaratan *Countercyclical buffer* dan

Tinjauan Kinerja Keuangan

Capital Surcharge untuk D-SIB akan ditinjau (*review*) oleh regulator sebanyak dua kali setiap tahunnya. Seluruh kewajiban modal penyangga harus dipenuhi dengan *Common Equity Tier 1* (CET 1).

Rincian Struktur Modal

Tabel Perkembangan Struktur Modal

(RpJuta, kecuali dinyatakan lain)

Struktur Modal	2019	2018	2017
Modal			
Modal Tier 1	27.259.773	15.898.538	14.661.161
Modal Tier 2	7.543.294	622.526	591.703
Total Modal	34.803.067	16.521.064	15.252.864
Aset Tertimbang Menurut Risiko:			
Risiko Kredit	124.368.632	49.742.514	47.282.810
Risiko Kredit dan Operasional	142.780.626	67.077.208	63.254.346
Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	143.582.952	67.131.441	63.302.113
Rasio Kecukupan Modal:			
Risiko Kredit	28,0%	33,2%	32,3%
Risiko Kredit dan Operasional	24,4%	24,6%	24,1%
Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	24,2%	24,6%	24,1%

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Sampai dengan akhir tahun 2019, BTPN tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal.

Investasi Barang Modal pada Tahun Buku Terakhir

Belanja modal BTPN untuk tahun 2019 tercatat sebesar Rp705 miliar terutama digunakan untuk mendukung operasional pasca merger dan pengembangan layanan perbankan digital.

Tabel Investasi Barang Modal Pada Tahun Buku Terakhir

(RpJuta, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Barang Modal	2019	2018	2017
Aset Tetap	324.700	382.971	323.844
Aset Tak Berwujud	380.234	392.940	462.215
Total	704.934	775.911	786.059

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN

Efektif tanggal 1 Januari 2020, BTPN telah mengadopsi PSAK 71 (Catatan 46) dan menerapkan perhitungan cadangan kerugian kredit ekspektasian yang *forward looking* ("ECL") atas aset keuangannya. Karena kejadian luar biasa terkait Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19"), di bulan Maret 2020, World Health Organization telah menyatakan pandemi, dan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian atas COVID-19 telah berlangsung di Indonesia. Situasi ini telah mengganggu aktivitas usaha dan ekonomi global, termasuk Indonesia. Perseroan terus memantau situasi terkait COVID-19 tersebut, menilai dan merespon secara aktif atas dampaknya ke posisi keuangan dan hasil operasi. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, ini, penilaian tersebut masih berlangsung. Perseroan akan mempertimbangkan dampak dan tingkat probabilitas skenario ekonomi yang memburuk akibat situasi terkait COVID-19 tersebut ketika mengestimasi ECL pada tahun 2020.

TARGET, REALISASI DAN PROYEKSI

Bank mencatat pertumbuhan dan kinerja yang baik di tahun 2019. Sebagaimana dijelaskan di bagian terdahulu, kondisi eksternal mempengaruhi pertumbuhan kredit di industri perbankan. Selain itu jumlah kredit di *mature business* Bank mengalami penurunan, di-*offset* oleh pertumbuhan kredit korporasi sebesar 16%, UKM 8%, dan Syariah sebesar 24%, sehingga secara

keseluruhan jumlah kredit Bank tumbuh sebesar 108% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi Simpanan, Bank menyesuaikan jumlah simpanan dengan kebutuhan sesuai dengan pertumbuhan kredit.

Dengan manajemen margin bunga yang baik, serta pertumbuhan kredit, Bank mencapai target pendapatan bunga bersih (7% di atas target).

Pendapatan operasional melebihi target. Laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, ROA dan ROE lebih baik dari target.

Kemampuan aset Bank dalam menghasilkan laba seperti ditunjukkan melalui *indikator return non aset* (ROA), realisasinya sebesar 120% dari target. Berikut ini rinciannya:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

(RpJuta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Target 2019	Realisasi 2019	Pencapaian
Pertumbuhan Kredit	119%	108%	91%
Pertumbuhan Simpanan	42%	23%	54%
Pendapatan Bunga Bersih	10.342.011	11.047.764	107%
Pendapatan Operasional	11.860.861	12.608.273	106%
Laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.	2.212.938	2.572.528	116%
Rasio Kecukupan Modal	22,8%	24,2%	106%
ROA	1,9%	2,3%	119%
ROE	8,9%	9,9%	115%

PROSPEK USAHA

Pada tahun 2020, kondisi perekonomian, baik di tingkat global maupun nasional masih akan bergerak dinamis. Situasi tersebut, antara lain berpotensi akan mempengaruhi kinerja perdagangan internasional, yang pada akhirnya menjadi tantangan bagi industri keuangan.

Kendati demikian, Bank BTPN terus berupaya untuk mencapai visinya untuk menjadi bank pilihan utama di Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, dengan dukungan teknologi digital. Bank BTPN diyakini dapat menjadi sebuah bank yang lebih besar dan lebih kuat, sehingga mampu meningkatkan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Visi tersebut dapat ditempuh dengan melalui beberapa strategi dimulai dari tahapan stabilisasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan memitigasi risiko dengan dukungan regulasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 dan akan dilanjutkan pada tahun 2020. Selanjutnya melalui tahapan Sinergi bertujuan untuk menggabungkan aset-aset yang ada saat ini untuk mendukung *cross-sell* yang lebih kuat, melayani segmen baru dan mengurangi biaya dan tahapan *Scale up* yang bertujuan untuk membuat mesin baru untuk pertumbuhan dan profitabilitas entitas gabungan.

Bisnis korporasi melayani perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, perusahaan multinasional dan perusahaan lokal besar lainnya. Bisnis korporasi juga secara aktif

terlibat dalam pembiayaan terstruktur (*Structured Financing*) dan pemberian pinjaman bersubsidi (*Syndicated Lending*) di pasar Indonesia. Segmen korporasi akan terus aktif berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi khususnya proyek infrastruktur dan industri pendukung, termasuk industri pendukung ekspor, yang sejalan dengan program pembangunan pemerintah Indonesia. Layanan pendukung akan juga terus ditingkatkan bagi segmen ini seperti *trade finance*, *Supply Chain Financing* dan produk derivatif.

Bisnis Retail Banking memiliki tujuan untuk menjadi pemain utama dalam perbankan digital, membangun lini Retail Banking yang terintegrasi (*one single customer view*) dan memiliki diversifikasi dari berbagai sumber

pendapatan. Sementara unit Business Banking berfokus pada pengembangan layanan untuk segmen SME dan transformasi bisnis untuk segmen Mikro. Sementara untuk segmen *Consumer Asset*, sejalan dengan fokus bisnis untuk menyediakan layanan dan produk perbankan bagi segmen mass-market, BTPN akan terus meningkatkan portofolio pinjaman dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan pembiayaan yang memiliki potensi besar.

Bank BTPN juga masih akan menjajaki layanan kerja sama pengiriman uang (*remittance*) global bekerja sama dengan perusahaan *international money transfer*, dengan menggunakan jaringan kantor BTPN sebagai *cash agent* dan diperluas ke layanan *mobile banking* dan layanan *agent banking*. Layanan *mobile banking* dan *international remittance* ini akan dapat meningkatkan *fee-based income*. Layanan *mobile banking* bagi *mass-market* yang akan didukung oleh *agent banking* dan *remittance* merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan BTPN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjamah layanan perbankan (*unbanked*), sebagai bagian dari program *financial inclusion*.

Dari sisi proses-proses kunci, *control system* dan infrastruktur, Bank BTPN akan terus memperkuat infrastruktur *information technology*, *human capital*, *operations*, manajemen risiko, *platform* Daya serta konsisten mengimplementasikan GCG untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Pembagian dividen ditetapkan di dalam RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan kecukupan saldo

laba ditahan, peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti persyaratan modal jangka panjang dan jangka pendek, serta ekspektasi pertumbuhan Bank dan kondisi pasar. Usulan pembagian dividen diajukan oleh Direksi kepada Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, usulan tersebut dibawa ke dalam RUPS Tahunan untuk disetujui oleh Pemegang Saham.

Untuk mendukung pertumbuhan usaha, Bank BTPN belum merencanakan untuk membagikan dividen untuk tiga tahun ke depan. Laba yang diperoleh dari kegiatan usaha akan digunakan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan Bank selanjutnya.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN MANAJEMEN

Tahun 2015

BTPN menyelenggarakan *Management & Employee Stock Options Program* (MESOP) dengan menerbitkan hak opsi untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel ("Hak Opsi") tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ("Program Hak Opsi") dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan No. I-A").

Program Hak Opsi yang dilaksanakan oleh BTPN mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 38/POJK.04/2014 tanggal 29

Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 Tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat oleh Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan *Management and Employee Stock Option Program* (Program MESOP 2015).

Manfaat Program Hak Opsi bagi Bank BTPN:

1. Program Hak Opsi disusun untuk meningkatkan rasa memiliki Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing Peserta Program Hak Opsi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.
2. Dengan pemberian Hak Opsi untuk membeli saham yang merupakan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan, diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan Peserta Program.
3. Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi Peserta Program sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan karyawan kunci Perseroan.
4. Pemberian Hak Opsi diharapkan dapat meningkatkan loyalitas Peserta Program serta meningkatkan kinerja Perseroan di kemudian hari dengan membangun program yang transparan, terukur serta memiliki kepastian implementasinya.

Hak opsi yang diterbitkan dalam setiap tahapan akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2020 yakni 5 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTPN yang menyetujui Program Hak Opsi ini.

Rincian pemberian hak opsi disajikan dalam tabel berikut:

Tanggal Pemberian Hak Opsi	Harga Eksekusi per lembar (dalam Rp)	Lembar Saham (dalam ribuan)
15 April 2015	4.000	141.575
10 Juli 2015	4.000	-
9 Oktober 2015	4.000	-
8 Januari 2016	4.000	-
11 April 2016	4.000	-
11 Juli 2016	4.000	-
10 Oktober 2016	4.000	10.500

Periode pelaksanaan seluruh hak opsi yang diterbitkan dibagi menjadi 6 periode yaitu:

1. Periode I dimulai sejak tanggal 1 Mei 2017
2. Periode II dimulai sejak tanggal 6 November 2017
3. Periode III dimulai sejak tanggal 7 Mei 2018
4. Periode IV dimulai sejak tanggal 5 November 2018
5. Periode V dimulai sejak tanggal 6 Mei 2019
6. Periode VI dimulai sejak tanggal 2 Desember 2019

Seluruhnya dilaksanakan selama 30 hari bursa.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan dilakukan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor:Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 hari bursa sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program Hak Opsi. Perseroan menetapkan harga pelaksanaan atas seluruh hak opsi yang akan diterbitkan sebesar Rp4.000 per saham. Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program Hak Opsi adalah sebanyak-banyaknya 233.611.491 lembar saham atau 4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Periode Pelaksanaan Program MESOP 2015

Tahap	Jumlah Opsi	Jumlah Opsi Saham yang diberikan	Jumlah Opsi Saham yang dieksekusi	Jumlah Opsi Saham yang hangus	Harga Pelaksanaan
I	131.445.000	39.433.500	-	240.000	-
II	129.235.000	38.770.500	-	135.000	-
III	119.180.000	71.508.000	-	1.620.000	-
IV	108.140.000	64.884.000	-	-	-
V	92.840.000	92.840.000	-	160.000	-
VI	91.260.000	91.260.000	-	-	-

Periode Pelaksanaan Program ESOP 2016

Tahap	Jumlah Opsi	Jumlah Opsi Saham yang diberikan	Jumlah Opsi Saham yang dieksekusi	Jumlah Opsi Saham yang hangus	Harga Pelaksanaan
I	52.690.000	15.807.000	10.670.600	54.000	2.617
II	39.072.400	5.073.400	1.112.900	-	2.617
III	21.000	90.000	12.000	-	2.617
IV	198.000	78.000	-	-	-

Tinjauan Kinerja Keuangan

Tahun 2016

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat oleh Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan *Employee Stock Option Program* (ESOP), atau Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan dan Karyawan Perusahaan Terkendali (Program ESOP 2016).

Sebagai implementasi program untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi, maka untuk meningkatkan rasa memiliki perusahaan sehingga dapat tercapai keselarasan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan karyawan, disamping Program MESOP 2015, Dewan Komisaris juga telah membuat suatu program pemberian insentif kepada para karyawan Perseroan maupun Perusahaan Terkendali akan diberikan hak opsi untuk memesan dan membeli saham-saham baru yang akan

dikeluarkan oleh Perseroan dengan membayar harga khusus yang dinamakan Harga Pelaksanaan (Program ESOP 2016).

Hak opsi yang diterbitkan dalam setiap tahapan akan berakhir pada tanggal 29 April 2021 yakni 5 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTPN yang menyetujui Program Hak Opsi ini.

Rincian pemberian hak opsi selama tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tanggal Pemberian Hak Opsi	Harga Eksekusi per lembar (dalam Rp)	Lembar Saham (dalam ribuan)
15 Juni 2016	2.617	56.645.000
9 September 2016	2.617	-
9 Desember 2016	2.617	-
10 Maret 2017	2.617	-
12 Juni 2017	2.617	-
11 September 2017	2.617	-
11 Desember 2017	2.617	-

Periode pelaksanaan seluruh hak opsi yang diterbitkan dibagi menjadi 6 periode yaitu:

1. Periode I dimulai sejak tanggal 28 Mei 2018
2. Periode II dimulai sejak tanggal 17 Desember 2018
3. Periode III dimulai sejak tanggal 28 Mei 2019
4. Periode IV dimulai sejak tanggal 19 Desember 2019
5. Periode V dimulai sejak tanggal 1 Juni 2020
6. Periode VI dimulai sejak tanggal 17 Desember 2020

Seluruhnya dilaksanakan selama 30 hari bursa.

Kondisi tertentu yang dapat berpengaruh terhadap hak dan kepesertaan Program Hak Opsi adalah:

Kondisi	Konsekuensi
Mencapai usia pensiun/pensiun dini/habisnya kontrak kerja yang tidak diperpanjang/diberhentikan karena alasan kesehatan/pengurangan pegawai/pengambilalihan perusahaan	Berhak secara penuh atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama peserta
Meninggal dunia	Ahli waris berhak secara penuh atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama peserta
Mengundurkan diri/diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran/Perseroan atau Perusahaan Terkendali dalam keadaan pailit/disita	Tidak berhak atas Hak Opsi yang telah dialokasikan atas nama Peserta

Harga Pelaksanaan Hak Opsi dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor:Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 hari bursa sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan Program Hak Opsi. Perseroan menetapkan harga pelaksanaan atas seluruh hak opsi yang akan diterbitkan sebesar Rp2.617 per saham. Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program Hak Opsi adalah sebanyak-banyaknya 116.805.746 lembar saham atau 2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Periode Pelaksanaan Program ESOP 2016

Tahap	Jumlah Opsi	Jumlah Opsi Saham yang diberikan	Jumlah Opsi Saham yang dieksekusi	Jumlah Opsi Saham yang hangus	Harga Pelaksanaan (Rp)
I	52.690.000	15.807.000	10.670.600	54.000	2.617

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Tabel Penerbitan Obligasi Tahun Buku

Nama Obligasi	Nominal (RpJuta)	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 Seri B	300.000.000.000	11 Juli 2016	1 Juli 2019
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 Seri B	900.000.000.000	18 Oktober 2017	17 Oktober 2020
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Seri A	799.000.000.000	26 November 2019	26 November 2022
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Seri B	201.000.000.000	26 November 2019	26 November 2024
Medium Term Notes (MTN) II Tahun 2017 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	1.302.000.000.000	14 Juni 2017	14 Juni 2020

Tabel Realisasi Penggunaan

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	
1	Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009	29 September 2009	750.000	8.699	741.301	741.301	741.301	0
2	Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010	18 Mei 2010	1.300.000	8.116	1.291.884	1.291.884	1.291.884	0
3	Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010	14 Desember 2010	1.100.000	6.476	1.093.524	1.093.524	1.093.524	0
4	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun I Tahun 2011	20 Juni 2011	500.000	5.057	494.943	494.943	494.943	0
5	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II Tahun 2012	20 Juni 2011	1.250.000	6.069	1.243.931	1.243.931	1.243.931	0
6	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II Tahun 2013	20 Juni 2011	750.000	3.668	746.332	746.332	746.332	0
7	Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013	26 Juni 2013	5.800.000	5.292	794.708	794.708	794.708	0

Tinjauan Kinerja Keuangan

Tabel Realisasi Penggunaan

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	
8	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016	27 Juni 2016	1.000.000	6.483	993.517	993.517	993.517	0
9	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017	27 Juni 2016	1.500.000	5.871	1.494.129	1.494.129	1.494.129	0
10	Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019	26 November 2019	1.000.000 seri A: 799.000 seri B: 201.000	10.219,625	989.780,375	989.780,375	989.780,375	0

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2019, tidak terdapat Transaksi Material antara Bank dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

BTPN melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pencatatan transaksi pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Tabel dibawah ini menunjukkan rincian pihak berelasi, sifat hubungan beserta sifat transaksi yang dilakukan sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Tabel Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	Pemegang saham pengendali	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; efek-efek; pinjaman yang diterima; pinjaman subordinasi; transaksi derivatif
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hongkong Branch	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Europe Limited	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dusseldorf Branch	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi	Simpanan dari bank lain; transaksi derivatif
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain

Tabel Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
PT SMFL Leasing Indonesia	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan, transaksi derivatif
PT Oto Multi Artha	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan, transaksi derivatif
PT Summit Oto Finance	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan, transaksi derivatif
PT Nikko Securities Indonesia	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah
PT SBCS Indonesia	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah
Personil manajemen kunci	Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif	Pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah, pembayaran kompensasi dan remunerasi, imbalan pascakerja

Nilai transaksi pihak berelasi

Rincian saldo dengan pihak berelasi telah diungkapkan pada Catatan 38 Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2019 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

Kewajaran, Mekanisme Review dan Pemenuhan Peraturan Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank memiliki kebijakan dalam memberikan persetujuan terhadap transaksi dengan pihak yang berelasi secara adil dan wajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bank melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga.

BTPN melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama

INFORMASI TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI

Pada 1 Februari 2019, PT Bank BTPN Tbk resmi beroperasi sebagai bank baru hasil penggabungan usaha (merger) antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Bank BTPN telah menjadi suatu bank universal yang memiliki bisnis yang lebih lengkap dan melayani segmen nasabah yang lebih luas, mulai dari segmen *mass market* (ritel) hingga korporasi.

Selain hal tersebut, BTPN tidak memiliki aksi korporasi material sepanjang tahun 2019.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Sampai dengan penerbitan Laporan Tahunan ini, tidak ada perubahan peraturan yang berdampak signifikan terhadap Bank BTPN.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR, ALASAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan untuk tahun buku 31 Desember 2019.

KETAATAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Alasan Kenaikan dikarenakan laba sebelum pajak penghasilan tahun 2019 naik dibandingkan dengan tahun 2018.

Pembayaran Pajak (RpJuta)	2019	2018	2017
Pajak Penghasilan Badan	545.060	521.559	287.513
Pajak Penghasilan Karyawan	35,375	24,284	24,194

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Kondisi Tahun Buku 2019

Sepanjang tahun buku 2019, Bank BTPN tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya di industri perbankan Indonesia, meskipun terdapat tantangan ketidakpastian global. Namun, Bank tetap berkomitmen untuk tetap tumbuh dengan lebih selektif melakukan penyaluran kredit sehingga kualitas aset tetap terjaga.

Bank berkomitmen menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meningkatkan standar kebijakan persetujuan kredit. Dengan demikian, Bank mendapatkan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan aktif memantau kredit yang dinilai berpotensi menjadi bermasalah.

Hasil Kajian dan Asumsi yang Digunakan

Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan usaha secara berkala. Hingga laporan tahunan 2019 ini diterbitkan, Bank BTPN tidak mendapatkan temuan atas ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank dalam mencapai target dan terus melanjutkan kelangsungan usaha.

Sejalan dengan hal tersebut, laporan keuangan konsolidasian Bank BTPN telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan. Berdasarkan pencapaian kinerja selama tahun 2019 dan histori Bank, manajemen menilai bahwa kelangsungan usaha BTPN sangat bagus. Hal ini didasarkan pada rasio-rasio keuangan dan kesehatan Bank yang berada dalam kondisi baik dan mampu mendukung kelangsungan usaha di masa yang akan datang. Selain itu, dukungan dari pemegang saham dan sinergi antar grup SMBC serta pengakuan atas kualitas dan kredibilitas BTPN yang diberikan lembaga pemeringkat menjadi fundamental bagi Bank untuk menjaga kelangsungan bisnis.

Sebagai bagian dari grup SMBC, di mana SMBC dikategorikan sebagai G-SIB, Bank BTPN terus berupaya mengadopsi kepatuhan atas standar lokal dan standar global di samping senantiasa meningkatkan praktik-praktik kepatuhan dan manajemen risiko yang sehat serta upaya-upaya untuk meningkatkan *operational excellence* dengan dukungan TI dan teknologi digital.

Manajemen optimis mampu menghadapi berbagai tantangan dan meraih peluang yang ada ditopang oleh beberapa faktor di antaranya sumber daya manusia yang berkompeten, infrastruktur bisnis yang memadai, serta jaringan bisnis internasional yang dimiliki menjadi dasar keyakinan Manajemen akan pertumbuhan bisnis BTPN di masa-masa yang akan datang.

Penerapan Strategi

Dengan berbagai pertimbangan yang telah disampaikan, manajemen Bank BTPN mempertimbangkan beberapa faktor strategis dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank. Faktor-faktor yang diantisipasi, meliputi kondisi makroekonomi dan perbankan, kinerja segmen usaha, kinerja keuangan, permodalan, tingkat likuiditas dan solvabilitas dalam melakukan *assessment* terkait kelangsungan usaha Bank.

Melalui pertimbangan strategis tersebut, Bank dapat melakukan antisipasi melalui penerapan manajemen risiko yang tepat. Dengan demikian, hasil yang dicapai akan maksimal serta berkesinambungan, sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha Bank ke depan.

Business Continuity Management (2019)

Bank BTPN secara aktif menjalankan kerangka kerja Pengelolaan Kelangsungan Usaha (Business Continuity Management – BCM) yang berfokus kepada pemulihan kembali aktivitas operasional yang terkait dengan fungsi-fungsi kritis di dalam Bank dan pelayanan kepada nasabah. Melalui unit kerja BCM yang berada di dalam Direktorat Risk Management, kerangka kerja BCM dijalankan bersama-sama dengan unit kerja lain sebagai bagian dari pengelolaan BCM yang menjadi tanggung jawab seluruh karyawan di setiap jenjang organisasi. Sebagai bagian dari penerapan BCM yang efektif, Bank BTPN telah memiliki Kebijakan dan Prosedur BCM dalam rangka mendukung kerangka kerja manajemen risiko.

Selama tahun 2019, BCM telah menjalankan program-program sebagai berikut:

1. Melakukan pengkinian Kebijakan, Prosedur BCM, dan memastikan agar setiap direktorat telah melakukan pengkinian dokumen Business Impact Analysis (BIA) & Business Continuity Plan (BCP) agar tetap sesuai dengan kondisi Bank terkini, termasuk direktorat baru dari hasil merger. Unit BCM melakukan fasilitasi dan memberikan rekomendasi kepada unit Bisnis/Fungsi Pendukung dalam penyusunan dokumen BIA dan BCP
2. Unit BCM telah melakukan konsolidasi BCP *site* setelah merger dengan SMBCI sehingga saat ini BTPN memiliki 2 BCP *site* di Jakarta dan BSD.
3. Mendefinisikan Critical Business Function (CBF) yaitu serangkaian proses/aktivitas yang mengarah ke satu fungsi kritikal yang harus segera dipulihkan pada saat terjadi insiden, karena hal tersebut akan berdampak secara finansial, legal, atau kerusakan lain terhadap perusahaan. CBF dapat terdiri dari satu atau beberapa proses yang berkontribusi terhadap satu fungsi akhir yang kritikal, dan CBF dapat melibatkan satu atau beberapa unit kerja. Unit BCM bekerja sama dengan Business Continuity Coordinator (BCC) dari tiap unit kerja bisnis/fungsi pendukung untuk mendefinisikan fungsi kritikal termasuk proses/aktivitas yang ada di dalam fungsi tersebut
4. Melakukan pengujian BCP berupa call tree secara serempak bagi seluruh karyawan BTPN (Kantor Cabang dan Kantor Pusat) untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki nomor kontak karyawan yang terkini sehingga dapat dihubungi setiap saat pada kondisi BCP diaktifkan
5. Pada saat terjadi kerusuhan Mei 2019, Bank melakukan split operations untuk unit kerja yang kritikal dan berjalan dengan baik
6. Setiap unit kerja kritikal telah melakukan pengujian BCP sesuai dengan dokumen BCP yang telah dibuat oleh masing-masing Direktorat
7. Selain itu, BTPN telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pengujian terhadap sistem yang terkoneksi dengan parent Company (SMBC) sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada bulan Agustus dan Desember.



Manajemen Risiko

“

Tahun ini, BTPN fokus untuk mendukung implementasi manajemen risiko bagi Bank dan anak usahanya setelah terlaksananya merger antara PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

”

150	Prioritas Tahun 2019
150	Sistem Pengendalian Internal
150	Pengungkapan Permodalan
153	Pengungkapan Eksposur



Manajemen Risiko



0,81%

Kualitas aset Bank secara keseluruhan tercermin dari rasio NPL-kotor konsolidasi sebesar 0,81%

“

Bank BTPN akan fokus untuk memastikan bahwa risiko risiko potensial yang muncul sehubungan dengan integrasi sistem perbankan, organisasi dan proses-proses dari kedua bank dapat dikelola dengan baik.

”

Struktur Manajemen Risiko Terintegrasi yang diterapkan BTPN mencakup semua bidang risiko yang dihadapi oleh Bank serta anak usahanya, BTPN Syariah. Fungsi pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten.

Tahun ini, BTPN fokus untuk mendukung implementasi manajemen risiko bagi Bank dan anak usahanya setelah terlaksananya merger antara PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Selain itu, Bank, yang ditunjuk sebagai Entitas Utama dari konglomerasi keuangan SMBC, wajib menerapkan proses manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan peraturan OJK dan/atau BI yang berlaku.

Pengembangan penerapan manajemen risiko akan terus dilakukan untuk mendukung rencana bisnis Bank, baik dalam hal pengembangan kerangka kerja, pembaruan kebijakan dan prosedur, termasuk pemenuhan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Program *Business Continuity Management* Bank terus diuji secara berkala guna mengevaluasi kesiapannya dan memastikan lokasi cadangan (*Disaster Recovery Site*), staf dan proses-proses alternatif yang memadai yang ditentukan oleh Bank. Penekanan khusus diberikan pada upaya pencegahan pelanggaran dan deteksi dini melalui penyempurnaan proses pengawasan dan respons Bank terhadap potensi pelanggaran. Hal ini dilakukan antara lain melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blower*) Bank, serta kegiatan pengarahan rutin di cabang-cabang dan pelaksanaan *e-learning* secara berkala terkait

pelatihan pencegahan pelanggaran. Manajemen Risiko Operasional senantiasa berkoordinasi dengan fungsi *quality assurance* di level *first line of defence* guna berupaya untuk memastikan peningkatan lingkungan pengendalian intern yang efektif.

Bank hasil merger telah membangun piramida bisnis yang lebih lengkap dan saling melengkapi, mulai dari BTPN WoW dan Bisnis Syariah, yang melayani jutaan nasabah melalui agen perbankan, bisnis *platform* digital (Jenius), segmen pasar mikro hingga mitra korporat di tingkat internasional.

Total pinjaman bank dalam Rupiah sebesar 71%, USD sebesar 28%, dan JPY sebesar 1%. Pinjaman ini diberikan kepada *Corporate Banking*, pinjaman ritel (termasuk pinjaman digital), dan usaha Mikro, UKM, dan Komersial masing-masing sebesar 57%, 29,7% dan 13,3%.

Pembiayaan yang disalurkan anak usaha Bank, BTPN Syariah, menyumbang 6,3% terhadap total kredit konsolidasi. Pembiayaan BTPN Syariah tumbuh sebesar 24% dengan rasio *nonperforming financing* (NPF)-kotor terjaga pada level 1,36%.

Kualitas aset Bank secara keseluruhan tercermin dari rasio NPL-kotor konsolidasi sebesar 0,81%, lebih rendah dari 1,24% yang tercatat pada tahun sebelumnya.

Unit Manajemen Risiko di kantor pusat, terdiri dari Portofolio Management Policy, Unit Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, Unit Manajemen Risiko Operasional dan Unit *Anti-Fraud Management*.

Setiap tahun, Manajemen Risiko melakukan kajian atas kecukupan kebijakan manajemen risiko, rencana pendanaan kontinjensi (*contingency funding plan*), rencana keberlanjutan usaha, serta kebijakan-kebijakan penting lainnya di BTPN. Di tingkat Direksi, Komite Manajemen Risiko memantau dan mengelola risiko di seluruh bagian Bank. Komite Pengawasan Risiko di tingkat Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko secara berkala.

Sejalan dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, Bank menyampaikan laporan profil risiko setiap kuartal, baik secara individu maupun secara terkonsolidasi.

Sejalan dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank sebagai Entitas Utama menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi setiap semester kepada OJK.

Sesuai peraturan Bank Indonesia dan OJK, penilaian atas profil risiko merupakan penilaian atas risiko-risiko inheren Bank. Hal ini meliputi risiko-risiko yang melekat dengan kegiatan usaha Bank, serta kualitas dari implementasi Manajemen Risikonya. Penilaian dilakukan atas 8 jenis risiko, yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Per

Desember 2019, Profil Risiko Bank, baik secara individu maupun secara konsolidasi, berada di peringkat 2 (Rendah hingga Moderat).

PRIORITAS TAHUN 2019

Dengan telah terlaksananya proses merger, Bank BTPN fokus dalam meningkatkan pelaksanaan manajemen risiko yang terintegrasi melalui proses-proses sebagai berikut:

- Terus menyempurnakan sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk Bank hasil merger, termasuk anak usahanya, BTPN Syariah.
- Menerapkan sistem dan pemodelan *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB), yang berlaku efektif pada Juni 2019.
- Mempersiapkan diri untuk PSAK 71, yang berlaku efektif mulai Januari 2020.
- Memastikan kecukupan dan efektivitas manajemen risiko operasional, program *business continuity management* dan kerangka kerja risiko keamanan informasi dan implementasinya
- Melakukan *stress test* secara berkala untuk mengantisipasi dan secara proaktif mengelola potensi timbulnya risiko ekonomi makro.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Three Lines of Defense

Kerangka kerja pengendalian internal BTPN menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*Three Lines of Defense*), yang masing-masing bekerja secara independen:

- Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defense*), *Risk Taking Unit* (RTU) dibantu oleh Fungsi *Quality Assurance* (QA) yang terkait,

menegakkan praktik manajemen risiko operasional sehari-hari secara disiplin.

- Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defense*), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bersama dengan Unit Kepatuhan mendefinisikan, menyempurnakan dan memastikan terlaksananya pengelolaan risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang memadai disertai dengan kebijakan dan prosedur yang tepat, serta mengkoordinasikan/memfasilitasi kegiatan pengelolaan risiko secara keseluruhan.
- Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defense*), Internal Audit secara independen memastikan bahwa semua risiko yang melekat (*inherent risk*) telah dikelola sehingga risiko residual telah sesuai dengan toleransi risiko yang telah disepakati dan *risk appetite* yang ditetapkan Bank.

Sebagai lini pertahanan kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko berkoordinasi dengan Fungsi QA di lini pertahanan pertama untuk memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif.

Sebagai lini pertahanan ketiga dalam sistem pengendalian internal, Audit Internal memiliki fungsi pengawasan untuk mengevaluasi manajemen risiko, efektivitas pengendalian internal, dan tata kelola semua aspek kegiatan Bank menggunakan pendekatan berbasis risiko. Dengan demikian, fungsi pengawasan dilakukan terhadap lini pertahanan pertama (*Risk Taking Unit* dan *Quality Assurance*) dan lini pertahanan kedua (Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kepatuhan).

Evaluasi yang dilakukan oleh Internal Audit terhadap efektivitas pengendalian internal turut memperhatikan organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan nasabah, infrastruktur bank maupun kualitas pelaksanaan proses-proses utama yang memiliki risiko bagi Bank.

Untuk setiap temuan, Internal Audit melakukan pemantauan status perbaikan yang dilakukan secara berkala dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Direksi maupun Komite Audit. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Internal Audit dilakukan berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap 3 tahun dilakukan audit terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan Internal Audit oleh pihak yang independen untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang berlaku.

PENGUNGKAPAN PERMODALAN

A. Struktur Permodalan

Tujuan dari manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan menjaga kepercayaan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal untuk pemegang saham, keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Posisi permodalan Bank per tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen Modal	31 Desember 2019	
	Individual	Konsolidasian
I Modal Inti (Tier 1)	23.521.707	27.259.773
1. Modal Inti Utama/ <i>Common Equity Tier 1</i> (CET 1)	23.521.707	27.259.773
1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi <i>Treasury Stock</i>)	161.075	161.075
1.2 Cadangan Tambahan Modal	25.582.386	28.312.115
1.2.1 Faktor Penambah	26.810.660	29.381.326
1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya	809.965	813.729
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	12.079	12.176
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	797.886	801.553
1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	26.000.695	28.567.597
1.2.1.2.1 Agio	10.907.715	10.898.202
1.2.1.2.2 Cadangan umum	23.361	44.361
1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu	13.476.835	15.052.506
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan	1.592.784	2.572.528
1.2.1.2.5 Dana setoran modal	-	-
1.2.1.2.6 Lainnya	-	-
1.2.2 Faktor Pengurang	(1.228.274)	(1.069.211)
1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya	-	-
1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-
1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	(1.228.274)	(1.069.211)
1.2.2.2.1 Disagio	-	-
1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu	-	-
1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan	-	-
1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	(1.228.274)	(1.108.256)
1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>	-	-
1.2.2.2.6 PPA aset non produktif yang wajib dibentuk	-	-
1.2.2.2.7 Lainnya	-	-
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(2.221.754)	(1.213.417)
1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	-	(144.874)
1.4.2 <i>Goodwill</i>	-	(61.116)
1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	(940.633)	(1.007.427)
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	(1.281.121)	-
1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
1.4.6 Eksposur sekuritisasi	-	-
1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya	-	-
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-
1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-
2. Modal Inti Tambahan/ <i>Additional Tier 1</i> (AT 1)	-	-
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1	-	-
2.2 Agio/Disagio	-	-
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	-	-
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-
2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-

Tabel 1. Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen Modal	31 Desember 2019	
	Individual	Konsolidasian
II Modal Pelengkap (Tier 2)	7.465.961	7.543.294
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	6.038.888	6.038.888
2. Agio/Disagio	-	-
3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	1.427.073	1.504.406
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-
4.1 <i>Sinking Fund</i>	-	-
4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain	-	-
4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-
Total Modal	30.987.668	34.803.067

	31 Desember 2019 Diaudit		Keterangan	31 Desember 2019 Diaudit	
	Bank	Konsolidasi		Bank	Konsolidasi
Aset Tertimbang Menurut Risiko			RASIO KPMM		
ATMR Risiko Kredit	117.335.520	124.368.632	Rasio CET 1 (%)	17,84%	18,99%
ATMR Risiko Pasar	802.326	802.326	Rasio Tier 1 (%)	17,84%	18,99%
ATMR Risiko Operasional	13.676.076	18.411.994	Rasio Tier 2 (%)	5,66%	5,25%
Total ATMR	131.813.922	143.582.952	Rasio KPMM (%)	23,51%	24,24%
Rasio KPMM Sesuai Profil Risiko (%)	9,30%	9,29%	CET 1 yang tersedia untuk BUFFER (%)	11,84%	12,99%
Alokasi Pemenuhan KPMM Sesuai Profil Risiko			Persentase Buffer yang Wajib Dipenuhi oleh Bank (%)		
Dari CET1 (%)	6,00%	6,00%	Capital Conservation Buffer (%)	2,50%	2,50%
Dari AT1 (%)	0,00%	0,00%	Countercyclical Buffer (%)	0%	0%
Dari Tier 2 (%)	3,30%	3,29%	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)	1,00%	1,00%

Komponen permodalan secara umum didominasi oleh modal yang bersifat permanen, di mana modal inti merupakan unsur terbesar dari modal Bank. Pada Desember 2019, posisi rasio modal inti terhadap ATMR adalah sebesar 24,2% (konsolidasi). Rasio ini berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebesar 8%.

Struktur permodalan BTPN secara konsolidasi didominasi oleh modal inti (96,0% dari total modal BTPN secara konsolidasi), yang terdiri dari modal disetor dan cadangan modal tambahan.

Tingkat modal BTPN berdasarkan basis yang berdiri sendiri dan dikonsolidasikan adalah sama

dengan kepentingan ekuitasnya di anak perusahaan yang relatif tidak material, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap modal BTPN secara konsolidasi.

Tingkat permodalan BTPN secara individu sama dengan tingkat permodalannya secara konsolidasi karena besarnya penyertaan modal BTPN pada anak usaha relatif tidak material sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan BTPN secara konsolidasi.

B. Kecukupan Modal

Manajemen menggunakan standar rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal sesuai dengan standar industri. Pendekatan OJK untuk mengukur modal tersebut

terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan (yang diukur sebesar 8,0% dari aktiva tertimbang menurut risiko) terhadap modal yang tersedia.

Sejalan dengan penerapan Basel II tentang permodalan, Bank telah melaporkan ICAAP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara berkesinambungan mengembangkan metodologi untuk menerapkan Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP), suatu proses untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan ketentuan profil risiko Bank. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Bank dalam manajemen risiko.

Bank menggunakan pendekatan standar dalam mengelola modal atas risiko kredit, di mana perhitungan ATMR secara umum dilakukan dengan mengacu pada bobot risiko sesuai dengan ketentuan OJK dan hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang telah ditetapkan oleh pihak regulator.

Sesuai ketentuan BI/OJK yang berlaku saat ini, Bank mengukur kecukupan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (PID). Berdasarkan metode tersebut, Bank mengalokasikan modal minimum untuk risiko operasional berdasarkan data historis, yakni sama dengan rata-rata jumlah pendapatan bruto (*gross income*) tahunan selama 3 tahun terakhir (yang positif) dikalikan dengan koefisien alfa yang berlaku, yaitu sebesar 15,0%.

Dalam mengelola risiko pasar, Bank menggunakan metode standar dalam melakukan penghitungan ATMR untuk Risiko Pasar.

Manajemen Bank memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola permodalannya, serta memandang perencanaan permodalan sebagai elemen penting untuk mewujudkan tujuan strategis Bank dengan melakukan analisis atas kecukupan modal Bank untuk saat ini dan masa yang akan datang melalui proses perencanaan strategis. Hal ini ditunjukkan dengan mempertahankan kinerja Bank dan perusahaan induknya melalui pengawasan yang berkesinambungan terhadap kualitas manajemen risiko, audit berkala oleh Satuan Kerja Audit Internal, kebijakan

yang memadai tentang pembagian dividen, serta komitmen manajemen terhadap strategi dan target Bank sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Rasio permodalan Bank dinilai sangat baik, yaitu di atas persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Tren pertumbuhan modal berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) juga menunjukkan kemampuan untuk mendukung ekspansi usaha Bank ke depan. Demikian pula jika dikaitkan dengan insentif untuk kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial), di mana nilai KPMM Bank telah memenuhi ketentuan minimum yang dipersyaratkan OJK, yakni 8,0% - 14,0%, sesuai dengan hasil penilaian mandiri atas profil risiko Bank, di mana posisi KPMM berdasarkan profil risiko per Desember 2019 adalah 9,30%.

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR

A. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Guna mendukung target bisnis dan tetap menjaga kualitas portofolio, Bank menyusun kebijakan dan prosedur kredit sesuai dengan hierarki kebijakan yang dinyatakan dalam kebijakan GCG. Kebijakan kredit merupakan pedoman dalam pelaksanaan proses kredit dan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur dilakukan secara berkala,

terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Setelah merger, harmonisasi kebijakan kredit antara kedua Bank telah dilakukan. Kebijakan kredit bank secara keseluruhan mencakup semua segmen (korporasi dan non korporasi).

Bank dikategorikan sebagai salah satu bank yang penting secara sistemik di Indonesia. Oleh karena itu, Bank telah menyusun Laporan Rencana Pemulihan (*Recovery Plan Document*), termasuk aspek kualitas aset. Rencana pemulihan tersebut mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk memulihkan kekuatan dan kelayakan finansial jika Bank menghadapi tekanan yang berat, terutama dalam hal kualitas aset.

Bank secara aktif terus mengelola dan mengawasi penerapan manajemen risiko dan secara efektif melakukan penyempurnaan kebijakan, prosedur dan pengembangan sistem manajemen risiko.

Selain menetapkan kebijakan dan prosedur, Bank juga menetapkan batasan (limit) untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan *risk appetite* Bank. Limit tersebut antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambil keputusan dan tingkat risikonya serta memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam proses kredit yang diberikan

kepada nasabah. Sementara itu, penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK.

Bank mengelola, dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit di mana pun risiko tersebut teridentifikasi - khususnya, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis.

Sistem Informasi Manajemen yang tersedia mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu untuk memperbaiki kualitas kredit yang menurun atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Bank dengan seksama memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit, dengan melakukan deteksi dini terhadap permasalahan dan melakukan pemantauan yang ketat.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Kerangka kerja Risiko Kredit BTPN diimplementasikan melalui proses terintegrasi dan terdiri dari

proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian/mitigasi risiko.

Proses identifikasi risiko kredit antara lain dilakukan mulai dari penentuan sektor industri atau segmen nasabah yang akan dibiayai, melakukan analisa atas pengajuan kredit nasabah serta analisa atas produk dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko kredit dengan melakukan kajian risiko terhadap Program Produk. Berdasarkan proses identifikasi risiko kredit tersebut, Bank melakukan pengukuran atas risiko kredit dengan menggunakan indikator utama yang menunjukkan kualitas kredit nasabah, seperti rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dan secara berkala mengukur kualitas aset berkualitas rendah serta melakukan pengawasan terhadap nasabah yang termasuk dalam *watchlist account*.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit, *stress testing* dilakukan untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi ekstrem.

Sistem pengukuran risiko kredit harus mempertimbangkan karakteristik produk, jangka waktu, aspek jaminan, potensi gagal bayar (*default*), dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan serta melakukan kuantifikasi, antara lain atas komposisi portofolio aset meliputi

jenis, fitur eksposur, pertumbuhan kredit, kecukupan pencadangan, tingkat konsentrasi dan kualitas penyediaan dana, termasuk tingkat aset bermasalah dan aset yang telah diambil alih, serta *mark to market* pada transaksi risiko kredit tertentu

Bank melakukan pemantauan atas eksposur risiko kredit aktual dibandingkan limit risiko kredit, memantau pengelolaan kredit yang bermasalah serta memantau kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko kredit.

Pengembangan sistem informasi manajemen dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat menyajikan informasi risiko kredit secara berkala.

3. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Kredit

Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengelola risiko yang membahayakan kelangsungan usaha Bank. Contohnya adalah penerapan prosedur penanganan kredit bermasalah yang efektif dengan memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dari fungsi pemutus kredit. Hasil dari penanganan kredit yang bermasalah harus didokumentasikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh satuan kerja *risk taking* dalam menyalurkan atau merestrukturisasi kredit.

Risiko kredit juga dapat dikendalikan melalui mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portofolio secara aktif dan penetapan target batasan risiko konsentrasi.

4. Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit

Bank melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dengan melakukan pemantauan antara lain untuk eksposur sektor industri, jenis kredit tertentu serta eksposur perorangan dan grup usaha.

5. Definisi Tagihan yang Melewati Jatuh Tempo

Tagihan yang telah melewati jatuh tempo adalah seluruh tagihan yang telah tertunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga.

6. Definisi Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai

Bank melakukan evaluasi atas aset keuangan/kelompok aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal neraca. Tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment* ditentukan berdasarkan aset keuangan/kelompok aset keuangan yang jika terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa

yang merugikan). Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara akurat.

7. Pendekatan untuk Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pendekatan kolektif dan individual.

CKPN untuk penilaian kolektif dihitung dengan menggunakan data historis (perhitungan *Incurring Loss* berdasarkan estimasi *Probability of Default dan Loss Given Default*) dari masing-masing kelompok aset tertentu.

Sedangkan, CKPN untuk penilaian individual dihitung berdasarkan arus kas yang didiskontokan (*discounted cash flow*).

Secara paralel, Bank juga mengestimasi kerugian akibat penurunan nilai dengan menggunakan model PSAK 71 yang menggantikan model *incurred loss*, yaitu PSAK 55 yang merupakan model *forward looking expected credit loss* (ECL). Model penurunan nilai yang baru ini akan berlaku untuk instrumen keuangan berikut yang tidak diukur pada FVTPL:

- Aset keuangan yang merupakan instrumen utang
- Piutang sewa guna usaha
- Kontrak jaminan keuangan yang diberikan, dan
- Komitmen pinjaman yang diberikan

Menurut PSAK 71, debitur/kelompok debitur akan mengetahui penyisihan kerugian dengan jumlah yang sama dengan ECL seumur hidup, kecuali dalam kasus-kasus berikut di mana jumlah yang diakui adalah ECL 12 bulan:

- Efek investasi hutang yang memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan, dan
- Instrumen keuangan lainnya (selain piutang sewa guna usaha) yang risikonya tidak meningkat secara signifikan sejak penerbitan awal.

Model ini akan mulai diterapkan pada Januari 2020, dan Bank telah melakukan persiapan dan simulasi.

8. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Kredit

Tabel 1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	21.963.565	-	-	-	-	21.963.565
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	9.157.858	-	998.700	-	61.966	10.218.524
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	2.023.573	-	-	-	925.895	2.949.469
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	105	264	-	-	-	369
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	18.202.810	2.449.881	7.284.261	7.731.183	-	35.668.135
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.453.269	137.660	917.016	446.301	-	4.954.246
9	Tagihan kepada Korporasi	74.027.155	7.995.466	9.436.228	5.260.281	452.940	97.172.070
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	292.362	9.732	107.243	64.651	-	473.988
11	Aset Lainnya	6.036.467	-	-	-	-	6.036.467
	Total	135.157.164	10.593.003	18.743.448	13.502.416	1.440.801	179.436.832

Tabel 1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	26.980.247	-	-	-	-	26.980.247
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	9.281.177	-	998.700	-	61.966	10.341.843
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	2.190.440	-	-	-	925.895	3.116.336
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	105	264	-	-	-	369
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	18.202.810	2.449.881	7.284.261	7.731.183	-	35.668.135
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	9.580.392	420.844	2.919.084	778.931	-	13.699.251
9	Tagihan kepada Korporasi	74.055.992	7.995.466	9.436.228	5.260.281	452.940	97.200.907
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	309.297	10.848	110.782	66.274	-	497.201
11	Aset Lainnya	6.860.325	33.424	164.542	45.622	-	7.103.913
	Total	147.460.785	10.910.727	20.913.597	13.882.291	1.440.801	194.608.201

Tabel 2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	> 5 tahun	Tanpa Kontrak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	21.963.565	-	-	-	-	21.963.565
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	1.894.538	2.571.810	5.349.945	402.231	-	10.218.524
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.649.934	408.388	134.587	4.796	751.764	2.949.469
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	129	239	-	-	-	368
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	24.686.079	10.982.057	-	-	-	35.668.136
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.922.424	31.822	-	-	-	4.954.246
9	Tagihan kepada Korporasi	22.675.815	41.901.690	19.228.307	13.366.257	-	97.172.070
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	426.417	47.571	-	-	-	473.988
11	Aset Lainnya	6.036.467	-	-	-	-	6.036.467
	Total	84.255.368	55.943.577	24.712.839	13.773.284	751.764	179.436.832

Tabel 2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	> 5 tahun	Tanpa Kontrak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	25.825.934	429.779	266.132	458.402	-	26.980.247
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.017.857	2.571.810	5.349.945	402.231	-	10.341.843
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.649.934	408.388	134.587	171.663	751.764	3.116.336
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	129	239	-	-	-	368
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	24.686.079	10.982.057	-	-	-	35.668.136
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	11.390.546	2.308.705	-	-	-	13.699.251
9	Tagihan kepada Korporasi	22.699.702	41.906.640	19.228.307	13.366.257	-	97.200.907
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	449.050	48.151	-	-	-	497.201
11	Aset Lainnya	6.036.468	-	-	1.067.445	-	7.103.913
	Total	94.755.699	58.655.769	24.978.971	15.465.998	751.764	194.608.201

Tabel 3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Desember 2019						
1	Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan penggalian	-	499.364	-	-	
4	Industri pengolahan	-	1.246.636	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	3.548.021	-	-	
6	Konstruksi	-	4.895.253	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	29.250	-	-	
10	Perantara keuangan	20.141.722	-	-	2.750.265	
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	
20	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	1.821.843	-	-	199.204	
	Total	21.963.565	10.218.524	-	2.949.469	

(dalam jutaan Rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	53.534	109.508	3.283.379	1.193	-
	-	-	4.492	11.157	2.268	369	-
	-	-	-	750	2.311.375	-	-
	-	-	8.453	184.926	34.670.391	83.048	-
	-	-	109	605	1.948.789	-	-
	-	-	116	3.628	1.829.492	18.069	-
	-	-	56.863	759.407	14.739.302	158.017	-
	-	-	20.374	90.737	137.316	1.630	-
	-	-	-	-	7.782.362	-	-
	-	-	-	-	20.778.076	-	-
	-	-	15.504	4.391	8.878.235	2.421	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.485	812	-	-
	-	-	96	29.362	2.895	185	-
	-	-	21	259.200	142.357	4.830	-
	369	-	35.507.170	2.494.193	5.966	167.755	-
	-	-	1.403	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.000.067	-	19.878	-
	-	-	-	4.830	659.055	16.594	6.036.466
	369	-	35.668.135	4.954.246	97.172.070	473.989	6.036.466

Tabel 3.b. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Desember 2019						
1	Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan penggalian	-	499.364	-	-	
4	Industri pengolahan	-	1.246.636	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	3.548.021	-	-	
6	Konstruksi	-	4.895.253	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	29.250	-	-	
10	Perantara keuangan	20.141.722	-	-	2.750.265	
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	
15	Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	
20	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	6.838.525	123.319	-	366.071	
	Total	26.980.247	10.341.843	-	3.116.336	

(dalam jutaan Rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	53.534	748.938	3.283.379	2.174	-
	-	-	4.492	44.781	2.268	444	-
	-	-	-	4.930	2.311.375	5	-
	-	-	8.453	516.068	34.670.390	83.917	-
	-	-	109	605	1.948.789	-	-
	-	-	116	3.628	1.829.492	18.069	-
	-	-	56.863	7.439.711	14.739.302	176.796	-
	-	-	20.374	267.415	137.316	2.248	-
	-	-	-	26.556	7.782.362	63	-
	-	-	-	802	20.806.914	-	-
	-	-	15.504	10.543	8.878.235	2.435	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.485	812	-	-
	-	-	96	32.598	2.895	201	-
	-	-	21	302.218	142.357	4.943	-
	369	-	35.507.170	3.287.389	5.966	169.393	-
	-	-	1.403	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.000.137	-	19.878	-
	-	-	-	11.447	659.055	16.635	7.103.913
	369	-	35.668.135	13.699.251	97.200.907	497.201	7.103.913

Tabel 4.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2019					
		Wilayah					
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan	129.514.518	2.876.028	18.775.197	13.568.928	870.726	165.605.396
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired loans</i>)						
	a. Belum jatuh tempo	759.895	20.421	183.322	132.860	-	1.096.498
	b. Telah jatuh tempo	21.094	26	15	100	-	21.235
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	311.450	-	10.587	-	-	322.037
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	425.594	30.404	178.712	218.409	-	853.118
5	Tagihan yang dihapus buku	2.495.551	260.944	1.136.619	333.482	-	4.226.596

Tabel 4.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2019					
		Wilayah					
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Tagihan	142.024.112	3.206.552	21.002.664	13.964.832	870.726	181.068.885
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired loans</i>)	-	-	-	-	-	-
	a. Belum jatuh tempo	759.895	20.421	183.322	132.860	-	1.096.498
	b. Telah jatuh tempo	108.890	5.244	20.706	9.065	-	143.905
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	311.450	-	10.587	-	-	322.037
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	631.565	43.205	236.030	234.438	-	1.145.237
5	Tagihan yang dihapus buku	2.970.130	292.799	1.270.365	395.672	-	4.928.966

Tabel 5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Desember 2019							
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	3.043.640	1.843	-	-	4.139	19.074
2	Perikanan	18.431	514	-	-	525	1.355
3	Pertambangan dan Penggalian	2.071.157	-	-	-	732	8.093
4	Industri pengolahan	31.077.983	135.518	8.059	43.411	54.235	297.714
5	Listrik, Gas dan Air	4.450.519	-	-	-	280	2.523
6	Konstruksi	6.502.458	39.819	-	17.170	13.247	61.585
7	Perdagangan besar dan eceran	15.268.553	254.353	8.002	62.381	238.381	623.329
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	269.815	8.926	5.000	19.043	5.825	19.832
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	7.262.381	36.852	-	14.279	15.313	51.862
10	Perantara keuangan	41.241.045	-	-	-	22.093	168.518
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	5.807.520	210.329	-	165.754	7.614	45.268
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	2.297	-	-	-	60	169
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	32.613	260	-	-	1.220	2.397
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	408.654	7.075	-	-	9.926	27.288
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	38.388.989	351.033	174	-	479.528	2.820.411
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	1.403	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	1.019.944	49.976	-	-	-	77.179
20	Lainnya (a.l untuk SBI dan SUN)	8.737.993	-	-	-	-	-
	Total	165.605.396	1.096.498	21.235	322.038	853.117	4.226.596

Tabel 5.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Desember 2019							
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	3.700.221	1.843	5.235	-	20.308	36.262
2	Perikanan	53.173	514	375	-	1.569	4.377
3	Pertambangan dan Penggalian	2.075.474	-	19	-	865	8.223
4	Industri pengolahan	31.421.213	135.518	12.474	43.411	65.454	322.808
5	Listrik, Gas dan Air	4.450.519	-	-	-	280	2.523
6	Konstruksi	6.502.458	39.819	-	17.170	13.247	61.585
7	Perdagangan besar dan eceran	22.195.996	254.353	107.878	62.381	466.742	1.225.771
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	453.999	8.926	8.231	19.043	12.714	42.135
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	7.289.780	36.852	293	14.279	16.092	53.188
10	Perantara keuangan	41.270.984	-	-	-	22.392	168.518
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	5.813.923	210.329	96	165.754	7.850	45.963
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	2.297	-	-	-	60	169
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	36.002	260	72	-	1.357	2.539
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	453.332	7.075	690	-	11.472	29.020
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	39.208.779	351.033	8.340	-	504.485	2.848.581
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	1.403	-	-	-	-	56
19	Bukan Lapangan Usaha	1.020.014	49.976	-	-	-	77.179
20	Lainnya (a.l untuk SBI dan SUN)	15.119.317	-	202	-	350	70
Total		181.068.885	1.096.498	143.905	322.038	1.145.236	4.928.966

Tabel 6.a. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2019	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	(85.456)	(832.660)
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan		
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	(268.164)	(868.408)
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	(109.600)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	124.192	1.132.131
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	(92.610)	(174.580)
	Saldo akhir	(322.038)	(853.117)

Tabel 6.b. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2019	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	(85.456)	(1.048.609)
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan		
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	(268.164)	(1.177.812)
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	(113.275)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	124.192	1.369.039
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	(92.610)	(174.579)
	Saldo akhir	(322.038)	(1.145.236)

9. Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan standar yang sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku, yaitu SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Dengan pendekatan standar tersebut bobot risiko ditetapkan berdasarkan peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio atau persentase tertentu untuk

jenis tagihan tertentu. Portofolio kelompok tagihan dibagi dalam kategori tagihan kepada pemerintah, tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional, kredit beragun rumah tinggal, kredit beragun properti komersial, tagihan kepada entitas sektor publik, tagihan kepada bank, tagihan kepada pegawai dan pensiun, tagihan kepada usaha mikro, kecil dan portofolio ritel, tagihan kepada korporasi dan tagihan yang telah jatuh tempo.

Bobot risiko ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Regulator. Apabila terdapat tagihan yang telah memiliki peringkat, maka Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Regulator.

Manajemen Risiko

Tabel 7.a. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-		
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-		
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3		
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)		
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1	Tagihan kepada Pemerintah		56.557	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		102.667	299.564	4.629.828		
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-		
4	Tagihan kepada Bank		216.116	812.153	1.077.154		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		275.000	7.233.430	1.762.879		
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	Total		650.341	8.345.147	7.469.861		

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019									
Tagihan Bersih									
Peringkat Jangka panjang				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	(15)
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.907.008
-	499.364	-	-	-	-	-	-	-	4.687.101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.383	144.499	-	-	-	-	-	-	-	607.163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.668.135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.954.246
1.129.489	634.239	194.314	-	-	-	-	-	-	85.942.719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	473.988
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.036.467
1.221.872	1.278.102	194.314	-	-	-	-	-	-	160.277.195

Tabel 7.b. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan kepada Pemerintah		56.557	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		102.667	299.564	4.753.147
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		303.878	812.153	1.077.154
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal				
6	Kredit Beragun Properti Komersial				
7	Kredit Pegawai/Pensiunan				
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9	Tagihan kepada Korporasi		275.000	7.233.430	1.762.879
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo				
11	Aset Lainnya				
	Total		738.103	8.345.147	7.593.180

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019									
Tagihan Bersih									
Peringkat Jangka panjang				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	(16)
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	-	-	26.923.690	
-	499.364	-	-	-	-	-	-	4.687.101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92.383	144.499	-	-	105	-	-	-	686.163	
								369	
								-	
								35.668.135	
								13.699.251	
1.129.489	634.239	194.314	-	-	-	-	-	85.971.556	
								497.201	
								7.103.913	
1.221.872	1.278.102	194.314	-	105	-	-	-	175.237.378	

10. Pengungkapan Risiko Kredit Counterparty

Risiko kredit *counterparty* bagi Bank adalah risiko yang timbul dari kegagalan pembayaran *counterparty* atas suatu kontrak dengan pihak Bank yang menyebabkan potensi kerugian bagi bank untuk menggantikan kontrak tersebut. *Counterparty credit risk* pada umumnya timbul dari FX *swap* dan transaksi *repo/reverse repo*. Mitigasi *counterparty credit risk* dilakukan sesuai SE OJK No 42/SEOJK.03/2016, yaitu dengan pengakuan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dan dilengkapi dengan kebijakan Bank untuk mengelola risiko kredit dari *counterparty*.

Eksposur risiko kredit *counterparty* per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.a. Pengungkapan Risiko Kegagalan Counterparty (Transaksi Derivatif Over the Counter) - Bank Secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

No	Variable yang Mendasari	31 Desember 2019							
		Nilai Nosional			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 Tahun - < 5 Tahun	> 5 Tahun					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Suku Bunga	12.549.780	4.504.022	4.520.133	75.078	246.878	231.638	0	231.638
2	Nilai Tukar	-	787.439	14.973.872	180.008	130.097	465.742	0	465.742
3	Lainnya	-	3.609	24.828.770	584.662	517.244	1.856.436	0	1.856.436
	Total	12.549.780	5.295.070	44.322.775	839.748	894.218	2.553.815	0	2.553.815

Tabel 8.b. Pengungkapan Risiko Kegagalan Counterparty (Transaksi Derivatif Over the Counter) - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Variable yang Mendasari	31 Desember 2019							
		Nilai Nosional			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 Tahun - < 5 Tahun	> 5 Tahun					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Suku Bunga	12.549.780	4.504.022	4.520.133	75.078	246.878	231.638	0	231.638
2	Nilai Tukar	-	787.439	14.973.872	180.008	130.097	465.742	0	465.742
3	Lainnya	-	3.609	24.828.770	584.662	517.244	1.856.436	0	1.856.436
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	12.549.780	5.295.070	44.322.775	839.748	894.218	2.553.815	0	2.553.815

Tabel 9.a. Pengungkapan Risiko Kegagalan Counterparty (Transaksi Reverse Repo) - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			
		Nilai Wajar Tagihan	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

Tabel 9.b. Pengungkapan Risiko Kegagalan Counterparty (Transaksi Reverse Repo) - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			
		Nilai Wajar Tagihan	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

Saat ini, Bank tidak memiliki eksposur atas sekuritisasi aset.

11. Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit

Bank mengadopsi serangkaian kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Bank memiliki panduan tentang jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan yang diterima adalah sebagai berikut:

- Tanah dan/atau bangunan
- Kendaraan
- Peralatan (termasuk mesin dan alat berat)
- *Cash collateral*
- SBLC
- Piutang
- Persediaan

Tabel 10.a. Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan kepada Pemerintah	21.946.714	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	402.231	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	1.431.084	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	368	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	33.111	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	120.170	6.368.501	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	216	-	-	-	
11	Aset Lainnya	1.587.729	-	-	-	-	
Total Eksposur Neraca		23.654.613	8.235.143	368	-	-	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	32.473	1.137.500	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
Total Eksposur TRA		32.473	1.137.500	-	-	-	
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan kepada Pemerintah	16.851	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	530.016	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		16.851	530.016	-	-	-	

(dalam jutaan Rupiah)

						ATMR	Beban Modal
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-	-	-
	9.420.292	-	109.134	-	-	4.899.726	391.978
	-	-	-	-	-	-	-
	661.442	-	-	-	-	616.938	49.355
	-	-	-	-	-	129	10
	-	-	-	-	-	-	-
	35.668.136	-	-	-	-	17.834.068	1.426.725
	-	4.921.134	-	-	-	3.697.473	295.798
	10.035.631	-	67.093.813	235.255	-	73.738.211	5.899.057
	-	-	-	473.773	-	710.703	56.856
	-	-	4.426.216	22.522	-	4.459.998	356.800
	55.785.501	4.921.134	71.629.163	731.550	-	105.957.246	8.476.579
	-	-	-	-	-	-	-
	286.867	-	-	-	-	143.434	11.475
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	4.360.307	-	6.108.397	-	-	8.516.049	681.284
	-	-	-	-	-	-	-
	4.647.174	-	6.108.397	-	-	8.659.484	692.759
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	322.986	-	3.940	-	-	1.038.769	83.102
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1.680.023	-	-	1.680.022	134.402
	322.986	-	1.683.963	-	-	2.718.791	217.504

Tabel 10.b. Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan kepada Pemerintah	26.963.396	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	402.231	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	1.597.951	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	368	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	33.111	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	120.170	6.368.501	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	216	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	2.299.062	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	29.382.628	8.402.010	368	-	-	-
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	32.473	1.137.500	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	32.473	1.137.500	-	-	-	-
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan kepada Pemerintah	16.851	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	530.016	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	16.851	530.016	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

						ATMR	Beban Modal
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-	-	-
	9.543.611	-	109.134	-	-	4.961.386	396.911
	-	-	-	-	-	-	-
	661.442	-	-	-	-	650.311	52.025
	-	-	-	-	-	129	10
	-	-	-	-	-	-	-
	35.668.136	-	-	-	-	17.834.068	1.426.725
	-	13.666.139	-	-	-	10.256.227	820.498
	10.064.469	-	67.093.813	235.255	-	73.738.211	5.899.057
	-	-	23.213	473.773	-	733.916	58.713
	-	-	4.782.329	22.522	-	4.816.110	385.289
	55.937.658	13.666.139	72.008.489	731.550	-	112.990.358	9.039.228
	-	-	-	-	-	-	-
	286.867	-	-	-	-	143.433	11.475
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	4.360.307	-	6.108.397	-	-	8.516.050	681.284
	-	-	-	-	-	-	-
	4.647.174	-	6.108.397	-	-	8.659.484	692.759
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	322.986	-	3.940	-	-	1.038.769	83.102
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1.680.023	-	-	1.680.022	134.402
	322.986	-	1.683.963	-	-	2.718.791	217.504

Tabel 11.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih	Bagian yang dijamin:				Bagian yang tidak dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(5)+(6)+(7)
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan kepada Pemerintah	21.946.714	-	-	-	-	21.946.714
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	9.931.657	390.230	-	-	-	9.541.427
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	2.092.526	-	-	-	-	2.092.526
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	368	-	-	-	-	368
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	35.668.136	-	-	-	-	35.668.136
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.954.245	-	-	33.111	-	4.921.134
9	Tagihan kepada Korporasi	83.853.370	8.392.930	-	-	-	75.460.440
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	473.989	-	-	216	-	473.773
11	Aset Lainnya	6.036.467	-	-	-	-	6.036.467
Total Eksposur Neraca		164.957.472	8.783.160	-	33.327	-	156.140.985
B Eksposur Rekening Administratif							
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	286.867	-	-	-	-	286.867
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	11.638.677	4.392.780	-	-	-	7.245.897
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Rekening Administratif		11.925.544	4.392.780	-	-	-	7.532.764
C Eksposur Counterparty Credit Risk							
1	Tagihan kepada Pemerintah	16.851	-	-	-	-	16.851
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	856.943	-	-	-	-	856.943
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	1.680.023	-	-	-	-	1.680.023
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		2.553.816	-	-	-	-	2.553.816
Total (A+B+C)		179.436.832	13.175.940	-	33.327	-	166.227.565

Tabel 11.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih	Bagian yang dijamin:				Bagian yang tidak dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(5)+(6)+(7)
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan kepada Pemerintah	26.963.396	-	-	-	-	26.963.396
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	10.054.976	390.230	-	-	-	9.664.746
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	2.259.393	-	-	-	-	2.259.393
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	368	-	-	-	-	368
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	35.668.136	-	-	-	-	35.668.136
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	13.699.250	-	-	33.111	-	13.666.139
9	Tagihan kepada Korporasi	83.882.208	8.421.768	-	-	-	75.460.440
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	497.202	-	-	216	-	496.986
11	Aset Lainnya	7.103.913	-	-	-	-	7.103.913
Total Eksposur Neraca		180.128.842	8.811.998	-	33.327	-	171.283.517
B Eksposur Rekening Administratif							
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	286.867	-	-	-	-	286.867
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	11.638.677	4.392.780	-	-	-	7.245.897
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Rekening Administratif		11.925.544	4.392.780	-	-	-	7.532.764
C Eksposur Counterparty Credit Risk							
1	Tagihan kepada Pemerintah	16.851	-	-	-	-	16.851
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	856.943	-	-	-	-	856.943
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	1.680.023	-	-	-	-	1.680.023
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		2.553.816	-	-	-	-	2.553.816
Total (A+B+C)		194.608.202	13.204.778	-	33.327	-	181.370.097

12. Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Tabel 12.a. Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individual

Tabel 12.a.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	21.946.714	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	9.931.657	5.094.841	4.899.726
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	2.092.526	616.938	616.938
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	369	129	129
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	35.668.135	17.834.068	17.834.068
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.954.246	3.715.684	3.697.473
9	Tagihan kepada Korporasi	83.853.370	77.994.761	73.738.211
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	473.988	710.984	710.703
11	Aset Lainnya	6.036.467	-	4.459.999
Total		164.957.472	105.967.404	105.957.246

Tabel 12.a.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	286.867	143.433	143.433
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	11.638.677	10.728.672	8.516.051
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-
Total		11.925.544	10.872.105	8.659.484

Tabel 12.a.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (counterparty credit risk)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	16.851	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	856.943	-	271.437
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	1.680.022	-	1.680.022
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA)</i>	-	-	767.332
Total		2.553.816	-	2.718.791

Tabel 12.a.4. Eksposur Risiko Setelmen

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2019		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1.	<i>Delivery versus payment</i>	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-	-
	Total	-	-	-

Tabel 12.a.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2019	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR
1.	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-
2.	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-
3.	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan		-
4.	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-
5.	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-
6.	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-
7.	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.		-
	Total	-	-

Tabel 12.a.6. Pengungkapan Transaksi Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori	31 Desember 2019	
		Tagihan Bersih	ATMR
1.	Peringkat AAA s.d BBB-	786.498	235.147
2.	Peringkat BB+ s.d B-	22.681	13.311
3.	Peringkat dibawah B-	-	-
4.	Tanpa Peringkat	1.744.638	1.703.001
	Total	2.553.816	1.951.459

Tabel 12.a.7. Pengungkapan Kredit Beragun Rumah Tinggal

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori	31 Desember 2019	
		Tagihan Bersih	ATMR
1.	LTV ≤ 50%	-	-
2.	50% < LTV ≤ 70%	-	-
3.	70% < LTV ≤ 100%	369	129
	Total	369	129

Tabel 12.a.8. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019
Total ATMR Risiko Kredit	117.335.520
Total Faktor Pengurang Modal	-

Tabel 12.b. Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel 12.b.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	26.963.396	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	10.054.976	5.156.501	4.961.386
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	2.259.393	650.311	650.311
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	369	129	129
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	35.668.135	17.834.068	17.834.068
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	13.699.251	10.274.438	10.256.227
9	Tagihan kepada Korporasi	83.882.208	78.009.180	73.738.211
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	497.201	734.197	733.916
11	Aset Lainnya	7.103.913	-	4.816.110
	Total	180.128.842	112.658.823	112.990.357

Tabel 12.b.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	286.867	143.433	143.433
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	11.638.677	10.728.672	8.516.051
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-
	Total	11.925.543	10.872.105	8.659.484

Tabel 12.b.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (counterparty credit risk)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	16.851	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	856.943	-	271.437
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	1.680.022	-	1.680.022
7	Exposure tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA)	-	-	767.332
	Total	2.553.815	-	2.718.791

Tabel 12.b.4. Eksposur Risiko Setelmen

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2019		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1.	<i>Delivery versus payment</i>	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-	
	Total	-	-	-

Tabel 12.b.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2019	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR
1.	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-
2.	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi	-	-
3.	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan		-
4.	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-
5.	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-
6.	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-
7.	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.		-
	Total	-	-

Tabel 12.b.6. Pengungkapan Transaksi Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori	31 Desember 2019	
		Tagihan Bersih	ATMR
1.	Peringkat AAA s.d BBB-	786.498	235.147
2.	Peringkat BB+ s.d B-	22.681	13.311
3.	Peringkat dibawah B-	-	-
4.	Tanpa Peringkat	1.696.872	1.680.022
	Total	2.506.051	1.928.480

Tabel 12.b.7. Pengungkapan Kredit Beragun Rumah Tinggal

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori	31 Desember 2019	
		Tagihan Bersih	ATMR
1.	LTV ≤ 50%	-	-
2.	50% < LTV ≤ 70%	-	-
3.	70% < LTV ≤ 100%	369	129
	Total	369	129

Tabel 12.b.8. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019
Total ATMR Risiko Kredit	124.368.632
Total Faktor Pengurang Modal	-

B. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada posisi keuangan dan akun administratif, termasuk transaksi derivatif, yang mungkin timbul karena perubahan umum pada kondisi pasar. Termasuk dalam kategori risiko ini adalah risiko opsi perubahan harga.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank secara berkala melakukan peninjauan terhadap kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam mengelola risiko pasar, sehingga selaras dengan peraturan eksternal, *risk appetite* dan strategi bisnis Bank, kompleksitas transaksi, serta karakteristik bisnis dan produk.

Kebijakan dan prosedur Bank juga telah secara jelas mendefinisikan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas antara unit pengambil risiko (*Business/First Line of Defense*) dengan unit pemantau risiko (Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)/*Second Line of Defense*), termasuk di dalamnya menetapkan proses revaluasi dan metodologi pengukuran, proses monitoring serta proses eskalasi untuk mendukung pengelolaan risiko pasar secara efektif.

Penetapan limit risiko pasar ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaian dengan perkembangan bisnis serta kondisi ekonomi dan pasar saat ini berdasarkan faktor-faktor risiko nilai tukar dan suku bunga.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko pasar senantiasa dilakukan melalui analisis setiap produk, transaksi atau layanan yang ditawarkan oleh Bank melalui *product program*, hingga produk, transaksi atau layanan tersebut menjadi eksposur risiko pasar yang diukur, dipantau dan dikontrol secara harian.

Untuk setiap pengembangan fitur dan pertumbuhan yang signifikan, risiko pasar senantiasa diidentifikasi kembali secara terus menerus dan didiskusikan bersama antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dalam hal ini adalah unit kerja Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, dengan unit-unit bisnis terkait.

Kebijakan internal BTPN menetapkan Bank untuk tidak memiliki eksposur *trading book* di surat berharga (sekuritas). Seluruh surat berharga yang dimiliki Bank dikategorikan sebagai *banking book* dengan tujuan menjadikannya aset likuid yang dapat digunakan kapan saja jika ada kebutuhan likuiditas.

Eksposur valuta asing yang dilakukan Unit *Treasury* sebagian besar berasal dari transaksi FX swap atas sumber dana yang diperoleh dalam mata uang asing. Pengukuran eksposur risiko nilai tukar dilakukan atas posisi devisa neto Bank. Rata-rata *net open position* Bank di bawah 1,0% dari modal, atau jauh di bawah ketentuan ambang batas maksimum Bank Indonesia, yaitu 20,0% dari modal.

Bank melakukan proses revaluasi (*mark to market/mtm*) berdasarkan harga pasar setiap akhir hari dan mengamati eksposur risiko pasar secara harian sebagai bagian dari mitigasi risiko dan memastikan eksposur tersebut tidak melebihi limit yang telah ditetapkan oleh *Asset Liabilities Committee* (ALCO).

Perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko pasar dan kebutuhan modal atas eksposur risiko pasar dilakukan berdasarkan pendekatan standar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berikut ini adalah Tabel Pengungkapan Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar.

Tabel 13. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2019			
		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga				
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	61.250	765.623	61.250	765.623
2	Risiko Nilai Tukar	2.936	36.702	2.936	36.702
3	Risiko Ekuitas			-	-
4	Risiko Komoditas			-	-
5	Risiko <i>Option</i>			-	-
	Total	64.186	802.326	64.186	802.326

Pengelolaan risiko pasar dilakukan dengan melaporkan hasil pengukuran dan pemantauan limit risiko pasar yang telah ditetapkan ALCO secara harian. Bank juga secara rutin melakukan simulasi proyeksi *net interest income* dan *earning at risk* dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komite ALCO dan Komite Manajemen Risiko (KMR).

Setiap tahun, atau bila ada penambahan fitur atau produk, Bank akan melakukan validasi atas hasil pengukuran dari sistem yang digunakan. Sistem informasi yang ada saat ini telah dapat memfasilitasi proses revaluasi (*mark to market*), memberikan informasi yang terkini atas eksposur risiko pasar Bank, serta memonitor pergerakan faktor risiko pasar Bank.

3. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Pasar

Pemantauan terhadap Risiko Pasar dilakukan melalui Asset Liabilities Committee (ALCO) dan Komite Manajemen Risiko. Sistem Pengendalian Intern telah efektif

dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar. Internal Audit melakukan audit secara berkala terhadap kecukupan kebijakan, prosedur, limit, serta toleransi dan kepatuhan dari setiap pihak yang terkait dengan penerapan manajemen risiko pasar sesuai dengan rencana audit Bank yang telah ditetapkan.

4. Pengungkapan Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*

Eksposur *banking book* atas aset dan liabilitas Bank diukur menggunakan analisis sensitivitas berdasarkan profil kesenjangan *repricing* suku bunga untuk menghitung dampak perubahan suku bunga terhadap laba bersih Bank dengan menggunakan pendekatan Pendapatan Bunga Bersih (NII), dan dampak perubahan suku bunga terhadap modal Bank, atau dengan menggunakan pendekatan *Economic Value of Equity* (EVE).

RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk. (individu)

Posisi Laporan : Desember 2019

ANALISA KUALITATIF

Risiko suku bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book/IRRBB*) didefinisikan sebagai risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Sesuai dengan ketentuan, Bank melakukan pengukuran dan pemantauan IRRBB dengan menggunakan metode EVE (*Economic Value of Equity*) dan Δ NII (*Net Interest Income*). Pada pemantauan IRRBB ini, cakupan posisi *Banking Book* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas Bank. Berdasarkan hal tersebut, maka produk-produk yang memiliki suku bunga tercakup dalam perhitungan IRRBB Bank seperti:

Aset

- Penempatan pada Bank Indonesia
- Penempatan pada Bank Lain
- Surat Berharga yang Dimiliki
- Tagihan Akseptasi
- Kredit yang Diberikan

Kewajiban

- Dana Pihak Ketiga
- Kewajiban pada Bank Lain
- Kewajiban Akseptasi
- Pinjaman Diterima
- Surat Berharga Diterbitkan

Derivative

- Transaksi *Interest Rate Swap*
- Transaksi *Cross Currency Swap*

Bank tidak memperhitungkan Modal dalam perhitungan IRRBB.

Dalam melakukan pengelolaan IRRBB, Bank telah menetapkan *risk appetite* yang diwujudkan dalam bentuk internal *buffer* atas maksimum Δ EVE yang harus dijaga. *Risk Management* akan melakukan pengukuran dan pemantauan IRRBB secara berkala untuk dilaporkan kepada Direksi dan ALCO/KMR. Apabila tingkat IRRBB telah mendekati atau melampaui angka *buffer* tersebut, maka ALCO akan memutuskan strategi bisnis maupun strategi lindung nilai yang harus dilakukan untuk mengembalikan angka IRRBB ke tingkatan yang diinginkan. Unit bisnis dan *Treasury* akan bertanggung jawab untuk melakukan strategi bisnis dan lindung nilai yang telah dirumuskan tersebut

Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemantauan atas IRRBB akan dilakukan secara bulanan. Sementara faktor-faktor pendukung modeling IRRBB seperti rasio pelunasan dipercepat (*prepayment ratio*) dan produk yang tidak memiliki jatuh tempo (*non-maturity deposits/NMD*) akan dikaji ulang secara tahunan.

Pengukuran IRRBB dilakukan dengan menggunakan metode standard sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut, telah dirumuskan beberapa skenario shock suku bunga yang harus digunakan dalam perhitungan IRRBB sebagai berikut:

EVE

- *Parallel shock up*
- *Parallel shock down*
- *Steeper shock*
- *Flattener shock*
- *Short rate shock up*
- *Short rate shock down*

Δ NII

- *Parallel shock up*
- *Parallel shock down*

Secara internal, dalam melakukan pemantauan IRRBB, BTPN juga melakukan pengukuran sensitivitas nilai aset dan kewajibannya dengan menggunakan pendekatan *Basis Point Value* (BPV). BPV mengukur perubahan nilai wajar atas aset dan kewajiban Bank sebagai akibat dari perubahan suku bunga sebesar 0,01%. Pengukuran BPV Bank meliputi seluruh produk Bank yang memiliki suku bunga (*interest rate bearing products*), namun tidak termasuk:

- Kredit dengan kolektibilitas selain 1
- Non Maturing Deposits/NMD (Giro dan Tabungan)
- Modal

Bank juga telah memperhitungkan *prepayment ratio* khususnya untuk kredit segmen pensiun.

Dalam melakukan pengelolaan IRRBB terutama dalam melakukan lindung nilai Bank melakukan transaksi swap suku bunga (*Interest Rate Swap/IRS*) untuk mengubah *asset/kewajiban* dengan suku bunga tetap (*fix rate*) menjadi suku bunga mengambang (*floating rate*). Namun demikian atas transaksi lindung nilai tersebut, Bank tidak menerapkan *hedge accounting* sehingga seolah tidak ada keterkaitan antara kedua transaksi tersebut.

Beberapa asumsi permodelan yang digunakan dalam pengukuran IRRBB adalah sebagai berikut:

- Marjin komersial dan *spread component* atas *asset* dan kewajiban Bank telah diperhitungkan dalam arus kas Bank. Namun kedua hal tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat suku bunga diskonto Bank, sehingga tingkat suku bunga diskonto hanya ditentukan dari *risk-free rate*
- Dalam menghitung rata-rata jangka waktu dari NMD, khususnya tabungan, penurunan atas saldo tabungan pada setiap periode sampai dengan perubahan suku bunganya dianggap sebagai rasio run off dari produk NMD. Selain itu, NMD akan dianggap sebagai jatuh tempo pada saat dilakukannya perubahan suku bunga dan periode perhitungan bunga akan dihitung ulang. Sementara untuk produk Giro, Bank tidak melakukan perhitungan behavioral karena secara konservatif Bank mengasumsikan produk Giro yang dimiliki Bank termasuk Simpanan Tidak Stabil (*Non Stable Deposits*) dan memasukkannya ke periode paling pendek.
- *Prepayment* ratio untuk kredit khususnya untuk segmen Purnabakti, Mitra Usaha Rakyat dan *Consumer Finance* (khusus untuk BFI dan OMA) dihitung dengan menggunakan metode *Single Monthly Mortality* (SMM). Namun demikian, karena kebijakan Bank yang akan mengenakan denda signifikan atas pencairan deposito sebelum jatuh tempo, maka Bank tidak memperhitungkan *Time Deposit Redemption Rate* (TDRR).
- Bank tidak memasukkan komponen Modal dalam perhitungan IRRBB baik untuk perhitungan Δ EVE maupun Δ NII
- Bank melakukan perhitungan IRRBB atas eksposur dalam 3 mata uang yang signifikan (Rp, USD dan JPY) secara terpisah dengan menggunakan tingkat suku bunga diskonto, *forward rate* serta skenario *shock* suku bunga tersendiri untuk setiap mata uang. Untuk eksposur dalam mata uang yang tidak signifikan diperhitungkan secara gabungan dengan eksposur dalam mata uang Rp.

Dari hasil pengukuran IRRBB untuk posisi Desember 2019 dapat dilihat bahwa EVE tertinggi Bank terjadi pada skenario Parallel Shock Up yaitu sebesar Rp2,21 triliun (9.18% dari CET1). Bank masih memiliki eksposur kredit jangka panjang dengan suku bunga tetap yang cukup besar, terutama dari segmen kredit pensiun sebesar Rp35,80 triliun. Kredit segmen pensiun ini memberikan kontribusi EVE sebesar Rp1,92 triliun (7.98% dari CET1). Sementara dari perspektif NII, pada skenario Parallel Shock Up, NII Bank akan mengalami penurunan sebesar Rp0,33 triliun. Hal ini merupakan 6,27% dari proyeksi NII Bank pada kondisi baseline.

Apabila dibandingkan dengan periode September 2019, Δ EVE Bank mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena ada Bank penurunan eksposur Bank dalam suku bunga tetap akibat penurunan total kredit Bank baik yang berasal dari segmen kredit pensiun serta peningkatan jumlah kewajiban jangka panjang berbunga tetap dengan adanya penerbitan obligasi dan penaciran pinjaman dari IFC. Selain itu, Δ EVE juga mengalami penurunan juga disebabkan karena peningkatan nilai CET1 Bank. Sementara untuk Δ NII, Bank mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi September 2019 yang disebabkan karena adanya peningkatan pada proyeksi NII serta penurunan nilai Δ NII pada skenario *Parallel Up* yang disebabkan oleh penurunan jumlah deposito berjangka yang memperbaiki posisi Gap Bank.

ANALISA KUANTITATIF

- Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) yang diterapkan untuk produk tabungan adalah 51 bulan. Sementara produk Giro dimasukkan ke periode penyesuaian suku bunga terpendek (*overnight*).
- Jangka waktu penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) telama yang diterapkan untuk produk tabungan adalah 113 bulan.

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk. (individu)

Posisi Laporan : Desember 2019

Mata Uang : Total dalam Rp

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE	Δ NII
Period	T	T
<i>Parallel up</i>	-2.210.846,30	-329.180,67
<i>Parallel down</i>	2.003.276,83	256.428,97
<i>Steeper</i>	1.026.579,26	
<i>Flattener</i>	-1.517.149,16	
<i>Short rate up</i>	-1.460.321,70	
<i>Short rate down</i>	1.455.309,01	
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	2.210.846,30	329.180,67
Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	24.077.577,85	5.251.085,89
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	9,18%	6,27%

C. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dengan menggunakan arus kasnya dan/atau aset likuidnya yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko likuiditas juga berkaitan dengan optimalisasi struktur neraca dan risiko struktural terhadap

ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Pengelolaan risiko likuiditas Bank berupaya agar dapat mengelola risiko likuiditas dalam perspektif jangka pendek maupun struktural.

Dalam perspektif jangka pendek, risiko likuiditas dikelola dengan mengoptimalkan arus kas berdasarkan kontrak dan perilaku, dan mensimulasikan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) melalui *stress testing*. Dalam perspektif jangka panjang, risiko likuiditas

dikelola melalui *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Risiko likuiditas dikelola secara struktural dengan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh regulator, dan dikelola secara internal berdasarkan keputusan ALCO sebagaimana tercermin dalam struktur neraca dan profil jatuh tempo.

Profil jatuh tempo kontraktual per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 14.a.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-pos	31 Desember 2019					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1.	Kas	1.559.111	1.559.111	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11.941.030	6.541.401	5.358.818	-	40.811	-
3.	Penempatan pada bank lain	449.351	449.351	-	-	-	-
4.	Surat Berharga	2.213.629	77.607	859.981	10.649	287.557	977.835
5.	Kredit yang diberikan	95.021.947	20.432.476	4.999.858	4.556.110	6.857.226	58.176.277
6.	Tagihan lainnya	1.626.346	591.281	205.666	89.022	225.973	514.404
7.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total Aset		112.811.415	29.651.228	11.424.324	4.655.781	7.411.566	59.668.517
B. Kewajiban							
1.	Dana Pihak Ketiga	65.421.253	49.372.233	13.424.273	1.765.566	842.673	16.507
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Kewajiban pada bank lain	4.371.363	2.926.414	1.444.950	-	-	-
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	3.190.628	-	-	1.301.409	898.986	990.232
5.	Pinjaman yang Diterima	6.853.477	-	-	2.499.061	2.000.000	2.354.416
6.	Kewajiban lainnya	1.397.649	523.714	254.381	75.578	80.649	463.327
7.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total Kewajiban		81.234.371	52.822.361	15.123.604	5.641.615	3.822.308	3.824.483
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		31.577.045	(23.171.134)	(3.699.280)	(985.834)	3.589.258	55.844.034
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1.	Komitmen	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
2.	Kontinjensi	6.856.631	1.659.088	2.513.133	2.204.530	60	479.820
Total Tagihan Rekening Administratif		7.856.631	1.659.088	2.513.133	2.204.530	60	1.479.820
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1.	Komitmen	43.767.500	1.177.805	1.582.358	4.622.067	20.026.280	16.358.990
2.	Kontinjensi	4.733.590	375.106	1.623.317	2.315.811	148.331	271.026
Total Kewajiban Rekening Administratif		48.501.090	1.552.910	3.205.676	6.937.877	20.174.611	16.630.016
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(40.644.459)	106.178	(692.543)	(4.733.347)	(20.174.551)	(15.150.196)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]		(9.067.415)	(23.064.956)	(4.391.823)	(5.719.181)	(16.585.293)	40.693.838
Selisih Kumulatif			(23.064.956)	(27.456.779)	(33.175.960)	(49.761.253)	(9.067.415)

Tabel 14.a.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-pos	31 Desember 2019					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1.	Kas	28.618	28.618	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8.127.100	8.127.100	-	-	-	-
3.	Penempatan pada bank lain	844.080	844.080	-	-	-	-
4.	Surat Berharga	769.663	307.463	140.039	198.632	123.529	-
5.	Kredit yang diberikan	37.738.662	9.933.891	5.043.348	1.482.741	1.962.821	19.315.860
6.	Tagihan lainnya	906.485	187.314	266.090	387.282	4.071	61.729
7.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total Aset		48.414.609	19.428.467	5.449.477	2.068.655	2.090.422	19.377.589
B. Kewajiban							
1.	Dana Pihak Ketiga	12.071.676	11.376.775	368.182	140.580	186.139	-
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Kewajiban pada bank lain	7.288.313	5.900.063	1.388.250	-	-	-
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5.	Pinjaman yang Diterima	37.232.865	-	-	-	-	37.232.865
6.	Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-
7.	Lain-lain	385.757	111.077	130.520	85.600	4.055	54.505
Total Kewajiban		56.978.611	17.387.915	1.886.952	226.180	190.195	37.287.370
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		(8.564.002)	2.040.552	3.562.525	1.842.475	1.900.227	(17.909.781)
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1.	Komitmen	40.482.674	8.180.317	10.367.789	1.459.915	1.559.734	18.914.919
2.	Kontinjensi	12.982.396	307.914	481.751	1.147.097	2.172.695	8.872.939
Total Tagihan Rekening Administratif		53.465.070	8.488.231	10.849.540	2.607.012	3.732.429	27.787.858
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1.	Komitmen	68.796.585	8.461.089	2.168.504	6.552.578	17.899.291	33.715.123
2.	Kontinjensi	4.190.987	415.024	14.472	203.571	453.380	3.104.539
Total Kewajiban Rekening Administratif		72.987.572	8.876.113	2.182.976	6.756.149	18.352.672	36.819.663
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(19.522.502)	(387.883)	8.666.564	(4.149.137)	(14.620.243)	(9.031.805)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]		(28.086.504)	1.652.670	12.229.089	(2.306.661)	(12.720.016)	(26.941.586)
Selisih Kumulatif			1.652.670	13.881.759	11.575.098	(1.144.918)	(28.086.504)

Tabel 14.b.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-pos	31 Desember 2019					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1.	Kas	2.270.444	2.270.444	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	15.123.442	8.027.682	5.862.887	1.192.062	40.811	-
3.	Penempatan pada bank lain	487.218	487.218	-	-	-	-
4.	Surat Berharga	4.300.218	870.102	1.342.998	10.649	347.900	1.728.569
5.	Kredit yang diberikan	104.111.122	20.549.068	5.452.941	5.776.587	11.833.762	60.498.764
6.	Tagihan lainnya	1.626.346	591.281	205.666	89.022	225.973	514.404
7.	Lain-lain	356.112	356.112	-	-	-	-
Total Aset		128.274.903	33.151.908	12.864.493	7.068.320	12.448.445	62.741.738
B. Kewajiban							
1.	Dana Pihak Ketiga	74.867.803	56.671.486	15.271.568	2.022.011	886.220	16.517
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Kewajiban pada bank lain	4.371.363	2.926.414	1.444.950	-	-	-
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	3.190.628	-	-	1.301.409	898.986	990.232
5.	Pinjaman yang Diterima	6.853.477	-	-	2.499.061	2.000.000	2.354.416
6.	Kewajiban lainnya	1.397.649	523.714	254.381	75.578	80.649	463.327
7.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total Kewajiban		90.680.921	60.121.614	16.970.899	5.898.060	3.865.855	3.824.493
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		37.593.983	(26.969.707)	(4.106.406)	1.170.260	8.582.590	58.917.245
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1.	Komitmen	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
2.	Kontinjensi	6.856.631	1.659.088	2.513.133	2.204.530	60	479.820
Total Tagihan Rekening Administratif		7.856.631	1.659.088	2.513.133	2.204.530	60	1.479.820
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1.	Komitmen	43.777.500	1.187.805	1.582.358	4.622.067	20.026.280	16.358.990
2.	Kontinjensi	4.733.590	375.106	1.623.317	2.315.811	148.331	271.026
Total Kewajiban Rekening Administratif		48.511.090	1.562.910	3.205.676	6.937.877	20.174.611	16.630.016
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(40.654.459)	96.178	(692.543)	(4.733.347)	(20.174.551)	(15.150.196)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]		(3.060.477)	(26.873.529)	(4.798.949)	(3.563.087)	(11.591.961)	43.767.049
Selisih Kumulatif			(26.873.529)	(31.672.478)	(35.235.565)	(46.827.526)	(3.060.477)

Tabel 14.b.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-pos	31 Desember 2019					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1.	Kas	28.618	28.618	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8.127.100	8.127.100	-	-	-	-
3.	Penempatan pada bank lain	844.080	844.080	-	-	-	-
4.	Surat Berharga	769.663	307.463	140.039	198.632	123.529	-
5.	Kredit yang diberikan	37.738.662	9.933.891	5.043.348	1.482.741	1.962.821	19.315.860
6.	Tagihan lainnya	906.485	187.314	266.090	387.282	4.071	61.729
7.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Total Aset		48.414.609	19.428.467	5.449.477	2.068.655	2.090.422	19.377.589
B. Kewajiban							
1.	Dana Pihak Ketiga	12.071.676	11.376.775	368.182	140.580	186.139	-
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Kewajiban pada bank lain	7.288.313	5.900.063	1.388.250	-	-	-
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5.	Pinjaman yang Diterima	37.232.865	-	-	-	-	37.232.865
6.	Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-
7.	Lain-lain	385.757	111.077	130.520	85.600	4.055	54.505
Total Kewajiban		56.978.611	17.387.915	1.886.952	226.180	190.195	37.287.370
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		(8.564.002)	2.040.552	3.562.525	1.842.475	1.900.227	(17.909.781)
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1.	Komitmen	40.482.674	8.180.317	10.367.789	1.459.915	1.559.734	18.914.919
2.	Kontinjensi	12.982.396	307.914	481.751	1.147.097	2.172.695	8.872.939
Total Tagihan Rekening Administratif		53.465.070	8.488.231	10.849.540	2.607.012	3.732.429	27.787.858
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1.	Komitmen	68.796.585	8.461.089	2.168.504	6.552.578	17.899.291	33.715.123
2.	Kontinjensi	4.190.987	415.024	14.472	203.571	453.380	3.104.539
Total Kewajiban Rekening Administratif		72.987.572	8.876.113	2.182.976	6.756.149	18.352.672	36.819.663
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(19.522.502)	(387.883)	8.666.564	(4.149.137)	(14.620.243)	(9.031.805)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]		(28.086.504)	1.652.670	12.229.089	(2.306.661)	(12.720.016)	(26.941.586)
Selisih Kumulatif			1.652.670	13.881.759	11.575.098	(1.144.918)	(28.086.504)

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank secara berkala menelaah kecukupan kebijakan, prosedur dan batasan risiko likuiditas dan kesesuaiannya dengan *risk appetite* dan strategi bisnis sejalan dengan pertumbuhan bisnis, kompleksitas transaksi, dan kondisi ekonomi serta kondisi pasar.

Untuk menerapkan kebijakan, prosedur dan menetapkan batasan-batasan pada risiko likuiditas secara efektif, Bank juga telah secara jelas menetapkan pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas antara unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas yaitu unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap risiko likuiditas. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memberikan masukan dan analisa yang independen dan objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas.

Kebijakan dan prosedur yang saat ini diterapkan juga telah mengatur pengelolaan risiko likuiditas dimasa krisis dimulai dengan aktivasi rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan/CFP*), dan implementasinya hingga kembali ke kondisi normal (*business as usual/BAU*).

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko likuiditas dilakukan terhadap seluruh sumber, baik dari sisi produk dan aktivitas perbankan yang baru, maupun sisi pertumbuhan yang signifikan dari sumber dan hasil pendanaan tertentu, baik berupa posisi aset, kewajiban maupun rekening administratif. Identifikasi juga dilakukan setiap munculnya potensi peningkatan risiko, baik risiko suku bunga, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko karena adanya peraturan baru dari Bank Indonesia.

Bank mengukur dan memantau indikator risiko likuiditas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan likuiditas melalui Indikator Peringatan Dini (*Early Warning Indicators/EWI*) yang memonitor tingkat *roll-over*, tingkat *replacement* dana yang keluar, suku bunga yang dibebankan pada nasabah, suku bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah dan pasar uang, dan *secondary reserve ratio*. Bank juga mengukur risiko likuiditas secara struktural dengan menggunakan rasio, seperti *loan to deposits ratio* (LDR), *Rasio Intermediasi Makroprudensial* (RIM), serta perhitungan dana keluar dan melakukan *stress testing*.

Kebijakan internal menetapkan Bank untuk selalu patuh terhadap peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan, seperti Giro Wajib Minimum dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Bank juga telah menerapkan regulasi *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) di tahun 2018.

Laporan Liquidity Coverage Ratio (LCR) per 31 Desember 2018:

Tabel 15. Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

	2019			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bank secara individu	247,38%	250,95%	219,81%	226,12%
Bank secara konsolidasi	244,48%	247,81%	218,95%	229,14%

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan melaporkan hasil pemantauan atas *Early Warning Indicators* dan Batasan Risiko Likuiditas secara harian. Bank juga secara berkala melaporkan kondisi dan perkembangan *liquidity key risk indicators* dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko (KMR).

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), melalui Unit Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, melakukan pemantauan terhadap indikator risiko likuiditas, sumber dan hasil pendanaan dan posisi likuiditas yang meliputi strategi penetapan suku bunga, perubahan perilaku nasabah, termasuk perubahan struktur dan volatilitas sumber pendanaan. Untuk setiap pelampauan atau kejadian risiko (*risk event*) tertentu, SKMR melakukan komunikasi dan meminta tindak lanjut dari unit bisnis terkait, termasuk meneruskan masalah tersebut ke manajemen yang lebih tinggi.

Sistem informasi yang digunakan saat ini dapat menyajikan informasi tentang kondisi likuiditas secara harian untuk kebutuhan proses pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas.

3. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Likuiditas

Pemantauan terhadap risiko likuiditas dilakukan oleh ALCO dan Komite Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko likuiditas juga dilakukan dengan menyiapkan *contingency funding plan* sebagai antisipasi jika terjadi kondisi likuiditas yang buruk. Sistem Pengendalian Intern telah secara efektif mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas. Internal Audit telah melakukan audit secara berkala atas kecukupan kebijakan, prosedur, limit transaksi, dan toleransi yang berlaku serta kepatuhan dari setiap pihak terkait sesuai dengan rencana audit Bank yang telah ditetapkan.

D. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko terjadinya kerugian yang disebabkan tidak memadainya atau tidak berfungsinya proses internal akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Bank.

1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko operasional, termasuk kebijakan dan prosedur *Business Continuity Management (BCM)*, *Quality Assurance (Jaminan Kualitas)* dan *Information Security (Keamanan Informasi)*. Kebijakan dan prosedur tersebut ditinjau secara berkala untuk mengevaluasi kondisi eksternal dan internal Bank.

Pada Semester 2 tahun 2019, unit Manajemen Risiko Operasional (ORM) telah memperkenalkan beberapa inisiatif risiko operasional dan mengadopsi praktik terbaik dari industri perbankan untuk diimplementasikan pada tahun 2020.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko operasional dilakukan atas seluruh aktivitas/ proses, produk, sistem dan organisasi, baik di tingkat unit bisnis maupun fungsi pendukung. Selain dilakukan terhadap inisiatif baru Bank, pengkajian risiko juga dilakukan terhadap pengembangan ataupun perubahan rutin. Proses identifikasi risiko juga dilengkapi dengan daftar risiko operasional yang disusun berdasarkan proses, produk, kejadian berisiko, dan aset informasi yang dimiliki oleh Bank.

Proses pengukuran risiko meliputi kegiatan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara berkala, pengelolaan basis data kerugian/ risiko operasional dan kejadian berisiko serta perhitungan kecukupan permodalan untuk risiko operasional. Selain itu Bank juga menerapkan *Key Operational Risk Indicators* (KORI) berdasarkan faktor-faktor manusia, proses dan sistem pada tingkatan Bank, yang dilaporkan secara berkala dalam rapat Komite Manajemen Risiko (KMR).

Pemantauan risiko operasional dilakukan melalui pelaporan kepada manajemen senior dan pelaporan profil risiko kepada regulator, baik secara berkala ataupun *ad-hoc*, termasuk pelaporan kejadian pelanggaran dan kerugiannya. Hal ini diterapkan agar setiap kejadian yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dan analisa untuk menilai kecukupan kontrol yang telah diterapkan dapat dilakukan.

Satuan kerja operasional dan SKMR bertanggung jawab melakukan pengendalian risiko dengan menerapkan mekanisme kontrol pencegahan, deteksi dan koreksi yang efektif dan/ atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan dampak kerugian operasional bagi Bank. Sebagai salah satu tindakan pengendalian, Bank telah memiliki pedoman bagi Manajemen Kelangsungan Bisnis yang komprehensif yang merujuk kepada standar industri ISO-22301 yang diuji secara berkala.

Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional (ORMS) dilakukan untuk menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini dan mendukung fungsi manajemen untuk memudahkan proses perencanaan, analisa dan pengambilan keputusan.

3. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Operasional

Pengendalian internal Bank pada level operasional dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian berlapis (*three lines of defense*). Pada lini pertahanan pertama, Risk Taking Unit (RTU) dibantu oleh Fungsi Pengendalian Internal (QA) melaksanakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lini pertahanan berikutnya, Unit Manajemen Risiko Operasional (ORM) bertugas mengidentifikasi dan mengukur risiko yang melekat, serta memastikan kecukupan mekanisme pengendalian yang telah diterapkan.

Pada lini pertahanan terakhir, Auditor Internal secara independen bertanggung jawab memastikan bahwa risiko yang tersisa (*residual risks*) masih berada dalam batasan yang dapat ditoleransi oleh Bank (*risk tolerance*).

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak bertanggung jawab atas praktik pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui matriks penilaian mandiri (*self-assessment*) QA maturity yang terstandarisasi, forum-forum periodik dan fasilitasi rutin yang diselenggarakan oleh Fungsi *Quality Assurance Coordinator* di bawah Unit Manajemen Risiko Operasional.

4. Fraud Risk Management

BTPN tidak mentolerir segala bentuk kejadian pelanggaran (*zero tolerance for fraud*), dan sejalan dengan kebijakan tersebut Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur strategi *anti-fraud* yang memadai yang terus disempurnakan secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko pelanggaran dilakukan secara sistematis melalui sejumlah proses/strategi.

Proses pencegahan risiko antara lain dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai kesadaran *anti fraud* (*anti fraud awareness*) ke semua jenjang organisasi dan melakukan identifikasi risiko pelanggaran pada setiap kegiatan/proses dan produk Bank.

Bank telah mengimplementasikan sistem *whistle-blowing* sebagai salah satu media pendeteksian kejadian pelanggaran, yang secara berkala dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media internal Bank. Melalui program '*Speak Your Mind* ',

karyawan juga dapat mengungkap dan melaporkan setiap tindakan pelanggaran (*misconduct*).

Bank juga telah memiliki kebijakan yang memadai terkait proses investigasi dan pelaporan kejadian pelanggaran. Untuk setiap kasus *fraud* yang terbukti, proses pemberian sanksi diputuskan oleh Komite *Fraud* dan melibatkan unit kerja terkait, Fungsi *Business Risk/QA* terkait, unit Sumber Daya Manusia dan *Anti-Fraud Management* (AFM). Implementasi keputusan Komite *Fraud* dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menentukan upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Tabel 16.a. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2019		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendekatan Indikator Dasar	7.293.907	1.094.086	13.676.076
Total		7.293.907	1.094.086	13.676.076

Tabel 16.b. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2019		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendekatan Indikator Dasar	9.819.730	1.472.960	18.411.994
Total		9.819.730	1.472.960	18.411.994

Catatan:

Bahwa pengungkapan dengan menggunakan data tahun buku 2018 sebagai pembandingan, tidak dapat dilakukan mengingat bahwa kondisi tahun buku 2018 tidak mencerminkan kondisi Bank BTPN yang belum melakukan penggabungan usaha dengan SMBCI.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Oktober 2018 sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 09 tertanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah disetujui Rencana Penggabungan Usaha PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"), dimana SMBCI bertindak sebagai bank yang menggabungkan diri dan BTPN bertindak sebagai bank penerima penggabungan, yang berlaku sejak seluruh persetujuan yang disyaratkan diperoleh ("Tanggal Efektif Penggabungan"). Tanggal Efektif Penggabungan ditentukan pada tanggal 1 Februari 2019, antara lain setelah diperolehnya (i) Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 35/KDK.03/2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan (Merger) PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ke dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, dan (ii) Keputusan serta penerimaan dan pencatatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 dan surat tertanggal 22 Januari 2019 No. AHU-AH.01.03-0044411 serta tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-AH.01.100006176. Terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, nama bank yang menerima penggabungan berubah menjadi PT Bank BTPN Tbk.



Tinjauan Pendukung Bisnis

“

Selain memperkuat kolaborasi dan integrasi antar karyawan, integrasi pada sistem dan proses-proses pengelolaan SDM juga dilakukan, untuk memastikan semua karyawan yang awalnya berasal dari dua bank berbeda memiliki pemahaman yang sama.

”

196	Sumber Daya Manusia
200	Teknologi Informasi dan Operasional
200	Teknologi Informasi
206	Operasional



Sumber Daya Manusia

“

Pada bulan pertama penggabungan Bank BTPN dengan SMBCI, manajemen melaksanakan program *onboarding* seluruh karyawan ke Bank BTPN hasil penggabungan, dengan nama program “Life at BTPN”

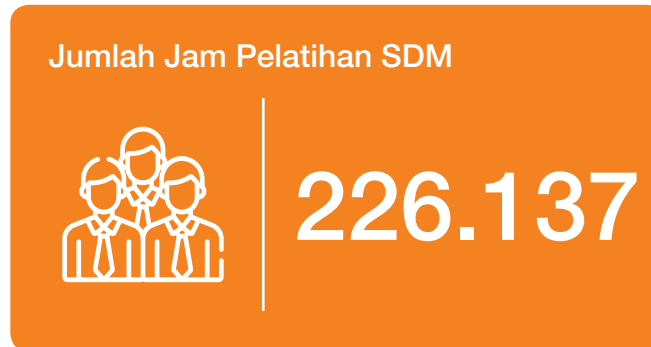
”

Setelah melalui masa persiapan selama kurang dari satu tahun, maka pada 1 Februari 2019 penggabungan antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (BSMI) resmi terjadi. Pada saat tanggal resmi penggabungan ini jumlah karyawan PT Bank BTPN Tbk. hasil penggabungan menjadi 8.168 karyawan, yang merupakan gabungan antara karyawan eks-BTPN dan eks-SMBCI.

Bergabungnya kedua perusahaan menghadirkan tantangan dan kesempatan yang baru dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Unit Sumber Daya Manusia berperan penting dalam memastikan tercapainya proses integrasi yang harmonis termasuk proses integrasi budaya dari bank-bank yang digabung guna menetapkan definisi budaya organisasi yang baru.

KEBIJAKAN BIDANG SDM TAHUN 2019

Selain aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh jajaran *Board of Management* sebelum tanggal resmi penggabungan, pada bulan pertama penggabungan kedua bank telah dilaksanakan program *onboarding* seluruh karyawan ke Bank BTPN hasil penggabungan. Program *onboarding* tersebut diberi nama "*Life at BTPN*" dan dilakukan pada 20-21 Februari 2019.



“ Pada tahun 2019, Bank BTPN telah merealisasikan pengembangan kompetensi bagi karyawan, dari tingkat tertinggi hingga ke level terendah, dengan total investasi Rp110,6 miliar. ”

Dalam program tersebut, seluruh karyawan di kantor pusat dan area Jabodetabek diundang untuk melihat pemaparan dalam bentuk simulasi, pameran, dan wahana yang melibatkan karyawan. Dari program tersebut diharapkan terciptanya pemahaman karyawan atas sejarah, pencapaian, dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank baru hasil penggabungan.

Pada bulan-bulan selanjutnya dilaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan untuk menunjang kolaborasi dan integrasi budaya melalui program pelatihan dan sesi-sesi seminar, *online gamification*, maupun sesi-sesi keterlibatan (*engagement*) karyawan lainnya. Sebagai penunjang aktivitas

tersebut, dilakukan pula *pulse survey* (jajak pendapat) untuk melihat persepsi karyawan terhadap proses penggabungan, dan menyusun rencana kegiatan untuk mendukung terciptanya integrasi budaya dan kolaborasi antar karyawan yang lebih baik.

Selain memperkuat kolaborasi dan integrasi antar karyawan, integrasi pada sistem dan proses-proses pengelolaan SDM juga dilakukan, untuk memastikan semua karyawan yang awalnya berasal dari dua bank berbeda memiliki pemahaman yang sama akan pengelolaan SDM, dan mendapat perlakuan yang serupa.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020

Rencana strategis pengembangan SDM pada tahun 2020 mengacu kepada inisiatif strategis Bank, yaitu secara terus menerus menjaga stabilitas organisasi setelah penggabungan. Selain itu, pengembangan SDM juga ditujukan untuk menciptakan sinergi di antara fungsi dan bisnis yang ada.

Dengan demikian, Bank BTPN telah menyiapkan fokus strategis Pengelolaan Sumber Daya Manusia akan diturunkan ke dalam 4 (empat) strategi utama yaitu: memperkuat inisiatif yang ada saat ini untuk mendukung organisasi paska penggabungan; meningkatkan kompetensi dan mempertahankan *key talent* (karyawan-karyawan yang menduduki fungsi kerja kunci) sekaligus mempersiapkan talenta masa depan; membuat inovasi di produk dan layanan terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia yang di antaranya mencakup peninjauan kembali terhadap EVP (*Employee value propositions*); serta memperbaharui dan meningkatkan proses, sistem dan sarana pendukung pengelolaan Sumber Daya Manusia termasuk kajian terhadap Sistem Utama (*core system*) dan integrasinya dengan sistem *front end* yang ada.

Selain peninjauan kembali dan penyusunan program-program EVP (*Employee Value Proposition*), di tahun 2020 akan dilakukan kajian dan penyesuaian terhadap model operasi (*Operating Model*) Bank BTPN. Penyesuaian model operasi ini, selanjutnya akan diikuti dengan kajian dan penyesuaian terhadap proses-proses kunci (*key processes*) di organisasi dan penyusunan kerangka pengelolaan talenta (*talent framework*) perusahaan, serta budaya organisasi yang lebih terintegrasi sehingga dapat menunjang pencapaian strategi Bank BTPN.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pada tahun 2019, Bank BTPN telah merealisasikan pengembangan kompetensi bagi karyawan, dari tingkat tertinggi hingga ke level terendah. Total investasi yang dikeluarkan untuk pelatihan pada tahun buku tersebut mencapai Rp110,6 miliar.

Berikut ini adalah rincian pengembangan kompetensi karyawan Bank:

	2019
Jumlah Program Pelatihan	279
Jumlah Peserta	77.743
Total Man-days	28.267
Jumlah Investasi Pelatihan (Rp juta)	110.567
Rata-rata Investasi Pelatihan per Karyawan (Rp juta)	1,422
Total Jam Pelatihan	226.137



Rencana strategis pengembangan SDM pada tahun 2020 mengacu kepada inisiatif strategis Bank, yaitu secara terus menerus menjaga stabilitas organisasi setelah penggabungan dan menciptakan sinergi di antara fungsi dan bisnis yang ada.



Halaman ini sengaja dikosongkan



Teknologi Informasi dan Operasional

“

Pada tahun 2019, terkait dengan penggabungan usaha Bank BTPN dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI), Unit Operasional telah melakukan penyesuaian terhadap organisasi untuk sejumlah fungsi. Hal ini dilakukan agar layanan terhadap unit bisnis Bank, yaitu ritel dan korporasi menjadi lebih efisien dan terpadu.

”

Perbankan digital (*digital banking*) merupakan salah keunggulan utama Bank BTPN yang terus dikembangkan secara berkesinambungan. Sebab Bank menyadari bahwa di era digital saat ini, teknologi informasi (TI), baik dari sisi infrastruktur maupun aplikasi sangat berperan penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Bank, termasuk memajukan sistem perbankan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, BTPN terus meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana TI secara berkala dan berkesinambungan. Dengan layanan berbasis TI, BTPN berharap mampu meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada nasabah melalui otomatisasi proses bisnis, efisiensi proses, dan inovasi produk.

VISI DAN MISI DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

Visi

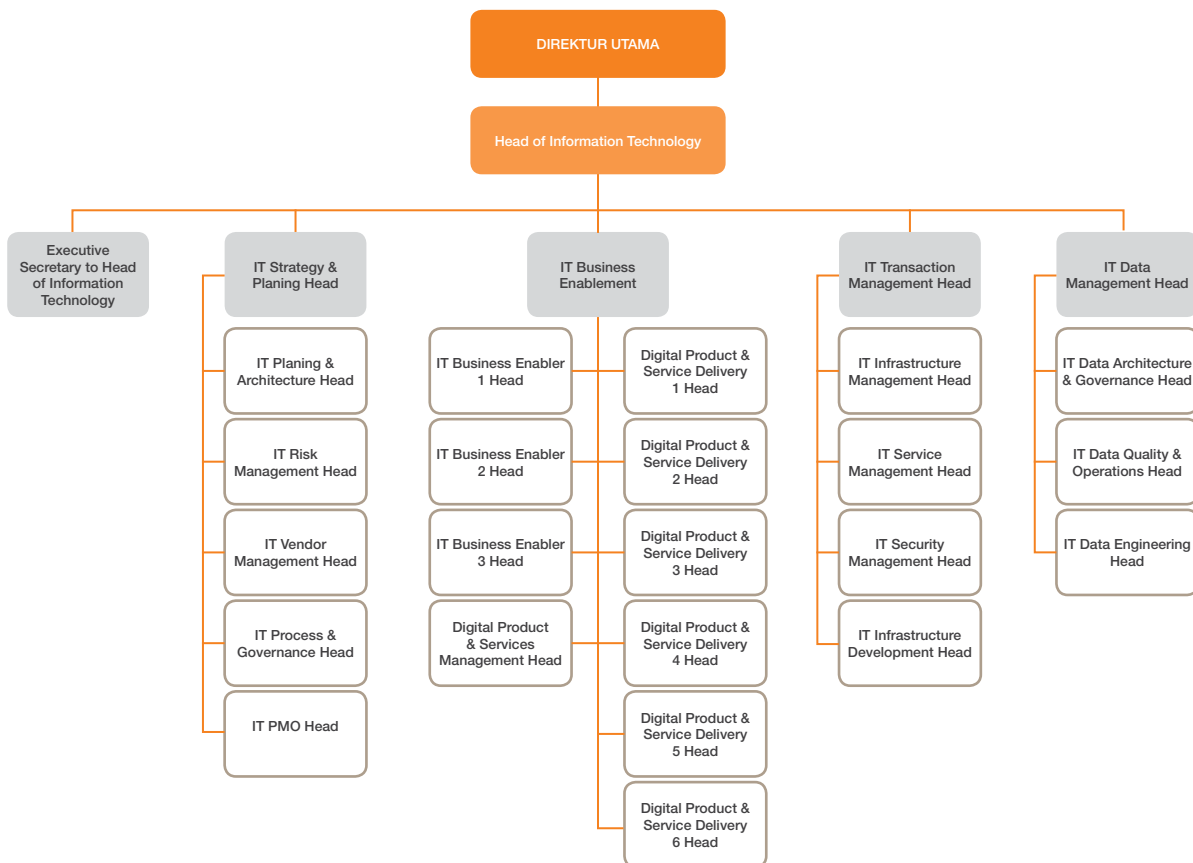
Menjadi penyedia solusi inovatif terbaik, menghadirkan pengalaman berbeda.

Misi

Membuat hidup para pemangku kepentingan lebih mudah melalui kreasi layanan yang bernilai.

ORGANISASI PENGELOLAAN TI

Pelaksanaan kegiatan teknologi informasi di lingkungan Bank dikelola oleh Direktorat Teknologi Informasi yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Berikut ini adalah struktur organisasi yang berlaku hingga tahun 2019.



SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Hingga akhir tahun 2019, jumlah SDM di Direktorat Teknologi Informasi sebanyak 368 orang yang terbagi dalam 4 (empat) organisasi:

No.	Organisasi	Tanggung Jawab	Jumlah (Orang)
1	IT Enablement	Bertanggung jawab atas solusi IT bagi user	186
2	IT Transaction Management:	Bertanggung jawab atas operasional infrastruktur dan tersedianya layanan TI bagi pengguna	123
3	IT Strategy & Planning	Bertanggung jawab atas strategi dan perencanaan TI, tata kelola, risiko, pengelolaan vendor dan pengelolaan anggaran TI	33
4	IT Data Management	Bertanggung jawab atas ketersediaan dan pengelolaan manajemen data di Bank	26

Untuk mengembangkan *digital-talents*, IT BTPN mengadakan *in-house training* berkelanjutan untuk *fresh-graduate* dan *re-skill* terhadap *existing-talents* agar IT BTPN dapat memiliki keberlanjutan (*sustainability*) dalam hal kesiapan talenta-talenta dan juga penguasaan teknologi yang dibutuhkan pada era digital. Tabel di bawah adalah beberapa program pengembangan SDM TI.

Nama Program	Penjelasan
CHIP 3 - Creative Hacknology Intensive Program #3	Program pengembangan SDM TI khususnya mempersiapkan <i>full stack developer</i> yang menguasai <i>modern application development concept batch ke-3</i>
CHIP 4 - Creative Hacknology Intensive Program #4	Program pengembangan SDM TI khususnya mempersiapkan <i>full stack developer</i> yang menguasai <i>modern application development concept batch ke-4</i>
DevOps Engineer	Program pengembangan SDM TI khususnya mempersiapkan <i>DevOps Engineering</i> yang menguasai <i>DevOps ToolChain, Continuous Monitoring</i> dan <i>SRE (Site Reliability Engineering)</i>
Community of Practice Engineering	<i>Ad-hoc Sharing, Meet Up</i> dan <i>TedTalk</i> mengenai <i>Engineering Practices</i> .
Community of Practice Business Analyst, Product Owner dan Scrum Master	<i>Ad-hoc Sharing, Meet Up</i> dan <i>TedTalk</i> mengenai bermacam-macam <i>Agile Practices</i>

SERTIFIKASI YANG DIMILIKI

Untuk menjamin standar mutu pengembangan teknologi informasi di lingkungan Bank BTPN, sejumlah SDM di lingkungan Bank telah memiliki sertifikasi berkaitan dengan TK. Di antaranya adalah:

- Risk Management
- Fraud Awareness
- Entertainment & Gift
- Complaint Handling
- APU PPT
- Code of conduct
- Mastering ITIL v4

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Tata kelola Teknologi Informasi (TI) Bank BTPN menjadi pedoman yang mengarah pada pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan untuk mencapai rencana bisnis Bank. Penerapan tata kelola TI di Bank terus ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala dari sisi kebijakan dan prosedur dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta *best practice* yang diterapkan.

Untuk menjamin tata kelola pengembangan TI yang baik, semua kegiatan yang dijalankan dilaporkan dan *review* oleh Komite Pengarah (*Steering Committee*). Kegiatan tersebut dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan. Hal ini merupakan bagian dari tata kelola di bidang TI yang berlaku dan sudah berjalan di Bank.

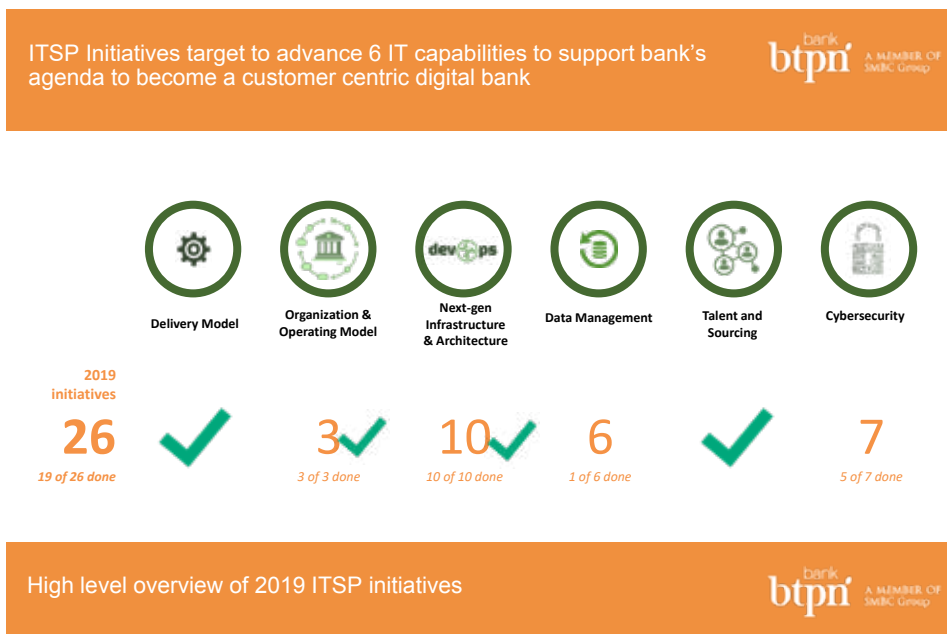
Sedangkan terkait dengan proyek pengembangan sistem di internal, Bank telah memiliki forum dengan nama *Executive Management of IT (EMIT)*, yang diisi oleh manajemen di bidang TI. Forum inilah yang memberikan persetujuan atas strategi dan pendekatan dalam pengembangan proyek di bidang TI.

Untuk mendapatkan tata kelola TI terbaik, pada tahun 2019, BTPN melakukan peningkatan *IT Governance* dan *Compliance* untuk memenuhi standar yang lebih baik (SOX, SMFG Group policies). Selain itu, Bank BTPN juga menyelaraskan strategi dan pelaksanaan dengan pendekatan *lean* dan *system* dengan fokus pada strategi dan pendanaan investasi, *agile portfolio operations*, dan tata kelola.

ROADMAP

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan *IT Strategic Plan (ITSP) 2017-2019*. Pengembangan rencana sistematis melalui ITSP tersebut bertujuan untuk mewujudkan Bank BTPN sebagai bank digital yang berorientasi pada upaya memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah atau *customer centric digital banking*.

Pada tahun 2019, pencapaian IT Strategic Plan dijelaskan melalui gambar berikut:



PENCAPAIAN 2019

Bank BTPN terus membangun sistem teknologi informasi yang terkini dan sejalan dengan bisnis Bank sehingga memberikan kemudahan akses, keamanan bertransaksi, membantu layanan *back office* dalam mendukung operasional bisnis Bank, serta dapat memberikan efisiensi biaya operasional

dalam mendukung ekspansi bisnis Bank.

Dalam mengembangkan program TI, Direktorat Teknologi Informasi di Bank melakukannya melalui dua mekanisme. Pertama, mekanisme *waterfall*, yaitu pendekatan yang sistematis dan tersusun rapi seperti air terjun mulai dari tingkat kebutuhan sistem

kemudian berlanjut ke tahapan analisis, desain, *coding*, pengujian/verifikasi, dan pemeliharaan.

Sedangkan mekanisme kedua adalah *cara agile*. Model ini bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim lintas fungsional untuk mendapatkan hasil akhir.

Melalui metode-metode tersebut, sepanjang tahun 2019 Direktorat IT telah melahirkan sejumlah produk. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Produk Pengembangan	Tujuan Pemanfaatan
Daya Phase 2A	Memberikan ruang bagi nasabah untuk dapat memanfaatkan situs daya.id sebagai ruang menjual produknya.
Enhancement Of Audit Management System (AMS)	Sebagai upaya penguatan sistem manajemen audit yang berkenaan dengan prosedur audit internal setelah merger.
Migrasi SOTI ke Airwatch	Airwatch mampu menangani Android dan iOS, dan juga untuk <i>desktop</i> Windows 10 dan MacOS (kemampuan UEM yang lebih baik). Juga dapat mendukung untuk mode BYOD dan COBO.
Kualitas Data Nasabah	Dalam rangka memonitor, menjaga, dan menghasilkan data yang lebih berkualitas dan terstandarisasi, yaitu dengan adanya sistem aplikasi Data Quality Dashboard.
CRN SLIK Synchronization	Dengan semakin berkembangnya bisnis Bank BTPN, maka dibutuhkan sistem yang dapat menyelaraskan (<i>synchronization</i>) nomor referensi nasabah (<i>Customer Reference Number - CRN</i>), sehingga dapat menghasilkan laporan yang terkonsolidasi berdasarkan data nasabah yang akurat.
Robotic Process Automation - Phase 2	Sistem otomasi proses penutupan rekening, klaim asuransi nasabah Purnabakti dan proses operasional lainnya untuk meningkatkan efisiensi.
Enhancement Regla Basel 3	Peningkatan efektivitas laporan individual Bank dan konsolidasi sesuai peraturan OJK, antara lain melalui sistem yang menggabungkan laporan detail dan konsolidasi untuk Korporasi, Retail dan Syariah.
Akses Bisnis	Peningkatan fitur Transaksi Pembayaran Pajak untuk mengakomodir kebutuhan nasabah non individual
Re-Engineering Joint Finance System	Pengembangan dan otomatisasi proses serta integrasi dengan sistem lain untuk optimalisasi proses bisnis Joint Finance yang lebih efektif dan efisien

INVESTASI TEKNOLOGI

Pada tahun 2019, total biaya yang dikeluarkan BTPN untuk pengembangan TI adalah sebesar Rp425 miliar.

RENCANA STRATEGIS 2020

Untuk meningkatkan daya saing dan menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, BTPN telah menyusun IT Strategic Plan (ITSP) 2020-2022 yang di dalamnya memuat strategi pengembangan IT yang mendukung strategi layanan digital di BTPN. Selain itu, ITSP 2020-2022 juga memuat integrasi *back end process* dan Robotic Process Automation (RPA).

Pada tahun 2020, BTPN akan terus melanjutkan pengembangan teknologi informasi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah melakukan digitalisasi layanan ke nasabah.

Selain itu, Bank juga fokus pada digitalisasi proses bisnis di bidang operasional. Bersamaan dengan hal itu, Direktorat Teknologi Informasi masih terus melanjutkan proses integrasi sebagai konsekuensi dari penggabungan usaha yang telah terjadi.

Operasional

Kegiatan operasional Bank BTPN, terutama ditujukan untuk mendukung bisnis Bank dalam berhubungan dengan nasabah. Karena itu, Unit Operasional senantiasa beradaptasi dengan beragam perubahan, baik di eksternal maupun internal Bank agar dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pelanggan dalam melakukan transaksi perbankan.

Sejak tahun 2018, kegiatan operasional diarahkan untuk mendukung jaringan cabang setelah dikonsolidasikan menjadi cabang universal. Hal itu membuat upaya efisiensi pada kegiatan operasional dapat ditingkatkan, sehingga ikut mendukung pencapaian usaha Bank. Cabang universal dirancang untuk menyatukan layanan berbagai segmen nasabah sehingga meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi di kantor cabang Bank.

Pada tahun 2019, terkait dengan penggabungan usaha Bank BTPN dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI), Unit Operasional telah melakukan penyesuaian terhadap organisasi untuk sejumlah fungsi. Hal ini dilakukan agar layanan terhadap unit bisnis Bank, yaitu ritel dan korporasi menjadi lebih efisien dan terpadu. Selain itu Unit Operasional juga menjalankan standarisasi atas layanan cabang universal guna meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah.

Sebelum terjadinya penggabungan usaha, fokus bisnis Bank BTPN adalah ritel, sementara SMBCI di bidang korporasi. Dua model bisnis ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kegiatan operasional perlu menyesuaikan.

Semakin berkembangnya pemanfaatan internet dalam transaksi perbankan, Bank BTPN juga ikut menyesuaikan, terutama terkait dengan layanan pelanggan. Apalagi, perkembangan segmen bisnis Bank saat ini mengarah kepada nasabah yang lebih muda dari segi usia, maka layanan pelanggan juga perlu beradaptasi dengan perilaku nasabah yang berbeda.

Dalam berkomunikasi dengan Bank, jika sebelumnya nasabah lebih banyak menggunakan saluran telepon, saat ini perilaku tersebut mulai berubah. Sebagian besar komunikasi dilakukan melalui perbincangan di media *chat* pada telepon selular dan surat elektronik.

Untuk mendukung layanan yang maksimal kepada nasabah, Bank senantiasa mengukur *Service Level Agreement (SLA)*, terutama berkenaan dengan keluhan nasabah agar dapat direspons dengan baik oleh Bank.

Pencapaian penting dari kinerja Operasional pada tahun 2019 adalah terciptanya efisiensi. Hal itu, terutama terlihat pada "Contact Center". Meskipun volume layanan naik secara signifikan sejalan dengan pertumbuhan bisnis ritel, terutama pada produk Jenius, namun hal tersebut tidak diiringi dengan penambahan sumber daya manusia dalam jumlah besar.

Pencapaian lainnya adalah pengembangan *Robotic Process Automation (RPA)*. Proses operasional yang bersifat terstruktur dan berulang dengan volume tinggi, dapat ditangani dengan lebih cepat dan efisien melalui penerapan RPA. Oleh karena itu, RPA akan terus dikembangkan dan diterapkan untuk berbagai proses operasional.

Seluruh kinerja operasional Bank BTPN selalu diawasi dan dievaluasi secara berkala setiap bulan. Tujuannya adalah untuk memberikan tingkat kepuasan layanan yang maksimal kepada nasabah.



INISIATIF DAN STRATEGI

Unit Operasional Bank BTPN telah merealisasikan sejumlah program dan inisiatif strategis sepanjang tahun 2019, agar kinerja operasional dapat memberikan dukungan maksimal terhadap kegiatan usaha Bank, terutama setelah terjadi penggabungan usaha. Selain itu, program dan inisiatif tersebut juga meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional secara keseluruhan.

Beberapa hal yang telah dilakukan, antara lain:

1. Mengintegrasikan sejumlah fungsi, seperti *payment* dan *fund transfer*, yang selama ini terpisah antara ritel dan korporasi
2. Melakukan harmonisasi kebijakan dan standar prosedur operasional (SOP) agar tercipta sinkronisasi antarlini bisnis
3. Meningkatkan layanan Contact Center dengan melakukan integrasi Infrastruktur sistem pendukung guna memadukan layanan berbagai kanal dan media komunikasi nasabah. Selain juga dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi layanan Contact Center
4. Memperluas kapabilitas layanan cabang universal, yang semula hanya berfokus pada nasabah ritel, untuk dapat mulai melayani nasabah korporasi. Selain itu, ekspansi jaringan cabang telah dilakukan untuk meningkatkan jangkauan layanan bagi nasabah ritel dan korporasi
5. Meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah melalui standarisasi layanan cabang

6. Melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk pembayaran gaji pensiun, sebagai bagian dari upaya perluasan jangkauan layanan dan penyediaan jalur layanan alternatif bagi nasabah pensiun
7. Bekerja sama dengan institusi Taspen untuk layanan pengenalan nasabah melalui sistem *biometric information*, sehingga nasabah pensiun dapat dimudahkan untuk melakukan otentifikasi melalui pengenalan wajah pada aplikasi yang telah disediakan
8. Memulai penggunaan *Robotic Process Automation* pada kegiatan operasional untuk peningkatan efisiensi proses
9. Meningkatkan mutu melalui sertifikasi ISO 9001:2015 pada proses operasional *procurement*
10. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional melalui implementasi, integrasi dan peningkatan beberapa sistem aplikasi yang digunakan untuk kegiatan operasional

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Guna mendukung kinerja operasional yang lebih efisien, sumber daya manusia (SDM) yang handal menjadi sangat penting. Untuk itu Unit Operasional secara berkelanjutan senantiasa melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui inisiatif sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan dengan sistem klasikal, misalnya terkait dengan pemberian layanan yang baik kepada nasabah

2. Menyediakan sistem *e-learning* yang dapat diakses oleh seluruh SDM di lingkungan Bank, di antaranya berkenaan dengan pengetahuan produk dan prosedur operasional, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik pada nasabah
3. Meningkatkan standar kompetensi melalui proses sertifikasi internal sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab karyawan

RENCANA STRATEGIS 2020

Bank BTPN telah menyiapkan sejumlah program dan rencana strategis yang akan dijalankan pada tahun depan.

Beberapa diantaranya adalah:

1. Memperluas penggunaan *Robotic Process Automation* (RPA) pada kegiatan operasional guna lebih meningkatkan efisiensi
2. Meningkatkan kompetensi SDM sejalan dengan pengembangan bisnis Bank yang semakin lengkap dan komprehensif
3. Membangun infrastruktur pendukung guna meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah melalui sistem digital



Tata Kelola Perusahaan

“

Bank memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya di dalam meningkatkan penerapan GCG, yang pada akhirnya dapat meningkatkan faktor kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap keberlangsungan usaha Bank.

”

210	Prinsip-Prinsip dan Dasar Hukum Pelaksanaan GCG
212	Tujuan Penerapan GCG
212	Struktur GCG
213	Penerapan dan Komitmen GCG
219	Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019
298	Penilaian Sendiri GCG

Prinsip-Prinsip Dan Dasar Hukum Pelaksanaan GCG

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“GCG”) merupakan serangkaian prinsip-prinsip tata kelola yang mengatur suatu proses dengan koordinasi antar dan di dalam struktur dengan merujuk kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh suatu hasil yang memuaskan baik dalam sisi kepatuhan terhadap perundang-undangan maupun dari sisi kepercayaan dari para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh PT Bank BTPN Tbk (“Bank”) sebagaimana dimaksud di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Transparansi**

Salah satunya dengan menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, misalnya dengan memberikan penjelasan yang jelas atas produk perbankan yang diluncurkan bagi nasabah atau calon nasabah, serta menyediakan akses yang mudah dihubungi untuk dapat menjelaskan keuntungan dan menjawab permasalahan yang mungkin timbul terkait dengan produk dimaksud.

- **Akuntabilitas**
yaitu bahwa setiap struktur GCG menjalankan masing-masing fungsinya secara benar, terukur, sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan, dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan
- **Responsibilitas**
melalui pelaksanaan hak dan kewajiban dari struktur GCG termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan mencakup masyarakat dan lingkungan agar kesinambungan usaha dapat terpelihara dalam jangka panjang.
- **Independensi**
yaitu Bank harus dikelola secara independen dan profesional sehingga masing-masing struktur GCG tidak saling mendominasi dan tidak melakukan intervensi.
- **Kewajaran dan Kesetaraan**
yaitu pelaksanaan kegiatan usaha dengan senantiasa memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Terkait dengan pelaksanaan GCG, Bank merujuk kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK 55”) yang berlaku sejak 7 Desember 2016.
4. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
5. POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
6. POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
7. POJK lainnya termasuk yang mengatur mengenai Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris dan Direksi, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Internal Audit, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.
8. Anggaran Dasar Bank
9. Kebijakan dan Prosedur Bank

Kebijakan dan prosedur Bank dikelompokkan dalam suatu hierarki kebijakan yang terdiri dari:

- **Kebijakan Utama Bank**

Kebijakan Utama Bank adalah kebijakan utama atau induk atas seluruh kebijakan Bank, merupakan kebijakan yang menyangkut tata kelola, maupun hal strategis lainnya yang mempengaruhi jalannya pengelolaan Bank secara baik, dan yang merupakan prinsip dasar serta pedoman pokok bagi semua ketentuan yang ada dan berlaku di BTPN.

Kebijakan Utama Bank meliputi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi.

- **Kebijakan Operasional Bank**

Kebijakan Operasional Bank adalah kebijakan yang mengatur setiap aktivitas di Bank yang mencerminkan strategi manajemen risiko Bank termasuk diantaranya menjelaskan secara umum *risk appetite* Bank atas aktivitas tersebut.

Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite serta Prosedur yang berlaku secara *bankwide* juga dipergunakan sebagai kebijakan operasional.

- **Standard Operational Procedures**

Standard Operational Procedures (SOP) adalah panduan yang mengatur secara detail atas suatu proses dan menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang wajib dilakukan, mencakup: siapa, bagaimana, dimana, kapan dilakukan dan mekanisme kontrolnya. Pengaturan ini wajib menerapkan fungsi *four eyes principle* secara tegas, fungsi internal kontrol yang memadai serta mengacu pada kebijakan.

- **User Manual/Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksana/dokumen lain yang dipersamakan**

User Manual atau Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana adalah:

- a. Tahapan/cara penggunaan suatu sistem/aplikasi yang menjelaskan secara detail cara penginputan/pengisian data pada setiap *screen* dan *field*, atau

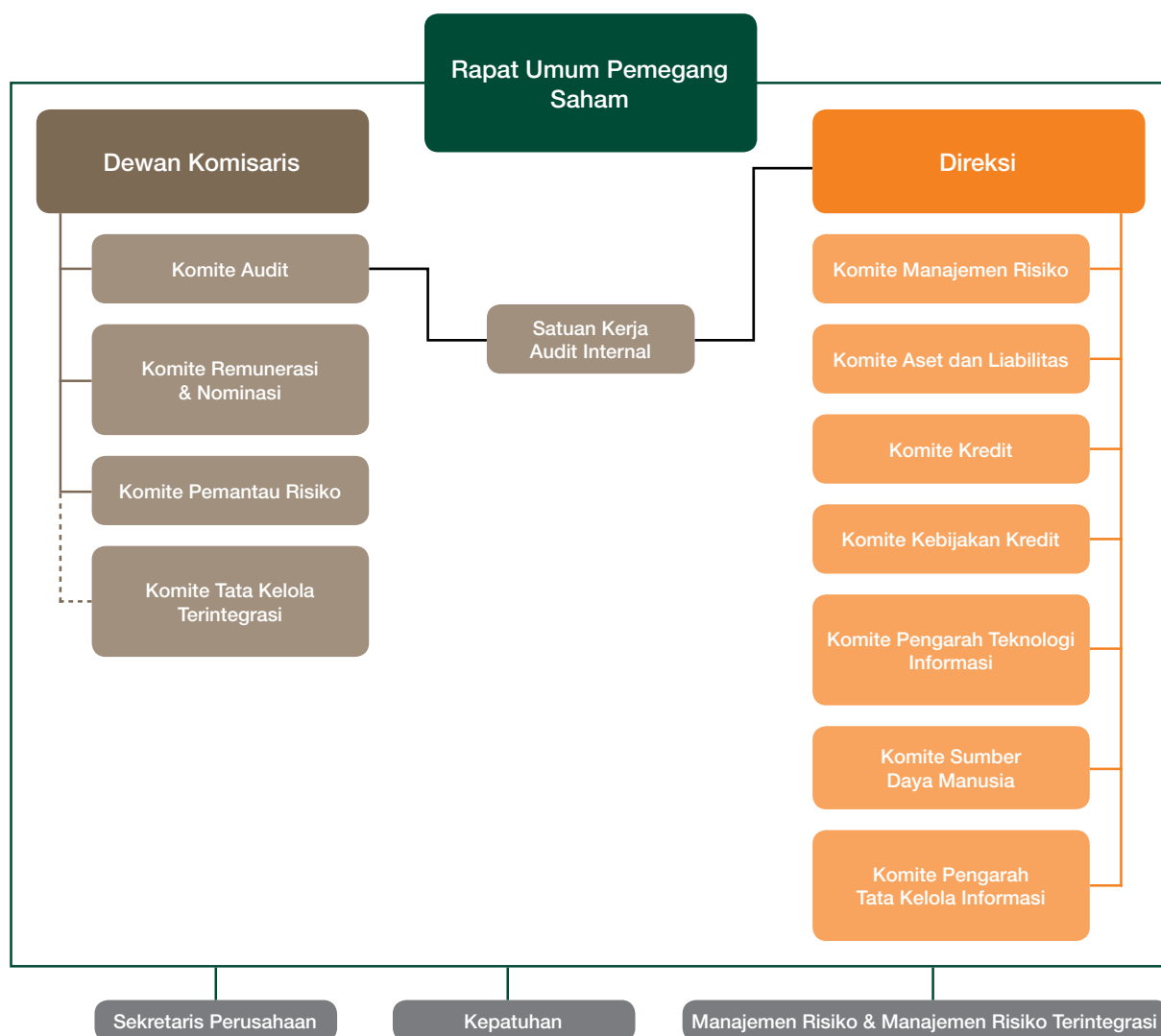
- b. Pedoman yang lebih detil dari SOP bagi *user* baik *operator* maupun *supervisor*, atau
- c. Pengaturan mengenai suatu standar parameter yang ada di sistem, atau
- d. Suatu panduan ringkas yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai produk dan layanan, dan
- e. Dibuat dengan mengacu pada SOP terkait.

Persetujuan atas penerbitan kebijakan dan prosedur dan/atau perubahannya dilakukan dengan memperhatikan hierarki masing-masing. Kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan Bank dilakukan secara berkala, setiap satu tahun sekali atau lebih cepat apabila diperlukan.

Tujuan Penerapan GCG

Tujuan penerapan GCG adalah mendorong pembangunan suatu lingkungan yang terdiri atas unsur kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan di dalam menumbuhkan investasi, stabilitas keuangan dan integritas usaha dalam jangka panjang, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan yang kuat serta penambahan komunitas inklusif.

Struktur GCG



Penerapan dan Komitmen GCG

Tinjauan Pelaksanaan GCG Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tonggak bagi Bank di dalam meningkatkan penerapan GCG dengan fokus terhadap kajian dan penyesuaian infrastruktur GCG sebagai tindak lanjut dari proses integrasi PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") ke dalam Bank. Kajian dan penyesuaian ini mencakup keseluruhan Kebijakan dan Prosedur BTPN sesuai dengan hierarki kebijakan, termasuk Panduan Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja ("Charter") Dewan Komisaris dan Direksi, Charter Komite-komite di bawah Direksi dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, serta seluruh kebijakan dan prosedur di setiap segmen BTPN.

Hal yang sama dilakukan juga terhadap Panduan Tata Kelola Terintegrasi dan Charter Komite Tata Kelola Terintegrasi, terkait dengan status Bank yang menjadi *Lead Entity* atau Entitas Utama di dalam Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") menggantikan kedudukan SMBCI karena penggabungan usaha.

Sebagai bagian dari institusi keuangan global yaitu SMBC, Bank juga melakukan kajian terhadap beberapa kebijakan dan prosedur, serta

menerbitkan ketentuan-ketentuan baru yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan, agar dapat mengakomodasi ketentuan lintas Negara, yaitu yang terkait dengan Anti-Fraud, Pemberian Hiburan dan Hadiah, kepemilikan atas informasi yang sensitif terhadap harga, transaksi investasi dan kepemilikan pribadi, kebijakan dan prosedur alur komunikasi dengan induk perusahaan, serta kedatangan tamu asing, dan berbagai kebijakan operasional lainnya.

Dalam rangka penerapan prinsip GCG selaku perusahaan terbuka, Bank telah menjalankan ketentuan terkait keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan OJK dan Bursa Efek, melakukan konsultasi yang intens dengan regulator agar dapat menjalankan ketentuan dalam jalur yang telah ditentukan serta, menjalankan aksi korporasi baik yang dilakukan rutin maupun yang dilakukan secara insidental untuk kepentingan Bank dan para pemangku kepentingan yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada bulan Februari, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada bulan September, pelaksanaan Public Expose (paparan kinerja) pada bulan Agustus dan *Investor Gathering* pada bulan Oktober untuk keperluan penerbitan obligasi,

serta penyelenggaraan *training* dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan April mengenai *risk refreshment*, bulan Mei mengenai *market and politic update* dan Desember mengenai *Economic Outlook 2020*.

Selain itu, rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta komite-komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris terkait baik yang sesuai dengan rencana kerja maupun adhoc selama tahun 2019, telah diselenggarakan dengan memperhatikan pemenuhan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tambahan, dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab di dalam organisasi Bank, setelah penggabungan usaha, dikenalkan pula suatu format pertemuan rutin yang dihadiri oleh Direksi dan para kepala unit kerja dengan agenda mengenai laporan kegiatan, informasi, ketentuan baru dari masing-masing direktorat, yang diselenggarakan pada minggu pertama setiap bulan. Pertemuan ini menambah frekuensi pertemuan Direksi dengan para kepala unit kerja dengan topik terkait kinerja keuangan secara triwulanan.

Tinjauan Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pendekatan “*comply or explain*” oleh Bank:

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	<i>Comply</i>	Prosedur teknis <i>voting</i> yang diatur dalam SOP Rapat Umum Pemegang Saham
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<i>Comply</i>	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tengah menjabat.
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun.	<i>Comply</i>	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia di situs web Bank setidaknya 2 hari kerja setelah pelaksanaan.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	<i>Comply</i>	Bank memiliki dan kebijakan dan prosedur alur komunikasi dengan pemegang saham mayoritas untuk tujuan control terhadap independensi, dengan memperhatikan ketentuan mengenai perdagangan orang dalam dan pemenuhan ketentuan lintas Negara. Prosedur komunikasi dengan pemegang saham secara umum dan/atau investor mencakup: 1. Strategi 2. Program 3. Waktu pelaksanaan komunikasi
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web	<i>Comply</i>	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham telah diungkapkan dalam situs web Bank. Kebijakan komunikasi tersebut diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	<i>Comply</i>	Penetapan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank, merujuk pada ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<i>Comply</i>	Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris .

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	<i>Comply</i>	Bank memiliki kebijakan <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	4.2 Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	<i>Comply</i>	Kebijakan <i>self assessment</i> diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2019 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply</i>	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	<i>Comply</i>	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	<i>Comply</i>
5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.		<i>Comply</i>	Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi
5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi		<i>Comply</i>	Direktur Keuangan Bank memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 pada bagian profil Direksi.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	<i>Comply</i>	Bank telah memiliki kebijakan <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi, dengan cakupan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria Penilaian yang digunakan Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply</i>	Kebijakan <i>self assessment</i> telah diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2019 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 pada bagian Penilaian Kinerja Direksi.
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply</i>	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<i>Comply</i>	Ketentuan mengenai pencegahan <i>insider trading</i> diatur dalam Kebijakan Kepatuhan dan Prosedur Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	<i>Comply</i>	Bank memiliki kebijakan terkait anti korupsi dan <i>anti fraud</i> sebagaimana dituangkan dalam Prosedur Hiburan dan Hadiah dan Prosedur <i>Anti-Fraud</i> .
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<i>Comply</i>	Bank memiliki kebijakan terkait pengelolaan pemasok atau vendor, yang antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria dalam pemilihan vendor b. Upaya peningkatan kemampuan vendor c. Pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan vendor Ketentuan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diungkapkan di dalam situs <i>web</i> Bank.
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	<i>Comply</i>	Kebijakan mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditur. Kebijakan tersebut telah diungkapkan di dalam situs <i>web</i> Bank

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<i>Comply</i>	<p>Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>. 2. Cara pengaduan. 3. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor. 4. Penanganan pengaduan. 5. Pihak yang mengelola aduan. 6. Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. <p>Ketentuan tersebut telah diungkapkan dalam situs web Bank.</p>
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.	<i>Comply</i>	Kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan diatur dalam Kebijakan Human Capital.
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi.	<i>Comply</i>	<p>BTPN memiliki akun resmi sosial media:</p> <p>Facebook : @BankBTPNOfficial https://facebook.com/BankBTPNOfficial</p> <p>Twitter: @sahabatBTPN https://twitter.com/sahabatbtpn</p> <p>Instagram: @lifeatbtpn https://www.instagram.com/lifeatbtpn/</p> <p>Youtube: Bank BTPN https://www.youtube.com/user/BTPNBank</p>
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<i>Comply</i>	Pengungkapan mengenai pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%. Informasi tersebut juga diungkapkan di dalam situs <i>web</i> Bank.

Komitmen Penerapan GCG Tahun 2020

Untuk tahun 2020, Bank dengan ini menegaskan mengenai komitmen yang dimiliki untuk terus menerus melakukan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh jenjang organisasi Bank yang diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi kepatuhan;
- f. penerapan fungsi audit intern;
- g. penerapan fungsi audit ekstern;
- h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- j. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
- k. rencana strategis Bank.

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Fokus dan komitmen BTPN terhadap pelaksanaan GCG untuk tahun 2020 adalah: penerapan GCG yang efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi target *zero penalties*, penyelenggaraan kajian berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ada, penyelenggaraan aksi korporasi dan pelaksanaan rapat-rapat serta pemenuhan laporan yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Dalam area konglomerasi keuangan, peningkatan pelaksanaan tata kelola terintegrasi juga menjadi fokus seiring dengan rencana OJK untuk menyesuaikan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.

Selain itu, sehubungan dengan status BTPN maupun PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("**BTPN Syariah**") yang menjadi anak perusahaan (*subsidiary*) dari SMBC, BTPN juga akan memperhatikan penerapan GCG dengan memperhatikan aspek hukum lintas Negara, terkait dengan ketentuan Japan Financial Services Agency (JFSA) yang berlaku terhadap BTPN sebagai anak perusahaan SMBC.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

RUPS

Kebijakan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui RUPS, Pemegang Saham mempergunakan haknya dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Anggaran Dasar, RUPS BTPN terbagi menjadi dua yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa. Adapun dasar hukum penyelenggaraan RUPS BTPN mengacu pada:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar BTPN.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham, antara lain:

- 1) Pemegang saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

- 2) Pemegang saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Perseroan sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan, sehingga pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS.
- 3) Pemegang saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Tanggung jawab Pemegang Saham, antara lain:

- 1) Setiap pemegang saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemegang saham pengendali wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemegang saham lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- 4) Mengungkapkan daftar pihak terkait, apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada Bank.

Pelaksanaan RUPS 2019

Selama tahun 2019, Bank BTPN telah menyelenggarakan dua kali RUPS, yaitu satu kali penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 pada tanggal 15 Februari 2019 dan satu kali penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2019. Materi dan mata acara RUPS termasuk penjelasan dan dasar pertimbangan atas setiap mata acara telah diungkapkan pada situs web BTPN bersamaan dengan tanggal panggilan RUPS.

Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs web Bank dan disampaikan kepada Pemegang Saham.

Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan hanya diberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Mekanisme pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka yang dilakukan dengan cara Ketua Rapat akan meminta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau *abstain* terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan penghitungan, pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dimohon agar mencantumkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam kartu suara yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek. Petugas dari Notaris akan mengumpulkan kartu suara yang telah diisi, untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.994.504.572 saham atau 86,7598119 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.756.702.857 saham (tidak termasuk saham treasury sebanyak 95.198.900 saham).

Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan. RUPS tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat termasuk anggota Komite Audit.

RUPS Tahunan dibuka dan dipimpin oleh Mari Elka Pangestu, Komisaris Utama (Independen) berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/013/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/007/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Tanggal Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Tanggal Pemanggilan	Pelaksanaan	Tanggal Penyampaian Hasil
2 Januari 2019 melalui surat Perseroan No. S.002/DIRCLC/CCS/I/2019 dan revisinya pada tanggal 17 Januari 2019 melalui surat Perseroan No. S.014/DIRCLC/CCS/I/2019 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan	9 Januari 2019 melalui surat Perseroan No. S.008/DIRCLC/CCS/I/2019 dan Surat No. S.009/DIRCLC/CCS/I/2019 serta dipublikasikan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia	23 Januari 2019	24 Januari 2019 melalui surat Perseroan No. 025/DIRCLC/CCS/I/2019 dan dipublikasikan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia serta bahan RUPS-T tersedia di situs web Perseroan serta	15 Februari 2019, bertempat di Menara BTPN, Lantai 27, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950.	19 Februari 2019 dipublikasikan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia serta bahan RUPS-T tersedia di situs web Perseroan

Peserta RUPS Tahunan

Peserta yang hadir dalam pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut adalah:

Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Ongki Wanadjati Dana Direktur Utama	Mari Elka Pangestu Komisaris Utama (Independen)	Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 2.336.114.903 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Yoshihiro Hyakutome, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Februari 2019.
Kazuhisa Miyagawa Wakil Direktur Utama	Chow Ying Hoong Wakil Komisaris Utama	Summit Global Capital Management B.V. pemegang 1.168.057.451 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Jaecheol Park, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2019.
Dini Herdini Direktur Kepatuhan (Independen)	Takeshi Kimoto Komisaris	PT Bank Central Asia Tbk pemegang 60.083.483 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Fanny Surjadi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2019.
Yasuhiro Daikoku Direktur	Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris (Independen)	Masyarakat sejumlah 1.430.248.735 saham dalam Perseroan.
Henoch Munandar : Direktur		
Adrianus Dani Prabawa : Direktur		
Merisa Darwis : Direktur		
Hiromichi Kubo : Direktur		

Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara	Keputusan
<p>Mata Acara 1: Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et discharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang memuat laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris SMBCI. Menyetujui Laporan Tahunan BTPN, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang memuat laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris BTPN. <ol style="list-style-type: none"> Mengesahkan Laporan Keuangan SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan dengan pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Tahunan SMBCI 2018. Mengesahkan Laporan Keuangan BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan dengan pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Tahunan BTPN 2018. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et discharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BTPN yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, untuk semua tindakan pengurusan, dan/atau pengawasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI dan BTPN (termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI dan BTPN yang telah mengundurkan diri masing-masing berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SMBCI dan BTPN pada tanggal 5 Oktober 2018) untuk semua tindakan pengurusan dan/atau pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan SMBCI dan BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan."

Pengambilan suara:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Suara Setuju | : 4.993.859.772 atau 99,9870898% |
| 2. Suara Tidak Setuju | : - |
| 3. Suara Abstain | : 644.800 atau 0,0129102% |
| Total Suara Setuju | : 4.994.504.572 atau 100,0000000% |

Pengambilan Keputusan: Suara Bulat

Realisasi/Tindak Lanjut:

Laporan Tahunan dan laporan keuangan Perseroan disetujui oleh Pemegang Saham dan tersedia di situs web Perseroan.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Mata Acara	Keputusan
<p>Mata Acara 2: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, total laba bersih yang diperoleh SMBCI dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp989.673.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah).2. Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, total laba bersih yang diperoleh BTPN dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp1.968.290.937.818,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah)3. Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh SMBCI sebesar Rp989.673.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, SMBCI tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham;b. Seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh SMBCI selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp989.673.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau <i>retained earnings</i>.4. Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh Perseroan sebesar Rp1.968.290.937.818,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham;b. Seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp1.968.290.937.818,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah), dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau <i>retained earnings</i>."
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Suara Setuju : 100%2. Suara Tidak Setuju :-3. Suara Abstain :-	
<p>Pengambilan Keputusan: Suara Bulat</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Pembukuan total laba bersih sebagai saldo laba yang ditahan atau <i>retained earnings</i></p>	

Mata Acara	Keputusan
<p>Mata Acara 3: Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>1. Menyetujui mengangkat kembali :</p> <p>DIREKSI</p> <p>Direktur Utama : ONGKI WANADJATI DANA Wakil Direktur Utama : KAZUHISA MIYAGAWA; Direktur Kepatuhan (Independen) : DINI HERDINI; Direktur : YASUHIRO DAIKOKU; Direktur : HENOCH MUNANDAR; Direktur : ADRIANUS DANI PRABAWA; Direktur : HIROMICHI KUBO; Direktur : MERISA DARWIS;</p> <p>DEWAN KOMISARIS</p> <p>Komisaris Utama (Independen) : MARI ELKA PANGESTU; Wakil Komisaris Utama : CHOW YING HOONG; Komisaris : TAKESHI KIMOTO; Komisaris (Independen) : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN; Komisaris (Independen) : lowong (posisi yang ditinggalkan TONY PRASETIANTONO)</p> <p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.</p> <p>2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”</p>
<p>Pengambilan suara:</p> <p>1. Suara Setuju : 4.963.942.865 atau 99,3880933% 2. Suara Tidak Setuju : 30.561.707 atau 0,6119067% 3. Suara Abstain : -</p>	
<p>Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Tbk No.14 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0109203 tanggal 21 Februari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan</p>	

Laporan Pelaksanaan GCG

Tahun Buku 2019

Mata Acara	Keputusan
<p>Mata Acara 4: Penetapan besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Direksi dan besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan besarnya bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, akan tetapi dibayarkan dalam tahun buku 2019.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta besarnya jumlah total bonus yang akan dibayarkan kepada para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang akan dibayarkan dalam tahun 2019, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian gaji dan tunjangan serta bonus para anggota Direksi tersebut Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan Nomor MOM/RNC/002/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/005/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang akan dibayarkan dalam tahun 2019, seluruhnya tidak melebihi Rp27,3 miliar (dua puluh tujuh koma tiga miliar Rupiah) kotor, sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 3. Jumlah bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan mengurangi besarnya cadangan tantieme yang tercatat dalam Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan jika setelah dilakukan pengurangan dengan jumlah bonus yang dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdapat jumlah sisa pada cadangan tantieme, maka jumlah sisa tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan lain dari Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 4. Besarnya gaji dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, serta besarnya honorarium dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris, dalam tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan juga akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 5. Pemberian kuasa dan kewenangan yang termuat dalam keputusan ini berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat dibatalkan."
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suara Setuju : 4.994.378.572 atau 99,9974772% 2. Suara Tidak Setuju : 126.000 atau 0,0025228% 3. Suara Abstain : - 	
<p>Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris telah diberikan oleh Perseroan sesuai keputusan terkait pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus diantara para anggota Dewan Komisaris.</p>	
<p>Mata Acara 5: Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan dan Akuntan Publik Liana Lim yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu biaya audit tahunan Perseroan sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) (diluar pajak & <i>out-of-pocket expenses</i>). 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2019 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut."

Mata Acara	Keputusan
<p>Pengambilan suara:</p> <p>1. Suara Setuju : 4.974.378.572 atau 99,5970371%</p> <p>2. Suara Tidak Setuju : 20.126.000 atau 0,4029629%</p> <p>3. Suara Abstain : -</p> <p>Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak</p> <p>Realisasi/Tindak Lanjut: Menunjuk Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan dan Akuntan Publik Liana Lim untuk mengaudit Laporan Keuangan 31 Desember 2019 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.</p>	<p>Mata Acara 6: Penguatan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.</p> <p>1. Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan Perseroan (Program MESOP 2015) , yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015 (RUPS-LB 2015) , Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 (RUPS-LB 2016), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 (RUPS-T 2017), serta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 (RUPS-T 2018).</p> <p>2. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu, untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program MESOP 2015, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) :</p> <p>a. Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi jumlah Rp4.672.229.820,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 233.611.491 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan RUPS-LB 2015, yang dikukuhkan dalam RUPS-LB 2016, RUPS-T 2017 serta RUPST 2018.</p> <p>b. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program MESOP 2015 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Program MESOP 2015 dan menetapkan besarnya harga pelaksanaan, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program MESOP 2015 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan, tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program MESOP 2015 yang Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal."</p>
<p>Pengambilan suara:</p> <p>1. Suara Setuju : 4.984.152.365 atau 99,7927281%</p> <p>2. Suara Tidak Setuju : 10.352.207 atau 0,2072721%</p> <p>3. Suara Abstain : -</p> <p>Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak</p> <p>Realisasi/Tindak Lanjut: Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan</p>	

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Mata Acara	Keputusan
<p>Mata Acara 7: Penguikuan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program ESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP 2016), yang telah diambil dalam RUPS-LB 2016, RUPS-T 2017 dan RUPS-T 2018. 2. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> a. Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746 (seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS-LB 2016, RUPST-2017 dan RUPS-T 2018. b. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program ESOP 2016 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program ESOP 2016 atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016 sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan. c. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program ESOP 2016 yang Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan. <p>Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> 3. Untuk menghilangkan keragu-raguan, penambahan modal ditempatkan dan modal disetor yang termuat dalam keputusan ini tidak mengurangi keputusan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang telah diputuskan dalam rangka melaksanakan Program MESOP 2015 yang telah dikukuhkan kembali dalam acara ke-6 (enam) Rapat
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suara Setuju : 4.984.152.365 atau 99,7927281% 2. Suara Tidak Setuju : 10.352.207 atau 0,2072720% 3. Suara Abstain : - 	
<p>Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan</p>	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 11 September 2019 dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.933.621.769 saham atau 98,5086637% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 8.053.729.969 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 95.198.900 saham).

Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada satu-satunya mata acara, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

RUPS Luar Biasa dibuka dan dipimpin oleh Mari Elka Pangestu, Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk (*Circular Resolutions of The Board of Commissioners In Lieu of Resolutions Adopted At a Meeting of The Board of Commissioners of PT BTPN Tbk*)” nomor PS/BOC/016/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa

Tanggal Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Tanggal Pemanggilan	Pelaksanaan	Tanggal Penyampaian Hasil
26 Juli 2019 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S.210/DIRCLC/CCS/VII/2019	5 Agustus 2019 melalui surat Perseroan No. S.218/DIRCLC/CCS/VIII/2019 dan dipublikasikan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia	19 Agustus 2019	20 Agustus 2019 melalui surat Perseroan No. S.233/DIRCLC/CCS/VIII/2019 dan dipublikasikan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia serta bahan RUPSLB tersedia di situs web Perseroan	11 September 2019 bertempat di Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 -5.6, Jakarta Selatan 12950.	13 September 2019 melalui surat Perseroan No. S. 268/DIRCLC/CCS/IX/2019 dan dipublikasikan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia

Peserta RUPS Luar Biasa

Peserta yang hadir dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut adalah:

Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Ongki Wanadjati Dana Direktur Utama	Mari Elka Pangestu Komisaris Utama (Independen)	Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 2.336.114.903 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Yoshihiro Hyakutome, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Februari 2019.
Kazuhisa Miyagawa Wakil Direktur Utama	Chow Ying Hoong Wakil Komisaris Utama	
Dini Herdini Direktur Kepatuhan (Independen)	Takeshi Kimoto Komisaris	
Yasuhiro Daikoku Direktur	Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris (Independen) serta dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Audit	
Henoch Munandar : Direktur		
Adrianus Dani Prabawa : Direktur		
Merisa Darwis : Direktur		
Hiromichi Kubo : Direktur		

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Mata Acara dan Keputusan RUPS Luar Biasa

Rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, kuorum kehadiran telah terpenuhi dan Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan																		
<p>Mata Acara 1: Penggangkatan Ibu Hanna Tantani sebagai Direksi Perseroan, sekaligus penetapan komposisi Direksi hingga tahun 2022.</p>	<p>Menyetujui untuk mengangkat ibu HANNA TANTANI sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022; sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI</p> <table> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>: Ongki Wanadjati Dana</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>: Kazuhisa Miyagawa</td> </tr> <tr> <td>Direktur Kepatuhan (Independen)</td> <td>: Dini Herdini</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Yasuhiro Daikoku</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Henoeh Munandar</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Adrianus Dani Prabawa</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Merisa Darwis</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Hiromichi Kubo</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Hanna Tantani</td> </tr> </table> <p>Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p>	Direktur Utama	: Ongki Wanadjati Dana	Wakil Direktur Utama	: Kazuhisa Miyagawa	Direktur Kepatuhan (Independen)	: Dini Herdini	Direktur	: Yasuhiro Daikoku	Direktur	: Henoeh Munandar	Direktur	: Adrianus Dani Prabawa	Direktur	: Merisa Darwis	Direktur	: Hiromichi Kubo	Direktur	: Hanna Tantani
Direktur Utama	: Ongki Wanadjati Dana																		
Wakil Direktur Utama	: Kazuhisa Miyagawa																		
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Dini Herdini																		
Direktur	: Yasuhiro Daikoku																		
Direktur	: Henoeh Munandar																		
Direktur	: Adrianus Dani Prabawa																		
Direktur	: Merisa Darwis																		
Direktur	: Hiromichi Kubo																		
Direktur	: Hanna Tantani																		
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Suara Setuju : 7.933.621.769 (100%) Suara Tidak Setuju :- Suara Abstain :- 																			
<p>Pengambilan Keputusan: Suara Bulat</p>																			
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Tbk No.16 tanggal 11 September 2019, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0333131 tanggal 18 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan</p>																			
<p>Mata Acara 2: Penggangkatan Bapak Irwan Mahjudin Habsjah sebagai Komisaris Independen Perseroan, sekaligus penetapan komposisi Dewan Komisaris hingga tahun 2022.</p>	<p>Menyetujui untuk mengangkat bapak IRWAN MAHJUDIN HABSJAH sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022; sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS</p> <table> <tr> <td>Komisaris Utama (Independen)</td> <td>: Mari Elka Pangestu</td> </tr> <tr> <td>Wakil Komisaris Utama</td> <td>: Chow Ying Hoong</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Takeshi Kimoto</td> </tr> <tr> <td>Komisaris (Independen)</td> <td>: Ninik Herlani Masli Ridhwan</td> </tr> <tr> <td>Komisaris (Independen)</td> <td>: Irwan Mahjudin Habsjah</td> </tr> </table> <p>Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p>	Komisaris Utama (Independen)	: Mari Elka Pangestu	Wakil Komisaris Utama	: Chow Ying Hoong	Komisaris	: Takeshi Kimoto	Komisaris (Independen)	: Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris (Independen)	: Irwan Mahjudin Habsjah								
Komisaris Utama (Independen)	: Mari Elka Pangestu																		
Wakil Komisaris Utama	: Chow Ying Hoong																		
Komisaris	: Takeshi Kimoto																		
Komisaris (Independen)	: Ninik Herlani Masli Ridhwan																		
Komisaris (Independen)	: Irwan Mahjudin Habsjah																		

Mata Acara	Keputusan
<p>Pengambilan suara:</p> <p>1. Suara Setuju : 7.933.621.769 (100%)</p> <p>2. Suara Tidak Setuju : -</p> <p>3. Suara Abstain : -</p> <p>Pengambilan Keputusan: Suara Bulat</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut:</p> <p>Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Tbk No.16 tanggal 11 September 2019, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0333131 tanggal 18 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan</p>	

RUPS TAHUN 2018 DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN

Bank BTPN telah merealisasikan hasil putusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan untuk Tahun Buku 2018, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi dan Tindak Lanjut
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2017. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa atau diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di Jakarta, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2017. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, untuk semua tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, untuk semua tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya. 	Laporan Tahunan dan laporan keuangan Perseroan disetujui oleh Pemegang Saham pada RUPS Tahunan tanggal 29 Maret 2018 dan tersedia di situs web Perseroan.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

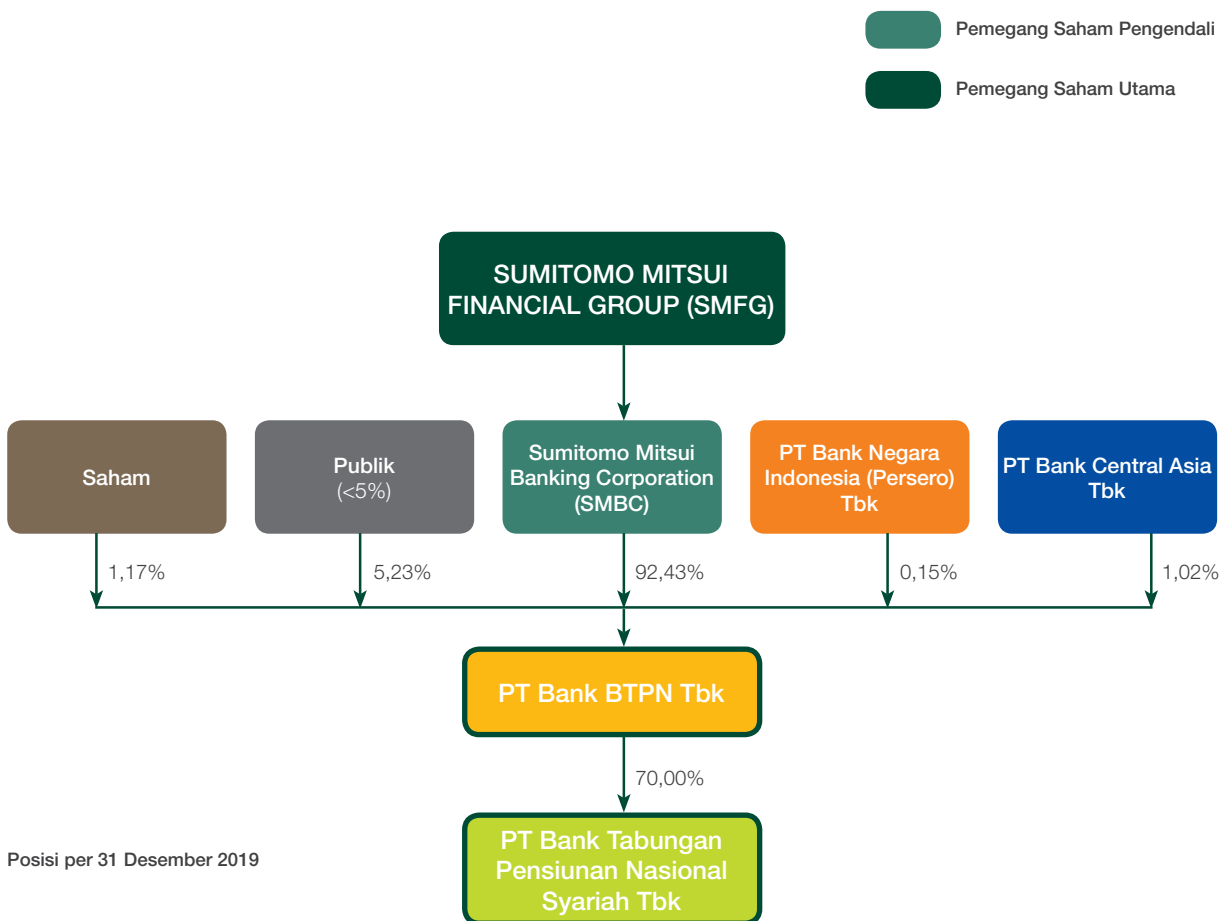
No.	Agenda	Keputusan	Realisasi dan Tindak Lanjut
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, total laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp1.220.886.000.000. Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh Perseroan sebesar Rp1.220.886.000.000, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp574.509.000.000 atau Rp100 per lembar saham, dengan ketentuan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran dividen, dan Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2017. Sisa dari laba bersih akan dibukukan sebagai saldo laba yang ditahan atau <i>retained earnings</i> sebesar Rp646.377.000.000 	Keputusan sudah terealisasi dan telah ditindak lanjuti.
3	Persetujuan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Wolf Arno Kluge selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2018, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat jabatan Direktur Perseroan. Menyatakan bahwa terhitung sejak saat RUPS Tahunan ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <p>DIREKSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama (Independen) : Jerry Ng - Wakil Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana - Wakil Direktur Utama : Djemi Suhendra - Direktur Kepatuhan (Independen) : Anika Faisal - Direktur : Kharim Indra Gupta Siregar - Direktur : Arief Harris Tandjung <p>DEWAN KOMISARIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama (Independen) : Mari Elka Pangestu - Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah - Komisaris (Independen) : Arief Tarunakarya Surowidjojo - Komisaris : Chow Ying Hoong - Komisaris : Shinichi Nakamura <p>dengan ketentuan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir karena hukum pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019.</p> 	Keputusan sudah terealisasi dan telah ditindak lanjuti.

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi dan Tindak Lanjut
4	<p>Penetapan besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Direksi dan besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, akan tetapi dibayarkan dalam tahun buku 2018.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta besarnya jumlah total bonus untuk para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang akan dibayarkan dalam tahun 2018, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi; 2. Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang akan dibayarkan dalam tahun 2018, seluruhnya tidak melebihi Rp27.300.000.000 kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris. 	<p>Keputusan sudah terealisasi dan telah ditindak lanjuti.</p>
5	<p>Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 2. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu biaya audit tahunan Perseroan sebesar Rp5.755.000.000 (diluar pajak & <i>out-of-pocket expenses</i>). 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan 31 Desember 2018. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan/ atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2018 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut. 	<p>Keputusan sudah terealisasi dan telah ditindak lanjuti.</p>

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi dan Tindak Lanjut
6	Pemberian pertanggung jawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tahap II Tahun 2017 dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp1.500.000.000.000 (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah)	Tidak ada keputusan, karena agenda rapat adalah untuk pemberian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017.	Keputusan sudah terealisasi dan telah ditindak lanjuti.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali



Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penting dalam struktur dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk memenuhi hal itu, Bank telah menetapkan sejumlah Dewan Komisaris dengan proses dan ketentuan sesuai peraturan berlaku yang ditetapkan oleh regulator.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan.

Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional serta latar belakang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, kebijakan Bank dalam menetapkan Dewan Komisaris tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

Dasar Hukum

Dasar hukum keberadaan Dewan Komisaris dalam organisasi perusahaan, didasarkan oleh sejumlah aturan yang berlaku. Di antaranya, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh ketentuan tersebut mengharuskan perusahaan yang bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris. Adapun tugasnya adalah mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan,

sekaligus mengawasi dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi.

Prosedur Pengangkatan

Kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kompetensi, dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membeda-bedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Berikut adalah alur proses nominasi anggota Dewan Komisaris:



Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Kriteria Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per 31 Desember 2019, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

Independensi Dewan Komisaris

Bank BTPN telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan independensi Dewan Komisaris:

- Anggota Dewan Komisaris BTPN telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 orang dimana 3 orang atau lebih dari 50% adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independensi berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Penggantian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan dalam Peraturan OJK.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kelayakan. Pernyataan ini selalu diperbaharui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2019.

Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris (*Board Manual*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris. Pedoman tersebut secara berkala dilakukan pengkinian dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris telah dilakukan kajian terakhir pada 1 Februari 2019.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, isi dari *Board Manual* Dewan Komisaris adalah:

1. Organisasi
2. Independensi
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Pembentukan Komite-komite
5. Fungsi Komisaris Utama
6. Nilai-nilai Etika Anggota Dewan Komisaris
7. Rapat
8. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris adalah 5 (lima) orang dan tidak melebihi jumlah anggota Direksi yaitu 9 (sembilan) orang. 3 (tiga) dari 5 (lima) orang atau lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Mayoritas anggota dari anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan RUPS Luar Biasa tanggal 11 September 2019 terjadi perubahan komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Tahapan perubahan komposisi Dewan Komisaris dijelaskan sebagai berikut:

Periode Sebelum RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1	Mari Elka Pangestu	Komisaris Utama (Independen)	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019 – 2022)
2	Chow Ying Hoong	Wakil Komisaris Utama	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019 – 2022)
3	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris (Independen)	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019 – 2022)
4	Takeshi Kimoto	Komisaris	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019 – 2022)

Periode Setelah RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1	Mari Elka Pangestu	Komisaris Utama (Independen)	2019-2022
2	Chow Ying Hoong	Wakil Komisaris Utama	2019-2022
3	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris (Independen)	2019-2022
4	Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022

Periode Setelah RUPS Luar Biasa tanggal 11 September 2019

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1	Mari Elka Pangestu	Komisaris Utama (Independen)	2019-2022
2	Chow Ying Hoong	Wakil Komisaris Utama	2019-2022
3	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris (Independen)	2019-2022
4	Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022
5	Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris (Independen)	2019-2022

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Dewan Komisaris

Secara umum, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.

Secara khusus, masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memiliki tugas. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1	Mari Elka Pangestu	Komisaris Utama (Independen)	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
2	Chow Ying Hoong	Wakil Komisaris Utama	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
3	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris (Independen)	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Audit b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi c. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
4	Takeshi Kimoto	Komisaris	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
5	Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris (Independen)	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Pemantau Risiko b. Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Rencana dan Realisasi Program Kerja 2019

Dewan Komisaris telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional Bank BTPN serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola pada seluruh aktivitas Bank. Pengawasan difokuskan kepada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun

melalui komite-komite yang dibentuk. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank antara lain:

1. Kajian atas kinerja keuangan Bank dan Perusahaan Anak.
2. Melalui Komite Pemantau Risiko, telah dilakukan kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Internal Audit dan eksternal dan rekomendasi dari Internal Audit melalui Komite Audit.
4. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Persetujuan atas revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019-2021.
6. Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
7. Pemantauan penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi.
8. Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
9. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank - RBBR, penerapan APU PPT dan penerapan manajemen risiko.

Pengungkapan Kepemilikan Saham

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terkait Laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Saham Direksi, selama tahun 2019 terdapat transaksi penjualan saham BTPN yang dilakukan oleh Direksi dan telah dilakukan laporan perubahan kepemilikan saham sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini merupakan tabel kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2018: (will be updated after cash offer period)

Nama	Jumlah Saham	Persen Saham	Status
DEWAN KOMISARIS			
Mari Elka Pangestu	0	0,00%	Komisaris Utama (Independen)
Chow Ying Hoong	0	0,00%	Wakil Komisaris Utama
Ninik Herlani Masli Ridhwan	0	0,00%	Komisaris (Independen)
Takeshi Kimoto	0	0,00%	Komisaris
Inwan Mahjudin Habsjah	0	0,00%	Komisaris (Independen)

Orientasi bagi Dewan Komisaris

Bank BTPN memastikan setiap anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris tersebut.

Penilaian Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Selama tahun 2019, komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasannya dengan baik melalui rapat berkala dengan Dewan Komisaris dan melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan, akuntabilitas dan tata kelola.

Penilaian kinerja komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian sendiri oleh masing masing anggota komite yang dirangkum secara kuantitatif.

Komisaris Independen

Jumlah Komisaris Independen

Pada tahun 2019, jumlah komisaris independen Bank BTPN sebanyak 3 (tiga) orang dari 5 (lima) Dewan Komisaris. Dengan demikian, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Komisaris Independen

Di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Peran Komisaris Independen sangat penting khususnya fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi, mencegah benturan kepentingan serta meningkatkan independensi dan obyektivitas.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris,
- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
- 3) Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
- 4) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Independensi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Aspek Independensi	Mari Elka Pangestu	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Irwan Mahjudin Habsjah
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank	✓	✓	✓
Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai: Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan pengawasan	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	✓	✓	✓

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Direksi

Direksi merupakan organ penting dalam tata kelola perusahaan, yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Wewenang tersebut digunakan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Bank. Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh regulasi bahwa Direksi dapat mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tujuannya adalah demi mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi Bank BTPN senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank.

Dasar Hukum

Dasar hukum keberadaan Direksi dalam organisasi perusahaan, didasarkan oleh sejumlah aturan yang berlaku. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, Bank Juga Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Regulasi tersebut menetapkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Karena itulah, Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Prosedur pengangkatan

Kebijakan Nominasi anggota Direksi dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kompetensi, dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sebelumnya, Direksi adalah lulus dalam menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per 31 Desember 2019, seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

Berikut adalah alur proses nominasi anggota Direksi:



Kriteria Direksi

Penetapan kriteria Direksi, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Saat diangkat, Direksi minimal harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS

- iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank. Selanjutnya, Bank wajib meneliti dan mendokumentasikannya.

Independensi Direksi

Penetapan komposisi Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama. Direksi BTPN berjumlah 9 (sembilan) orang dimana terdapat 3 (tiga) orang adalah Direktur perempuan.

Sejalan dengan itu, Bank BTPN telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan independensi Direksi:

- Anggota Direksi Bank BTPN telah memenuhi kriteria dan independensi sesuai ketentuan regulator, yang di antaranya menyebutkan bahwa Direktur

Utama merupakan pihak independen.

- Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan OJK.

Anggota Direksi Perseroan menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kelayakan. Pernyataan ini selalu diperbaharui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2019.

Pedoman Tata Tertib Direksi (*Board Manual*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Board Manual*). Pedoman tersebut secara berkala dilakukan pengkinian dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi telah dilakukan kajian terakhir. Berdasarkan hasil kajian tersebut, isi dari *Board Manual* Direksi adalah:

1. Organisasi
2. Independensi
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
4. Fungsi Direktur Utama
5. Direktur Kepatuhan
6. Nilai-nilai Etika Anggota Direksi
7. Rapat
8. Hubungan dengan Stakeholder
9. Pelatihan

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Komposisi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan RUPS Luar Biasa tanggal 11 September 2019 terjadi perubahan komposisi anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:

Periode Sebelum RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1	Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019-2022)
2	Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019-2022)
3	Dini Herdini	Direktur Kepatuhan (Independen)	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019-2022)
4	Yasuhiro Daikoku	Direktur	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019-2022)
5	Adrianus Dani Prabawa	Direktur	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019-2022)
6	Henoch Munandar	Direktur	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019-2022)
7	Hiromichi Kubo	Direktur	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019-2022)
8	Merisa Darwis	Direktur	Setelah efektif Merger (1 Februari 2019-2022)

Periode Setelah RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1	Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2019-2022
2	Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	2019-2022
3	Dini Herdini	Direktur Kepatuhan (Independen)	2019- 2022
4	Yasuhiro Daikoku	Direktur	2019- 2022
5	Adrianus Dani Prabawa	Direktur	2019- 2022
6	Henoch Munandar	Direktur	2019- 2022
7	Hiromichi Kubo	Direktur	2019- 2022
8	Merisa Darwis	Direktur	2019- 2022

Periode Setelah RUPS Luar Biasa tanggal 11 September 2019

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1	Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2019-2022
2	Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	2019-2022
3	Dini Herdini	Direktur Kepatuhan (Independen)	2019- 2022
4	Yasuhiro Daikoku	Direktur	2019- 2022
5	Adrianus Dani Prabawa	Direktur	2019- 2022
6	Henoch Munandar	Direktur	2019- 2022
7	Hiromichi Kubo	Direktur	2019- 2022
8	Merisa Darwis	Direktur	2019- 2022
9	Hanna Tantani	Direktur	2019-2022

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Secara umum, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Secara khusus, masing-masing anggota Direksi telah memiliki tugas. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Jabatan	Tugas
Direktur Utama	Mengkoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Secara khusus membawahi: a. Wakil Direktur Utama b. Direktur <i>Corporate Banking Japanese</i> c. Direktur <i>Wholesale Banking</i> d. Direktur <i>Treasury</i> e. Direktur Operasional f. Direktur Manajemen Risiko g. Direktur Kepatuhan & Legal h. <i>Head of Information Technology</i> i. <i>Head of Business Banking</i> j. <i>Chief Financial Officer</i> k. <i>Head of Human Capital</i> l. <i>Head of Internal Audit</i> m. <i>Chief Retail Banking Officer</i>
Wakil Direktur Utama	a. Mengkoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab: i. Direktur yang membawahi <i>Corporate Banking Japanese</i> ii. Direktur yang membawahi <i>Wholesale Banking</i> iii. Direktur <i>Treasury</i> b. Secara khusus membawahi: <i>Credit Risk Division</i> : a. <i>Credit</i> b. <i>Loan</i> c. <i>Transaction Legal</i>
Direktur Kepatuhan	Secara khusus membawahi: a. <i>AML&CFT</i> b. <i>Compliance</i> c. <i>Corporate Secretary</i> d. <i>Legal & Litigasi</i> e. <i>Corporate Communication & DAYA</i>
Direktur <i>Corporate Banking Japanese</i>	Secara khusus membawahi: a. <i>Corporate Banking 2</i> b. <i>Corporate Banking 3</i> c. <i>Corporate Banking 4</i> d. <i>Corporate Banking 5</i> e. <i>KYC Onboarding</i> .
Direktur <i>Wholesale Banking</i>	Secara khusus membawahi: a. <i>Wholesale Banking</i> b. <i>Transaction Banking Solutions</i> c. <i>Wholesale Funding Business</i>

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Jabatan	Tugas
Direktur Manajemen Risiko	Secara khusus membawahi: a. <i>Portfolio Management & Policy</i> b. <i>Anti Fraud Management</i> c. <i>Operational Risk Management</i> d. <i>Market & Liquidity Risk Management.</i>
Direktur Operasional	Secara khusus membawahi: a. <i>Customer Experience Center</i> b. <i>Branch Banking</i> c. <i>Corporate Banking Operations</i> d. <i>Retail Banking Operations</i> e. <i>Information Security & Control Assurance</i> f. <i>Operations Development</i> g. <i>General Services</i>
Direktur Treasury	Secara khusus membawahi <i>Deputy Head of Treasury</i>
Direktur Keuangan	Secara khusus membawahi: a. <i>Planning and Deputy of Chief Financial Officer</i> b. <i>Financial Control</i> c. <i>Finance Technology & Operations</i> d. <i>Alignment & Synergy</i>

Orientasi Anggota Direksi Baru

Direktur Utama memastikan anggota Direksi yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Direksi tersebut.

Rencana dan Realisasi Program Kerja 2019

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis dan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi. Selama 2019, rapat Direksi telah membahas antara lain:

1. Pemantauan kinerja keuangan Bank dan Perusahaan Anak.
2. Evaluasi kinerja unit-unit bisnis atas target yang telah ditetapkan.
3. Kajian terhadap penerapan teknologi informasi (TI) dan operasional Bank serta inisiatif di bidang TI dan operasional.
4. Persetujuan rencana strategis pada Unit Bisnis dan Unit Pendukung.
5. Persetujuan realisasi promosi dan penyesuaian gaji promosi karyawan tahun 2019
6. Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap Bank.
7. Pemantauan tindak lanjut atas temuan audit dari Internal dan Eksternal Audit serta hasil pengawasan OJK dan otoritas lainnya.
8. Kajian internal *fraud, whistle blowing system* dan upaya tindak lanjut.
9. Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Pengungkapan Kepemilikan Saham

Sesuai dengan amanat regulator bahwa Direksi harus menyampaikan kepemilikannya terhadap Bank, maka dengan ini disampaikan bahwa:

Nama	Jumlah Saham	Persen Saham	Status
DIREKSI			
Ongki Wanadjati Dana	0	0,00%	Direktur Utama
Kazuhisa Miyagawa	0	0,00%	Wakil Direktur Utama
Dini Herdini	0	0,00%	Direktur Kepatuhan (Independen)

Nama	Jumlah Saham	Persen Saham	Status
DIREKSI			
Yasuhiro Daikoku	0	0,00%	Direktur
Adrianus Dani Prabawa	0	0,00%	Direktur
Henoch Munandar	0	0,00%	Direktur
Hirromichi Kubo	0	0,00%	Direktur
Merisa Darwis	0	0,00%	Direktur
Hanna Tantani	0	0,00%	Direktur

Suksesi Direksi

Human Capital memfasilitasi melalui proses *talent management & succession planning* dimana dilakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota Direksi, dan potensi pengembangannya di masa depan. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Selama tahun 2019, komite di bawah pengawasan Direksi telah terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi dengan memastikan semua strategi dan inisiatif-inisiatif utama telah ditindaklanjuti.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang diterapkan di lingkungan Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Karena itulah, pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertimbangkan faktor keragaman.

Keberagaman pada Dewan Komisaris tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Bank. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan, baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Bank. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Bank.

Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal. Begitu pun halnya dengan Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Karakteristik Keragaman Dewan Komisaris

No.	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia Warga Negara Singapura Warga Negara Jepang
2	Pendidikan	Bidang Ilmu Ekonomi Bidang Manajemen Keuangan Bidang Moneter
3	Pengalaman Kerja	Birokrasi Peneliti Praktisi Perbankan Auditor
4	Gender	2 Perempuan 3 Laki-laki

Karakteristik Keragaman Direksi

No.	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia Warga Negara Jepang
2	Pendidikan	Bidang Ilmu Ekonomi Bidang Manajemen Keuangan Bidang Hukum Bidang Perdagangan
3	Pengalaman Kerja	Perbankan Internasional Manajemen Risiko Eksekutif Keuangan
4	Gender	3 Perempuan 6 Laki-laki

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat tercantum dalam Pedoman dan Tertib Kerja Dewan Komisaris yaitu antara lain:

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- e. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk di dalam rapat tersebut.
- f. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- g. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- h. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- i. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Nama Komisaris	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	Persentase Kehadiran
Mari Elka Pangestu	5	100%	7	100%
Chow Ying Hoong	5	100%	7	100%
Ninik Herlani Masli Ridhwan	5	100%	7	100%
Takeshi Kimoto	5	100%	7	100%
Irwan Mahjudin Habsjah	1	100%	2	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda
MOM.001B/BOC/III/2019	15/03/2019	- Rencana Kerja Komite Tahun 2019 - Laporan Komite Audit per Februari 2019 - Laporan Komite Pemantau Risiko per Februari 2019 - Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi per Februari 2019
MOM.001A/BOC/IV/2019	4/04/2019	Komposisi Direksi Perseroan
MOM.002/BOC/IV/2019	30/04/2019	- Laporan Komite Audit Kwartal I/2019 - Laporan Komite Pemantau Kwartal I/2019 - Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi Kwartal I/2019 - Laporan Kunjungan Kerja Komite
MOM.002a/BOC/VII/2019	25/07/2019	- Laporan Komite Audit Kwartal II/2019 - Laporan Komite Pemantau Risiko Kwartal II/2019 - Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi Kwartal II/2019 - Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tengah Tahun 2019 - Penilaian Sendiri Tata Kelola Perusahaan 30 Juni 2019
MOM.003/BOC/XI/2019	5/11/2019	- Laporan Komite Audit Kwartal III/2019 - Laporan Komite Pemantau Kwartal III/2019 - Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi Kwartal III/2019

Pelaksanaan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

- a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap bulan.
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- e. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- g. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- h. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk didalam Rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ke-3.
- i. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- j. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- k. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.
- l. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Nama Direktur	Jumlah Rapat Direksi	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	Persentase Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana	37	92%	7	100%
Kazuhisa Miyagawa	37	92%	7	100%
Dini Herdini	37	89%	7	100%
Adrianus Dani Prabawa	37	78%	7	43%
Yasuhiro Daikoku	37	78%	7	86%
Henoch Munandar	37	89%	7	86%
Hirohichi Kubo	37	97%	7	100%
Merisa Darwis	37	89%	7	71%
Hanna Tantani	14	86%	2	100%

Agenda Rapat Direksi

Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda
MOM.004a/BOD/II/2019	06/02/19	<ul style="list-style-type: none"> - Penyambutan anggota Direksi baru - Tugas dan Tanggung Jawab Direksi - Panduan Budget dan KPI Intern - Agenda untuk Rapat Direksi
MOM.004b/BOD/II/2019	12/02/19	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan Tahunan sampai Januari 2019 - Kebijakan Alur Komunikasi - Revisi Kebijakan E&G - Pengkinian Informasi Life@BTPN
MOM.004c/BOD/II/2019	19/02/19	Pokok-pokok dan Aksi Bawaan
MOM.005/BOD/III/2019	5/03/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian mengenai <i>Japanesse Marketing</i> - Pengkinian mengenai <i>Non Japanesse Marketing</i> - Pengkinian mengenai <i>Treasury</i> - Usulan Video Profile - Pengkinian mengenai <i>Project Management Office</i>
MOM.006/BOD/III/2019	12/03/19	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pelaksanaan Legal Day 1 - Kinerja Keuangan s/d Februari 2019 - KPI 2019 dan Inisiatif Bisnis - Presentasi Internal Audit
MOM.007/BOD/III/2019	26/03/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian mengenai IT - Inisiatif Kunci 2019 dan strategi Usaha 2019 - Pengelolaan Biaya Strategis - Usulan Acara Penerimaan
MOM.008/BOD/IV/2019	2/04/19	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan mengenai Peraturan Pemerintah Daerah Aceh No.11-2018 - Prosedur Kedatangan Tamu Asing
MOM.009/BOD/IV/2019	9/04/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian mengenai <i>Treasury</i> - Pengkinian mengenai <i>Treasury Stock</i> - Pengkinian mengenai Bisnis Pensiun - Pengkinian mengenai Bisnis Pendanaan Ritel - Perhitungan RWA dari Risiko Operasional untuk Tahun Buku 2019
MOM.010/BOD/IV/2019	16/04/19	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan sampai dengan Maret 2019 - Pengkinian mengenai BTPN Wow - Pengkinian mengenai Jenius - Inisiatif strategi kunci.

Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda
MOM.011/BOD/IV/2019	23/04/19	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kepatuhan, APU&PPT dan Sekretaris Perusahaan Kuartal ke-I 2019 - Laporan Operasional Kuartal I 2019 - Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> untuk Maret 2019 - Laporan Bapepam untuk Kuartal I 2019 - Pengkinian Fraud Risk Kuartal I 2019
MOM.012/BOD/V/2019	7/05/19	Pengkinian anggota BOM
MOM.013/BOD/V/2019	14/05/29	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja Keuangan April 2019 - Relokasi PMO - Pengkinian IFRS 9 - Pengkinian terkait Qanun dan Optimisasi Titik Pelayanan - Pengkinian dari SMBC
MOM.014/BOD/V/2019	21/05/19	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan <i>Cloud</i> pada Jenius dengan <i>Amazon Web Services (AWS)</i> - Pengembangan Produk KPR - Pengkinian Audit Internal - Pengkinian TI - Pengkinian Strategi Kunci
MOM.015/BOD/V/2019	28/05/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian Tresuri - Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese</i> - Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> - Rencana Aksi Keuangan Berke
MOM.016/BOD/VI/2019	18/06/19	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja Keuangan Mei 2019 - Pengkinian Strategi Kunci dan Sinergi Bisnis - Rencana Aksi APU untuk persetujuan Direksi - Laporan Tata Kelola - Pengkinian dari Jenius terkait IPR
MOM.017/BOD/VI/2019	25/06/19	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Bisnis Bank 2019-2021 untuk persetujuan Direksi - Pengkinian Tresuri - Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese</i> - Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> - Laporan Tata Kelola - Pengarahan terkait Resepsi BTPN - Audit terkait <i>Internal Control Framework</i>
MOM.018/BOD/VII/2019	9/07/19	<ul style="list-style-type: none"> - Fase 1 - Perkembangan Proyek SOX - Laporan Kinerja Keuangan Juni 2019 - Pengenalan pada <i>Mid-Term Plan</i> - Pengkinian Bisnis <i>Retail Lending</i> - Pengkinian Bisnis <i>Retail Funding</i> - Sinaya Prioritas Digital - Pengkinian tentang Qanun
MOM.019/BOD/VII/2019	16/07/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian BTPN Wow! - Pengkinian Strategi Kunci dan Sinergi Bisnis - Pengkinian TBV & <i>Forecast</i> untuk 2019 (Penilaian berdasarkan data 15 Juli 2019) - Pengkinian Pinjaman <i>Offshore</i> - Laporan Tata Kelola
MOM.020/BOD/VII/2019	23/07/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian Audit Internal - Pengkinian TI - Pengkinian <i>Wholesale Banking</i> - Laporan Kepatuhan dan APU&PPT Kuartal 2. 2019 - Proposal Pilar DAYA baru - Pengaturan untuk Obligasi
MOM.020a/BOD/VII/2019	30/07/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese</i> - Pengkinian Jenius - Laporan Operasional untuk Kuartal 2 - 2019 - Laporan <i>Fraud</i> dari Manajemen Risiko - Pengkinian Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda
MOM.021/BOD/VIII/2019	6/08/19	<ul style="list-style-type: none"> - Isu yang Mempengaruhi Penutupan Neraca Keuangan Akhir Bulan Substantiasi Keuangan dan Rekonsiliasinya - Pembaruan Aplikasi TBV
MOM.022/BOD/VIII/2019	13/08/19	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja Keuangan Juli 2019 - Pengkinian <i>Business Banking</i> - Inisiatif <i>Satelite Office</i> - Laporan Tata Kelola - Jenius dan Potensi Kolaborasi MRT Jakarta
MOM.023/BOD/VIII/2019	20/08/19	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan SOX (Fase 2 - Pengkinian Hasil) - Pengkinian Tresuri - Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese</i> - Pengkinian Grup <i>Wholesale Banking</i> - Pengkinian Strategi Kunci dan Sinergi Bisnis - Laporan Tata Kelola - <i>Retail Branding</i> - Logo Sinaya Prioritas
MOM.024/BOD/VIII/2019	27/08/19	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Survei Nadi - Sebelum & Sesudah Penggabungan - Pengkinian Proyek Sumber Daya Manusia - Laporan Tata Kelola - Pengkinian <i>portfolio</i> Jenius dan iklan TVC
MOM.025/BOD/IX/2019	10/09/19	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja Keuangan bulan Agustus 2019 - Pengkinian Proyek <i>General Ledger Account Ownership (GLAO)</i> - Pengkinian Audit Internal - Laporan Tata Kelola - Pengkinian Jenius
MOM.026/BOD/IX/2019	17/09/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian Tresuri - Pengkinian Strategi Kunci dan Sinergi Bisnis - Pengkinian Prediksi dan Biaya tahun 2019 - Laporan Tata Kelola - Pengkinian Komunikasi
MOM.027/BOD/IX/2019	24/09/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian SOX - Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese</i> - Pengkinian Grup <i>Wholesale Banking</i> - Pengkinian Tata Kelola Pengadaan - Laporan Tata Kelola - Respon terhadap Temuan Audit ICF No. 2 - Proyek Lombok
MOM.028/BOD/IX/2019	1/10/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian Asuransi D&O - Persetujuan Direksi untuk Perjanjian Kolaborasi dengan SMBC
MOM.029/BOD/X/2019	8/10/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian Bisnis <i>Retail Lending</i> - Pengkinian Pemantauan GL Operasional - Laporan Perkembangan - Laporan Tata Kelola - Isu pada <i>Openshift</i> Teknologi Informasi
MOM.030/BOD/X/2019	15/10/19	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja Keuangan September 2019 - Pengkinian BTPN Wow! - Pengkinian Jenius - Strategi Kunci dan Sinergi Bisnis - Pengkinian Legal - Pendigitalan UKM
MOM.031/BOD/X/2019	22/10/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian <i>Business Banking</i> - Pengkinian Audit Internal - Rencana Audit Tahunan - Pengkinian Operasional Kuartal III 2019 - Pengkinian Mid-Term Plan
MOM.032/BOD/X/2019	29/10/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian SOX - Pengkinian Tresuri - Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese</i> - Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> - Pengkinian <i>Bisnis Retail Funding</i>

Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda
MOM.033/BOD/X/2019	12/11/19	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja Keuangan Oktober 2019 - Pengkinian <i>Mid-Term Plan</i> - Rangkuman rancangan Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2020-2022 - Logo BTPN Sinaya Prioritas - Penilaian Risiko Audit Internal 2019 dan Rencana Audit Tahunan 2020 - Pengkinian Pasca-Penggabungan untuk temuan audit - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk tahun 2020-2023 - Pendaftaran Hak Tanggungan - Laporan Tata Kelola
MOM.034/BOD/X/2019	19/11/19	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Tata Kelola - Pengkinian Proyek GLAO - Strategi Kunci dan Sinergi Bisnis - Pertemuan Tahunan Karyawan dan Karyawan Tahunan - Potensi gabungan dan kerja sama dengan Traveloka - Pengkinian ALTO
MOM.035/BOD/X/2019	26/11/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian Tresuri - Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> - Laporan Tata Kelola - Pengkinian <i>Active Employee Loan</i> - Pengkinian Sumber Daya Manusia - Pengkinian Transisi IBOR
MOM.036/BOD/XII/2019	10/12/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian SOX - Pengkinian Proyek GLAO - Laporan Kinerja Keuangan November 2019 - Laporan Tata Kelola - Pengkinian Asuransi Biaya Dibayar Dimuka Kredit Bisnis Pensiun - Rancangan <i>Medium-Term Management</i>
MOM.037/BOD/XII/2019	17/12/19	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian Tresuri - PSAK 73 - Implementasi Akuntansi untuk Kontrak Sewa dan Rangkuman Audit KPMG - Status akhir terkait GLAO dan Penutupan untuk Desember - Strategi Kunci dan Sinergi Bisnis - Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> - Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese</i> - Laporan Tata Kelola - Tindak Lanjut Temuan Audit terkait pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (IPR) - Proposal Internal Audit terkait respon dari Manajemen
MOM.038/BOD/XII/2019	30/12/19	Biaya Dibayar Dimuka Asuransi Kredit – <i>BOD Hearing Session</i>

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan jadwal dan agenda rapat. Bahan rapat serta risalah rapat telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang efektif terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasi, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2019, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan sebanyak 7 kali.

Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Selama tahun 2019, tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda
MOM.006A/BOD-BOC/III/2019	15/03/2019	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Implementasi <i>Legal Day-1</i>- Laporan Kinerja Keuangan untuk Februari 2019
MOM.001/BOD-BOC/IV/2019	30/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Kinerja Keuangan Kuartal I 2019- Pengkinian Merger dan Integrasi
MOM.002a/BOC-BOD/VI/2019	26/06/2019	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Kinerja Keuangan Mei 2019 dan Persetujuan Dewan Komisaris untuk revisi Rencana Bisnis Bank 2019- Pengkinian Hasil Pemeriksaan Audit SMBC- Pengkinian tentang Resepsi BTPN
MOM.002a/BOD_BOC/VII/2019	25/07/2019	<ul style="list-style-type: none">- Transaksi Pihak Terkait- Laporan Kinerja Keuangan Juni 2019- Pemberian Kuasa untuk 2 Komisaris
MOM.003/BOC-BOD/VIII/2019	22/08/2019	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Kepatuhan- Laporan Manajemen Risiko<ul style="list-style-type: none">• Profil Risiko-Risiko Operasional• Pengkinian <i>Anti Fraud</i>• PSAK 71 - Pengkinian Penurunan Nilai- Pengkinian <i>Recovery Plan</i>- Persetujuan <i>Tax Book Value</i>
MOM.004/BOC-BOD/XI/2019	5/11/2019	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Kinerja Keuangan September 2019- Laporan Kepatuhan- Laporan Manajemen Risiko<ul style="list-style-type: none">• Profil Risiko-Risiko Operasional• Pengkinian <i>Anti-Fraud Management</i>- Proyek SOX dan Substansiasi & Rekonsiliasi GL
MOM.005/BOC-BOD/XI/2019	15/11/2019	Rencana Bisnis Bank 2020-2022

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
			Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
1	Mari Elka Pangestu	Komisaris Utama (Independen)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Chow Ying Hoong	Wakil Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris (Independen)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Takeshi Kimoto	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris (Independen)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Direksi

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
			Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Lainnya	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Lainnya
1	Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Dini Herdini	Direktur Kepatuhan (Independen)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Yasuhiro Daikoku	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Adrianus Dani Prabawa	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Henoch Munandar	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Hirromichi Kubo	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Merisa Darwis	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9	Hanna Tantani	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Komite tingkat Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Pemantau Risiko. Setiap Komite bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan melakukan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan internal dan eksternal serta pelaksanaan kepatuhan Bank.

Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- e. Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Audit adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/CCS/05/2019.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan serta masa tugas. Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Audit pada tanggal 11 September 2019.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- c. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank termasuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.

- d. Menganalisa rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit.
- e. Menganalisa independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik ("KAP") serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP Publik dengan standar audit yang berlaku.
- f. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Internal Audit, KAP, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- h. Melaporkan secara berkala hasil rapat dan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris

Independensi Komite Audit

Mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen atau paling kurang terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen
2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi
3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Susunan Anggota Komite Audit

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ketua (Komisaris Independen)	1 Februari 2019
2	Ivan Purnama Sanoesi	Anggota (Pihak Independen)	1 Februari 2019
3	Kanaka Puradiredja	Anggota (Pihak Independen)	1 Februari 2019

Masa Jabatan

Periode jabatan Komite Audit adalah terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS Tahunan pada tanggal 15 Februari 2019) atau jangka waktu lain yang diputuskan oleh RUPS Luar Biasa Bank.

Profil Anggota Komite Audit

Profil anggota Komite Audit terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen di dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh anggota.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama Anggota Komite Audit	Jumlah Rapat	Kehadiran
Ninik Herlani Masli Ridhwan	18	18
Ivan Purnama Sanoesi	18	18
Kanaka Puradiredja	18	16

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2019

Pembahasan dan fokus kajian dan diskusi Komite Audit adalah sebagai berikut :

Laporan Keuangan

- Membahas dan melakukan evaluasi laporan keuangan Bank 2018.
- Memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara berkala dan informasi keuangan lainnya.

Audit Eksternal

- Membahas hasil audit laporan keuangan Bank tahun 2018.
- Membahas rencana audit eksternal tahun 2019, pendekatan audit, dan metodologi.
- Memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal.
- Melakukan penelaahan dan penilaian atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.

Internal Audit

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit selama tahun 2018 dan 2019.
- Memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan Internal Audit.
- Melakukan kajian dan memberikan persetujuan atas Rencana Audit tahun 2020.

Kepatuhan dan Internal *Fraud*

1. Memantau penerapan kepatuhan Bank dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT).
2. Melakukan kajian peraturan/ ketentuan baru yang berlaku dan dampaknya.
3. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memantau kasus internal *fraud* dan melakukan evaluasi program penanggulangan *fraud*.

Rencana Kerja Komite Audit

Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit tahun 2020 serta melakukan kajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memastikan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank dinilai sudah berjalan efektif dan memadai mencakup pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/CCS/05/2019.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank BTPN telah memiliki pedoman dan tata tertib Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan pada 1 Februari 2019. Dalam dokumen tersebut, diatur tentang Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan Penilaian Diri Sendiri (*Self Assessment*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris, Wewenang KOMite Remunerasi dan Nominasi, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, dan Masa Tugas.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite adalah:

Terkait dengan kebijakan remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi, struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Terkait dengan kebijakan nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan memberi rekomendasi mengenai kriteria serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan OJK. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris Independen, dua orang Komisaris dan satu orang Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan sistem remunerasi dan nominasi serta succession plan. Komposisi anggota komite yang telah berjalan di Bank dalam rangka mendukung prinsip independensi dalam melaksanakan tugas.

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Mari Elka Pangestu	Ketua (Komisaris Independen)	1 Februari 2019
2	Ninik Herlani Masli Ridwan	Anggota (Komisaris Independen)	1 Februari 2019
3	Chow Ying Hoong	Anggota (Komisaris)	1 Februari 2019
4	Pratomo Soedarsono	Anggota (Pejabat Eksekutif HC)	1 Februari 2019

Masa Jabatan

Periode jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan RUPS Tahunan 2020 (sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS Tahunan pada tanggal 1 Februari 2019) atau jangka waktu lain yang diputuskan oleh RUPS Luar Biasa Bank

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan anggota Board of Management di dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

- Komite Remunerasi Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 6 kali pertemuan.

Anggota Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	Frekuensi Pertemuan
Mari Elka Pangestu	6/6
Ninik Herlani Masli Ridwan	5/5
Chow Ying Hoong	6/6
Pratomo Soedarsono	5/5
Irwan M.Habsjah*	1
Maya Kartika*	1

*) Per 1 Februari 2019 Irwan M.Habsjah digantikan oleh Ninik Herlani dan Maya Kartika digantikan oleh Pratomo Soedarsono.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2019

No	Tanggal	Agenda
1	21 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Konversi program SOP karyawan Konversi <i>deferred shares</i> untuk posisi <i>Material Risk Taker</i>
2	8 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Nominasi anggota Dewan Komisaris Renumerasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Independen Penghargaan akhir masa jabatan untuk Direksi Benefit tenaga kerja asing (<i>expatriate</i>) khususnya posisi Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

No	Tanggal	Agenda
3	4 April 2019	Komposisi Direksi
4	1 Juli 2019	Rekomendasi penyesuaian gaji satu Direksi
5	20 Agustus 2019	Rekomendasi penyesuaian gaji satu Direksi
6	10 Oktober 2019	1. Remunerasi Variabel untuk Direksi 2. Penyesuaian Provisi Bonus untuk anggota Direksi Asing 3. Kompensasi Dewan Komisaris & Direksi

Komite Pemantau Risiko

Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/CCS/05/2019.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki *board charter* sebagai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan serta masa tugas.

Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan kerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 Februari 2019.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terkait pengelolaan risiko Bank.

- Membuat rencana kegiatan tahunan Komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan batasan yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.

- Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris, dan dua orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan bidang Keuangan.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Irwan M. Habsjah	Ketua (Komisaris Independen)	11 September 2019
2	Takeshi Kimoto	Anggota (Komisaris)	1 Februari 2019
3	Kanaka Puradiredja	Anggota (Pihak Independen)	1 Februari 2019
4	Sofyan Rambey	Anggota (Pihak Independen)	1 Februari 2019

Masa Jabatan

Periode jabatan Komite Pemantau Risiko adalah terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS Tahunan pada tanggal 15 Februari 2019) atau jangka waktu lain sebagaimana diputuskan dalam RUPS Luar Biasa Bank).

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen di dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat yang telah ditetapkan, yaitu:

- Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh anggota.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan 9 (sembilan) kali pertemuan serta kunjungan kerja ke kantor-kantor cabang di Bandung dan Makassar.

Nama Anggota Komite Pemantau Risiko	Jumlah Rapat	Kehadiran
Ninik Herlani Masli Ridhwan	5	5
Irwan M. Habsjah	4	4
Takeshi Kimoto	9	8
Kanaka Puradiredja	9	8
Sofyan Rambey	9	9

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2019 adalah:

- Melakukan evaluasi dan analisis profil risiko Bank (individual dan konsolidasi) secara triwulanan.
- Evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang terdapat dalam *standard deck risk* yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan likuiditas serta risiko lainnya.
- Pemantauan dan evaluasi terhadap tugas Komite Manajemen Risiko dan unit Manajemen Risiko terkait penetapan dan pemantauan risiko kredit untuk masing-masing unit bisnis, risiko pasar dan likuiditas dan risiko operasional.
- Melakukan monitor terhadap tingkat kesehatan bank *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan kepatuhan Bank secara berkala.
- Pemantauan kasus-kasus internal dan eksternal *fraud* dan strategi penanganan *fraud*.
- Menyusun rencana dan program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2019 serta melakukan kajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dasar Hukum

Dasar hukum Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. PBI nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/CCS/05/2019

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Bank BTPN telah memiliki *board charter* yang mengatur tentang Pedoman dan Tata tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman tersebut ditetapkan pada 1 Februari 2019 dan berisi: Dasar Hukum, Tujuan, Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab dan Prosedur.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Irwan Mahjudin Habsjah	Ketua (Komisaris Independen)	11 September 2019
2	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Anggota (Komisaris Independen)	1 Februari 2019
3	Dewie Pelitawati	Anggota (Komisaris Independen - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk)	1 Februari 2019
4	Muhammad Faiz	Anggota (Komisaris Independen - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk)	1 Februari 2019
5	Yosef Antonius Boliona Badilangoe	Anggota - Pihak Independen	1 Februari 2019

Masa Jabatan

Ketetapan tentang masa tugas atau masa jabatan adalah sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Apabila Ketua dan/atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Independen atau terdapat penggantian dari anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, maka masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC tersebut segera menunjuk penggantinya.

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen di dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat yang telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

- Komite mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam setiap semester.
- Undangan Rapat dengan surat tercatat atau surat elektronik selambatnya pada tujuh (7) hari sebelum tanggal Rapat. Undangan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat yang akan disampaikan pada peserta rapat Komite paling lambat dua Undangan disampaikan dua (2) hari sebelum Rapat.
- Anggota Komite dapat mengundang pihak selain anggota Komite yang berasal dari Konglomerasi Keuangan grup SMBC, yang terlibat atau bertanggung jawab atas topik dari agenda Rapat apabila diperlukan.
- Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri baik secara langsung maupun melalui kuasa kepada anggota Komite lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite termasuk Ketua Komite.
- Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi atau media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. Anggota Komite yang berpartisipasi dalam Rapat melalui media dan dengan cara tersebut di atas dianggap turut hadir dalam Rapat dan dihitung dalam perhitungan kuorum kehadiran maupun keputusan Rapat.
- Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Jumlah Rapat	Kehadiran
Irwan Mahjudin Habsjah	1	100%
Ninik Herlani Masli Ridhwan	2	100%
Dewie Pelitawati	2	100%
Muhammad Faiz	2	50%
Yosef Antonius Boliona Badilangoe	2	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

No	Tanggal	Agenda
1	23 Juli 2019	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 30 Juni 2019 1. Perubahan Entitas Utama 2. Pedoman Kerja dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi 3. Rencana Kerja Komite 2019 4. Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 30 Juni 2019 5. Laporan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 30 Juni 2019
2	14 November 2019	1. Review terhadap Pedoman Kerja dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi 2. Rencana Kerja Komite untuk tahun 2020 3. Update <i>Anti-Fraud Management</i> – BTPN 4. Update <i>Anti-Fraud Management</i> – BTPN Syariah

Komite Di Bawah Direksi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, BTPN membentuk komite-komite yang bertanggung jawab kepada Direksi. Sesuai dengan ketentuan, Bank diwajibkan memiliki minimal 3 (tiga) komite yang membantu tugas Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Melihat kompleksitas usaha yang dijalankan BTPN, membutuhkan pengelolaan serta peningkatan kualitas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. Untuk itu, BTPN membentuk 8 (delapan) komite sebagai berikut:

1. Komite Aset dan Liabilitas
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Kebijakan Kredit
5. Komite Kredit
6. Komite Pengarah Tata Kelola Informasi
7. Komite Human Capital
8. Komite Manajemen Terintegrasi

Komite Aset Dan Liabilitas (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Treasury
Anggota dengan hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Chief of Retail Banking Officer 5. Chief Financial Officer 6. Deputy Head of Treasury (Secretary)

Pedoman Kerja

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) telah mempunyai pedoman kerja yang telah diperbaharui pada tanggal 31 Mei 2019. Pedoman kerja tersebut memuat antara lain:

1. Memantau dan mengelola dan liabilities
2. Memantau perkembangan pasar dan faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi keadaan pendanaan dan likuiditas bank.
3. Memantau eksposur risiko bank seperti risiko suku bunga dan nilai tukar
4. Memutuskan dan memberikan arahan dalam pengelolaan suku bunga baik suku bunga *funding* maupun *lending*
5. Dan hal-hal terkait lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Mengkaji ulang, mengawasi dan menyetujui strategi neraca secara keseluruhan, atas likuiditas, harga, dan manajemen permodalan.
2. Memberikan gambaran keadaan perekonomian domestik dan dunia, serta analisis implikasi dan kebijakan moneter dan fiskal yang telah dan atau akan diambil oleh pemerintah.

Pelaksanaan Tugas 2019

Pada tahun 2019, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) menyelenggarakan 12 kali pertemuan dengan agenda pembasahan sebagai berikut:

- Menyetujui batasan baru pada risiko pasar dan likuiditas
- Memberikan mandat untuk memutuskan dan menentukan tingkat pendanaan berdasarkan aturan dan pedoman yang diusulkan oleh Divisi Tresuri & Keuangan
- Menyetujui penerapan Persyaratan Pencadangan Tetap Minimum dan Persyaratan Pencadangan Rata-Rata Minimum
- Menyetujui prosedur *Contingency Funding Plan* (CFP) yang diusulkan oleh Tresuri
- Menyetujui rencana penerbitan obligasi
- Tingkat referensi yang disetujui
- Menyetujui Kerangka kerja untuk Pemantauan risiko tingkat bunga dan IRRBB
- Menyetujui variable dalam Indikator Peringatan Dini
- Menyetujui aplikasi penambahan likuiditas
- Menyetujui metode Penentuan Harga Transfer Dana (FTP)

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	% Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	11	83
Kazuhiya Miyagawa	Wakil Direktur Utama	11	58
Hironmichi Kubo	Direktur Treasury	11	92
Darmadi Sutanto	Chief of Retail Officer	11	33
Hanna Tantani	Chief of Financial Officer/Direktur Keuangan	11	92
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	11	92
Wiwig Santoso	Deputy Head of Treasury	11	83

Komite Manajemen Risiko

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Anggota Tetap dengan hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan 4. Direktur Corporate Banking Japanese 5. Direktur Wholesale Banking 6. Direktur Operasional 7. Direktur Treasury 8. Direktur Keuangan 10. <i>Chief Retail Banking Officer</i> 11. <i>Head of Information Technology</i> 12. <i>Head of Human Capital</i> 13. <i>Head of Retail Lending Business</i> 14. <i>Head of Business Banking</i> 15. <i>Head of Retail Funding Business</i> 16. <i>Head of Branchless Banking</i> 17. <i>Head of Digital Banking</i>
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	1. Head of Internal Audit 2. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

Pedoman Kerja

- Rapat komite dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam setahun sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).
- Rapat dipimpin oleh Ketua. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
- Bilamana dipandang perlu, komite dapat mengundang pihak lain selain Anggota Komite untuk hadir dalam rapat, termasuk namun tidak terbatas pada Perusahaan Anak.

- Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).
- Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Members*) tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara.
- Keputusan rapat komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
- Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam kebijakan perusahaan (*Corporate Policy*).

9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Laporan/materi Komite Manajemen Risiko disiapkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit terkait diwajibkan menyampaikan materi/data setiap bulan kepada pihak yang ditunjuk (PIC) Satuan Kerja Manajemen Risiko selambat-lambatnya 8 hari kerja setelah akhir bulan.
11. Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat meminta informasi/data tambahan dari unit lain di Bank untuk dicantumkan kedalam laporan/materi Komite Manajemen Risiko.
12. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
13. Keputusan rapat berupa Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. Risalah Rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota komite.
14. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan telah disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun kebijakan dan kerangka manajemen risiko serta limit risiko berikut pengkinian, perbaikan, dan/atau penyempurnaan.
2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas, yang menyimpang dari prosedur normal.

Pelaksanaan Tugas 2019

Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko mengadakan 11 kali rapat. Rapat Komite Manajemen Risiko merupakan sarana anggota komite untuk memantau 8 (delapan) jenis risiko sebagaimana diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan Peraturan Bank Indonesia/OJK.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Komite Manajemen Risiko membahas serta mengkaji berbagai agenda penting, antara lain:

- Peningkatan aktivitas *cross selling*.
- Meninjau kerangka kerja pengumpulan dan kegiatan yang dapat disesuaikan dengan bisnis model BTPN.
- Memperbaharui penerapan PSAK 71.
- Memperbaharui penerapan Credit Risk Appetite Framework (CRAF).

- Memperbaharui penerapan Significant Incident Notification Protocol (SINP), Key Control Self Assessment (KCSA), dan penilaian Quality Assurance (QA).
- Menyetujui 3 (tiga) inisiatif baru dari Manajemen Risiko Operasional, yaitu *operational risk acceptance*, *operasioan risk appetite*, serta standarisasi peran dan tanggung jawab pengendalian internal dan risiko.
- Memperbaharui Komite Fraud, investigasi, ambang batas dan sistem pelaporan pelanggaran.
- Melakukan pembaharuan mengenai risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi, dan risiko hukum

Selain itu, dalam konteks pemantauan risiko dengan anak perusahaan, setiap triwulan disampaikan konsolidasi 8 risiko bank dengan anak perusahaan, serta pelaporan konsolidasi profil risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	11	10	91
Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	11	10	91
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	11	6	55
Merisa Darwis	Direktur Operational	11	11	100
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	11	10	91
Hikomichi Kubo	Direktur Treasury	11	10	91
Dani Prabawa	Direktur Wholesale Banking	11	9	82
Yashuhiro Daikoku	Direktur Japanese Corporate Banking	11	7	64
Hanna Tantani ¹⁾	Direktur Keuangan	11	8	73
Darmadi Sutanto ²⁾	Chief of Retail Banking Officer	11	11	100
Vincentius Hidayat	Head of Retail Lending Business	11	9	82
Steffano Ridwan	Head of Business Banking	11	8	73
Helena	Head of Retail Funding Business	11	9	82
Hadi Wibowo	Head of Branchless Banking	11	10	91
Irwan Sutjipto Tisnabudi ³⁾	Head of Digital Banking	11	7	64
YB Hariantono ³⁾	Head of Information Technology	11	8	73
Pratomo Soedarsono ⁴⁾	Head of Human Capital	11	7	64
Maya Kartika ⁵⁾	Head of Human Capital	11	3	27
Jerry Ng ⁶⁾	Direktur Utama	11	0	-
Anika Faisal ⁶⁾	Direktur Kepatuhan	11	1	9
Arief Haris Tandjung ⁶⁾	Direktur Keuangan	11	1	9
Peterjan Van Nieuwenhuizen ⁶⁾	Head of Digital Banking	11	1	9
Kharim Indra Gupta Siregar ⁶⁾	Head of Information Technology	11	3	27

Keterangan:

- 1) menjabat sebagai anggota komite sejak 15 september 2019
- 2) menjabat sebagai anggota komite sejak 1 Mei 2019
- 3) menjabat sebagai anggota komite sejak 1 April 2019
- 4) menjabat sebagai anggota komite sejak 1 Agustus 2019
- 5) tidak lagi menjabat sebagai anggota komite sejak 1 Agustus 2019
- 6) tidak lagi menjabat sebagai anggota komite sejak 1 Februari 2019

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi per 31 Desember adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur yang membawahi bidang TI
Anggota dengan hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Operasional 5. Direktur Corporate Banking Japanese 6. Direktur Wholesale Banking 7. Chief Financial Officer 8. Direktur Treasury 9. Direktur Keuangan 10. Chief Retail Banking Officer 11. Head of Business Banking 12. Head of Retail Lending Business 13. Head of Retail Funding Business 14. Head of Digital Business 15. Head of Branchless Banking
Anggota Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Internal Audit 2. Pejabat Eksekutif di IT

Pedoman Kerja

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memiliki pedoman kerja yang telah disahkan Direksi pada tanggal 1 Mei 2019 yang memuat antara lain:

1. Rapat Komite Pengarah TI dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilaman dibutuhkan, rapat Komite Pengarah TI dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota tetap (*permanent voting members*)
2. Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
3. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota tetap dengan hak suara (*permanent voting members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat.
4. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah ketua komite dan/atau Direktur Utama.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk ketua komite dan/atau Direktur Utama.
6. Dalam hal terdapat bentuan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan (*Corporate Policy*)
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terdapat dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

8. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
9. Lebih dari 50% rapat komite dihadiri oleh lebih 70% anggota komite secara fisik.
10. Bilamana dipandang perlu, Komite Pengarah TI dapat mengundang pihak lain selain anggota, termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat.
11. Keputusan rapat berupa risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. Risalah rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota komite.
12. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler komite yang disetujui seluruh anggota tetap (*permanent voting members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua anggota tetap (*permanent voting members*).

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi setidaknya mencakup, sebagai berikut:

1. Rencana strategis Teknologi Informasi (TI) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.

4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
9. Melakukan evaluasi atas ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia terkait dengan pengoperasian, pemeliharaan dan dukungan atas penggunaan TI.
10. Memberikan masukan atas proses berkaitan dengan risiko TI.

Pelaksanaan Tugas 2019

Pada tahun 2019, Komite Pengarah Teknologi Informasi menyelenggarakan 4 kali pertemuan dengan agenda pembasahan sebagai berikut:

- Memberikan *update* atas IT Strategic Plan 2019
- Membahas IT Strategic Plan baru (2020-2022), berikut nilai investasi yang dibutuhkan. Selain itu, juga membahas rencana konsolidasi *Core Banking* sebagai bagian dari *IT Strategic Plan* berikut waktu pelaksanaannya.
- Membahas imbas dari insiden yang disebabkan oleh MFT dan *Micro Service Payment* yang menyebabkan gangguan *availability* Jenius dan system pembayaran.
- Menyetujui penggunaan metode SMBC *Important System Risk Assessment* dalam menentukan sistem di mana *High Priviledge User* (HPU) untuk operating system dan database, serta menjadikan metode ini sebagai standar BTPN.
- Menyetujui penggunaan iOS *Screen Capture* terkait BYOD.
- Menyetujui rencana penggunaan aplikasi yang memiliki *operating system* dan *database* yang telah *obsolete* (*end of life*).
- Menyetujui rencana IT 2020 yang akan dilaporkan ke OJK

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	4	2	50
Kazuhiisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	4	3	75
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	4	4	100
Yasuhiro Daikoku	Direktur Japanese Corporate Banking	4	2	50
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	4	4	100
Hiromichi Kubo	Direktur Treasury	4	4	100
Merisa Darwis	Direktur Operasional	4	4	100
Dani Prabawa	Direktur Wholesale Banking	4	1	25
Vincentius Hidayat	Head of Retail Lending Business	4	3	75
Steffano Ridwan	Head of Business Banking	4	2	50
Helena	Head of Retail Funding Business	4	2	50
Hadi wibowo	Head of Branchless Banking	4	4	100
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	4	4	100
Ariadi Nugroho	Pejabat Eksekutif IT	4	4	100
Setiasmo	Pejabat Eksekutif IT	4	4	100
Wiwit Rifayanto	Pejabat Eksekutif IT	4	2	50
Ferdinandus Huber	Pejabat Eksekutif IT	4	4	100

Komite Kebijakan Kredit

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kebijakan Kredit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Anggota dengan hak Suara	Direktur Utama (Ketua) Wakil Direktur Utama (Wakil Ketua) Direktur Operasional Direktur Manajemen Risiko Direktur Kepatuhan
Anggota dengan hak Suara	Kepala Divisi Kredit Kepala Divisi Loan Kepala Divisi Manajemen Risiko Kepala Divisi Administrasi Kredit Segmen Korporasi Kepala Risiko Bisnis Kepala Divisi Audit Internal (Pengamat) Kepala Divisi Legal dan Litigasi Kepala Divisi Kepatuhan

Pedoman Kerja

Komite Kebijakan Kredit telah memiliki pedoman kerja (*charter*) yang telah disahkan Direksi pada tanggal 1 Februari 2019, yang berisi antara lain:

1. Rapat

- Rapat Komite Kebijakan Perkreditan diadakan paling sedikit setiap 12 (dua belas) bulan.
- Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota tetap dengan hak suara dan ditunjuk dalam rapat

2. Kuorum

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% anggota tetap dengan hak suara termasuk ketua komite

Apabila anggota komite berhalangan hadir, maka kehadiran yang bersangkutan dapat digantikan oleh perwakilannya.

3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju lebih dari 50% jumlah anggota tetap dengan hak suara yang hadir dalam rapat, termasuk suara setuju ketua komite.

4. Pengambilan Keputusan Tanpa Mengadakan Rapat Formal

Komite Kebijakan Perkreditan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat komite secara formal (Keputusan Sirkuler Komite), dengan ketentuan semua anggota tetap dengan hak suara menyetujui keputusan tersebut secara tertulis.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Mengadakan rapat untuk menentukan arah kredit bank dan memantau implementasi dari kebijakan kredit
- Memberikan masukan kepada Direksi Bank dalam penyusunan kebijakan Perkreditan Bank serta melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank
- Mengawasi penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
- Melakukan evaluasi dan analisa kualitas portofolio perkreditan terkait kebijakan perkreditan
- Memberikan laporan berkala yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Rangkuman dari hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
 - Hasil pemantauan/tinjauan dan evaluasi mengenai kualitas dan kondisi portofolio kredit.
 - Saran-saran untuk perbaikan kebijakan

Pelaksanaan Tugas 2019

Pada tahun 2019, Komite Kebijakan Kredit mengadakan 1 (satu) kali pertemuan pada tanggal 20 November 2019, yang merupakan pertemuan pertama untuk Komite Kebijakan Kredit, dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Penyampaian dan pembahasan Kebijakan Perkreditan terkini Bank BTPN termasuk dengan kerangka kerja kebijakannya.
2. Penyampaian dan pembahasan hirarki ketentuan kredit
3. Penyampaian dan pembahasan prosedur terkait kredit yang berlaku secara *bankwide*.
4. Penyampaian dan pembahasan *Product Program* terkait kredit

5. Penyampaian dan pembahasan mengenai *Credit Authority Framework*
6. Penyampaian dan pembahasan *highlight items*
7. Pengajuan perubahan anggota Komite Kebijakan Kredit, sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi .

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	1	1	100%
Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	1	1	100%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	1	1	100%
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	1	1	100%
Yasuhiro Daikoku	Direktur Japanese Corporate Banking	1	1	100%
Darmadi Sutanto	Chief of Retail Banking Officer	1	1	100%
Vincentius Hidayat	Head of Retail Lending Business	1	1	100%
Hadi Wibowo	Head of Branchless Banking	1	1	100%
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	1	1	100%
Adil Pamungkas	Kepala Kredit Ritel	1	1	100%
Vanny Maryani	Kepala Risiko Bisnis Branchless Banking	1	1	100%
Takane Shiomi	Kepala Divisi Risiko Kredit	1	1	100%
Butet Sondang Sitepu	Kepala Divisi Kepatuhan	1	1	100%
Argo Wibowo	Kepala Divisi Legal dan Litigasi	1	1	100%
Sendiaty Sondy	Kepala Manajemen dan Kebijakan Portofolio	1	1	100%

Komite Kredit

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kredit per 31 Desember adalah sebagai berikut:

Anggota	Direktur Utama
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Bisnis/kepala Bisnis 3. <i>Credit Department Head</i> 4. <i>Loan Department Head</i> 6. <i>Credit Risk Head</i> 7. Kepala Grup atau Departemen Bisnis 8. Direktur Manajemen Risiko (Pengamat)

Pedoman Kerja

Komite Kredit telah memiliki pedoman kerja (*charter*) yang telah disahkan Direksi pada tanggal 1 Februari 2019, yang berisi antara lain:

1. Rapat

Komite Kredit menyelenggarakan Rapat pada saat kapanpun sesuai dengan kebutuhan Komite.

Rapat Komite Kredit diselenggarakan untuk menghasilkan suatu rekomendasi atau opini kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama yang akan memberikan keputusan akhir untuk menyetujui kredit, termasuk kondisi dan instruksi yang berkaitan dengan Persetujuan Kredit.

Pada rekomendasi atau opini Komite Kredit, Direktur bisnis/ Kepala Bisnis terkait akan turut menandatangani lembar rekomendasi/opini bersama-sama dengan anggota komite lainnya.

Anggota Kredit Komite yang wajib hadir dalam rapat komite akan ditentukan berdasarkan agenda rapat dengan detail sebagai berikut:

Agenda	Peserta yang Wajib Hadir
1. Kredit terkait segmen <i>Wholesale, Corporate</i> dan <i>Enterprise Banking</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama • Direktur <i>Wholesale, Corporate</i> dan <i>Enterprise Banking</i> terkait • Kepala Risiko Kredit • Kepala Departemen Loan • Kepala Grup atau Departemen <i>Wholesale, Corporate</i> dan <i>Enterprise Banking</i> terkait • Direktur Manajemen Risiko (Pengamat) <p>Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir maka Wakil Direktur Utama bertindak selaku Ketua Komite</p>
2. Kredit terkait segmen <i>Business Banking</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur/Kepala <i>Business Banking</i> • Kepala Risiko Credit Business Banking • Kepala Risiko Kredit • Direktur Manajemen Risiko (Pengamat) <p>Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir dalam rapat, maka salah satu anggota Komite dapat ditunjuk sebagai ketua rapat.</p>

2. Kuorum Rapat

Rapat Komite Kredit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari peserta rapat yang wajib hadir dan dengan minimum 1 perwakilan dari *Credit Department* atau *Loan Department*. Kehadiran pengamat tidak akan dihitung dalam kuorum rapat.

Anggota komite yang bukan merupakan peserta rapat yang wajib hadir, dapat hadir akan tetapi kehadirannya tidak dihitung sebagai kuorum rapat dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.

3. Pengambilan Keputusan Rapat Komite

Pengambilan Keputusan pada Rapat Komite Kredit dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah total anggota yang hadir dalam rapat sudah termasuk suara Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama.

Suara Direktur Manajemen Risiko sebagai pengamat tidak akan dihitung dalam pengambilan keputusan Rapat Komite, namun setiap keputusan Rapat Komite harus diketahui oleh Direktur Manajemen Risiko.

Dalam hal pengambilan keputusan dalam Rapat Komite menghasilkan perhitungan jumlah suara setuju yang sama dengan jumlah suara tidak setuju, maka Ketua Komite dapat menentukan keputusan akhir yang akan diambil oleh Komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan kredit, Komite Kredit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Menganalisa secara independen dan menyetujui pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan (keputusan yang diambil harus bersifat objektif, dilakukan dengan analisa yang hati-hati dan terhindar dari kepentingan pribadi.
- Memastikan bahwa bisnis yang dilakukan sesuai dengan kebijakan, standar dan praktik manajemen risiko bank.

Pelaksanaan Tugas 2019

Pada tahun 2019, Komite Kredit mengadakan rapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali pertemuan untuk segmen *Wholesale, Corporate* dan *Enterprise Banking* dan 2 (dua) kali pertemuan untuk segmen *Business Banking*.

Rapat diselenggarakan untuk memutuskan permohonan kredit dari masing masing segment baik untuk pengajuan baru, tambahan atau perpanjangan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Komite Kredit Wholesale, Corporate dan Enterprise Banking

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanajati Dana/ Kazuhiya Miyagawa	Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama	35	35	100%
Dani Prabawa/Yasuhiro Daikoku	Direktur Wholesale/Direktur Japanese Corporate Banking	35	33	94%
Jenny Susanto*	Kepala Departemen Kredit	15	15	100%
Takane Shiomi**	Kepala Risiko Kredit Bisnis	20	17	85%
Husan Mahjudin	Kepala Loan Department	35	32	91%
Kepala Department terkait	Direktur Manajemen Risiko	35	34	97%
Henoch Munandar (pengamat)	Direktur Manajemen Risiko	35	22	63%

Komite Kredit Commercial dan Business Banking

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2	2	100%
Steffano Ridwan	Business Banking Head	2	2	100%
Sidik Waskito	Business Banking Credit Head	2	1	50%
Jenny Susanto*/Takane Shiomi**	Kepala Departemen Kredit/Kepala Risiko Kredit Bisnis	2	2	100%
Henoch Munandar (pengamat)	Direktur Manajemen Risiko/Chief of Banking Officer	2	1	50%

Keterangan:

*) Tidak lagi menjabat sebagai anggota komite sejak Juli 2019 dan digantikan oleh Kepala Risiko Kredit (Takane Shiomi)

**) Menjabat sebagai anggota komite sejak 4 Juli 2019

Komite Pengarah Tata Kelola Informasi

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Kepala di bidang TI
Anggota	Permanent Voting Members <ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan Direktur Keuangan Direktur Manajemen Risiko Direktur Operasional
	Permanent Non-Voting Members <ul style="list-style-type: none"> Kepala Audit Intern Manajemen Data IT Head (sebagai sekretaris)
	Standing Invitee <ul style="list-style-type: none"> Direktur Japanese Corporate Banking Direktur Treasury Chief Retail Banking Officer Head of Retail Lending Business Head of Retail Funding Business Head of Digital Banking Head of Branchless Banking Analytics & Decision Science Head

Pedoman Kerja

Komite Pengarah Tata Kelola Teknologi Informasi telah memiliki pedoman kerja yang telah disahkan Direksi pada tanggal 1 Mei 2019 yang memuat antara lain:

- Rapat Komite Pengarah Tata Kelola Informasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Apabila dibutuhkan, rapat Rapat Komite Pengarah Tata Kelola Informasi dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota tetap (*permanent voting members*)

2. Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
3. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota tetap dengan hak suara (*permanent voting members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat.
4. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah ketua komite dan/atau Direktur Kepatuhan.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk ketua komite dan/atau Direktur Kepatuhan.
6. Dalam hal terdapat bentuan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan (*Corporate Policy*)
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terdapat dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
9. Bilamana dipandang perlu, komite dapat mengundang pihak lain selain anggota, termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat.
10. Keputusan rapat berupa risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. Risalah rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota komite.
11. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler komite yang disetujui seluruh anggota tetap (*permanent voting members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua anggota tetap (*permanent voting members*).

Tugas dan Tanggung Jawab

Pedoman yang dimiliki oleh Komite dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Menegakkan kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi strategis
2. Memantau kondisi tata kelola data dan informasi Bank serta upaya untuk memperbaikinya
3. Memberikan panduan untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait data dan informasi

Pelaksanaan Tugas 2019

Secara garis besar, Komite telah melaksanakan 4 kali pertemuan dengan pembahasan antara lain:

1. Memonitor progress Pengkinian Data Nasabah
2. Memonitor progres pelaksanaan integrasi dan *data cleansing* BFEQ, WOW dengan *Bank-Wide Reference Data (Bank-Wide Reference Data Management)*
Catatan: Bank-Wide Reference Data yang digunakan berdasarkan ketentuan IGSC 2018
3. Memonitor progres data *cleansing* terkait pembentukan *Customer Reference Data [CRN]* yang dihasilkan dari sistem *Master Data Management*
Catatan:
 - Implementasi Master Data Management Advance Edition dilaporkan dalam kinerja IGSC 2018
 - *Customer Reference Number (CRN)* sebagai Single/Global CIF bank-wide
4. Menetapkan *MEMO Service Level Agreement (SLA)* dalam penanganan data *CRN Suspects/Rejects*
5. Memonitor progres pelaksanaan inisiatif bank dalam melakukan perubahan informasi CRN dalam pelaporan SLIK

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
YB Hariantono	4	4	100%
Dini Herdini	4	3	75%
Hanna Tantani	4	3	75%
Henoch Munandar	4	3	75%
Merisa Darwis	4	4	100%
Hendra Rahardja*	2	2	100%
Yasuhiro Daikoku	4	2	50%
Dani Prabawa	4	1	25%
Hiromichi Kubo	4	2	50%
Darmadi Sutanto	4	4	100%
Vincentius Hdayat	4	4	100%
Steffano Ridwan	4	3	75%
Helena	4	1	25%
Irwan Tisnabudi	4	2	50%
Hadi Wibowo	4	4	100%
Erlina Tandoko	4	2	50%

* baru menjabat sebagai anggota komite sejak Oktober 2019

Komite Human Capital**Struktur dan Keanggotaan**

Keanggotaan Komite bersifat ex officio (berdasarkan jabatan) dan terdiri dari:

Ketua	Direktur Utama
Anggota tetap (Permanent Voting Members):	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Operasional 4. Head of Human Capital (Sekretaris)

Pedoman Kerja

Pedoman kerja yang menjadi acuan Komite dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah:

- Keputusan rapat Komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk Direktur Utama.
- Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan perusahaan (*Corporate Policy*).

- Dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang *Human Capital* dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk ditetapkan sebagai kebijakan yang dimaksud khususnya adalah kebijakan yang sifatnya strategis.
- Mengevaluasi pelaksanaan program remunerasi *Human Capital* dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk disetujui.
- Menyetujui penyimpangan dari peraturan/kebijakan perusahaan yang berlaku di bidang *Human Capital* yang melebihi kewenangan kepala divisi dan/atau Direktur yang membidangi *Human Capital*.
- Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penunjukan dan penempatan (nominasi) anggota Direksi/Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak (termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Anak yang menjalankan bisnis Syariah).

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Pelaksanaan Tugas 2019

No	Tanggal	Agenda
1	28 Feb 2019	Penambahan anggota BOM
2	18 Apr 2019	Organization Structure Man Power Planning
3	2 May 2019	Usulan Dewan Komisaris BTPN Syariah
4	12 Juli 2019	Penambahan anggota BOM
5	29 Oktober 2019	Pengkajian Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan Proyek EVP Job Grading People Risk
6	13 Nov 2019	Usulan perubahan benefit karyawan <i>Expatriate</i>
7	2 Desember 2019	Usulan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan pengawas BTPN Syariah

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana Direktur Utama	7	7	100
Kasuhiza Miyagawa Wakil Direktur Utama	7	7	100
Merisa Darwis Direktur Operasional	7	7	100
Maya Kartika* Head of Human Capital	3	3	100
Pratomo Soedarsono Head of Human Capital	4	4	100
Hanna Tantani **	3	3	100

*digantikan oleh Pratomo Soedarsono
** menjabat sejak September 2019

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Struktur dan Keanggotaan

Struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap

1. Direktur Manajemen Risiko Terintegrasi dari Bank BTPN sebagai Entitas Utama yang juga merangkap sebagai Ketua.
2. Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko atau pihak yang mewakili dan ditunjuk oleh BTPN Syariah.
3. Kepala Manajemen Risiko dari BTPN yang membawahi fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT")

Anggota Tidak Tetap

Direktur dan Pejabat Eksekutif dari BTPN dan setiap Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") anggota Konglomerasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi.

Pedoman Kerja

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

1. Rapat

- Komite akan menyelenggarakan rapat minimal satu kali setiap semester, atau lebih cepat jika diperlukan.
- Komite dapat mengundang Anggota Tidak Tetap dari Komite untuk menghadiri rapat jika diperlukan
- Rapat Komite akan membahas Laporan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dari Konglomerasi. Selain itu, SKMRT juga akan mengumpulkan agenda rapat tambahan dari anggota Konglomerasi 1 (satu) bulan sebelum rapat Komite Manajemen Risiko dilangsungkan. Agenda ini akan dikirimkan bersamaan dengan undangan rapat komite.
- Hasil rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat termasuk perbedaan pendapat yang terjadi, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Tetap dan didokumentasikan dengan baik. Risalah rapat akan disirkulasikan kepada seluruh Anggota Tetap untuk diketahui.

- Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler yang disetujui oleh seluruh anggota Komite. Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan telah disampaikan kepada semua anggota komite.
- 2. Kuorum**
Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Tetap ditambah Chairman.
- 3. Pengambilan Keputusan**
- Pengambilan keputusan pada rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
 - Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan suara terbanyak yang dihitung berdasarkan suara dari Anggota Tetap yang menghadiri rapat.
- 4. Kaji Ulang**
Kaji ulang atas pedoman kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau lebih cepat apabila diperlukan

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama mengenai hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko khususnya dalam:

1. Penyusunan dan kaji ulang atas kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Kaji ulang harus dilakukan secara berkala maupun setiap saat apabila dibutuhkan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat berpengaruh buruk terhadap kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi.
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi yang menjadi perhatian Anggota Komite.

Pelaksanaan Tugas 2019

Pada tahun 2019, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan 2 (dua) kali pertemuan membahas hal-hal terkait dibawah ini:

1. Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan KPMM Terintegrasi posisi Juni 2019 pada tanggal 8 Juli 2019 dan posisi Desember 2019 pada tanggal 6 Februari 2020, sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada setiap setengah tahunan.
2. Penyampaian laporan Keuangan dari Konglomerasi Keuangan posisi Juni 2019 dan Desember 2019
3. Penyampaian kegiatan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Group SMBC (BTPN) pada setiap setengah tahunan.
4. Menyusun Peraturan dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Membuat jadwal dan Rencana Kerja Tahunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tahun 2019

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Henoch Munandar	2	2	100%
Arief Ismail	2	2	100%
Sendiaty SONDY	2	2	100%

Penilaian Dan Remunerasi Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain kepada anggota Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris, Bank mempertimbangkan kinerja secara umum, evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan, dan kemampuan Perusahaan. Kinerja perusahaan yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi digambarkan pada harga saham perusahaan di bursa.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Adapun alur proses remunerasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Jumlah Per 31 Desember 2019	Rp Juta
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura.*	5	11.210
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya, yang:		
Dapat dimiliki	5	670
Tidak dapat dimiliki	5	9
Total	5	11.889

* Termasuk remunerasi anggota Dewan Komisaris yang bekerja sampai dengan 31 Januari 2019

Nama	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 Miliar	2
Di atas Rp1 Miliar – Rp2 Miliar	2
Di atas Rp500 Juta – Rp 1 Miliar	0
Di bawah Rp500 juta	0

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi Bersifat Tetap dan Variabel selama 1 (satu) tahun dan Total Nominalnya

Kategori Tetap

Keterangan	2019 (Rp Juta)	2018 (Rp Juta)
Direksi	37.715	44.119
Dewan Komisaris	7.450	10.414
Karyawan	1.331.273	1.238.915

Kategori Variabel

Keterangan	2019 (Rp Juta)		2018 (Rp Juta)	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	7	73.550	7	65.200
Dewan Komisaris	3	3.760	3	4.350
Karyawan Bonus	-	154.050	-	159.044
Karyawan Insentif	-	27.378	-	29.283

Shares Option Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif

Keterangan	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
Direksi	6.300.000	19.800.000
Komisaris	-	-
Pejabat Eksekutif	20.140.000	53.175.000

^{*)} Direksi Komisaris dan Pejabat Eksekutif BTPN Konvensional

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio
Karyawan Tertinggi - Karyawan Terendah	238,97
Diretur Tertinggi - Direktur Terendah	3,97
Komisaris Tertinggi - Komisaris Terendah	3,65
Direktur Tertinggi - Karyawan Tertinggi	1,04

Total Remunerasi Bersifat Variabel Ditangguhkan

	2019		2018	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Bonus yang ditangguhkan (Gross)	7	16.350.000.000	7	16.300.000.000
MESOP 2015-2020	204	76,360,000	216	105.350.000
ESOP 2016-2021	3	198,000	259	48.990.000

^{*)} Bonus kinerja tahun sebelumnya

^{**)} Direksi dan Pejabat Eksekutif BTPN Konvensional

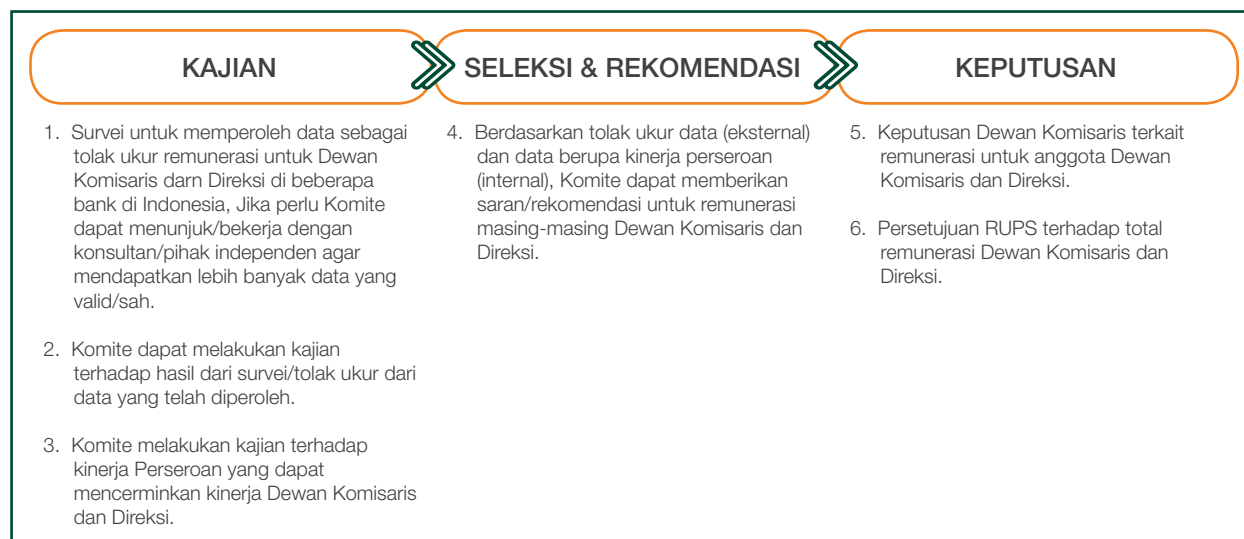
Penilaian Dan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain kepada anggota Direksi mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Direksi, Bank mempertimbangkan kinerja secara umum, evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan, dan kemampuan Perusahaan. Kinerja perusahaan yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi digambarkan pada harga saham perusahaan di bursa.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Adapun alur proses remunerasi anggota Direksi adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

1. Bank menganut prinsip *meritocracy* dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan pegawai, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Kaji ulang remunerasi individu dilakukan setiap tahun dan penyesuaian remunerasi berdasarkan kinerja individu
2. Dalam Manajemen Kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan pegawai memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/direktoratnya, diturunkan dari target bank, dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu pegawai pada lapisan paling bawah
3. Dalam penilaian Kinerja unit maupun individu, berdasarkan realisasi dari target unit kerja

maupun individu. Kinerja unit dalam kategori - Melampaui Target, Mencapai target atau Tidak Mencapai Target. Kinerja unit juga mempengaruhi kinerja pimpinan unit kerja tersebut.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target individu, dan dinilai dalam kategori – Istimewa (*outstanding*); Sangat baik (*very good*); Baik (*Good*); Perlu perbaikan (*Need Improvement*); Kurang (*Poor*). Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu; dimana manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun *variable* sesuai dengan kinerja individunya

Pemberian *variable income* yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 80% dari *Variable Income* diberikan dalam bentuk *cash*.

- b. 20% dari *Variable Income* ditangguhkan (*Deferred Variable Income*) dengan distribusi sebagai berikut:

- 10% diberikan dalam bentuk *cash/tunai* dan dibayarkan pada tahun pertama setelah 80% *Variable Income* diberikan.
- 5% diberikan dalam bentuk saham dan diberikan pada tahun kedua setelah 80% *Variable Income* diberikan.
- 5% diberikan dalam bentuk saham dan diberikan pada tahun ketiga setelah 80% *Variable Income* diberikan.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Jabatan yang termasuk dalam kategori *material risk takers* adalah Direksi sejumlah 7 orang. Jumlah tersebut adalah jumlah *Material Risk Taker* (MRT) selama tahun 2019.

Struktur Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 Tahun	
	Direksi	
	Jumlah Per 31 Desember 2019	Rp Juta
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura.*	9	168.517
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya, yang:		
Dapat dimiliki	9	3.610
Tidak dapat dimiliki	9	42
Total	9	172.169

* Termasuk remunerasi anggota Direksi yang bekerja sampai dengan 28 Maret 2018, 5 Oktober 2018, 31 Januari 2019

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Miliar	13
Di atas Rp1 Miliar – Rp2 Miliar	1
Di atas Rp500 Juta – Rp 1 Miliar	1
Di bawah Rp500 juta	0

Remunerasi Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari Insentif, Bonus Kinerja dan MESOP/ESOP. Insentif diberikan berdasarkan kinerja individu dan diberikan kepada pegawai yang dengan jabatan penjual (*sales*), *service* dan *Collection*. Insentif diberikan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja terkait dan kinerja individu, dan dibayarkan pada tahun berikutnya. Bonus kinerja merupakan diskresi manajemen, dan diberikan sesuai dengan kinerja dan kondisi keuangan bank. Bonus kinerja diberikan tahunan, dan kepada pegawai yang tidak menerima insentif, Direksi dan Komisaris.

MESOP/ESOP (*Management and Employee Stock Option Program/Employee Stock Option Program*) yaitu memberikan hak Opsi untuk membeli sejumlah saham bank dengan harga tertentu kepada Direksi dan karyawan pada tingkat tertentu. Besaran MESOP/ESOP diberikan kepada Direksi dan karyawan tingkat tertentu berdasarkan kinerja individu, dengan tujuan sebagai imbalan atas kinerjanya dan untuk meningkatkan kinerja/kontribusi individu terhadap kinerja bank di masa mendatang, yang dapat meningkatkan nilai saham bank dan merupakan program retensi.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Dini Herdini, yang pada tahun buku 2019 memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur Kepatuhan. Dengan demikian, profil lengkap telah disajikan di bagian "Profil Direksi".

Masa Jabatan

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak 1 Februari 2019. (Sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi).

Dasar Acuan

Posisi Sekretaris Perusahaan di Bank BTPN mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu Dini Herdini yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan terhitung mulai 1 Februari 2019, yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. PS/BOD/006/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
- Bertanggung jawab untuk memberikan informasi penting yang perlu diketahui publik mengenai kondisi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
- Melakukan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- Bertanggung Jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- Membuat Risalah Rapat Direksi serta menyimpan Risalah Rapat tersebut.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas atau aktivitas sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 15 Februari 2019, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 September 2019.
- Menyampaikan keterbukaan informasi dan atau laporan-laporan yang diwajibkan oleh otoritas yang berwenang.
- Menyampaikan siaran pers sebanyak 17 kali.
- Menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan bersamaan dengan acara Investor Summit 2019 PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2019.
- Menyelenggarakan *Investor Gathering* sehubungan dengan telah diterbitkannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 pada tanggal 21 Oktober 2019.
- Melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan rapat dengan rincian yaitu rapat Direksi sebanyak 37 kali, rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 kali, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 7 kali.
- Melaksanakan program orientasi atau pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru.
- Berpartisipasi dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi Emiten Indonesia.
- Melakukan pengkinian informasi yang ada di situs Bank BTPN.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi. Rinciannya disampaikan pada bab "Profil Perusahaan" di halaman 95.

Siaran Pers

Bulan	Tanggal	Keterangan
Januari	17	Jenius Hadirkan Solusi Life Finance di Malang
Januari	24	Aset Tembus Rp 100 Triliun, Laba Melonjak 61%
Februari	1	PT Bank BTPN Tbk Resmi Beroperasi
Februari	15	RUPST Bank BTPN Sepakat Tidak Membagikan Dividen
Februari	20	Jenius, Solusi Life Finance Hadir di Medan
Februari	22	Jenius Gelar Co.Creation Week 2019, Ajang Kokreasi bersama Digital Savvy
Maret	20	Bank BTPN Hadirkan Layanan Jenius di Makassar
April	25	Segmen Korporasi Dorong Pertumbuhan Aset Bank BTPN
Mei	3	Jenius Resmi Hadir di Yogyakarta dan Semarang untuk Solusi Life Finance Simpel, Cerdas, dan Aman
Mei	9	Kolaborasi Jenius dan BAZNAS Hadirkan Layanan Zakat dan Donasi Digital
Agustus	26	Fokus Konsolidasi, Kinerja BTPN Tetap Tumbuh Positif
Agustus	27	Jenius Rayakan Ulang Tahun Ketiga bersama #temanjenius
September	11	RUPSLB Bank BTPN Setujui Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Oktober	18	Bank BTPN Rilis Obligasi untuk Ekspansi
Oktober	23	Pengembangan Kapasitas untuk Kesuksesan Usaha Nasabah UKM
Oktober	24	Kredit Tumbuh Berkualitas, Bank BTPN Cetak Kinerja Positif
November	21	Jenius Tech Hub Pertama Resmi Hadir di Bandung

Keterbukaan Informasi

Bulan	Surat Perseroan	Tanggal	Keterangan
Januari	S.001/DIRCLC/CCS/I/2019	2-Jan-19	Kupon Obligasi
Januari	S.015/DIRCLC/CCS/I/2019	17-Jan-19	Kupon Obligasi
Januari	S.035/DIR/CCS/I/2019	23-Jan-19	Penggabungan Perseroan
Januari	S.024/DIRCLC/CCS/I/2019	23-Jan-19	Penggabungan Perseroan
Januari	S.045/DIRCLC/CCS/I/2019	31-Jan-19	Kepemilikan Saham
Februari	S.083/DIR/CCS/II/2019	4-Feb-19	Laporan Kepemilikan Saham
Februari	S.082/DIR/CCS/II/2019	4-Feb-19	Laporan Kepemilikan Saham
Februari	S.106/DIR/CCS/II/2019	6-Feb-19	Transaksi Afiliasi
Februari	S.105/DIR/CCS/II/2019	6-Feb-19	Transaksi Afiliasi
Februari	S.048/DIRCLC/CCS/II/2019	6-Feb-19	Perubahan Susunan Anggota BOD BOC
Februari	S.047/DIRCLC/CCS/II/2019	6-Feb-19	Perubahan Susunan Anggota BOD BOC
Februari	S.046/DIRCLC/CCS/II/2019	6-Feb-19	Perubahan Susunan Anggota BOD BOC
Februari	S.056/DIRCLC/CCS/II/2019	7-Feb-19	Kepemilikan Saham
Februari	S.055/DIRCLC/CCS/II/2019	7-Feb-19	Kepemilikan Saham
Februari	S.054/DIRCLC/CCS/II/2019	7-Feb-19	Kepemilikan Saham Tertentu
Februari	S.053/DIRCLC/CCS/II/2019	7-Feb-19	Kepemilikan Saham Tertentu
Februari	S.154/DIR/CCS/II/2019	21-Feb-19	Laporan Keuangan SMBC & SMFG
Februari	S.072/DIRCLC/CCS/II/2019	21-Feb-19	Laporan Keuangan SMBC & SMFG
Maret	S.088/DIRCLC/CCS/III/2019	11-Mar-19	Akta Perubahan Anggaran Dasar (Modal)
Maret	S.087/DIRCLC/CCS/III/2019	11-Mar-19	Akta Perubahan Anggaran Dasar (Modal)
Maret	S.101/DIRCLC/CCS/III/2019	14-Mar-19	Penyampaian Berita Acara RUPST 2019
Maret	S.100/DIRCLC/CCS/III/2019	14-Mar-19	Penyampaian Berita Acara RUPST 2019
April	S.121/DIRCLC/CCS/IV/2019	4-Apr-19	Disclosure - Pembayaran Kupon PUB III ke-11
April	S.120/DIRCLC/CCS/IV/2019	4-Apr-19	Disclosure - Pembayaran Kupon PUB III ke-11
April	S.135/DIRCLC/CCS/IV/2019	23-Apr-19	Pembayaran Kupon PUB III Tahap II tahun 2017 ke-6
April	S.134/DIRCLC/CCS/IV/2019	23-Apr-19	Pembayaran PUB III Tahap II tahun 2017 ke-6 ke-6
April	S.313/DIR/CCS/IV/2019	26-Apr-19	Siaran Pers Kinerja Kwartal 1 Tahun 2019
April	S.141/DIRCLC/CCS/IV/2019	26-Apr-19	Siaran Pers Kinerja Kwartal 1 Tahun 2019
April	S.140/DIRCLC/CCS/IV/2019	26-Apr-19	Siaran Pers Kinerja Kwartal 1 Tahun 2019
Mei	S.154/DIRCLC/CCS/V/2019	13-May-19	Siaran Pers Kolaborasi Jenius BAZNAS
Mei	S.155/DIRCLC/CCS/V/2019	14-May-19	Hasil Pemingkatan Tahunan
Juni	S.171/DIRCLC/CCS/VI/2019	14-Jun-19	Pembayaran Bunga MTN II
Juli	S.213/DIRCLC/CCS/VII/2019	31-Jul-19	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Kwartal II/2019 (Audited)
Agustus	S.232/DIRCLC/CCS/VIII/2019	16-Aug-19	Penunjukan KAP untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Kwartal II/2019 (Audited)
Agustus	S.242/DIRCLC/CCS/VIII/2019	23-Aug-19	Penyampaian Akta Perubahan Anggaran Dasar
Agustus	S.247/DIRCLC/CCS/VIII/2019	28-Aug-19	Siaran Pers Jenius Ulang Tahun ke-3
Agustus	S.248/DIRCLC/CCS/VIII/2019	29-Aug-19	Laporan Kepemilikan Saham
September	S.269/DIRCLC/CCS/IX/2019	13-Sep-19	yang Perlu Diketahui Publik
September	S.271/DIRCLC/CCS/IX/2019	16-Sep-19	Pembayaran Kupon MTN II
September	S.273/DIRCLC/CCS/IX/2019	20-Sep-19	Perubahan Susunan Direksi

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Bulan	Surat Perseroan	Tanggal	Keterangan
Oktober	S.313/DIRCLC/CCS/X/2019	17-Oct-19	Pembayaran Kupon PUB III Tahap II 2017 seri B
Oktober	S.011/CCS/X/2019	21-Oct-19	Siaran Pers PUB IV 2019
Oktober	S.016/CCS/X/2019	25-Oct-19	Siaran Pers Kinerja Kwartal III/2019
Oktober	S.015/CCS/X/2019	25-Oct-19	Siaran Pers Pengembangan Nasabah UKM
November	S.338/DIRCLC/CCS/XI/2019	25-Nov-19	Siaran Pers Jenius Tech Hub Pertama di Bandung
November	S.346/DIRCLC/CCS/XI/2019	28-Nov-19	Siaran Pers jenius & Kemenlu - Safe Travel Fest
Desember	S.786/DIR/CCS/XII/2019	4-Dec-19	Transaksi Green Financing dengan IFC
Desember	S.347/DIRCLC/CCS/XII/2019	4-Dec-19	Transaksi Green Financing dengan IFC

FUNGSI KEPATUHAN

Industri perbankan merupakan industri yang diwajibkan untuk menerapkan “kepatuhan” lebih ketat (*highly regulated*) dibandingkan dengan industri lainnya dikarenakan terkait dengan misi publik dan tanggung jawab terhadap dana masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting apalagi dengan adanya peningkatan kompleksitas kegiatan usaha bank sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang dapat menyebabkan potensi risiko kepatuhan bagi Bank.

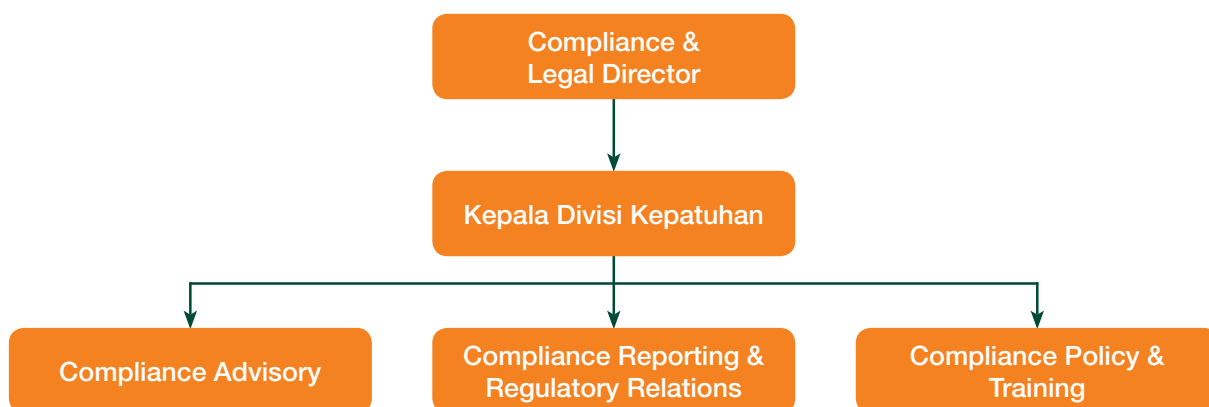
Sehubungan hal tersebut diperlukan upaya-upaya memitigasi risiko kegiatan usaha bank dengan melakukan upaya baik bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dengan cara mematuhi segala ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta perundang-undangan yang berlaku untuk memperkecil risiko kegiatan usaha Bank. Hal tersebut dapat terwujud dengan peningkatan peran dan tanggung jawab kepatuhan pada setiap jenjang organisasi serta efektivitas peran fungsi Satuan Kerja Kepatuhan yang ada pada bank sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat diantisipasi lebih dini.

Sebagaimana tertuang pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*), pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun peraturan perundangan yang berlaku merupakan salah satu komitmen PT Bank BTPN Tbk (“Bank”), termasuk pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT).

Pemenuhan kepatuhan Bank dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang bersifat pencegahan guna memastikan bahwa pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Bank telah sejalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Tata kelola ini, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Struktur Organisasi

Agar penerapan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan efektif, Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang selanjutnya disebut “Divisi Compliance” yang independen sebagaimana peraturan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Compliance dirumuskan sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh regulator. Di antaranya adalah:

Fungsi Kepatuhan

Fungsi yang dijalankan di Bank telah mengacu arahan yang diberikan oleh regulator, yang antara lain meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

5. Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang, baik melalui media elektronik, diskusi, telepon atau pertemuan, termasuk fungsi konsultatif terhadap semua proses dan perkembangan merger.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai bagian dari fungsi pengendalian internal Bank, Divisi Kepatuhan sebagai lini kedua sistem pengendalian internal bertanggung jawab melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) dimana guna memastikan hal tersebut Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan secara memadai dengan menetapkan Kerangka Kerja Kepatuhan yang menjadi acuan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Compliance adalah sebagai berikut:

1. Mengambil langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi melalui antara lain pembuatan sistem, program, kerangka kerja, piagam kepatuhan atau kebijakan dan prosedur kepatuhan.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum. Dalam rangka melakukan proses Manajemen Risiko Kepatuhan, Divisi Compliance berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan internal yang dimiliki oleh Bank serta peraturan yang berlaku, meliputi rancangan kebijakan/ ketentuan internal baru maupun kaji ulang tahunan.

4. Melakukan penelaahan/tinjauan dan/atau merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan internal yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan peraturan OJK dan BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan internal, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
 - Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK, BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang;
 - Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai peraturan yang berlaku
 - Bertindak sebagai nara hubung atau orang yang dapat dimintakan keterangan untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator, yaitu Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris di Bank BTPN ikut melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan. Sesuai POJK Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan paling sedikit 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga melibatkan komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi.

Fungsi pengawasan oleh Direksi, dilakukan melalui rapat mingguan. Pada kesempatan tersebut, secara khusus Direktur Kepatuhan menyampaikan kondisi terkini berkenaan dengan penerapan tata kelola perusahaan di lingkungan Bank. Selain itu, beragam isu yang menjadi *concern* kepatuhan juga disampaikan untuk dibahas bersama-sama.

Mekanisme rapat tersebut merupakan ruang untuk pengawasan, sekaligus sharing terkait dengan penerapan prinsip kepatuhan di lingkungan Bank. Dengan demikian, melalui rapat Direksi, seluruh organisasi di lingkungan Bank tersampaikan perkembangan penerapan kepatuhan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Model yang sama diterapkan pada sistem pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan kepatuhan di lingkungan Bank. Rapat dengan Dewan Komisaris diselenggarakan minimal setiap satu bulan sekali. Seperti halnya pada rapat Direksi, di rapat dengan Dewan Komisaris juga

disampaikan perkembangan terkini penerapan prinsip kepatuhan Bank serta isu-isu strategis terkait dengan hal itu.

Keterlibatan Dewan Komisaris bersifat melekat pada fungsi kepatuhan. Seluruh perkembangan kepatuhan menjadi materi *assessment* Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala dan menjadi bagian penting dalam laporan Dewan Komisaris.

Inisiatif dan Pelaksanaan Program 2019

Pada tahun 2019, Bank BTPN merupakan entitas baru hasil penggabungan usaha yang harus menyatukan dua kultur atau *framework* di bidang kepatuhan. Bank bukan sekadar harus memenuhi ketentuan dari regulasi dalam negeri yang selama ini sudah dilaksanakan dengan baik, tapi juga sudah mulai beradaptasi untuk memenuhi standar internasional, sejalan dengan posisi Bank yang menjadi bagian dari jaringan global.

Dengan demikian, standar yang ditetapkan di Bank pun dinaikkan. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan perkembangan di dunia internasional.

Bank juga harus mengikuti kepada kebijakan dan prosedur yang ada di perusahaan induk. Dengan demikian, sejumlah regulasi internasional yang diacu, antara lain dari otoritas perbankan Jepang, yaitu *Financial Services Agency. Foreign Corrupt Practice Act* (FCPA) untuk anti korupsi yang berlaku di Amerika Serikat dan UK Bribery Act (UKBA) yang berlaku di Inggris. Itu peraturan-peraturan yang kita jadikan sebagai dasar dan acuan dalam melakukan aktivitas bisnis.

Selama tahun 2019 Divisi Kepatuhan telah melaksanakan penerapan Fungsi Kepatuhan guna memastikan pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan BI serta perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu kepada Kerangka Kerja Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank antara lain:
 - Sejalan dengan proses *merger* PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dengan SMBCI menjadi PT Bank BTPN Tbk (“Bank”) efektif per tanggal 1 Februari 2019, Bank telah melakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Hasil Penggabungan.
 - Sosialisasi peraturan baru OJK dan BI kepada karyawan dan pengurus Bank, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit kerja terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Sosialisasi dilakukan melalui email, tatap muka maupun media komunikasi internal Bank lainnya.
 - Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/

tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja dalam setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas serta kebijakan; baik baru, pengembangan maupun kaji ulang tahunan melalui diskusi, rapat koordinasi, media elektronik dan lain-lain.

- Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pada Divisi Kepatuhan guna memastikan pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain melalui *soft & technical skills training*, *refreshment program* dll.
2. Dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank:
 - Pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip *prudential banking* antara lain KPMM, GWM, BMPK.
 - Pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada Regulator.
 - Pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari Regulator.
 - *Gap analysis* dan analisa dampak ketentuan baru terhadap operasional Bank.
 - Pelaksanaan *Compliance On-site Review* guna memastikan kepatuhan cabang terhadap penerapan ketentuan OJK, BI serta Lembaga Penjamin Simpanan.
 - Pelaksanaan *self assessment* Risiko Kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan profil risiko Bank yang dilakukan secara triwulanan sesuai ketentuan OJK.

- *Review* pemenuhan dokumen guna memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan serta penutupan jaringan kantor (*compliance check list*).
- Penyampaian laporan pelaksanaan kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara berkala.

3. Dalam rangka memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) :
 - Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/ tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja dalam setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas serta kebijakan; baik baru, pengembangan maupun kaji ulang tahunan melalui diskusi, rapat koordinasi, media elektronik dan lain-lain.
 - Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, produk program, tindakan korporasi serta transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit.

4. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau BI:
- *Monitoring* terhadap tindak lanjut pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan OJK dan/atau BI serta menyampaikan laporan perkembangannya kepada OJK dan/atau BI secara berkala.
 - *Monitoring* dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan/atau BI dalam rangka pengawasan Bank.
- Terkait kewajiban pemenuhan terhadap penerapan ketentuan APU & PPT sesuai Peraturan OJK no. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017, berikut disampaikan penerapan Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan Bank selama tahun 2019 meliputi antara lain:
- Finalisasi penyusunan “*AML Action Plan*” untuk menindaklanjuti adanya perbedaan yang ditemukan dalam pelaksanaan Kebijakan APU & PPT sebelum penggabungan usaha dengan Kebijakan yang berlaku bagi anak perusahaan grup SMBC.
 - Di tahun 2019, beberapa aktivitas terkait *AML Action Plan* telah mulai dilaksanakan antara lain:
 - Proses seleksi karyawan yang akan ditunjuk sebagai *AML Compliance Champion* yang akan ditugaskan di kantor regional. *AML Compliance Champion*

- tersebut nantinya akan betugas untuk memonitor penerapan ketentuan APU & PPT di wilayah regional
- Menyusun pengembangan *e-KYC system* yang dapat mengakomodasi profil nasabah retail
 - Menyusun metodologi penilaian APU & PPT yang sesuai dengan profil nasabah retail
 - Mengidentifikasi penyempurnaan materi training yang harus dilakukan untuk mengakomodasi Kebijakan yang berlaku bagi anak perusahaan grup SMBC.
 - Melakukan diskusi dengan departemen terkait guna mengubah proses pengkinian data dari penetapan tenggat waktu finalisasi di akhir tahun menjadi penetapan tenggat waktu finalisasi di akhir periode triwulanan.
 - Mengsosialisasikan penerapan ketentuan *JASF screening* dan mulai menerapkannya pada Semester 1/2019
 - Mulai menggunakan Sistem AML (*SIRON*) antara lain dalam proses *screening* dan identifikasi tingkat risiko nasabah, proses pemantauan transaksi nasabah, serta integrasi Sistem AML dengan aplikasi *front end* Bank.

- Melakukan kajian penerapan APU & PPT pada beberapa kantor cabang guna memantau dan memastikan kesesuaian penerapan APU & PPT di cabang dengan kebijakan internal bank.
- Melakukan sosialisasi ketentuan APU & PPT untuk meningkatkan *compliance awareness* yang dilaksanakan melalui portal BTPN, *e-mail blast*, *wallpaper desktop*, maupun melalui pertemuan langsung pada saat kunjungan ke cabang.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa selama tahun 2019 tingkat kepatuhan Bank “*Baik*”, tercermin pada peringkat Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan risiko (RBBR) adalah “*Sehat*” sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, termasuk terkait pemenuhan terhadap prinsip *prudential banking* (KPMM, GWM, BMPK dll).

Rencana Strategi Tahun 2020

Secara berkelanjutan Bank akan melakukan langkah-langkah guna memperkuat Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha, termasuk memperkuat kerangka kerja (*framework*) APU & PPT. Berikut disampaikan fokus penerapan Fungsi Kepatuhan tahun 2020 melalui strategi kepatuhan yang dilaksanakan sejalan dengan komitmen pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan OJK,

BI serta peraturan perundangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

- Memastikan kebijakan, produk program, aksi perusahaan maupun keputusan transaksional dengan limit/plafon persetujuan Komite Kredit telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku melalui proses uji kepatuhan serta fungsi *advisory*, termasuk kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan produk program.
- Melakukan sosialisasi peraturan baru OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut.
- Melaksanakan *Compliance On-site Review* guna memastikan kepatuhan terhadap penerapan ketentuan OJK, BI serta peraturan perundangan yang berlaku serta penunjukkan *compliance champion* di kantor regional Bank yang akan bekerja sama dengan *Quality Assurance* (QA) business melakukan fungsi *quality assurance*.
- Memastikan budaya kepatuhan tersebar luas di semua lini *business* dan cabang Bank, termasuk memastikan dokumen hukum yang digunakan di seluruh kantor Bank telah di kaji ulang dan diverifikasi oleh pihak Kantor Pusat Bank.
- Memastikan pelaksanaan GCG, termasuk anti suap dan korupsi serta benturan kepentingan di semua proses Bank, antara lain proses penunjukan vendor, pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan jamuan kepada pihak ketiga.
- Menyelenggarakan pelatihan terkait *compliance awareness*, anti suap dan korupsi serta APU & PPT kepada seluruh karyawan Bank melalui *e-learning* maupun media internal Bank lainnya.
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pada Direktorat Kepatuhan & Legal dalam rangka pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui *soft & technical skills training, refreshment program*, dll.
- Meningkatkan budaya kepatuhan terhadap ketentuan dan kebijakan internal bank terkait penerapan program APU & PPT antara lain melalui:
 - Melaksanakan rencana yang telah disusun dalam “*AML Action Plan*” untuk menindaklanjuti adanya perbedaan (*gaps*) yang ditemukan dalam pelaksanaan Kebijakan APU & PPT sebelum penggabungan usaha dengan Kebijakan APU & PPT yang berlaku bagi anak perusahaan grup SMBC; serta untuk meningkatkan penerapan APU & PPT di Bank;
 - Evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan kebijakan APU & PPT serta perkembangan risiko APU & PPT yang dihadapi, melalui penerapan kajian risiko APU & PPT secara berkala, serta kajian risiko yang mampu memitigasi risiko APU & PPT di produk/jasa yang dimiliki Bank.
- Menyempurnakan program APU & PPT yang telah ada terutama untuk:
 - menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan APU & PPT yang berlaku
 - menyesuaikan dengan risiko APU & PPT terkait perkembangan produk/ jasa yang dimiliki bank, serta kasus/masalah terkait APU & PPT yang terjadi di Bank
 - mengakomodasi kebijakan pemegang saham yang berlaku bagi anak perusahaan SMBC,
 - memastikan program pelatihan telah dilakukan terhadap karyawan yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU & PPT
 - Mengoptimalkan fungsi sistem pendukung APU & PPT terutama dengan:
 - Melanjutkan rencana integrasi sistem AML dengan aplikasi *front-end* untuk mendukung proses *screening* nasabah dan penentuan profil risiko nasabah, sejalan dengan rencana standarisasi formulir aplikasi (*unified e-form*).
 - Menyempurnakan proses/sistem *screening* yang saat ini digunakan agar dapat mendukung proses *screening* yang lebih cepat dan tepat; dan menerapkan *single screening system* untuk *retail business*

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

- Menyempurnakan proses pengkinian data *watch list/sanction list* untuk memastikan proses pengkinian data dapat dilakukan sesegera mungkin.
- Menyempurnakan MIS yang digunakan bank untuk pelaporan APU & PPT ke otoritas dan manajemen, serta yang digunakan untuk memonitor penerapan APU & PPT.
- Memastikan '*reliability*' sistem monitoring transaksi nasabah untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Mengotomasi proses terkait APU & PPT, terutama terkait pelaporan, untuk meminimalisir kesalahan yang disebabkan karena *human error*.

INTERNAL FRAUD

Pencegahan *Internal Fraud*

Internal Fraud adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar) dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) yang bernilai lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), sesuai Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK/.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penerapan Strategi *Anti-Fraud*

Bank BTPN berkomitmen penuh untuk senantiasa melengkapi dan menyempurnakan penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan evaluasi dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi *Anti-Fraud* Bank BTPN.

Penyempurnaan penerapan Strategi *Anti-Fraud* Bank BTPN dilakukan dengan cara antara lain melalui:

1. Penyelesaian berkesinambungan diantara berbagai unit bisnis dan unit kerja dalam penerapan Strategi *Anti-Fraud* dan secara konsisten menerapkan *zero tolerance* terhadap pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*.
2. Secara terus menerus melakukan *awareness Anti-Fraud* dan *Whistleblowing Channel*, baik melalui *in-class training* baik untuk karyawan baru maupun kampanye *Anti-Fraud* dan sosialisasi *Whistleblowing Channel* melalui media internal Bank, *e-news letter*, *e-mail*, *desktop wallpaper*, dan lain-lain yang berisi informasi mengenai *fraud* dan *channel* yang dapat digunakan untuk pelaporan kejadian berindikasi *fraud*, sehingga diharapkan kesadaran (*awareness*) dan kepedulian terhadap budaya *anti-fraud* di BTPN dapat terus dan semakin meningkat.
3. Pelaksanaan Deklarasi *anti fraud* melalui *e-learning* sebagai komitmen dan membangun kesadaran untuk tidak melakukan *fraud*, selalu taat kepada aturan yang berlaku disiplin dalam menjalankan tahapan proses kerja sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Bank BTPN.

Pelaksanaan di Bank

Penjelasan berkenaan yang terjadi di Bank dalam dua tahun terakhir disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Telah diselesaikan			2	5		
Dalam proses penyelesaian di internal bank.						
Belum diupayakan penyelesaiannya.						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum			2	1		
Total Fraud			4	6		

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2019, tidak terdapat Transaksi antara Bank dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI AFILIASI

Merujuk pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Terdapat 2 transaksi afiliasi selama tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang melakukan Transaksi	Jenis Hubungan Afiliasi	Objek Transaksi
1	SMBC dan BTPN	SMBC adalah Pemegang Saham Mayoritas sekaligus Pemegang Saham Pengendali Bank	Transaksi Penggabungan Usaha antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
2	SMBC dan BTPN	SMBC adalah Pemegang Saham Mayoritas sekaligus Pemegang Saham Pengendali Bank	Kolaborasi di bidang teknologi informasi atau perbankan digital.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

BTPN tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya dengan melaksanakan panggilan sosialnya, BTPN dapat terus mempertahankan kinerja usahanya. Dalam hal ini BTPN menempatkan program tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dan integral dari kegiatan bisnis BTPN dimana penjelasan lebih rinci terkait hal tersebut terdapat di bagian Daya dalam buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. Sedangkan, kontribusi pada kegiatan sosial adalah sebagai berikut:

No.	Program	Biaya (Rupiah)	Persentase
1	Wirausaha	2.857.102.478	34%
2	Kesehatan	4.912.000.000	59%
3	Pendidikan	550.000.000	7%
Total		8.319.102.478	100%

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank BTPN telah memenuhi kewajiban berkenaan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Mekanisme penyampaiannya dilakukan melalui beragam saluran komunikasi dari mengunggah melalui situs Bank, hingga disampaikan langsung kepada regulator dan pihak berkepentingan.

Selain itu, transparansi juga dilakukan melalui publikasi pada media nasional.

Berikut ini, di antara rincian transparansi di bidang keuangan dan non keuangan:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs *web*.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs *web*.
3. Laporan Tahunan disampaikan kepada regulator, lembaga pemeringkat, pemegang saham, serta pihak berkepentingan lain dan publik melalui situs *web*.
4. Informasi Tata Kelola juga dipublikasikan melalui situs *web*.
5. Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs *web*.
6. Pengumuman penyelenggaraan RUPS, antara lain disampaikan melalui publikasi di media nasional dan situs *web*.
7. Informasi lainnya yang berkenaan dengan keterbukaan informasi.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM ATAU OBLIGASI SUBORDINASI

Pembelian kembali saham dan obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2019, BANK BTPN tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi (*share buy back* dan *buy back* obligasi).

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA DALAM JUMLAH BESAR

Bank BTPN secara konsisten mempertimbangkan kapasitas modal dan distribusi/diversifikasi portofolio dalam pemberian pinjaman. Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran terkait dengan eksposur besar yang berada di luar kewajaran, maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Berikut adalah tabel penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar per 31 Desember 2019

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	12	3.261.007
2.	Kepada Debitur Inti	25	56.284.354,83
	a. Individu	1	3.390.152,50
	b. Group	24	52.894.202,33

Suku Bunga Dasar Kredit	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah berdasarkan Segmen Kredit							
	Desember 2019				Desember 2018			
	Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi Non KPR	Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit	7,09%	11,28%	16,01%	13,21%	8,39%	12,66%	17,09%	14,47%

AUDIT EKSTERNAL

Dalam penyusunan laporan keuangan yang diaudit untuk tahun 2019, BTPN menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Bapepam-LK, yaitu KAP Siddharta Widjaja & Rekan. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada 15 Februari 2019 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2019 adalah Rp7.300 sebelum PPN 10%.

Penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor eksternal dilakukan sejak tahun buku 2019.

Akuntan Publik dan KAP tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik, serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Berikut adalah KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun Pemeriksaan	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Penanggung Jawab	Jasa yang Diberikan	Biaya (Rp Juta)
2019	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit laporan keuangan	7.300
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Jinny Pangestu	Audit laporan keuangan	5.755
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA	Audit laporan keuangan	5.555

Jasa Lain yang Diberikan

Sepanjang periode audit, seluruh KAP tidak memberikan jasa lain selain jasa audit keuangan.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki dua fungsi.

Pertama adalah fungsi penjaminan (*assurance*). Terkait dengan fungsi ini Internal Audit mengevaluasi proses tata kelola, pengelolaan risiko dan efektivitas pengendalian internal pada semua aspek kegiatan Bank melalui pendekatan berbasis risiko.

Kedua, fungsi konsultatif. Melalui fungsi ini, Internal Audit memberikan masukan atas pengendalian internal kepada direktorat lainnya, seperti pemberian rekomendasi atau saran perbaikan dalam berbagai pemeriksaan yang dilakukan, masukan atas draf kebijakan atau prosedur, masukan atas inisiatif utama Bank, dan lainnya.

Profil Kepala Internal Audit

Nurhajati Soerjo Hadi
Kepala Internal Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun dan berdomisili di Jakarta

Riwayat Pengangkatan

Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sejak 1 Januari 2017, melalui Surat Keputusan No. PS/BOC/009/XII/2016 tentang Persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan Penggantian Internal Audit Head PT Bank BTPN Tbk.

Riwayat Pendidikan

- Bachelor of Art in Business Administration dari Oregon State University, Corvallis – Oregon, USA (1991)

Riwayat Pekerjaan

- Sebagai Fraud Management Unit Head di PT Bank BTPN, Tbk (2015-2016)
- Sebagai Quality Assurance and Corporate Client Execution Head di PT ANZ Bank Indonesia (2015)
- Sebagai Business Development Director (Business Manager) to International Banking di The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta Branch (2008-2013)
- Sebagai Director di PT. RBS Finance Indonesia (2008-2012)
- Sebagai Credit Portfolio Management Head di ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2005-2008)
- Sebagai Deputy Head Financial Restructuring & Recovery (FRR) di ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2003- d2005)
- Sebagai Financial Restructuring & Recovery Officer di ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1999-2005)
- Sebagai Development Director (Business Manager) to Executive Country di ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1996-2008)
- Sebagai Corporate Credit Account Officer di PT IBJ Indonesia Bank, Jakarta (1991- d1995)

Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

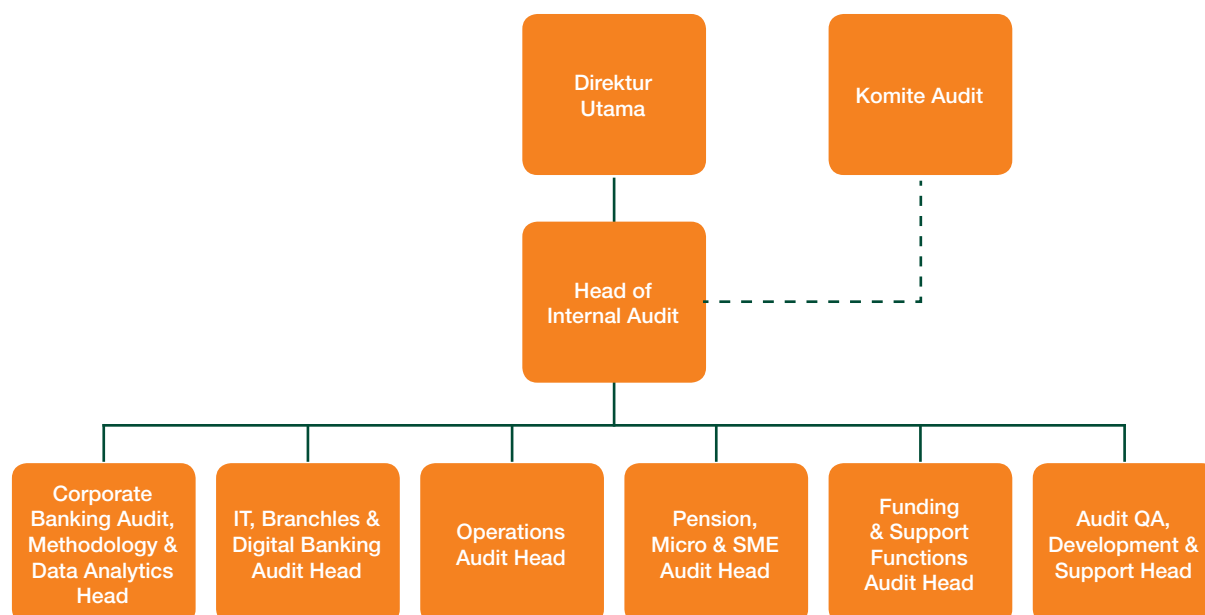
Organisasi dan Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Perusahaan

Internal Audit merupakan direktorat independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Direktorat ini memiliki 6 (enam) divisi. Berikut adalah struktur organisasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2019:

- **Divisi Corporate Banking Audit, Metodologi dan Data Analytics**
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas segala aktivitas pada bisnis Korporasi, persiapan perencanaan audit tahunan, pengembangan metodologi, melakukan analisa data, dan verifikasi data *irregularities (continuous monitoring)*
- **Divisi IT, Branchless dan Digital Banking Audit**
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat *Digital Banking* (Jenius), direktorat *Branchless Banking* (BTPN Wow!) dan direktorat Teknologi Informasi serta mendukung divisi audit lainnya dalam pemeriksaan terhadap direktorat-direktorat lain yang menggunakan dukungan teknologi

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

- **Divisi Operations Audit**
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat *Operations* baik di Kantor Pusat maupun di cabang
- **Divisi Pensiun, Mikro dan SME Audit**
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas segala aktivitas kredit pada bisnis *Retail Lending*, Mitra Usaha Rakyat (MUR), Mitra Bisnis (SME), dan *Consumer Asset*
- **Divisi Funding Business dan Support Functions Audit**
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat *Funding* serta direktorat-direktorat pendukung di Kantor Pusat, seperti *Finance*, Kepatuhan, Manajemen Risiko, *Human Capital*, dan lain-lain
- **Divisi Quality Assurance, Development dan Support**
Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas kesesuaian aktivitas Internal Audit dengan standar yang berlaku dan meningkatkan kompetensi staf Internal Audit melalui pemetaan pelatihan yang efektif.



Tugas dan Tanggung Jawab

Internal Audit melaporkan setiap hasil pelaksanaan audit termasuk rekomendasi untuk perbaikan kepada Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Secara berkala, Internal Audit mempresentasikan hasil audit kepada Direksi dan Komite Audit, serta memberikan rangkuman atas hasil audit kepada Direktur Utama, Direksi, dan Komite Audit.

Setiap tahun Internal Audit menyusun Rencana Audit Tahunan berbasis risiko terkait aktivitas utama Bank. Rencana Audit didiskusikan juga bersama Direktur terkait agar selaras dengan arah pengembangan bisnis secara keseluruhan dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

- Membuat rencana audit tahunan dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
- Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan melakukan analisa dan evaluasi efektivitas *Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC)* guna mendukung tujuan dan sasaran Bank secara maksimal.

- Melakukan audit konsultatif/kajian terhadap inisiatif/produk baru Bank apabila diperlukan baik oleh manajemen maupun *Regulator*.
- Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk perbaikan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Menyampaikan laporan audit secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan hasil tindak lanjut hasil audit.
- Melakukan investigasi apabila diperlukan/diminta oleh manajemen.
- Bekerja sama dengan audit ekstern untuk tercapainya hasil audit yang komprehensif.

Piagam Internal Audit

Tugas dan tanggung jawab termasuk wewenang Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan serta kode etik setiap karyawan dituangkan dalam Piagam Internal Audit yang telah disetujui oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris. Sehubungan dengan merger antara Bank dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (BSMI) yang telah teralisasi pada tanggal 1 Februari 2019, Internal Audit telah menyelaraskan piagam (*charter*), kebijakan serta prosedur Internal Audit.

Pelaksanaan kegiatan dan Piagam Internal Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), *International Practices Professional Framework* (IPPF), Piagam Audit Internal, serta Rencana Audit Tahunan.

Sumber Daya Manusia

Internal Audit senantiasa memperkuat kapabilitas tim dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para karyawan, baik dalam bentuk *soft skills* maupun *technical skills*, serta sertifikasi untuk manajemen risiko, audit, IT, *sharing session*, dan lainnya. Selama tahun 2019, Internal Audit juga melakukan proses rekrutmen guna memperkuat tim audit dengan mencari kandidat yang telah berpengalaman pada bidangnya dan mengutamakan kandidat yang juga memiliki pengetahuan teknologi informasi.

Internal Audit juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas melalui pemeriksaan secara komprehensif dengan sumber daya manusia yang kompeten. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan standar profesi audit yang memberikan nilai tambah bagi Bank.

Hingga berakhirnya tahun buku 2019, jumlah sumber daya manusia Internal Audit sebanyak 58 orang.

Direktorat/Divisi	Jumlah Sumber Daya Manusia
Head of Internal Audit	1
Corporate Banking Audit, Methodology and Data Analytics Division	7
IT, Branchless and Digital Banking Audit Division	12
Operations Audit Division	12
Pension, Micro and SME Audit Division	11
Funding and Support Function Audit Division	11
Audit QA, Development and Support Division	4
Total	58

Posisi	Sertifikasi Profesi terkait Internal Audit
Head of Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> • S1 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 • Sertifikasi Profesi terkait Internal Audit
Audit Division Head	<ul style="list-style-type: none"> • S1 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 • Sertifikasi Profesi terkait Internal Audit
Audit Lead	<ul style="list-style-type: none"> • S1 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2
Senior Auditor/Auditor	<ul style="list-style-type: none"> • S1 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Profesi	Jumlah Karyawan Pemilik Sertifikat
CIA (Certified Internal Auditor)	1
CISA (Certified Information Systems Auditor)	4
CCNA (Cisco Certified Network Associate)	1

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2019

Sertifikasi Profesi	Jumlah Karyawan Pemilik Sertifikat
CEH (Certified Ethical Hacker)	1
CISM (Certified Information Security Manager)	1
CSX (Cyber Security Nexus)	1
CBAP (Certified Business Analyst Professional)	1
CPLHI (Certified Professional Life & Health Insurance)	1
QIA (Qualified Internal Auditor)	6
CBIA (Certified Bank Internal Audit)	31
SMR (Sertifikasi Manajemen Risiko)	57

Partisipasi dalam perhimpunan profesi

Perhimpunan Profesi	Jumlah Karyawan Yang Terlibat
IIA (Institute of Internal Auditors)	5
ISACA (Information Systems Audit and Control Association)	3

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Pada tahun 2019 Internal Audit melaksanakan 4 (empat) jenis pendekatan audit, yaitu audit yang diwajibkan oleh *Regulator* (*regulatory audit*), audit tematik, audit atas cabang secara keseluruhan (*branch audit*), dan audit satuan unit kerja (*general audit*). Pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun buku tersebut adalah:

1. Menyelesaikan 100% pemeriksaan yang direncanakan, yaitu meliputi 28 pemeriksaan atas bisnis *Retail Lending*, *Retail Funding*, Mitra Usaha Rakyat (MUR), Mitra Bisnis (SME), BTPN Wow!, Jenius, dan fungsi-fungsi pendukung di kantor pusat termasuk Compliance, Operations dan Teknologi Informasi.
2. Pemeriksaan reguler berdasarkan rencana audit yang telah disetujui.
3. Melakukan 12 (dua belas) audit yang bersifat konsultatif (*Limited Review*), terutama terkait dengan implementasi produk/fitur baru berdasarkan peraturan regulator serta permintaan khusus dari bisnis/unit kerja tertentu.
4. Melakukan 3 (tiga) *continuous monitoring review* untuk mendeteksi secara dini terkait kelemahan proses berdasarkan data yang tercatat di sistem maupun indikasi *fraud* melalui analisa data dan kunjungan kepada debitur secara langsung.

Atas kelemahan/temuan yang ada, direktorat/unit terkait telah menetapkan rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan hal ini dimonitor secara berkesinambungan oleh Internal Audit. Komitmen untuk perbaikan tercermin dari diselesaikannya tindak lanjut secara tepat waktu oleh setiap satuan kerja terkait sebanyak >92%.

Tim Internal Audit senantiasa memperkuat fungsi analisa data (*data analytics*) untuk mengembangkan proses *continuous monitoring*. Adapun cakupan analisa data berfokus memberikan indikasi kelemahan proses yang terjadi melalui anomali data yang tercatat di sistem Bank seperti informasi dan transaksi nasabah, serta kecurangan (*fraud*) atau kelemahan proses di cabang. Internal Audit tetap mengembangkan *macro risk assessment*, dan lainnya yang dikiniakan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk dapat membantu tim Internal Audit dalam melakukan analisa data sehingga meningkatkan pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit*).

Rencana Strategis Tahun 2020

Untuk penyusunan rencana strategis tahun depan, Internal Audit telah melakukan kajian risiko atas bisnis dan unit kerja yang ada di Bank. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Internal Audit akan berfokus pada sejumlah hal, antara lain:

- Identifikasi atas risiko-risiko yang terkait dengan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT).
- Pencegahan tindakan penyuapan dan korupsi serta keterbukaan informasi terhadap nasabah (*anti bribery, corruption and conduct*).
- Kecukupan kontrol terhadap risiko operational dan pencegahan serta penanganan indikasi *fraud*, keamanan informasi dan data/ dokumen
- Kesiapan keberlangsungan usaha
- Pelaksanaan implementasi proses di cabang
- Kelayakan fisik kantor cabang

- Kecukupan infrastruktur dan perubahan terkait teknologi informasi
- Kepuasan pelanggan.
- Pemeriksaan terhadap kecukupan kontrol internal pada anak perusahaan.
- Pemeriksaan terhadap kecukupan kontrol internal di setiap lini bisnis yang dimiliki oleh Bank.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang merupakan suatu bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh manajemen Bank. Sistem tersebut ditujukan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, maupun kebijakan dan prosedur intern Bank.

Selain itu, dalam rangka tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian; meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) dan kedisiplinan pada organisasi Bank secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini. Trakhir adalah untuk menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Sistem pengendalian intern yang efektif menjadi dasar penyediaan laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta pelaksanaan kegiatan operasional yang sehat dan aman. Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain:

1. Dewan Komisaris
2. Komite Audit
3. Direksi
4. Satuan Kerja Kepatuhan
5. Satuan Kerja Manajemen Risiko
6. Satuan Kerja Keuangan
7. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
8. Pejabat dan Pegawai Bank
9. Pihak Eksternal

Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) dan disiplin pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Kesesuaian dengan COSO (Internal Control Framework)

Sistem pengendalian intern Bank terdiri dari 5 (lima) komponen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)

Pengawasan oleh manajemen merupakan landasan utama dari sistem pengendalian intern.

Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan dan prosedur, serta struktur organisasi yang ditetapkan telah memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh Bank. Selain itu, secara berkala Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan dan kaji ulang terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh karyawan Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*)

Identifikasi dan penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Risiko yang mempengaruhi pencapaian sasaran harus diidentifikasi,

dinilai, dipantau dan dikelola secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pengendalian intern perlu segera dikaji ulang apabila terdapat risiko yang belum dikendalikan.

Kaji ulang dilaksanakan antara lain melalui evaluasi secara berkesinambungan mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian sasaran atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan dan organisasi Bank.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*)

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan secara tepat guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten telah dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan pengendalian diterapkan pada seluruh tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank.

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang pada seluruh jenjang organisasi tidak memiliki peluang untuk melakukan dan/atau menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi yang dikenal sebagai "*Four-Eyes Principle*". Sistem pengendalian intern yang efektif mensyaratkan pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus diidentifikasi, dikelola dan dipantau oleh pihak independen, seperti akuntan publik.

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*)

Bank harus melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama harus diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan Bank, termasuk evaluasi secara berkala. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern secara terus-menerus berkaitan dengan perubahan kondisi intern dan ekstern, serta meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut agar senantiasa terlaksana secara efektif.

Kelemahan dalam pengendalian intern harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kelima komponen utama di atas sejalan dengan komponen pengendalian yang ditetapkan dalam *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO), yaitu *Control Environment* (CE); *Risk Assessment* (RA); *Control Activities* (CA); *Information and Communication* (IC); serta *Monitoring Activities* (MA).

Review atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Secara umum, penerapan sistem pengendalian intern yang sejalan dengan Pedoman Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 telah menyempurnakan penilaian hasil audit yang mencakup: evaluasi atas kecukupan dan efektivitas desain serta implementasi pengendalian intern berdasarkan pendekatan kerangka pengendalian intern yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO).

Internal Audit secara berkala telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern sesuai dengan Rencana Audit yang telah ditetapkan. Permasalahan terkait kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan langkah-langkah perbaikan serta tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank. Kedepannya, Bank perlu senantiasa meningkatkan pemahaman budaya risiko (*risk culture*) dan kedisiplinan pada seluruh jenjang organisasi untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Dapat kami sampaikan bahwa saat ini tidak terdapat perkara yang material (penting) yang sedang ditangani, sedangkan Perkara Hukum berupa Gugatan dari PEMKOT Semarang saat ini telah selesai dengan keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan perkara Pidana Korupsi dengan Tersangka Eksternal di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang telah diputus oleh Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht*) yang sebelumnya tertulis pada Laporan Tahunan 2018.

SANKSI ADMINISTRASI

Selama tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif material yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya yang mempengaruhi kelangsungan usaha BTPN dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun anak perusahaan.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank BTPN telah menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Bank melalui beragam media komunikasi. Di antaranya adalah melalui:

- Situs *web*: www.btpn.com (Bahasa Indonesia dan Inggris)
- Call Center: 1500300 (BTPN Call), +62 21 2450 5500 (*International Call*)
- E-mail Sekretaris Perusahaan: Corporate.secretary@btpn.com
- E-mail Komunikasi Korporasi: corporate.communications@btpn.com
- E-mail Pengaduan Nasabah: btpncare@btpn.com
- Keterbukaan Informasi melalui *website* Bank dan Bursa Efek Indonesia
- Siaran Pers
- Media Sosial:
 - Facebook: Bank BTPN Official
 - Twitter : @sahabatBTPN
 - Youtube: BTPN
 - LinkedIn: PT Bank BTPN Tbk
 - Instagram : @lifeatbtpn

KODE ETIK

Kode Etik berfungsi sebagai pedoman dasar bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan seluruh karyawan dalam bersikap dan berperilaku. Kajian Kode Etik dilakukan secara berkala, penyempurnaan Kode Etik terakhir telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 12 Agustus 2015 melalui Memorandum No. M.036/DIRCLC/CCS/VIII/2015.

Prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam Kode Etik merupakan elemen utama dari budaya di BTPN yang memuat antara lain:

Speak Your Mind

Merupakan saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya, sehingga karyawan dapat mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan/atau kejadian *fraud*, aspirasi, dan/atau ide perbaikan.

Pokok-pokok Kode Etik

Berikut ini rincian dari pokok-pokok kode etik yang diberlakukan di Bank BTPN:

1. Kepatuhan & Manajemen Risiko
2. Benturan Kepentingan
3. Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kondusif
 - 3.1 Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan
 - 3.2 Anti Diskriminasi dan Pelecehan
 - 3.3 Keamanan ditempat kerja
 - 3.4 Penggunaan Fasilitas Perusahaan
 - 3.5 Aktivitas di luar Perusahaan
 - 3.6 Penggunaan Sosial Media
4. Pengelolaan & Pengamanan Informasi
5. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
 - 5.1 Hubungan dengan Nasabah
 - 5.2 Anti Pencucian Uang
 - 5.3 Hubungan dengan Rekanan
 - 5.4 Hubungan dengan Regulator
 - 5.5 Penyuaian dan Korupsi
 - 5.6 Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Upaya Penegakan Kode Etik

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku yang sesuai standar etika Bank, BTPN telah melaksanakan *Induction Program* untuk eksekutif dan karyawan baru terkait Kode Etik. Selain itu secara berkala, dilakukan sosialisasi Kode Etik untuk memberikan pemahaman bagi karyawan serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik.

Pernyataan Kode Etik Berlaku pada Seluruh Level Organisasi

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen yang berada di bawah Dewan Komisaris, semua karyawan tanpa terkecuali wajib untuk membaca, mempelajari, dan memahami isi Kode Etik, dan bersedia untuk mentaati dan melaksanakan Kode Etik dengan sebaik-baiknya. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bank BTPN.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik dilakukan dengan *E-mail Blast* dan penyegaran melalui sistem *E-Learning*, berlaku bagi seluruh jenjang di Bank BTPN baik yang baru bergabung maupun yang lama.

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bank memiliki kebijakan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang antara lain mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Pengadaan Barang dan Jasa, serta mengatur syarat serta pengelolaan vendor..

WHISTLE BLOWING SYSTEM/PELAPORAN PELANGGARAN

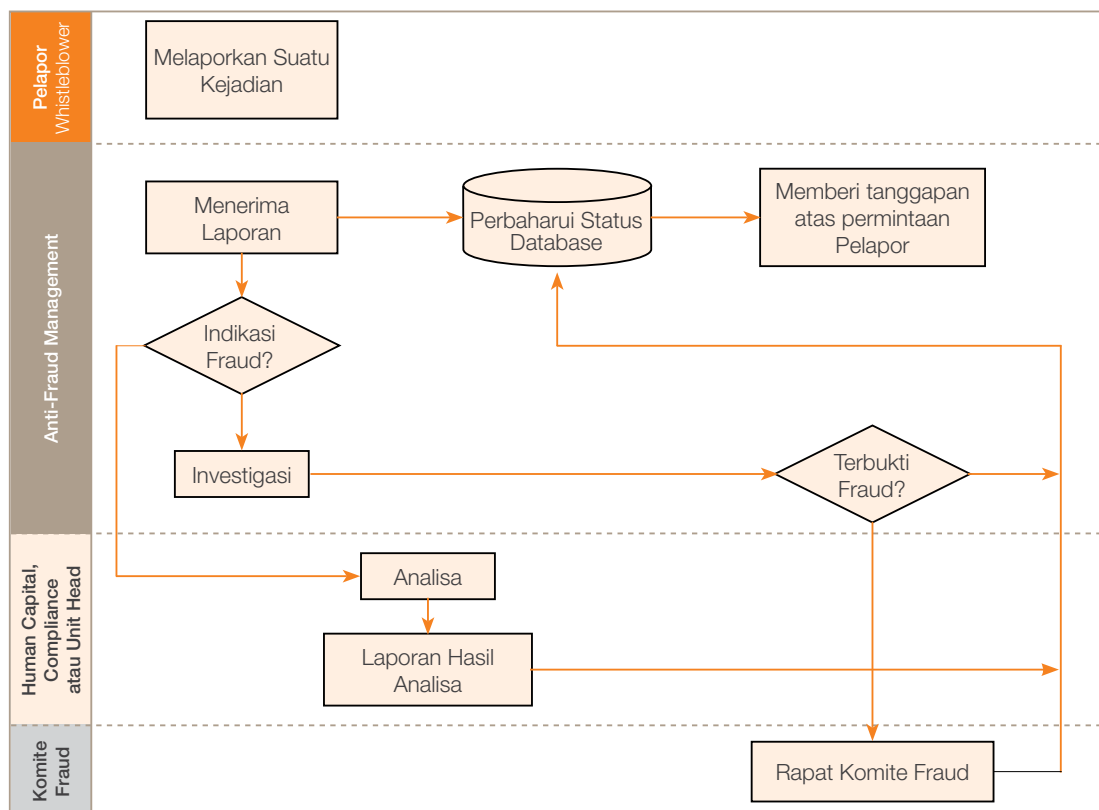
Bank BTPN telah memiliki saluran sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing (WBS) channel*. Fasilitas tersebut merupakan sarana yang disediakan bagi semua karyawan untuk melaporkan permasalahan yang terkait dengan perilaku yang menyimpang serta kejadian *fraud*. Termasuk di dalamnya adalah indikasi dan kecurigaan atas tindakan tersebut, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang berlangsung dan/atau dicurigai dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Whistleblowing Channel dapat digunakan oleh karyawan melalui e-mail, aplikasi whatsapp, *hotline* dan surat. BTPN berkomitmen menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelapor memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilaporkan dengan memenuhi unsur (4W+1H) yang meliputi:

- a) Menjelaskan kejadian (*What*)
- b) Pihak yang terlibat (*Who*)
- c) Waktu kejadian (*When*)
- d) Lokasi kejadian (*Where*)
- e) Bagaimana terjadinya (*How*)

Mekanisme Pelaporan

Mekanisme Penyampaian dan Pengelolaan *Whistleblowing Channel* adalah sebagai berikut:



Perlindungan bagi Pelapor

Bank memberikan perlindungan terhadap pelapor, yaitu kerahasiaan identitas dan isi laporan yang disampaikan.

Pihak Pengelola Pengaduan

Pengelolaan saluran *Whistleblowing* dilakukan oleh pihak internal yaitu Anti Fraud Management

Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut Tahun 2019

Selama tahun 2019, terdapat 43 pengaduan yang masuk melalui *Whistleblowing Channel* yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

BTPN senantiasa menghimbau karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide dan permasalahan yang terkait penyimpangan dan *fraud* dengan berpedoman pada Prosedur Mekanisme Pelaporan *Whistleblowing*, sehingga secara berkelanjutan selalu menjadikan BTPN sebagai Bank terpercaya dan berintegritas terhadap masyarakat, karyawan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penilaian Sendiri GCG

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG tahun 2019, dan untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, PT Bank BTPN Tbk ("Bank ") telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola Bank. Hasil penilaian sendiri oleh Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Hasil Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG untuk tahun 2019 adalah "2" dengan kategori "Baik", yang berlaku bagi individual Bank maupun konsolidasi (Hasil untuk tahun 2018 adalah: 2).

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk

Posisi : 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi*	2	Baik

Analisis

Peringkat komposit 2 (dua) mencerminkan bahwa Manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen. Kesimpulan atas penilaian pelaksanaan tata kelola Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur adalah sebagai berikut:

A. Governance Structure

Faktor - faktor positif aspek governance structure Bank adalah:

- Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank telah memenuhi peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- Kompetensi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan personil yang menjabat posisi Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris memadai untuk mendukung Bank mencapai tujuannya.
- Bank telah menetapkan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern.
- Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur dari Bank hasil Merger, yang merupakan kombinasi dari Bank peserta penggabungan, peninjauan berkala dan sosialisasi terkait ketentuan tersebut dilakukan secara berkala.

Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah:

Tidak terdapat faktor-faktor negatif dari aspek ini.

B. *Governance Process*

Sehubungan dengan penggabungan usaha SMBCI ke dalam BTPN, Bank hasil penggabungan terus berupaya dan berproses dalam melakukan kombinasi kebijakan dan prosedur tata kelola sehingga dapat memenuhi persyaratan baik dari sisi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi bank terbuka di Indonesia, maupun sebagai bank yang merupakan anak perusahaan dari kelompok usaha finansial di Asia, yang tercatat di New York dan Tokyo.

Seluruh struktur GCG dalam hal ini berupaya untuk mempertahankan kelebihan dan memitigasi kekurangan dari kedua sisi, sehingga pelaksanaan GCG dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Sebagai bagian dari suatu konglomerasi keuangan, tukar menukar informasi untuk kepentingan konsolidasi tidak mungkin dicegah namun dikelola agar dapat memperhatikan prinsip independensi dan kesetaraan informasi, oleh karenanya Bank memberlakukan kebijakan dan prosedur mengenai alur komunikasi dan Informasi Orang Dalam serta Transaksi Pribadi.

Selain itu, memperhatikan prinsip akuntabilitas, Bank terus meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang mencakup peningkatan kualitas fungsi Anti Fraud Management.

Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah:

Tidak terdapat faktor-faktor negatif dari aspek ini

C. *Governance Outcome*

Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah:

Untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan, BTPN secara konsisten meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank yaitu antara lain pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan independensi Dewan Komisaris, Direksi serta Komite, pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko yang kuat, penerapan budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank serta pemenuhan aspek transparansi laporan keuangan dan non-keuangan.

Dewan Komisaris beserta Direksi dibantu oleh Komite-komite akan memastikan keberlanjutan komitmen pada praktik tata kelola perusahaan yang baik serta menyempurnakan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko Bank.

Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah:

Pada tahun 2019, Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar (denda) oleh regulator baik oleh Bank Indonesia, OJK maupun Dirjen Pajak sehubungan dengan keterlambatan penyampaian laporan.

Guna mencegah terjadinya pembebanan denda atas kesalahan yang sama di masa yang akan datang, Bank telah melakukan beberapa langkah perbaikan antara lain meningkatkan pengawasan penyusunan dan penyerahan laporan internal, pemindahan *server routing* Jenius (*onshoring*) yang akan dilakukan selambatnya akhir Januari 2020, mengingatkan (memberikan *reminder* ke) kantor cabang terkait kewajiban pelaporan pajak dan memantau penyerahan dokumen pelaporan pajak kepada kantor pajak setempat oleh wilayah terkait.

Selain itu, Bank telah menyusun Rencana Aksi yang mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dengan target zero penalties, meningkatkan kontrol ketat terhadap fraud serta penerapan standar pelaporan SOX (*sarbanes oaxley*) sehingga diharapkan tata kelola penyajian laporan keuangan akan jauh lebih baik.

* Bank memiliki Perusahaan Anak (BTPN Syariah). Berdasarkan perbandingan aset Perusahaan Anak terhadap aset Bank, Bank menilai bahwa hasil Penilaian *self assessment* Perusahaan Anak tidak memiliki dampak yang signifikan.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Bank BTPN melaksanakan dan menjaga komitmen implementasi CSR secara berkesinambungan agar kehadiran BTPN semakin memberikan manfaat luas terhadap masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak negatif terhadap seluruh pemangku kepentingan.



- 304 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 306 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia
- 307 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil
- 308 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
- 309 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 311 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nasabah
- 312 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Rp **9,1**
Miliar

Sepanjang tahun 2019, total anggaran yang disediakan untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebesar Rp 9,1 miliar.



12,81 %

Secara keseluruhan, sejak diluncurkan pada Maret 2015 hingga akhir tahun buku 2019, BTPN Wow! telah menyediakan layanan perbankan bagi 6,6 juta nasabah, meningkat 12,81% dibandingkan tahun 2018.



Kebijakan BTPN yang mendukung pelestarian lingkungan salah satunya terlihat dari Kantor Pusat BTPN di Jakarta yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, bahkan telah meraih sertifikasi Gold Standard Certificate for Green Building.





Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%.



Bagi Bank BTPN, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) merupakan bentuk tanggung jawab moral Bank yang harus diimplementasikan kepada seluruh *stakeholder*. Hal itu merupakan wujud kepatuhan Bank terhadap peraturan dan sebagai bentuk terima kasih atas partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan BTPN.

Berdasarkan hal tersebut, BTPN melaksanakan dan menjaga komitmen implementasi CSR secara berkesinambungan agar kehadiran BTPN semakin memberikan manfaat luas terhadap masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak negatif terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

KOMITMEN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Komitmen Bank BTPN untuk mendukung tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain melalui implementasi atau penerapan keuangan berkelanjutan, seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Bagi Bank, upaya tersebut merupakan bagian penting dari komitmen untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dari sisi internal, komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diimplementasikan melalui kehadiran unit khusus yang menanganinya, yaitu Daya. Pada prinsipnya, program ini mengintegrasikan antara misi bisnis dengan misi sosial Bank BTPN atau *corporate share value*.

Sejak terjadi penggabungan usaha, program Daya yang awalnya memiliki tiga pilar, berubah menjadi empat pilar agar lebih relevan dengan bisnis Bank yang telah berubah menjadi bank universal. Pertama adalah *Competence Development*, yaitu program pengembangan kompetensi teknis yang bertujuan meningkatkan kapasitas peserta program untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan bidang yang diminati atau dibutuhkan. Kedua, *Personal financial health* yaitu upaya untuk mengembangkan kemampuan pengelolaan keuangan peserta program dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan keuangan dan mimpinya. Ketiga, *Sustainable Living*, yang mendukung

peserta program untuk hidup yang lebih sehat, usaha yang lebih ramah lingkungan dan secara umum hidup yang berkelanjutan. Sedangkan keempat, *Capacity to Grow for business*, yaitu memberdayakan peserta program untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha, memberikan peluang usaha baru serta akses pasar dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha.

Dari sisi segmentasi, jika selama ini Daya lebih banyak mengembangkan program untuk nasabah *mass market*, personal dan berdasarkan wilayah, maka saat ini program Daya telah berkembang. Di antaranya melalui kerja sama dengan nasabah korporasi untuk memberdayakan para karyawan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

METODE DAN LINGKUP DUE DILIGENCE TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS BANK

Bank BTPN senantiasa melakukan kajian atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas usahanya dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam melakukan analisis dampak dari kegiatan usaha Bank, prosesnya dilakukan secara internal dan masukan dari pihak eksternal, baik yang berdampak langsung maupun tidak.

Pihak eksternal dimaksud bersifat beragam. Dari masukan yang diterima melalui *contact center*, survei kepuasan nasabah, tatap muka dengan nasabah dan karyawan, serta dari pihak lain seperti investor, media dan akademisi.

Masukan-masukan tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh internal Bank. Selanjutnya, ditentukan kegiatan yang akan direalisasikan serta para pemangku kepentingan yang dituju, berkenaan dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU TERPENGARUH DARI KEGIATAN

Hasil identifikasi Bank BTPN, para pemangku kepentingan yang paling terpengaruh atau terdampak terhadap kegiatan Bank, sedikitnya ada enam pihak: Pemegang saham, nasabah, karyawan, mitra Bank, Pemerintah/regulator dan masyarakat umum.

Dari hasil identifikasi para pemangku kepentingan tersebut, Bank menyusun program yang sesuai dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Bank menjadi lebih tepat guna serta memberikan manfaat yang besar.

ISU-ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN BANK

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei 2016, yang masing-masing 29,7% dan 67,8%.

Untuk literasi keuangan, survei 2019 ini menggunakan indikator yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku. Sedangkan indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*) terhadap instrumen dan lembaga keuangan.

Kendati persentase masyarakat yang memahami dan memiliki akses terhadap layanan keuangan terus meningkat setiap tahun, namun upaya tersebut tidak boleh berhenti. Karena itulah, bagi Bank BTPN, dua isu tersebut: literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian dari isu penting. Selain itu, dalam industri keuangan, isu terjadinya *fraud* atau kejahatan juga merupakan isu yang sangat penting. Dampak dari *fraud* bukan hanya kepada internal Bank, namun dapat berimplikasi pada perekonomian secara umum serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN SERTA PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL DAN RELEVAN DENGAN BISNIS BANK

Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain terkait dengan perlindungan terhadap nasabah, kepatuhan kepada regulator, serta masyarakat dan lingkungan yang diatur dalam regulasi keuangan berkelanjutan. Terhadap lingkup tersebut, Bank telah mengimplementasikan sejumlah program secara berkesinambungan setiap tahun.

Selain itu, Bank juga ikut mendukung dan berpartisipasi dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelaksanaan aktivitas dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Di antaranya adalah melalui program produk ramah lingkungan, operasional ramah lingkungan, kesehatan, dan upaya mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam 17 tujuan program SDGs.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA BANK DALAM MENANGANI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN SERTA DALAM UPAYA *STAKEHOLDER ENGAGEMENT* DAN MENINGKATKAN NILAI BAGI *STAKEHOLDER* DAN PEMEGANG SAHAM

Bank BTPN memiliki program CSR yang sejalan dengan prinsip 3P (*people, profit, planet*), yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan manfaat bagi pemangku kepentingan melalui penerapan kebijakan alokasi anggaran CSR yang memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

Program CSR Bank juga berorientasi pada penciptaan nilai tambah kepada *stakeholders* maupun komunitas sekitar, serta mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan. Tak kalah pentingnya, program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh Daya lebih berkembang dengan prinsip *corporate share value*.

Berdasarkan prinsip tersebut, Bank menurunkannya menjadi beragam program CSR, yang pada intinya adalah meredistribusi nilai yang diperoleh Bank kepada para pemangku kepentingan.

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sepanjang tahun 2019, total anggaran yang disediakan untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebesar Rp9,1 miliar. Dibandingkan tahun 2018 yang Rp10,6 miliar, menurun 13,81%.

Dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan di bidang pengembangan kapasitas diri, literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha dan kehidupan yang berkelanjutan.

(Rp Juta)

Kegiatan	2019	2018	2017
Pengembangan kapasitas diri	814	26	-
Literasi keuangan	1.575	875	369
Peningkatan kapasitas usaha	1.340	1.580	2.068
Kehidupan yang berkelanjutan	5.389	8.098	8.098
Total	9.119	10.580	10.535

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Bank BTPN memiliki komitmen untuk menghormati hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia, antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Di lingkungan Bank, seluruh aspek tersebut telah terpenuhi melalui beragam kebijakan dalam organisasi perusahaan. Kebijakan Bank terkait dengan aspek hak asasi manusia bersandar pada Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya mencakup:

- Hak untuk hidup
- Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
- Hak Mengembangkan Diri
- Hak Memperoleh Keadilan
- Hak Atas Kebebasan Pribadi
- Hak Atas Rasa Aman
- Hak Atas Kesejahteraan
- Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
- Hak Wanita/Kesamaan Gender
- Hak Anak

RUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Dalam memberikan rumusan tanggung jawab terhadap aspek terkait HAM, Bank melakukan identifikasi pengaruh kegiatan usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap HAM. Karena itu, Bank menyiapkan *contact center* sebagai pusat pengaduan bagi pemangku kepentingan terkait dengan dampak kegiatan usaha Bank.

Mekanisme pengaduan juga dapat menggunakan *whistle blowing*

system (WBS) yang sudah ada di Bank, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pengaduan yang diakomodir oleh Bank tidak hanya dari pemangku kepentingan luar, tetapi juga pemangku kepentingan internal seperti karyawan.

Rumusan lainnya adalah:

- **Membantu Kelompok Rentan**
Mengidentifikasi kelompok rentan di lingkungan operasi perusahaan, membuat mekanisme untuk meyakini bahwa kegiatan usaha tidak melakukan diskriminasi serta mengambil keuntungan dari kelompok rentan.
- **Perlakuan Adil**
Memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi karyawan, konsumen dan mitra usaha.
- **Menghormati Hak Sipil dan Politik**
Hak bersuara dan berekspresi, Mendengar sebelum sanksi disiplin
- **Menghormati Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**
Hak untuk akses bidang ekonomi, hak kesehatan, pendidikan, dan budaya

RENCANA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mendukung pengembangan diri dan peningkatan kapasitas karyawan, nasabah dan mitra usaha. BTPN mengembangkan program Daya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas diri dan usaha nasabah, memberikan wadah untuk karyawan dalam pengembangan diri serta ajang kolaborasi dengan mitra-mitra yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pemberdayaan.

Program Daya dikembangkan berdasarkan kebutuhan nasabah terkait dengan permasalahan dan dukungan yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengembangan program, Daya berkolaborasi dengan mitra-mitra yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidangnya untuk terlibat dalam pembuatan materi program dan evaluasinya. Saat ini Daya memiliki mitra dari lingkungan akademisi, pelaku usaha dan profesional.

Sejalan dengan tujuan BTPN untuk meningkatkan kapasitas dan memenuhi minat karyawan, Daya membuat program *voluntary* (kerelawanan) yang bernama sahabat daya, di mana setiap karyawan dapat ikut secara aktif dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan. Program kerelawanan ini diselenggarakan di kantor pusat dan cabang-cabang BTPN di beberapa daerah. Pada tahun 2019 program sahabat daya diikuti oleh 442 peserta di 25 wilayah.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Pelaksanaan program daya terkait peningkatan kapasitas diri dan usaha nasabah pada tahun 2019 diselenggarakan di beberapa lini bisnis BTPN seperti program persiapan purnabakti untuk pegawai negeri sipil, TNI dan Polri untuk mitra purnabakti, seminar wirausaha untuk pengusaha kecil dan menengah bagi nasabah *mitra bisnis* dan seminar kesehatan untuk nasabah sinaya.

CAPAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Pada tahun 2019, program Daya diikuti oleh 1.413.694 peserta dengan 313.746 aktivitas dan 442 peserta program kerelawanan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

Komitmen Bank BTPN terkait dengan aspek tanggung jawab sosial bidang operasi yang adil, antara lain mengacu pada sejumlah regulasi yang ada. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, pelaksanaan komitmen tersebut juga mengacu pada norma penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Bank. Bank juga memiliki komitmen dalam kepatuhan terhadap seluruh regulasi, baik terkait dengan perbankan maupun pengelolaan perusahaan serta regulasi lain yang relevan dengan kegiatan bisnis Bank.

RUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

Bank BTPN telah memiliki rumusan yang diuraikan dari beragam norma, baik dalam bentuk regulasi maupun praktik bisnis terbaik yang berlaku di industri. Di antaranya, terkait dengan:

Transparansi dan Praktik jujur dalam transaksi bisnis

Rumusan terkait dengan praktik jujur, antara lain dilakukan melalui publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) secara berkala. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Kredit yang dikeluarkan pada 15 Januari 2013.

Sedangkan terkait hubungan dengan mitra bisnis, Bank senantiasa melakukan lelang terbuka dalam pengadaan yang disampaikan secara transparan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil terhadap seluruh mitra.

RENCANA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

Sejalan dengan dilakukannya merger BTPN dan SMBCI pada tahun 2019, telah dilakukan pengembangan program Daya yang berkolaborasi dengan nasabah-nasabah korporasi. Tujuan dari program adalah untuk memperluas cakupan program Daya dan meningkatkan layanan bank kepada nasabah korporasi.

Pengembangan program Daya untuk nasabah korporasi ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan nasabah dalam hal pengembangan sumber daya manusia di internal perusahaan dan kolaborasi pelaksanaan program CSR. Pengembangan program ini tetap mengacu kepada 4 (empat) Pillar daya yaitu pengembangan diri, pengelolaan keuangan individu, pengembangan usaha dan kehidupan yang berkelanjutan.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

Dalam rangka mendukung pengembangan usaha korporasi, Daya menyelenggarakan program pelatihan peningkatan kompetensi bahasa Inggris untuk karyawan dari nasabah.

Program ini diselenggarakan dengan rencana nasabah untuk melakukan pengembangan bisnisnya ke luar negeri.

Kegiatan tersebut dikembangkan dalam rangka mendukung perkembangan bisnis nasabah, membina hubungan bisnis jangka panjang dan memberikan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat untuk menghasilkan dampak positif dari hubungan bisnis.

Selain itu, BTPN melalui program Daya berkolaborasi dengan Djarum Foundation dalam pengembangan kapasitas guru, kurikulum, alat dan fasilitas belajar mengajar untuk beberapa sekolah di Kudus. Dengan demikian, kehadiran Bank memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

CAPAIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

Pada tahun 2019, program Daya berkolaborasi dengan 6 (enam) nasabah korporasi dengan 285 peserta program,

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Meskipun kegiatan usaha BTPN tidak bersentuhan secara langsung dengan lingkungan hidup, namun kondisi lingkungan hidup menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dan turut mempengaruhi kegiatan operasional Bank. Untuk itu, BTPN berkomitmen penuh untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan inisiatif yang berwawasan lingkungan hidup, seperti mengurangi penggunaan listrik dan kertas dalam kegiatan operasional Bank.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada tahun 2019, BTPN melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- **Rancangan Ramah Lingkungan**
Kebijakan BTPN yang mendukung pelestarian lingkungan salah satunya terlihat dari Kantor Pusat BTPN di Jakarta yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Saat ini, kantor yang berada di Menara BTN tersebut tercatat telah meraih sertifikasi *Gold Standard Certificate for Green Building*.

Selain itu, beberapa Kantor Cabang BTPN juga menampilkan desain eksterior yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan tanaman hidup untuk memaksimalkan ruang hijau. Hal itu mampu membantu menurunkan penggunaan energy dan menampilkan lingkungan yang asri.

- **Efisiensi Penggunaan Energi**
Untuk meminimalisir penggunaan energy, Menara BTPN memanfaatkan lampu LED untuk mengurangi konsumsi listrik serta sensor gerak dalam pengelolaan aktivitas pencahayaan. Selain itu, untuk mengotimalkan pencahayaan alami, Gedung Menara BTPN tidak dilengkapi *window blinders* serta meminimalisasi penggunaan partisi *blocking*.

- **Efisiensi Penggunaan Air**
Untuk mengurangi konsumsi air dan mendukung pelestarian lingkungan, BTPN memanfaatkan teknologi *reverse osmosis* untuk memproduksi pasokan air minum.
- **Efisiensi Penggunaan Kertas**
BTPN mendorong pemanfaatan komunikasi elektronik untuk mengurangi penggunaan kertas. Untuk itu, sejak tahun 2018, BTPN memperkenalkan Fornt End System (FES) di seluruh jaringan cabang sebagai *platform* yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi pemrosesan berbasis kertas.

Selain itu, BTPN juga mengembangkan dua *platform* digital, BTPN Wow! dan Jenius yang memanfaatkan teknologi perangkat seluler. Kedua platform tersebut mampu mengurangi kebutuhan nasabah untuk mengunjungi kantor cabang, sehingga mampu meminimalisir konsumsi kertas untuk kebutuhan transaksi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

BTPN meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan aset Bak yang paling berharga dalam mencapai keberhasilan dan menentukan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, BTPN berkomitmen untuk mengelola SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan memberikan remunerasi yang kompetitif, kesempatan untuk pengembangan pribadi dan karier, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan serta meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat aktivitas kerja.

Regulasi yang dijadikan acuan, antara lain:

- UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi

Perlakuan Adil

Memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi seluruh karyawan: tetap dan kontrak. Hal itu terkait dengan: promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, fasilitas, remunerasi.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bidang Ketenagakerjaan

Hingga tahun 2019, BTPN telah melaksanakan kegiatan CSR terkait ketenagakerjaan sebagai berikut:

- **Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja**

Proses rekrutmen SDM di BTPN dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan kerja yang sama bagi semua kandidat, baik pria maupun wanita tanpa memandang suku, agama, ras, golongan politik maupun tingkatan sosial maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif.

Pada tahun 2019, karyawan BTPN berjumlah 7.740. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.156 orang merupakan karyawan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses rekrutmen BTPN diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan antara pria dan wanita.

Dalam melakukan rekrutmen, BTPN juga mengutamakan tenaga kerja lokal (dalam negeri) sebagai bentuk pemberian kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Ketika BTPN membutuhkan keahlian tertentu yang tidak atau jarang ditemukan pada tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja asing yang direkrut bertujuan melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

- **Pelatihan dan Pengembangan Karir**

BTPN memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi dan membantu mereka dalam pengembangan karir.

Sepanjang tahun 2019, Bank menganggarkan Rp110,6 miliar untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

Lingkungan kerja yang aman dan sehat merupakan prioritas utama bagi BTPN. Hal ini diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan formal tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yang terintegrasi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan, sejak tahun 2017. Bank juga memiliki komitmen mematuhi seluruh peraturan K3 yang berlaku serta standar-standar yang relevan.

- **Hubungan Industrial**

BTPN berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang harmonis, selaras dan berkeadilan dengan seluruh karyawan. Bank juga menghormati hak karyawan untuk membentuk dan berpartisipasi dalam serikat pekerja.

Oleh Karena itu, BTPN memfasilitasi pembentukan Serikat Pekerja yang dibentuk sejak 27 September 2007 dan terdaftar dengan nomor registrasi 256/DPP. SP.BTPN-CTT.22-DISNAKER/2007 di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BTPN senantiasa berupaya membina hubungan saling mendukung dengan Serikat Pekerja melalui konsep kemitraan dan dialog. Untuk memastikan bahwa karyawan memahami hak dan tanggung jawabnya, Bank secara rutin menyebarluaskan informasi tentang peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan kepada seluruh karyawan.

- **Hidup yang Seimbang**

Guna mendorong adopsi gaya hidup yang sehat dan seimbang, Bank mendukung pendirian BTPN Club sebagai sarana di mana seluruh karyawan dapat menikmati hobinya dan bersosialisasi dengan rekan-rekan karyawan BTPN lainnya. Karyawan juga dapat bergabung dengan salah satu klub olah raga Bank: klub futsal, bulu tangkis, atletik, tenis, bowling, karate, judo dan klub olahraga lainnya, atau klub menari dan menyanyi BTPN, serta klub bagi penggemar fotografi.

- **Program Pensiun**

Bagi karyawan yang memasuki masa pensiun, BTPN menawarkan berbagai program pendukung guna mempersiapkan mereka dengan hidup setelah masa kerja profesional.

Karyawan dapat berpartisipasi dalam berbagai pilihan program pelatihan di bidang kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan persiapan mental sebelum masa pensiun.

- **Tingkat Turnover Karyawan**

BTPN menciptakan lingkungan kerja yang aman, harmonis dan kondusif dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan loyalitas dan menekan tingkat *turnover* karyawan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nasabah

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

BTPN memprioritaskan kepentingan para nasabah dengan memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan tersebut meliputi penyediaan produk-produk terbaik serta pelayanan yang konsisten, terpercaya, aman, menyeluruh, dan penuh perhatian kepada nasabah.

Selain itu, BTPN juga senantiasa memberi prioritas pada perlindungan nasabah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, kerahasiaan dan keamanan data/informasi nasabah, serta penanganan keluhan nasabah yang cepat dan mudah.

Regulasi yang menjadi acuan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN

Dalam rangka mendukung terlaksananya program literasi dan inklusi keuangan, Bank BTPN mengembangkan produk dan program yang dapat mempercepat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan dari perbankan. Program Inklusi Keuangan Bank BTPN dilakukan melalui BTPN WOW! yang menjangkau nasabah yang belum terjangkau layanan perbankan.

BTPN Wow! merupakan layanan perbankan dengan memanfaatkan teknologi telepon genggam dan didukung jasa Agen Laku Pandai yang berperan sebagai perpanjangan tangan Bank BTPN, yakni agen BTPN Wow!

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DAMPAK KEGIATAN

Bank BTPN merupakan bank umum yang dipilih oleh pemerintah untuk menjadi salah satu pemberi layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif), yaitu program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani industri perbankan.

Secara keseluruhan, sejak diluncurkan pada Maret 2015 hingga akhir tahun buku 2019, BTPN Wow! telah menyediakan layanan perbankan bagi 6,6 juta nasabah. Jumlah tersebut meningkat 12,81% dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 5,9 juta nasabah.

Sedangkan jumlah agen mencapai 301 ribu yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 264 ribu agen, telah terjadi penambahan 14,04%. Peningkatan jumlah agen ini bertujuan untuk perluasan akses dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

INFORMASI PRODUK

Seluruh informasi produk dan jasa Bank BTPN dapat diakses secara terbuka oleh nasabah melalui banyak saluran informasi. Dari seluruh cabang Bank BTPN hingga website: <http://www.btpn.com>.

Selain itu, seluruh produk yang dikeluarkan oleh Bank BTPN telah memenuhi unsur kepatuhan terhadap regulator. Sedangkan dari sisi internal, Bank juga telah melakukan uji terhadap potensi risiko dari setiap produk, sehingga setiap produk dan jasa yang dikeluarkan oleh Bank bersifat aman bagi nasabah.

SARANA, JUMLAH DAN PENANGGULANGAN PENGADUAN NASABAH

Pengaduan nasabah ditangani secara langsung dan khusus oleh Customer Care. Setiap aduan nasabah yang masuk akan diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja. Dalam hal Bank belum dapat menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan/ *service level agreement* oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK), Bank akan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB

Komitmen Bank BTPN dalam pengembangan sosial kemasyarakatan, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

INFORMASI TENTANG ISU-ISU SOSIAL YANG RELEVAN

Berdasarkan hasil survei OJK pada tahun 2016, Indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks indeks inklusi keuangan 67,8%. Pemerintah menetapkan target inklusi keuangan yang dicanangkan melalui Perpres No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019.

Sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan tersebut, BTPN mengembangkan program-program literasi dan inklusi keuangan melalui produk, layanan dan aktivitas Bank yang dikhususkan kepada kedua hal tersebut.

INFORMASI TENTANG RISIKO SOSIAL YANG DIKELOLA

Rendahnya literasi dan inklusi keuangan dimasyarakat dapat berdampak terhadap rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan yang aman. Salah satu bentuk dampak nyatanya adalah banyak masyarakat yang sudah terkena dampak dari investasi “bodong” yang tidak dapat dipercaya.

Selain itu ada beberapa risiko lain terkait dengan dampak rendahnya literasi dan inklusi keuangan seperti; masyarakat tidak mengetahui cara mengelola keuangan yang baik, tidak memiliki tujuan dari pengelolaan keuangan, melakukan penempatan instrumen investasi ditempat yang tidak sesuai dan terjebak oleh investasi yang tidak terpercaya

Mengacu kepada Peraturan dan Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat, BTPN melalui beberapa unit bisnisnya, diantaranya unit bisnis yang melayani segmen nasabah Purnabakti, menjalankan rencana kegiatan literasi keuangan bagi para nasabah BTPN Purnabakti di 8 provinsi.

Selain segmen nasabah Purnabakti, di tahun 2019 BTPN juga telah menjalankan rencana kegiatan literasi keuangan untuk masyarakat yang telah terbiasa dalam dunia *digital banking*.

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Total biaya yang telah dikeluarkan BTPN selama tahun 2019 untuk mendukung kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan adalah sebesar Rp1.575.193.488,-.

Biaya tersebut dipergunakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik yang bersifat tatap muka secara langsung, maupun melalui media digital. Tidak hanya untuk kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka pemenuhan kewajiban PUJK, BTPN juga telah melakukan kegiatan

literasi keuangan melalui berbagai program lain yang telah berjalan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Selama tahun 2019, pelaksanaan kegiatan literasi keuangan untuk pemenuhan kewajiban BTPN selaku PUJK telah berjalan di berbagai daerah sesuai dengan rencana. Di antaranya, pelaksanaan diskusi tentang “*Managing Good Financial Habit*” bersama Co.Create Club di Bandung, diskusi tentang Literasi Keuangan bersama nasabah segmen Purnabakti di BTPN Kantor Cabang Banda Aceh, dan lain sebagainya.

Selain kegiatan khusus literasi keuangan yang telah direncanakan di awal terkait ketentuan OJK, Bank BTPN sendiri juga telah melakukan kegiatan literasi keuangan yang diberikan melalui berbagai program lainnya yang telah berjalan sejak lama. Misalnya adalah program persiapan pensiun bagi nasabah BTPN segmen Purnabakti, program kerelawanan, program literasi keuangan bagi nasabah Jenius, serta program literasi keuangan bagi karyawan dari nasabah segmen korporasi.

DAMPAK KEGIATAN

Dampak dari kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan nasabah dan masyarakat dalam kegiatan literasi keuangan yang diselenggarakan oleh Bank BTPN. Terkait dengan hal itu, total jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan khusus untuk pemenuhan kewajiban BTPN selaku PUJK selama tahun 2019 adalah sebanyak 2.732 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari nasabah, hingga non nasabah BTPN.

Laporan Keuangan 2019



PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/*FORMERLY PT BANK TABUNGAN*
***PENSIUNAN NASIONAL Tbk*)**
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018/
*YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
PT BANK BTPN TBK DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
PT BANK BTPN TBK AND SUBSIDIARY**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Ongki Wanadjati Dana
Alamat Kantor : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Alamat Rumah : Jl. Bungur Besar No.97
RT/RW 010/001, Kel. Kemayoran
Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 30026200
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Hanna Tantani
Alamat Kantor : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Alamat Rumah : Jl. Pegangsaan Indah Barat A1/40
Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara
Nomor Telepon : (021) 30026200
Jabatan : Direktur Keuangan

1. Name : Ongki Wanadjati Dana
Office address : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Residential address : Jl. Bungur Besar No.97
RT/RW 010/001, Kel. Kemayoran
Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Telephone : (021) 30026200
Title : President Director
2. Name : Hanna Tantani
Office address : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Residential address : Jl. Pegangsaan Indah Barat A1/40
Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara
Telephone : (021) 30026200
Title : Finance Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary;
2. The consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

JAKARTA,
23 Maret/March 2020

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

Ongki Wanadjati Dana
Direktur Utama/
President Director

Hanna Tantani
Direktur Keuangan/
Finance Director



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00090/2.1005/AU.1/07/0851-1/1/III/2020

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank BTPN Tbk:

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk (dahulu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan, yang berisi suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No.: 00090/2.1005/AU.1/07/0851-1/1/III/2020

The Shareholders,
The Board of Commissioners and Board of Directors
PT Bank BTPN Tbk:

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk (formerly PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk) and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free of material misstatement.



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi komparatif

Kami membawa perhatian ke Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian yang menunjukkan bahwa informasi komparatif tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah disajikan kembali. Opini kami tidak dimodifikasi terkait dengan hal ini.

Laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk (dahulu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk) dan entitas anaknya tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (darimana laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2018 berasal), tidak termasuk penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian, telah diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan tersebut masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019 dan 2 Februari 2018.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank BTPN Tbk and its subsidiary as of 31 December 2019, and their consolidated financial performance and their consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Comparative information

We draw attention to Note 48 to the consolidated financial statements which indicates that the comparative information presented as of and for the year ended 31 December 2018 has been restated. Our opinion is not modified in respect of this matter.

The consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk (formerly PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk) and its subsidiary as of and for the year ended 31 December 2018 and 31 December 2017 (from which the consolidated statement of financial position as of 1 January 2018 has been derived), excluding the adjustments described in Note 48 to the consolidated financial statements, were audited by other auditors who expressed an unmodified opinion on those statements on 23 January 2019 and 2 February 2018, respectively.



Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan konsolidasian tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kami mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian yang diterapkan untuk menyajikan kembali informasi komparatif tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2018. Kami tidak ditugaskan untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan konsolidasian tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (tidak disajikan), maupun atas laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2018, selain yang berkaitan dengan penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Namun, menurut opini kami, penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat.

Hal lain

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam Lampiran 1 sampai dengan 4, yang terdiri dari laporan posisi keuangan PT Bank BTPN Tbk (entitas induk saja) tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian dan menurut opini kami disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

As part of our audit of the consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2019, we audited the adjustments described in Note 48 to the consolidated financial statements that were applied to restate the comparative information presented as of and for the year ended 31 December 2018 and the consolidated statement of financial position as of 1 January 2018. We were not engaged to audit, review, or apply any procedures to the consolidated financial statements as of and for the years ended 31 December 2018 or 31 December 2017 (not presented herein) or to the consolidated statement of financial position as of 1 January 2018, other than with respect to the adjustments described in Note 48 to the consolidated financial statements. Accordingly, we do not express an opinion or any other form of assurance on those respective consolidated financial statements taken as a whole. However, in our opinion, the adjustments described in Note 48 are appropriate and have been properly applied.

Other matter

Our audit was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements as a whole. The supplementary information included in Appendix 1 to 4, which comprises the statement of financial position of PT Bank BTPN Tbk (parent entity only) as of 31 December 2019, and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements and in our opinion is fairly stated, in all material respects, in relation to the consolidated financial statements as a whole.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta Widjaja & Rekan

Liana Lim, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0851

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018*
DAN 1 JANUARI 2018/31 DESEMBER 2017*

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018*
AND 1 JANUARY 2018/31 DECEMBER 2017*

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		1 Januari/ January 2018/ 31 Desember/ December 2017*	
		2019	2018*		
ASET					ASSETS
Kas	2h, 4	2,299,062	1,838,136	1,496,785	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2h, 2j, 5	8,987,079	5,248,644	5,098,341	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain:					Current accounts with other banks
- Pihak ketiga		331,454	819,552	475,913	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 38	725,450	21,912	12,029	Related parties -
	2h, 2j, 6	1,056,904	841,464	487,942	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain		8,839,876	11,720,619	8,489,491	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima		74,228	29,284	16,449	Accrued interest income
	2h, 2k, 7	8,914,104	11,749,903	8,505,940	
Efek-efek					Marketable securities
- Pihak ketiga		10,568,519	6,806,407	6,337,831	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 38	86,105	-	-	Related parties -
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		48,233	60,099	28,711	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(6)	-	-	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2l, 8	10,702,851	6,866,506	6,366,542	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		-	1,591,672	2,495,409	Securities purchased under resale agreements
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		-	8,283	5,378	Accrued interest/margin income
	2h, 2m, 9	-	1,599,955	2,500,787	
Tagihan derivatif					Derivative receivables
- Pihak ketiga		778,690	-	2,338	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 38	61,682	-	-	Related parties -
	2h, 2n, 10	840,372	-	2,338	
Tagihan akseptasi					Acceptance receivables
- Pihak ketiga		1,692,460	-	-	Third parties -
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(69)	-	-	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2o, 11	1,692,391	-	-	
Pinjaman yang diberikan:					Loans:
- Pihak ketiga		130,627,900	60,840,986	59,277,279	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 38	2,132,709	18,632	21,285	Related parties -
Pembiayaan/piutang syariah:					Sharia financing/receivables:
- Pihak ketiga		8,999,574	7,277,162	6,053,273	Third parties -
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		827,359	605,519	749,095	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(1,467,199)	(1,134,065)	(794,115)	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2p, 12	141,120,343	67,608,234	65,306,817	
Penyertaan saham	2h, 2q	22,522	22	22	Investment in shares
Beban dibayar dimuka	2r, 2aj, 13, 48	2,234,521	2,227,078	2,285,183	Prepayments
Pajak dibayar dimuka	2ad, 14a	321,312	53,308	53,308	Prepaid taxes
Dipindahkan		178,191,461	98,033,250	92,104,005	Carry forward

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018*
DAN 1 JANUARI 2018/31 DESEMBER 2017*

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018*
AND 1 JANUARY 2018/31 DECEMBER 2017*

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		1 Januari/ January 2018/ 31 Desember/ December 2017*	
		2019	2018*		
ASET (lanjutan)					ASSETS (continued)
Pindahan		178,191,461	98,033,250	92,104,005	Carried forward
Aset pajak tangguhan	2ad, 14f	144,874	215,734	165,935	Deferred tax assets
Aset tetap		3,751,845	3,388,416	2,994,068	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(1,858,099)	(1,601,689)	(1,333,948)	Less: Accumulated depreciation
	2s, 15	<u>1,893,746</u>	<u>1,786,727</u>	<u>1,660,120</u>	
Aset tak berwujud		2,197,397	1,663,685	1,281,387	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(1,128,855)	(722,855)	(512,325)	Less: Accumulated amortization
	2t, 16	<u>1,068,542</u>	<u>940,830</u>	<u>769,062</u>	
Aset lain-lain		332,931	364,852	346,471	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(169)	(169)	(4,000)	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2u, 17	<u>332,762</u>	<u>364,683</u>	<u>342,471</u>	
JUMLAH ASET		<u>181,631,385</u>	<u>101,341,224</u>	<u>95,041,593</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas segera	2h, 18	18,268	15,323	49,538	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	2h, 2aa, 49	21,861	17,035	13,735	Undistributed revenue sharing
Simpanan nasabah:					Deposits from customers:
- Pihak ketiga		78,849,654	63,854,288	61,834,242	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 38	539,161	997,564	835,783	Related parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar		210,601	233,429	193,765	Accrued interest expenses
	2h, 2v, 19	<u>79,599,416</u>	<u>65,085,281</u>	<u>62,863,790</u>	
Simpanan dari bank-bank lain:					Deposits from other banks:
- Pihak ketiga		4,342,049	14,394	822,584	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 38	7,291,425	-	-	Related parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar		57,081	-	822	Accrued interest expenses
	2h, 2v, 20	<u>11,690,555</u>	<u>14,394</u>	<u>823,406</u>	
Liabilitas derivatif					Derivative payables
- Pihak ketiga		840,876	116,521	2,886	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 38	54,071	-	-	Related parties -
	2h, 2n, 10	<u>894,947</u>	<u>116,521</u>	<u>2,886</u>	
Liabilitas akseptasi					Acceptance payables
- Pihak ketiga		730,936	-	-	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 38	157,523	-	-	Related parties -
	2h, 2o, 11	<u>888,459</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Utang pajak:					Taxes payables:
- Pajak penghasilan badan		119,060	308,408	85,696	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain		117,833	103,219	91,164	Other taxes -
	2ad, 14b	<u>236,893</u>	<u>411,627</u>	<u>176,860</u>	
Dipindahkan		93,350,399	65,660,181	63,930,215	Carry forward

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018*
DAN 1 JANUARI 2018/31 DESEMBER 2017*

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018*
AND 1 JANUARY 2018/31 DECEMBER 2017*

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		1 Januari/ January 2018/ 31 Desember/ December 2017*	
		2019	2018*		
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (Lanjutan)					LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (Continued)
LIABILITAS (Lanjutan)					LIABILITIES (Continued)
Pindahan		93,350,399	65,660,181	63,930,215	Carried forward
Efek-efek yang diterbitkan:					Securities issued:
- Surat utang jangka menengah	21a	1,301,409	-	-	Medium term notes -
- Utang obligasi	21b	1,889,219	1,197,442	2,543,401	Bonds payable -
Beban bunga yang masih harus dibayar		26,286	19,875	37,376	Accrued interest expenses
	1d, 2h, 2w	<u>3,216,914</u>	<u>1,217,317</u>	<u>2,580,777</u>	
Pinjaman yang diterima:					Borrowings:
- Pihak ketiga		6,868,795	7,386,939	3,004,155	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 38	31,193,978	1,078,500	2,238,638	Related parties -
Biaya transaksi yang belum diamortisasi		(15,318)	(22,674)	(34,153)	Unamortised transaction costs
Beban bunga yang masih harus dibayar		141,471	114,109	41,567	Accrued interest expenses
	2h, 2x, 22	<u>38,188,926</u>	<u>8,556,874</u>	<u>5,250,207</u>	
Akrual	2h, 23	451,386	267,857	398,668	Accruals
Liabilitas imbalan kerja karyawan:					Employee benefits liabilities:
- Imbalan kerja jangka pendek		560,620	471,623	411,130	Short-term employee benefits -
- Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya		37,458	33,126	45,654	Post-employment benefits and other long-term employee benefits
	2y, 24	<u>598,078</u>	<u>504,749</u>	<u>456,784</u>	
Liabilitas pajak tangguhan	2ad, 14f	53,052	-	-	Deferred tax liabilities
Pinjaman subordinasi		6,038,888	-	-	Subordinated loans
Beban bunga yang masih harus dibayar		6,305	-	-	Accrued interest expenses
	2g, 2h, 2z, 25, 38	<u>6,045,193</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Liabilitas lain-lain	2h, 26	704,845	355,056	424,354	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>142,608,793</u>	<u>76,562,034</u>	<u>73,041,005</u>	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER					TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank					Non-bank
- Pihak ketiga					Third parties -
Tabungan mudharabah		104,628	113,788	92,925	Mudharabah savings
Deposito mudharabah		7,428,302	5,872,246	5,147,649	Mudharabah time deposits
- Pihak berelasi	2g, 38				Related parties -
Tabungan mudharabah		250	594	763	Mudharabah savings
Deposito mudharabah		17,484	6,232	6,711	Mudharabah time deposits
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	2aa, 27	<u>7,550,664</u>	<u>5,992,860</u>	<u>5,248,048</u>	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018*

DAN 1 JANUARI 2018/31 DESEMBER 2017*

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018*

AND 1 JANUARY 2018/31 DECEMBER 2017*

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		1 Januari/ January 2018/ 31 Desember/ December 2017*	
		2019	2018*		
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)					LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
EKUITAS					SHAREHOLDERS' EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas induk					Equity attributable to owners of the parent
Modal saham -					Share capital -
Modal dasar Rp 300.000 (31 Desember 2018: Rp 300.000 dan 1 Januari 2018/31 Desember 2017: Rp 150.000) terdiri dari: 15.000.000.000 saham (31 Desember 2018: 15.000.000.000 saham dan 1 Januari 2018/31 Desember 2017: 7.500.000.000 saham) dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham					Authorized capital of Rp 300,000 (31 December 2018: Rp 300,000 and 1 January 2018/31 December 2017: Rp 150,000) consists of: 15,000,000,000 shares (31 December 2018: 15,000,000,000 shares and 1 January 2018/31 December 2017: 7,500,000,000 shares) with par value of Rp 20 (full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.148.928.869 saham (31 Desember 2018: 5.851.646.757 saham dan 1 Januari 2018/31 Desember 2017: 5.840.287.257 saham)	2ab, 28	162,979	117,033	116,806	Issued and fully paid-up capital is 8,148,928,869 shares (31 December 2018: 5,851,646,757 shares and 1 January 2018/31 December 2017: 5,840,287,257 shares)
Tambahan modal disetor	1b	11,158,702	1,458,886	1,429,385	Additional paid-in capital
Cadangan revaluasi aset tetap		801,553	801,553	724,449	Reserve on revaluation of fixed assets
Cadangan pembayaran berbasis saham	2ac, 29	244,012	281,748	254,496	Share-based payment reserve
Cadangan nilai wajar - bersih	2l	12,176	3,527	12,875	Fair value reserve - net
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	1f	(24,267)	(24,267)	-	Transaction with non-controlling interest
Saldo laba					Retained earnings
- Dicadangkan		44,361	30,361	26,861	Appropriated -
- Belum dicadangkan	48	17,730,931	15,198,223	13,778,768	Unappropriated -
Saham tresuri	1c, 2ab	(262,404)	(262,404)	(262,404)	Treasury shares
		29,868,043	17,604,660	16,081,236	
Kepentingan non-pengendali		1,603,885	1,181,670	671,304	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		31,471,928	18,786,330	16,752,540	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		181,631,385	101,341,224	95,041,593	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND EQUITY

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

* After restatement (Note 48)

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018*
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018*
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018*	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan bunga		14,627,058	10,679,385	Interest income
Pendapatan syariah		4,457,352	3,447,266	Sharia income
	2g, 2ae, 31, 38	<u>19,084,410</u>	<u>14,126,651</u>	
Beban bunga		(7,513,059)	(4,158,571)	Interest expenses
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer		(523,587)	(367,672)	Third parties' shares on return of temporary syirkah funds
	2g, 2ae, 32, 38	<u>(8,036,646)</u>	<u>(4,526,243)</u>	
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH		<u>11,047,764</u>	<u>9,600,408</u>	NET INTEREST AND SHARIA INCOME
Pendapatan operasional lainnya:				Other operating income:
Pendapatan operasional lainnya	2af, 2ag, 33, 49	973,750	784,361	Other operating income
Keuntungan (kerugian) dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	2e, 2n, 49	586,759	(184,222)	Net gain (loss) on foreign exchange and derivative transactions
		<u>1,560,509</u>	<u>600,139</u>	
Beban operasional lainnya:				Other operating expenses:
Beban kepegawaian	2y, 2ac, 34, 2ag, 35, 48,	(3,329,635)	(2,811,122)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	49	(3,262,539)	(2,730,838)	General and administrative expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	2i, 36	(1,445,882)	(1,375,272)	Provision for impairment losses
Beban operasional lainnya	2ag, 37, 49	(537,698)	(335,559)	Other operating expenses
		<u>(8,575,754)</u>	<u>(7,252,791)</u>	
PENDAPATAN OPERASIONAL – BERSIH		<u>4,032,519</u>	<u>2,947,756</u>	NET OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional	49	5,068	5,122	Non-operating income
Beban non-operasional	49	(18,665)	(33,450)	Non-operating expenses
		<u>(13,597)</u>	<u>(28,328)</u>	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>4,018,922</u>	<u>2,919,428</u>	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2ad, 14c	(1,026,504)	(791,364)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		<u>2,992,418</u>	<u>2,128,064</u>	NET PROFIT FOR THE YEAR

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

*After restatement (Note 48)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian tertampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
 KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
 TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018***
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
 AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018***
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018*	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	2s, 15	-	77,104	Gain on revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2y	(30,767)	227,084	Remeasurements of employee benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		7,692	(56,771)	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss
		<u>(23,075)</u>	<u>247,417</u>	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2l	11,306	(8,097)	Unrealised gain (loss) on fair value changes of available for sale and measured at fair value through other comprehensive income marketable securities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(2,827)	(1,040)	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss
		<u>8,479</u>	<u>(9,137)</u>	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		<u>(14,596)</u>	<u>238,280</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK		<u>2,977,822</u>	<u>2,366,344</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		2,572,528	1,838,471	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		419,890	289,593	Non-controlling interest
		<u>2,992,418</u>	<u>2,128,064</u>	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		2,555,357	2,065,220	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		422,465	301,124	Non-controlling interest
		<u>2,977,822</u>	<u>2,366,344</u>	
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)	2ah, 41			EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)
Dasar		<u>327</u>	<u>320</u>	Basic
Dilusian		<u>324</u>	<u>312</u>	Diluted

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

*After restatement (Note 48)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018*
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018*
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributable to owners of the parent										
Cataan/ Notes	Modal ditempatkan dan disor/ penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambah modal disor/ Additional paid-in capital	Cadangan revaluasi aset tetap/ Reserve on revaluation of fixed assets	Cadangan pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Cadangan nilai wajar - bersih/ Fair value reserve - net	Transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ Transaction with non-controlling interest	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Saham tesori/ Treasury shares	Jumlah/ Total	Kepentingan non- pengendali/ Non- controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity
	117,033	1,459,886	801,563	281,748	3,527	(24,267)	30,361	15,198,223	(262,404)	17,604,860	1,181,670	18,786,330
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	2,572,528	-	2,572,528	4,199,890	2,992,418
Laba komprehensif lainnya: Perubahan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi komprehensif Perubahan nilai wajar atas aset keajaiban Efek pajak terkait	-	-	-	-	11,533	-	-	-	-	11,533	(227)	11,306
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	-	-	(2,884)	-	-	(34,427)	-	(34,427)	3,860	(30,767)
	-	-	-	-	8,649	-	-	8,607	-	5,723	(858)	4,865
	-	-	-	-	-	-	-	2,546,708	-	2,555,357	422,465	2,977,822
Cadangan umum anak perusahaan	-	-	-	-	-	-	14,000	(14,000)	-	-	-	-
Transaksi dengan kepentingan non- pengendali	-	(9,513)	-	-	-	-	-	-	-	(9,513)	(250)	(9,763)
Efekt dari penggabungan usaha	45,937	9,708,197	-	-	-	-	-	-	-	9,754,134	-	9,754,134
Ops saham: Penerimaan dari pembelian saham	9	1,132	-	-	-	-	-	-	-	1,141	-	1,141
Pembayaran berbasis saham	162,979	11,158,702	801,563	(37,736)	12,176	(24,267)	44,361	17,730,931	(262,404)	(37,736)	-	31,471,938
Saldo tanggal 31 Desember 2019	162,979	11,158,702	801,563	244,012	12,176	(24,267)	44,361	17,730,931	(262,404)	29,868,043	1,603,885	31,471,938

Charges in fair value of available for sale
and measured at fair value through
other comprehensive income
Other comprehensive income
financial assets
Remeasurement of employee
benefits liabilities
Related tax effect
Total comprehensive
income during the year
General appropriation of subsidiary
Transaction with
non-controlling interest
Effect of merger
Share option
Proceed from shares issued
Share-based payments
Balance as of 31 December 2019

*After restatement (Note 48)

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018*
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018*
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

		Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributable to owners of the parent													
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-up capital	Cadangan revaluasi aset tetap/ Reserve on revaluation of fixed assets	Cadangan pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Cadangan nilai wajar - bersih/ Fair value reserve - net	Transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ Transaction with non-controlling interest	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated earnings	Saldolaba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated earnings	Saham treasury/ Treasury Shares	Jumlah/ Total	Kepentingan pengendali/ Non- controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity			
													Balance as of 1 January 2018	Effect of restatement relating to prepayments, net of income tax	Balance as of 1 January 2018, after restatement
48	116,806	1,429,385	724,449	254,496	12,875	-	26,861	14,227,025	(262,404)	16,529,493	671,304	17,200,797			
	-	-	-	-	-	-	(448,257)	(448,257)	-	-	-	(448,257)			
	116,806	1,429,385	724,449	254,496	12,875	-	26,861	13,778,768	(262,404)	16,081,236	671,304	16,752,540			
	-	-	-	-	-	-	-	1,838,471	-	1,838,471	289,593	2,128,064			
	-	-	77,104	-	(8,379)	-	-	-	-	(8,379)	282	(8,097)			
	-	-	77,104	-	-	-	-	-	-	77,104	-	77,104			
	-	-	-	-	(869)	-	-	211,991	-	211,991	15,083	227,084			
	-	-	-	-	(869)	-	-	(62,988)	-	(53,867)	(3,844)	(57,811)			
	-	-	77,104	-	(9,348)	-	-	1,987,464	-	2,065,220	301,124	2,366,344			
	-	-	-	-	-	-	3,500	(3,500)	-	-	-	-			
1f	-	-	-	-	-	(24,267)	-	-	-	(24,267)	209,242	184,975			
30	-	-	-	-	-	-	-	(574,509)	-	(574,509)	-	(574,509)			
1c	227	29,501	-	27,252	-	-	-	-	-	29,728	-	29,728			
2ac, 29	-	-	-	281,748	3,527	(24,267)	30,361	15,198,223	(262,404)	17,604,660	1,181,670	18,786,330			
	117,033	1,458,886	801,563	281,748	3,527	(24,267)	30,361	15,198,223	(262,404)	17,604,660	1,181,670	18,786,330			

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

*After restatement (Note 48)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		14,690,431	10,782,860	<i>Receipt from interest</i>
Penerimaan dari pendapatan syariah		4,449,890	3,440,239	<i>Receipt from sharia income</i>
Pembayaran beban bunga		(7,687,456)	(4,041,871)	<i>Payments of interest expense</i>
Pembayaran hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer		(518,761)	(364,372)	<i>Payments of third parties' shares on return of temporary syirkah funds</i>
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		1,556,385	611,782	<i>Receipts from other operating income</i>
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan		113,243	124,526	<i>Recovery from written-off loans</i>
Pembayaran beban kepegawaian		(3,304,809)	(2,508,821)	<i>Payments of personnel expenses</i>
Pembayaran beban operasional lainnya		(2,831,098)	(2,765,224)	<i>Payments of other operating expenses</i>
Pembayaran lain-lain		(10,072)	(25,729)	<i>Other payments</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan		(1,262,205)	(568,652)	<i>Payments of corporate income tax</i>
Arus kas sebelum perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer		5,195,548	4,684,738	Cash flows before changes in operating assets, operating liabilities and temporary syirkah funds
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi, dan dana syirkah temporer :				<i>Changes in operating assets, operating liabilities, and temporary syirkah funds :</i>
(Kenaikan) penurunan aset operasi :				<i>(Increase) decrease in operating assets :</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - jatuh tempo lebih dari 3 bulan		(2,280,000)	755,000	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks - with maturity more than 3 months</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji jual kembali		1,591,672	903,737	<i>Securities purchased under resale agreement</i>
Tagihan derivatif		(53,974)	2,338	<i>Derivative receivables</i>
Tagihan akseptasi		966,125	-	<i>Acceptance receivables</i>
Pinjaman yang diberikan		(4,980,410)	(2,520,514)	<i>Loans</i>
Pembiayaan/piutang syariah		(1,959,320)	(1,437,361)	<i>Sharia financing/receivables</i>
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				<i>Increase (decrease) in operating liabilities:</i>
Liabilitas segera		2,945	(34,215)	<i>Obligations due immediately</i>
Simpanan nasabah		(15,527,695)	2,181,827	<i>Deposits from customers</i>
Simpanan dari bank-bank lain		4,825,097	(808,190)	<i>Deposits from other banks</i>
Liabilitas derivatif		(222,689)	113,635	<i>Derivative payables</i>
Liabilitas akseptasi		(1,086,023)	-	<i>Acceptance payables</i>
Kenaikan dana syirkah temporer		1,557,804	744,812	<i>Increase in temporary syirkah funds</i>
Arus kas (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi		(11,970,920)	4,585,807	Net cash flows (used in) provided from operating activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek		(49,875,535)	(8,984,697)	<i>Purchases of marketable securities</i>
Penerimaan dari pelepasan efek-efek		50,586,393	9,182,474	<i>Proceeds from disposal of marketable securities</i>
Pembelian aset tetap		(324,700)	(382,971)	<i>Purchases of fixed assets</i>
Perolehan aset takberwujud	16	(380,234)	(392,940)	<i>Purchases of intangible assets</i>
Pengalihan kas dan setara kas sehubungan dengan penggabungan usaha		11,289,137	-	<i>Cash and cash equivalents transfer due to merger</i>
Hasil dari penjualan aset tetap		6,026	4,456	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		11,301,087	(573,678)	Net cash flows provided from (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran efek-efek yang diterbitkan		(300,000)	(1,350,000)	<i>Payments of securities issued</i>
Penerimaan dari efek-efek yang diterbitkan		1,000,000	-	<i>Proceeds from securities issued</i>
Penerimaan dari pinjaman yang diterima		172,265,489	10,287,664	<i>Proceeds from borrowings</i>
Pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima		(172,817,491)	(7,065,018)	<i>Installment payments and settlement of borrowings</i>
Pembayaran beban emisi obligasi		(9,992)	-	<i>Payments bonds issuance cost</i>
Pembayaran biaya transaksi atas pinjaman yang diterima		(7,077)	(7,297)	<i>Payments of borrowing transaction cost</i>
Pembayaran dividen		-	(574,509)	<i>Payments of dividend</i>
Hasil penerbitan saham		1,141	29,728	<i>Proceed from shares issued</i>
Dana yang diterima oleh Entitas Anak atas penawaran umum perdana		-	735,020	<i>Fund received by Subsidiary from initial public offering</i>
Imbalan yang dibayarkan kepada non-pengendali		(9,763)	(550,045)	<i>Consideration paid to non-controlling interest</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		122,307	1,505,543	Net cash flows provided from financing activities
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(547,526)	5,517,672	NET(DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(35,026)	(10,878)	EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		20,424,211	14,917,417	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		19,841,659	20,424,211	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR
Kas dan setara kas terdiri dari:				<i>Cash and cash equivalents consist of:</i>
Kas	4	2,299,062	1,838,136	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	5	8,987,079	5,248,644	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank-bank lain	6	1,056,904	841,464	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	7	6,559,876	11,720,619	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Efek-efek	8	938,738	775,348	<i>Marketable securities</i>
		<u>19,841,659</u>	<u>20,424,211</u>	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS				SUPPLEMENTAL CASH FLOWS INFORMATION
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS
Penerbitan modal saham sehubungan dengan penggabungan usaha	1b	9,754,134	-	<i>Issuance of shares in relation with merger</i>
Cadangan pembayaran berbasis saham		37,736	27,252	<i>Share-based payment reserve</i>
Pembelian aset tetap yang masih terutang		(1,402)	(1,979)	<i>Acquisition of fixed assets still payable</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Bank BTPN Tbk ("BTPN" atau "Bank") yang berdomisili di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional berdasarkan akta notaris No.31 tanggal 16 Februari 1985 dari Notaris Komar Andasasmita, S.H. Akta ini telah diubah dengan akta notaris No. 12 tanggal 13 Juli 1985 dari Notaris Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1148 Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985.

Bank diberikan izin untuk melanjutkan usaha bank sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") yang telah beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Februari 1959. Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 dan surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan Unit Usaha Syariah melalui surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008 yang telah dipindahkan ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (anak perusahaan Bank) setelah pemisahan pada tanggal 14 Juli 2014.

Bank memperoleh izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 382/PB.12/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pemberian izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Bank mulai melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa pada tanggal 16 Februari 2016.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar secara lengkap dituangkan dalam Akta Nomor 22 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, di mana Bank resmi mengubah namanya menjadi PT Bank BTPN Tbk.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Bank BTPN Tbk ("BTPN" or the "Bank") domiciled in Southern Jakarta formerly under the name of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional based on notarial deed No. 31 dated 16 February 1985 of Notary Komar Andasasmita, S.H. The deed was amended by notarial deed No. 12 dated 13 July 1985 of Notary Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. The Articles of Association was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-4583HT01.01TH.85 dated 25 July 1985 and published in Supplement No. 1148 to State Gazette No. 76 dated 20 September 1985.

The Bank was given permission to carry on the bank business as a continuity from Association of Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") which commenced its commercial operations on 16 February 1959. The Bank obtained license to operate as commercial bank based on Decree of Ministry of Finance of the Republic Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 dated 22 March 1993 and the letter of Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd dated 22 April 1993. The Bank also obtained a license to operate its Sharia Business Unit by the letter of Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd dated 17 January 2008 which has been transferred to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (the Bank's subsidiary) after a spin-off on 14 July 2014.

The Bank obtained license to conduct foreign exchange activities based on Decree of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 382/PB.12/2015 dated 22 December 2015 regarding approval in conducting foreign exchange activities. The Bank has begun to operate as a foreign exchange bank on 16 February 2016.

The Bank's Articles of Association have been amended several times. The complete amendment as specified into the Deed Number 22 dated 21 January 2019 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Letter Number AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 dated 22 January 2019, where the Bank formally changed its name to PT Bank BTPN Tbk.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Bank dilakukan dalam rangka Peningkatan Modal Disetor/Ditempatkan Bank sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Bank ("Program ESOP") sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 29 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0318547 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BTPN Tbk. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Bank sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Nomor 16 tanggal 11 September 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0333131 tanggal 18 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Tbk.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan serta kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang termasuk melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Sumitomo Mitsui Banking Corporation merupakan pemegang saham dengan pengaruh signifikan (kepemilikan saham sebesar 40%) dan pada tanggal 30 Januari 2019 telah menjadi pemegang saham pengendali atas Bank.

Pemegang saham terakhir (*ultimate shareholders*) dari Perseroan adalah Sumitomo Mitsui Financial Group.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The latest amendment of Articles of Association was made in relation with the Increase of the Issued/Paid Up Capital regarding exercise of Employee Stock Option Program to the Employee of the Bank ("ESOP Program") as specified in the Deed Number 29 dated 12 August 2019 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human right of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0318547 dated 23 August 2019 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association of PT Bank BTPN Tbk. The latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank as specified in the Deed Number 16 dated 11 September 2019 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0333131 dated 18 September 2019 regarding Acceptance of Notification of the Company's Data Changes of PT Bank BTPN Tbk.

In accordance with Article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services including capital investment in bank conducting business based on sharia principles, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

As of 31 December 2018, Sumitomo Mitsui Banking Corporation was the shareholder with significant influence (40% of shares ownership) and as of 30 January 2019 has become the Bank's controlling shareholder.

The ultimate shareholders of the Company's is Sumitomo Mitsui Financial Group.

The Bank's head office is located at Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Jaringan distribusi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2019
Kantor Cabang	84
Kantor Cabang Pembantu	285
ATM dan TCR	226
Payment Points	164
Kantor Fungsional	46
	805

Jumlah karyawan PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak ("Bank dan Entitas Anak") pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing adalah 19.235 dan 19.175 karyawan (tidak diaudit).

b. Penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 09 tertanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah disetujui Rencana Penggabungan Usaha PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") dengan Bank, dimana SMBCI bertindak sebagai bank yang menggabungkan diri dan Bank bertindak sebagai bank penerima penggabungan, yang berlaku sejak seluruh persetujuan yang disyaratkan diperoleh ("Tanggal Efektif Penggabungan").

Penggabungan menjadi efektif pada tanggal 1 Februari 2019, setelah diperolehnya persetujuan dari (i) OJK melalui surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 35/KDK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) SMBCI ke dalam Bank; (ii) Japan Financial Services Agency (JFSA) melalui surat Pengawas Perbankan No. 1788 dan No. 1789 tertanggal 18 Januari 2019 perihal Persetujuan *Subsidiarization*; dan (iii) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-0006169.AH.01.10. Tahun 2019 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BTPN Tbk dan surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0044411 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Tbk serta surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-AH.01.10-0006176 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank BTPN Tbk.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

Distribution network as of 31 December 2019 and 2018 (unaudited) was as follows:

	31 Desember/ December 2018	
	84	Branches
	298	Sub-Branches
	227	ATM and TCR
	326	Payments Points
	87	Functional Branches
	1,022	

As of 31 December 2019 and 2018 PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary ("Bank and Subsidiary") had 19,235 and 19,175 employees, respectively (unaudited).

b. Merger with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Based on the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 5 October 2018 as stipulated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 09 dated 5 October 2018 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, it has approved the Proposed Merger of PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") and the Bank whereby SMBCI acted as the Merging Bank and the Bank acted as the Merger-Recipient Bank or surviving bank, effective as of all the required approval being obtained ("Effective Merger Date").

*The Merger became effective on 1 February 2019, after obtaining the approval from (i) OJK through Decree of Board of Commissioners of OJK Number 35/KDK.03/2018 dated 20 December 2018 regarding the Merger Approval of SMBCI into the Bank; (ii) Japan Financial Services Agency (JFSA) through the Banking Supervisory letter No. 1788 and No. 1789 dated 18 January 2019 regarding the approval of *Subsidiarization*; and (iii) Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate of Administration of General Law by letter dated 22 January 2019 Number AHU-0006169.AH.01.10. Year 2019 regarding the Approval of Amendment of Articles of Association of Limited Liability Company PT Bank BTPN Tbk and letter dated 22 January 2019 Number AHU-AH.01.03-0044411 regarding the Acceptance of Notification of Company Data Submission of PT Bank BTPN Tbk as well as letter dated 22 January 2019 Number AHU-AH.01.10-0006176 regarding Acceptance on Notification of Merger of PT Bank BTPN Tbk.*

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (lanjutan)

Sehubungan dengan penggabungan usaha antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI"), penggabungan usaha dilakukan melalui penerbitan instrumen ekuitas BTPN kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation (pemegang saham BTPN dan SMBCI) sebesar 2.296.846.112 lembar saham biasa disetor penuh dengan nilai nominal sebesar Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Nilai wajar saham BTPN pada tanggal 1 Februari 2019 adalah Rp 4.282 (nilai penuh) per lembar saham. Rasio konversi atas konversi saham SMBCI menjadi saham BTPN adalah sebesar 799,1971.

Penggabungan usaha antara BTPN dan SMBCI merupakan transaksi penggabungan usaha entitas sepengendali. Pada tanggal efektif merger, baik BTPN dan SMBCI merupakan entitas sepengendalian dan hubungan sepengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok yang sama dan bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi. Oleh karena itu, transaksi ini diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*).

Selisih nilai transfer entitas sepengendali di atas dicatat sebagai tambahan modal disetor. Atas transaksi ini, Bank mencatat tambahan modal disetor dan agio saham masing-masing sebesar Rp 45.937 dan Rp 9.708.197.

Tabel berikut ini merangkum jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal penggabungan usaha:

	1 Februari/ February 2019
ASET	
Kas	23,195
Giro pada Bank Indonesia	6,793,162
Giro pada bank-bank lain	4,472,780
Efek-efek - bersih	4,390,582
Tagihan derivatif	786,398
Pinjaman yang diberikan - bersih	68,375,817
Tagihan akseptasi	2,658,516
Penyertaan saham	22,500
Beban dibayar dimuka	54,745
Pajak dibayar dimuka	61,988
Aset tetap	145,056
Aset takberwujud	106,267
Aset lain-lain	59,817
Jumlah aset	87,950,823

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Merger with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (continued)

In relation with merger between PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI"), the merger was conducted through the issuance of equity instrument of BTPN to Sumitomo Mitsui Banking Corporation (the shareholder of both BTPN and SMBCI) of 2,296,846,112 fully paid ordinary shares of BTPN with nominal value amounting to Rp 20 (full amount) per share.

The fair value of BTPN's shares as of 1 February 2019 was Rp 4,282 (full amount) per share. Conversion ratio of the conversion of SMBCI's share into BTPN's share was 799.1971.

The merger between BTPN and SMBCI is a business combination under common control transaction. As at the effective date of merger, both BTPN and SMBCI are entites under common control and the common control relationship is not transitory. Business combination transaction between entites under common control is done in the event of reorganisation of entites under the same group which does not constitute change in ownership by economic substance. Therefore, the transaction is recognised at carrying amount under pooling of interest method.

Net transfer under common control entites above was recorded as additional paid-in capital. As a result of this transaction, the Bank recorded additional share capital and paid-in capital amounting to Rp 45,937 and Rp 9,708,197, respectively.

The following table summarized the amounts of the assets acquired and liabilities assumed on merger date:

	1 Februari/ February 2019
ASSETS	
Cash	
Current accounts with Bank Indonesia	
Curent accounts with other banks	
Marketable securities - net	
Derivative receivables	
Loans - net	
Acceptance receivables	
Investment in shares	
Prepayments	
Prepaid taxes	
Fixed assets	
Intangible assets	
Other assets	
Total assets	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (lanjutan)

LIABILITAS

Simpanan nasabah	30,136,739
Simpanan dari bank-bank lain	6,871,941
Liabilitas akseptasi	1,974,482
Liabilitas derivatif	1,001,115
Utang pajak	111,343
Efek-efek yang diterbitkan	1,314,228
Pinjaman yang diterima	30,221,176
Akrual	30,860
Liabilitas imbalan kerja karyawan	-
Liabilitas pajak tangguhan	174,014
Pinjaman subordinasi	6,108,270
Liabilitas lain-lain	252,521
Jumlah liabilitas	78,196,689
Jumlah aset bersih teridentifikasi	9,754,134

Karena BTPN maupun SMBCI tidak dalam satu entitas pengendali yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation pada tanggal 31 Desember 2018, maka informasi komparatif tahun 2018 sebagaimana disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 hanya termasuk laporan keuangan konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (sebelum menjadi PT Bank BTPN Tbk) untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 8 Juni 2007, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia.

Bank melakukan penawaran umum perdana atas 267.960.220 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 2.850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Maret 2008.

Penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 25 November 2010, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("HMETD I"), dengan cara mengeluarkan saham dari portepel Bank.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Merger with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (continued)

LIABILITIES

Deposits from customers
Deposits from other banks
Acceptance payables
Derivative payables
Taxes payable
Securities issued
Borrowings
Accruals
Employee benefits liabilities
Deferred tax liabilities
Subordinated loans
Other liabilities
Total liabilities
Total identifiable net assets

As both BTPN and SMBCI were not under common control of Sumitomo Mitsui Banking Corporation as of 31 December 2018, the 2018 comparative information as presented in the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 includes only the consolidated financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (before changed to PT Bank BTPN Tbk) for the year ended 31 December 2018.

c. Changes in Capital Due to Corporate Action

Initial Public Offering (IPO)

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 8 June 2007, the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares at Indonesia Stock Exchange.

The Bank undertook an initial public offering of 267,960,220 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 2,850 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares was listed at Indonesia Stock Exchange on 12 March 2008.

Increase of Capital through Pre-Emptive Right ("HMETD")

Based on Extraordinary General Shareholders Meeting ("EGSM") dated 25 November 2010, the shareholders approved the Bank's plan to increase the Bank's share capital through the issuance of Pre-Emptive Right I ("HMETD I"), by issuing shares from the Bank's unissued shares.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi
(lanjutan)**

**Penambahan modal melalui Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) (Lanjutan)**

Pada tanggal 10 Desember 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 188.787.238 saham baru atas nama dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 943.936.190 saham menjadi sejumlah 1.132.723.428 saham.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 18.878 dan agio saham sebesar Rp 1.293.458.

Pemecahan saham

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 Februari 2011, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 20 (nilai penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 1.132.723.428 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham akan menjadi sejumlah 5.663.617.140 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 28 Maret 2011 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 5.606.980.970 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Peningkatan modal melalui *Convertible Loan*

Pada tanggal 14 Maret 2012, Bank telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dengan mengeluarkan 176.670.117 saham baru dari portepel kepada International Finance Corporation (“IFC”) sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement*. Setelah itu, saham tersebut telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Total modal disetor dan ditempatkan Bank setelah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjadi 5.840.287.257 saham.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 3.533 dan agio saham sebesar Rp 135.927.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**c. Changes in Capital Due to Corporate Action
(continued)**

**Increase of Capital through Pre-Emptive
Right (“HMETD”) (Continued)**

On 10 December 2010, the Bank’s shares were listed at the Indonesia Stock Exchange with 188,787,238 new registered shares with value of Rp 100 (full amount) per share, accordingly, the number of shares issued and fully paid changed from 943,936,190 to 1,132,723,428 shares.

The Bank obtained Rp 18,878 additional share capital and Rp 1,293,458 additional paid-in capital.

Stock split

Based on EGSM dated 25 February 2011, the shareholders approved the Bank’s plan to split share from nominal value of Rp 100 (full amount) to Rp 20 (full amount) per share; accordingly, it changed the number of shares issued and fully paid from 1,132,723,428 shares with nominal value of Rp 100 (full amount) per share to 5,663,617,140 shares with nominal value of Rp 20 (full amount) per share.

On 28 March 2011, the Bank’s shares were listed at the Indonesia Stock Exchange for 5,606,980,970 shares with nominal value of Rp 20 (full amount) per share.

Capital increase through Convertible Loan

On 14 March 2012, the Bank obtained an approval to increase issued and paid-up capital by issuing 176,670,117 shares from the Bank’s unissued shares to International Finance Corporation (“IFC”) in accordance with terms and condition in the Convertible Loan Agreement. Afterwards, those Bank’s shares were listed at Indonesia Stock Exchange. Total issued and paid-up capital of the Bank after the Capital Increases without Pre-Emptive Rights was 5,840,287,257 shares.

The Bank obtained Rp 3,533 additional share capital and Rp 135,927 additional paid-in capital.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi
(lanjutan)**

Pembelian kembali saham

Melalui surat OJK No. S-20/PB.31/2016 tanggal 18 Februari 2016, Perseroan telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham. Dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Bank, jumlah alokasi dana tidak melebihi Rp 535.500 untuk membeli sebanyak-banyaknya 150.000.000 saham atau 2,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Bank, yang akan dilakukan dalam periode dari tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 23 Mei 2016. Sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, Bank telah membeli kembali saham Bank sebanyak 95.198.900 lembar saham (nilai penuh) dengan total dana pembelian sebesar Rp 262.874.

Tujuan dari pembelian kembali saham adalah untuk memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien dan memungkinkan untuk menurunkan keseluruhan biaya modal, meningkatkan laba per saham (*EPS*), serta *Return on Equity (ROE)* secara berkelanjutan.

Pelaksanaan opsi saham

Seperti yang dijelaskan di Catatan 29, Bank memberikan program pembayaran berbasis saham untuk personel manajemen dan karyawan tertentu ("Program MESOP 2015-2020" dan "Program ESOP 2016-2021").

Sehubungan dengan Periode Pelaksanaan Program MESOP 2015-2020, terdapat 2 periode pelaksanaan yang berlangsung selama tahun 2019, yang setiap periodenya dimulai sejak tanggal 6 Mei 2019 (Periode V) dan 2 Desember 2019 (Periode VI), masing-masing selama 30 hari bursa.

Sehubungan dengan Periode Pelaksanaan Program ESOP 2016-2021, terdapat 3 periode pelaksanaan yang berlangsung selama tahun 2019, yang setiap periodenya dimulai sejak tanggal 17 Desember 2018 (Periode II), 28 Mei 2019 (Periode III) dan 19 Desember 2019 (Periode IV), masing-masing selama 30 hari bursa.

Total opsi saham yang dieksekusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atas Program ESOP 2016-2021 adalah 11.795.500 lembar saham yang diterbitkan pada harga sebesar Rp 20 per lembarnya. Harga saham pada saat eksekusi adalah sebesar Rp 2.617 per lembar.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**c. Changes in Capital Due to Corporate Action
(continued)**

Shares buyback

The Bank was approved by OJK to conduct shares buyback through its letter No. S-20/PB.31/2016 dated 18 February 2016. In the implementation of shares buyback by the Bank, the allocated fund up to Rp 535,500 to buy up to 150,000,000 shares or 2.57% of the Bank's issued and fully paid-up capital shall be done between 23 February 2016 and 23 May 2016. Up to 23 May 2016, the Bank had repurchased 95,198,900 (full amount) shares amounting to Rp 262,874.

The objective of conducting shares buyback is to provide flexibility to achieve an efficient capital structure and enable the Bank to lower the overall cost of capital, increasing the Earnings per Share (EPS) and Return on Equity (ROE) on an on-going basis.

Share option execution

As explained in Note 29, the Bank provides share-based payment program to certain management personnel and employees ("MESOP 2015-2020 Program" and "ESOP 2016-2021 Program").

In relation to the Exercise Period of MESOP 2015-2020 Program, there were 2 exercise periods during 2019, in which each period commenced from 6 May 2019 (Period V) as well as 2 December 2019 (Period VI), for 30 trading days each.

In relation to the Exercise Period of ESOP 2016-2021 Program, there were 3 exercise periods during 2019, in which each period commenced from 17 December 2018 (Period II), 28 May 2019 (Period III) as well as 19 December 2019 (Period IV), for 30 trading days each.

Options exercised resulted up to 31 December 2019 from ESOP Program 2016-2021 are 11,795,500 shares being issued at price of Rp 20 per share. The share price at execution date amounted to Rp 2,617 per share.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi
 (lanjutan)

Pelaksanaan opsi saham (lanjutan)

Perubahan modal disetor terkait periode pelaksanaan Program MESOP 2015-2020 dan ESOP 2016-2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana disebut di paragraf sebelumnya telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk No. 29 tanggal 12 Agustus 2019, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0318547 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 236 dan agio saham sebesar Rp 30.633.

d. Efek-efek yang diterbitkan

Surat utang jangka menengah

Nama/Name	Pernyataan efektif/ Effective notification	Persetujuan/ Approval	Jumlah pokok/ Nominal value	Jangka waktu/ Tenor	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate
Medium Term Notes ("MTN") II Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	14 Juni/June 2017	Dinyatakan efektif oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jumbo MTN No. SMBC-I/02/MF3/0617/Became effective by the Indonesia Central Securities Depository as stated in Sertifikat Jumbo MTN No. SMBC-I/02/MF3/0617	1,302,000	3 tahun/years	14 Juni/June 2020	8.25%

MTN tersebut diterbitkan oleh PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebelum dilakukan penggabungan usaha dengan Bank. PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atas seluruh MTN yang diterbitkan Bank.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Changes in Capital Due to Corporate Action
 (continued)

Share option execution (continued)

The changes of paid-up capital in connection to exercise period of MESOP Program 2015-2020 and ESOP Program 2016-2021 up to 31 December 2019 as mentioned in the previous paragraph has been stipulated in the Deed of Circular Resolutions of the Board of Commissioners of PT Bank BTPN Tbk No. 29 dated 12 August 2019, made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Administrative City of South Jakarta and had been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human right of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0318547 dated 23 August 2019 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association.

The Bank obtained Rp 236 additional share capital and Rp 30,633 additional paid-in capital.

d. Securities issued

Medium term notes

This MTN was issued by PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia before merger with the Bank.

PT Bank Mega Tbk acts as the Trustee for all MTN issued by the Bank.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Efek-efek yang diterbitkan (lanjutan)

d. Securities issued (continued)

Utang obligasi

Bonds payable

Nama/Name	Pernyataan efektif/ Effective registration	Persetujuan/ Approval	Jumlah pokok/ Nominal value	Jangka waktu/ Tenor	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga setahun/ Interest rate per annum
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap III Tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap III") /Bank BTPN Continuing Bonds I Phase III Year 2013 with a fixed interest rate ("Continuing Bonds I Phase III")	20 Juni/June 2011	Dinyatakan efektif oleh OJK bersamaan dengan surat efektif Obligasi Berkelanjutan I Tahap I/ Became effective by the OJK in conjunction with effective letter of Continuing Bonds I Phase I	Seri/Series B: 400,000	Seri/Series B: 5 tahun/years	5 Maret/ March 2018	8.25%
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") /Bank BTPN Continuing Bonds II Phase I Year 2013 with a fixed interest rate ("Continuing Bonds II Phase I")	26 Juni/June 2013	Dinyatakan efektif oleh OJK, melalui suratnya No.S.188/D.04/2013 / Became effective by the OJK in its letter No.S.188/D.04/2013	Seri/Series B: 350,000	Seri/Series B: 5 tahun/years	4 Juli/July 2018	8.25%
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I")/ Bank BTPN Continuing Bonds III Phase I Year 2016 with a fixed interest rate ("Continuing Bonds III Phase I")	27 Juni/June 2016	Dinyatakan efektif oleh OJK, melalui suratnya No.S-325/D.04/2016/OJK tanggal 27 Juni 2016/ Became effective by OJK by its letter No. S-325/D.04/2016 dated 27 June 2016	Seri/Series B: 300,000	Seri/Series B: 3 tahun/years	1 Juli/July 2019	8.00%
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II")/ Bank BTPN Continuing Bonds III Phase II Year 2017 with a fixed interest rate ("Continuing Bonds III Phase II")	27 Juni/June 2016	Dinyatakan efektif oleh OJK bersamaan dengan surat efektif Obligasi Berkelanjutan III Tahap V/ Became effective by the OJK in conjuctoin with effective letter of Continuance Bonds III Phase I	Seri/ Series A: 600,000 Seri/Series B: 900,000	Seri/Series A: 370 hari/days Seri/Series B: 3 tahun/years	27 Oktober/ October 2018 17 Oktober/ October 2020	6.60% 7.50%
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I") /Bank BTPN Continuing Bonds V Phase I Year 2019 with a fixed interest rate ("Continuing Bonds IV Phase I")	26 November/ November 2019	Dinyatakan efektif oleh OJK, melalui suratnya No. S-168/D.04/2019 tanggal 15 November 2019/ Became effective by OJK by its letter No. S-168/D.04/2019 dated 15 November 2019	Seri/Series A: 799.000 Seri/Series B: 201.000	Seri/Series A: 3 tahun/years Seri/Series B: 5 tahun/years	26 November/ November 2022 26 November/ November 2024	7.55% 7.75%

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Efek-efek yang diterbitkan (lanjutan)

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan Bank dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dananya dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 2019¹⁾</u>
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama (Independen)	Mari Elka Pangestu
Wakil Komisaris Utama	Chow Ying Hoong
Komisaris	-
Komisaris	Takeshi Kimoto
Komisaris (Independen)	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris (Independen)	Irwan Mahjudin Habsjah ²⁾
Direksi	
Direktur Utama	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	Kazuhisa Miyagawa
Direktur Kepatuhan (Independen)	Dini Herdini
Direktur	Yasuhiro Daikoku
Direktur	Henoch Munandar
Direktur	Adrianus Dani Prabawa
Direktur	Hirromichi Kubo
Direktur	Merisa Darwis
Direktur	Hanna Tantani ³⁾

¹⁾ Kecuali apabila dinyatakan lain, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris efektif menjabat sejak tanggal penggabungan usaha dan diangkat kembali dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Februari 2019

²⁾ Efektif diangkat dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 September 2019 untuk mengisi posisi lowong karena Bapak Tony Prasetyantono meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2019

³⁾ Efektif diangkat dengan RUPSLB tanggal 11 September 2019

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>
Ketua	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Anggota	-
Anggota	Kanaka Puradiredja
Anggota	Ivan Purnama Sanoesi

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Securities issued (continued)

All bonds payable issued by the Bank were listed at the Indonesia Stock Exchange and the funds are used for business growth in form of credit expansion.

PT Bank Permata Tbk acts as the Trustee for Continuation Bonds III Phase I and Continuation Bonds III Phase II, and PT Bank Mega acts as the Trustee for Continuation Bonds IV Phase I.

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit

As of 31 December 2019 and 2018 the composition of Board of Commissioners and Board of Directors was as follows:

	<u>31 Desember/ December 2018</u>
Board of Commissioners	
President Commissioner (Independent)	Mari Elka Pangestu
Vice President Commissioner	-
Commissioner	Chow Ying Hoong
Commissioner	Shinichi Nakamura
Commissioner (Independent)	Arief Tarunakarya Surowidjojo
Commissioner (Independent)	Irwan Mahjudin Habsjah
Board of Directors	
President Director	Jerry Ng
Deputy President Director	Ongki Wanadjati Dana
Compliance Director (Independent)	Anika Faisal
Director	Kharim Indra Gupta Siregar
Director	-
Director	Arief Harris Tandjung
Director	-
Director	-
Director	-

¹⁾ Unless stated otherwise, all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are effective as of the merger date, and to re-appointed by the Shareholders on 15 February 2019

²⁾ Effectively appointed by Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 11 September 2019 to fill the vacant position due to Mr. Tony Prasetyantono passed away on 16 January 2019

³⁾ Effectively appointed by EGMS on 11 September 2019

The composition of the Audit Committee as of 31 December 2019 and 2018 was as follows:

	<u>31 Desember/ December 2018</u>
Chairman	Irwan Mahjudin Habsjah
Member	Arief Tarunakarya
Member	Surowidjojo
Member	Kanaka Puradiredja
Member	Yosef Antonius Badilangoe

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Dini Herdini dan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Anika Faisal.

Satuan Kerja Audit Internal

Kepala Satuan Kerja Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Noerhajati Soerjo Hadi.

f. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Bidang usaha/ Business activities	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Tahun mulai operasi komersial/ year of starting commercial operations	Jumlah aset/ Total assets	
			31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018		31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	Jakarta	Perbankan/ Banking	70%	70%	2014	15,383,038	12,039,275

Entitas Anak berkantor pusat di Menara BTPN, lantai 12, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia menyetujui rencana Bank untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") melalui suratnya No. 15/10/DPBI/PBI-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., BSPD mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah ("BTPNS" atau "Entitas Anak"). Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit (continued)

Corporate Secretary

The Corporate Secretary as of 31 December 2019 was Dini Herdini and as of 31 December 2018 was Anika Faisal.

Internal Audit Unit

Head of Internal Audit as of 31 December 2019 and 2018 was Noerhajati Soerjo Hadi.

f. Subsidiary

The Bank has direct ownership in the following Subsidiary:

The head office of Subsidiary is located at Menara BTPN 12th floor, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

On 19 July 2013, Bank Indonesia approved the Bank's plan to acquire 70% shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") through its letter No. 15/10/DPBI/PBI-5/rahasia which is subject to the change of BSPD's business activities from a conventional bank into a commercial bank under sharia principles.

Pursuant to the Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 juncto Notarial Deed No. 30 dated 25 September 2013 before Hadijah, S.H., M.Kn., BSPD changed its name to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah ("BTPNS" or "Subsidiary"). The above change was subsequently approved by the Minister of Law and Human rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-50529.AH.01.02 Year 2013 dated 1 October 2013 and has been published in State Gazette No.94 year 2013, in supplement of the State Gazette No. 124084 dated 22 November 2013.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 4 Juli 2014 di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“UUS BTPN”) dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“BTPN”). Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi BSPD berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.Kep-49/D-03/2014. Izin tersebut mengubah kegiatan usaha Entitas Anak dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Entitas Anak memperoleh izin pemisahan dari OJK berdasarkan Surat No: S-17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan Entitas Anak memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

Setelah menjadi Bank Umum Syariah, Entitas Anak telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan terakhir Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta No. 8 tanggal 5 April 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0007953.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0140091 tanggal 10 April 2018 *juncto* Akta No. 178 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215425 tanggal 21 Juni 2018.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiary (continued)

On 20 January 2014, the Shareholders' Extraordinary General Meeting of the Bank which was notarised by Notarial Deed No. 8 dated 4 July 2014 before Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta approved the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“UUS BTPN”) from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“BTPN”). The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 which has been amended by PBI No. 15/14/PBI/2013 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, i.e. the approval of the conversion permit and spin-off permit.

On 22 May 2014, the Subsidiary received its permit from Bank Indonesia regarding conversion of BSPD based on the Decision Letter of Board of Commissioner of Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.Kep-49/D-03/2014. The permit changed the Subsidiary's business activities from conventional commercial bank to commercial bank which conducts business activities based on sharia principles.

On 23 June 2014, the Subsidiary received its spin-off permit from OJK based on the Letter No: S - 17/PB.1/2014. The spin-off of UUS BTPN was made under Spin-off Deed No. 8 dated 4 July 2014 and was notarised by Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. Furthermore, the spin-off became effective on 14 July 2014 and the Subsidiary started its operational activity based on sharia principles, as reported to Bank Indonesia through its letter No. S.031/DIR/LG/VII/2014 dated 17 July 2014 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Sharia Commercial Bank Resulting from the Spin-Off.

*The Subsidiary's Articles of Association have been amended several times, upon became Sharia Commercial Bank. The latest amendment of the Articles of Association was stated in the deed No. 8 dated 5 April 2018, which was notarised by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No AHU-0007953.AH.01.02. Year 2018 dated 10 April 2018 and the Letter of Acceptance of the amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0140091 dated 10 April 2018 *juncto* deed No. 178 dated 31 May 2018, which was notarised by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System as the Letter of Acceptance of the amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0215425 dated 21 June 2018.*

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Anak, maksud dan tujuan serta kegiatan Entitas Anak adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

(i) Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Entitas Anak yang dilakukan melalui surat edaran resolusi pemegang saham pada tanggal 16 November 2017, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 25 April 2018, Entitas Anak memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan surat No. S-36/D-04/2018 untuk penawaran umum saham perdana tersebut.

Entitas Anak melakukan penawaran umum perdana atas 770.370.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 975 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018. Dana yang diterima oleh Entitas Anak atas penawaran umum perdana adalah sebesar Rp 735.020 (setelah biaya emisi dan pajak).

Atas tambahan saham yang diterbitkan sehubungan dengan penawaran umum perdana Entitas Anak kepada publik, jumlah kepemilikan Bank atas Entitas Anak menurun dari 70% menjadi 63%.

(ii) Akuisisi dari kepentingan non-pengendali pada Entitas Anak

Pada tanggal 11 Mei 2018, Bank mengakuisisi 7% saham atas Entitas Anak dengan imbalan pembelian sebesar Rp 550.045. Kepentingan non-pengendali Entitas Anak pada tanggal akuisisi adalah Rp 525.778. Dengan demikian, kepemilikan Bank atas Entitas Anak kembali menjadi 70%. Dampak perubahan atas kepemilikan saham Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	2018	
Kepentingan non-pengendali yang diakuisisi	525,778	<i>Non-controlling interest acquired</i>
Imbalan yang dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali	(550,045)	<i>Consideration paid to non-controlling interest</i>
Selisih lebih imbalan uang dibayarkan yang diakui pada ekuitas Bank	(24,267)	<i>Excess of consideration paid as recorded in the Bank's equity</i>

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiary (continued)

In accordance with article 3 of the Subsidiary's Article of Association, the Subsidiary's objective and scope of activities is to engage in banking industry based on sharia principles.

(i) Initial Public Offering

Pursuant to the Subsidiary's Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 16 November 2017, the shareholders approved the plan to conduct Initial Public Offering of Ordinary Shares to public through capital market and listing of the Subsidiary's shares at the Indonesia Stock Exchange. On 25 April 2018, the Subsidiary obtained the effective notification from OJK through letter No. S-36/D-04/2018 for this initial public offering.

The Subsidiary undertook an initial public offering of 770,370,000 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 975 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares were listed at the Indonesia Stock Exchange on 8 May 2018. The funds received by the Subsidiary from the initial public offering amounting to Rp 735,020 (net of issuance costs and tax).

In relation to the additional shares issued in connection with the initial public offering of the Subsidiary to the public, the Bank's ownership in the Subsidiary decreased from 70% to 63%.

(ii) Acquisition of non-controlling interest of Subsidiary

On 11 May 2018, the Bank acquired 7% shares of Subsidiary for a purchase consideration of Rp 550,045. The non-controlling interest in Subsidiary on the date of acquisition was Rp 525,778. Therefore, the Bank's ownership in the Subsidiary became 70%. The effect of changes in the ownership interest of Subsidiary was as follows:

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

(ii) Akuisisi dari kepentingan non-pengendali pada Entitas Anak (lanjutan)

Dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali pada ekuitas adalah sebagai berikut:

	2018
Perubahan pada ekuitas:	
- Dampak atas penawaran umum perdana	209,242
- Akuisisi saham tambahan pada Entitas Anak	(24,267)
Dampak bersih pada ekuitas	184,975

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK" yang fungsinya dialihkan kepada OJK sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No. KEP 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan konsolidasian ini yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan Bank dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut "Perseroan" dan Bank secara individu disebut "Bank") telah disetujui untuk diterbitkan oleh direksi pada tanggal 23 Maret 2020.

Laporan keuangan konsolidasi ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dalam Bahasa Indonesia.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Kecuali dinyatakan secara khusus, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiary (continued)

(ii) Acquisition of non-controlling interest of Subsidiary (continued)

Effects of transactions with non-controlling interests on the equity was as follows:

	Changes in equity:
	<i>Effect on initial public offering - Acquisition of additional interest in - Subsidiary</i>
	<i>Net effect in equity</i>

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies, applied in the preparation of the Company's consolidated financial statements as of and for the years ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:

a. Statement of Compliance

The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

These consolidated financial statements have also been prepared and presented in accordance with Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK", whose function has been transferred to OJK starting 1 January 2013) rule No. VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of The Issuer or Public Company".

These consolidated financial statements which represent the consolidation of the financial statements of the Bank and its subsidiary (together referred to as the "Company" and the Bank individually as the "Bank"), were authorized for issuance by the Board of Directors on 23 March 2020.

These consolidated financial statements are presented in Indonesian and English languages. Should there be any difference in interpretation due to translation, the Indonesian version shall prevail.

b. Basis for Preparation of Consolidated Financial Statements

Figures in these consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian disusun atas basis akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, dan efek-efek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Penggunaan pertimbangan dan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan di Catatan 3.

d. Perubahan kebijakan akuntansi

Berikut ini adalah standar dan interpretasi standar yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2019 dan relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement.

The consolidated statements of cash flows present the changes in cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities. The statements of cash flows are prepared using the direct method. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and marketable securities that mature within three months from the date of acquisition, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted.

c. Use of judgments and estimates

The preparation of financial statements in conformity with SAK requires management to make judgments and estimates that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the periods in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognized in the financial statements are described in Note 3.

d. Changes in accounting policies

The following standards and interpretation of standards became effective on 1 January 2019 and are relevant to the Company's consolidated financial statements:

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

d. Changes in accounting policies (continued)

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 24 (amandemen) "Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"
- PSAK No. 26 (Penyesuaian Tahunan) "Biaya Pinjaman"
- PSAK No. 46 (Penyesuaian Tahunan) "Pajak Penghasilan"
- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka"
- ISAK No. 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

- *Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 24 (amendment) "Plan Amendment, Curtailment or Program Settlement"*
- *PSAK No. 26 (Annual Improvement) "Borrowing Costs"*
- *PSAK No. 46 (Annual Improvement) "Income Tax"*
- *Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") No. 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"*
- *ISAK No. 34 "Uncertainty Over Income Tax Treatments"*

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of the above standards did not result in significant changes to the Company's accounting policies and on the amounts reported for current or prior financial years.

e. Penjabaran Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing

e. Foreign Currency Transactions and Balances Translation

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan, dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah, the Company's functional currency, at the exchange rates prevailing at the transaction date.

Saldo akhir tahun aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB.

Year-end balances monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using exchange rate as of the reporting date (closing) as determined by Bank Indonesia, i.e. middle rates which are the average of buying rates and selling rates per Reuters at 16.00 WIB.

Kurs valuta asing utama yang digunakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

The major exchange rates used as of the reporting date were as follows (full amount):

	2019	2018	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	13.882,50	14.380,00	1 United States Dollar (USD)
1 Dolar Australia (AUD)	9.725,39	10.162,35	1 Australian Dollar (AUD)
1 Dolar Singapura (SGD)	10.315,05	10.554,91	1 Singapore Dollar (SGD)
1 Dolar Hong Kong (HKD)	1.782,75	1.836,28	1 Hong Kong Dollar (HKD)
1 Poundsterling Inggris (GBP)	18.238,14	18.311,50	1 British Poundsterling (GBP)
1 Yen Jepang (JPY)	127,81	130,62	1 Japanese Yen (JPY)
1 Euro (EUR)	15.570,61	16.440,66	1 Euro (EUR)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam valuta asing dan dari penjabaran aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing diakui pada laba rugi.

The exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of monetary assets and monetary liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortised cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortised cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Bank dan Entitas Anak.

f. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Bank and its Subsidiary.

Suatu pengendalian atas entitas anak dianggap ada bilamana Perseroan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak. Perseroan akan menilai kembali apakah memiliki kendali jika ada perubahan atas satu atau lebih unsur pengendalian. Ini termasuk situasi dimana hak protektif yang dimiliki (seperti yang dihasilkan dari hubungan pinjaman) menjadi substantif dan mengakibatkan Perseroan memiliki kekuasaan atas entitas anak.

Control over a subsidiary is presumed to exist if the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiary. The Company reassesses whether it has control if there are changes to one or more of the elements of the control. This includes circumstances in which protective rights held (e.g. those resulting from a lending relationship) become substantive and lead to the Company having power over a subsidiary.

Laporan keuangan dari entitas anak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian berakhir.

The financial statements of subsidiary are included in the consolidated financial statements from the date on which control commences until the date when control ceases.

Ketika Perseroan kehilangan kendali atas entitas anak, Perseroan menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, dan kepentingan nonpengendali terkait dan komponen ekuitas lainnya. Laba atau rugi yang timbul diakui dalam laba rugi. Kepentingan yang dipertahankan di entitas anak sebelumnya diukur sebesar nilai wajar ketika pengendalian hilang.

When the Company loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting gain or loss is recognised in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value when the control is lost.

Seluruh transaksi dan saldo antar perusahaan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

All inter-company transactions and balances are eliminated in the consolidated financial statements; accordingly, the consolidated financial statements include only transactions and balances with other parties.

Akuisisi entitas anak oleh Perseroan dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan akuisisi diukur pada nilai wajar aset yang diberikan, instrumen ekuitas yang diterbitkan, liabilitas yang terjadi atau diambil dan penyesuaian harga beli kontinjensi, jika ada, pada tanggal transaksi. *Goodwill* yang timbul dari akuisisi entitas anak diuji penurunan nilainya minimal secara tahunan. Keuntungan yang dihasilkan atas pembelian dengan diskon diakui langsung pada laba rugi. Biaya-biaya transaksi yang timbul dari akuisisi entitas anak dibebankan langsung pada laba rugi tahun berjalan.

The acquisition method is used to account for the acquisition of subsidiary by the Company. The cost of acquisition is measured at the fair value of the assets given, equity instruments issued, liabilities incurred or assumed and contingent consideration, if any, at the transaction date. Goodwill arising from the acquisition of subsidiary is tested at least annually for impairment. Any gain on bargain purchase is recognised in profit or loss immediately. Transaction costs incurred in the acquisition of subsidiary are directly expensed in the current year profit or loss.

Kepentingan nonpengendali diakui pada tanggal kombinasi bisnis dan selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan aset bersih teridentifikasi entitas anak.

Non-controlling interest is recognised at the date of initial business combination and subsequently adjusted by proportion of change in identifiable net assets of subsidiaries.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi antara pemegang ekuitas dan dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Changes in ownership interest in a Subsidiary that do not result in a loss of control are treated as transaction between equity holders and are accounted for as equity transactions.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham nonpengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas entitas anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada entitas anak tersebut.

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Perseroan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, pinjaman yang diberikan, pembiayaan/piutang syariah, penyertaan saham dan tagihan lainnya (yang disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain).

Liabilitas keuangan Perseroan terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank-bank lain, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, akrual, pinjaman subordinasi, dan liabilitas lain-lain.

h.1. Klasifikasi

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Tersedia untuk dijual;
- iii. Dimiliki hingga jatuh tempo;
- v. Pinjaman yang diberikan dan piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Basis of Consolidation (continued)

Non-controlling interest is presented as part of equity in the consolidated statements of financial position and represents the non-controlling shareholders' proportionate share in the net income for the year and equity of the subsidiary based on the percentage of ownership of the non-controlling shareholders in the subsidiary.

g. Transactions with Related Parties

In these consolidated financial statements, the term related parties is used as defined in PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures".

h. Financial Assets and Financial Liabilities

The Company's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, securities purchased under resale agreements, derivative receivables, acceptance receivables, loans, sharia financing/receivables, investment in shares and other receivables (presented as part of other assets).

The Company's financial liabilities consist of obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, derivative payables, acceptance payables, securities issued, borrowings, accruals, subordinated loans, and other liabilities.

h.1. Classification

The Company classifies its financial assets into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:

- i. Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held for trading;*
- ii. Available-for-sale;*
- iii. Held-to-maturity;*
- iv. Loans and receivables.*

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

h.1. Classification (continued)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

Financial liabilities are classified into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- i. Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities classified as held for trading;*
- ii. Financial liabilities measured at amortised cost.*

Instrumen keuangan dengan kategori untuk diperdagangkan adalah instrumen keuangan yang diperoleh atau dimiliki Perseroan terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga atau suku bunga dalam jangka pendek atau untuk lindung nilai instrumen *trading book* lainnya.

Held for trading financial instruments are those financial instruments that the Company acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing with the intention of benefiting from short-term price or interest rate movements or hedging for other trading book instruments.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perseroan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan yang tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Company has the positive intent and ability to hold to maturity, and which are not designated at fair value through profit or loss or available-for-sale.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perseroan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and that the Company does not intend to sell immediately or in the near term.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari liabilitas keuangan non-derivatif yang tidak dimiliki Perseroan untuk diperdagangkan dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial liabilities measured at amortised cost consist of non-derivative financial liabilities that are not held for trading purpose and not designated at fair value through profit or loss.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

h.1. Classification (continued)

Perseroan pada awalnya mengakui pinjaman yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

The Company initially recognises loans and deposits on the date of origination.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Perseroan memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Company commits to purchase or sell those assets.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Perseroan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

h.2. Pengakuan

h.2. Recognition

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognised initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognised initially. Such transaction costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)**

**h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)**

h.3. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

h.3. Amortised cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount, and minus any allowance for impairment losses.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi (Catatan2h.2) dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs (Note2h.2) and all fees and points paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

h.4. Penghentian pengakuan

h.4. Derecognition

Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Perseroan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perseroan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perseroan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Company is recognised as a separate asset or liability.

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

The Company derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)

h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)

h.4. Penghentian pengakuan (lanjutan)

h.4. Derecognition (continued)

Dalam transaksi dimana Perseroan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perseroan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perseroan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perseroan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

In transactions in which the Company neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Company derecognises the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Company continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

Perseroan menghapusbukkan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perseroan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

The Company writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Company determines that the financial asset is uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

h.5. Saling hapus

h.5. Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perseroan atau pihak lawan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan**

**i. Allowance for impairment losses of
financial assets**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat
berdasarkan biaya perolehan
diamortisasi dan piutang murabahah**

**i.1. Financial assets carried at amortised
cost and murabahah receivables**

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

The Bank and Subsidiary assess at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Kriteria yang digunakan oleh Perseroan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah:

The criteria used by the Company to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;
- d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

- a) *significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- b) *a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*
- c) *the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;*
- d) *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation;*
- e) *the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- f) *observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows.*

Periode yang diestimasi antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by the management for each identified portfolio.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan
biaya perolehan diamortisasi dan
piutang murabahah (lanjutan)**

**i.1. Financial assets carried at amortised
cost and murabahah receivables
(continued)**

Pada awalnya, Perseroan menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti yang dijelaskan di atas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai atau direstrukturisasi dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Initially, the Company assesses whether objective evidence of impairment for financial asset exists as described above. An individual assessment is performed on the significant impaired or restructured financial asset. The impaired financial assets which are not classified as individually significant are included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assessed.

Jika Perseroan menilai bahwa tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Company assesses that there is no objective evidence of impairment for individually assessed financial asset, both for significant and insignificant amount, hence the account of financial asset will be included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Accounts that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (kecuali kerugian yang timbul di masa depan dari pinjaman yang diberikan atau pembiayaan/piutang syariah) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut, atau dengan tingkat imbal hasil efektif awal untuk pembiayaan/piutang syariah.

The amount of loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future losses from loans and sharia financing/receivables) discounted at the financial asset's original effective interest rate, or at original effective rate of return for sharia financing/receivables.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif/tingkat imbal hasil terkini yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held to maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate/rate of return determined under the contract.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan
biaya perolehan diamortisasi dan
piutang murabahah (lanjutan)**

**i.1. Financial assets carried at amortised
cost and murabahah receivables
(continued)**

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan.

For the purpose of a collective evaluation of impairment, financial asset are grouped on the basis of similar credit risk characteristics such as considering credit segmentation and past due status.

Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau pihak lawan untuk membayar seluruh saldo terutang sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets which indicate debtors or counterparties' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

Perseroan menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *roll rates* dan *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan yang ditinjau secara kolektif.

The Company uses statistical model analysis method, namely roll rates and migration analysis methods for financial assets impairment which collectively assessed.

Pada *migration analysis method*, manajemen menentukan estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian untuk setiap portofolio yang diidentifikasi, yaitu 12 sampai 36 bulan.

In migration analysis method, management determines 12 to 36 months as the estimated and identification period between a loss occurring for each identified portfolio.

Ketika pinjaman yang diberikan atau pembiayaan/piutang syariah tidak tertagih, aset tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Aset tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

When a loan or sharia financing/receivable is uncollectible, the asset is written-off against the related allowance for impairment losses. Such assets are written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

Beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi tahun berjalan.

The provision expense of impairment losses is recognised in the current year profit or loss.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognised in the current year profit or loss.

Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan atau pembiayaan/piutang syariah yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan atau pembiayaan/piutang syariah yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

Subsequent recoveries of loans or sharia financing/receivables written off in the current year are credited to the allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans or sharia financing/receivable written off in previous year are recognised as other operating income.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i.2. Aset keuangan yang tersedia untuk
dijual**

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut di atas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif, yang merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laba rugi, dikeluarkan dari komponen ekuitas dan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar dari utang aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi tahun berjalan.

**j. Giro pada Bank Indonesia dan bank-bank
lain**

Setelah pengakuan awal, giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Giro pada Bank Indonesia termasuk giro wadiah Entitas Anak yang disajikan sebesar biaya perolehan. Giro pada bank-bank lain termasuk giro pada bank-bank lain Entitas Anak yang dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

**k. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-
bank lain**

Setelah pengakuan awal, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of
financial assets (continued)**

**i.2. Financial assets classified as available
for sale**

The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. In the case of debt instruments classified as available for sale, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is objective evidence of impairment and resulting in the recognition of an impairment loss. If such evidence exists for available for sale financial assets, the cumulative loss - measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in profit or loss, is removed from equity component and recognised in the current year profit or loss.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt financial asset classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss, such impairment loss is reversed through the current year profit or loss.

**j. Current accounts with Bank Indonesia and
other banks**

Subsequent to initial recognition, current accounts with Bank Indonesia and other banks are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Current accounts with Bank Indonesia include the Subsidiary's wadiah current accounts which are stated at acquisition cost. Current accounts with other banks include the Subsidiary's current accounts with other banks which are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

**k. Placements with Bank Indonesia and other
banks**

Subsequent to initial recognition, placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortised cost using the effective interest rate method.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain (lanjutan)

k. Placements with Bank Indonesia and other banks (continued)

Penempatan pada Bank Indonesia termasuk penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS"). FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan akad masing-masing adalah wadiah dan jualah. Penempatan pada FASBIS dan SBIS disajikan sebesar biaya perolehan.

Placements with Bank Indonesia includes placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS") and Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS"). FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short-term fund deposits under wadiah and jualah agreements, respectively. Placements of FASBIS and SBIS are stated at acquisition cost.

Penempatan Entitas Anak pada bank-bank lain disajikan sebesar saldo penempatan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The Subsidiary's placements with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

l. Efek-efek

l. Marketable securities

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), reksadana, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), wesel ekspor, obligasi korporasi, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank ("SIMA"), dan obligasi pemerintah yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal, serta wesel ekspor.

Marketable securities consist of Certificate of Bank Indonesia (SBI), mutual funds, Certificate of Deposit of Bank Indonesia (SDBI), export bills, corporate bonds, mutual fund, Certificate of Interbank Mudharabah Investment ("SIMA"), government bonds traded in the money market and capital market, and export bills.

Efek-efek (selain obligasi syariah-sukuk, SIMA, reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah) pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diperhitungkan tergantung pada klasifikasinya menjadi tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo, atau pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi atas tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

Marketable securities (other than sharia bonds-sukuk, SIMA, sharia mutual funds and other securities based on sharia principles) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently accounted for depending on their classification being available for sale, held to maturity, or loans and receivables. Refer to Note 2h for the accounting policy of available for sale, held to maturity, and loans and receivables.

Premi dan/atau diskonto diamortisasi dan dilaporkan sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Premium and/or discount is amortised and reported as interest income using the effective interest method.

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk), SIMA, reksa dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Sharia marketable securities are proof of investments based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk), SIMA, sharia mutual funds and other securities based on sharia principles.

Perseroan menentukan klasifikasi investasi pada sukuk dan efek lain berprinsip syariah yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk, sesuai dengan PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

The Company determined the classification of investments in sukuk and other securities under sharia principles which have similar characteristic with sukuk, in accordance with PSAK No. 110 (2015 Revision) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Efek-efek (lanjutan)

I. Marketable securities (continued)

1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.

1) *Measured at acquisition cost. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to collect contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the margin. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at acquisition cost plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at acquisition cost, plus unamortised portion of transaction costs that are amortised using straight-line method, minus allowance for impairment losses, if any.*

2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

2) *Measured at fair value through other comprehensive income. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and/or the results.*

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dipindahkan ke laba rugi.

At the initial recognition, investments in sukuk are measured at acquisition cost plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognised in other comprehensive income. When sukuk is derecognised, accumulated gain or loss which has previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

3) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi langsung diakui pada laba rugi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi tahun berjalan.

3) *Measured at fair value through profit or loss. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value at acquisition cost. Transaction costs are directly recognised in profit or loss. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognised in the current year profit or loss.*

Investasi dalam unit reksa dana syariah dinyatakan sebesar nilai wajar yang ditentukan berdasarkan nilai aset bersih dari reksa dana pada tanggal pelaporan. Seluruh perubahan nilai aset bersih diakui pada penghasilan komprehensif lain.

Investment in sharia mutual funds are presented at fair value which is measured based on net asset value of mutual funds at reporting date. All changes in net asset value are recognised in other comprehensive income.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

l. Efek-efek (lanjutan)

Perseroan mencatat transaksi efek-efek berupa surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali berdasarkan PSAK No. 111 "Akuntansi Wa'd". Pada saat pengakuan awal, Perseroan mengklasifikasikan surat berharga syariah yang diperoleh dari transaksi jual beli pertama dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

m. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antar harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Pada pengukuran awal, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang.

n. Tagihan dan liabilitas derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti *swap* mata uang asing, *cross currency swap*, dan *swap* suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui pada nilai wajar, dengan biaya transaksi yang terjadi diakui langsung pada laba rugi. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Marketable securities (continued)

The Company records securities in the forms of sharia marketable securities purchased under resale agreements in accordance with PSAK No. 111 "Accounting for Wa'd". At initial recognition, the Company classifies the underlying securities from the first sale and purchase transaction as measured at fair value through other comprehensive income. Gain or losses arising from changes in its fair value is recorded as other comprehensive income.

m. Securities sold under repurchase agreements and securities purchased under resale agreement

Securities sold under repurchase agreement are presented as liabilities in the consolidated statement of financial position at the agreed repurchases price less the difference between the selling price and agreed purchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest rate method as interest expense over the period commencing from the selling date of the repurchase date.

Securities purchased under resale agreements are presented as an asset in the consolidated statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

Securities purchased under resale agreement are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Securities purchased under resale agreement are classified as loans and receivable. Refer to Note 2h for the accounting policy of loans and receivables.

n. Derivative receivables and payables

In the normal course of business, the Bank enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency swap, cross currency swap, and interest rate swap.

Derivative financial instruments are recognised at their fair value, with transaction costs recognised directly in profit or loss. Derivative are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.

Gains or losses as a result of fair value changes are recognised as current year profit or loss.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Liabilitas akseptasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

**p. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah**

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Pembiayaan bersama dicatat sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank dan Entitas Anak, dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Termasuk dalam pinjaman yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang terdiri dari piutang murabahah, pembiayaan musyarakah dan pinjaman qardh.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Entitas Anak, dimana Entitas Anak membiayai kebutuhan barang untuk konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah, yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan margin yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh piutang murabahah tersebut. Setelah pengakuan awal, piutang murabahah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode imbal hasil efektif dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

o. Acceptance receivables and payables

Acceptance receivables are stated at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses, where appropriate.

Acceptance payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Acceptance receivables are classified as loans and receivables. Refer to Note 2h for the accounting policy of loans and receivables.

p. Loans and sharia financing/receivables

Loans represent disbursement of cash or cash equivalent based on agreements with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period.

Joint financing is recorded according to the proportion of risks borne by the Bank and Subsidiary and stated at amortised cost.

Loans are classified as loans and receivables. Refer to Note 2h for the accounting policy of loans and receivables.

Included in the loans are sharia financing/receivables which consist of murabahah receivables, musyarakah financing and qardh financing.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Subsidiary, whereby the Subsidiary finances the goods for consumption, investment and working capital needs of the customer, sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus directly attributable transaction costs and additional costs to obtain the respective murabahah receivables. Subsequent to the initial recognition, they are measured at amortised cost using the effective rate of return method less deferred margin income and allowance for impairment losses.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah (lanjutan)**

**p. Loans and sharia financing/receivables
(continued)**

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds with the terms that profits are shared according to the agreement, while losses are borne by each party proportionate to the amount of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Entitas Anak menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Subsidiary provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

Pinjaman qardh adalah penyaluran dana dengan akad qardh.

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh agreement.

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Entitas Anak yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Funds of qardh represent funds provided or similar claims based on an agreement or contract between the borrower and the Subsidiary, wherein the borrower should repay the loan after a specified period of time.

Pinjaman qardh diakui sebesar total dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Entitas Anak dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Imbalan tersebut diakui pada saat diterima.

A funds of qardh is recognised in the amount lent at the transaction date. The Subsidiary may receive a fee, however, this should not be stated in the agreement. The fee is recognised upon receipt.

Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for impairment losses.

Skema restrukturisasi termasuk penyesuaian kembali suku bunga, pokok bunga dan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu jatuh tempo, penjadwalan kembali pembayaran angsuran serta modifikasi persyaratan kredit.

Restructuring scheme includes interest rate, loan principal and past due interest adjustment, extension of repayment period, rescheduling of installment and modification of the term of the loan.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai kini dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Losses on loan restructurings in respect of modification of the terms of the loans are recognised only if the present value of total future cash receipts specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Penyertaan saham

Penyertaan saham merupakan investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual yang pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan karena terdiri dari efek ekuitas tanpa harga kuotasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, kecuali untuk penyertaan saham yang memiliki harga kuotasi, maka dicatat sebesar nilai wajar pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, penyertaan yang mempunyai harga kuotasi tersebut diukur pada nilai wajar.

Dividen kas yang diterima dari penyertaan saham diakui sebagai pendapatan.

r. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Beban dibayar dimuka akan diakui sebagai beban pada laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

s. Aset tetap

Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala dan apabila terdapat perubahan nilai wajar yang signifikan untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada "cadangan revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset tetap yang sama dibebankan terhadap "cadangan revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari laba komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi berjalan.

Tanah tidak disusutkan. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap selain tanah diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

q. Investment in shares

Investment in shares represents investment that is classified as available for sale financial assets which are carried at acquisition cost at initial recognition as it consists of unquoted equity securities which fair value cannot be reliably measured, except for certain investment in shares that has quoted price at initial recognition. Subsequent to initial recognition, investment in shares that have quoted price are measured at fair value.

Cash dividend received from investment in shares is recognised as income.

r. Prepayments

Prepayments are expenses which have been paid but not yet recognised as an expense in the related period. Prepayments are recognised as expenses in the profit or loss when it is amortised in accordance with the expected period of benefit.

s. Fixed assets

Land are presented at fair value based on valuations performed by certified external independent valuers which are registered with OJK. Valuations are performed on a regular basis and if there is significant change in fair value to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

The increases in the carrying amount arising on revaluation of land is credited to the "reserve on revaluation of fixed asset" as part of other comprehensive income. The decreases that offset the previous increases are debited against "reserve on revaluation of fixed asset" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to the current year profit or loss.

Land is not depreciated. When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Fixed assets other than land are recognised at cost less accumulated depreciation.

Acquisition cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the assets.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Aset tetap (lanjutan)

s. Fixed assets (continued)

Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Fixed assets, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at cost less accumulated depreciation.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

The expected useful lives of fixed assets are as follows:

	Tahun/Years	
Gedung	20	<i>Buildings</i>
Golongan I:		<i>Class I:</i>
Kendaraan bermotor	4	<i>Vehicles</i>
Perlengkapan kantor	3, 4 & 8	<i>Office equipment</i>
Golongan II:		<i>Class II:</i>
Kendaraan bermotor	3,5 & 8	<i>Vehicles</i>
Perlengkapan kantor	5 & 8	<i>Office equipment</i>
<i>Leasehold improvement</i>	<i>sesuai masa sewa/according to lease period</i>	<i>Leasehold improvement</i>

Kendaraan bermotor yang termasuk dalam golongan I adalah sepeda motor sedangkan kendaraan operasional dan kendaraan dinas untuk direktur atau komisaris termasuk dalam golongan II.

Motor vehicles classified in class I are motorcycles whilst operational vehicles and office vehicles for directors or commissioners are classified in class II.

Perlengkapan kantor yang termasuk dalam golongan I adalah mebel dan peralatan dari kayu dan rotan, mesin kantor seperti mesin tik, mesin fotokopi, komputer, laptop, alat komunikasi, alat dapur dan perlengkapan lain seperti CCTV. Sedangkan yang termasuk dalam golongan II adalah mebel dan peralatan dari logam seperti brankas, pendingin ruangan, dan generator listrik.

Office equipment classified as class I are furniture and office equipment made from wood, office machine such as typing machine, photocopy machine, computer, laptop, communication tools, kitchen set and other equipment such as CCTV. Whilst office equipment classified as class II are furniture and office equipment made from metal such as safes, air conditioning and electrical generator.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perseroan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi tahun berjalan.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. Repairs and maintenance costs are charged to the current year profit or loss.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

When fixed assets are no longer in use or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are written off in the consolidated financial statements. Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised in the current year profit or loss.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

s. Aset tetap (lanjutan)

Akumulasi biaya konstruksi bangunan serta pemasangan peralatan kantor, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan ketika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

t. Aset takberwujud

Goodwill

Goodwill dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Peninjauan atas penurunan nilai pada goodwill dilakukan setahun sekali atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai.

Piranti lunak

Piranti lunak memiliki masa manfaat yang terbatas dan diakui sebesar harga perolehan, selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai.

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi piranti lunak dan mempersiapkan piranti lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Bank dan Entitas Anak diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Fixed assets (continued)

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of office equipment are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets accounts when the construction or installation is completed. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

The asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount when the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

t. Intangible assets

Goodwill

Goodwill is carried at cost less accumulated impairment losses. Goodwill impairment reviews are undertaken annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment.

Software

Software have a finite useful life and recognised at acquisition cost, subsequently carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

Acquired computer software licences are capitalized on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software.

Costs associated with maintaining software programs are recognised as expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Bank and Subsidiary are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs that are capitalized as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Aset takberwujud (lanjutan)

t. Intangible assets (continued)

Piranti lunak (lanjutan)

Software (continued)

Pengeluaran pengembangan lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as expense when incurred. Development costs previously recognised as expense are not recognised as asset in a subsequent period.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat piranti lunak tersebut, sejak tanggal piranti tersebut siap untuk dipakai. Estimasi masa manfaat dari piranti lunak adalah 4-5 tahun.

Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful life of the software, from the date it is ready for use. The estimated useful life of software is 4-5 years.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya atau dilepas ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Intangible assets shall be derecognised or disposal when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

u. Aset lain-lain

u. Other assets

Aset lain-lain sebagian besar terdiri dari pembayaran obligasi, tagihan ATM dan transfer, jaminan sewa, aset imbalan kerja, tagihan kepada asuransi, uang muka, persediaan keperluan kantor, persediaan terkait dengan pembiayaan Syariah (murabahah) dan agunan yang diambil alih dari Entitas Anak.

Other assets mainly bonds payment, ATM transaction and transfer, rental security deposits, employee benefit assets, receivables from insurance company, advance payment, office supplies, inventories related to sharia financing (murabahah), and foreclosed collateral from Subsidiary.

Perseroan mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi pada saat terjadinya.

The Company recognises impairment losses of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At each reporting date, the Bank and Subsidiary evaluate the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. Reversal of impairment losses is recognised as gain in the profit or loss when incurred.

**v. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank-
bank lain**

**v. Deposits from customers and deposits from
other banks**

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dan Entitas Anak berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk didalamnya adalah giro, tabungan, deposito berjangka deposito *on call* dan simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank and Subsidiary based on fund deposits agreements. Included in these accounts are current accounts, saving deposits, time deposits and deposits on call and sharia deposits from customers.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**v. Simpanan nasaban dan simpanan dari
bank-bank lain (lanjutan)**

Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari giro dan tabungan wadiah. Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh-dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Entitas Anak. Giro wadiah dicatat sebesar saldo titipan pemegang giro wadiah. Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('Athaya') sukarela dari Entitas Anak.

Simpanan dari bank-bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank-bank lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito tanpa warkat dan *call money*.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain.

Simpanan dari bank-bank lain disajikan sebesar jumlah liabilitas terhadap bank lain.

w. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan mencakup surat utang jangka menengah dan utang obligasi.

Surat utang jangka menengah yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan utang obligasi, diakui sebagai beban yang ditangguhkan dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu utang obligasi tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

x. Pinjaman yang diterima

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman yang diterima diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**v. Deposits from customers and deposits from
other banks (continued)**

Sharia deposits consist of wadiah demand deposits and saving deposits. Wadiah demand deposits are wadiah yadh-dhamanah demand deposits in which the funds owner will get a bonus based on the Subsidiary's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors. Wadiah saving deposits represent third party funds which can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of voluntary bonus ('Athaya') on the part of the Subsidiary.

Deposits from other banks represent liabilities to other domestic banks, in the form of current accounts, saving deposits, term deposits, Negotiable Certificate of Deposits and call money.

Deposits from customers and deposits from other banks are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of deposits from customers and deposits from other banks.

Deposits from other banks are stated at the amounts due to other banks.

w. Securities issued

Securities issued includes medium term notes and bonds payable.

Medium term notes issued are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Bonds payable are stated at nominal value net of unamortised bond issuance cost. Costs incurred in connection with the bonds payable, are recognised as a deferred expense and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortised over the period of the bonds payable using the effective interest rate method.

x. Borrowings

Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest rate method.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

x. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

y. Imbalan kerja karyawan

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari taksiran jumlah imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan tersebut pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected-unit-credit*.

Ketika imbalan pasca-kerja berubah, porsi imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu, diakui segera dalam dalam laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja (contohnya keuntungan/kerugian aktuarial) diakui segera sebagai penghasilan komprehensif lain.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya berupa cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

z. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

x. Borrowings (continued)

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

y. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they are payable to the employees.

Post-employment benefits

The post-employment benefits liabilities are calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

When the benefits of a plan are changed, the portion of the benefits that relate to service by employees is recognised immediately in profit or loss. Remeasurements of the post-employment benefits liabilities (for example actuarial gain/loss) are recognised immediately as other comprehensive income.

Other long-term benefits

Other long-term benefits such as long service leave are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumption are recognised to the current year profit or loss.

z. Subordinated loans

Subordinated loans are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

aa. Dana syirkah temporer

aa. Temporary syirkah funds

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh Entitas Anak.

Temporary syirkah funds represent investment received by Subsidiary.

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Entitas Anak) dalam pengelolaan investasinya sesuai prinsip syariah dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Subsidiary) in the management of their investments according to sharia principle with profit distributed based on the agreement. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving accounts and mudharabah time deposits.

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Entitas Anak.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving deposits are stated based on the customer's savings deposit balance at the Subsidiary.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Entitas Anak. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Entitas Anak.

Mudharabah time deposits represent investment which can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Subsidiary. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Subsidiary.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Entitas Anak tidak berkewajiban untuk menjamin pengembalian jumlah dana awal dari pemilik dana bila Entitas Anak merugi kecuali kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability, because the Subsidiary does not have any obligation to return the initial funds to the owners if the Subsidiary experiences losses, except for losses caused by the Subsidiary's management negligence or default. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

ab. Modal saham

ab. Share capital

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Ordinary shares are classified as equity.

Tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham biasa atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang, sebesar jumlah yang diterima bersih setelah dikurangi pajak.

Incremental costs directly attributable to the issuance of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ab. Modal saham (lanjutan)

ab. Share capital (continued)

Saham tresuri

Ketika Bank membeli modal saham ekuitas (saham tresuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan kepada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank.

Treasury shares

When Bank purchases the equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Bank's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Bank's equity holders.

ac. Pembayaran berbasis saham

Bank dan Entitas Anak menyediakan program imbalan berbasis saham yang diselesaikan dengan ekuitas, dimana Bank dan Entitas Anak memberikan opsi instrumen ekuitas Bank kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Nilai wajar opsi yang diberikan diakui sebagai beban dan dengan peningkatan pada ekuitas. Jumlah nilai yang harus dibebankan ditentukan dengan mengacu kepada nilai wajar opsi pada tanggal diberikan:

ac. Share-based payments

The Bank and Subsidiary provide equity-settled share-based compensation plans, under which the Bank and Subsidiary give share option of the Bank's shares to employees in return for their services. The fair value of the options is recognised as an expense with a corresponding increase in equity. The total amount to be expensed is determined by reference to the fair value of the options at grant date:

- termasuk kinerja pasar (misalnya: harga saham Bank);
- tidak termasuk dampak dari jasa dan kondisi *vesting* yang tidak dipengaruhi kinerja pasar (misalnya profitabilitas, target pertumbuhan penjualan dan tetap menjadi karyawan Bank atau Entitas Anak selama periode waktu tertentu); dan
- termasuk dampak dari kondisi *non-vesting*.

- including any market performance conditions (for example: a Bank's share price);
- excluding the impact of any service and non-market performance vesting conditions (for example: profitability, sale growth targets and remaining an employee of the Bank or Subsidiary over a specified time period); and
- including the impact of any non-vesting conditions.

Syarat jasa dan syarat yang tidak dipengaruhi kinerja pasar dimasukkan di dalam asumsi mengenai jumlah opsi yang diharapkan akan menjadi hak (*vest*). Jumlah beban diakui selama periode *vesting*, yaitu periode dimana seluruh kondisi *vesting* tertentu telah terpenuhi.

Service conditions and non-market performance are included in assumptions about the number of options that are expected to vest. The total expense is recognised over the vesting period, which is the period over which all of the specified vesting conditions are to be satisfied.

Setiap akhir periode pelaporan, Bank dan Entitas Anak merevisi estimasi jumlah opsi yang diharapkan *vest* berdasarkan syarat jasa. Selisih antara estimasi yang direvisi dengan jumlah estimasi sebelumnya, jika ada, diakui dalam laba rugi, dengan penyesuaian pada ekuitas.

At the end of each reporting period, the Bank and Subsidiary revise their estimates of the number of options that are expected to vest based on the service conditions. The difference between the revised estimates and original estimates, if any, is recognised in the profit or loss, with a corresponding adjustment to equity.

Ketika opsi dieksekusi, Bank menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham tresurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan tambahan modal disetor.

When the options are executed, the Bank issues new shares or reissue its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share capital (nominal value) and additional paid-in capital.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini merupakan estimasi utang atau pengembalian pajak yang dihitung atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyesihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak.

Utang atau restitusi pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk ditetapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan yang tidak dapat terealisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan atas laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Bank dan Entitas Anak memperhitungkan dampak atas posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

ad. Taxation

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognised in profit or loss except to the extent that it relates to items recognised directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable or refundable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date, and includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments.

Current tax payable or refundable is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carryforwards, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised; such reductions are reversed when the probability of future taxable incomes improves.

Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognised to the extent that it has become probable that future taxable income will be available against which they can be used.

In determining the amount of current and deferred tax, the Bank and Subsidiary take into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Perpajakan (lanjutan)

ad. Taxation (continued)

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan atau banding itu diterima.

Amendments to tax obligations are recognised when an assessment is received, or if objection and or appeal is applied, when the results of the objection or the appeal are received.

ae. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

ae. Interest income and expense and sharia income and third parties' shares on return of temporary syirkah funds

(i). Konvensional

(i). Conventional

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest-bearing* dicatat dalam "pendapatan bunga" dan "beban bunga" di dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognised within "interest income" and "interest expense" in profit or loss using the effective interest rate method.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan.

The effective interest rate method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or liability and of allocating the interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Interest on impaired financial assets continues to be recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment losses.

(ii). Pendapatan syariah

(ii). Sharia income

Pendapatan pengelolaan dana oleh Entitas Anak sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual beli-margin murabahah, pendapatan bagi hasil-pembiayaan musyarakah, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Income from fund management by Subsidiary as mudharib consist of income from sales and purchases-murabahah margin, income from profit sharing-musyarakah financing and other main operating income.

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

The revenue recognition of murabahah receivables, which do not have significant risk in relation with the ownership of inventory, are recognised in profit or loss using the effective rate of return method.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**ae. Pendapatan dan beban bunga dan
pendapatan syariah dan hak pihak ketiga
atas bagi hasil dana syirkah temporer**
(lanjutan)

**ae. Interest income and expense and sharia
income and third parties' shares on return
of temporary syirkah funds (continued)**

(ii). Pendapatan syariah (lanjutan)

(ii). *Sharia income (continued)*

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh nilai tercatat piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Entitas Anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate which exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of murabahah receivables. When calculating the effective rate of return, the Subsidiary estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivables, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provisions and other forms received by the parties in a contract which are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.

Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Income from profit sharing - musyarakah financing is recognised during the period of profit sharing in accordance with the pre-determined ratio.

(iii). Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

(iii). *Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Entitas Anak. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Subsidiary's income derived from the management of their funds by the Subsidiary under mudharabah principles. Distributable income will be distributed from the cash received (cash basis).

Pendapatan marjin atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya (penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga) akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana dan Entitas Anak sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin yang tersedia tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah pemilik dana sebagai shahibul maal dan Entitas Anak sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Margin income on financing facilities and other earning assets (placements with Bank Indonesia, placements with other banks and investments in marketable securities) are distributed to fund owners and the Subsidiary based on proportion of funds used in the financing and other earning assets. Likewise, the available margin income is then distributed to fund owners as shahibul maal and the Subsidiary as mudharib based on a pre-determined ratio (nisbah).

Pendapatan marjin dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Entitas Anak, seluruhnya menjadi milik Entitas Anak, termasuk pendapatan dari transaksi Entitas Anak berbasis imbalan.

Margin income from financing facilities and other earning assets using the Subsidiary's funds, are entirely shared for the Subsidiary, including income from the Subsidiary's fee-based transactions.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

af. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aktivitas meminjam dan diakui sebagai pengurang biaya pinjaman dan nilai tercatat atas pinjaman tersebut akan diamortisasi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada umumnya pendapatan provisi dan komisi diakui menggunakan basis akrual pada saat jasa telah diberikan. Pendapatan provisi atas komitmen memberikan pinjaman yang kemungkinan besar akan dicairkan (bersama-sama dengan biaya transaksi lain yang terkait langsung) diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional lainnya atau beban operasional lainnya.

ag. Pendapatan dan beban operasional lainnya

Pendapatan operasional lainnya sebagian besar terdiri dari penerimaan kembali kredit atas hapus buku, administrasi atas pinjaman yang diberikan, denda pelunasan dipercepat, penjualan produk investasi, dan administrasi dana pihak ketiga.

Pendapatan dari komisi asuransi merupakan pendapatan yang diperoleh Bank berdasarkan persentase tertentu dari total premi yang dibayarkan oleh Bank kepada perusahaan asuransi atas nama nasabah.

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank dan Entitas Anak, yang terdiri dari jasa pihak ketiga dan perlengkapan kantor, sewa, penyusutan asset tetap, amortisasi piranti lunak, beban asuransi, promosi dan iklan. Beban tenaga kerja meliputi beban berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan dan pelatihan.

Seluruh penghasilan dan beban yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadi.

af. Fee and commission income

Fees and commissions income directly attributable to lending activity are recognised as a deduction of lending cost and will be recognised as interest income by amortising the carrying value of loan using effective interest rate method.

Fees and commissions income are generally recognised on an accrual basis when the service has been provided. Loan commitment fees for loans that are likely to be drawn down are (together with related direct costs) recognised as an adjustment to the effective interest rate on the loan.

Fees and commissions income which are not related to lending activities are recognised as revenue on the transaction date and classified under other operating income or other operating expenses.

ag. Other operating income and expenses

Other operating income mainly consists of write-off recovery, loan administration, early termination penalty and late penalty, sale of investment product, and third party fund administration income.

Insurance commission income represents the Bank's income based on certain percentage of insurance premium paid by the Bank to insurance company on behalf of customers.

General and administrative expenses represent expenses related to the Bank and Subsidiary's office and operational activities which mainly consist of service from third parties and office supplies, rent, depreciation of fixed assets, amortisation of software, insurance expense, and promotion and advertising. Personnel expense includes salaries for employees, bonuses, overtime, allowances and training.

All of these income and expenses are recorded in the consolidated statement of profit or loss when incurred.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ah. Laba per saham

ah. Earning per share

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

Basic earnings per share are computed by dividing net profit with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Bank, yaitu opsi saham.

Diluted earnings per share is calculated by dividing the weighted average number of ordinary shares outstanding plus the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by Bank, which is stock option.

Ketika opsi dieksekusi, Bank menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham treasurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan agio saham.

When the options are exercised, the Bank issues new shares or reissues its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share capital (nominal value) and share premium.

ai. Segmen operasi

ai. Operating segment

Segmen operasi adalah komponen dari Perseroan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Perseroan, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen, dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar.

An operating segment is a component of the Company that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Company's other components, whose operating results are reviewed regularly by the operating decision makers to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the operating decision makers include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

aj. Transaksi Sewa

aj. Lease Transaction

Sesuai dengan PSAK No. 30, Perseroan menentukan suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa berdasarkan substansi perjanjian dan dilakukan evaluasi apakah pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

In accordance with PSAK No. 30, the Company determines an arrangement is, or contains, a lease based on the substance of the arrangement and requires an assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

aj. Transaksi Sewa (lanjutan)

aj. Lease Transaction (continued)

Transaksi sewa yang dilakukan Perseroan diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan garis lurus selama masa sewa. Seluruh insentif untuk perjanjian sewa operasi baru atau yang diperbarui diakui sebagai bagian tidak terpisahkan dari imbalan neto yang disepakati untuk menggunakan aset sewaan, terlepas dari sifat atau bentuk insentif atau waktu pembayaran. Perseroan mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang beban rental selama masa sewa dengan dasar garis lurus.

The lease transaction entered into by the Company was classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Lease payment is recognised as an expense on a straight-line basis over the lease term. All incentives for the agreement of a new or renewal operating lease are recognised as an integral part of the net consideration agreed for the use of the leased asset, irrespective of the incentive's nature or form or the timing of payments. The Company recognises the aggregate benefit of incentives as a reduction of rental expense over the lease term, on a straight-line basis.

ak. Pengukuran nilai wajar

ak. Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perseroan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

When available, the Company measures the fair value in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Perseroan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

ak. Fair value measurement (continued)

Bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perseroan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

The best evidence of the fair value at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Perseroan mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Company measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Perseroan berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam kelompok.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Company on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Key sources of estimation uncertainty

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan-catatan di bawah ini:

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following notes:

- Catatan 24 – pengukuran liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya: asumsi-asumsi aktuarial.

- *Note 24 – measurement of post-employment benefits liabilities and other long term benefits: actuarial assumptions.*

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

**Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

- Allowance for impairment losses of financial assets.

Perseroan melakukan peninjauan kembali atas aset keuangan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan penurunan nilai yang telah dicatat. Pertimbangan manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

The Company reviews its financial assets at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgement is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

Untuk penilaian secara individu, kondisi spesifik penurunan nilai debitur dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima disetujui secara independen oleh Manajemen Risiko.

For individual assessment, the specific debtors' conditions in determining allowance for impairment amount of the financial assets is evaluated individually and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the debtors' financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by the Risk Management.

Perseroan juga membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kolektif atas eksposur piutang yang diberikan, dimana evaluasi dilakukan berdasarkan data kerugian historis.

The Company also estimates the collective impairment allowance for its receivables portfolio, where evaluation is performed based on historical data.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama dan aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

Collectively assessed impairment allowances covers credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics and financial assets that are individually insignificant. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

- Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Keakuratan cadangan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan penyisihan kolektif.

The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

Basis evaluasi atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan piutang murabahah dijelaskan pada Catatan 2i.

Basis of evaluation of impairment for financial assets and murabahah receivables is described in Note 2i.

- Penentuan nilai wajar

- Determining fair values

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Perseroan harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 2ak. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang obyektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga, dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tertentu.

The determination of fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price requires the use of valuation techniques as described in Note 2ak. For financial instruments that trade infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

Kebijakan akuntansi pengukuran nilai wajar Perseroan dibahas pada Catatan 2ak.

The company's accounting policy on fair value measurement is discussed in Note 2ak.

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan

Critical accounting judgments in applying the Company's accounting policies

- Nilai wajar atas instrumen keuangan

- Fair value of financial instruments

Kebijakan akuntansi Perseroan untuk pengukuran nilai wajar dibahas di Catatan 2ak.

The Company's accounting policy on fair value measurements is discussed in Note 2ak.

Informasi mengenai penentuan nilai wajar dari instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 43.

Information about the determination of fair value of financial instruments is disclosed in Note 43.

- Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan serta efek-efek syariah

- Financial assets and liabilities as well as sharia marketable securities classification

Kebijakan akuntansi Perseroan memberikan pilihan untuk mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan ke dalam berbagai kategori pada saat pengakuan awal berdasarkan kondisi tertentu:

The Company's accounting policies provide choices to classify financial assets and liabilities into different categories at initial recognition based on certain circumstances:

Dalam mengklasifikasikan aset keuangan sebagai "dimiliki hingga jatuh tempo", Perseroan telah menetapkan bahwa Perseroan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga tanggal jatuh tempo seperti yang dijabarkan dalam Catatan 2h.

In classifying financial assets as "held-to-maturity", the Company has determined that it has both the positive intention and ability to hold the assets until their maturity dates as set out in Note 2h.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan (lanjutan)

Dalam mengklasifikasikan investasi pada efek-efek syariah sebagai "diukur pada biaya perolehan" dan "diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain", Perseroan telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2h.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Critical accounting judgments in applying the Company's accounting policies (continued)

In classifying investment in sharia marketable securities as "measured at acquisition cost" and "measured at fair value through other comprehensive income", the Company has determined that they meet the requirements of such classification as set out in Note 2h.

4. KAS

	31 Desember/December	
	2019	2018
Rupiah	2,270,444	1,833,169
Dolar Amerika Serikat	26,954	4,967
Yen Jepang	1,664	-
	<u>2,299,062</u>	<u>1,838,136</u>

*Rupiah
United States Dollar
Japanese Yen*

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 55.866 dan Rp 58.899.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) as of 31 December 2019 and 2018 amounting to Rp 55,866 and Rp 58,899, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember/December	
	2019	2018
Rupiah	5,344,026	4,632,885
Dolar Amerika Serikat	3,643,053	615,759
	<u>8,987,079</u>	<u>5,248,644</u>

*Rupiah
United States Dollar*

Termasuk dalam saldo giro pada Bank Indonesia adalah giro berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah masing-masing sebesar Rp 458.402 dan Rp 398.552 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Included in the balance of current accounts with Bank Indonesia are current accounts based on sharia principle under wadiah contract amounting to Rp 458,402 and Rp 398,552 as of 31 December 2019 and 2018, respectively.

Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2019 and 2018, the statutory reserves were as follows:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
<u>Bank</u>			<u>Bank</u>
Rupiah			<u>Rupiah</u>
- GWM (Bank Konvensional)	6.17%	6.57%	Statutory Reserves (Conventional Bank) -
- GWM Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM")	9.53%	11.42%	Statutory Reserve Macroprudential - Liquidity Buffer ("PLM")
- GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM")*	-	-	Statutory Reserve Macroprudential - Intermediation Ratio ("RIM")*
Mata uang asing			Foreign currencies
- GWM mata uang asing	8.02%	8.28%	Foreign currencies reserve -
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiary</u>
Rupiah			<u>Rupiah</u>
- GWM (Bank Syariah)	4.91%	5.47%	Statutory Reserves (Sharia Bank) -

*) Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 rasio RIM Bank berada di atas batas yang ditentukan. Walaupun demikian, Bank tidak dikenakan GWM RIM dikarenakan rasio KPMM Bank berada di atas 14%.

*) On 31 December 2019 and 2018, the Bank's RIM ratio is above the specified limit. Nevertheless the Bank is not subject to the GWM RIM as the Bank's CAR is above 14%.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, pemenuhan GWM Primer Rupiah rata-rata adalah sebesar 6,5% dengan pemenuhan harian sebesar 3,5% dan pemenuhan secara rata-rata 3%. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2018.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, pemenuhan GWM Primer Rupiah rata-rata adalah sebesar 6% dengan pemenuhan harian sebesar 3% dan pemenuhan secara rata-rata 3%. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019.

Penyangga likuiditas makroprudensial adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Rasio Intermediasi Makroprudensial adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, jika rasio hasil perbandingan antara: kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing dan surat berharga korporasi dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki Bank terhadap DPK Bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank dan surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan, di bawah minimum target Bank Indonesia (80%) atau jika di atas maksimum target Bank Indonesia (92%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan No. 21/5/PADG/2019 tanggal 29 Maret 2019, minimum target Bank Indonesia adalah 84% dan maksimum target Bank Indonesia adalah 94%. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019.

Sesuai dengan peraturan BI mengenai giro wajib minimum ("GWM") bagi bank umum syariah yang berlaku, setiap bank diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah secara harian sebesar 1,5%, secara rata-rata sebesar 3% dan total kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar 4,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
(continued)**

Based on Board Members Regulation No. 20/30/PADG/2018 dated 30 November 2018, the required average of Rupiah Primary Statutory Reserves is 6.5% with daily fulfillment is 3.5% and average fulfillment is 3%. This regulation is effective since 1 December 2018.

Based on Board Members Regulation No. 21/14/PADG/2019 dated 26 June 2019, the required average of Rupiah Primary Statutory Reserves is 6% with daily fulfillment is 3% and average fulfillment is 3%. This regulation is effective since 1 July 2019.

Macroprudential liquidity buffer is minimum liquidity reserves that must be maintained by the Bank in the form of securities that meet certain requirements, which amount is determined by Bank Indonesia.

Macroprudential Intermediation Ratio is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of current accounts with Bank Indonesia, if the ratio of the comparison between: loans in Rupiah and foreign currencies and corporate securities in Rupiah and foreign currencies that meet certain requirements, which are owned by the Bank, against Bank's third party funds in the form of current accounts, savings deposits and time deposits in Rupiah and foreign currencies, excluding interbank funds and securities in Rupiah and foreign currencies that meet certain requirements issued by the Bank to obtain funding sources, below the minimum target of Bank Indonesia (80%) or if above the maximum target of Bank Indonesia (92%) and the Capital Adequacy Ratio ("CAR") is below Bank Indonesia requirement of 14%.

Based on Board Members Regulation No. 21/5/PADG/2019 dated 29 March 2019, minimum target of Bank Indonesia is 84% and maximum target of Bank Indonesia is 94%. This regulation has been effective since 1 July 2019.

In accordance with the prevailing BI regulations regarding minimum reserve requirements ("GWM") for sharia commercial banks, each bank is required to maintain GWM in Rupiah on daily basis of 1.5%, with an average of 3% and total obligation of GWM Rupiah of 4.5% from third party funds.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Bank dan Entitas Anak memenuhi ketentuan BI yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The Bank and Subsidiary fulfilled BI's regulations regarding Statutory Reserve Requirements as of 31 December 2019 and 2018.

6. GIRO PADA BANK-BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December	
	2019	2018
Rupiah	212,823	128,043
Mata uang asing		
Yen Jepang	575,604	1,160
Dolar Amerika Serikat	158,708	712,029
Dolar Singapura	46,378	232
Euro Eropa	35,410	-
Baht Thailand	15,955	-
Poundsterling Inggris	7,257	-
Dolar Australia	3,173	-
Mata uang asing lainnya	1,596	-
	844,081	713,421
	1,056,904	841,464

a. By currency

Rupiah

Foreign currencies
 Japanese Yen
 United States Dollar
 Singapore Dollar
 European Euro
 Thailand Baht
 Great Britain Poundsterling
 Australian Dollar
 Other foreign currencies

b. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan

	31 Desember/December	
	2019	2018
Pihak ketiga		
Rupiah	212,823	128,043
Mata uang asing	118,631	691,509
	331,454	819,552
Pihak berelasi		
Mata uang asing	725,450	21,912
	1,056,904	841,464

b. By relationship with counterparties

Third parties
 Rupiah
 Foreign currencies

Related party
 Foreign currencies

c. Berdasarkan pihak lawan

	31 Desember/December	
	2019	2018
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	166,790	123,149
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	88,832	52,612
Wells Fargo Bank NA, New York	46,598	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14,738	54,492
Citibank N.A., New York	8,657	587,444
National Australia Bank	3,173	-
Lain-lain	2,666	1,855
	331,454	819,552
Pihak berelasi		
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	725,450	21,912
	1,056,904	841,464

Third parties
 PT Bank Central Asia Tbk
 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Wells Fargo Bank NA, New York
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Citibank N.A., New York
 National Australia Bank
 Others

Related party
 Sumitomo Mitsui Banking Corporation

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK-BANK LAIN (lanjutan)

Giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas OJK. Tidak terdapat saldo giro pada bank-bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

Tingkat suku bunga rata-rata giro pada bank-bank lain per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah 0,87% dan 1,15%.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat giro pada bank-bank lain yang mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

7. PENEMPATANAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain ditempatkan pada pihak ketiga.

a. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Rupiah	4,355,828	9,865,599	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	4,484,048	1,855,020	<i>United States Dollar</i>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	74,228	29,284	<i>Accrued interest income</i>
	<u>8,914,104</u>	<u>11,749,903</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang digolongkan sebagai setara kas adalah masing-masing sebesar Rp 6.559.876 dan Rp 11.720.619.

b. Berdasarkan jenis

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Deposito berjangka	4,484,048	2,130,020	<i>Time deposits</i>
Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS")	2,280,000	1,110,000	<i>Certificate of Bank Indonesia Sharia ("SBIS")</i>
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI") bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	1,825,828	3,131,708	<i>Bank Indonesia's Deposit Facilities ("FASBI") net of unamortised discount</i>
Call money	250,000	350,000	<i>Call money</i>
FTK (Fine Tune Kontraksi)	-	4,998,891	<i>FTK (Fine Tune Kontraksi)</i>
	<u>8,839,876</u>	<u>11,720,619</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	74,228	29,284	<i>Accrued interest income</i>
	<u>8,914,104</u>	<u>11,749,903</u>	

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

As of 31 December 2019 and 2018, current accounts with other banks were classified as current based on OJK collectibility. There were no current accounts with other banks which were blocked or used as collateral as of those dates.

The average interest rates per annum of current accounts with other banks for the years ended 31 December 2019 and 2018 were 0.87% and 1.15%, respectively.

As of 31 December 2019 and 2018, there was no impairment on current accounts with other banks.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

As of 31 December 2019 and 2018, all placements with Bank Indonesia and other banks were placed at third parties.

a. By currency

As of 31 December 2019 and 2018, total placements with Bank Indonesia and other banks that were classified as cash equivalents amounted to Rp 6,559,876 and Rp 11,720,619, respectively.

b. By type

Time deposits
Certificate of Bank Indonesia Sharia ("SBIS")
Bank Indonesia's Deposit Facilities ("FASBI") net of unamortised discount
Call money
FTK (Fine Tune Kontraksi)

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Termasuk dalam saldo penempatan pada bank-bank lain adalah deposito berjangka berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah sebesar Rp 275.000 pada tanggal 31 Desember 2018.

b. By type (continued)

Included in the balances of placements with other banks are time deposits based on sharia principle under mudharabah contract amounted to Rp 275,000 as of 31 December 2018.

c. Berdasarkan pihak lawan

c. By counterparties

	31 Desember/December	
	2019	2018
Call loan:		
Bank Indonesia - bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	4,105,828	9,240,599
Call money:		
PT Bank Bukopin Tbk	250,000	50,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	100,000
PT Bank DKI	-	50,000
PT Bank HSBC Indonesia	-	50,000
PT Bank Jawa Tengah	-	50,000
PT Bank KEB Hana	-	25,000
PT BPD Riau Kepri	-	25,000
	250,000	350,000
Deposito berjangka:		
PT BPD Jawa Tengah	-	100,000
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	90,000
PT BPD Nusa Tenggara Barat	-	85,000
Bank Indonesia	4,484,048	1,855,020
	4,484,048	2,130,020
	8,839,876	11,720,619
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	74,228	29,284
	8,914,104	11,749,903

Call loan:
 Bank Indonesia - net of unamortised discount

Call money:
 PT Bank Bukopin Tbk
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 PT Bank DKI
 PT Bank HSBC Indonesia
 PT Bank Jawa Tengah
 PT Bank KEB Hana
 PT BPD Riau Kepri

Time deposits:
 PT BPD Jawa Tengah
 PT Bank OCBC NISP Tbk
 PT BPD Nusa Tenggara Barat
 Bank Indonesia

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember/December	
	2019	2018
Hingga 1 bulan	6,559,876	11,720,619
Lebih dari 3 - 12 bulan	2,280,000	-
	8,839,876	11,720,619
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	74,228	29,284
	8,914,104	11,749,903

Up to 1 month
 More than 3 - 12 months

Accrued interest income

e. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

e. By remaining period to maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 43.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 43.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

f. Tingkat suku bunga

f. Interest rate

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The average interest rates per annum of placements with Bank Indonesia and other banks for the years ended 31 December 2019 and 2018 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Rupiah	5.20%	4.38%	Rupiah
Mata uang asing	2.16%	1.81%	Foreign currencies

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

g. Allowance for impairment losses

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas OJK dan manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai. Tidak terdapat saldo penempatan di Bank Indonesia dan bank-bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

Placements with Bank Indonesia and other banks as of 31 December 2019 and 2018 was classified as current based on OJK collectibility and management believes that no allowance for impairment losses is necessary. There were no placements with Bank Indonesia and other banks which were blocked or used as collateral as of those dates.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang mengalami penurunan nilai.

As of 31 December 2019 and 2018, there were no impaired placements with Bank Indonesia and other banks.

8. EFEK-EFEK

8. MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit

a. By currency and issuer

	31 Desember/December 2019			
	Nilai nominal/ Nominal value	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium (discount)	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah				
<u>Tersedia untuk dijual/Available for sale</u> <u>Sertifikat Bank Indonesia/Certificate of</u> <u>Bank Indonesia</u>	5,647,030	14,367	(61,820)	5,599,577
	5,647,030	14,367	(61,820)	5,599,577
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo/Held to</u> <u>maturity</u>				
Obligasi Pemerintah/Government Bonds	1,780,000	-	11,330	1,791,330
	1,780,000	-	11,330	1,791,330

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit (lanjutan)

a. By currency and issuer (continued)

31 Desember/December 2019				
	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ <i>Unrealised gain (loss)</i>	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ <i>Unamortised premium (discount)</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>
<u>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Measured at fair value through other comprehensive income</i></u>				
Reksa dana Syariah/ <i>Sharia Mutual Funds</i>	80,000	185	-	80,185
	80,000	185	-	80,185
<u>Diukur pada biaya perolehan/ <i>Measured at acquisition cost</i></u>				
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)/ <i>Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)</i>	79,000	-	-	79,000
Sukuk Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Sukuk</i>	1,005,926	-	-	1,005,926
Sukuk korporasi/ <i>Corporation sukuk</i>	50,000	-	-	50,000
Surat Berharga Syariah Negara/ <i>Sovereign Sharia Securities</i>	816,481	-	(2,439)	814,042
Reksa dana Syariah/ <i>Sharia Mutual Funds</i>	42,600	-	-	42,600
	1,994,007	-	(2,439)	1,991,568
<u>Pinjaman dan piutang/<i>Loans and receivables</i></u>				
Wesel ekspor/ <i>Export bills</i>	423,437	-	(1,136)	422,301
	423,437	-	(1,136)	422,301
Mata uang asing/<i>Foreign currency</i>				
<u>Pinjaman dan piutang/<i>Loans and receivables</i></u>				
Wesel ekspor/ <i>Export bills</i>	774,640	-	(4,976)	769,664
	774,640	-	(4,976)	769,664
Jumlah/ <i>Total</i>				10,654,624
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima/ <i>Accrued interest/margin income</i>				48,233
Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>				(6)
Jumlah/ <i>Total</i>				10,702,851

31 Desember/December 2018				
	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ <i>Unrealised gain (loss)</i>	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ <i>Unamortised premium (discount)</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>
<u>Tersedia untuk dijual/<i>Available for sale</i></u>				
Sertifikat Bank Indonesia/ <i>Certificate of Bank Indonesia</i>	1,300,000	4,043	(69,197)	1,234,846
Reksa dana/ <i>Mutual Funds</i>	24,945	(24,945)	-	-
	1,324,945	(20,902)	(69,197)	1,234,846

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit (lanjutan)

a. By currency and issuer (continued)

31 Desember/December 2018				
	Nilai nominal/ Nominal value	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium (discount)	Nilai tercatat/ Carrying amount
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo/Held to maturity</u>				
Obligasi Pemerintah/Government Bonds	3,645,000	-	37,435	3,682,435
Sertifikat Bank Indonesia/Certificate of Bank Indonesia	550,000	-	(11,328)	538,672
Obligasi Korporasi/Corporate Bonds	220,000	-	13	220,013
Sertifikat Deposito Bank Indonesia/Certificate Deposit of Bank Indonesia	100,000	-	(248)	99,752
	<u>4,515,000</u>	<u>-</u>	<u>25,872</u>	<u>4,540,872</u>
<u>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Measured at fair value through other comprehensive income</u>				
Surat Perbendaharaan Negara Syariah/ Government Sharia Treasury Bills	260,163	941	(456)	260,648
Reksa dana Syariah/Sharia Mutual Funds	50,000	-	-	50,000
	<u>310,163</u>	<u>941</u>	<u>(456)</u>	<u>310,648</u>
<u>Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost</u>				
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)/Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)	380,000	-	-	380,000
Sukuk Korporasi/Corporation Sukuk	26,000	-	-	26,000
Surat Berharga Syariah Negara/ Sovereign Sharia Securities	319,955	-	(5,914)	314,041
	<u>725,955</u>	<u>-</u>	<u>(5,914)</u>	<u>720,041</u>
Jumlah/Total				6,806,407
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima/Accrued interest/margin income				60,099
Jumlah/Total				<u>6,866,506</u>

Atas Surat Perbendaharaan Negara Syariah sebesar Rp 260.648 pada tanggal 31 Desember 2018, Entitas Anak mempunyai wa'd/janji untuk menjual kembali kepada Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

For Government Sharia Treasury Bills amounted to Rp 260,648 as of 31 December 2018, the Subsidiary had wa'd/promise to resell to Bank Indonesia as detailed below:

Jenis surat berharga/ Type of marketable securities	Tanggal beli dan janji/ Purchase and promise date	Tanggal jual kembali/ Resell date	Harga Beli/ Purchase price	Harga penjualan kembali/ Reselling price	Nilai tercatat/ Carrying amount
SPNS 08022019	12 Desember/December 2018	9 Januari/January 2019	148,234	148,972	149,250
SPNS 01052019	5 Desember/December 2018	2 Januari/January 2019	20,018	20,117	20,224
SPNS 03042019	9 Desember/December 2018	16 Januari/January 2019	90,623	91,074	91,174
			<u>258,875</u>	<u>260,163</u>	<u>260,648</u>

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan akad

b. By contract

Termasuk di dalam efek-efek adalah efek-efek dengan akad syariah:

Included in marketable securities are securities under sharia contracts:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Mudharabah dan wakalah Ijarah Wa'd	251,785	456,000	Mudharabah and wakalah Ijarah Wa'd
Musyarakah muntahiyah bittamlik	814,042	314,041	Musyarakah muntahiyah bittamlik
	-	260,648	
	1,005,926	-	
	2,071,753	1,030,689	
Pendapatan yang masih akan diterima	14,836	7,361	Accrued income
	2,086,589	1,038,050	

c. Berdasarkan hubungan lawan

c. By relationship

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Pihak ketiga	10,568,519	6,806,407	Third parties
Pihak berelasi	86,105	-	Related parties
	10,654,624	6,806,407	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	48,233	60,099	Accrued interest/margin Income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6)	-	Allowance for impairment losses
	10,702,851	6,866,506	

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Sampai dengan 1 bulan	327,884	-	Up to 1 month
1 - 3 bulan	610,854	775,348	1 - 3 months
3 - 6 bulan	1,136,222	-	3 - 6 months
6 - 9 bulan	44,918	-	6 - 9 months
9 - 12 bulan	5,848,064	758,685	9 - 12 months
Lebih dari 12 bulan	2,686,682	5,272,374	More than 12 months
	10,654,624	6,806,407	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	48,233	60,099	Accrued interest/margin Income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6)	-	Allowance for impairment losses
	10,702,851	6,866,506	

e. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

e. By remaining period of maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 43.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 43.

f. Tingkat suku bunga/margin rata-rata per tahun

f. Average interest rate/margin per annum

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Sertifikat Bank Indonesia	6.44%	6.16%	Certificate of Bank Indonesia
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	5.75%	5.08%	Certificate Deposit of Bank Indonesia
Obligasi Korporasi	6.07%	6.43%	Corporate Bonds
Obligasi Pemerintah	6.84%	6.87%	Government Bonds
Reksa dana	-	5.71%	Mutual Funds
Surat Berharga Syariah Negara	6.81%	6.41%	Sovereign Sharia Securities
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	-	4.58% - 6.40%	Government Sharia Treasury Bills
Sertifikat Mudharabah Antar Bank (SIMA)	5.12%	3.90% - 7.50%	Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)
Reksa dana Syariah	7.79%	8.66%	Sharia Mutual Funds
Sukuk Korporasi	7.00%	8.35%	Corporate Sukuk
Sukuk Bank Indonesia	5.54%	-	Sukuk Bank Indonesia

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

g. Berdasarkan peringkat

Peringkat penerbit obligasi dan sukuk korporasi adalah sebagai berikut:

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
 PT Federal International Finance
 PT Astra Sedaya Finance
 PT Bank CIMB Niaga Tbk
 PT BFI Finance Indonesia Tbk
 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
 PT Indomobil Finance Indonesia
 PT Bank UOB Indonesia Tbk

h. Cadangan kerugian penurunan nilai

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai atas efek-efek pada tanggal 31 Desember 2019.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek pada tanggal 31 Desember 2018.

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2019	2018
Saldo awal tahun	-	-
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 36)	44	-
Pengalihan cadangan kerugian penurunan nilai akibat penggabungan usaha	(50)	-
Saldo akhir tahun	(6)	-

i. Informasi penting lainnya sehubungan dengan efek-efek

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Bank tidak melakukan penjualan atas efek-efek tersedia untuk dijual, sehingga tidak ada pemindahan keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi.

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2018, Bank melakukan penjualan efek-efek tersedia untuk dijual sehingga terdapat pemindahan keuntungan sebesar Rp 15.981 dari ekuitas ke laba rugi.

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

g. By rating

Rating of issuers of corporate bonds and sukuk were as follows:

31 Desember/December 2018		
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying amount
Pefindo	idAAA	60,008
Pefindo	idAAA	60,000
Fitch	AAA(idn)	30,000
Pefindo	idAAA	26,000
Fitch	AA-(idn)	20,005
Pefindo	idAAA	20,000
Pefindo	idA	20,000
Fitch	AAA(idn)	10,000
		246,013

h. Allowance for impairment losses

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses for marketable securities as of 31 December 2019.

Management believes that no allowance for impairment losses was necessary on marketable securities as of 31 December 2018.

The movement of the allowance for impairment losses for marketable securities was as follows:

31 Desember/December		
2019	2018	
-	-	Balance at beginning of year
44	-	Provision during the year (Note 36)
(50)	-	Transfer allowance for impairment losses due to merger
(6)	-	Balance at end of year

i. Other significant information relating to marketable securities

During the year ended 31 December 2019, the Bank did not sell available for sale marketable securities, so there were no gains or losses transferred from equity to profit or loss.

During the year ended 31 December 2018, the Bank sold its available for sale marketable securities resulting in transfer of gain from equity to profit or loss amounting to Rp 15,981.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

i. Informasi penting lainnya sehubungan dengan efek-efek (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah efek-efek yang digolongkan sebagai setara kas adalah masing-masing sebesar Rp 1.809.849 dan Rp 775.348.

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

a. Berdasarkan jenis

Rupiah	Tanggal beli/ Purchase date	Tanggal penjualan kembali/ Resell date	Tingkat bunga kontraktual setahun/ Contractual rate per interest annum	Nilai pokok/ Principal amount	Pendapatan bunga yang masih akan diterima/ Accrued interest income	Nilai tercatat/ Carrying amount ¹⁾	Harga penjualan kembali/ Resell price
Obligasi/Bonds FR0040	19 Desember/ December 2018	2 Januari/ January 2019	6.20%	559,884	1,253	561,137	561,233
Obligasi/Bonds FR0047	21 Desember/ December 2018	4 Januari/ January 2019	6.20%	547,752	1,038	548,790	549,072
Obligasi/Bonds FR0052	21 Desember/ December 2018	4 Januari/ January 2019	6.20%	287,071	544	287,615	287,763
Obligasi/Bonds FR0047	6 Juli/ July 2018	4 Januari/ January 2019	5.80%	111,740	3,222	114,962	115,016
Obligasi/Bonds FR0064	27 Juli/ July 2018	25 Januari/ January 2019	5.95%	85,225	2,226	87,451	87,790
Jumlah/Total				1,591,672	8,283	1,599,955	1,600,874

¹⁾ Nilai tercatat merupakan harga pembelian efek ditambah dengan pendapatan bunga yang masih akan diterima yang sudah diakui.

b. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 43.

c. Cadangan kerugian penurunan nilai

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2018 digolongkan sebagai lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2018 tidak terdapat efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali yang mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

i. Other significant information relating to marketable securities (continued)

As of 31 December 2019 and 2018, total marketable securities that were classified as cash equivalents amounted to Rp 1,809,849 and Rp 775,348, respectively.

9. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS

Securities purchased under resale agreements were denominated in Rupiah and were placed at Bank Indonesia.

As of 31 December 2019, there were no outstanding securities purchased under resale agreements.

a. By type

b. By remaining period to maturity date

Securities purchased under resale agreements will be settled no more than 12 months after the date of the consolidated financial positions.

Information regarding remaining period to maturity date is disclosed in Note 43.

c. Allowance for impairment losses

Based on the prevailing BI regulation, all securities purchased under resale agreements as of 31 December 2018 were classified as current.

As of 31 December 2018, there was no impairment of securities purchased under resale agreements.

Management believes that no allowance for impairment losses was necessary on securities purchased under resale agreements.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

10. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES

a. Berdasarkan jenis dan hubungan

a. By type and relationship

31 Desember/December 2019					
<i>Instrumen/Instruments</i>	Nilai kontrak/nosional/ Contract/ notional amount	Nilai wajar/Fair value			
		Tagihan derivatif/ Derivative receivables		Liabilitas derivatif/ Derivative payables	
		Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties
Kontrak tunai mata uang asing/Foreign currency spot	634,430	29	595	17	712
Kontrak berjangka mata uang asing/Foreign currency forward	7,595,993	-	154,417	172	55,967
Swap mata uang asing/Foreign currency swap	20,715,098	1	30,472	-	248,151
Cross currency swap	24,832,379	58,079	526,583	2,796	514,448
Swap suku bunga/Interest rate swap	9,024,155	3,573	66,623	51,086	21,598
	<u>62,802,055</u>	<u>61,682</u>	<u>778,690</u>	<u>54,071</u>	<u>840,876</u>

31 Desember/December 2018					
<i>Instrumen/Instruments</i>	Nilai kontrak/nosional/ Contract/ notional amount	Nilai wajar/Fair value			
		Tagihan derivatif/ Derivative receivables		Liabilitas derivatif/ Derivative payables	
		Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties
Swap mata uang asing/Foreign currency swap	5,080,034	-	-	-	116,521
	<u>5,080,034</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>116,521</u>

Bank menyediakan produk derivatif untuk nasabahnya seperti kontrak pembelian atau penjualan berjangka mata uang asing, perjanjian swap mata uang asing dan perjanjian swap/cap tingkat suku bunga yang memungkinkan nasabahnya untuk memindahkan, memodifikasi atau mengurangi risiko atas kurs nilai tukar dan/atau risiko tingkat suku bunga. Sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, Bank melindungi sebagian besar transaksi derivatif dengan nasabahnya dengan membuat transaksi derivatif timbal balik dengan jumlah dan waktu jatuh tempo yang sama dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan bank lain. Bank juga menggunakan instrumen derivatif sebagai sarana sehubungan dengan kegiatan manajemen risiko. Derivatif digunakan oleh Bank terutama untuk mengatasi risiko kurs nilai tukar atas aset dan liabilitas dalam mata uang asing, dan untuk mengatasi risiko tingkat suku bunga yang berhubungan dengan aset dan liabilitas tertentu di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Bank provides derivative products to its customers such as forward exchange contracts, cross-currency swap agreements and interest rate swap/cap agreements to enable its customers to transfer, modify or reduce their foreign exchange and/or interest rate risks. As part of its risk management policy, the Bank covers most of these derivative contracts with customers with back-to-back derivative contracts with the same notional amount and maturity with its foreign affiliates and other banks. Also, the Bank uses derivative instruments as an end-user in connection with its risk management activities. Derivatives are used by the Bank mainly to manage foreign exchange risk on its foreign currency denominated assets and liabilities and to manage interest rate risk relating to specific groups of assets and liabilities in the consolidated statement of financial position.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

10. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

b. Berdasarkan kolektibilitas

Tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak mengalami penurunan nilai, dan diklasifikasikan sebagai lancar berdasarkan kolektibilitas OJK.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai pada tagihan derivatif.

b. By collectibility

Derivative receivables as of 31 December 2019 and 2018 were not impaired and were all classified as current based on OJK grading.

Management believes that no allowance for impairment losses was necessary on derivative receivables.

c. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 43.

c. By remaining period to maturity date

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 43.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

11. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES

Tagihan akseptasi

Semua tagihan akseptasi adalah transaksi dengan pihak ketiga.

Acceptance receivables

All acceptance receivables transactions were with third parties.

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Rupiah	847,922	-	Rupiah
Mata uang asing	844,538	-	Foreign currency
	<u>1,692,460</u>	<u>-</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(69)	-	Less: Allowance for impairment losses
	<u><u>1,692,391</u></u>	<u><u>-</u></u>	

b. Berdasarkan jangka waktu

b. By time period

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Rupiah			Rupiah
Hingga 1 bulan	-	-	Up to 1 month
Lebih dari 1 – 3 bulan	24,046	-	More than 1 – 3 months
Lebih dari 3 – 6 bulan	56,061	-	More than 3 – 6 months
Lebih dari 6 bulan	767,815	-	More than 6 months
	<u>847,922</u>	<u>-</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Hingga 1 bulan	3,079	-	Up to 1 month
Lebih dari 1 – 3 bulan	106,249	-	More than 1 – 3 months
Lebih dari 3 – 6 bulan	632,400	-	More than 3 – 6 months
Lebih dari 6 bulan	102,810	-	More than 6 months
	<u>844,538</u>	<u>-</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(69)	-	Less: Allowance for impairment losses
	<u><u>1,692,391</u></u>	<u><u>-</u></u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

11. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

Tagihan akseptasi (lanjutan)

Acceptance receivables (continued)

c. Berdasarkan kolektabilitas OJK

c. By OJK grading

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Lancar	1,688,749	-	Current
Dalam perhatian khusus	3,711	-	Special mention
	1,692,460	-	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(69)	-	Less: Allowance for impairment losses
	<u>1,692,391</u>	<u>-</u>	

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

d. Allowance for impairment losses

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses for acceptance receivables was as follows:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Saldo awal tahun	-	-	Balance at beginning of year
Pemulihan cadangan selama tahun berjalan (Catatan 36)	7	-	Reversal of allowance during the year (Note 36)
Pengalihan cadangan kerugian penurunan nilai akibat penggabungan usaha	(76)	-	Transfer allowance for impairment losses due to merger
Saldo akhir tahun	<u>(69)</u>	<u>-</u>	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2019.

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses on acceptance receivables as of 31 December 2019.

Liabilitas akseptasi

Acceptance payables

a. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan dan mata uang

a. By relationship with counterparties and currency

	31 Desember/ December		
	2019	2018	
Rupiah			Rupiah
- Pihak ketiga	557,430	-	Third parties -
- Pihak berelasi	-	-	Related parties -
	<u>557,430</u>	<u>-</u>	
Mata uang asing			Foreign Currency
- Pihak ketiga	173,506	-	Third parties -
- Pihak berelasi	157,523	-	Related parties -
	<u>331,029</u>	<u>-</u>	
	<u>888,459</u>	<u>-</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

11. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

Liabilitas akseptasi (lanjutan)

Acceptance payables (continued)

b. Berdasarkan jangka waktu

b. By time period

	31 Desember/ December		
	2019	2018	
Rupiah			Rupiah
Hingga 1 bulan	-	-	Up to 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	21,568	-	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	56,060	-	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 bulan	479,802	-	More than 6 months
	<u>557,430</u>	<u>-</u>	
Mata uang asing			Foreign currency
Hingga 1 bulan	3,079	-	Up to 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	106,249	-	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	118,891	-	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 bulan	102,810	-	More than 6 months
	<u>331,029</u>	<u>-</u>	
	<u>888,459</u>	<u>-</u>	

c. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

c. By remaining period to maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 43.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 43.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Pinjaman yang diberikan:			Loans:
Pihak ketiga			Third parties
- Rupiah	94,923,456	60,840,986	Rupiah -
- Dolar Amerika Serikat	34,762,076	-	United States Dollar -
- Yen Jepang	942,368	-	Japanese Yen -
Pihak berelasi			Related parties
- Rupiah	98,492	18,632	Rupiah -
- Dolar Amerika Serikat	2,032,884	-	United States Dollar -
- Yen Jepang	1,333	-	Japanese Yen -
Pembiayaan/piutang syariah:			Sharia financing/receivables:
Pihak ketiga			Third parties
- Rupiah	8,999,574	7,277,162	Rupiah -
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima			Accrued interest/margin income
- Rupiah	673,920	605,519	Rupiah -
- Dolar Amerika Serikat	153,093	-	United States Dollar -
- Yen Jepang	346	-	Japanese Yen -
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1,467,199)</u>	<u>(1,134,065)</u>	Less: Allowance for impairment losses
	<u>141,120,343</u>	<u>67,608,234</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES(continued)

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas OJK

a. Based on type, currency and OJK grading

31 Desember/December 2019						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total
Rupiah						
Korporasi	37,178,116	782,332	14,750	-	-	37,975,198
Pensiunan	33,249,734	696,810	53,791	50,180	119,767	34,170,282
Usaha Kecil Menengah	13,218,680	206,224	20,154	90,853	348,069	13,883,980
Usaha Mikro Kecil	1,399,899	165,758	18,818	19,281	7,393	1,611,149
Pembiayaan/piutang syariah	8,749,269	127,635	71,504	25,102	26,064	8,999,574
Pegawai instansi lain	1,306,174	99,226	5,540	10,826	19,218	1,440,984
Keperluan rumah tangga	2,132,674	207,335	38,782	67,025	13,074	2,458,890
Karyawan	178,308	372	237	85	300	179,302
Umum	2,986,003	122,555	11,019	2,508	3,024	3,125,109
Kepemilikan mobil	149,531	23,936	2,082	798	706	177,053
Mata uang asing						
Korporasi	35,616,340	2,010,667	90,236	13,883	7,536	37,738,662
	136,164,728	4,442,850	326,913	280,541	545,151	141,760,183
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	773,975	53,384	-	-	-	827,359
Cadangan kerugian penurunan nilai	(507,755)	(422,856)	(104,196)	(125,544)	(306,848)	(1,467,199)
	136,430,948	4,073,378	222,717	154,997	238,303	141,120,343

31 Desember/December 2018						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total
Rupiah						
Pensiunan	35,693,556	514,805	45,549	54,708	95,940	36,404,558
Usaha Kecil Menengah	12,439,073	155,079	16,661	79,521	207,955	12,898,289
Usaha Mikro Kecil	2,628,132	322,085	28,629	45,363	19,594	3,043,803
Pembiayaan/piutang syariah	7,060,620	115,660	55,637	39,466	5,779	7,277,162
Pegawai instansi lain	1,982,277	51,823	6,186	5,602	9,394	2,055,282
Keperluan rumah tangga	2,397,272	213,416	36,221	55,597	29,401	2,731,907
Karyawan	184,142	339	-	395	406	185,282
Umum	3,442,540	79,031	4,536	494	1,249	3,527,850
Kepemilikan mobil	11,141	1,233	170	61	42	12,647
	65,838,753	1,453,471	193,589	281,207	369,760	68,136,780
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	550,662	54,857	-	-	-	605,519
Cadangan kerugian penurunan nilai	(359,643)	(274,278)	(114,336)	(171,232)	(214,576)	(1,134,065)
	66,029,772	1,234,050	79,253	109,975	155,184	67,608,234

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas OJK (lanjutan)

a. Based on type, currency and OJK grading (continued)

Pembiayaan/piutang syariah terdiri atas piutang murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pinjaman qardh masing-masing sebesar Rp 8.969.565, Rp 29.129, dan Rp 880 pada tanggal 31 Desember 2019 dan masing-masing sebesar Rp 7.277.010, Rp 152, dan Rp 0 pada tanggal 31 Desember 2018.

Sharia financing/receivables consists of murabahah receivables, musyarakah financing, and funds of qardh amounted to Rp 8,969,565, Rp 29,129, dan Rp 880, respectively, as of 31 December 2019 and Rp 7,277,010, Rp 152, and Rp 0, respectively, as of 31 December 2018.

Rasio kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM") terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 12,27% dan 24,96%. Rasio tersebut dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Ratios of loans extended to Micro, Small and Medium Enterprises ("UMKM") to total loans as of 31 December 2019 and 2018. were 12.27% and 24.96%. respectively. These ratios were calculated based on the prevailing Bank Indonesia regulations.

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

31 Desember/December 2019

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Rumah tangga	37,511,417	1,139,395	112,704	132,562	156,107	39,052,185	Household
Perdagangan	18,499,411	346,132	72,195	78,456	214,812	19,211,006	Trading
Perindustrian	18,288,234	545,075	14,548	41,345	84,562	18,973,764	Manufacturing
Jasa lainnya	11,348,037	343,960	12,158	4,551	3,325	11,712,031	Other services
Pertanian	1,886,553	12,534	4,551	1,534	1,506	1,906,678	Agriculture
Jasa akomodasi	238,745	14,914	1,167	742	12,017	267,585	Accommodation services
Konstruksi	6,116,404	21,504	14,750	3,060	36,759	6,192,477	Construction
Transportasi & komunikasi	6,258,173	7,929	4,343	4,337	28,466	6,303,248	Transportation & communication
Pertambangan	233,648	252	16	3	-	233,919	Mining
Lainnya	167,766	488	245	68	62	168,629	Others
	100,548,388	2,432,183	236,677	266,658	537,616	104,021,522	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollar
Perdagangan	2,563,857	-	-	-	-	2,563,857	Trading
Perindustrian	8,800,555	1,792,162	90,236	13,882	7,536	10,704,371	Manufacturing
Jasa lainnya	13,801,425	-	-	-	-	13,801,425	Other services
Pertanian	1,784,640	-	-	-	-	1,784,640	Agriculture
Konstruksi	195,576	-	-	-	-	195,576	Construction
Transportasi & komunikasi	1,636,441	-	-	-	-	1,636,441	Transportation & communication
Pertambangan	1,835,920	-	-	-	-	1,835,920	Mining
Lainnya	4,272,730	-	-	-	-	4,272,730	Others
	34,891,144	1,792,162	90,236	13,882	7,536	36,794,960	
Yen Jepang							Japanese Yen
Perdagangan	23,006	-	-	-	-	23,006	Trading
Perindustrian	600,087	218,505	-	-	-	818,592	Manufacturing
Jasa lainnya	102,103	-	-	-	-	102,103	Other services
	725,196	218,505	-	-	-	943,701	
	136,164,728	4,442,850	326,913	280,540	545,152	141,760,183	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	773,975	53,384	-	-	-	827,359	Accrued interest/margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(507,755)	(422,856)	(104,196)	(125,544)	(306,848)	(1,467,199)	Allowance for impairment losses
	136,430,948	4,073,378	222,717	154,996	238,304	141,120,343	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector (continued)

31 Desember/December 2018

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Rumah tangga	40,474,195	868,216	94,701	119,372	137,023	41,693,507	Household
Perdagangan	14,459,657	351,407	83,203	111,852	157,573	15,163,692	Trading
Perindustrian	3,992,104	80,083	5,111	17,882	45,236	4,140,416	Manufacturing
Jasa lainnya	4,323,954	48,003	5,387	6,440	9,560	4,393,344	Other services
Pertanian	762,175	22,171	3,426	4,119	1,269	793,160	Agriculture
Jasa akomodasi	323,857	42,980	1,416	2,854	12,871	383,978	Accommodation services
Konstruksi	742,365	31,978	-	12,429	-	786,772	Construction
Transportasi & komunikasi	563,962	7,569	116	6,092	6,202	583,941	Transportation & communication
Pertambangan	143,114	354	10	8	-	143,486	Mining
Lainnya	53,370	710	219	159	26	54,484	Others
Jumlah	<u>65,838,753</u>	<u>1,453,471</u>	<u>193,589</u>	<u>281,207</u>	<u>369,760</u>	<u>68,136,780</u>	Total
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	550,662	54,857	-	-	-	605,519	Accrued interest/margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(359,643)</u>	<u>(274,278)</u>	<u>(114,336)</u>	<u>(171,232)</u>	<u>(214,576)</u>	<u>(1,134,065)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>66,029,772</u>	<u>1,234,050</u>	<u>79,253</u>	<u>109,975</u>	<u>155,184</u>	<u>67,608,234</u>	

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By time period

31 Desember/December

	2019	2018	
Hingga 1 tahun	19,250,098	15,031,995	Up to 1 year
1 – 2 tahun	33,033,629	6,006,140	1 – 2 years
2 – 3 tahun	9,753,606	2,983,717	2 – 3 years
3 – 4 tahun	8,147,728	2,566,031	3 – 4 years
4 – 5 tahun	26,202,246	4,402,548	4 – 5 years
Lebih dari 5 tahun	45,372,876	37,146,349	More than 5 years
	<u>141,760,183</u>	<u>68,136,780</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	827,359	605,519	Accrued interest/margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1,467,199)</u>	<u>(1,134,065)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>141,120,343</u>	<u>67,608,234</u>	

d. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

d. By remaining period to maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 43.

Information regarding remaining period to maturity date is disclosed in Note 43.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES (continued)

d. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan/debitur

d. By relationship with counterparties/debtors

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Pihak ketiga	139,627,474	68,118,148	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	2,132,709	18,632	<i>Related parties</i>
	<u>141,760,183</u>	<u>68,136,780</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	827,359	605,519	<i>Accrued interest/margin income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,467,199)	(1,134,065)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>141,120,343</u>	<u>67,608,234</u>	

e. Tingkat suku bunga/margin rata-rata per tahun

e. Average interest/margin rate per annum

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:			<i>Average interest rate per annum:</i>
Rupiah	16.37%	19.75%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	3.33%	-	<i>Foreign currencies</i>

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Tingkat margin rata-rata per tahun:			<i>Average margin rate per annum:</i>
Piutang murabahah	25%-30%	25%-30%	<i>Murabahah receivables</i>
Pembiayaan musyarakah	10.75%	-	<i>Musyarakah financing</i>

f. Cadangan kerugian penurunan nilai

f. Allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses for loans and sharia financing/receivables was as follows:

	31 Desember/December 2019			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal tahun	(85,456)	(1,048,609)	(1,134,065)	<i>Balance at beginning of year</i>
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 36)	(268,164)	(1,177,769)	(1,445,933)	<i>Provision during the year (Note 36)</i>
Penerimaan kembali	-	(113,243)	(113,243)	<i>Recovery</i>
Penghapusbukuan	124,192	1,369,039	1,493,231	<i>Write-off</i>
Pengalihan cadangan kerugian penurunan nilai akibat penggabungan usaha	(92,610)	(7,641)	(100,251)	<i>Transfer allowance for impairment losses due to merger</i>
Lain-lain	-	(166,938)	(166,938)	<i>Others</i>
	<u>(322,038)</u>	<u>(1,145,161)</u>	<u>(1,467,199)</u>	<i>Balance at end of year</i>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses on loans and sharia financing/receivables as of 31 December 2019 and 2018

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

f. Allowance for impairment losses (continued)

	31 Desember/December 2018			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal tahun	(19,409)	(774,706)	(794,115)	<i>Balance at beginning of year</i>
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 36)	(189,523)	(1,175,418)	(1,364,941)	<i>Provision during the year (Note 36)</i>
Penerimaan kembali	-	(124,526)	(124,526)	<i>Recovery</i>
Penghapusbukuan	123,476	1,049,456	1,172,932	<i>Write-off</i>
Lain-lain	-	(23,415)	(23,415)	<i>Others</i>
Saldo akhir tahun	<u>(85,456)</u>	<u>(1,048,609)</u>	<u>(1,134,065)</u>	<i>Balance at end of year</i>

g. Pembiayaan bersama

g. Joint financing

Bank mengadakan perjanjian pembiayaan bersama, antara lain dengan PT SMFL Leasing Indonesia, PT Home Credit Indonesia (HCI), PT Andalan Finance Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) dan PT Finansia Multi Finance (Catatan 42).

The Bank has entered into joint financing agreements, among others with PT SMFL Leasing Indonesia, PT Home Credit Indonesia (HCI), PT Andalan Finance Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) and PT Finansia Multi Finance (Note 42).

h. Jasa pemasaran dan administrasi

h. Marketing and administration services

Bank mengadakan perjanjian kerjasama jasa pemasaran dan administrasi dengan PT Oto Multiartha (OMA), PT Summit Oto Finance (SOF), PT Digital Tunai Kita (DTK), dan PT Kredit Pintar Indonesia (KPI) (Catatan 42).

The Bank has entered into marketing and administration services agreement with PT Oto Multiartha (OMA), PT Summit Oto Finance (SOF), PT Digital Tunai Kita (DTK), and PT Kredit Pintar Indonesia (KPI) (Note 42).

i. Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK")

i. Legal Lending Limit ("LLL")

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank dan Entitas Anak yang disampaikan kepada OJK, pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan BMPK kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan OJK.

Based on the the Bank and Subsidiary's Legal Lending Limit (LLL) report to OJK, as of 31 December 2019 and 2018 there was no violation or excess of LLL to both third parties and related parties in compliance with OJK's regulation.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES (continued)

j. Pinjaman yang diberikan/pembiayaan/piutang syariah bermasalah

j. Non-performing loans/sharia financing/receivables

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, rasio bruto kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setinggi-tingginya adalah 5% dari jumlah pinjaman yang diberikan/pembiayaan/piutang syariah. Rasio kredit bermasalah bruto dan bersih Bank dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Based on prevailing OJK regulations, the maximum gross non-performing loan/sharia financing/receivables ratio for a bank is 5% from total loans/sharia financing/receivables given. The gross and net non-performing loan ratios of the Bank and Subsidiary were as follows:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Kurang lancar	326,913	193,589	<i>Substandard</i>
Diragukan	280,541	281,207	<i>Doubtful</i>
Macet	545,151	369,760	<i>Loss</i>
Jumlah pinjaman yang diberikan/pembiayaan/piutang syariah bermasalah - kotor	1,152,605	844,556	<i>Total non-performing loans/sharia financing/receivables - gross</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(536,588)	(500,144)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah pinjaman yang diberikan/pembiayaan/piutang syariah bermasalah - bersih	616,017	344,412	<i>Total non-performing loans/sharia financing/receivables - net</i>
Jumlah pinjaman yang diberikan/pembiayaan/piutang syariah yang diberikan	141,760,183	68,136,780	<i>Total loans/sharia financing/receivables</i>
Rasio pinjaman yang diberikan/pembiayaan/piutang syariah bermasalah - kotor	0.81%	1.24%	<i>Non-performing loans/sharia financing/receivables ratio - gross</i>
Rasio pinjaman yang diberikan/pembiayaan/piutang syariah bermasalah - bersih	0.43%	0.51%	<i>Non-performing loans/sharia financing/receivables ratio - net</i>

Rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Bank (persentase cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 63,45% dan 89,08%.

The Bank's ratio of allowance for impairment losses on financial assets (percentage of allowance for impairment losses on financial assets recorded by the Bank to the minimum allowance for impairment losses on financial assets as required by Bank Indonesia) as of 31 December 2019 and 2018 were 63.45% and 89.08%, respectively.

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lainnya.

Loans are generally collateralised by registered mortgages, mortgages or powers of attorney to sell and other guarantees.

Pada tanggal 31 Desember 2019, pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai adalah Rp 13.940.291 (31 Desember 2018: Rp 255.050).

As of 31 December 2019, loans secured by cash collateral were Rp 13,940,291 (31 December 2018: Rp 255,050).

k. Kredit penerusan

k. Channeling loans

Bank juga menyalurkan fasilitas kredit yang dananya bersumber dari Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia melalui kredit penerusan (*channeling loan*) dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM).

The Bank also provides loan facilities funded by the Government of Indonesia or Bank Indonesia through channeling loans in the form of Kredit Usaha Tani (KUT) and Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM).

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING RECEIVABLES (continued)

k. Kredit penerusan (lanjutan)

k. Channeling loans (continued)

Saldo dari kredit penerusan tidak diakui pada laporan keuangan konsolidasian. Rincian saldo kredit penerusan adalah sebagai berikut:

These channelling loans are not recognised in the consolidated financial statements. The balances were as follows:

	31 Desember/December	
	2019	2018
Kredit Penerusan KUT	24,687	24,687
Kredit Penerusan KPKM	9,788	9,851
	34,475	34,538

KUT Channeling Loans
 KPKM Channeling Loans

l. Kredit sindikasi

l. Syndicated loans

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain dan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Dalam kredit sindikasi, Bank dapat bertindak sebagai anggota dan/atau *arranger* dan/atau *security agency*. Sindikasi dilakukan dengan bank-bank di Indonesia dan luar negeri. Keikutsertaan Bank sebagai anggota dan/atau *arranger* dalam kredit sindikasi berkisar antara 5% sampai dengan 60% dari fasilitas kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2019. Bank tidak berpartisipasi dalam fasilitas kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2018.

Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks and are generally used to support the working capital needs and investment. In syndicated loans, the Bank may act as a member and/or arranger and/or security agency. Syndication is done with several banks in Indonesia and offshore. Total participation of the Bank in syndicated loans, in which the Bank acted as a member and/or arranger, ranged from 5% up to 60%, of syndicated loan facility as of 31 December 2019. The Bank did not participate in syndicated loan facilities as of 31 December 2018.

m. Perjanjian asuransi

m. Insurance agreements

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Pada tanggal 26 November 2008, Bank melakukan perjanjian ("PKS") dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan dan mikro dengan asuransi jiwa. Perjanjian Kerjasama ini mencakup 3 bagian (asuransi untuk debitur Kredit Pensiun sebelum tanggal 1 Desember 2008, asuransi untuk debitur Kredit Pensiun sejak tanggal 1 Desember 2008, dan asuransi untuk debitur kredit mikro) dan berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian, dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 5 (lima) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

On 26 November 2008, the Bank entered into an agreement ("PKS") with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension and micro loans with life insurance. The insurance agreement consists of 3 sections (insurance for pension loan debtors before 1 December 2008, insurance for pension loan debtors since 1 December 2008 onwards, and insurance for micro loan debtors) and is effective for 5 (five) years since the date of the agreement, and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of 5 (five) years or as mutually agreed by both parties.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
 PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
 RECEIVABLES (continued)**

m. Perjanjian (lanjutan)

m. Agreements (continued)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia (lanjutan)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia (continued)

Pada tanggal 1 April 2013 dilakukan perubahan atas PKS yang dibuat dalam bentuk PKS Induk (Perjanjian Bancassurance untuk Kegiatan Referensi) dan PKS Turunan yang dibuat untuk masing-masing produk.

On 1 April 2013, the PKS has been amended in the form of Master Agreement (Bancassurance Agreement for Referral Activities) and Sub PKS which were provided for each product.

Premi asuransi Kredit Pensiun akan ditanggung bersama-sama oleh debitur dan Bank. Sebesar 10,5% dari premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh Allianz, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi.

Insurance premium of pension loan is borne by both debtors and the Bank. 10.5% of the premiums paid by debtors, which is received by Allianz, will be returned to the Bank as commission.

Sedangkan untuk debitur mikro, premi asuransi akan ditanggung oleh Bank.

Meanwhile for micro debtors, the insurance premium is borne by Bank.

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari Allianz untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Total premium paid by debtors through the Bank and commission fees received from Allianz for the years ended 31 December 2019 and 2018 were as follows:

**Tahun berakhir 31 Desember/
 Year ended 31 December**

	2019	2018	
Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke Allianz	353,707	648,713	<i>Premium paid by debtors through the Bank to Allianz</i>
Penerimaan komisi dari Allianz	34,090	65,093	<i>Commissions received from Allianz</i>

PT Avrist Assurance

PT Avrist Assurance

Pada tanggal 23 Juni 2011, Bank melakukan perjanjian dengan PT Avrist Assurance ("Avrist"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 23 June 2011, the Bank entered an agreement with PT Avrist Assurance ("Avrist"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.

Premi asuransi akan ditanggung bersama-sama oleh debitur dan Bank. Sebesar 11% dari premi yang dibayarkan oleh debitur yang diterima oleh Avrist, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne by both debtors and the Bank. 11% of the premiums paid by debtors which is received by Avrist will be returned to the Bank as commission.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

m. Perjanjian (lanjutan)

m. Agreements (continued)

PT Avrist Assurance (lanjutan)

PT Avrist Assurance (continued)

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari Avrist untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Total premiums paid by debtors through the Bank and commission fees received from Avrist for the years ended 31 December 2019 and 2018 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2019	2018

Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke Avrist	130,219	81,692
Penerimaan komisi dari Avrist	12,945	8,971

Premium paid by debtors through the Bank to Avrist

Commissions received from Avrist

PT Asuransi Jiwa Generali

PT Asuransi Jiwa Generali

Pada tanggal 22 Juni 2011, Bank telah melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 22 June 2011, the Bank entered into an agreement with PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension loans. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.

Premi asuransi akan ditanggung bersama-sama oleh debitur dan Bank. Sebesar 11% dari premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh Generali, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne by both debtors and the Bank. 11% of the premiums paid by debtors which is received by Generali will be returned to the Bank as commission.

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari Generali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Total premium paid by debtors through the Bank and commission fees received from Generali for the year ended 31 December 2019 and 2018 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2019	2018

Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke Generali	149,996	247,552
Penerimaan komisi dari Generali	15,051	25,030

Premium paid by debtors through from the Bank to Generali

Commissions received from Generali

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

m. Perjanjian (lanjutan)

m. Agreements (continued)

PT FWD Life Indonesia

PT FWD Life Indonesia

Pada tanggal 13 Desember 2016, Bank juga melakukan implementasi kerjasama dengan P FWD Life Indonesia ("FWD"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pegawai. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama lima tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya selama lima tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 13 December 2016, the Bank signed an agreement with PT FWD Life Indonesia ("FWD"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible active employee loans. The agreement is effective for five years and shall then be automatically renewed for further five years or as mutually agreed by both parties.

Premi asuransi akan ditanggung oleh debitur. Sebesar 20% dari seluruh premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh FWD, akan dibayarkan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne by debtors. 20% of all premiums paid by debtors which is received by FWD, will be paid to the Bank as commission.

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari FWD untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Total premium paid by the debtors through the Bank and commission fees received from FWD for the years ended 31 December 2019 and 2018 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2019	2018

Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke FWD	58	1,265	
Penerimaan komisi dari FWD	30	300	

			<i>Premium paid by debtors through the Bank to FWD</i>
			<i>Commissions received from FWD</i>

PT Proteksi Antar Nusa

PT Proteksi Antar Nusa

Pada tanggal 1 Maret 2017, Bank telah melakukan perjanjian dengan PT Proteksi Antar Nusa ("PAN"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 1 March 2017, the Bank entered an agreement with PT Proteksi Antar Nusa ("PAN"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan. The agreement is effective for three years and can be extended as mutually agreed by both parties.

Premi asuransi akan ditanggung oleh debitur. Sebesar 10,5% dari seluruh premi yang dibayarkan oleh debitur yang diterima oleh PAN akan dibayarkan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne by debtors. 10.5% of all premiums paid by debtors which is received by PAN will be paid to the Bank as commission.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

m. Perjanjian (lanjutan)

m. Agreements (continued)

PT Proteksi Antar Nusa (lanjutan)

PT Proteksi Antar Nusa (continued)

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari PAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The total premium paid by the debtors through the Bank and commission fees received from PAN for the year ended 31 December 2019 and 2018 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2019	2018

Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke PAN	7,930	2,395
Penerimaan komisi dari PAN	222	221

Premium paid by debtors through the Bank to PAN
Commissions received from PAN

PT Adonai Pialang Asuransi

PT Adonai Pialang Asuransi

Pada tanggal 14 September 2018, Bank telah melakukan perjanjian dengan PT Adonai Pialang Asuransi ("APA"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 14 September 2018, the Bank has entered an agreement with PT Adonai Pialang Asuransi ("APA"), a non-related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioner loan. The agreement is effective for three years and can be extended as mutually agreed by both parties.

Premi asuransi akan ditanggung oleh debitur. Sebesar 20% dari seluruh premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh APA akan dibayarkan kepada Bank sebagai komisi.

The insurance premium is borne by debtors. 20% of all premiums paid by debtors which is received by APA will be paid to the Bank as commission.

Jumlah premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank dan komisi yang diterima dari APA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The total premium paid by the debtors through the Bank and commission fees received from APA for the year ended 31 December 2019 and 2018 were as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2019	2018

Premi yang dibayarkan oleh debitur melalui Bank ke APA	24	-
Penerimaan komisi dari APA	8	-

Premium paid by debtors through the Bank to APA
Commissions received from APA

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

n. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah yang direstrukturisasi

n. Restructured loans and sharia financing/ receivables

31 Desember/December 2019							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Korporasi	4,781	209,109	-	-	-	213,890	Corporates
Pensiunan	475	-	-	-	-	475	Pensioners
Usaha kecil menengah	251,168	44,175	10,753	12,561	54,630	373,287	Small medium enterprises
Usaha mikro kecil	226,497	74,942	9,349	6,564	3,277	320,629	Micro business
Pembiayaan/piutang syariah	47,400	2,229	968	572	384	51,553	Sharia financing/ receivables
	<u>530,321</u>	<u>330,455</u>	<u>21,070</u>	<u>19,697</u>	<u>58,291</u>	<u>959,834</u>	
31 Desember/December 2018							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Korporasi	-	-	-	-	-	-	Corporate
Pensiunan	-	638	-	-	-	638	Pensioners
Usaha kecil menengah	173,255	56,198	4,317	52,529	29,335	315,634	Small medium enterprises
Usaha mikro kecil	377,775	151,092	11,492	18,559	10,343	569,261	Micro business
Pembiayaan/piutang syariah	127,841	3,386	2,059	618	187	134,091	Sharia financing/ receivables
	<u>678,871</u>	<u>211,314</u>	<u>17,868</u>	<u>71,706</u>	<u>39,865</u>	<u>1,019,624</u>	

13. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

13. PREPAYMENTS

	31 Desember/December		
	2019	2018*	
Asuransi kredit	1,860,240	1,913,689	Loans insurance
Sewa bangunan	235,564	223,933	Building rental
Pemeliharaan dan pembaharuan IT	86,400	55,902	IT maintenance and renewal
Tunjangan perumahan	18,686	8,786	Housing allowance
Jasa profesional	8,672	9,988	Professional service
Promosi	19	2,227	Promotion
Lainnya	24,940	12,553	Others
	<u>2,234,521</u>	<u>2,227,078</u>	

Beban dibayar dimuka lainnya termasuk beban dibayar dimuka untuk asuransi jiwa, asuransi uang tunai dan asuransi gedung.

Other prepayments primarily includes prepayments for life, cash and building insurance.

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

*) After restatement (Note 48)

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

Bank memiliki pajak dibayar dimuka terkait:

The Bank has prepaid taxes related to:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Klaim pengembalian pajak	124,022	53,308	<i>Claim for tax refund Corporate income tax overpayment</i>
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan	197,290	-	
	<u>321,312</u>	<u>53,308</u>	

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Pajak penghasilan badan:			<i>Corporate income taxes:</i>
<u>Bank</u>			<i>Bank</i>
- Pasal 29	-	214,287	<i>Article 29 -</i>
- Pasal 25	60,894	-	<i>Article 25 -</i>
<u>Entitas anak</u>			<i>Subsidiary</i>
- Pasal 25	45,980	30,132	<i>Article 25 -</i>
- Pasal 29	12,186	63,989	<i>Article 29 -</i>
	<u>119,060</u>	<u>308,408</u>	
Pajak lainnya:			<i>Other taxes:</i>
<u>Bank</u>			<i>Bank</i>
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	62,269	64,565	<i>Article 23,26 and 4(2) -</i>
- Pasal 21	36,018	24,447	<i>Article 21 -</i>
- Pajak pertambahan nilai	3,129	1,884	<i>Value added tax -</i>
<u>Entitas anak</u>			<i>Subsidiary</i>
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	9,701	7,907	<i>Article 23,26 and 4(2) -</i>
- Pasal 21	6,716	4,335	<i>Article 21 -</i>
- Pajak pertambahan nilai	-	81	<i>Value added tax -</i>
	<u>117,833</u>	<u>103,219</u>	
	<u>236,893</u>	<u>411,627</u>	

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Pajak penghasilan:			<i>Income taxes:</i>
- Kini			<i>Current -</i>
Bank	545,060	521,559	<i>Bank</i>
Entitas anak	526,767	377,414	<i>Subsidiary</i>
- Tangguhan			<i>Deferred -</i>
Bank	2,828	(63,903)	<i>Bank</i>
Entitas anak	(48,151)	(43,706)	<i>Subsidiary</i>
Jumlah beban pajak penghasilan	<u>1,026,504</u>	<u>791,364</u>	<i>Total income tax expenses</i>

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasi sebelum pajak penghasilan dikali tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2019	2018*
Laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	4,018,922	3,049,248
Tarif pajak	25%	25%
Pajak dihitung dengan tarif pajak	1,004,730	762,312
Perbedaan permanen dengan tarif pajak 25%		
- Bank	12,721	20,099
- Entitas anak	9,053	8,953
Beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>1,026,504</u>	<u>791,364</u>

Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan penghasilan kena pajak Bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2019	2018*
Laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	4,018,922	3,049,248
Dikurangi:		
Laba Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	(1,878,249)	(1,299,019)
Laba akuntansi sebelum pajak penghasilan (Bank saja)	<u>2,140,673</u>	<u>1,750,229</u>
Perbedaan temporer:		
Penyisihan kerugian aset produktif - pinjaman yang diberikan	14,632	237,317
Beban penyusutan	(51,247)	(18,940)
Bonus direksi	(55,752)	59,111
Beban atas imbalan pascakerja	59,962	4,451
Akrual, bonus, tantiem dan lain-lain	21,090	(26,327)
Jumlah perbedaan temporer	<u>(11,315)</u>	<u>255,612</u>
Perbedaan permanen:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	50,884	80,396
Penghasilan kena pajak Bank	<u>2,180,242</u>	<u>2,086,237</u>

d. Perhitungan pajak kini dan utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2019	2018*
Penghasilan kena pajak:		
Bank	2,180,242	2,086,237
Entitas anak	2,107,068	1,509,656
	<u>4,287,310</u>	<u>3,595,893</u>
Pajak kini:		
Bank	545,060	521,559
Entitas anak	526,767	377,414
	<u>1,071,827</u>	<u>898,973</u>
Pajak dibayar dimuka:		
Bank	321,312	53,308
Entitas anak	-	-
	<u>321,312</u>	<u>53,308</u>
Utang pajak penghasilan badan:		
Bank	60,894	214,287
Entitas anak	58,166	63,989
	<u>119,060</u>	<u>278,276</u>
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan:		
Bank	197,290	-
Entitas anak	-	-
	<u>197,290</u>	<u>-</u>

*Sebelum penyajian kembali. Lihat penyajian kembali di Catatan 48

14. TAXATION (continued)

c. Income tax expense (continued)

Reconciliation between consolidated accounting profit before income tax multiplied by the prevailing tax rate and consolidated income tax expense was:

Consolidated accounting profit before income tax	4,018,922
Tax rate	25%
Tax calculated at tax rate	1,004,730
Permanent differences at 25% tax rate:	
Bank -	12,721
Subsidiary -	9,053
Consolidated income tax expense	<u>791,364</u>

The reconciliation between consolidated accounting profit before income tax and taxable income of the Bank was as follows:

	31 Desember/December	
	2019	2018*
Consolidated accounting profit before income tax	4,018,922	3,049,248
Less:		
Subsidiary's profit before income tax	(1,878,249)	(1,299,019)
Accounting profit before income tax (Bank only)	<u>2,140,673</u>	<u>1,750,229</u>
Temporary differences:		
Allowance for impairment losses on earning assets - loans	14,632	237,317
Depreciation expenses	(51,247)	(18,940)
Bonus for directors	(55,752)	59,111
Post-employment benefit expenses	59,962	4,451
Accruals, bonus, tantiem and others	21,090	(26,327)
Total temporary differences	<u>(11,315)</u>	<u>255,612</u>
Permanent differences:		
Non-deductible expenses	50,884	80,396
Taxable income of the Bank	<u>2,180,242</u>	<u>2,086,237</u>

d. The computation of current income tax and tax payable was as follows:

Taxable income:	
Bank	2,180,242
Subsidiary	2,107,068
	<u>4,287,310</u>
Current tax expense:	
Bank	545,060
Subsidiary	526,767
	<u>1,071,827</u>
Prepaid taxes:	
Bank	321,312
Subsidiary	-
	<u>321,312</u>
Corporate income tax payable:	
Bank	60,894
Subsidiary	58,166
	<u>119,060</u>
Income tax overpayment:	
Bank	197,290
Subsidiary	-
	<u>197,290</u>

*Before restatement. See Note 48 for the restatement

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank dan Entitas Anak menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah (pelaporan pajak penghasilan konsolidasian tidak diperbolehkan) berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Manajemen mempertahankan posisi perpajakan Perseroan yang diyakini berdasarkan pada teknik dasar yang kuat, sesuai dengan peraturan perpajakan dan upaya manajemen dalam mengantisipasi kemungkinan risiko timbulnya pajak di masa depan.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunannya.

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan Bank dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Bank

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan
 Imbalan kerja jangka pendek
 Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang
 Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain
 Aset tetap
 Lain-lain
 Liabilitas pajak tangguhan - bersih

31 Desember/December 2019				
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Transfer dari SMBCI terkait dengan merger/ Transfer from SMBCI related to merger	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance
	66,492	3,658	(178,678)	(108,528)
	82,246	(2,944)	3,800	83,102
	(33,906)	15,901	-	(7,263)
	(1,010)	-	86	(4,026)
	690	(12,812)	(5,714)	(17,836)
	1,638	(6,631)	6,492	1,499
	<u>116,150</u>	<u>(2,828)</u>	<u>(174,014)</u>	<u>(53,052)</u>

Allowance for impairment losses on loans
Short-term employee benefits
Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Unrealized (gain) loss on available for sale and measured at fair value through other comprehensive income marketable securities
Fixed assets
Others
Deferred tax liabilities – net

14. TAXATION (continued)

- e. Under the taxation laws of Indonesia, the Bank and its Subsidiary calculate and submit individual company tax returns (submission of consolidated income tax computation is not allowed) on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

Management vigorously defends the Company's tax positions which are believed to be grounded on sound technical basis, in compliance with the tax regulations and management efforts to anticipate possible future tax exposure.

The calculation of income tax for the year ended 31 December 2019 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to change at the time Bank submits its annual tax return (SPT).

f. Deferred tax assets (liabilities)

Details of deferred tax assets (liabilities) of the Bank and Subsidiary were as follows:

Bank

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

f. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

31 Desember/December 2018					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance		
Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan	7,163	59,329	-	66,492	<i>Allowance for impairment losses on loans</i>
Imbalan kerja jangka pendek	69,614	12,632	-	82,246	<i>Short-term employee benefits</i>
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	9,175	1,113	(44,195)	(33,907)	<i>Post-employment benefits and other long-term employee benefits</i>
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain	(205)	-	(805)	(1,010)	<i>Unrealized loss on available for sale and measured at fair value through other comprehensive income marketable securities</i>
Aset tetap	5,425	(4,735)	-	690	<i>Fixed assets</i>
Lain-lain	6,074	(4,435)	-	1,639	<i>Others</i>
Aset pajak tangguhan – bersih	97,246	63,904	(45,000)	116,150	<i>Deferred tax assets - net</i>

Entitas Anak

Subsidiary

31 Desember/December 2019					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance		
Imbalan kerja jangka pendek	34,021	15,401	-	49,422	<i>Short-term employee benefits</i>
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	(433)	3,267	(3,050)	(216)	<i>Post-employment benefits and other long-term employee benefits</i>
Aset tetap	11,424	7,357	-	18,781	<i>Fixed assets</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	26,425	10,801	-	37,226	<i>Allowance for impairment losses on murabahah receivables</i>
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari surat berharga	(235)	-	189	(46)	<i>Unrealized gain (loss) from marketable securities</i>
Lainnya	28,382	11,325	-	39,707	<i>Others</i>
Aset pajak tangguhan – bersih	99,584	48,151	(2,861)	144,874	<i>Deferred tax assets - net</i>

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

f. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

	31 Desember/December 2018				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Imbalan kerja jangka pendek Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	28,378	5,643	-	34,021	Short-term employee benefits Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Aset tetap	5,307	6,836	(12,576)	(433)	Fixed assets
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	12,330	(906)	-	11,424	Allowance for impairment losses on murabahah receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai atas persediaan	13,618	12,807	-	26,425	Allowance for impairment loses on inventory
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari surat berharga	1,000	(1,000)	-	-	Unrealized gain/loss from marketable securities
Lainnya	-	-	(235)	(235)	Others
	8,056	20,326	-	28,382	
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>68,689</u>	<u>43,706</u>	<u>(12,811)</u>	<u>99,584</u>	Deferred tax assets - net

g. Surat ketetapan pajak

g. Tax assessment letters

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), SMBCI memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut:

Before the merger (Note 1.b), SMBCI had the following tax assessments:

Tahun pajak 2002

Fiscal year 2002

Pada tahun 2005, Direktur Jendral Pajak ("DJP") menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas pemeriksaan hasil pajak untuk tahun pajak 2002. Pada tahun 2016, SMBCI mengajukan surat keberatan ke DJP. DJP menolak keberatan Bank tersebut.

In 2005, Director of General Taxation ("DGT") issued the Tax Underpayment Letter ("SKPKB") for fiscal year 2002. In 2016, SMBCI filed an objection letter to DGT. DGT rejected SMBCI's objection.

SMBCI mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2007 setelah membayar semua denda dan bunga. Di bulan Desember 2010, Pengadilan Pajak mengabulkan gugatan SMBCI tersebut dan SMBCI menerima semua kelebihan pengembalian pajak.

SMBCI filed an appeal to the Tax Court on 22 June 2007 after paying all penalty and interest. In December 2010, the Tax Court approved SMBCI's appeal and SMBCI received all tax refund.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

g. Tax assessments letters (continued)

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), SMBCI memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut (lanjutan):

Before the merger (Note 1.b), SMBCI had the following tax assessments (continued):

Tahun pajak 2002 (lanjutan)

Fiscal year 2002 (continued)

Atas putusan Pengadilan Pajak yang menyetujui banding SMBCI, DJP mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung di bulan Februari 2011 untuk membatalkan keputusan dari Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, permohonan kasasi tersebut masih dalam proses.

Based on the Tax Court's decision which approved the SMBCI's appeal, DGT filed a judicial review to the Supreme Court in February 2011 to revoke the decision of the Tax Court. Up to the date of consolidated financial statements, the judicial review was still in process.

Untuk kompensasi bunga, pada bulan Februari 2011, SMBCI mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Pajak untuk memperoleh kompensasi bunga terkait pemeriksaan pajak tahun 2002. Pada tanggal 22 September 2011, SMBCI memenangkan gugatan ke Pengadilan Pajak tersebut.

For the interest compensation, in February 2011, SMBCI filed a new appeal to the Tax Court to get interest compensation related with 2002 tax assessment. On 22 September 2011, SMBCI won its appeal to the Tax Court.

Pada bulan Januari 2012, DJP mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan dari Pengadilan Pajak atas imbalan bunga tersebut. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, belum ada hasil atas permohonan kasasi yang diajukan oleh DJP ke Mahkamah Agung.

In January 2012, DGT filed a judicial review to the Supreme Court to revoke the decision of the Tax Court for interest compensation. Up to 31 December 2019, the outcome of the judicial review filed by the DGT to Supreme Court has not been determined yet.

Tahun pajak 2010

Fiscal year 2010

Pada tanggal 18 Desember 2015, SMBCI menerima SKPKB sejumlah Rp 817. SMBCI melunasi seluruh SKPKB (termasuk denda) sebesar Rp 817 pada tanggal 14 Januari 2016.

On 18 December 2015, SMBCI received SKPKB amounted Rp 817. SMBCI paid all taxes underpayment (including penalties) amounting to Rp 817 on 14 January 2016.

Pada tanggal 14 Maret 2016, SMBCI mengajukan keberatan ke Kantor Pajak.

On 14 March 2016, SMBCI filed an objection to Tax Office.

Pada tanggal 20 Januari 2017, Kantor Pajak telah mengeluarkan Surat Keputusan atas Keberatan Wajib Pajak yang menyetujui keberatan SMBCI sebesar Rp 14. SMBCI mengajukan permohonan banding atas tersebut.

On 20 January 2017, the Tax Office issued Decision Letter on Taxpayer Objection which approved SMBCI's objection amounting to Rp 14. SMBCI filed an appeal against the decision.

Pada bulan Februari 2020, Bank menerima Putusan Pengadilan yang menolak permohonan banding Bank. Atas hasil Putusan Pengadilan tersebut, Bank akan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

In February 2020, the Bank has received the decision letter from Tax Court which rejected the Bank's appeal request. Based on the decision letter, the Bank will file an appeal for Judicial Review to the Supreme Court.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), SMBCI memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut (lanjutan):

Tahun pajak 2015

Pada tahun 2016, sehubungan dengan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp 36.179, kewajiban perpajakan SMBCI tahun 2015 diperiksa oleh Kantor Pajak.

Pada tanggal 26 April 2017, SMBCI menerima surat ketetapan bahwa Kantor Pajak hanya menyetujui klaim pengembalian pajak SMBCI sebesar Rp 4.249 dari Rp 36.179. SMBCI mengajukan surat keberatan sejumlah Rp 31.930, yang dicatat sebagai klaim pengembalian pajak.

Pada tanggal 12 Juli 2018, SMBCI menerima surat penolakan dari kantor pajak atas keberatan yang diajukan sebelumnya.

Pada tanggal 9 Oktober 2018, SMBCI mengajukan surat banding atas surat penolakan kantor pajak.

Pada tanggal 1 November 2019, SMBCI menerima putusan Pengadilan Pajak dimana dalam putusan disebutkan permohonan banding SMBCI dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Pajak.

Pada bulan Januari 2020, Bank menerima pengembalian pajak sebesar Rp 31.930. Pada bulan Februari 2020, Bank menerima pemberitahuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh DJP. Bank telah menyampaikan Surat Kontra Memorandum kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Maret 2020.

Tahun pajak 2014

Pada tanggal 19 Februari 2019, SMBCI menerima beberapa SKPKB sehubungan dengan tahun pajak 2014 dengan total sebesar Rp 48.227 (termasuk denda). Sesuai dengan peraturan yang berlaku, SMBCI telah melunasi SKPKB (termasuk denda) tersebut pada 27 Februari 2019. Pada tanggal 26 April 2019, SMBCI mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPN. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, proses keberatan pajak tahun pajak 2014 masih berlangsung.

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), BTPN memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut:

Tahun pajak 2016

Pada tanggal 5 Desember 2018, BTPN menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2016. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, proses pemeriksaan masih berlangsung.

14. TAXATION (continued)

g. Tax assessments letters (continued)

Before the merger (Note 1.b), SMBCI had the following tax assessments (continued):

Fiscal year 2015

In 2016, in relation with the overpayment income tax for year 2015 of Rp 36,179, SMBCI's 2015 taxes were being audited by the Tax Office.

On 26 April 2017, SMBCI received a decision letter that the Tax Office only approved SMBCI's claim for tax refund amounting to Rp 4,249 out of Rp 36,179. SMBCI filed an objection letter amounted to Rp 31,930, which was recorded as claim for tax refund.

On 12 July 2018, SMBCI received rejection letter from the tax office for the objection letter submitted earlier.

On 9 October 2018, SMBCI filed on appeal letter for the rejection letter sent by the tax office.

On 1 November 2019, SMBCI has received Tax Court decision which stated then SMBCI's appeal request has been wholly granted by the Tax Court.

In January 2020, the Bank has received the tax refund amounted to Rp 31,930. In February 2020, the Bank received notification of Judicial Review filed by DGT. On 5 March 2020, the Bank has submitted the letter of Counter Memorandum to the Supreme Court through the Tax Court.

Fiscal year 2014

On 19 February 2019, SMBCI received assessment letters of SKPKB relating to fiscal year 2014 totaling to Rp 48,227 (including penalties). Based on the prevailing tax regulation, SMBCI fully paid the SKPKB (including penalties) on 27 February 2019. On 26 April 2019, SMBCI filed an objection letter toward SKPKB for corporate income tax and VAT. Up to 31 December 2019, the objection process for fiscal year 2014 was still on going.

Before the merger (Note 1.b), BTPN had the following tax assessments

Fiscal year 2016

On 5 December 2018, BTPN received tax audit notice for fiscal year 2016. Up to 31 December 2019, the tax audit was still on going.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), BTPN memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut: (lanjutan)

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 29 April 2019, BTPN menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp 48.017 dari total lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp 53.308. Atas selisih Rp 5.237, BTPN mengajukan keberatan dengan surat pengajuan tanggal 23 Juli 2019. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, proses pengajuan keberatan masih berlangsung.

Pada tanggal 19 Desember 2019, BTPN menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk PPh Pasal 23/26 masa pajak Januari 2019. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, proses pemeriksaan masih berlangsung.

h. Persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha

Pada tanggal 28 Mei 2019, sesuai dengan surat No. S.022/DIRUT/FINCP/V/2019, Bank telah mengajukan permohonan izin untuk dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha antara BTPN dengan SMBCI.

Pada tanggal 2 Agustus 2019, Bank telah menerima surat keputusan dari DGT No. KEP-196/WPJ.19/2019 tertanggal 30 Juli 2019 mengenai persetujuan penggunaan nilai buku menurut pajak atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

14. TAXATION (continued)

g. Tax assessments letters (continued)

Before the merger (Note 1.b), BTPN had the following tax assessments (continued)

Fiscal year 2017

On 29 April 2019, BTPN received Tax Overpayment Letter ("SKPLB") amounting to Rp 48,017 from the total overpayment in annual tax return amounting to Rp 53,308. BTPN filed an objection letter on 23 July 2019 for the difference of Rp 5,237. Up to 31 December 2019, the objection process was still on going.

On 19 December 2019, BTPN received a tax audit notification letter for Income Tax Article 23/26 for the January 2019 tax period. Up to 31 December 2019, the tax audit was still on going.

h. Approval of the use of book value towards the transfer asset in regards of merger

On 28 May 2019, in accordance with Letter No. S.022/DIRUT/FINCP/V/2019, the Bank submitted a request for permission to use the book value towards the transfer asset in regards of merger between BTPN and SMBCI.

On 2 August 2019, the Bank received decision letter from DGT No. KEP-196/WPJ.19/2019 dated 30 July 2019 regarding approval to use tax book value towards the transfer asset in regards of merger.

15. ASET TETAP

15. FIXED ASSETS

	31 Desember/December 2019						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan dari penggabungan usaha/ Additions from merger	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Model revaluasi							Revaluation model
Kepemilikan langsung							Direct ownership
Tanah	908,804	-	-	-	-	908,804	Land
Model biaya							Cost model
Kepemilikan langsung							Direct ownership
Gedung	394,886	-	1,613	-	13,555	410,054	Buildings
Kendaraan bermotor	152,354	-	73,943	(24,265)	5,836	207,868	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	1,226,677	154,952	48,251	(174,113)	162,445	1,418,212	Office equipments
Leasehold improvement	670,356	105,429	24,206	(40,989)	13,661	772,663	Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian	35,339	-	176,110	(1,667)	(175,538)	34,244	Construction in progress
	<u>3,388,416</u>	<u>260,381</u>	<u>324,123</u>	<u>(241,034)</u>	<u>19,959</u>	<u>3,751,845</u>	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Gedung	(210,527)	-	(45,086)	154	4	(255,455)	Buildings
Kendaraan bermotor	(88,358)	-	(32,453)	16,364	-	(104,447)	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	(847,709)	(75,760)	(215,249)	166,358	(3)	(972,363)	Office equipments
Leasehold improvement	(455,095)	(39,565)	(65,476)	34,303	(1)	(525,834)	Leasehold improvement
	<u>(1,601,689)</u>	<u>(115,325)</u>	<u>(358,264)</u>	<u>217,179</u>	<u>-</u>	<u>(1,858,099)</u>	
Nilai buku bersih	<u>1,786,727</u>					<u>1,893,746</u>	Net book value

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

15. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember/December 2018						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Model revaluasi						Revaluation model
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	831,700	77,104	-	-	908,804	Land
Model biaya						Cost model
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Gedung	326,099	39,189	-	29,598	394,886	Buildings
Kendaraan bermotor	131,646	41,366	(20,658)	-	152,354	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	1,097,189	126,824	(34,818)	37,482	1,226,677	Office equipments
Leasehold improvement	592,996	61,657	(211)	15,914	670,356	Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian	14,438	113,935	(10,596)	(82,438)	35,339	Construction in progress
	<u>2,994,068</u>	<u>460,075</u>	<u>(66,283)</u>	<u>556</u>	<u>3,388,416</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Gedung	(188,112)	(22,415)	-	-	(210,527)	Buildings
Kendaraan bermotor	(79,748)	(27,056)	18,446	-	(88,358)	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	(699,652)	(176,378)	28,321	-	(847,709)	Office equipments
Leasehold improvement	(366,436)	(88,724)	65	-	(455,095)	Leasehold improvement
	<u>(1,333,948)</u>	<u>(314,573)</u>	<u>46,832</u>	<u>-</u>	<u>(1,601,689)</u>	
Nilai buku bersih	<u>1,660,120</u>				<u>1,786,727</u>	Net book value

Rincian kerugian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Detail of the loss on disposal of fixed assets was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Hasil atas penjualan aset tetap	6,026	4,456	Proceeds from sale of fixed assets
Nilai buku bersih	(9,551)	(7,820)	Net book value
Kerugian penjualan aset tetap	(3,525)	(3,364)	Loss on sale of fixed assets

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 34.245 dan Rp 35.339 merupakan gedung yang disewa dari pihak ketiga dan masih dalam tahap renovasi dan perlengkapan kantor yang masih dalam tahap konstruksi. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2020 dengan persentase penyelesaian adalah antara 5% - 95% pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: 5% - 95%).

Assets under construction as of 31 December 2019 and 2018 amounted to Rp 34,245 and Rp35,339, respectively, related to buildings that were rented from third parties but was still in the renovation progress and office equipments that were still under construction. Those constructions are estimated to be completed in 2020 with current percentages of completion between 5% - 95% as of 31 December 2019 (31 December 2018: 5% - 95%).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga:

As of 31 December 2019 and 2018, fixed assets, except for land, have been insured by the third party insurance companies:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
PT Asuransi MSIG Indonesia	1,165,071	-	PT Asuransi MSIG Indonesia
PT Asuransi Adira Dinamika Syariah	142,288	121,655	PT Asuransi Adira Dinamika Syariah
PT Asuransi Adira Dinamika	11,130	1,056,569	PT Asuransi Adira Dinamika
PT Salvus Inti	-	15,550	PT Salvus Inti
Jumlah	<u>1,318,489</u>	<u>1,193,774</u>	Total

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa nilai pertanggungansian asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank dan Entitas Anak melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak diperlukan perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

Penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 358.264 dan Rp 314.573 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 35).

Pada tanggal 31 Desember 2019, aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank adalah sebesar Rp 1.529.897 (31 Desember 2018: Rp 1.079.504).

Manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai yang permanen atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan dan semua aset tetap tidak dibatasi kepemilikannya.

Revaluasi tanah

Penilaian atas tanah pada tanggal 31 Desember 2018 dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Susan, Widjojo & Rekan/VPC Asia Pacific dalam Laporan Penilaian No. 004/SWR/ADF/1/2019 tertanggal 18 Januari 2019. Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI tahun 2015 dan Peraturan Bapepam-LK No.VIII.C.4, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar. Pada tanggal 31 Desember 2018 nilai wajar (hirarki nilai wajar level 2) tanah yang dimiliki Bank bernilai Rp 899.337.

Nilai wajar tingkat 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar dan estimasi biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Harga pasar dari tanah yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut utama seperti ukuran aset, lokasi dan penggunaan aset. Untuk kedua pendekatan di atas, input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi harga per meter.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. FIXED ASSETS (continued)

The Bank and Subsidiary believe that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the fixed assets.

As of 31 December 2019 and 2018, the Bank and Subsidiary performed a review on useful life, depreciation method and residual value of fixed assets and concluded that no change in these method and assumptions was necessary.

The depreciation of fixed assets for the years ended 31 December 2019 and 2018 amounting to Rp 358,264 and Rp 314,573, respectively, was charged to general and administrative expenses (Note 35).

As of 31 December 2019, fixed assets that have been fully depreciated but were still in use to support the Bank's operation activities amounted to Rp 1,529,897 (31 December 2018: Rp 1,079,504).

The Bank and Subsidiary's management believe that there was no indication of permanent impairment in the value of fixed assets as of 31 December 2019 and 2018.

As of 31 December 2019 and 2018 there was no fixed asset pledged as collateral and no limitation of ownership of the fixed assets.

Revaluation of land

The valuation of land as of 31 December 2018 was performed by external independent valuer, KJPP Susan, Widjojo & Rekan/VPC Asia Pacific in the Valuation Report No. 004/SWR/ADF/1/2019 dated 18 January 2019. Valuations are performed based on Indonesian Valuation Standards Edition VI year 2015 and Bapepam-LK Regulations No.VIII.C.4 which appropriate with recent market transactions done on arm's length terms. The valuation method used is market data approach. As of 31 December 2018 fair values (fair value hierarchy level 2) of the Bank's land was Rp 899,337.

Level 2 fair values of land is calculated using the comparable market data approach and cost reproduction or cost replacement approach. The approximate market prices of comparable land is adjusted for differences in key attributes such as property size, location and use of an asset. For the two above approaches, the most significant input into this valuation approach is price per square meter assumption.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Informasi mengenai penilaian kembali tanah pada tanggal 31 Desember 2018 untuk kelompok aset tanah yang dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

15. FIXED ASSETS (continued)

Information of the revaluation of land as of 31 December 2018 performed by Bank was as follows:

	Nilai buku sebelum revaluasi/ <i>Carrying amount before revaluation</i>	Nilai buku setelah revaluasi/ <i>Carrying amount after revaluation</i>	Keuntungan revaluasi/ <i>Gain on revaluation</i>	
Tanah	822,233	899,337	77,104	Land

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah yang menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp 77.104 dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain".

The revaluation of land that resulted in an increase in the carrying amount of land and building amounting to Rp 77,104 was recognised as "Other Comprehensive Income".

Penilaian kembali tanah untuk tujuan perpajakan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-356/WPJ.19/2016 tanggal 16 Maret 2016. Bank melakukan penilaian kembali aset tetap dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015. Ketentuan penyusutan fiskal aset tetap untuk tujuan pajak setelah penilaian kembali dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016.

Revaluation of land for tax purposes was performed after the approval from Directorate General of Tax through its letter No. KEP-356/WPJ.19/2016 dated 16 March 2016. The Bank performed revaluation of fixed assets in accordance with the Finance Minister Regulation (PMK) No. 191/PMK.010/2015, dated 15 October 2015, as amended by PMK No. 233/PMK.03/2015, dated 21 December 2015. The provision concerning the fiscal depreciation of fixed assets for tax purpose after revaluation was started on 1 January 2016.

Berdasarkan kajian manajemen pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat kenaikan yang signifikan atas nilai tanah sehingga manajemen memutuskan untuk tidak membukukan nilai kenaikan tanah tersebut.

Based on assessment performed by management as of 31 December 2019, there was no significant increase on the value of land. Therefore, management decided not to book the increment of fair value.

16. ASET TAK BERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

31 Desember/December 2019

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan dari penggabungan usaha/ <i>Additions from merger</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Deductions</i>	Reklasifikasi / <i>Reclassifica tion</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan							Cost
Piranti lunak	1,236,783	199,330	13,622	(6,144)	448,571	1,892,162	Software
Pengembangan piranti lunak	365,786	-	366,612	(19,749)	(468,530)	244,119	Software development
Goodwill	61,116	-	-	-	-	61,116	Goodwill
	<u>1,663,685</u>	<u>199,330</u>	<u>380,234</u>	<u>(25,893)</u>	<u>(19,959)</u>	<u>2,197,397</u>	
Akumulasi amortisasi							Accumulated amortisation
Piranti lunak	(722,855)	(93,063)	(318,284)	5,347	-	(1,128,855)	Software
Nilai buku bersih	<u>940,830</u>					<u>1,068,542</u>	Net book value

31 Desember/December 2018

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan						Cost
Piranti lunak	936,505	15,843	-	284,435	1,236,783	Software
Pengembangan piranti lunak	283,766	377,097	(10,086)	(284,991)	365,786	Software development
Goodwill	61,116	-	-	-	61,116	Goodwill
	<u>1,281,387</u>	<u>392,940</u>	<u>(10,086)</u>	<u>(556)</u>	<u>1,663,685</u>	
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation
Piranti lunak	(512,325)	(210,530)	-	-	(722,855)	Software
Nilai buku bersih	<u>769,062</u>				<u>940,830</u>	Net book value

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)

Sisa periode amortisasi untuk piranti lunak adalah 1 sampai dengan 4 tahun.

Goodwill merupakan selisih antara nilai perolehan dengan nilai wajar dari aset Entitas Anak yang diakuisisi pada tahun 2014 dimana Bank mengakuisisi 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk).

Manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Amortisasi aset tak berwujud untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 318.284 dan Rp 210.530 dan dibebankan sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 35).

16. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Remaining amortisation period of software is 1 to 4 years.

Goodwill arises from the difference between the cost of acquisition with the fair value of Subsidiary's assets acquired in 2014 where the Bank acquired 70% of PT Bank Sahabat Purba Danarta's shares (now PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk).

Bank and Subsidiary's management believe that there is no impairment in the value of intangible assets as of 31 December 2019 and 2018.

The amortisation of intangible assets for the years ended 31 December 2019 dan 2018 amounted to Rp 318,284 and Rp 210,530, respectively, and was changed to general and administrative expenses (Note 35).

17. ASET LAIN-LAIN – BERSIH

17. OTHER ASSETS – NET

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Transaksi ATM dan transfer	89,998	55,505	<i>ATM transaction and transfer</i>
Aset imbalan kerja (Catatan 24)	69,202	172,312	<i>Employee benefits assets (Note 24)</i>
Jaminan sewa	69,177	41,070	<i>Rental security deposits</i>
Uang muka	32,945	41,738	<i>Advance payment</i>
Tagihan kepada asuransi	23,232	20,618	<i>Receivables from insurance company</i>
Persediaan keperluan kantor	14,290	6,853	<i>Office supplies</i>
Agunan yang diambil alih dari entitas anak	169	169	<i>Foreclosed collateral from subsidiary</i>
Pembayaran obligasi	-	6,000	<i>Bonds payment</i>
Lain-lain	33,918	20,587	<i>Others</i>
	<u>332,931</u>	<u>364,852</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(169)	(169)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>332,762</u>	<u>364,683</u>	

Uang muka merupakan uang muka pembelian inventaris, beban perjalanan dinas dan uang muka operasional lainnya.

Transaksi ATM dan transfer terdiri dari piutang atas transaksi ATM dan transfer antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya.

Aset imbalan kerja merupakan kelebihan pendanaan pada aset program dimana terdapat manfaat ekonomi masa depan untuk Bank.

Jaminan sewa merupakan pembayaran atas uang jaminan sewa gedung.

Advance payment consists of advances for purchase on office supplies, business trip allowances and other operational advances.

ATM transaction and transfer consists of receivables from ATM transaction and transfer from other banks that will be settled on the following working day.

Employee benefit assets derived from overfunding in plan asset program which provide future economic benefit to the Bank.

Rental security deposits represent security deposits payment on building rent.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. ASET LAIN-LAIN – BERSIH (lanjutan)

Tagihan kepada asuransi adalah klaim kepada pihak asuransi atas uang pesangon karyawan dan klaim pengembalian premi nasabah kredit pensiun.

Persediaan keperluan kantor merupakan persediaan atas formulir aplikasi, materai, kartu ATM dan cek.

Pembayaran obligasi merupakan pembayaran atas hutang pokok dan bunga obligasi ke PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang akan jatuh tempo di awal bulan berikutnya.

Lain-lain terdiri dari berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2019	2018
Saldo awal	(169)	(4,000)
Cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 36)	-	(10,331)
Penghapusbukuhan	-	14,162
Saldo akhir tahun	<u>(169)</u>	<u>(169)</u>

Penyisihan kerugian aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dibentuk untuk agunan yang diambil alih dari Entitas Anak. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai.

18. LIABILITAS SEGERA

Seluruh liabilitas segera adalah dalam mata uang Rupiah dan dengan pihak ketiga.

	31 Desember/December	
	2019	2018
Titipan bagi hasil deposito syariah	4,307	2,906
Titipan uang pensiun	4,304	7,108
Titipan uang notaris	1,730	1,537
Titipan asuransi pensiun	473	525
Kiriman uang yang belum diselesaikan	423	301
Lain-lain	7,031	2,946
	<u>18,268</u>	<u>15,323</u>

Titipan uang pensiun merupakan tumpukan uang pembayaran pensiun nasabah yang akan dibayarkan ke rekening nasabah.

Liabilitas segera lain-lain terutama merupakan titipan pemulihan *fraud* dan aktivitas sosial.

17. OTHER ASSETS – NET (continued)

Receivables from insurance company are the claim to the insurance companies on employees' severance pay and premium refund claim for pension loan's debtors.

Office supplies represent supply of application forms, stamps, ATM cards and cheques.

Bonds payment represents principal and interest payment of bonds which will be due in the beginning of the following month to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Others mainly consist of various receivables from transaction with third parties.

The movement of the allowance for impairment losses for other assets was as follows:

Balance at beginning of year	(4,000)
Provision for impairment losses (Note 36)	(10,331)
Write-off	14,162
Balance at end of year	(169)

Allowance for impairment losses as of 31 December 2019 and 2018 were made for foreclosed collateral from Subsidiary. Management believes that allowance for impairment losses is sufficient.

18. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

All obligations due immediately were denominated in Rupiah and to third parties.

Unsettled sharia profit-sharing	2,906
Unsettled pension funds	7,108
Unsettled notary funds	1,537
Unsettled pension insurance funds	525
Unsettled remittance transactions	301
Others	2,946
	<u>15,323</u>

Unsettled pension funds represent the customer's retirement payments that will be paid to the customer's bank account.

Other obligations due immediately mostly consist of unsettled fraud recovery and social activities.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN NASABAH

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Pihak ketiga:			<i>Third parties:</i>
- Giro	14,315,643	1,115,370	<i>Current accounts -</i>
- Tabungan	9,944,811	7,707,013	<i>Savings deposits -</i>
- Deposito berjangka	51,619,382	52,469,682	<i>Time deposits -</i>
- Deposito on call	2,969,819	2,562,223	<i>Deposits on call -</i>
	<u>78,849,655</u>	<u>63,854,288</u>	
Pihak berelasi:			<i>Related parties:</i>
- Giro	58,583	3,535	<i>Current accounts -</i>
- Tabungan	10,894	21,825	<i>Savings deposits -</i>
- Deposito berjangka	469,683	392,704	<i>Time deposits -</i>
- Deposito on call	-	579,500	<i>Deposits on call -</i>
	<u>539,160</u>	<u>997,564</u>	
	<u>79,388,815</u>	<u>64,851,852</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>210,601</u>	<u>233,429</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>79,599,416</u>	<u>65,085,281</u>	
Berdasarkan mata uang:	<i>By currency:</i>		
	31 Desember/December		
	2019	2018	
Simpanan nasabah:			<i>Deposits from customers:</i>
Rupiah	67,317,139	60,627,621	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	10,893,144	4,224,152	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	1,103,663	-	<i>Japanese Yen</i>
Mata uang asing lainnya	74,869	79	<i>Other foreign currency</i>
	<u>79,388,815</u>	<u>64,851,852</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>210,601</u>	<u>233,429</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>79,599,416</u>	<u>65,085,281</u>	

a. Giro

a. Current accounts

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Rupiah	5,431,023	1,089,507	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	7,866,301	29,398	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	1,036,827	-	<i>Japanese Yen</i>
Mata uang asing lainnya	40,075	-	<i>Other foreign currencies</i>
	<u>14,374,226</u>	<u>1,118,905</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>731</u>	<u>961</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>14,374,957</u>	<u>1,119,866</u>	

Giro Wadiah yang dikelola oleh anak perusahaan, masing-masing sebesar Rp 25.248 & Rp 100.350 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Wadiah current account managed by Bank's subsidiary, amounted to Rp 25,248 & Rp 100,350 as of 31 December 2019 and 2018, respectively.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Giro (lanjutan)

a. Current accounts (continued)

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun:

The average interest rate per annum for current accounts:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended December		
	2019	2018	
Rupiah	1.43%	4.46%	Rupiah
Mata uang asing	0.15%	0.97%	Foreign currencies

Saldo giro yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 163.395 (31 Desember 2018: nihil).

Total current accounts which were blocked as of 31 December 2019 amounted to Rp 163,395 (31 December 2018: nil).

b. Tabungan

b. Saving deposits

Berdasarkan jenis:

By type:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Tabungan "Jenius"	3,141,319	1,015,428	"Jenius" Savings
Tabungan "Citra Pensiun"	2,501,285	2,642,607	"Citra Pensiun" Savings
Tabungan "Se To"	2,094,713	2,129,805	"Se To" Savings
Tabungan "Wadiah TUR Prospera"	1,813,317	1,505,640	"Wadiah TUR Prospera" Savings
Tabungan "Pasti"	175,326	199,082	"Pasti" Savings
Tabungan "Citra"	38,003	-	"Citra" Savings
Tabungan "Wadiah WOW iB"	15,205	13,206	"Wadiah WOW iB" Savings
Lain-lain	176,537	223,070	Others
	<u>9,955,705</u>	<u>7,728,838</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	3,066	2,575	Accrued interest expenses
	<u>9,958,771</u>	<u>7,731,413</u>	

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Simpanan nasabah			Deposits from customers
Rupiah	9,807,345	7,705,784	Rupiah
Dolar Amerikat Serikat	95,712	22,996	United States Dollar
Yen Jepang	17,854	54	Japanese Yen
Mata uang asing lainnya	34,794	4	Other foreign currencies
	<u>9,955,705</u>	<u>7,728,838</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	3,066	2,575	Accrued interest expenses
	<u>9,958,771</u>	<u>7,731,413</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Tabungan (lanjutan)

b. Saving deposits (continued)

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun:

Average interest rate per annum for saving deposits:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended December		
	2019	2018	
Rupiah	2.5%	2.14%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	0.31%	0.69%	<i>Foreign currencies</i>
Saldo tabungan yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 5.072 dan Rp 5.195.			<i>Total saving deposits which are blocked as of 31 December 2019 and 2018 amounted to Rp 5,072 and Rp 5,195, respectively.</i>

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Deposito berjangka			<i>Time Deposits</i>
Rupiah	49,751,557	48,690,607	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	2,298,367	4,171,758	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	39,141	-	<i>Japanese Yen</i>
Mata uang asing lainnya	-	21	<i>Other foreign currencies</i>
	<u>52,089,065</u>	<u>52,862,386</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	204,823	225,934	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>52,293,888</u>	<u>53,088,320</u>	

Berdasarkan jangka waktu:

By time period:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Hingga 1 bulan	28,516,430	30,014,943	<i>Up to 1 month</i>
Lebih dari 1 - 3 bulan	16,018,424	14,330,755	<i>More than 1 - 3 months</i>
Lebih dari 3 - 6 bulan	4,996,149	5,250,452	<i>More than 3 - 6 months</i>
Lebih dari 6 - 12 bulan	2,521,906	3,224,498	<i>More than 6 - 12 months</i>
Lebih dari 1 tahun	36,156	41,738	<i>More than 1 year</i>
	<u>52,089,065</u>	<u>52,862,386</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	204,823	225,934	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>52,293,888</u>	<u>53,088,320</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo:

By remaining period to maturity date:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Hingga 1 bulan	35,345,144	35,294,075	<i>Up to 1 month</i>
Lebih dari 1 - 3 bulan	13,792,455	12,580,594	<i>More than 1 - 3 months</i>
Lebih dari 3 - 6 bulan	1,906,146	4,109,846	<i>More than 3 - 6 months</i>
Lebih dari 6 - 12 bulan	1,028,813	858,647	<i>More than 6 - 12 months</i>
Lebih dari 1 tahun	16,507	19,224	<i>More than 1 year</i>
	<u>52,089,065</u>	<u>52,862,386</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	204,823	225,934	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>52,293,888</u>	<u>53,088,320</u>	

Berdasarkan tingkat suku bunga:

By interest rate:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Hingga 7%	44,590,172	11,598,222	<i>Up to 7%</i>
7% - 8%	7,236,869	25,852,788	<i>7% - 8%</i>
8% - 9%	262,024	15,411,376	<i>8% - 9%</i>
	<u>52,089,065</u>	<u>52,862,386</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	204,823	225,934	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>52,293,888</u>	<u>53,088,320</u>	

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito:

Average interest rate per annum for time deposits:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended December		
	2019	2018	
Rupiah	7.41%	6.71%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	2.21%	2.16%	<i>Foreign currencies</i>

Saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing adalah sebesar Rp 235.095 dan Rp 143.678.

Total time deposits blocked or pledged for collaterals of loans as of 31 December 2019 and 2018 amounted to Rp 235,095 and Rp 143,678, respectively.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

d. Deposito on call

d. Deposits on call

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Deposito <i>on call</i>			<i>Deposits on call</i>
- Rupiah	2,327,214	3,141,723	<i>Rupiah -</i>
- Dolar Amerika Serikat	632,764	-	<i>United States Dolar -</i>
- Yen Jepang	9,841	-	<i>Japanese Yen -</i>
	<u>2,969,819</u>	<u>3,141,723</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	1,981	3,959	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>2,971,800</u>	<u>3,145,682</u>	

Rata-rata suku bunga deposito *on call* per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing adalah 6,66% dan 6,56%.

Average interest rates on deposits on call per annum for the years ended 31 December 2019 and 2018 were 6.66% and 6.56%, respectively.

20. SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN

20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Pihak ketiga	4,342,049	14,394	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	7,291,425	-	<i>Related parties</i>
	<u>11,633,474</u>	<u>14,394</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	57,081	-	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>11,690,555</u>	<u>14,394</u>	

a. Berdasarkan jenis:

a. By type:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
<i>Call money</i>	11,568,219	-	<i>Call money</i>
<i>Bank acceptance finance</i>	50,000	-	<i>Bank acceptance finance</i>
Giro	15,234	14,373	<i>Current accounts</i>
Tabungan	21	21	<i>Saving deposits</i>
	<u>11,633,474</u>	<u>14,394</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	57,081	-	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>11,690,555</u>	<u>14,394</u>	

Tidak ada saldo simpanan dari bank-bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

There were no deposits from other banks which were blocked or pledged as of 31 December 2019 and 2018.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN (lanjutan)

20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan mata uang:

b. By currency:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Rupiah	4,345,162	14,394	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	7,288,312	-	<i>United States Dollar</i>
	<u>11,633,474</u>	<u>14,394</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	57,081	-	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>11,690,555</u>	<u>14,394</u>	

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

c. Average interest rate per annum:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended December		
	2019	2018	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
<i>Call money</i>	6.81%	4.83%	<i>Call money</i>
<i>Bank acceptance finance</i>	7.5%	-	<i>Bank acceptance finance</i>
Tabungan	1.5%	0.55%	<i>Savings deposits</i>
Giro	0.03%	0.31%	<i>Current accounts</i>
Deposito berjangka	-	6.29%	<i>Time deposits</i>
Dolar Amerika Serikat			<i>United States Dollar</i>
<i>Call money</i>	2.94%	-	<i>Call money</i>

d. Jangka waktu:

d. Time period:

Jangka waktu simpanan dari bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah kurang dari 1 tahun.

The time period of deposits from other banks as of 31 December 2019 and 2018 was less than 1 year.

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 43.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 43.

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

21. SECURITIES ISSUED

a. Surat utang jangka menengah

a. Medium term notes

	Peringkat/ Rating*)	31 Desember/ December 2019	
Nilai nominal: <i>Medium term notes II SMBCI</i>	idAAA	1,302,000	<i>Nominal value: Medium term notes II SMBCI</i>
Dikurangi: Biaya transaksi yang belum diamortisasi		(591)	<i>Less: Unamortised transaction costs</i>
		<u>1,301,409</u>	
Ditambah: Beban bunga yang masih harus dibayar		5,032	<i>Add: Accrued interest expenses</i>
		<u>1,306,441</u>	
Surat utang jangka menengah sesuai dengan jangka waktunya: 1 - 3 tahun		1,302,000	<i>Medium term notes based on time period: 1 - 3 years</i>
		<u>1,302,000</u>	

*) Berdasarkan peringkat dari PT Pemingkat Efek Indonesia

*) Based on rating by PT Pemingkat Efek Indonesia

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

21. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Surat utang jangka menengah (lanjutan)

a. Medium term notes (continued)

Pembayaran bunga surat utang jangka menengah dilakukan setiap 3 bulan dan pembayaran pokok dilakukan pada saat jatuh tempo (Juni 2020). Bank telah melakukan pembayaran bunga sesuai dengan jadwal.

Interest on medium term notes are paid every 3 months and the principal are paid on maturity date (June 2020). The Bank has paid the interest based on the schedule.

Dalam perjanjian perwaliamanatan, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi, antara lain untuk mempertahankan tingkat kesehatan Bank minimal berada dalam peringkat komposit 3 yang tergolong "Cukup Baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lainnya. Bank telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

The trustee agreements provide several negative covenants, among others, maintain the Bank's health level at least in composite rating 3, which is classified as "Fair" according to internal rating Bank Indonesia or by Financial Service Authority or other financial institutions authority. The Bank has complied with the covenants on the trustee agreement.

Beban bunga atas surat utang jangka menengah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 99.628 (Catatan 32).

The interest expenses of medium term notes for the years ended 31 December 2019 amounted to Rp 99,628 (Note 32).

b. Utang obligasi

b. Bonds payable

	Peringkat/ Rating*)	31 Desember/December		
		2019	2018	
Nilai nominal:				Nominal value:
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	AAA(idn)	-	300,000	Continuance Bonds III - Phase I
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	AAA(idn)	900,000	900,000	Continuance Bonds III - Phase II
- Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	AAA(idn)	1,000,000		Continuance Bonds IV - Phase I
		<u>1,900,000</u>	<u>1,200,000</u>	
Dikurangi:				Less:
Biaya emisi yang belum diamortisasi		(10,781)	(2,558)	Unamortised bonds issuance costs
		<u>1,889,219</u>	<u>1,197,442</u>	
Ditambah:				Add:
Beban bunga yang masih harus dibayar		21,254	19,875	Accrued interest expenses
		<u>1,910,473</u>	<u>1,217,317</u>	
Utang obligasi sesuai dengan jangka waktunya:				Bonds payable based on time period:
Hingga 1 tahun		-	300,000	Up to 1 year
Lebih dari 1-3 tahun		-	900,000	More than 1-3 years
Lebih dari 3 tahun		1,900,000	-	More than 3 years
		<u>1,900,000</u>	<u>1,200,000</u>	

*) Berdasarkan peringkat dari PT Fitch Ratings Indonesia

*) Based on rating by PT Fitch Ratings Indonesia

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

21. SECURITIES ISSUED (continued)

b. Utang obligasi (lanjutan)

b. Bonds payable (continued)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Other information relating to bonds payable as of 31 December 2019 and 2018 was as follows:

Seri/ Series	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Tanggal penerbitan/ Date of issuance	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok obligasi/ Bonds principal installment
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I/Continuing Bonds III Phase I:					
Seri/ Series B	300,000	8.00%	1 Juli/ July 2016	1 Juli/ July 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II/Continuing Bonds III Phase II:					
Seri/ Series B	900,000	7.50%	17 Oktober/ October 2020	17 Oktober/ October 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I/Continuing Bonds IV Phase I:					
Seri/ Series A	799,000	7.55%	26 November/ November 2022	26 November/ November 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/ Series B	201,000	7.75%	26 November/ November 2024	26 November/ November 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 bulan dan pembayaran pokok dilakukan pada saat jatuh tempo. Bank telah melakukan pembayaran pokok dan bunga obligasi sesuai dengan jadwal.

Bonds interests are paid every 3 months and bonds principals are paid on the maturity date. Bank has paid the bonds principal and interest based on the schedule.

Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank, antara lain tidak menerbitkan obligasi lain atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II serta yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman dan fasilitas dari pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit (untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II).

The trustee agreements provide several negative covenants to the Bank, among others, not issuing another bonds or other similar debt instrument with higher collecting right compares to Continuing Bonds III Phase I and Continuing Bonds III Phase II and collateralised with asset, except loans and facilities from bilateral interbank loan and bilateral facilities from Bank Indonesia which are secured with assets in the amount of 20% from assets which are calculated from the last audited financial statements (Applied to Continuing Bond III Phase II).

Bank berkewajiban menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% dari total obligasi yang diterbitkan termasuk pokok obligasi. Bank telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

The Bank should keep the total assets that have not been specifically pledged at the minimum 125% from total issued bonds including bonds principal. The Bank has complied with the covenants on the trustee agreement.

Beban bunga atas utang obligasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 88.648 dan Rp 148.646 (Catatan 32).

The interest expenses of bonds payable for the years ended 31 December 2019 and 2018 amounted to Rp 88,648 and Rp 148,646, respectively (Note 32).

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman bukan bank yang dilakukan dengan pihak berelasi dan pihak ketiga.

22. BORROWINGS

Borrowings consists of bank borrowings and non-bank borrowings with related parties and third parties.

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties:
Pinjaman bank:			<i>Bank borrowings:</i>
PT Bank UOB Indonesia	-	2,876,000	<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
PT Bank Central Asia Tbk	5,500,000	2,500,000	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Pinjaman bukan bank:			<i>Non-bank borrowings:</i>
International Finance Corporation	1,368,500	2,010,625	<i>International Finance Corporation</i>
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Pemerintah	295	314	<i>Government Housing Financing Liquidity Facility</i>
	<u>6,868,795</u>	<u>7,386,939</u>	
Pihak berelasi			Related party:
Pinjaman bank:			<i>Bank borrowings:</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	31,193,978	1,078,500	<i>Sumitomo Mitsui Banking Corporation</i>
	<u>38,062,773</u>	<u>8,465,439</u>	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(15,318)	(22,674)	<i>Unamortised transaction costs</i>
Ditambah:			<i>Add:</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	141,471	114,109	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>38,188,926</u>	<u>8,556,874</u>	

a. Pinjaman bank

Cicilan pokok pinjaman yang dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

a. Bank borrowings

Installments of borrowing principals based on maturity date:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Hingga 1 tahun	-	3,954,500	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1 – 2 tahun	5,500,000	-	<i>More than 1 – 2 years</i>
Lebih dari 2 – 3 tahun	-	2,500,000	<i>More than 2 – 3 years</i>
Lebih dari 3 tahun	31,193,978	-	<i>More than 3 years</i>
	<u>36,693,978</u>	<u>6,454,500</u>	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(939)	(10,758)	<i>Unamortised transaction costs</i>
	<u>36,693,039</u>	<u>6,443,742</u>	
Ditambah:			<i>Add:</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	118,650	64,246	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>36,811,689</u>	<u>6,507,988</u>	

(i) Perjanjian Pinjaman 2017

Pada tanggal 12 September 2017, Bank menandatangani fasilitas kredit melalui pinjaman sindikasi dengan nilai maksimum sebesar USD 250.000.000 (angka penuh) dengan SMBC sebagai *Mandated Lead Arranger* dan *Bookrunner*, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation cabang Singapura sebagai agen.

(i) Borrowing Agreement 2017

On 12 September 2017, the Bank entered into syndicated loan amounting to maximum of USD 250,000,000 (full amount) with SMBC as the Mandated Lead Arranger as well Bookrunner, and Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore branch as the agent.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

(i) Perjanjian Pinjaman 2017 (lanjutan)

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro dan SME.

Berdasarkan perjanjian, fasilitas kredit terdiri dari Pinjaman Berjangka Sindikasi USD 115.000.000 (angka penuh) ("Fasilitas A") dan Pinjaman *Revolving* sebesar USD 135.000.000 (angka penuh) ("Fasilitas B").

Periode ketersediaan Fasilitas A adalah tiga bulan terhitung sejak tanggal perjanjian. Bank tidak dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman yang telah dilunasi.

Periode ketersediaan Fasilitas B dimulai sejak tanggal perjanjian sampai dengan satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo final. Tanggal jatuh tempo final adalah 360 hari sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pinjaman.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- tidak melakukan penggabungan usaha, *spin-off*, konsolidasi atau restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak merugikan yang signifikan,
- selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8%, rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20% dan rasio NPL (*Non-Performing Loan*) tidak lebih dari 5%.

Fasilitas A

Pada tanggal 20 November 2017, dilakukan penarikan Pinjaman Fasilitas A sebesar USD 115.000.000 (angka penuh), ekuivalen Rp 1.560.263 dengan suku bunga 2,43567% (3 bulan LIBOR + 1%) jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2018.

Pada tanggal 20 Februari 2018, Bank melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga pinjaman Fasilitas A.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. BORROWINGS (continued)

a. Bank borrowings (continued)

(i) Borrowing Agreement 2017 (continued)

The borrowing purpose was to finance the micro and SME loans.

Based on agreement, credit facilities consist of Syndicated Term borrowing amounted to USD 115,000,000 (full amount) ("Facility A") and Revolving borrowing amounting to USD 135,000,000 (full amount) ("Facility B").

The availability period of Facility A is three months commencing from the date of agreement. The Bank could not re-drawdown this borrowing facility that already repaid.

The availability period of Facility B is commencing from the date of agreement until one month before final maturity date. Final maturity date is 360 days from the date of first drawdown of the borrowing facility.

The borrowing agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- *no substantial change is made to the general nature of its business without prior written consent of the lender,*
- *not undertake or permit any merger, spin-off, consolidation or reorganisation, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,*
- *moreover, the Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of not more than 25%, capital adequacy ratio of not less than 8%, liquidity asset ratio of not less than 20% and NPL (Non-Performing Loan Ratio) of not more than 5%.*

Facility A

On 20 November 2017, Facility A amounting to USD 115,000,000 (full amount), equivalent to Rp 1,560,263 had been drawdown with interest rate 2.43567% (3 months LIBOR + 1%), due date on 20 February 2018.

On 20 February 2018, the Bank fully paid the outstanding principal and interest of Facility A.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

(i) Perjanjian Pinjaman 2017 (lanjutan)

(i) Borrowing Agreement 2017 (continued)

Fasilitas B

Facility B

Pada tanggal 26 Oktober 2017, dilakukan penarikan pinjaman Fasilitas B (Pinjaman *Revolving*) sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh), ekuivalen Rp 678.375 dengan suku bunga 2,56444% (3 bulan LIBOR + 1%), jatuh tempo pada tanggal 26 April 2018. Pada tanggal 26 April 2018, Bank melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga pinjaman.

On 26 October 2017, Facility B (*Revolving Borrowing*) amounting to USD 50,000,000 (full amount), equivalent to Rp 678,375 has been drawdown with interest rate 2.56444% (3 months LIBOR + 1%), due date on 26 April 2018. On 26 April 2018, the Bank fully paid the principal and interest.

Pada tanggal 16 Januari 2018, dilakukan penarikan Pinjaman Fasilitas B (Pinjaman *Revolving*) sebesar USD 85.000.000 (nilai penuh), ekuivalen Rp 1.168.325 dengan suku bunga 2,72152% (3 bulan LIBOR + 1%) jatuh tempo pada tanggal 16 April 2018. Pada tanggal 16 April 2018, Bank melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga pinjaman.

On 16 January 2018, Facility B (*Revolving Borrowing*) amounting to USD 85,000,000 (full amount), equivalent to Rp 1,168,325 has been drawdown with interest rate 2.72152% (3 months LIBOR + 1%), due date on 16 April 2018. On 16 April 2018, the Bank fully paid the principal and interest.

Pada tanggal 8 Mei 2018, dilakukan penarikan Pinjaman Fasilitas B (Pinjaman *Revolving*) sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh), ekuivalen Rp 1.405.000 dengan suku bunga 3,36313% (3 bulan LIBOR + 1%) jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2018. Pada tanggal 8 Agustus 2018, Bank melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga pinjaman.

On 8 May 2018, Facility B (*Revolving Borrowing*) amounting to USD 100,000,000 (full amount), equivalent to Rp 1,405,000 has been drawdown with interest rate 3.36313% (3 months LIBOR + 1%) due date on 8 August 2018. On 8 August 2018, the Bank fully paid the principal and interest.

Pada tanggal 6 Juni 2018, dilakukan penarikan Pinjaman Fasilitas B (Pinjaman *Revolving*) sebesar USD 35.000.000 (nilai penuh), ekuivalen Rp 484.838 dengan suku bunga 3,31381% (3 bulan LIBOR + 1%), jatuh tempo pada tanggal 6 September 2018. Pada tanggal 6 September 2018, Bank melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga pinjaman.

On 6 June 2018, Facility B (*Revolving Borrowing*) amounting to USD 35,000,000 (full amount), equivalent to Rp 484,838 has been drawdown with interest rate 3.31381% (3 months LIBOR + 1%) due date on 6 September 2018. On 6 September 2018, the Bank fully paid the principal and interest.

Periode ketersediaan fasilitas telah berakhir pada tanggal 7 Agustus 2018.

The facility availability period was due on 7 August 2018.

(ii) Perjanjian Pinjaman 2018

(ii) Borrowing Agreement 2018

Pinjaman Bilateral Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura

Bilateral Borrowing with Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch

Pada tanggal 27 September 2018, Bank telah menandatangani fasilitas kredit melalui pinjaman bilateral dengan nilai maksimum sebesar USD 75.000.000 (nilai penuh) dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura.

On 27 September 2018, the Bank entered into bilateral borrowing amounting to maximum USD 75,000,000 (full amount) with Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2018 (lanjutan)

(ii) Borrowing Agreement 2018 (continued)

Pinjaman Bilateral Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura (lanjutan)

Bilateral Borrowing with Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch (continued)

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk modal kerja Bank.

The purpose of that borrowing was for Bank's working capital purpose.

Berdasarkan perjanjian, fasilitas kredit adalah Pinjaman *Revolving* sebesar USD 75.000.000 (nilai penuh).

Based on the agreement, credit facility is *Revolving Borrowing* amounting to USD 75,000,000 (full amount).

Periode ketersediaan fasilitas dimulai sejak tanggal perjanjian sampai dengan satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo final. Tanggal jatuh tempo final adalah 365 hari sejak pinjaman pertama disediakan.

The availability period of facility is commencing from the date of agreement until one month before termination date. Termination date is 365 days after the first borrowing was provided.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio NPL (*Non Performing Loan*) tidak lebih dari 5%.

The borrowing agreements provide several negative covenants to the Bank, such as, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain capital adequacy ratio of no less than 8% and NPL (*Non Performing Loan Ratio*) of no more than 5%.

Pada tanggal 20 Desember 2018, dilakukan penarikan fasilitas sebesar USD 75.000.000 (nilai penuh), ekuivalen Rp 1.078.500 dengan suku bunga 3,67638% (6 bulan LIBOR + 0,8%) jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2019. Pada tanggal 20 Juni 2019, Bank telah melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga pinjaman.

On 20 December 2018, facility amounting to USD 75,000,000 (full amount), equivalent to Rp 1,078,500 has been drawdown with interest rate 3.67638% (6 months LIBOR + 0.8%), due date on 20 June 2019. On 20 June 2019, the Bank fully paid the principal and interest.

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk

Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 4 Mei 2018, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit *term loan non revolving* sebesar Rp 1.400.000 dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai kreditur. Tujuan pinjaman adalah untuk modal kerja Bank.

On 4 May 2018, the Bank signed non revolving term borrowing facility agreement amounting to Rp 1,400,000 with PT Bank Central Asia Tbk as the creditor. The purpose of the borrowing is for the Bank's working capital.

Pada tanggal 31 Juli 2018 telah ditandatangani Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit yaitu penambahan pokok fasilitas *Term Loan Non-Revolving* sebesar Rp 1.100.000, sehingga jumlah pokok fasilitas menjadi Rp 2.500.000.

On 31 July 2018, the Bank signed first amendment of borrowing agreement that increase the principal amount of *Term Loan Non-Revolving* facility by Rp 1,100,000, then total facility became Rp 2,500,000.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2018 (lanjutan)

(ii) Borrowing Agreement 2018 (continued)

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Berdasarkan perjanjian, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended on the 6 (sixth) month from the date of agreement.

Fasilitas kredit harus ditarik sepenuhnya dalam batas waktu penarikan dengan ketentuan jumlah minimum penarikan adalah Rp 500.000 atau sebesar jumlah fasilitas kredit yang belum ditarik.

The facility should be fully drawdown within the availability period with minimum drawdown amount is Rp 500,000 or any remaining undrawn amount.

Jatuh tempo waktu pembayaran pinjaman tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo.

The borrowing should be repaid within 2 (two) years after the date of borrowings agreement. Interest period is 3 (three) or 6 (six) months based on JIBOR interest rate and the payment of interest execute every due date.

Penarikan pertama dilakukan pada tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp 700.000 dengan suku bunga 7,78% (6 bulan JIBOR + 1,35%), jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2020. Suku bunga akan disesuaikan setiap 6 (enam) bulan. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 23 November dan 23 Mei, yang dimulai pada tanggal 23 November 2018 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2020. Pada tanggal 23 November 2018, suku bunga telah disesuaikan menjadi 9,165%.

The first drawdown was on 23 May 2018, amounting to Rp 700,000 with interest rate 7.78% (JIBOR 6 months + 1.35%) maturing on 4 May 2020. Interest rate will be repriced on semi-annual basis. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 23 November and 23 May, started on 23 November 2018 and will be ended on 4 May 2020. On 23 November 2018 the interest rate was repriced to 9.165%.

Penarikan kedua dilakukan pada tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp 700.000 dengan suku bunga 7,815% (6 bulan JIBOR + 1,35%), jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2020. Suku bunga akan disesuaikan setiap 6 (enam) bulan. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 5 Desember dan 5 Juni, yang dimulai pada tanggal 5 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2020. Pada tanggal 5 Desember 2018, suku bunga telah disesuaikan menjadi 9,16500%.

The second drawdown was on 5 June 2018, amounting to Rp 700,000 with interest rate 7.815% (JIBOR 6 months + 1.35%), due date on 4 May 2020. Interest rate will be repriced on semi-annual basis. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 5 December and 5 June, started on 5 December 2018 and will be ended on 4 May 2020. On 5 December 2018, the interest rate was repriced to 9.16500%.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2018 (lanjutan)

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Penarikan ketiga dilakukan pada tanggal 12 September 2018 sebesar Rp 1.100.000 dengan suku bunga 8,69% (6 bulan JIBOR + 1,35%), jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2020. Suku bunga akan disesuaikan setiap 6 (enam) bulan. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 12 Maret dan 12 September yang dimulai pada tanggal 12 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2020.

Sebelum penggabungan, SMBCI memiliki 5 fasilitas Pinjaman Bilateral dari PT Bank Central Asia Tbk yang ditandatangani pada rentang waktu tahun 2009 hingga 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 4 (empat) fasilitas yang masih berlaku, dengan total fasilitas adalah sebesar Rp 3.500.000 dengan detail sebagai berikut:

- a) Perjanjian pinjaman *revolving Term Loan I* sebesar Rp 500.000 yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2009 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2019.

Berdasarkan perjanjian, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dari tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,60%.

- b) Perjanjian pinjaman *revolving Term Loan III* sebesar Rp 1.000.000 yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 1 April 2019.

Berdasarkan perjanjian, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 2 (dua) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

22. BORROWINGS (continued)

a. Bank borrowings (continued)

(ii) Borrowing Agreement 2018 (continued)

Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk (continued)

The third drawdown was on 12 September 2018, amounting to Rp 1,100,000 with interest rate 8.69% (JIBOR 6 months + 1.35%), due date on 4 May 2020. Interest rate will be repriced on semi-annual basis. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 12 March and 12 September, started on 12 March 2019 and will be ended on 4 May 2020.

Before the merger, SMBCI had 5 Bilateral Borrowing facilities from PT Bank Central Asia which were signed during 2009 to 2017.

As of 31 December 2019, there were 4 (four) outstanding facilities, with total facilities amounting to Rp 3,500,000 with details as follows:

- a) The facility Agreement of revolving Term Loan I amounting to Rp 500,000 which was signed on 15 May 2009 and has been amended several times with the latest amendment signed on 13 May 2019.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 18 (eighteen) months from the date of agreement.

The facility should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.60%.

- b) The facility Agreement of revolving Term Loan III amounting to Rp 1,000,000 which was signed on 1 April 2015 and has been amended several times with the latest amendment signed on 1 April 2019.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 2 (two) months of the date of agreement.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2018 (lanjutan)

(ii) Borrowing Agreement 2018 (continued)

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,60%.

The facility should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid of every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.60%.

- c) Perjanjian pinjaman *non-revolving Term Loan IV* sebesar Rp 1.000.000 ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2019.

- c) *The facility Agreement of non-revolving Term Loan IV amounting Rp 1,000,000 signed on 10 June 2015 which has been amended several times with the latest amendment signed on 10 June 2019.*

Berdasarkan perjanjian, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 2 (dua) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended in 2 (two) months from the date of agreement.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,60%.

The borrowing should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.60%.

- d) Perjanjian pinjaman *non-revolving Term Loan V* sebesar Rp 1.000.000 ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2017 dan telah diperpanjang dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2019.

- d) *The facility Agreement of non-revolving Term Loan V amounting Rp 1,000,000 signed on 16 August 2017 has amended with the latest amendment signed on 15 August 2019.*

Berdasarkan perjanjian, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 2 (dua) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 2 (two) months from the date of agreement.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,60%.

The facility should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.60%.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2018 (lanjutan)

(ii) Borrowing Agreement 2018 (continued)

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2019, total fasilitas PT Bank Central Asia Tbk yang belum digunakan adalah sebesar Rp 500.000.

As of 31 December 2019, total unused facility for loan from PT Bank Central Asia Tbk amounted to Rp 500,000.

Pinjaman Bilateral PT Bank OCBC NISP

Bilateral Borrowing with PT Bank OCBC NISP

Sebelum penggabungan usaha, SMBCI memiliki fasilitas Pinjaman Bilateral dari PT Bank OCBC NISP yang ditandatangani di tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp 500.000.

Before the merger, SMBCI had Bilateral Borrowing facility from PT Bank OCBC NISP which was signed on 15 January 2019 amounting Rp 500,000.

Fasilitas ini bersifat *stand by* dan belum ditarik pada tanggal 31 Desember 2019. Jatuh tempo fasilitas tersebut adalah 15 Januari 2020.

The facility is on a stand by basis and has not been utilised as of 31 December 2019. Maturity date of this facility is on 15 January 2020.

Pinjaman Sindikasi United Overseas Bank Limited (UOB)

United Overseas Bank Limited (UOB) Syndication Borrowing

Pada tanggal 30 Juli 2018, Bank telah menandatangani fasilitas kredit melalui pinjaman sindikasi dengan nilai maksimum sebesar USD 200.000.000 (nilai penuh) dengan United Overseas Bank Limited sebagai *Mandated Lead Arranger*, *Bookrunner* dan Agen, serta PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai *Mandated Lead Arrangers*.

On 30 July 2018, the Bank entered into syndicated borrowing amounting to maximum USD 200,000,000 (full amount) with United Overseas Bank Limited (UOB Ltd) as the Mandated Lead Arranger, Bookrunner and Agent, also PT Bank UOB Indonesia and PT Bank Maybank Indonesia Tbk as Mandated Lead Arrangers.

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk kebutuhan umum Bank.

The loan was used for the Bank's general needs.

Berdasarkan perjanjian, fasilitas kredit dibagi menjadi 3 tranche yaitu Fasilitas A dari kreditur United Overseas Bank Limited sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh), Fasilitas B dari kreditur PT Bank UOB Indonesia sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh) dan Fasilitas C dari kreditur PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh). Setiap permohonan pencairan akan dibagi secara prorata untuk masing-masing fasilitas.

Based on the agreement, credit facilities consist of 3 tranches, such as Facility A from lender United Overseas Bank Limited amounting to USD 100,000,000 (full amount), Facility B from PT Bank UOB Indonesia amounting to USD 50,000,000 (full amount) and Facility C from PT Bank Maybank Indonesia Tbk amounting to USD 50,000,000 (full amount). Each disbursement request will be prorated for each facility.

Periode ketersediaan ketiga fasilitas adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian. Bank tidak dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman yang telah dilunasi.

The availability period of the three facilities are 3 (three) months commencing from the date of agreement. The Bank could not re-drawdown this loan facility that already repaid.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2018 (lanjutan)

(ii) Borrowing Agreement 2018 (continued)

Pinjaman Sindikasi United Overseas Bank Limited (UOB) (lanjutan)

United Overseas Bank Limited (UOB) Syndication Borrowing (continued)

Jangka waktu pembayaran final untuk ketiga fasilitas adalah 365 hari sejak penarikan pertama dari setiap fasilitas.

Final repayment date for the three facilities are 365 days after the first utilisation date under each facility.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

The borrowing agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- tidak melakukan penggabungan usaha, *spin-off*, konsolidasi atau restrukturisasi Bank, kecuali penggabungan usaha dengan SMBCI,
- selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8%, rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20% dan rasio NPL net (Non Performing Loan) tidak lebih dari 5%.

- *no substantial change is made to the general nature of its business without the prior written consent of the lender,*
- *not undertake or permit any merger, spin-off, consolidation or reorganisation, except for the merger with SMBCI,*
- *moreover, the Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio of no less than 8%, liquidity asset ratio no less than 20% and net NPL Ratio (Non Performing Loan) of no more than 5%.*

Pada tanggal 10 September 2018, telah dilakukan pencairan pertama fasilitas sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh), yang terbagi secara prorata masing-masing untuk Fasilitas A sebesar USD 25.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,24419% (LIBOR 6 bulan + 0,7%), Fasilitas B sebesar USD 12.500.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,24419% (LIBOR 6 bulan + 0,7%); Fasilitas C sebesar USD 12.500.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,34419% (LIBOR 6 bulan + 0,8%). Jatuh tempo pertama suku bunga adalah pada tanggal 11 Maret 2019.

On 10 September 2018, the Bank requested the first drawdown of facility amounting to USD 50,000,000 (full amount), which was prorated into Facility A amounting to USD 25,000,000 (full amount) with interest rate of 3.24419% (LIBOR 6 months + 0.7%), Facility B amounting to USD 12,500,000 (full amount) with interest rate of 3.24419% (LIBOR 6 months + 0.7%), Facility C amounting to USD 12,500,000 (full amount) with interest rate of 3.34419% (LIBOR 6 months + 0.8%). First interest payment was due on 11 March 2019.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2018 (lanjutan)

(ii) Borrowing Agreement 2018 (continued)

Pinjaman Sindikasi United Overseas Bank Limited (UOB) (lanjutan)

United Overseas Bank Limited (UOB) Syndication Borrowing (continued)

Pada tanggal 12 Oktober 2018 telah dilakukan pencairan kedua fasilitas sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh) yang terbagi secara prorata menjadi Fasilitas A sebesar USD 25.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,25950% (LIBOR 6 bulan + 0,7%), Fasilitas B sebesar USD 12.500.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,25950% (LIBOR 6 bulan + 0,7%); Fasilitas C sebesar USD 12.500.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,35950% (LIBOR 6 bulan + 0,8%). Jatuh tempo pertama suku bunga adalah pada tanggal 11 Maret 2019.

On 12 October 2018, the Bank requested the second drawdown of facility amounting to USD 50,000,000 (full amount), which was prorated into Facility A amounting to USD 25,000,000 (full amount) with interest rate of 3.25950% (LIBOR 6 months + 0.7%); Facility B amounting to USD 12,500,000 (full amount) with interest rate of 3.25950% (LIBOR 6 months + 0.7%); Facility C amounting to USD 12,500,000 (full amount) with interest rate of 3.35950% (LIBOR 6 months + 0.8%). First interest period was due on 11 March 2019.

Pada tanggal 22 Oktober 2018 telah dilakukan pencairan ketiga fasilitas sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh) yang terbagi secara prorata menjadi Fasilitas A sebesar USD 25.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,28907% (LIBOR 6 bulan + 0,7%), Fasilitas B sebesar USD 12.500.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,28907% (LIBOR 6 bulan + 0,7%); Fasilitas C sebesar USD 12.500.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,38907% (LIBOR 6 bulan + 0,8%). Jatuh tempo pertama suku bunga adalah pada tanggal 11 Maret 2019.

On 22 October 2018, the Bank requested the third drawdown of facility amounting to USD 50,000,000 (full amount), which was prorated into Facility A amounting to USD 25,000,000 (full amount) with interest rate of 3.28907% (LIBOR 6 months + 0.7%); Facility B amounting to USD 12,500,000 (full amount) with interest rate of 3.28907% (LIBOR 6 months + 0.7%); Facility C amounting to USD 12,500,000 (full amount) with interest rate of 3.38907% (LIBOR 6 months + 0.8%). First interest period was due on 11 March 2019.

Pada tanggal 29 Oktober 2018 telah dilakukan pencairan keempat fasilitas sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh) yang terbagi secara prorata menjadi Fasilitas A sebesar USD 25.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,32992% (LIBOR 6 bulan + 0,7%), Fasilitas B sebesar USD 12.500.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,2992% (LIBOR 6 bulan + 0,7%); Fasilitas C sebesar USD 12.500.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 3,4992% (LIBOR 6 bulan + 0,8%). Jatuh tempo pertama suku bunga adalah pada tanggal 11 Maret 2019.

On 29 October 2018, the Bank requested the fourth drawdown of facility amounting to USD 50,000,000 (full amount), which was prorated into Facility A amounting to USD 25,000,000 (full amount) with interest rate of 3.32992% (LIBOR 6 months + 0.7%); Facility B amounting to USD 12,500,000 (full amount) with interest rate of 3.2992% (LIBOR 6 months + 0.7%); Facility C amounting to USD 12,500,000 (full amount) with interest rate of 3.4992% (LIBOR 6 months + 0.8%). First interest period was due on 11 March 2019.

Bank melakukan pembayaran pokok dan bunga pada tanggal 10 September 2019.

Bank fully paid the principal and interest on 10 September 2019.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

a. Bank borrowings (continued)

(iii) Pinjaman Bilateral Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura

(iii) Bilateral Borrowing with Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch

Pinjaman jangka panjang ini merupakan pinjaman dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura sejumlah USD 2.247.000.000 (nilai penuh). Pinjaman ini akan jatuh tempo berkisar antara tanggal 11 Januari 2021 sampai 27 Desember 2021.

This borrowing represents long-term borrowings from Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch amounted to USD 2,247,000,000 (full amount). This borrowing will mature ranging from 11 January 2021 until 27 December 2021.

Pada tanggal 29 November 2019, Bank mendapatkan tambahan fasilitas baru pinjaman jangka panjang dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura sebesar USD 525.000.000 (nilai penuh) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sehingga total fasilitas pinjaman jangka panjang dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura meningkat menjadi USD 2.825.000.000 (nilai penuh) dari sebelumnya USD 2.300.000 (nilai penuh).

On 29 November 2019, the Bank obtained additional new long-term borrowings facility from Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch amounted to USD 525.000.000 (full amount) with the term of 7 (seven) years so that total amount of long-term borrowings facilities from Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch is increased to become USD 2.825.000.000 (full amount) from USD 2.300.000 (full amount) previously.

Tingkat suku bunga kontraktual setahun atas pinjaman jangka panjang ini adalah *cost of fund* ditambah margin tertentu. Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019, margin yang diterapkan adalah 0,50%.

Contractual interest rate per annum on long-term borrowings is cost of fund plus certain margin. For position as of 31 December 2019, the applied margin was 0.50%.

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang diharuskan dalam pemberian pinjaman jangka panjang kepada Bank.

As of 31 December 2019, there was no certain covenant which was required to be maintained in terms of long-term borrowings.

b. Pinjaman bukan bank

b. Non-bank borrowings

Cicilan pokok pinjaman yang dibayarkan sesuai dengan jangka waktu:

Installments of borrowing principal based on time period:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Hingga 1 tahun	-	1,341,375	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 3 tahun	1,368,795	669,564	<i>More than 3 years</i>
	<u>1,368,795</u>	<u>2,010,939</u>	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(14,380)	(11,916)	<i>Unamortised transaction costs</i>
	<u>1,354,415</u>	<u>1,999,023</u>	
Ditambah:			<i>Add:</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	22,821	49,863	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>1,377,236</u>	<u>2,048,886</u>	

Pembayaran bunga pinjaman yang diterima telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Payments of interest on non-bank borrowings had been paid by the Bank in accordance with the schedule.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

b. Non-Bank borrowings (continued)

Pinjaman bukan bank adalah fasilitas pinjaman dengan International Finance Corporation (IFC) dan Pemerintah, bukan pihak berelasi yang terdiri dari beberapa perjanjian sebagai berikut:

Non-bank borrowings consisted of some agreements of borrowing facilities from International Finance Corporation (IFC) and Government, non-related party, consist of some agreement as follows:

(i) Perjanjian Pinjaman 2012

(i) Borrowing Agreement 2012

Pada tanggal 8 Juni 2017 telah dilakukan penandatanganan atas amandemen perjanjian sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh) yang dapat dicairkan dalam Dollar Amerika Serikat atau Rupiah.

Amendment Agreement was signed on 8 June 2017, amounting to USD 100,000,000 (full amount) which can be drawdown in United States Dollar or Rupiah.

Bank dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum atau pada tanggal 8 Juni 2020.

The Bank could re-drawdown this loan facility (revolving loan) amounting to portion that already repaid prior to or on 8 June 2020.

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro dan UKM.

The purpose of this borrowing was to finance the growth of the Bank's micro and SME loan portfolio.

Pada tanggal 5 Desember 2017, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 676.250, ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,59% dan jatuh tempo pada 5 Juni 2019. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2019. Pada tanggal 10 Juni 2019 (hari kerja berikutnya), Bank telah melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga.

On 5 December 2017, loan was drawdown amounting to Rp 676,250, equivalent to USD 50,000,000 (full amount) with interest rate 7.59% and maturity date on 5 June 2019. Interest payment will be paid every 6 (six) months, which is on 15 January and 15 July, started on 15 January 2018 and will be ended on 5 June 2019. On 10 June 2019 (the next business day), the Bank fully paid the principal and interest.

Pada tanggal 2 Februari 2018, Bank melakukan penarikan kembali sebesar Rp 669.250, ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,50% dan jatuh tempo pada 2 Februari 2021. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 dan akan berakhir pada tanggal 2 Februari 2021.

On 2 February 2018, loan was drawdown amounting to Rp 669,250, equivalent to USD 50,000,000 (full amount) with interest rate 7.50% and maturity date on 2 February 2021. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 15 January and 15 July, started on 16 July 2018 and will be ended on 2 February 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman yang ada.

As of 31 December 2019, the Bank has utilized all borrowing facility.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

The borrowing agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- tidak melakukan penggabungan usaha, *demerger*, restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak merugikan yang signifikan,

- *no substantial change is made to the general nature of its business without prior written consent of the lender,*
- *not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,*

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

b. Non-bank borrowings (continued)

(i) Perjanjian Pinjaman 2012 (lanjutan)

(i) Borrowing Agreement 2012 (continued)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain: (lanjutan)

The borrowing agreements provide several negative covenants to the Bank, such as: (continued)

- tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah SMBC menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia,
- selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

- *not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that action would make the SMBC to become non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations,*
- *moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio of no less than 8% and liquidity asset ratio of no less than 20%.*

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank telah memenuhi seluruh rasio yang dipersyaratkan.

As of 31 December 2019, the Bank had fulfilled all the required ratios.

(ii) Perjanjian Pinjaman 2015

(ii) Borrowing Agreement 2015

Pada tanggal 27 Februari 2015, Bank telah menandatangani fasilitas kredit dengan IFC. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, IFC memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank sebesar USD 300.000.000 (nilai penuh) yang terdiri dari fasilitas pinjaman A1 sebesar USD 75.000.000 (nilai penuh) dan fasilitas pinjaman A2 sebesar USD 225.000.000 (nilai penuh).

On 27 February 2015, the Bank entered into borrowing facility with IFC. Based on the borrowing agreement, IFC granted to distribute a loan to the Bank amounting to USD 300,000,000 (full amount), which consists of A1 loan facility amounting to USD 75,000,000 (full amount) and A2 loan facility amounting to USD 225,000,000 (full amount).

Pada tanggal 6 Juni 2017, Bank melakukan penarikan fasilitas A1 sebesar Rp 333.000, ekuivalen USD 25.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 8,17%, jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2019. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 6 Juni dan 6 Desember, yang dimulai pada tanggal 6 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 6 Juni 2019. Pada tanggal 10 Juni 2019 (hari kerja berikutnya), Bank melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga.

On 6 June 2017, the Bank has drawdown the A1 facility amounting to Rp 333,000, equivalent to USD 25,000,000 (full amount) with the interest rate 8.17%, maturing on 6 June 2019. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 6 June and 6 December, started on 6 December 2017 and ended on 6 June 2019. On 10 June 2019 (the following business day), the Bank fully paid the principal and interest.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

b. Non-bank borrowings (continued)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2015 (lanjutan)

(ii) Borrowing Agreement 2015 (continued)

Pada tanggal 6 Juni 2017, Bank melakukan penarikan fasilitas A2 sebesar Rp 1.000.350, ekuivalen USD 75.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 6,64%, jatuh tempo pada 6 Desember 2017. Bank telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada tanggal 6 Desember 2017.

On 6 June 2017, the Bank has drawdown the A2 facility amounting to Rp 1,000,350, equivalent to USD 75,000,000 (full amount) with the interest rate 6.64%, due date on 6 December 2017. The Bank fully paid the outstanding principal and interest on 6 December 2017.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Bank melakukan penarikan fasilitas A1 sebesar Rp 332.125, ekuivalen USD 25.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 8,06%, jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2019. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 20 Juni dan 20 Desember, yang dimulai pada tanggal 20 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Juni 2019. Pada tanggal 20 Juni 2019, Bank telah melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga.

On 20 June 2017, the Bank has drawdown the A1 facility amounting to Rp 333,125, equivalent to USD 25,000,000 (full amount) with the interest rate 8.06%, maturing on 20 June 2019. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 20 June and 20 December, started on 20 December 2017 and ended on 20 June 2019. On 20 June 2019, the Bank fully paid the principal and interest.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Bank melakukan penarikan fasilitas A2 sebesar Rp 988.530, ekuivalen USD 75.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,02%, jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2018. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 20 Juni dan 20 Desember, yang dimulai pada tanggal 20 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Juni 2018. Bank telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada tanggal 20 Juni 2018.

On 20 June 2017, the Bank has drawdown the A2 facility amounting to Rp 988,530, equivalent to USD 75,000,000 (full amount) with the interest rate 7.02%, maturing on 20 June 2018. Interest will be paid every 6 (six) months, which is on 20 June and 20 December, started on 20 December 2017 and ended on 20 June 2018. The Bank fully paid the outstanding principal by way of a bullet payment on 20 June 2018.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

The borrowing agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman;
- tidak melakukan penggabungan usaha, *spin-off*, konsolidasi atau restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak merugikan yang signifikan;
- tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia;

- *no substantial change is made to the general nature of its business without prior written consent of the lender;*
- *not undertake or permit any merger, spin-off, consolidation or reorganisation, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect;*
- *not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that the action would change the Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) as non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations;*

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

22. BORROWINGS (continued)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

b. Non-bank borrowings (continued)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2015 (lanjutan)

(ii) Borrowing Agreement 2015 (continued)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain: (lanjutan)

The borrowing agreements provide several negative covenants to the Bank, such as: (continued)

- selain itu, Bank wajib untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

- *moreover, the Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: the Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio of no less than 8% and liquid asset ratio of no less than 20%.*

Periode ketersediaan fasilitas telah berakhir pada tanggal 27 Februari 2018.

The facility availability period ended on 27 February 2018.

(iii) Perjanjian Pinjaman 2018

(iii) Borrowing Agreement 2018

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Pemerintah

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Pemerintah

Pada tanggal 18 Desember 2017, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

On 18 December 2017, the Bank signed an Operational Agreement with Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) under the Public Works and Public Housing Ministry regarding Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). The agreement was valid from the date of the agreement until 31 December 2018.

Pinjaman tersebut digunakan untuk penyaluran Pembiayaan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Program Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Pemerintah). Bank bertindak sebagai Bank Pelaksana Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.

The borrowing is used to distribute Prosperous Home Financing for Low-Income Communities (Government Subsidized Housing Ownership Credit Program). Bank acted as an executing bank of Prosperous Home Ownership Loans.

Besarnya dana yang disalurkan oleh PPDPP adalah 90% dari nilai pinjaman untuk periode pencairan sebelum Agustus 2018. Sedangkan untuk pencairan yang dilakukan setelah periode tersebut, dana yang disalurkan oleh PPDPP adalah 75% dari nilai pinjaman.

The amount that was distributed by PPDPP is 90% from loan value for the loan that was disbursed before August 2018. However for loan that was disbursed after that period, the amount that is distributed by PPDPP is 75% from loan value.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank telah menyalurkan dana FLPP kepada 3 (tiga) debitur dengan jangka waktu pinjaman 120-180 bulan dengan nilai pokok Rp 300. Bank memiliki kewajiban untuk membayar bunga kepada PPDPP sebesar 0,5% per tahun.

As of 31 December 2019, the Bank has disbursed FLPP fund for 3 (three) debtors with tenor of 120-180 months and outstanding amount of Rp 300. The Bank was obliged to pay at the 0.5% per annum.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

(iv) Perjanjian Pinjaman 2019

Pada tanggal 3 Desember 2019 telah dilakukan penandatanganan atas perjanjian pinjaman sebesar USD 150.000.000 (nilai penuh) yang dapat dicairkan dalam Dolar Amerika Serikat atau Rupiah.

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro, usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan, green loans, SCF loans. Bank akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa jumlah agregat dari pencairan yang diberikan untuk setiap pinjaman setidaknya sama dengan 25% dari jumlah maksimum pinjaman.

Pada tanggal 30 Desember 2019, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 699.250.000, ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,75% dan jatuh tempo pada 3 Desember 2024. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 30 Juni 2020 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2024 (hari kerja berikutnya), Bank telah melakukan pembayaran penuh pokok dan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total fasilitas yang belum dipergunakan sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh).

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak merugikan yang signifikan,
- tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah SMBC menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia,
- selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank telah memenuhi seluruh rasio yang dipersyaratkan.

22. BORROWINGS (continued)

b. Non-bank borrowings (continued)

(iv) Borrowing Agreement 2019

Borrowing Agreement was signed on 3 December 2019, amounting to USD 100,000,000 (full amount) which can be drawdown in United States Dollar or Rupiah.

The purpose of borrowing was to finance the Women-Owned Micro, Small Medium Enterprise (MSME) loans, Green loans and SCF loans. The Bank will use its best efforts to ensure that the aggregated amount of the disbursements made to each loans was at least equal to 25% of the maximum loan amount.

On 30 December 2019, loan was drawdown amounting to Rp 699,250,000, equivalent to USD 50,000,000 (full amount) with interest rate 7.75% and maturity date on 3 December 2024. Interest payment will be paid every 6 (six) months, which is started on 30 June 2020 and will be ended on 30 December 2024 (the next business day), the Bank fully paid the principal and interest.

As of 31 December 2019, the unused facility was amounting to USD 100,000,000 (full amount).

The borrowing agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- *no substantial change is made to the general nature of its business without prior written consent of the lender,*
- *not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,*
- *not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that action would make the SMBC to become non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations,*
- *moreover, the Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio of no less than 8% and liquidity asset ratio of no less than 20%.*

As of 31 December 2019, the Bank had fulfilled all the required ratios.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. AKRUAL

23. ACCRUALS

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Akrual beban operasional	347,631	189,396	<i>Accrued operational expenses</i>
Akrual beban promosi	55,564	50,047	<i>Accrued promotion expenses</i>
Akrual jasa profesional	48,191	28,414	<i>Accrued professional fees</i>
	<u>451,386</u>	<u>267,857</u>	

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari:

Employee benefits liabilities consist of:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
<u>Imbalan kerja jangka pendek</u>			<i>Short-term employee benefits</i>
Akrual bonus karyawan, THR, tantiem, dan liabilitas jangka pendek pembayaran Program ESOP 2016-2021			<i>Accrual of employee bonus, THR, tantiem, and short-term liabilities related with ESOP 2016-2021</i>
- Bank	360,987	335,535	<i>Program settlement</i>
- Entitas Anak	199,633	136,088	<i>Bank -</i>
	<u>560,620</u>	<u>471,623</u>	<i>Subsidiary -</i>
<u>Imbalan kerja jangka panjang lainnya</u>			<i>Other long-term employee benefits</i>
- Bank	26,436	22,791	<i>Bank -</i>
- Entitas Anak	11,022	10,335	<i>Subsidiary -</i>
	<u>37,458</u>	<u>33,126</u>	
	<u>598,078</u>	<u>504,749</u>	

Bank dan Entitas Anak menerapkan kebijakan program manfaat imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja ("UUTK") No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerjasama yang berlaku di Bank. Dasar perhitungan manfaat UUTK No. 13 ini menggunakan gaji pokok terkini. Program pensiun manfaat pasti ini dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

The Bank and Subsidiary implement post-employment benefits policy based on Labor Law ("UUTK") No. 13 Year 2003 and Collective Labor Agreement applied in Bank. The calculation basis of this UUTK No. 13 benefit is the current basic salary. The Bank's defined benefit pension plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan UUTK. Pendanaan program pensiun ini dilakukan oleh Bank dan Entitas Anak dengan membayar iuran tahunan yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The program calls for benefits to be paid to eligible employees at retirement or when the employees resign according to the UUTK. The funding of the pension plan is conducted by the Bank and Subsidiary through payments of annual contributions which are sufficient to meet the minimum requirements set forth in applicable laws.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah karyawan Bank yang memiliki hak atas manfaat ini adalah 6.750 karyawan (31 Desember 2018: 6.274 karyawan) (tidak diaudit).

As of 31 December 2019, the total number of the Bank's employees eligible for this benefit are 6,750 employees (31 December 2018: 6,274 employees) (unaudited), respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah karyawan Entitas Anak yang memiliki hak atas imbalan ini adalah sebanyak 5.111 karyawan (31 Desember 2018: 5.159 karyawan) (tidak diaudit).

As of 31 December 2019, the total number of the Subsidiary's employees eligible for this benefit was 5,111 employees (31 December 2018: 5,159 employees) (unaudited).

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
 (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Pada tahun 2019, Bank dan Entitas Anak berinisiatif memberikan program *cash retention* kepada karyawan yang memiliki hak opsi saham dari "Program ESOP 2016-2021", di mana pemegang hak opsi saham tersebut sepakat untuk menyerahkan terlebih dahulu hak opsi saham mereka kepada Bank dan Entitas Anak. Oleh karena itu, cadangan atas Program ESOP 2016-2021 tanggal 31 Desember 2019 kini dicatat sebagai liabilitas sesuai dengan kebijakan akuntansi imbalan kerja jangka pendek (Catatan 2y).

In 2019, the Bank and Subsidiary initiatively provided a cash retention program to employees who owned share option rights from "ESOP 2016-2021 Program", of which the share option holders agree to first surrender their share option rights to the Bank and the Subsidiary. As a result, the reserve for ESOP 2016-2021 Program as of 31 December 2019 is now recorded as liabilities in accordance with the accounting policy for short-term employee benefits (Note 2y).

Selain memberikan manfaat yang disebutkan di atas, Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

In addition to the benefits mentioned above, the Bank also provides its employees with long leave benefits.

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Bank

Bank

Perhitungan aktuaria atas liabilitas imbalan kerja karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 28 Februari 2020 dan 15 Januari 2019.

The actuarial calculation for the Bank's employee benefit liabilities as of 31 December 2019 and 2018 was performed by PT Sentra Jasa Aktuaria, an independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method based on its reports dated 28 February 2020 and 15 January 2019, respectively.

Perhitungan aktuaria tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial valuations were carried out using the following assumptions:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Asumsi ekonomi:			Economic assumptions:
Tingkat diskonto per tahun	5.42% - 8.15%	8.08%	<i>Interest discount rate per annum</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7%	7%	<i>Salary increment rate per annum</i>
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Usia pensiun normal	55	55	<i>Normal pension age</i>
	Tabel mortalita/ Mortality table Indonesia 2011	Tabel mortalita/ Mortality table Indonesia 2011	
Tingkat kematian	(TMI 11)	(TMI 11)	<i>Mortality rate</i>
Tingkat cacat	10% TMI 11	10% TMI 11	<i>Disability rate</i>

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan laporan aktuaria adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2019 and 2018 based on the actuarial reports was as follows:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	540,349	477,067	<i>Present value of defined benefits liabilities</i>
Nilai wajar aset program	(595,828)	(635,475)	<i>Fair value of plan assets</i>
Kelebihan pendanaan	(55,479)	(158,408)	<i>Funding surplus</i>

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
 (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

Perubahan liabilitas imbalan manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefits liabilities during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini kewajiban imbalan manfaat pasti, awal tahun	477,067	603,599	Present value of defined benefits liabilities, beginning of the year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Beban jasa kini	72,761	56,519	Current service cost
Beban bunga	38,547	38,932	Interest expense
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Kerugian/keuntungan aktuarial yang timbul dari:			Actuarial losses/gains arising from:
- Asumsi keuangan	15,997	(89,278)	Financial assumption -
- Penyesuaian pengalaman	9,886	(98,163)	Experience adjustment -
Lain-lain			Others
Imbalan yang dibayarkan oleh aset program selama tahun berjalan	(73,909)	(34,542)	Benefits paid by the plan assets during the year
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	540,349	477,067	Present value of net defined benefits liabilities, end of year

Perubahan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of fair value of plan assets during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Perubahan nilai wajar aset program:			Movement in the fair value of plan assets:
Nilai wajar aset program, awal tahun	635,475	603,774	Fair value of plan assets, beginning of year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Pendapatan bunga atas aset program	51,347	38,942	Interest income on plan assets
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Imbal hasil atas aset program di luar pendapatan bunga	(17,085)	(10,850)	Return on plan assets excluding interest income
Lain-lain			Others
Kontribusi yang dibayarkan kepada program	-	38,151	Contributions paid into the plan
Imbalan yang dibayarkan oleh program	(73,909)	(34,542)	Benefits paid by the plan
Nilai wajar aset program, akhir tahun	595,828	635,475	Fair value of plan assets, end of year

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following :

	31 Desember/December 2019		31 Desember/December 2018		
	Total	%	Total	%	
Kas/deposito berjangka	595,828	100%	360,124	56.67%	Cash/time deposits
Reksa dana	-	-	275,351	43,33%	Mutual funds
Jumlah	595,828	100%	635,475	100%	Total

Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada deposito berjangka di Bank dan reksa dana.

All of the pension plan assets are placed on time deposits with the Bank and mutual funds.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Bank (lanjutan)

Bank terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi korporasi akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pengalaman pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December					
	2019	2018	2017	2016	2015	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	540,349	477,067	603,599	827,306	704,905	<i>Present value of defined benefits liabilities</i>
Nilai wajar aset program	(595,828)	(635,475)	(603,774)	(825,087)	(715,923)	<i>Fair value of plan assets</i>
Dampak batas atas aset	-	-	175	-	-	<i>The effect of the asset ceiling</i>
Defisit (surplus)	<u>(55,479)</u>	<u>(158,408)</u>	<u>-</u>	<u>2,219</u>	<u>(11,018)</u>	<i>Deficit (surplus)</i>
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	<u>(9,886)</u>	<u>98,163</u>	<u>25,062</u>	<u>(24,670)</u>	<u>22,084</u>	<i>Experience adjustment on plan liabilities</i>
Penyesuaian pengalaman pada aset program	<u>(17,085)</u>	<u>(10,850)</u>	<u>4,279</u>	<u>(9,601)</u>	<u>3,372</u>	<i>Experience adjustment on plan assets</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah memenuhi persyaratan minimum UUTK No. 13.

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah 12 tahun dan 7 tahun.

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefits (continued)

Bank (continued)

The Bank is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Changes in bond yields

A decrease in corporate bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plans' bond holdings.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date.

Present value of defined benefits liabilities, fair value of plan assets, deficit/surplus of program and experience adjustment on plan liabilities and plan assets for the last 5 years were as follows:

Management believes that the estimated post-employment benefit liabilities as of 31 December 2019 and 2018 have fulfilled the minimum requirements of UUTK No. 13.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as of 31 December 2019 and 2018 was 12 years and 7 years, respectively.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
 (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

	31 Desember/ December		
	2019	2018	
Hingga 1 tahun	35,553	39,089	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1 - 2 tahun	44,932	35,349	<i>More than 1 - 2 years</i>
Lebih dari 2 - 5 tahun	186,109	200,176	<i>More than 2 - 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	2,666,202	6,531,768	<i>More than 5 years</i>

Sensitivitas liabilitas imbalan pascakerja untuk perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the post-employment benefits liabilities to changes in the key actuarial assumptions was as follows:

	31 Desember/December 2019			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja/ Present value of post- employment benefits liabilities	Beban jasa kini/ Current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	504,076	67,037	<i>Discount rate</i>
	Penurunan/Decrease 1%	581,472	79,342	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	583,263	79,592	<i>Salary increase rate</i>
	Penurunan/Decrease 1%	502,020	66,739	

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the post-employment benefits liabilities.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
 (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak

Subsidiary

Perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 10 Januari 2020 dan 11 Januari 2019 dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculation as of 31 December 2019 and 2018 was performed by registered actuarial consulting firm, PT Sentra Jasa Aktuaria, independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated 10 January 2020 and 11 January 2019 with the following assumptions:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Tingkat diskonto per tahun	5.53% - 8.29%	8.04%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9%	10%	Annual salary increase rate
Tabel mortalita	Tabel mortalita/ Mortality table Indonesia 2011	Tabel mortalita/ Mortality table Indonesia 2011	Mortality table
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal pension age

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan laporan aktuaria adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2019 and 2018 was based on the actuarial reports was as follows:

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	175,160	154,699	Present value of defined benefits liabilities
Nilai wajar aset program	(188,883)	(168,602)	Fair value of plan assets
Kelebihan pendanaan	(13,723)	(13,903)	Funding surplus

Perubahan liabilitas imbalan manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of defined benefits liabilities during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, awal tahun	154,699	178,167	Present value of defined benefits liabilities, beginning of year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Beban jasa kini	28,498	28,567	Current service cost
Beban bunga	12,438	11,225	Interest expense
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Keugian/keuntungan aktuaria yang timbul dari:			Actuarial losses/gains arising from:
- Asumsi keuangan	(15,187)	(30,005)	Financial assumption -
- Penyesuaian pengalaman	(1,066)	(22,711)	Experience adjustment -
Lain-lain			Others
Imbalan yang dibayar	(4,222)	(10,544)	Benefits paid
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	175,160	154,699	Present value of defined benefits liabilities, end of year

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

Perubahan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of fair value of plan assets during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Saldo, awal tahun	168,602	170,795	<i>Balance, beginning of year</i>
Hasil yang diharapkan dari aset program	13,555	10,761	<i>Expected return on plan assets</i>
Kontribusi pemberi kerja	15,000	-	<i>Employer's contribution</i>
Imbalan yang dibayar	(4,222)	(10,544)	<i>Benefits paid</i>
Kerugian aktuarial - bersih	(4,052)	(2,410)	<i>Actuarial losses - net</i>
Saldo, akhir tahun	<u>188,883</u>	<u>168,602</u>	<i>Balance, end of year</i>

Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz dengan deposito berjangka sebagai aset yang mendasari. Nilai wajar atas deposito berjangka tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 188.883 dan Rp 168.602.

All of the pension plan assets are placed on Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz with time deposits as underlying assets. The fair value of time deposits as of 31 December 2019 and 2018 was Rp 188,883 and Rp 168,602, respectively.

Entitas Anak terekspos dengan risiko volatilitas aset melalui program imbalan pasti. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Subsidiary is exposed to asset volatility risks through its defined benefit pension plans. The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pengalaman pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Present value of defined benefits liabilities, fair value of plan assets, deficit/surplus of program and experience adjustment on plan liabilities and plan assets for the last 5 years were as follows:

	31 Desember/December					
	2019	2018	2017	2016	2015	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	(175,160)	(154,699)	(178,167)	(122,058)	(95,400)	<i>Present value of defined benefits liabilities</i>
Nilai wajar aset program	188,883	168,602	170,795	148,488	104,417	<i>Fair value of plan asset</i>
Surplus (defisit)	13,723	13,903	(7,372)	26,430	9,017	<i>Surplus (deficit)</i>
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	16,253	52,716	15,626	7,261	6,615	<i>Experience adjustment on plan liabilities</i>
Penyesuaian pengalaman pada aset program	(4,052)	(2,410)	(3,411)	(943)	468	<i>Experience adjustment on plan assets</i>

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits was as follow:

	2019	2018	
Hingga 1 tahun	8,115	2,682	<i>Up to 1 years</i>
Lebih dari 1 - 2 tahun	13,295	3,097	<i>More than 1 - 2 years</i>
Lebih dari 2 - 5 tahun	36,980	30,150	<i>More than 2 - 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	1,892,882	9,178,888	<i>More than 5 years</i>

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
 (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja untuk perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefits (continued)

Subsidiary (continued)

The sensitivity of the post-employment benefit obligation to change in the key actuarial assumption was as follow:

		31 Desember/December 2019		
		Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja/ Present value of post-employment benefits liabilities		
Perubahan asumsi/ Change in assumption				Beban jasa kini/ Current service cost
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	158,267	25,644	<i>Discount rate</i>
	Penurunan/Decrease 1%	195,255	31,909	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	195,627	31,969	<i>Salary increase rate</i>
	Penurunan/Decrease 1%	157,656	25,543	

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan pascakerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan pascakerja.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefits liabilities to key actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the post-employment benefits liabilities.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Bank

Bank

Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

The Bank also provides its employees with long leave benefit.

Perubahan liabilitas yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The movement in the Bank's liabilities arising from other long-term employee benefits was as follows:

		Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2019	2018	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:				Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, awal tahun		22,791	26,258	<i>Present value of defined liabilities, beginning of the year</i>
Termasuk dalam laba rugi				Included in profit or loss
Beban jasa kini		5,081	4,222	<i>Current service cost</i>
Beban bunga		1,842	1,694	<i>Interest expense</i>
Pengukuran kembali:				<i>Remeasurement:</i>
- Penyesuaian asumsi keuangan		643	(1,976)	<i>Changes in financial assumptions -</i>
- Penyesuaian pengalaman		442	(4,739)	<i>Experience adjustment -</i>
Lain-lain				Others
Imbalan yang dibayarkan dari pemberi kerja selama tahun berjalan		(4,363)	(2,668)	<i>Benefits paid by the employer during year</i>
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun		26,436	22,791	Present value of net defined benefits liabilities, end of year

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
 (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long term employee benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long term employee benefits are as follow:

	<u>31 Desember 2019/ 31 December 2019</u>	<u>31 Desember 2018/ 31 December 2018</u>	
Hingga 1 tahun	5,880	3,869	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	5,904	6,991	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	12,752	19,828	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	62,787	132,425	More than 5 years

Sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the pension obligation to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

		<u>31 Desember/December 2019</u>			
		<u>Perubahan asumsi/ Change in assumption</u>	<u>Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Presents value of benefit obligation</u>	<u>Beban jasa kini/ Current service cost</u>	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%		25,510	4,878	Discount rate
	Penurunan/Decrease 1%		27,449	5,303	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%		27,441	5,302	Salary increase rate
	Penurunan/Decrease 1%		25,501	4,876	

Entitas Anak

Subsidiary

Perubahan liabilitas yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the liabilities arising from other long-term employee benefits over the year was as follows:

	<u>31 Desember 2019 /31 December 2019</u>	<u>31 Desember 2018/ 31 December 2018</u>	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, awal tahun	10,335	12,024	Present value of the defined benefits liabilities, beginning of year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Beban jasa kini	2,016	2,106	Current service cost
Beban bunga	831	757	Interest expense
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
- Penyesuaian asumsi keuangan	(228)	(857)	Changes in financial assumptions -
- Penyesuaian pengalaman	(127)	(1,530)	Experience adjustment -
Lain-lain			Others
Imbalan yang dibayar	(1,805)	(2,165)	Benefit paid
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, akhir tahun	<u>11,022</u>	<u>10,335</u>	Present value of defined benefits liabilities, end of year

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long term employee benefits are as follow:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Hingga 1 tahun	1,917	2,047	Up to 1 years
Lebih dari 1-2 tahun	1,956	2,445	More than 1-2 years
Lebih dari 2-5 tahun	4,961	5,945	More than 2-5 years
Lebih dari 5 tahun	42,828	187,789	More than 5 years

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
 (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long term employee benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions is as follows:

		31 Desember/December 2019		
		Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja/ Present value of post- employment benefits		
	Perubahan asumsi/ Change in assumption		Beban jasa kini/ Current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	10,471	1,917	
	Penurunan/Decrease 1%	11,643	2,127	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	11,627	2,125	
	Penurunan/Decrease 1%	10,474	1,917	Salary increase rate

25. PINJAMAN SUBORDINASI

25. SUBORDINATED LOANS

Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman dari SMBC Cabang Singapura sejumlah USD 435.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp 6.038.888.

The outstanding subordinated loans represent loans obtained from SMBC Singapore Branch amounted to USD 435,000,000 (full amount), equivalent to Rp 6,038,888.

Pinjaman subordinasi di atas terdiri dari pinjaman subordinasi sejumlah USD 100.000.000, USD 100.000.000, USD 150.000.000, USD 35.000.000 dan USD 50.000.000 (nilai penuh), masing-masing diperoleh pada tanggal 23 November 2018, 26 September 2018, 24 Desember 2013, 5 September 2008 dan 27 Maret 2003. Pinjaman subordinasi USD 150.000.000, USD 35.000.000 dan USD 50.000.000 telah diperbaharui dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Subordinasi pada tanggal 27 Maret 2018. Pinjaman subordinasi USD 100.000.000 dan USD 100.000.000 masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2025 dan 26 September 2025, sedangkan pinjaman subordinasi USD 150.000.000, USD 35.000.000 dan USD 50.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2025. Pinjaman subordinasi memiliki opsi pembayaran lebih awal dengan pemberitahuan 20 hari sebelumnya dan dengan persetujuan dari kreditur.

The above subordinated loans consist of subordinated loan amounting to USD 100,000,000, USD 100,000,000, USD 150,000,000, USD 35,000,000 dan USD 50,000,000 (full amount), which were obtained on 23 November 2018, 26 September 2018, 24 December 2013, 5 September 2008 and 27 March 2003, respectively. Subordinated loan of USD 150,000,000, USD 35,000,000 and USD 50,000,000 have been renewed by Amendment and Restatement of Subordinated Loan Agreement on 27 March 2018. Subordinated loan of USD 100,000,000 and USD 100,000,000 will mature on 21 November 2025 and 26 September 2025, respectively, while Subordinated loan of USD 150,000,000, USD 35,000,000 and USD 50,000,000 will mature on 27 March 2025. These subordinated loans have early repayment option by 20 days notification in advance with lender's approval.

Kisaran tingkat suku bunga pinjaman subordinasi adalah 3,23% - 3,27% per tahun.

Range of interest rate for subordinated loans per year was 3.23% - 3.27%.

Pinjaman subordinasi digunakan untuk memperkuat struktur modal Debitur sebagai Modal pelengkap (Tier 2).

Subordinated loans are used to strengthen the Borrower's capital structure as the supplementary Capital (Tier 2).

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Sesuai Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, Kreditur dan Debitur memahami bahwa terdapat kondisi yang menyebabkan (*trigger events*) pinjaman yang diberikan sesuai dengan Perjanjian ini harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down*, yaitu dalam hal kelangsungan usaha debitur berpotensi terganggu (*point of non viability*) sehingga mempengaruhi kewajiban debitur kepada kreditur, yaitu dapat berupa:

- (i) rasio Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan Entitas Anak; dan/atau
- (ii) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Debitur yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
- (iii) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down*.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman subordinasi.

26. LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Desember 2019/ 31 December 2019	31 Desember 2018/ 31 December 2018	
Utang kepada pihak ketiga	200,157	14,195	<i>Payable to third parties</i>
Transaksi ATM, transfer dan tagihan <i>merchant</i>	102,110	31,348	<i>ATM transaction, transfer and merchant bills</i>
Komisi asuransi diterima dimuka	91,667	135,000	<i>Up-front insurance commission</i>
Beban <i>Standby Letter of Credit</i> yang masih harus dibayarkan	58,246	-	<i>Accrued Standby Letter of Credit fee</i>
Utang premi asuransi kredit	47,730	62,576	<i>Loan insurance premium payable</i>
Pendapatan ditangguhkan	38,251	-	<i>Unearned income</i>
Utang premi asuransi lainnya	18,742	11,203	<i>Other insurance premium payable</i>
Klaim asuransi	10,811	39,378	<i>Insurance claim</i>
Lainnya	137,131	61,356	<i>Others</i>
	704,845	355,056	

25. SUBORDINATED LOANS (continued)

In accordance with the Regulation of OJK Number 11/POJK.03/2016 and Circular Letter of OJK Number 20/SEOJK.03/2016 regarding Feature of Conversion to Common Stock or Write Down The Instruments of Additional Tier 1 and Tier 2, Lender and Borrower acknowledge the trigger events that will cause the loan provided under this Agreement to be converted to common stock or written down, particularly in the event when the business continuity of the debtor is potentially disrupted (point of non viability) and therefore affecting the liabilities of borrower to the lender, in the term of:

- (i) Common Equity Tier 1 (CET 1) is lower than or equal to 5.125% of Risk-Weighted Assets (RWA), both individually and consolidated with its Subsidiaries; and/or*
- (ii) there is a plan of the competent authority to make capital injection to the Borrower which continuity of its business is evaluated to have the potential to be disrupted; and*
- (iii) There is an order from OJK to convert into common stock and/or write-down*

As of 31 December 2019, the Bank complied with all the requirements mentioned in the subordinated loan agreements.

26. OTHER LIABILITIES

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Transaksi ATM, transfer dan tagihan *merchant* merupakan hutang atas transaksi ATM dan transfer antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya, serta transaksi dengan *merchant* melalui gerbang pembayaran.

Komisi asuransi diterima dimuka merupakan komisi yang diterima dari Allianz atas penjualan produk-produk asuransi kepada nasabah Bank melalui seluruh saluran distribusi Bank.

Beban *standby letters of credit* yang masih harus dibayarkan merupakan beban biaya yang masih harus dibayar atas *standby letter of credit* terkait dengan pinjaman yang diberikan.

Utang premi asuransi lainnya merupakan premi terutang atas asuransi karyawan Bank dan Entitas Anak.

Utang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Pendapatan ditangguhkan terdiri atas pendapatan dari pembelian wesel ekspor yang ditangguhkan.

Utang kepada pihak ketiga sebagian besar merupakan utang terkait informasi dan teknologi (IT) dan utang kepada ASABRI.

Klaim asuransi terdiri dari dana yang diterima dari hasil klaim asuransi atas nasabah kredit pensiun yang meninggal dunia dan pencatatan sementara penerimaan kembali premi asuransi Bank. Dana yang diterima akan berada dalam akun ini sampai Bank dapat mengidentifikasi kontrak terkait.

Lainnya terutama terdiri dari akun tampungan untuk penerimaan cicilan kredit yang diberikan. Dana yang diterima akan berada dalam akun ini sampai Bank dapat mengidentifikasi kontrak terkait.

27. DANA SYIRKAH TEMPORER

Perseroan menyajikan dana *syirkah* temporer sehubungan dengan kepemilikan Bank atas Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan syariah.

26. OTHER LIABILITIES (continued)

ATM transaction, transfer and merchant bills consist of payables from Bank ATM transaction and transfer to other banks that will be settled on the next working day and transactions with merchants via payment gateway.

Up-front insurance commission represents commission received from Allianz for the sales of insurance products to the Bank's customers through all Bank's distribution channel.

Accrued standby letters of credit fees are expense for standby letters of credit related to loans that has not been paid.

Other insurance premium payables are employees insurance premium payables of the Bank and Subsidiary.

Loan insurance premium payable consists of insurance premium payment from debtors not yet paid to the insurance company.

Unearned income consists of deferred income from export bills purchase.

Payables to third parties mainly represent payable related to information and technology (IT) and payable to ASABRI.

Insurance claim represents funds received from insurance claim on pensioner debtors who passed away and a temporary record of refund of Bank's insurance premium. The received fund would be in this account until the Bank can identify the specific contract.

Others mainly consist of escrow account for loan installments received. The received fund would be in this account until the Bank can identify the specific contract.

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

The Company presented temporary syirkah funds in relation to the Bank's ownership in the Subsidiary which engages in sharia banking industry.

	31 Desember/ December	
	2019	2018
Simpanan nasabah:		
Tabungan <i>mudharabah</i>	104,878	114,382
Deposito <i>mudharabah</i>	7,445,786	5,878,478
	<u>7,550,664</u>	<u>5,992,860</u>

Deposits from customer:
Mudharabah saving deposits
Mudharabah time deposits

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

a. Tabungan mudharabah

a. Mudharabah savings deposits

Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan:

By relationship with counterparties:

	31 Desember/ December		
	2019	2018	
Pihak ketiga	104,628	113,788	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	250	594	<i>Related parties</i>
	<u>104,878</u>	<u>114,382</u>	

Berdasarkan jenis produk:

By product type:

	31 Desember/ December		
	2019	2018	
Tabungan Taseto Premium iB	104,878	70,801	<i>Taseto Premium iB Savings</i>
Tabungan Citra iB	-	40,370	<i>Citra iB Savings</i>
Tabungan Taseto Mapan iB	-	3,211	<i>Taseto Mapan iB Savings</i>
	<u>104,878</u>	<u>114,382</u>	

Pada bulan Mei 2019, akad atas Tabungan Citra iB dan Tabungan Taseto Mapan iB berubah dari akad mudharabah menjadi akad wadiah.

In May 2019, deeds for Citra iB Saving and Taseto Mapan iB Saving were changed from mudharabah to wadiah.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan mudharabah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The average of pre-determined ratio and profit sharing rate for mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2019 and 2018 were as follows:

	2019		
	<i>Nisbah (%)/ Pre-determined ratio (%)</i>	<i>Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)</i>	
Tabungan mudharabah	3.45%	4.56%	<i>Mudharabah savings deposits</i>
	2018		
	<i>Nisbah (%)/ Pre-determined ratio (%)</i>	<i>Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)</i>	
Tabungan mudharabah	1.80%	4.01%	<i>Mudharabah savings deposits</i>

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada saldo tabungan mudharabah yang diblokir atau dijadikan jaminan pembiayaan.

As of 31 December 2019 and 2018, there were no mudharabah saving deposits which were blocked or pledged for financing.

b. Deposito mudharabah

b. Mudharabah time deposits

Berdasarkan hubungan dengan pihak lain:

By relationship with counterparties:

	31 Desember/ December		
	2019	2018	
Pihak ketiga	7,428,302	5,872,246	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	17,484	6,232	<i>Related parties</i>
	<u>7,445,786</u>	<u>5,878,478</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By time period

	2019	2018	
<u>Bukan Bank</u>			<u>Non-Bank</u>
Lebih dari 1 - 3 bulan	6,917,619	5,590,403	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	399,197	212,424	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 - 9 bulan	25,510	18,000	More than 6 - 9 months
Lebih dari 9 - 12 bulan	103,450	56,871	More than 9 - 12 months
Lebih dari 12 bulan	10	780	More than 12 months
	<u>7,445,786</u>	<u>5,878,478</u>	

d. Berdasarkan sisa umur sampai jatuh tempo

d. By remaining period to maturity date

	2019	2018	
<u>Bukan Bank</u>			<u>Non-Bank</u>
Hingga 1 bulan	5,298,489	4,108,910	Up to 1 months
Lebih dari 1 - 3 bulan	1,847,295	1,658,085	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	256,445	88,170	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 - 9 bulan	32,041	17,460	More than 6 - 9 months
Lebih dari 9 - 12 bulan	11,506	5,833	More than 9 - 12 months
Lebih dari 12 bulan	10	20	More than 12 months
	<u>7,445,786</u>	<u>5,878,478</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada saldo deposito mudharabah yang diblokir atau dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan.

As of 31 December 2019 and 2018, there were no mudharabah time deposits which were blocked or pledged for financing.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The average of pre-determined ratio (nisbah) and profit sharing rate for mudharabah time deposits as of 31 December 2019 and 2018 were as follows:

	2019		
	Nisbah (%)/ Pre-determined Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	
1 bulan	13.95%	7.76%	1 month
3 bulan	14.20%	7.82%	3 month
6 bulan	13.90%	7.87%	6 month
12 bulan	13.48%	7.83%	12 month
	2018		
	Nisbah (%)/ Pre-determined Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	
1 bulan	12.68%	7.10%	1 month
3 bulan	12.74%	6.92%	3 month
6 bulan	12.58%	6.96%	6 month
12 bulan	12.56%	6.75%	12 month

28. MODAL SAHAM

28. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Based on the share registrant record from Biro Administrasi Efek, the composition of the Bank's shareholders composition as of 31 December 2019 and 2018 was as follows:

Pemegang saham	31 Desember 2019/31 December 2019			Shareholder
	Lembar saham/ Number of shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/Total	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7,532,311,297	92.43%	150,647	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
PT Bank Central Asia Tbk	83,052,408	1.02%	1,661	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,007,137	0.15%	240	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Publik	426,359,127	5.23%	8,527	Public
	8,053,729,969	98.83%	161,075	
Saham tresuri	95,198,900	1.17%	1,904	Treasury shares
	<u>8,148,928,869</u>	<u>100%</u>	<u>162,979</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. MODAL SAHAM (lanjutan)

28. SHARE CAPITAL (continued)

Pemegang saham	31 Desember 2018/31 December 2018		Jumlah/Total	Shareholder
	Lembar saham/ Number of shares	Persentase/ Percentage		
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	2,336,114,903	39.92%	46,722	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo
Summit Global Capital Management B.V.	1,168,057,451	19.96%	23,361	Summit Global Capital Management B.V.
Direksi				Directors
- Jerry Ng	25,504,500	0.44%	510	Jerry Ng -
- Ongki Wanadjati Dana	11,255,000	0.19%	225	Ongki Wanadjati Dana -
- Anika Faisal	4,600,000	0.08%	92	Anika Faisal -
- Arief Harris Tandjung	11,975,000	0.20%	239	Arief Harris Tandjung -
- Kharim Indra Gupta Siregar	1,130,500	0.02%	23	Kharim Indra Gupta Siregar -
Publik	2,197,810,503	37.56%	43,957	Public
	5,756,447,857	98.37%	115,129	
Saham tresuri	95,198,900	1.63%	1,904	Treasury shares
	5,851,646,757	100%	117,033	

Pemegang saham publik terdiri dari pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% jumlah saham beredar. Seluruh saham yang beredar adalah saham biasa.

Public shareholders consist of shareholders whose ownership are less than 5% of outstanding shares. All the outstanding shares are ordinary shares.

Perubahan komposisi kepemilikan saham

Changes in share ownership composition

Pada tanggal 31 Desember 2018, SMBC merupakan pemegang saham dengan pengaruh signifikan (kepemilikan saham sebesar 40%) dan pada tanggal 30 Januari 2019 telah menjadi pemegang saham pengendali atas Bank.

As of 31 December 2018, SMBC was the shareholder with significant influence (40% of shares ownership) and as of 30 January 2019 has become the controlling shareholder.

Pada tanggal 1 Februari 2019, Bank melakukan aksi korporasi berupa *Cash Offer* dan Konversi Saham karena penggabungan usaha dengan SMBCI, sehingga terdapat perubahan kepemilikan saham dan penambahan sejumlah 2.296.846.112 saham.

On 1 February 2019, The Bank carried out corporate action namely cash offer and Share Conversion due to the merger with SMBCI, resulting in changes in share ownership and an additional 2,296,846,112 shares.

Dengan aksi korporasi tersebut, maka kepemilikan SMBC di Bank mengalami peningkatan menjadi 7.932.311.297 lembar saham atau 97,34%.

After this corporate action, SMBC ownership in the Bank's increased to 7,932,311,297 shares of equivalent to 97.34%.

Sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama adalah minimum sebesar 7,5% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh Bank (Saham *Free float*). Oleh karenanya, SMBC telah menjual 400 juta lembar sahamnya pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan harga jual Rp 3.600 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga pemenuhan ketentuan Saham *Free Float* ini telah menyebabkan kepemilikan SMBC berubah dari 97,34% ke 92,43%.

In accordance with the Indonesia Stock Exchange Regulation, The number of shares owned by the non controlling shareholders and non majority shareholders is at the minimum of 7.5% of total issued shares of the Bank (Free Float Shares). Therefore, SMBC sold 400 million of its shares in 26 August 2019 with the selling price of Rp 3,600 (full amount Rupiah) per share. The compliance with Free Float Shares requirement has changed the SMBC's ownership from 97.34% to 92.43%.

29. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

29. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank dan Entitas Anak memiliki cadangan pembayaran berbasis saham sebesar masing-masing Rp 244.012 dan Rp 281.748.

As of 31 December 2019 and 2018, the Bank and Subsidiary had share-based payments reserve amounting to Rp 244,012 and Rp 281,748, respectively.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)

Program MESOP 2015-2020

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Bank dengan jumlah tidak melebihi Rp 4.672, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Bank menjadi tidak melebihi Rp 121.478.

Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham-saham baru masing-masing bernilai nominal Rp 20 (nilai penuh) dengan jumlah tidak melebihi 233.611.491 saham.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi No. PS/BOD/004/IV/2015, pada tanggal 15 April 2015, Bank memberikan hak opsi sebesar 141.575.000 saham. Hak opsi tersebut diberikan kepada para anggota Direksi dan para karyawan jenjang tertentu dari Bank dan Entitas Anak yang ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi Bank berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, selama jangka waktu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.

Para anggota Direksi dan karyawan pada jenjang tertentu dapat mengeksekusi opsi saham yang diberikan selama mereka tetap memberikan jasa selama periode opsi saham.

Pelaksanaan atas hak opsi atas saham-saham baru tersebut harus sesuai dengan harga pelaksanaan, syarat dan ketentuan yang telah diumumkan dalam "Keterbukaan Informasi" yang diumumkan melalui *website* Bank dan *website* Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Februari 2015.

Periode pelaksanaan eksekusi opsi saham atas Program MESOP 2015-2020 terdiri dari: (1) Maksimum 30% pada bulan Mei 2017, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 1 Mei 2017; (2) Maksimum 30% pada bulan November 2017, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 6 November 2017; (3) Maksimum 60% pada bulan Mei 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 7 Mei 2018; (4) Maksimum 60% pada bulan November 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 5 November 2018; (5) Maksimum 100% pada bulan Mei 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 6 Mei 2019; (6) Maksimum 100% pada bulan Desember 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 2 Desember 2019. Sisa hak opsi yang belum dieksekusi secara penuh sampai dengan 100% selama periode eksekusi sebelumnya dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan eksekusi terakhir.

29. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE (continued)

MESOP 2015-2020 Program

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 26 March 2015 as notarised on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 50 dated 26 March 2015 made before Hadijah, S.H., M.Kn, the shareholders approved the Bank's plan to increase the issued and paid-in capital of the Bank by a number not exceeding Rp 4,672 which resulted in the issued and paid-up capital of the Bank not exceeding Rp 121,478.

This is done by issuing option rights on new shares with a par value of Rp 20 (full amount) by a number not exceeding 233,611,491 shares.

Based on Circular Resolution of Directors No. PS/BOD/004/IV/2015, dated 15 April 2015, the Bank granted 141,575,000 share options. Share options granted to the Bank's and the Subsidiary's members of the Board of Directors and the employees on a certain level are determined by the Board of Commissioners or by the Board of Directors of the Bank under authority granted by the Board of Commissioners, during a certain period determined by the Board of Commissioners.

Board of Directors and the employees at certain levels are able to execute share options that have been granted to them under the condition that the respected party continues to provide service during the share options period.

Implementation of the right options on new shares shall be in accordance with the exercise price, the terms and conditions that have been published in the "Disclosure of Information" published in Bank's and Indonesia Stock Exchange's website on 17 February 2015.

The exercise period of MESOP 2015-2020 Program will be conducted on (1) Maximum 30% in May 2017, with the implementation period of 30 trading days starting on 1 May 2017; (2) Maximum 30% in November 2017, with the implementation period of 30 trading days starting on 6 November 2017; (3) Maximum 60% in May 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 7 May 2018; (4) Maximum 60% in November 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 5 November 2018; (5) Maximum 100% on May 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 6 May 2019; (6) Maximum 100% on December 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 2 December 2019. The remaining option rights which have not yet been fully exercised up to prior exercise period can be implemented in the last exercise period of implementation.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)

Program MESOP 2015-2020 (lanjutan)

Nilai wajar rata-rata tertimbang opsi Program MESOP 2015-2020 yang diberikan selama tahun berjalan yang ditentukan dengan menggunakan Binomial Model Parameter adalah sebesar Rp 1.144,16; Rp 1.388,54; dan Rp 1.622,72 (nilai penuh) per opsi untuk masing-masing periode *vesting*. Input model yang signifikan adalah harga saham rata-rata tertimbang sebesar Rp 4.030 pada tanggal pemberian, harga eksekusi seperti ditunjukkan di bawah, volatilitas sebesar 29,37%, hasil dividen 0%, usia opsi yang diharapkan selama lima tahun dan tingkat bunga bebas risiko tahunan sebesar 7,5%.

Volatilitas yang diukur dengan standar deviasi atas imbal hasil saham yang terus dimajemukkan berdasarkan analisis stastisik atas harga saham harian sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai tanggal pemberian.

Tingkat suku bunga bebas risiko sesuai dengan pengembalian keuntungan atas obligasi pemerintah dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pemberian.

Program ESOP 2016-2021

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2016 sebagaimana dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Bank dengan jumlah tidak melebihi Rp 2.336.

Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham-saham baru masing-masing bernilai nominal Rp 20 (nilai penuh) dengan jumlah tidak melebihi 116.805.746 saham.

Para karyawan pada jenjang tertentu dapat mengeksekusi opsi saham yang diberikan selama mereka tetap menyediakan jasa selama periode opsi saham.

Pelaksanaan atas hak opsi atas saham-saham baru tersebut harus sesuai dengan harga pelaksanaan, syarat dan ketentuan yang telah diumumkan dalam "Keterbukaan Informasi" yang diumumkan melalui situs Bank dan situs Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Maret 2016 dan 27 April 2016.

29. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE (continued)

MESOP 2015-2020 Program (continued)

The weighted average fair value of options granted during the year for MESOP 2015-2020 Program was determined using the Binomial Model Parameter amounted to Rp 1,144.16; Rp 1,388.54; and Rp 1,622.72 (full amount) per option for each vesting period. The significant inputs into the model were weighted average share price of Rp 4,030 on the grant date, exercise price shown below, volatility of 29.37%, dividend yield of 0%, an expected option life of five years, and an annual risk-free interest rate of 7.5%.

The volatility measured at the standard deviation of continuously compounded share returns is based on statistical analysis of daily share prices starting from 3 January 2011 until grant date.

The risk free interest rate corresponds to market yields on government bonds of 5 years from grant date.

ESOP 2016-2021 Program

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 29 April 2016 which was notarised on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 60 dated 29 April 2016 made before Hadijah, S.H., M.Kn, the shareholders approved the Bank's plan to increase the issued and paid-in capital of the Bank by an amounts not exceeding Rp 2,336.

This is done by issuing option rights on new shares with a par value of Rp 20 (full amount) by a number not exceeding 116,805,746 shares.

Employees at certain levels are able to execute share options that have been granted to them under the condition that the respected party continues to provide services during the share options period.

Implementation of the right options on new shares shall be in accordance with the exercise price, the terms and conditions that have been published in the "Disclosure of Information" published at the Bank's website and Indonesia Stock Exchange's website on 8 March 2016 and 27 April 2016.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)

Program ESOP 2016-2021 (lanjutan)

Periode waktu pelaksanaan eksekusi opsi saham atas Program ESOP 2016-2021 terdiri dari: (1) Maksimum 30% pada bulan Mei 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 28 Mei 2018; (2) Maksimum 30% pada bulan Desember 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 17 Desember 2018; (3) Maksimum 60% pada bulan Mei 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 28 Mei 2019; (4) Maksimum 60% pada bulan Desember 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 19 Desember 2019; (5) Maksimum 100% pada bulan Juni 2020, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 1 Juni 2020; (6) Maksimum 100% pada bulan Desember 2020, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada tanggal 17 Desember 2020. Sisa hak opsi yang belum dieksekusi secara penuh sampai dengan 100% selama periode eksekusi sebelumnya dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan eksekusi terakhir.

Nilai wajar rata-rata tertimbang opsi Program ESOP 2016-2021 yang diberikan selama tahun berjalan yang ditentukan dengan menggunakan *Binomial Model Parameter* adalah Rp 546,50, Rp 709,55, dan Rp 839,99 (nilai penuh) per opsi untuk masing-masing periode *vesting*. Input model yang signifikan adalah harga saham rata-rata tertimbang sebesar Rp 2.480 pada tanggal pemberian, harga eksekusi seperti ditunjukkan di bawah, volatilitas per masing-masing periode *vesting* sebesar 28,92%, 29,60%, dan 29,10%, hasil dividen 0%, usia opsi yang diharapkan selama lima tahun dari tanggal pemberian, dan tingkat bunga bebas risiko tahunan masing-masing periode *vesting* sebesar 6,52%, 6,60% dan 6,71%.

Volatilitas diukur dengan standar deviasi atas imbal hasil saham yang terus dimajemukkan berdasarkan analisis statistik atas harga saham harian sejak 15 Mei 2014 sampai tanggal pemberian untuk periode *vesting* pertama, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai tanggal pemberian untuk periode *vesting* kedua dan sejak 14 Mei 2012 sampai tanggal pemberian untuk periode *vesting* ketiga.

Tingkat suku bunga bebas risiko sesuai dengan pengembalian keuntungan atas obligasi pemerintah pada saat tanggal pemberian dengan jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

29. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE (continued)

ESOP 2016-2021 Program (continued)

The exercise period of ESOP 2016-2021 Program is divided into the following: (1) Maximum 30% in May 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 28 May 2018; (2) Maximum 30% in December 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 17 December 2018; (3) Maximum 60% in May 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 28 May 2019; (4) Maximum 60% in December 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 19 December 2019; (5) Maximum 100% in June 2020, with the implementation period of 30 trading days starting on 1 June 2020; (6) Maximum 100% in December 2020, with the implementation period of 30 trading days starting on 17 December 2020. The remaining option rights which have not yet been fully exercised up to prior exercise period can be implemented in the last exercise period of implementation.

The weighted average fair value of options granted during the year for ESOP 2016-2021 Program was determined using Binomial Model Parameter amounted to Rp 546.50, Rp 709.55, and Rp 839.99 (full amount) per option for each vesting period. The significant inputs into the model were weighted average share price of Rp 2,480 on the grant date, exercise price as shown below, volatility of 28.92%, 29.60%, and 29.10%, respectively for each vesting period, dividend yield of 0%, expected life of five years from grant date, and annual risk-free interest rate of 6.52%, 6.60% and 6.71%, respectively.

The volatility measured at the standard deviation of continuously compounded share returns, which is based on statistical analysis of daily share prices starting from 15 May 2014 until the grant date for the first vesting period, starting from 13 May 2013 until the grant date for the second vesting period and starting from 14 May 2012 for the third vesting period.

The risk free interest rate corresponds to market yields on government bonds at grant date with duration ranging from 1 to 5 years.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
 (lanjutan)

29. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE (continued)

Program ESOP 2016-2021 (lanjutan)

ESOP 2016-2021 Program (continued)

Pada tahun 2019, Bank dan Entitas Anak berinisiatif memberikan program *cash retention* kepada karyawan yang memiliki hak opsi saham dari "Program ESOP 2016-2021", dimana pemegang hak opsi saham tersebut sepakat untuk menyerahkan terlebih dahulu hak opsi saham mereka kepada Bank dan Entitas Anak. Oleh karena itu, cadangan atas Program ESOP 2016-2021 tanggal 31 Desember 2019 kini dicatat sebagai liabilitas sesuai dengan kebijakan akuntansi imbalan kerja jangka pendek (Catatan 2y dan 24).

In 2019, the Bank and Subsidiary initiatively provided a cash retention program to employees who own share option rights from "ESOP 2016-2021 Program", of which the share option holders agree to first surrender their share option rights to the Bank and the Subsidiary. As a result, the reserve for ESOP 2016-2021 Program as of 31 December 2019 is now recorded as liabilities in accordance with short-term employee benefits accounting policy (Note 2y and 24).

Perubahan jumlah opsi saham adalah sebagai berikut:

Movements in the number of share options were as follows:

31 Desember 2019/31 December 2019			
	Harga eksekusi per lembar dalam Rupiah (nilai penuh)/ Exercise price per share in Rupiah (full amount)	Opsi Saham/ Share Option	
<u>Pada awal tahun</u>			<u>At beginning of year</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	108,140,000	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	38,383,500	ESOP 2016-2021 Program -
		<u>146,523,500</u>	
<u>Dieksekusi</u>			<u>Executed</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	-	MESOP 2015-2020 Program -
<u>Kadaluwarsa</u>			<u>Forfeited</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	(17,230,000)	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	(38,383,500)	ESOP 2016-2021 Program -
		<u>(55,613,500)</u>	
<u>Pada akhir tahun</u>			<u>At end of year</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	<u>90,910,000</u>	MESOP 2015-2020 Program -
31 Desember 2018/31 December 2018			
	Harga eksekusi per lembar dalam Rupiah (nilai penuh)/ Exercise price per share in Rupiah (full amount)	Opsi Saham/ Share Option	
<u>Pada awal tahun</u>			<u>At beginning of year</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	120,900,000	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	53,080,000	ESOP 2016-2021 Program -
		<u>173,980,000</u>	
<u>Dieksekusi</u>			<u>Executed</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	-	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	(11,359,500)	ESOP 2016-2021 Program -
		<u>(11,359,500)</u>	
<u>Kadaluwarsa</u>			<u>Forfeited</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	(12,760,000)	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	(3,337,000)	ESOP 2016-2021 Program -
		<u>(16,097,000)</u>	
<u>Pada akhir tahun</u>			<u>At end of year</u>
- Program MESOP 2015-2020	4,000	108,140,000	MESOP 2015-2020 Program -
- Program ESOP 2016-2021	2,617	38,383,500	ESOP 2016-2021 Program -
		<u>146,523,500</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

Opsi saham atas Program MESOP 2015-2020 yang masih ada pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 memiliki tanggal kadaluwarsa dan harga eksekusi berikut ini:

Tanggal Pemberian/ Grant date	Tanggal kadaluwarsa/ Expiry date	Harga eksekusi per lembar (nilai penuh)/ Exercise price per share (full amount)	Opsi Saham/Share Option	
			31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018
15 April/April 2015	Januari/January 2020	4,000	81,310,000	98,540,000
10 Juli/July 2015	Januari/January 2020	4,000	-	-
9 Oktober/October 2015	Januari/January 2020	4,000	-	-
8 Januari/January 2016	Januari/January 2020	4,000	-	-
11 April/April 2016	Januari/January 2020	4,000	-	-
11 Juli/July 2016	Januari/January 2020	4,000	-	-
10 Oktober/October 2016	Januari/January 2020	4,000	9,600,000	9,600,000
			<u>90,910,000</u>	<u>108,140,000</u>

29. SHARE-BASED PAYMENT RESERVE (continued)

Share options of MESOP 2015-2020 Program outstanding as of 31 December 2019 and 2018 have the following expiry dates and exercise prices:

Opsi saham atas Program ESOP 2016-2021 yang masih ada pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 memiliki tanggal kadaluwarsa dan harga eksekusi berikut ini:

Tanggal Pemberian/ Grant date	Tanggal kadaluwarsa/ Expiry date	Harga eksekusi per lembar (nilai penuh)/ Exercise price per share (full amount)	Opsi Saham/Share Option	
			31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018
21 September/September 2016	Januari/January 2021	2,617	-	38,383,500
9 Desember/December 2016	Januari/January 2021	2,617	-	-
10 Maret/March 2017	Januari/January 2021	2,617	-	-
12 Juni/June 2017	Januari/January 2021	2,617	-	-
11 September/September 2017	Januari/January 2021	2,617	-	-
11 Desember/December 2017	Januari/January 2021	2,617	-	-
			<u>-</u>	<u>38,383,500</u>

Share options of ESOP 2016-2021 Program outstanding as of 31 December 2019 and 2018 have the following expiry dates and exercise prices:

30. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut: (1) Bank akan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 574.509 atau Rp 100 per lembar saham dan (2) sisa dari total laba bersih yang diperoleh Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Pada tanggal 3 Mei 2018, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai Bank kepada pemegang saham sesuai Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 April 2018 (tanggal pencatatan).

30. APPROPRIATION OF NET INCOME

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2018 as unappropriated retained earnings.

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2017 as follows: (1) the Bank shall distribute dividend to the shareholders amounted Rp 574,509 or Rp 100 each shares and (2) the remaining balance of the net income acquired by the Bank in book year ended on 31 December 2017 shall be declared as unappropriated retained earnings.

On 3 May 2018, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia has distributed Bank's cash dividends to Shareholders based on Shareholders List on 11 April 2018 (recording date).

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH

31. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Pihak ketiga:			Third parties:
Pinjaman yang diberikan	13,252,279	9,947,176	Loans
Efek-efek	624,104	376,940	Marketable securities
Penempatan pada Bank Indonesia	242,273	126,813	Placements with Bank Indonesia
Derivatif	184,778	-	Derivatives
Giro dan penempatan pada bank-bank lain	37,276	15,885	Current accounts and placements with other banks
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	19,871	211,763	Securities purchased under resale agreements
	<u>14,360,581</u>	<u>10,678,577</u>	
Pihak berelasi:			Related parties:
Derivatif	168,879	-	Derivatives
Pinjaman yang diberikan	92,956	573	Loans
Giro dan penempatan pada bank-bank lain	2,468	235	Current accounts and placements with other banks
Efek-efek	2,174	-	Marketable securities
	<u>266,477</u>	<u>808</u>	
	<u>14,627,058</u>	<u>10,679,385</u>	
Pendapatan syariah			Sharia income
Pihak ketiga:			Third parties:
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	4,203,294	3,303,491	Income from sales and purchases - murabahah margin
Pendapatan dari bagi hasil - pembiayaan musyarakah	1,045	-	Revenue from profit sharing - musyarakah financing
Pendapatan usaha utama lainnya	253,013	143,775	Other main operating income
	<u>4,457,352</u>	<u>3,447,266</u>	
	<u>19,084,410</u>	<u>14,126,651</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. BEBAN BUNGA DAN HAK PIHAK KETIGA ATAS
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

32. INTEREST EXPENSE AND THIRD PARTIES'
SHARES ON RETURN OF TEMPORARY
SYIRKAH FUNDS

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
<u>Beban bunga</u>			<u>Interest expense</u>
<u>Pihak ketiga:</u>			<u>Third parties:</u>
Simpanan nasabah			Customer deposits
Deposito berjangka	4,667,302	3,371,265	Time deposits
Tabungan	141,034	138,635	Saving deposits
Giro	90,105	23,992	Current accounts
Deposito on call	36,153	35,545	Deposits on call
	<u>4,934,594</u>	<u>3,569,437</u>	
Pinjaman yang diterima	636,998	350,784	Borrowings
Derivatif	235,786	-	Derivatives
Simpanan dari bank-bank lain	215,188	14,396	Deposits from other banks
Surat utang jangka menengah	99,628	-	Medium Term Notes
Utang obligasi	88,648	148,646	Bonds payables
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21	50	Securities sold under repurchase agreements
	<u>6,210,863</u>	<u>4,083,313</u>	
<u>Pihak berelasi:</u>			<u>Related parties:</u>
Pinjaman yang diterima	794,945	45,783	Borrowings
Pinjaman subordinasi	236,426	-	Subordinated loans
Derivatif	111,576	-	Derivatives
Simpanan dari bank-bank lain	88,249	-	Deposits from other banks
	<u>1,231,196</u>	<u>45,783</u>	
Simpanan nasabah			Customer deposits
Deposito berjangka	46,438	4,944	Time deposits
Tabungan	14,429	6,463	Saving deposits
Giro	10,133	18,068	Current accounts
	<u>71,000</u>	<u>29,475</u>	
	<u>1,302,196</u>	<u>75,258</u>	
	<u>7,513,059</u>	<u>4,158,571</u>	
<u>Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer</u>			<u>Third parties' shares on return of temporary syirkah funds</u>
Pihak ketiga	522,771	367,176	Third parties
Pihak berelasi	816	496	Related parties
	<u>523,587</u>	<u>367,672</u>	
	<u>8,036,646</u>	<u>4,526,243</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

33. OTHER OPERATING INCOME

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Pendapatan komisi atas pinjaman yang diberikan	221,392	61,855	<i>Loan commission income</i>
Pendapatan dari penerimaan kembali kredit yang dihapusbuku	197,900	171,994	<i>Income from recovery of loans written-off</i>
Pendapatan administrasi dana pihak ketiga	133,474	65,096	<i>Third party fund administration income</i>
Denda pelunasan dipercepat dan keterlambatan	126,586	171,887	<i>Early termination penalty and late penalty income</i>
Pendapatan dari penjualan produk investasi	108,169	87,100	<i>Income from sale of investment products</i>
Pendapatan dari komisi asuransi	66,836	102,025	<i>Insurance commission income</i>
Jasa penerbitan garansi	42,156	-	<i>Guarantee fees</i>
Jasa kliring dan transfer	15,987	-	<i>Clearing and transfer fees</i>
Pendapatan komisi lainnya	15,617	-	<i>Others commission income</i>
Penerimaan kembali dari kerugian operasional	5,353	5,263	<i>Operational loss recovery</i>
Lain-lain	40,280	119,141	<i>Others</i>
	<u>973,750</u>	<u>784,361</u>	

Pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan adalah pendapatan administrasi yang diperoleh dari pinjaman bank.

Loan administration income are administration income received from bank.

Pendapatan dari penjualan produk investasi adalah pendapatan komisi dari pihak ketiga atas produk investasi yang dijual melalui Bank.

Income from sale of investment products are commission income received from third party related with investment product that are sold through the Bank.

Pendapatan dari komisi asuransi adalah pendapatan atas komisi penjualan *unit link* dan komisi yang diterima oleh Bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan Allianz, Avrist, Generali, FWD, Proteksi Antar Nusa dan Adonai Pialang Asuransi (Catatan 12).

Insurance commission income are income from unit link sales commission and commission received by the Bank based on agreements with Allianz, Avrist, Generali, FWD, Proteksi Antar Nusa and Adonai Pialang Asuransi (Note 12).

Lain-lain termasuk jasa *cash handling*, jasa *payment point* dan pendapatan dividen.

Others consist of cash handling services, payment point service, and dividend income.

34. BEBAN KEPEGAWAIAN

34. PERSONNEL EXPENSES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Gaji, upah, bonus, tantiem dan imbalan kerja karyawan	2,016,558	1,830,104	<i>Salaries, wages, bonus, tantiem and employee benefits</i>
Tunjangan hari raya	414,784	308,230	<i>Holiday allowances</i>
Tunjangan kesehatan	185,553	140,089	<i>Medical benefit</i>
Tunjangan pajak	173,624	135,217	<i>Tax allowances</i>
Pendidikan dan latihan	138,688	109,446	<i>Training and education</i>
Tunjangan representasi	125,493	95,430	<i>Representation allowance</i>
Jamsostek	82,663	73,283	<i>Jamsostek</i>
Tunjangan program kepemilikan kendaraan	56,054	44,502	<i>Car ownership program allowance</i>
Tunjangan telepon	24,828	20,870	<i>Telephone allowance</i>
Tunjangan perumahan	22,012	15,824	<i>Housing allowance</i>
Lain-lain	89,378	38,127	<i>Others</i>
	<u>3,329,635</u>	<u>2,811,122</u>	

Termasuk dalam beban kepegawaian adalah gaji, opsi saham dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Included under personnel expenses are salaries, share options and other compensations paid to the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018*	
Jasa dari pihak ketiga dan perlengkapan kantor	1,080,648	909,372	Services from third parties and office supplies
Sewa	620,873	480,602	Rent
Beban asuransi	445,471	381,658	Insurance expense
Penyusutan aset tetap (Catatan 15)	358,264	314,573	Depreciation of fixed assets (Note 15)
Amortisasi piranti lunak (Catatan 16)	318,284	210,530	Amortisation of software (Note 16)
Promosi dan iklan	216,201	154,620	Promotion and advertising
Jasa profesional	109,641	172,475	Professional fees
Pemeliharaan dan perbaikan	78,712	46,596	Repairs and maintenance
Lain-lain	34,445	60,412	Others
	3,262,539	2,730,838	

* Setelah penyajian kembali (Catatan 48) dan reklasifikasi (Catatan 49)

* After restatement (Note 48) and reclassification (Note 49)

Jasa dari pihak ketiga dan perlengkapan kantor terdiri dari beban honorarium, perjalanan dinas, tagihan kantor pos, beban listrik, air dan telepon, komunikasi data, peralatan kantor dan jasa pengiriman.

Services from third parties and office supplies consist of expenses from honorarium, business travelling, post office billing, utilities, data communication, office supplies, and delivery services.

Lain-lain termasuk pajak reklame, pajak kendaraan, pajak daftar perusahaan, dan beban lain-lain Entitas Anak.

Others consist of advertisement tax, vehicle tax, company registration tax and Subsidiary's miscellaneous expenses.

36. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

36. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 12f)	1,445,933	1,364,941	Loans and sharia financing/receivables (Note 12f)
Efek-efek (Catatan 8h)	(44)	-	Marketable securities (Note 8h)
Tagihan akseptasi (Catatan 11)	(7)	-	Acceptance receivables (Note 11)
Aset lain-lain (Catatan 17)	-	10,331	Other assets (Note 17)
	1,445,882	1,375,272	

37. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

37. OTHER OPERATING EXPENSES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Beban komisi dan administrasi	280,270	145,001	Commissions and administrative fees
Iuran tahunan OJK	79,152	40,200	OJK annual fee
Beban pengembangan komunitas	43,982	16,024	Community development expenses
Kerugian terkait risiko operasional	35,020	26,687	Loss of operational risk
Beban rumah tangga	24,104	52,870	Household expenses
Beban retribusi	3,216	2,939	Retribution expenses
Beban pengurusan klaim asuransi	3,117	3,466	Insurance claim expenses
Rekrutmen	1,822	1,328	Recruitment
Lain-lain	67,015	47,044	Others
	537,698	335,559	

Lain-lain termasuk beban jamuan, beban keanggotaan dan beban penyelesaian kredit.

Others consist of entertainment expenses, membership fees and credit settlement charges.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Bank dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

Di bawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank dan Entitas Anak, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

38. RELATED PARTY INFORMATION

In the normal course of business, the Bank and Subsidiary engage in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

The following is a summary of related parties who have transactions with the Bank and Subsidiary, including the nature of the relationships and transactions:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	Pemegang saham pengendali/ <i>Controlling shareholders</i>	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain/ <i>Current accounts with other banks; deposits from other banks</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; efek-efek; pinjaman yang diterima; pinjaman subordinasi; transaksi derivatif/ <i>Current accounts with other banks; deposits from other banks; marketable securities; borrowings; subordinated loans; derivative transactions</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hongkong Branch	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain/ <i>Current accounts with other banks; deposits from other banks</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Europe Limited	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Dusseldorf Branch	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan dari bank lain; transaksi derivatif/ <i>Deposits from other banks; derivative transactions</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain/ <i>Current accounts with other banks; deposits from other banks</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
PT SMFL Leasing Indonesia	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ <i>Deposits from customers; loans; derivative transactions</i>
PT Oto Multi Artha	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ <i>Deposits from customers; loans; derivative transactions</i>
PT Summit Oto Finance	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ <i>Deposits from customers; loans; derivative transactions</i>
PT Nikko Securities Indonesia	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
PT SBCS Indonesia	Perusahaan afiliasi/ <i>affiliated company</i>	Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
Personil manajemen kunci/ <i>Key Management Personnel</i>	Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif/ <i>Directors, Commissioners and executive employees</i>	Pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah, pembayaran kompensasi dan remunerasi, imbalan pascakerja/ <i>Loans, deposits from customers, payments of compensation and remuneration, post-employment benefits</i>

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

38. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances and detail transactions with related parties were as follows:

(a) Giro pada bank-bank lain

(a) Current accounts with other banks

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Giro pada bank-bank lain	725,450	21,912	Current accounts with other banks
Pihak berelasi			Related party
Persentase terhadap jumlah aset	0.40%	0.02%	Percentage to total assets

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Pendapatan bunga	2,468	235	Interest income
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	0.02%	0.00%	Percentage to total interest income

(b) Efek-efek

(b) Marketable securities

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Efek-efek	86,105	-	Marketable securities
Pihak berelasi			Related parties
Persentase terhadap jumlah aset	0.05%	0.00%	Percentage to total assets

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Pendapatan bunga	2,174	-	Interest income
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	0.01%	0.00%	Percentage to total interest income

(c) Tagihan derivatif

(c) Derivative receivables

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Tagihan derivatif	61,682	-	Derivative receivables
Pihak berelasi			Related parties
Persentase terhadap jumlah aset	0.03%	0.00%	Percentage to total assets

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Pendapatan bunga	168,879	-	Interest income
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	1.15%	0.00%	Percentage to total interest income

(d) Pinjaman yang diberikan

(d) Loans

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Pinjaman yang diberikan	8,714	18,632	Loans
Personil manajemen kunci	2,123,995	-	Key management personnel
Pihak berelasi			Related parties
	2,132,709	18,632	

Pendapatan bunga yang masih akan diterima	12,538	7	Accrued interest income
	2,145,247	18,639	

Persentase terhadap jumlah aset	1.18%	0.02%	Percentage to total assets
---------------------------------	-------	-------	----------------------------

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Pendapatan bunga:			Interest income:
Personil manajemen kunci	300	573	Key management personnel
Pihak berelasi	92,656	-	Related parties
	92,956	573	

Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	0.64%	0.00%	Percentage to total interest income
---	-------	-------	-------------------------------------

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

38. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(d) Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

(d) Loans (continued)

Suku bunga atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebesar 5% sampai dengan 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman antara 1 sampai dengan 20 tahun. Pinjaman tersebut diberikan tanpa adanya jaminan tertentu.

Interest rate charged on loan to key management personnel amounting 5% until 8% per annum with term between 1 until 20 years. Such loan is given without any specific collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

There was no impairment on the loan to key management personnel as of 31 December 2019 and 2018.

(e) Simpanan nasabah

(e) Deposits from customers

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Dana pihak ketiga			<i>Third party fund</i>
Personil manajemen kunci:			<i>Key management personnel:</i>
Giro	8,631	-	<i>Current accounts</i>
Tabungan	10,894	21,825	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka dan deposito on call	82,128	177,454	<i>Time deposits and deposits on call</i>
	<u>101,653</u>	<u>199,279</u>	
Pihak berelasi:			<i>Related parties:</i>
Giro	49,952	3,535	<i>Current accounts</i>
Tabungan	-	-	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka dan deposito on call	387,555	794,750	<i>Time deposits and deposits on call</i>
	<u>437,507</u>	<u>798,285</u>	
	<u>539,160</u>	<u>997,564</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	4,033	3,567	<i>Accrued interest expense</i>
	<u>543,193</u>	<u>1,001,131</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.38%	1.31%	<i>Percentage to total liabilities</i>
	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Beban bunga	71,000	29,475	<i>Interest expense</i>
Persentase terhadap jumlah beban bunga	0.95%	0.71%	<i>Percentage to total interest expenses</i>

Dana pihak ketiga ditempatkan dalam giro, tabungan maupun deposito berjangka. Tingkat suku bunga yang diberikan oleh Bank adalah sebesar 0,00% - 7,50%. Untuk deposito berjangka tergantung tenor dan jumlah pokok deposito.

Third party funds are placed on current account, saving accounts and time deposits. Interest rate given by the Bank for the placement amounting to 0.00% - 7.50%. For time deposit depends on tenor and principal amount.

(f) Simpanan dari bank-bank lain

(f) Deposits from other banks

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Simpanan dari bank-bank lain	7,291,425	-	<i>Deposits from other banks</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	26,784	-	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>7,318,209</u>	<u>-</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	5.13%	-	<i>Percentage to total liabilities</i>
	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Beban bunga	88,249	-	<i>Interest expense</i>
Persentase terhadap jumlah beban bunga	1.17%	-	<i>Percentage to total interest expenses</i>

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

38. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(g) Liabilitas derivatif

(g) Derivative liabilities

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Liabilitas derivatif			<i>Derivative liabilities</i>
Pihak berelasi	54,071	-	<i>Related parties</i>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,04%	0,00%	<i>Percentage to total liabilities</i>

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Beban bunga	111,576	-	<i>Interest expense</i>
Persentase terhadap jumlah beban bunga	1.49%	0.00%	<i>Percentage to total interest expenses</i>

(h) Pinjaman yang diterima

(h) Borrowings

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Pinjaman yang diterima	31,193,978	1,078,500	<i>Borrowings</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	59,954	1,322	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>31,253,932</u>	<u>1,079,822</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	21.92%	1.41%	<i>Percentage to total liabilities</i>

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Beban bunga Pihak berelasi	794,945	45,783	<i>Interest expense Related party</i>
Persentase terhadap jumlah beban bunga	10.58%	1.10%	<i>Percentage to total interest expenses</i>

(i) Liabilitas akseptasi

(i) Acceptance payables

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Liabilitas akseptasi Pihak berelasi	157,523	-	<i>Acceptance payables Related party</i>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.11%	0.00%	<i>Percentage to total liabilities</i>

(j) Pinjaman subordinasi

(j) Subordinated loans

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Pinjaman subordinasi	6,038,888	-	<i>Subordinated loans</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	6,305	-	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>6,045,193</u>	<u>-</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	4.24%	0.00%	<i>Percentage to total liabilities</i>

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Beban bunga: Pihak berelasi	236,426	-	<i>Interest expense: Related party</i>
Persentase terhadap jumlah beban bunga	3.15%	0.00%	<i>Percentage to total interest expenses</i>

(k) Dana syirkah temporer

(k) Temporary syirkah funds

	31 Desember/31 December		
	2019	2018	
Simpanan nasabah			<i>Deposits from customers</i>
Personil manajemen kunci: Tabungan mudharabah	250	594	<i>Key management personnel: Mudharabah saving deposits</i>
Deposito mudharabah	17,484	6,232	<i>Mudharabah time deposits</i>
	<u>17,734</u>	<u>6,826</u>	
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	0.24%	0.11%	<i>Percentage to total temporary syirkah funds</i>

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
 (lanjutan)

38. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(k) Dana syirkah temporer (lanjutan)

(k) *Temporary syirkah funds* (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	2018	
Hak atas bagi hasil dana syirkah temporer	816	496	Shares on return of temporary syirkah funds
Persentase terhadap beban bagi hasil	0.16%	0.13%	Percentage to total profit-sharing

(l) Kompensasi dan remunerasi personil manajemen kunci

(l) *Compensation and remuneration of key management personnel*

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

	31 Desember/December 2019						
	Direksi/Board of Directors		Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Personil manajemen kunci lainnya/Other key management personnel		
	%*	Rp	%*	Rp	%*	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	6.06%	202,589	0.62%	20,709	10.09%	337,368	Salaries and other short-term employee benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	0.39%	12,915	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.02%	637	Other long-term benefits
Jumlah	6.06%	202,589	0.62%	20,709	10.50%	350,920	Total

	31 Desember/December 2018						
	Direksi/Board of Directors		Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Personil manajemen kunci lainnya/Other key management personnel		
	%*	Rp	%*	Rp	%*	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	6.60%	187,092	0.80%	22,525	9.15%	257,096	Salaries and other short-term employee benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	0.39%	10,907	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.01%	323	Other long-term benefits
Jumlah	6.60%	187,092	0.80%	22,525	9.55%	268,326	Total

*% terhadap jumlah beban kepegawaian

% to total personnel expenses

(m) Pembayaran berbasis saham

(m) *Share-based payments*

Pembayaran berbasis saham yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Share-based payments given to the key management personnel are as follows:

	Program ESOP 2016-2021*				
	Bank		Entitas Anak		
	Harga eksekusi opsi/ Option exercise price	Opsi saham/ Share option	Harga eksekusi opsi (sebelum modifikasi*)/ Option exercise price (before modification)**	Opsi saham/ Share option	
Manajemen kunci lainnya	2,617	52,865,000	2,617	3,780,000	Other key management

*) dalam nilai penuh

**) terdapat modifikasi yang mengubah skema pembayaran Program ESOP 2016-2021 (Catatan 29).

*) in full amount

**) there was modification on the payment scheme for ESOP 2016-2021 Program (Note 29)

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
 (lanjutan)

38. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(m) Pembayaran berbasis saham (lanjutan)

(m) *Share-based payments* (continued)

Pembayaran berbasis saham yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Share-based payments given to the key management personnel were as follows: (continued)

	Program MESOP 2015-2020*				
	Bank		Entitas Anak		
	Harga eksekusi opsi/ <i>Option exercise price</i>	Opsi saham/ <i>Share option</i>	Harga eksekusi opsi/ <i>Option exercise price</i>	Opsi saham/ <i>Share option</i>	
Direksi	4,000	36,700,000	4,000	9,400,000	<i>Board of Directors</i>
Manajemen kunci lainnya	4,000	96,215,000	4,000	9,760,000	<i>Other key management</i>
		<u>132,915,000</u>		<u>19,160,000</u>	

*) dalam nilai penuh

**) in full amount

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Seluruh komitmen dan kontinjensi adalah dengan pihak ketiga.

All commitments and contingencies are with the third parties.

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Aset komitmen			Committed assets
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	3,124,023	-	<i>Unused borrowing facilities</i>
Aset kontinjensi			Contingent assets
Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan yang bermasalah	97,680	86,310	<i>Interest receivable on non-performing loans</i>
Garansi yang diterima	19,839,026	2,157	<i>Guarantees received</i>
	<u>19,936,706</u>	<u>88,467</u>	
Liabilitas komitmen			Committed liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>committed</i>	8,433,080	6,160,762	<i>Unused credit facilities to customers - committed</i>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>uncommitted</i>	73,413,906	-	<i>Unused credit facilities to customers - uncommitted</i>
Fasilitas kredit kepada bank yang belum digunakan - <i>uncommitted</i>	63,163	-	<i>Unused credit facilities to banks - uncommitted</i>
<i>Letters of credit</i> yang tidak dapat dibatalkan	925,174	-	<i>Irrevocable letters of credit</i>
	<u>82,835,323</u>	<u>6,160,762</u>	
Liabilitas kontinjensi			Contingent liabilities
Garansi yang diberikan	8,924,578	107,719	<i>Guarantees provided</i>

b. Berdasarkan kolektibilitas OJK

b. By OJK grading

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Lancar	90,359,090	6,268,346	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	1,350,086	135	<i>Special mention</i>
Kurang lancar	50,725	-	<i>Substandard</i>
	<u>91,759,901</u>	<u>6,268,481</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

**39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)**

c. Kasus hukum

Berkaitan dengan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pemerintah Kota Semarang di Pengadilan Negeri Semarang, pihak-pihak yang terkait adalah Pemerintah Kota Semarang sebagai penggugat, PT Bank BTPN Tbk cabang Sinaya Pandanaran Semarang sebagai tergugat satu dan PT Bank BTPN Tbk kantor pusat di Jakarta sebagai tergugat dua.

Pada tanggal 20 Agustus 2018, Bank telah menerima surat pemberitahuan bahwa gugatan perdata dimaksud telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan isi putusan "Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima". Dengan demikian Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan tidak ada kerugian Bank atas gugatan dalam perkara tersebut.

Perkara tindak pidana korupsi, pada tanggal 8 Juli 2019 telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, dengan isi putusan "Terdakwa Pihak Eksternal Bank terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dihukum dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan". Dengan demikian Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht*).

Perseroan menghadapi beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi dan klaim yang belum terselesaikan, yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Adalah tidak mungkin untuk memastikan apakah Perseroan akan memenangkan masalah atau tuntutan hukum tersebut, atau dampaknya jika Perseroan kalah. Namun demikian, manajemen Perseroan yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan atau likuiditas Perseroan.

40. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk Direksi, yang bertindak sebagai pengambil keputusan operasi, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Bank dan Entitas Anak telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan PSAK 5, "Segmen Operasi".

Bank dan Entitas Anak memiliki 5 (lima) pelaporan segmen, berdasarkan produk usaha, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

c. Litigation cases

In relation with the civil lawsuit Tort filed by Semarang City Government in the Semarang District Court, the related parties are Semarang City Administration as plaintiff, PT Bank BTPN Tbk, Sinaya Pandanaran Branch Office as first defendant and PT Bank BTPN Tbk, Head office in Jakarta as second defendant.

*On 20 August 2018, the Bank received a notification that the civil lawsuit has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia on 12 October 2016 with the contents of the decision "Plaintiff's Claim Not Acceptable". Thus the Decision has a permanent legal force (*In Kracht*); therefore, the Bank has not suffered a loss in this case*

*In relation with criminal case of corruption, on 8 July 2019 has been decided by Corruption Court in the Semarang District Court with the contents of the decision "The Bank's external defendant were proven to have committed a criminal Corruption Act and were sentenced 2 years and 6 months imprisonment". Thus the Decision has a permanent legal force (*In Kracht*).*

The Company is a party to various unresolved legal actions, administrative proceedings, and claims in the ordinary course of its business. It is not possible to predict with certainty whether or not the Company will ultimately be successful in any of these legal matters or, if not, what the impact might be. However, the Company's management does not expect that the results in any of these proceedings will have a material adverse effect on the Company's results of operations, financial position or liquidity.

40. OPERATING SEGMENT

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the Directors, as the chief operating decision maker, who are responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. All operating segments used by the Bank and Subsidiary meet the definition of a reportable segment under PSAK 5, "Operating Segment".

The Bank and Subsidiary have 5 (five) reportable segments, in accordance with the business product, as set out in the table below.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Ritel

Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah pensiunan dan nasabah individual lainnya.

Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM)

Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Penghimpunan dana dan treasury

Terdiri dari aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga dan bank lain, serta aktivitas treasury termasuk pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan. Penghimpunan dana treasury berada di bawah direktorat yang sama.

Korporasi

Terdiri dari pinjaman dan layanan yang diberikan dari nasabah korporasi yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Syariah

Merupakan lini segmen operasi atas Entitas Anak yang dimulai dari tanggal efektif beroperasi sebagai bank umum syariah.

Terdiri dari pembiayaan syariah dan dana pihak ketiga dari nasabah syariah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Dalam mengalokasikan beban operasional, manajemen mengatribusikan beberapa pos beban operasional sesuai dengan kebijakan pelaporan internal Bank dan Entitas Anak.

Informasi pelaporan segmen adalah sebagai berikut:

40. OPERATING SEGMENT (continued)

Retail

Consists of loans to pensioners and other individual customers.

Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

Consists of loans to micro, small & medium enterprise customers for commercial purpose.

Funding and treasury

Consists of funding business activity in raising funds from third party and other banks, and centralised treasury operations including borrowings and securities issued. Funding and treasury are under the same directorate.

Corporate

Consists of loans and services from corporate customers which related to commercial purpose.

Sharia

Represents a line of operating segments of Subsidiary which started from the effective date to operate as a sharia commercial bank.

Consists of sharia financing and third party fund from sharia customers which related to commercial purpose.

In allocating operating expenses, management attributed some of its expenses based on Bank and Subsidiary's internal reporting policy.

The reportable segment information was as follows:

31 Desember/December 2019							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasury/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasi/ Consolidation
Pendapatan dan beban operasional							Operating income and expense
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	7,462,017	1,881,192	1,208,296	4,075,553	4,457,352	-	19,084,410
Pendapatan bunga antar segmen	(4,122,228)	(1,116,614)	8,265,397	(3,026,555)	-	-	-
Beban bunga antar segmen	127,688	37,365	(3,811,466)	3,646,413	-	-	-
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(18,430)	(16,034)	(4,302,390)	(3,176,205)	(523,587)	-	(8,036,646)
Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan-bersih	3,449,047	785,909	1,359,837	1,519,206	3,933,765	-	11,047,764
							Net reportable segment interest and sharia income

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

40. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Desember/December 2019								
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan tresuri/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasi/ Consolidation	
Pendapatan operasional lainnya:								Other operating income:
Pendapatan operasional lainnya	215,455	272,816	222,683	246,114	17,742	(1,060)	973,750	Other operating income
Keuntungan transaksi spot dan derivatif - bersih	-	-	87,529	499,230	-	-	586,759	Net gain from spot and derivative transactions
Pendapatan operasional lainnya	215,455	272,816	310,212	745,344	17,742	(1,060)	1,560,509	Other operating income
Beban operasional lainnya								Other operating expenses
Beban operasional lainnya	(1,829,251)	(1,011,711)	(1,827,378)	(701,551)	(1,761,041)	1,060	(7,129,872)	Other operating expense
Cadangan kerugian penurunan nilai	(483,712)	(564,473)	(6,537)	(81,758)	(309,402)	-	(1,445,882)	Allowance for impairment losses
Beban operasional lainnya	(2,312,963)	(1,576,184)	(1,833,915)	(783,309)	(2,070,443)	1,060	(8,575,754)	Other operating expenses
Beban non-operasional - bersih	(6,056)	(97)	(4,629)	-	(2,815)	-	(13,597)	Non-operating expenses
Laba segmen sebelum pajak penghasilan	1,345,483	(517,556)	(168,495)	1,481,241	1,878,249	-	4,018,922	Segment income (loss) before income tax
Beban pajak penghasilan	(344,365)	132,465	43,124	(379,113)	(478,615)	-	(1,026,504)	Income tax expense
Laba (rugi) bersih	1,001,118	(385,091)	(125,371)	1,102,128	1,399,634	-	2,992,418	Net income (loss)
Aset								Assets
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan-bersih	41,051,406	15,019,353	-	75,514,770	8,707,455	-	140,292,984	Net loans/financing
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima dari pinjaman/pembiayaan yang diberikan	373,606	68,661	-	295,491	89,601	-	827,359	Accrued interest/margin income from loans/financing
Aset lain-lain	-	-	25,932,578	-	5,929,356	(1,244,387)	30,617,547	Other assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	33,615	-	88,846	-	122,461	Accrued interest income
Jumlah aset yang dialokasikan	41,425,012	15,088,014	25,966,193	75,810,261	14,815,258	(1,244,387)	171,860,351	Total allocated assets
Aset yang tidak dialokasikan*							9,771,034	Unallocated assets*
Jumlah aset							181,631,385	Total assets
Liabilitas								Liabilities
Simpanan nasabah	2,501,285	625,497	27,612,593	46,753,556	1,895,885	-	79,388,816	Customer deposits
Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	-	-	210,601	-	21,861	-	232,462	Undistributed revenue sharing
Liabilitas lain-lain	-	-	58,936,647	-	-	(26,202)	58,910,445	Others liabilities
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	231,143	-	-	-	231,143	Accrued interest expenses
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	2,501,285	625,497	86,990,984	46,753,556	1,917,746	(26,202)	138,762,866	Total allocated liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan							3,845,927	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas							142,608,793	Total liabilities
Dana syirkah temporer	-	-	-	-	7,550,664	-	7,550,664	Temporary syirkah fund

*) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset tak berwujud, liabilitas lainnya dan akrual

*) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accruals

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi pelaporan segmen adalah sebagai berikut (lanjutan):

40. OPERATING SEGMENT (continued)

The reportable segment information was as follows (continued):

	31 Desember/December 2018*							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan tresuri/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination		Konsolidasi/ Consolidation
Pendapatan dan beban operasional							Operating income and expense	
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	7,803,030	2,106,690	769,665	-	3,447,266	-	14,126,651	External interest and sharia income
Pendapatan bunga antar segmen	-	-	5,313,279	-	-	-	5,313,279	Inter-segment interest income
Beban bunga antar segmen	(4,260,807)	(1,052,472)	-	-	-	-	(5,313,279)	Inter-segment interest expense
Beban bunga dan bagi hasil syariah	-	(11,673)	(4,146,898)	-	(367,672)	-	(4,526,243)	Interest expense and sharia profit sharing
Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan - bersih	3,542,223	1,042,545	1,936,046	-	3,079,594	-	9,600,408	Net reportable segment interest and sharia income
Pendapatan operasional lainnya							Other operating income	
Pendapatan operasional lainnya	324,448	291,615	159,178	-	13,149	(4,029)	784,361	Other operating income
Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif bersih	-	-	(184,222)	-	-	-	(184,222)	Net gain (loss) from spot and derivative transactions
Pendapatan operasional lainnya	324,448	291,615	(25,044)	-	13,149	(4,029)	600,139	Other operating income
Beban operasional lainnya							Other operating expenses	
Beban operasional lainnya	(1,706,037)	(1,051,682)	(1,609,537)	-	(1,514,292)	4,029	(5,877,519)	Other operating expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(549,603)	(549,133)	(634)	-	(275,902)	-	(1,375,272)	Allowance for impairment losses
Beban operasional Lainnya	(2,255,640)	(1,600,815)	(1,610,171)	-	(1,790,194)	4,029	(7,252,791)	Other operating expenses
Beban non-operasional	(286)	(123)	(24,389)	-	(3,530)	-	(28,328)	Net non-operating expenses
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	1,610,745	(266,778)	276,442	-	1,299,019	-	2,919,428	Segment income (loss) before income tax
Beban pajak penghasilan	(454,927)	75,347	(78,076)	-	(333,708)	-	(791,364)	Income tax expense
Laba (rugi) bersih	1,155,818	(191,431)	198,366	-	965,311	-	2,128,064	Net income (loss)
Aset							Assets	
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan-bersih	43,722,043	15,582,407	637,051	-	7,061,214	-	67,002,715	Net loans/financing
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima dari pinjaman/pembiayaan yang diberikan	437,935	82,354	3,091	-	82,139	-	605,519	Accrued interest margin income from loans/financing
Aset lain-lain	-	-	23,670,144	-	4,404,288	(27,490)	28,046,942	Other assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	61,868	-	35,798	-	97,666	Accrued interest income
Jumlah aset yang dialokasikan	44,159,978	15,664,761	24,372,154	-	11,583,439	(27,490)	95,752,842	Total allocated assets
Aset yang tidak dialokasikan**							5,588,382	Unallocated assets**
Jumlah aset							101,341,224	Total assets

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

*) After restatement (Note 48)

**) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset tak berwujud, liabilitas lainnya dan akrual

**) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accruals

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

40. OPERATING SEGMENT (continued)

	31 Desember/December 2018*							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasury/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination		Konsolidasi/ Consolidation
Liabilitas							Liabilities	
Simpanan nasabah	-	419,368	63,046,659	-	1,619,254	-	65,085,281	Customer deposit
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	-	-	-	17,035	-	17,035	Undistributed revenue sharing
Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	-	-	-	-	-	-	-	Accrued interest/profit sharing
Liabilitas lain-lain	-	-	9,683,182	-	-	(28,581)	9,654,601	Others liabilities
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	133,984	-	-	-	133,984	Accrued interest expenses
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	-	419,368	72,863,825	-	1,636,289	(28,581)	74,890,901	Total allocated liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan**							1,671,133	Unallocated liabilities**
Jumlah liabilitas							76,562,034	Total liabilities
Dana syirkah								Temporary syirkah
temporer	-	-	-	-	5,992,860	-	5,992,860	fund

*) Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

*) After restatement (Note 48)

**) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset tak berwujud, liabilitas lainnya dan akrual

**) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accrual

41. LABA BERSIH PER SAHAM

41. EARNINGS PER SHARE

a. Laba per saham dasar

a. Basic earnings per share

	31 Desember/December	
	2019	2018*
Jumlah laba per saham dasar yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank	327	320

Total basic earnings per share attributable to the ordinary equity holders of the Bank

b. Laba per saham dilusian

b. Diluted earnings per share

	31 Desember/December	
	2019	2018*
Jumlah laba per saham dilusian yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank	324	312

Total diluted earnings per share attributable to the ordinary equity holders of the Bank

c. Laba yang digunakan dalam perhitungan laba per saham

c. Earnings used in calculating earnings per share

	31 Desember/December	
	2019	2018*
<u>Laba per saham dasar</u>		
Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar	2,572,528	1,838,471
<u>Laba per saham dilusian</u>		
Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian	2,572,528	1,838,471

Basic earnings per share

Profit attributable to the ordinary equity holders of the Bank used in calculating basic earnings per share

Diluted earnings per share

Profit attributable to the ordinary equity holders of the Bank used in calculating diluted earnings per share

d. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut

d. Weighted average number of shares used as the denominator

	31 Desember/December	
	2019	2018
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar	7,858,627,916	5,750,209,622
Penyesuaian untuk perhitungan laba per saham dilusian:		
- Opsi saham (Catatan 29)	90,910,000	146,523,500
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dilusian	7,949,537,916	5,896,733,122

Weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating basic earnings per share

Adjustments for calculation of diluted earnings per share: Share options (Note 29) -

Weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating diluted earnings per share

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

*After restatement (Note 48)

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**42. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN**

a. PT Taspen (Persero)

Sejak tahun 2007, Bank bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) dimana Bank menjadi salah satu mitra untuk penanganan pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah.

b. PT Pos Indonesia (Persero)

Sejak bulan Maret 2012 Bank bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dimana PT Pos Indonesia (Persero) membantu Bank dalam melakukan pemotongan uang pensiun para pegawai Pemerintah untuk angsuran kredit pensiun dan memasarkan produk kredit pensiun Bank.

Perjanjian kerjasama Bank dengan PT Pos Indonesia (Persero) diperbaharui secara berkala dan berdasarkan perjanjian terakhir kerjasama ini akan terus berlangsung sampai dengan bulan Juli 2020. Pada tahun 2019 dan 2018, Bank membayarkan komisi kepada PT Pos Indonesia (Persero) masing-masing sebesar Rp 97.613 dan Rp 64.460 terkait dengan kerjasama ini.

c. Perjanjian pembiayaan bersama

PT Home Credit Indonesia

Pada bulan Juni 2014, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Berdasarkan perjanjian kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk debitur adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak HCI.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank menyediakan fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp 4.200.000.

PT Bank Bukopin Tbk

Pada bulan Juni 2018, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT Bank Bukopin Tbk ("Bukopin") untuk kredit pensiunan. Berdasarkan perjanjian kerjasama ini, porsi pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank dan Bukopin masing-masing adalah 90% dan 10% dari setiap kredit. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 2.000.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 1 (satu) tahun, dihitung mulai tanggal 7 Juni 2018 hingga 7 Juni 2019 yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama Bank dan Bukopin.

**42. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND
COMMITMENTS**

a. PT Taspen (Persero)

Since 2007, the Bank has been cooperating with PT Taspen (Persero) in which the Bank become one of the partners for handling the payments of pension to retired government employees.

b. PT Pos Indonesia (Persero)

Since March 2012 the Bank been cooperating with PT Pos Indonesia (Persero) in which PT Pos Indonesia (Persero) assists the Bank in deducting the pension benefits of retired government employees for pension loan installments and marketing the Bank's pension loan products.

The Bank's cooperation agreement with PT Pos Indonesia (Persero) is renewed regularly and based on the latest agreement, the cooperation will be continuing until July 2020. In 2019 and 2018, the Bank paid commissions to PT Pos Indonesia (Persero) amounted to Rp 97,613 and Rp 64,460, respectively, in regards for this cooperation.

c. Joint financing agreements

PT Home Credit Indonesia

In June 2014, the Bank entered into a joint financing arrangement (without recourse) with PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Based on the agreement, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and a minimum of 10% from HCI.

As of 31 December 2019 and 2018, the Bank provided joint financing facilities of Rp 4,200,000.

PT Bank Bukopin Tbk

In June 2018, the Bank entered into a joint financing arrangement (without recourse) with PT Bank Bukopin Tbk ("Bukopin") for pension loans. Based on the agreement, the amount of funds to be financed by Bank and Bukopin are 90% and 10% of each loan, respectively. The maximum joint financing facility is amounted to Rp 2,000,000. The term of the agreement is for 1 (one) year, from 7 June 2018 to 7 June 2019, with possible extension based on the Bank and Bukopin's mutual agreement.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**42. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**42. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND
COMMITMENTS** (continued)

c. Perjanjian pembiayaan bersama (lanjutan)

c. Joint financing agreements (continued)

PT Finansia Multi Finance

PT Finansia Multi Finance

Pada bulan Desember 2018, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT Finansia Multi Finance ("Finansia"). Dalam kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak Finansia. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 500.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal 13 Desember 2018 hingga 13 Desember 2021.

In December 2018, the Bank entered into a joint financing arrangement (without recourse) with PT Finansia Multi Finance ("Finansia"). Based on the agreement, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and minimum of 10% from Finansia. The maximum joint financing facility is amounted to Rp 500,000. The term of the agreement is for 3 (three) years, from 13 December 2018 to 13 December 2021.

**d. Perjanjian Kerjasama Jasa Pemasaran dan
Administrasi Produk BTPN**

**d. Marketing and Administration Services for
BTPN Product agreement**

PT Oto Multiartha

PT Oto Multiartha

Pada bulan Agustus 2015, Bank melakukan kerjasama dengan PT Oto Multiartha ("OMA"). Dalam kerjasama ini, OMA akan membantu memasarkan dan mengadministrasi produk pinjaman Bank. Seluruh sumber dana pinjaman berasal dari Bank.

In August 2015, the Bank entered into agreement with PT Oto Multiartha ("OMA"). Based on the agreement, OMA would assist to market and administer the Bank's loan product. All source of funds for the loans will come from the Bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, imbalan yang dibayarkan kepada OMA masing-masing sebesar Rp 20.617 dan Rp 10.466.

For years ended 31 December 2019 and 2018, the fees that were paid to OMA were Rp 20,617 and Rp 10,466, respectively.

PT Digital Tunai Kita

PT Digital Tunai Kita

Pada tanggal 9 Januari 2018, Bank melakukan kerjasama Jasa Pemasaran dan Administrasi Produk BTPN dengan PT Digital Tunai Kita ("TunaiKita"). Dalam Perjanjian Kerjasama ini, pembiayaan yang akan diberikan untuk debitur adalah 100% dari Bank. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal 9 Januari 2018 hingga 9 Januari 2021. Pada bulan November 2019, Bank telah sepakat dengan TunaiKita untuk mengakhiri kerjasama ini paling lambat sejak tanggal 1 Januari 2020.

On 9 January 2018, the Bank entered into a Marketing and Administration Services for BTPN Product agreement with PT Digital Tunai Kita ("TunaiKita"). In the agreement, the financing to debtors is 100% from the Bank. The term of the agreement is for 3 (three) years, from 9 January 2018 to 9 January 2021. In November 2019, the Bank agreed with TunaiKita to terminate the cooperation at the latest by 1 January 2020.

Dalam perjanjian ini, Bank menunjuk TunaiKita untuk bertindak sebagai agen pemasaran dan penyelenggara atas produk Bank. Bank mendapatkan garansi dari perusahaan induk TunaiKita untuk biaya kredit dari pinjaman yang didistribusikan melalui KPI.

Under this agreement, the Bank appointed TunaiKita to act as marketing and administration agent for the Bank's product. The bank received a guarantee from TunaiKita's parent company for customer of credit related to loan distributed through KPI.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

42. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND COMMITMENTS (continued)

d. Perjanjian Kerjasama Jasa Pemasaran dan Administrasi Produk BTPN (lanjutan)

d. Marketing and Administration Services for BTPN Product agreement (continued)

PT Kredit Pintar Indonesia

PT Kredit Pintar Indonesia

Pada tanggal 21 Mei 2018, Bank melakukan kerjasama Jasa Pemasaran dan Administrasi Produk BTPN dengan PT Kredit Pintar Indonesia ("KPI"). Dalam Perjanjian ini, pembiayaan yang akan diberikan untuk debitur adalah 100% dari Bank. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 hingga 21 Mei 2021.

On 21 May 2018, the Bank entered into a Marketing and Administration Services for BTPN Product agreement with PT Kredit Pintar Indonesia ("KPI"). In the agreement, the financing to debtors is 100% from the Bank. The term of the agreement is for 3 (three) years, from 21 May 2018 to 21 May 2021.

Dalam perjanjian ini, Bank menunjuk KPI untuk bertindak sebagai agen pemasaran dan penyelenggara atas produk Bank. Bank mendapatkan garansi dari perusahaan induk KPI untuk biaya kredit dari pinjaman yang didistribusikan melalui KPI.

Under this agreement, the Bank appointed KPI to act as marketing and administration agent for the Bank's product. The Bank received a guarantee from KPI's parent company for cost of credit related to loan distributed through KPI.

e. Perjanjian Kerjasama bancassurance

e. Bancassurance Agreement

Pada bulan Agustus 2014, Bank melakukan kerjasama *bancassurance* dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). Bank akan mendistribusikan produk-produk asuransi jiwa dari Allianz kepada nasabah Bank melalui seluruh jalur distribusi Bank. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun.

In August 2014, the Bank entered into a bancassurance agreement with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). The Bank will distribute life insurance products of Allianz to its customers through the Bank's distribution channels. The agreement is effective for 10 years.

f. Komitmen signifikan lainnya

f. Other significant commitment

Bank menyewa kantor dengan perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Masa sewa antara lima dan sebelas tahun dengan mayoritas perjanjian jasa dapat diperbarui pada akhir periode dengan harga pasar. Bank diharuskan memberitahukan enam bulan lebih awal apabila berniat mengakhiri perjanjian sewa. Beban sewa yang dibebankan pada laba rugi selama tahun berjalan diungkapkan dalam Catatan 35.

The Bank leases offices under non-cancellable operating lease agreements. The lease terms are between five and eleven years, and the majority of lease agreements are renewable at the end of the lease period at the market rate. The Bank is required to give a six-month notice for the termination of these agreements. The rental expense charged to the profit or loss during the year was disclosed in Note 35.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Bank:

The following are counterparties of the Bank's lease commitments:

<u>Pihak dalam perjanjian/ Counterparties</u>	<u>Item yang disewa/ Leased items</u>	<u>Periode perjanjian/ Period of agreement</u>
PT Wiratara Prima	Ruang Kantor/Office Space	17 Februari/February 2015 – 9 Oktober/October 2020
PT Bumi Serpong Damai	Ruang Kantor/Office Space	1 Februari/February 2014 – 1 September/September 2020
PT Bahana Semesta Citra Nusantara	Ruang Kantor/Office Space	5 Oktober/October 2015 – 31 Desember/December 2026

Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable operating leases were as follows:

	<u>31 Desember/December</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Hingga 1 tahun	121,876	27,901	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 5 tahun	148,770	193,181	More than 1 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	396,986	398,426	More than 5 years
	<u>667,632</u>	<u>619,508</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kerangka manajemen risiko

Perseroan tetap mengutamakan penerapan manajemen risiko baik pada Bank dan Entitas Anak setelah terlaksananya proses penggabungan usaha antara SMBCI dan BTPN. Penggabungan usaha merubah komposisi portofolio Bank dimana setelah penggabungan usaha, Bank memiliki segmen yang lebih lengkap mulai dari pinjaman dengan plafond kecil di BTPN Syariah, Pensiun, MUR (mikro), SME, Komersial sampai dengan Korporasi. Penggabungan ini juga menambah jenis produk yang dapat ditawarkan kepada nasabah antara lain produk *Trade Finance*. Pada konsentrasi portofolio, segmen Korporasi menjadi portofolio terbesar di BTPN yaitu di kisaran 53% pada posisi Desember 2019 diikuti oleh Pensiun di kisaran 24%.

Pengembangan manajemen risiko keuangan di Bank dan Entitas Anak berpedoman pada peraturan OJK yang mengatur penerapan manajemen risiko bagi bank umum serta dokumentasi *Basel Accord II* yang diterbitkan oleh *Basel Committee of Banking Supervision*.

Kerangka manajemen risiko Bank dan Entitas Anak diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank dan Entitas Anak melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan perkembangan organisasi, strategi dan manajemen sistem informasi.

Penerapan manajemen risiko mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Pengendalian internal yang menyeluruh

Organisasi manajemen risiko Bank dan Entitas Anak melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank dan Entitas Anak telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris dan Komite Manajemen Risiko di tingkat direktur yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, sebagai unit kontrol yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank dan Entitas Anak.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Risk management framework

After merger process of SMBCI and BTPN was completed, the Company still focuses on supporting the risk management implementation for the Bank and Subsidiary. The merger changes the composition of the Bank's portfolio where the Bank after the merger has more complete segment from the loans with small limit at BTPN Syariah (the Subsidiary's), Pension, MUR (micro), SME, Commercial to Corporate segment. This merger also adds the types of products that can be offered to the customers, including Trade Finance products. In term of portfolio concentration, Corporate portfolio is the largest portfolio at BTPN at around 53% in the position of December 2019 followed by Pension at around 24%.

Financial risk management development in the Bank and Subsidiary is guided by OJK regulations which govern risk management implementation by commercial banks operating in Indonesia, as well as Basel Accord II documentation issued by the Basel Committee of Banking Supervision.

The Bank and Subsidiary's risk management framework is implemented through policies, procedures, transactions and authorisation limits, risk tolerance as well as risk management tools. The Bank and Subsidiary carry out continuous risk management development in line with the increasing business complexity and the development organisation, strategies and management information systems.

Implementation of risk management covers:

- *Active supervision from Board of Commissioners and Board of Directors*
- *Sufficient policies, procedures and limit sets*
- *Sufficient process of identification, measurement, risk oversight and control and risk management information*
- *Overall internal control system*

The risk management organisation of the Bank and Subsidiary involves the oversight from the Board of Commissioners and Board of Directors. The Bank and Subsidiary has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level and Risk Management Committee at the director level, which constitutes a crucial element in risk control, as a control unit to monitor all of the risks in the Bank and Subsidiary operating activities.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Sejalan dengan ketentuan OJK terkait dengan manajemen risiko terintegrasi, setelah proses penggabungan, Bank ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan SMBC dengan Entitas Anak sebagai anggota dalam melakukan penerapan manajemen risiko terintegrasi. Dengan menjadi Entitas Utama, maka Direktur Manajemen Risiko Bank menjadi Pimpinan dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya ini, Komite Audit dibantu oleh Divisi Internal Audit.

Risiko yang timbul dari instrumen keuangan Bank dan Entitas Anak adalah risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit dan pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Entitas Anak telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada Entitas Anak. Manajemen risiko pada Entitas Anak secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada struktur organisasi Entitas Anak juga dibentuk Komite Audit yang memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara berkala, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Entitas Anak.

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Anak secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap pengendalian internal melalui laporan-laporan untuk digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan mengembangkan kebijakan yang tepat pada Entitas Anak.

Bank selaku Entitas Induk telah menerapkan manajemen risiko konsolidasian sesuai ketentuan OJK. Penerapan manajemen risiko konsolidasian antara lain mencakup laporan perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) konsolidasian, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) konsolidasian, laporan Profil Risiko konsolidasian, Tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating*) konsolidasian dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) konsolidasian.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)

In line with the prevailing OJK regulation regarding integrated risk management, after the merger, Bank is currently appointed by majority shareholders as the Primary Entity of SMBC Financial Conglomerate and Subsidiary as a member in conducting integrated risk management. As the Primary Entity, Bank's Risk Management Director became the leader of the Integrated Risk Management Committee.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with risk management policies and procedures and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. In performing the role, the Audit Committee is assisted by Internal Audit Division.

The risks arising from the Bank and Subsidiary's financial instruments are financial risks, which include credit and financing risk, liquidity risk, market risk and operational risk.

Subsidiary has implemented risk management, among others by establishing a risk unit in Subsidiary. Risk management in Subsidiary is operating separately from the business unit and conducting its function independently. To support the implementation of risk management, the Subsidiary has established Audit Committee in their organisational structure, which has responsibility to monitor the compliance of risk management policies and procedures on a regular basis, and to analyse the adequacy of risk management framework which related to the risks faced by the Subsidiary.

In addition, the Subsidiary's Board of Commissioners and Board of Directors actively monitor and evaluate the internal controls, through the reports, as a basis in formulating and developing appropriate policies for the Subsidiary.

As the Parent Entity, the Bank has implemented consolidated risk management in accordance with OJK regulation. The Implementation of consolidated risk management among others include report of consolidated minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), Legal Lending Limit (LLL), risk profile, Risk-Based Bank Rating and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Bank dan Entitas Anak gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Bank dan Entitas Anak. Risiko kredit terutama berasal dari pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

Bank juga terekspos risiko kredit yang muncul dari investasi pada surat berharga utang (efek-efek).

(i) Manajemen risiko kredit

Bank melakukan harmonisasi kebijakan kredit setelah penggabungan dan kaji ulang atas kebijakan kredit secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Batas pemberian kredit ditetapkan dan ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Penelaahan kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan kredit dilakukan melalui komite kredit.

Bank dan Entitas Anak mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pinjaman yang diberikan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit dan pembiayaan secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan akan terus dikembangkan serta telah mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan yang tepat waktu untuk mengatasi kemungkinan penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Agunan

Bank menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit, Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas pinjaman yang diberikan antara lain adalah:

- Kas/Deposito;
- Tanah dan/atau Bangunan;
- Kendaraan; dan
- Mesin
- Persediaan
- Piutang

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss, should any of the Bank and Subsidiary customers, clients or counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Bank and Subsidiary. Credit risk arise mainly from loans and sharia financing/receivables.

The Bank is also exposed to credit risks arising from investment in debt securities (marketable securities).

(i) Credit risk management

The Bank conducts credit policies harmonization after merger and reviews the credit policies periodically, especially if there are any changes in market conditions, changes in regulations and/or business approach.

Lending limits are set and reviewed in the light of changing market and economic conditions. Periodic credit reviews and assessments of probability of default are also conducted. Credit approval is processed by credit committee.

The Bank and Subsidiary actively manage and monitor the loan portfolio quality by improving credit and financing risk management policies effectively, improving procedures and systems development.

Management Information Systems (MIS) are in place and continuously developed and have covered sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing timely measurement to be taken to counteract any possible deterioration in credit quality or to minimise credit losses.

Collaterals

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral to mitigate credit risk. The collateral types for loans are as follows:

- Cash/Time deposits;
- Land and/or Building;
- Vehicles; and
- Machine
- Inventory
- Account receivables

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Untuk kredit korporasi, Bank mendapatkan jaminan dalam bentuk *standby letters of credit* dari bank afiliasi untuk membatasi risiko kredit bank. Bank juga menyediakan bank garansi kepada nasabahnya yang mengharuskan Bank melakukan pembayaran untuk kepentingan mereka. Hal ini menyebabkan Bank menghadapi risiko yang sama dengan kredit yang diberikan dan risiko tersebut juga dimitigasi dengan prosedur dan kebijakan yang sama.

Selain agunan yang disebutkan di atas, agunan yang diterima untuk kredit korporasi terutama terdiri dari jaminan yang diterima dari perusahaan induk debitur, penjaminan kredit korporasi dan entitas publik lainnya, lembaga keuangan dan perusahaan lain serta jaminan berupa efek-efek.

Porsi kredit yang diberikan yang mendapatkan manfaat dari agunan, baik sebagian maupun penuh, sebagai mitigasi dari risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 41,02% dan 19,25% dari jumlah kredit yang diberikan.

- (ii) Eksposur maksimum risiko kredit (tanpa memperhitungkan agunan dan perlindungan kredit lainnya)

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi dan *irrevocable L/C* yang diterbitkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai yang harus dibayarkan oleh Bank jika kewajiban atas bank garansi dan *irrevocable L/C* yang diterbitkan terjadi. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah komitmen fasilitas kredit (*committed*) yang belum digunakan oleh nasabah.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

For corporate loans, the Bank received collateral in the form of *standby letters of credit* from controlling banks to restrict Bank's credit risk. The Bank also provides bank guarantee to its customers which requires the Bank to make payments for their interests. This causes the Bank to face the same risks as the loans granted and these risks are also mitigated by the same procedures and policies.

In addition to the collateral mentioned above, collaterals for corporate loans mainly consists of guarantees received from the parent company of the debtor, corporate credit guarantees and other public entities, financial institutions and other companies as well as collateral in the form of securities.

The portion of loans that benefit from such partial or full collateralisation as credit risk mitigation as of 31 December 2019 and 2018 were 41.02% and 19.25% of total outstanding loans, respectively.

- (ii) Maximum exposure to credit risk (without taking into account collateral held or other credit enhancements)

For financial assets recognised in the consolidated statement of financial position, the maximum exposure to credit risk is equal to its carrying value. For bank guarantees and *irrevocable L/C* issued, maximum exposure to credit risk is the value that must be paid by the Bank if the liabilities on the bank guarantee and *irrevocable L/C* issued has been occurred. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is equal to the amount of committed credit facilities that have not been used by customers.

The following table presents the Company's maximum exposure to credit risk of financial instruments in the statement of financial position and off-balance sheet accounts, without taking into account any collateral held or other credit enhancements:

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(ii) Eksposur maksimum risiko kredit (tanpa memperhitungkan angsuran dan perlindungan kredit lainnya) (lanjutan)

(ii) *Maximum exposure to credit risk (without taking into account collateral held or other credit enhancements) (continued)*

	31 Desember/December		
	2019	2018	
Giro pada Bank Indonesia	8,987,079	5,248,644	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank-bank lain	1,056,904	841,464	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,914,104	11,749,903	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Efek-efek	10,702,851	6,866,506	<i>Marketable securities</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1,599,955	<i>Securities purchased under resale agreements</i>
Tagihan derivatif	840,372	-	<i>Derivative receivables</i>
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih			<i>Loans and sharia financing/receivables - net</i>
- Korporasi	75,516,713	-	<i>Corporate -</i>
- Pensiun	33,906,446	36,144,492	<i>Pension -</i>
- UMKM	14,993,462	15,582,407	<i>MSME -</i>
- Syariah	8,707,455	7,061,213	<i>Sharia -</i>
- Lainnya	7,168,908	8,214,603	<i>Others -</i>
- Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	827,359	605,519	<i>Accrued interest/margin income -</i>
Tagihan akseptasi	1,692,391	-	<i>Acceptance receivables</i>
Penyertaan saham	22,522	22	<i>Investment in shares</i>
Aset lain-lain	177,188	47,041	<i>Other assets</i>
	<u>173,513,754</u>	<u>93,961,769</u>	
<u>Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:</u>			<u>Commitments and contingencies with credit risk:</u>
Garansi yang diterbitkan	8,924,578	107,719	<i>Guarantees issued</i>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>committed</i>	8,433,080	-	<i>Unused credit facilities to customers - committed</i>
<i>Letters of credit</i> yang tidak dapat dibatalkan	925,174	-	<i>Irrevocable letters of credit</i>

(iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

(iii) *Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure*

Bank dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi - secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis.

The Bank and Subsidiary manage and control concentrations of credit risk wherever they are identified - in particular, to individual and group counterparties, and to industries and geographical sectors.

Bank dan Entitas Anak menentukan tingkat risiko kredit dan pembiayaan yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau kelompok debitur.

The Bank and Subsidiary structure the levels of credit and financing risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one or group borrowers.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor geografis adalah sebagai berikut:

Credit risk concentration by geographical sectors was as follows:

	31 Desember/December 2019					
	Jawa*	Sumatera	Bali dan/and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	8,987,079	-	-	-	8,987,079	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	1,055,377	1,214	100	213	1,056,904	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,914,104	-	-	-	8,914,104	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	10,702,851	-	-	-	10,702,851	Marketable securities
Tagihan derivatif	840,372	-	-	-	840,372	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	116,335,218	11,981,511	2,947,684	9,855,930	141,120,343	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi	1,692,391	-	-	-	1,692,391	Acceptance receivables
Penyertaan saham	22,500	14	-	8	22,522	Investment in shares
Aset lain-lain	165,540	3,566	1,833	6,249	177,188	Other assets
	<u>148,715,432</u>	<u>11,986,305</u>	<u>2,949,617</u>	<u>9,862,400</u>	<u>173,513,754</u>	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:						Commitments and contingencies with credit risk:
Garansi yang diterbitkan	8,924,578	-	-	-	8,924,578	Guarantees issued
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - committed Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	8,433,080	-	-	-	8,433,080	Unused credit facilities to customers - committed
	925,174	-	-	-	925,174	Irrevocable letters of credit

*) Termasuk Kantor Pusat

*) Including Head Office.

	31 Desember/December 2018					
	Jawa*	Sumatera	Bali dan/and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	5,248,644	-	-	-	5,248,644	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	838,881	988	1,386	209	841,464	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	11,749,903	-	-	-	11,749,903	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	6,866,506	-	-	-	6,866,506	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,599,955	-	-	-	1,599,955	Securities purchased under resale agreements
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	41,673,365	12,354,178	3,033,538	10,547,153	67,608,234	Loans and sharia financing/receivables - net
Penyertaan saham	35,279	3,892	1,663	6,207	47,041	Investment in shares
Aset lain-lain	68,012,533	12,359,072	3,036,587	10,553,577	93,961,769	Other assets
	<u>68,012,533</u>	<u>12,359,072</u>	<u>3,036,587</u>	<u>10,553,577</u>	<u>93,961,769</u>	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:						Commitments and contingencies with credit risk:
Garansi yang diterbitkan	107,459	-	-	260	107,719	Guarantee issued

*) Termasuk Kantor Pusat

*) Including Head Office.

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri adalah sebagai berikut:

Credit risk concentration by industry sectors was as follows:

	31 Desember/December 2019							
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	8,987,079	-	-	-	-	-	8,987,079	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	-	1,056,904	-	-	-	-	1,056,904	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,664,070	250,034	-	-	-	-	8,914,104	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	9,334,690	1,368,161	-	-	-	-	10,702,851	Marketable securities
Tagihan derivatif	-	840,372	-	-	-	-	840,372	Derivative receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	-	18,893,600	21,376,687	21,160,585	332,010	79,357,461	141,120,343	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi	-	-	1,692,391	-	-	-	1,692,391	Acceptance receivables
Penyertaan saham	-	22,522	-	-	-	-	22,522	Investment in shares
Aset lain-lain	-	16,693	-	-	-	160,495	177,188	Other assets
	<u>26,985,839</u>	<u>22,448,286</u>	<u>23,069,078</u>	<u>21,160,585</u>	<u>332,010</u>	<u>79,517,956</u>	<u>173,513,754</u>	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:								Commitments and contingencies with credit risk:
Garansi yang diterbitkan	-	-	8,924,578	-	-	-	8,924,578	Guarantees issued
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - committed Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	-	2,069,413	709,869	1,648,598	905,056	3,090,144	8,433,080	Unused credit facilities to customers - committed
	-	-	925,174	-	-	-	925,174	Irrevocable letters of credit

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

31 Desember/December 2018

	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	5,248,644	-	-	-	-	-	5,248,644	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	-	841,464	-	-	-	-	841,464	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	11,124,176	625,727	-	-	-	-	11,749,903	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	6,594,785	271,721	-	-	-	-	6,866,506	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,599,955	-	-	-	-	-	1,599,955	Securities purchased under resale agreements
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	-	3,073,432	14,860,220	3,002,368	209,852	46,462,362	67,608,234	Loans and sharia financing/receivables - net
Penyertaan saham	-	22	-	-	-	-	22	Investment in shares
Aset lain-lain	-	18,927	-	-	-	28,114	47,041	Other assets
	<u>24,567,560</u>	<u>4,831,293</u>	<u>14,860,220</u>	<u>3,002,368</u>	<u>209,852</u>	<u>46,490,476</u>	<u>93,961,769</u>	
<u>Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:</u>								<u>Commitments and contingencies with credit risk:</u>
Garansi yang diberikan	-	-	107,719	-	-	-	107,719	Guarantee provided

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan jenis kredit atau pembiayaan, mata uang, sektor ekonomi dan hubungan dengan debitur diungkapkan pada Catatan 12.

The credit risk concentration by type of credit or financing, currency, economic sector and relationship with debtors is disclosed in Note 12.

(iv) Kualitas kredit aset keuangan

(iv) Credit quality of financial assets

Proses penentuan kualitas kredit Perseroan mengacu pada kolektibilitas sesuai peraturan OJK.

Process of determining the Company's credit quality refers to collectibility in accordance with the OJK regulations.

Untuk segmen korporasi, kualitas kredit dikelola oleh Bank dengan menggunakan peringkat kredit internal. Bank menentukan peringkat suatu debitur dengan terlebih dahulu menetapkan peringkat keuangan (financial grade) dengan menggunakan model peringkat dari aspek keuangan dan data yang diperoleh dari laporan keuangan debitur, termasuk kekayaan bersih dan arus kas. Peringkat keuangan ini kemudian disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi dari posisi keuangan debitur dan faktor kualitatif untuk menentukan peringkat debitur.

For corporate segment, the quality of credit is managed by the Bank using internal credit ratings. The Bank determines the rating of a debtor by first determining the financial grade using a rating model from financial aspects and data obtained from the debtor's financial statements, including net worth and cash flows. This financial grade is then adjusted by considering the conditions of the debtor's financial position and qualitative factors to determine the grade of the debtor.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Faktor kualitatif terutama mencakup arus kas masa depan yang diharapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti informasi kerugian historis, kesesuaian rencana bisnis debitur atau rencana perbaikan operasional, status perkembangan rencana bisnis dan dukungan menyeluruh dari lembaga keuangan.

Selain prosedur peringkat di atas, dalam hal debitur dianggap sebagai anak perusahaan yang dikonsolidasi oleh induk perusahaan di luar negeri, peringkat debitur bisa ditentukan dengan mengadopsi peringkat obligor berdasarkan kualitas kredit induk perusahaan atau peringkat kredit yang diberikan induk perusahaan Bank terhadap induk perusahaan tersebut. Peringkat debitur dan peringkat fasilitas ditelaah paling sedikit setahun sekali, atau bila diperlukan, ketika ada perubahan kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2019			Jumlah/ Total
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	
Giro pada Bank Indonesia	8,987,079	-	-	8,987,079
Giro pada bank-bank lain	1,056,904	-	-	1,056,904
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,914,104	-	-	8,914,104
Efek-efek	10,702,851	-	-	10,702,851
Tagihan derivatif	840,372	-	-	840,372
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih:				
- Pihak ketiga				
Korporasi	73,650,198	-	40,900	73,691,098
Non-korporasi	62,962,709	1,349,981	971,747	65,284,437
- Pihak berelasi				
Korporasi	2,136,091	-	-	2,136,091
Non-korporasi	8,717	-	-	8,717
Tagihan akseptasi	1,688,680	3,711	-	1,692,391
Penyertaan saham	22,522	-	-	22,522
Aset lain-lain	177,188	-	-	177,188
	<u>171,147,415</u>	<u>1,353,692</u>	<u>1,012,647</u>	<u>173,513,754</u>

Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Derivative receivables

Loans and sharia financing/ receivables - net:
Third parties - Corporates
Non-corporates
Related parties - Corporates
Non-corporates
Acceptance receivables
Investment in shares
Other assets

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

Qualitative factors mainly cover expected future cash flows with considering some factors such as historical loss information, conformity of the debtor's business plan or operational improvement plan, status of developments in the business plan and overall support from financial institutions.

In addition of grading procedure above, in the event that the debtor is considered as a subsidiary that is consolidated by a parent company abroad, the debtor's grading can be determined by adopting an obligor grading based on the quality of the parent loan or credit grading provided by the Bank's parent company. Debtor grading and facility grading are reviewed at least once a year, or if needed, when there are changes in credit.

As of 31 December 2019 and 2018, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows:

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

(iv) *Credit quality of financial assets (continued)*

	31 Desember/December 2018				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/Past due and impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/Impaired	Jumlah/Total	
Giro pada Bank Indonesia	5,248,644	-	-	5,248,644	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank-bank lain	841,464	-	-	841,464	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	11,749,903	-	-	11,749,903	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Efek-efek	6,866,506	-	-	6,866,506	<i>Marketable securities</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,599,955	-	-	1,599,955	<i>Securities purchased under resale agreements</i>
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih:					<i>Loans and sharia financing/ receivables - net:</i>
- Pihak ketiga	66,011,133	1,234,050	344,412	67,589,595	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	18,639	-	-	18,639	<i>Related parties -</i>
Penyertaan saham	22	-	-	22	<i>Investment in shares</i>
Aset lain-lain	47,041	-	-	47,041	<i>Other assets</i>
	<u>92,383,307</u>	<u>1,234,050</u>	<u>344,412</u>	<u>93,961,769</u>	

Kualitas kredit dengan kategori "mengalami penurunan nilai" adalah sebagai berikut:

Credit quality in "impaired" category is as follows:

- Pinjaman/pembiayaan non-korporasi

- *Non-corporate loans/financing*

Kategori pinjaman/pembiayaan yang mengalami penurunan nilai adalah kredit yang minimum memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

Loans/financing that are categorised as impaired are loans that satisfy at least one of the following criteria:

- a. Menunggak di atas 90 hari
- b. Kredit yang direstrukturisasi dengan kolektibilitas OJK 3, 4 dan 5.

- a. *Days past due over 90 days*
- b. *Restructured loans with OJK grading 3, 4 and 5.*

- Pinjaman korporasi

- *Corporate loans*

Kategori pinjaman yang mengalami penurunan nilai adalah kredit yang diberikan kepada debitur yang peringkat internal pinjamannya adalah sama dengan 7R atau lebih rendah.

Loans that are categorised as impaired are loans from debtors with internal grading at 7R or lower.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

(iv) *Credit quality of financial assets (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rincian kualitas kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan yang "belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan ketentuan internal Bank adalah sebagai berikut:

The detail of credit quality of loans and sharia financing/receivables that were "neither past due nor impaired" as of 31 December 2019 and 2018 based on the Bank's internal policy was as follows:

		31 Desember/December 2019			
		Lancar/ Current	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience	Jumlah/ Total	
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan:					<i>Loans and sharia financing/receivables:</i>
Pensiunan		24,167,980	9,081,820	33,249,800	<i>Pension</i>
UMKM		11,736,023	2,404,909	14,140,932	<i>MSME</i>
Korporasi		75,499,669	-	75,499,669	<i>Corporate</i>
Syariah		8,713,045	36,224	8,749,269	<i>Sharia</i>
Lainnya		3,470,353	3,281,779	6,752,132	<i>Others</i>
		<u>123,587,070</u>	<u>14,804,732</u>	<u>138,391,802</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		661,355	112,406	773,761	<i>Accrued interest/margin income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai		(321,561)	(86,287)	(407,848)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		<u>123,926,864</u>	<u>14,830,851</u>	<u>138,757,715</u>	
		31 Desember/December 2018			
		Lancar/ Current	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience	Jumlah/ Total	
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan:					<i>Loans and sharia financing/receivables:</i>
Pensiunan		28,666,212	7,027,344	35,693,556	<i>Pension</i>
UMKM		11,779,354	3,287,851	15,067,205	<i>MSME</i>
Syariah		7,023,762	36,858	7,060,620	<i>Sharia</i>
Lainnya		5,287,341	2,730,031	8,017,372	<i>Others</i>
		<u>52,756,669</u>	<u>13,082,084</u>	<u>65,838,753</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		444,761	105,901	550,662	<i>Accrued interest/margin income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai		(249,254)	(110,389)	(359,643)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		<u>52,952,176</u>	<u>13,077,596</u>	<u>66,029,772</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit dengan kategori “belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai” adalah sebagai berikut:

- Lancar

Pinjaman dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar bunga dan pokok pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah oleh Bank dan Entitas Anak, yang terdiri dari:

- o Pinjaman non-korporasi
Pinjaman dengan kondisi kolektibilitas “lancar” pada tanggal pelaporan.
- o Pinjaman korporasi
Pinjaman berdasarkan peringkat internal sebagai berikut:
 - Debitur *Grading* 1-3 memiliki kemampuan membayar kewajiban yang tinggi,
 - Debitur *Grading* 4-6 tidak mengalami kesulitan pembayaran kewajiban, namun terdapat faktor bisnis atau ekonomi yang dapat menyebabkan masalah dalam pembayaran kewajiban,
 - Debitur *Grading* 7A dan 7B memerlukan pemantauan khusus karena bisnis yang lesu/tidak stabil, atau masalah keuangan.

- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran

Pinjaman dalam kategori ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar bunga dan pokoknya walaupun pernah mengalami keterlambatan pembayaran pada saat jatuh tempo.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iv) *Credit quality of financial assets (continued)*

Credit quality in “past due and impaired” category is as follows:

- *Current*

Loans in this category are considered to have very strong capacity to pay interest and principal of loans, and sharia financing by the Bank and Subsidiary, which consists of:

- o *Non-corporate loans*
Loans with “current” grading at the reporting date.
- o *Corporate loans*
Loans categorised by internal grading as follows:
 - *Grading 1-3 debtors have very strong ability to pay their obligations,*
 - *Grading 4-6 debtors do not experience difficulties to pay their obligations; however, there are business or economy factors that may cause difficulties to pay the obligations,*
 - *Grading 7A and 7B debtors need special observation as they experience sluggish/unstable business, or financial issues.*

- *Has an overdue experience*

Loans in this category are considered to have adequate capacity to pay interest and principal although they have overdue experience in making payments when due.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman korporasi yang “belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai” berdasarkan umur tagihan berdasarkan peringkat internal antara lain: grading 1-3 sebesar Rp 64.500.956, grading 4-6 sebesar Rp 10.976.758 dan grading 7A dan 7B sebesar Rp 21.955.

Pada tanggal 31 Desember 2018 tidak terdapat pinjaman korporasi.

Rincian kualitas kredit yang “telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai” berdasarkan umur tagihan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2019, total corporate loans that were “neither past due nor impaired” are as follows: grading 1-3 amounted to Rp 64,500,956 grading 4-6 amounted to Rp 10,976,758, and grading 7A and 7B amounted to Rp 21,955.

As of 31 December 2018 there were no corporate loans.

The detail of credit quality that is “past due but not impaired” as of 31 December 2019 and 2018 based on aging of receivables was as follows:

		31 Desember/December 2019					
		Pensiunan/ Pension	UMKM/ MSME	Syariah/ Sharia	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Tunggakan							
1 – 30 hari		441,993	118,774	63,165	280,286	904,218	Days past due: 1 – 30 days
31 – 60 hari		159,879	113,461	34,685	110,292	418,317	31 – 60 days
61 – 90 hari		94,985	139,747	29,785	63,180	327,697	61 – 90 days
		<u>696,857</u>	<u>371,982</u>	<u>127,635</u>	<u>453,758</u>	<u>1,650,232</u>	
Pendapatan bunga/ margin yang masih akan diterima		18,384	8,783	7,605	15,795	50,567	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai		(52,795)	(76,095)	(60,176)	(67,501)	(256,567)	Allowance for impairment losses
		<u>662,446</u>	<u>304,670</u>	<u>75,064</u>	<u>402,052</u>	<u>1,444,232</u>	
		31 Desember/December 2018					
		Pensiunan/ Pension	UMKM/ MSME	Syariah/ Sharia	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Tunggakan							
1 – 30 hari		320,409	200,579	70,851	205,868	797,707	Days past due: 1 – 30 days
31 – 60 hari		124,823	160,978	22,477	78,259	386,537	31 – 60 days
61 – 90 hari		69,573	115,607	22,332	61,715	269,227	61 – 90 days
		<u>514,805</u>	<u>477,164</u>	<u>115,660</u>	<u>345,842</u>	<u>1,453,471</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		21,549	13,938	5,310	14,060	54,857	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai		(44,796)	(79,344)	(55,739)	(94,399)	(274,278)	Allowance for impairment losses
		<u>491,558</u>	<u>411,758</u>	<u>65,231</u>	<u>265,503</u>	<u>1,234,050</u>	

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan jenis portofolio kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut:

Movement of the allowance for impairment losses by credit/financing portfolio types was as follows:

31 Desember/December 2019						
	Pensiunan/ <i>Pension</i>	UMKM/ <i>MSME</i>	Korporasi/ <i>Corporate</i>	Syariah/ <i>Sharia</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Saldo awal	295,887	359,684	-	215,949	262,545	1,134,065
Penambahan	163,476	564,581	82,043	309,402	326,431	1,445,933
Penerimaan kembali	32,925	64,146	-	3,676	12,496	113,243
Penghapusbukuan	(184,046)	(495,707)	-	(236,908)	(576,570)	(1,493,231)
Pengalihan cadangan kerugian penurunan nilai dampak penggabungan usaha	-	-	100,251	-	-	100,251
Lainnya	-	-	(134)	-	167,072	166,938
Saldo akhir	<u>308,242</u>	<u>492,704</u>	<u>182,160</u>	<u>292,119</u>	<u>191,974</u>	<u>1,467,199</u>

31 Desember/December 2018						
	Pensiunan/ <i>Pension</i>	UMKM/ <i>MSME</i>	Syariah/ <i>Sharia</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Saldo awal	197,410	348,382	157,657	90,666	794,115	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	252,885	549,133	265,571	297,352	1,364,941	<i>Addition</i>
Penerimaan kembali	21,544	92,683	6,193	4,106	124,526	<i>Recovery</i>
Penghapusbukuan	(175,952)	(630,568)	(213,472)	(152,940)	(1,172,932)	<i>Write-off</i>
Lainnya	-	54	-	23,361	23,415	<i>Others</i>
Saldo akhir	<u>295,887</u>	<u>359,684</u>	<u>215,949</u>	<u>262,545</u>	<u>1,134,065</u>	<i>Ending balance</i>

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi jika Bank dan Entitas Anak tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah. Salah satu parameter yang digunakan adalah dengan menganalisa profil jatuh tempo dari sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan sebagian besar aset yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan jangka waktu yang pada umumnya berjangka panjang. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan dapat meningkatkan risiko likuiditas.

Liquidity risk is the risk that the Bank and Subsidiary are unable to meet their payment obligations as they fall due, including withdrawal of customer deposits. One of the parameters used is by analysing the maturity profile from the funding source, which is usually short term, and most of the asset which were distributed in the form of loans, which is usually long-term. A relatively wide gap can increase liquidity risk.

Profil jatuh tempo diproyeksikan atas jangka waktu yang tersisa berdasarkan tanggal kontraktual aset dan liabilitas tertentu. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo yang dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan tingkat kepercayaan terhadap Bank dan Entitas Anak. Untuk mengelola risiko likuiditas atas kondisi tersebut, maka Bank dan Entitas Anak menetapkan strategi yang sesuai dan jumlah kas dan aset likuid yang perlu dimiliki, yang dapat dicairkan atau dijadikan jaminan jika ada kebutuhan likuiditas yang mendesak.

This maturity profile is projected based on the remaining period to the contractual maturity date of assets and liabilities. Historically, a significant portion of deposits are rolled-over on the maturity date which is affected by customer behaviour and confidence level to the Bank and Subsidiary. To manage the liquidity risk of this condition, the Bank and Subsidiary establish appropriate strategies and sufficient amount of cash and liquid assets that can be liquidated or used as collateral should there be an urgent need for liquidity.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Profil jatuh tempo diproyeksikan atas jangka waktu yang tersisa berdasarkan tanggal kontraktual aset dan liabilitas tertentu. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo yang dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan tingkat kepercayaan terhadap Bank dan Entitas Anak. Untuk mengelola risiko likuiditas atas kondisi tersebut, maka Bank dan Entitas Anak menetapkan strategi yang sesuai dan jumlah kas dan aset likuid yang perlu dimiliki, yang dapat dicairkan atau dijadikan jaminan jika ada kebutuhan likuiditas yang mendesak.

Tabel berikut ini menyajikan rincian sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo aset keuangan (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai).

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

This maturity profile is projected based on the remaining period to the contractual maturity date of assets and liabilities. Historically, a significant portion of deposits are rolled-over on the maturity date which is affected by customer behaviour and confidence level to the Bank and Subsidiary. To manage the liquidity risk of this condition, the Bank and Subsidiary establish appropriate strategies and sufficient amount of cash and liquid assets that can be liquidated or used as collateral should there be an urgent need for liquidity.

The following tables provide detail of remaining period to maturity date of financial assets (before allowance for impairment losses).

31 Desember/December 2019

	Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1-3 bulan/ > 1-3 months	> 3-6 bulan/ > 3-6 months	> 6-12 bulan/ > 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months	
Aset								Assets
Kas	2,299,062	2,299,062	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	8,987,079	8,987,079	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	1,056,904	1,056,904	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,914,104	-	7,254,104	485,000	370,000	805,000	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	10,702,857	-	1,302,594	6,949,639	209,282	512,240	1,729,102	Marketable securities
Tagihan derivatif	840,372	-	840,372	-	-	-	-	Derivative receivables
Tagihan akseptasi	1,692,460	-	662,819	446,301	418,076	165,264	-	Acceptance receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	142,587,542	-	31,307,032	10,493,102	7,246,115	13,747,925	79,793,368	Loans and sharia financing/receivables
Penyertaan saham	22,522	22,522	-	-	-	-	-	Investment in shares
Aset lain-lain	177,188	19,961	119,150	1,588	1,791	1,077	33,621	Other assets
Jumlah aset	177,280,090	12,385,528	41,486,071	18,375,630	8,245,264	15,231,506	81,556,091	Total assets
Liabilitas								Liabilities
Liabilitas segera	(18,268)	-	(18,268)	-	-	-	-	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	(21,861)	-	(14,473)	(6,294)	(991)	(103)	-	Undistributed revenue sharing
Giro	(14,374,956)	(14,374,226)	(730)	-	-	-	-	Current accounts
Tabungan	(9,958,771)	(9,955,705)	(3,066)	-	-	-	-	Saving deposits
Deposito berjangka dan deposito on call	(55,265,689)	-	(38,521,768)	(13,792,455)	(1,906,146)	(1,028,813)	(16,507)	Time deposits and deposits on call
Simpanan dari bank- bank lain	(11,690,555)	(11,690,555)	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	(894,947)	-	(894,947)	-	-	-	-	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	(888,459)	-	(519,441)	(225,754)	(116,395)	(26,869)	-	Acceptance payables
Surat utang jangka menengah	(1,306,441)	-	(5,032)	-	(1,301,409)	-	-	Medium term notes
Utang obligasi	(1,910,473)	-	(21,254)	-	-	(898,987)	(990,232)	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	(38,188,926)	-	(141,472)	-	(2,499,061)	(1,000,000)	(34,548,393)	Borrowings
Pinjaman subordinasi	(6,045,193)	(6,305)	-	-	-	-	(6,038,888)	Subordinated loans
Liabilitas lain-lain	(582,809)	(582,809)	-	-	-	-	-	Other liabilities
Jumlah liabilitas	(141,147,348)	(36,609,600)	(40,140,451)	(14,024,503)	(5,824,002)	(2,954,772)	(41,594,020)	Total liabilities
Aset (liabilitas) bersih	36,132,742	(24,224,072)	1,345,620	4,351,127	2,421,262	12,276,734	39,962,071	Net assets (liabilities)

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

31 Desember/December 2018							
	Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1-3 bulan/ > 1-3 months	> 3-6 bulan/ > 3-6 months	> 6-12 bulan/ > 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months
Aset							
Kas	1,838,136	1,838,136	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	5,248,644	5,248,644	-	-	-	-	-
Giro pada bank-bank lain	841,464	841,464	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11,749,903	-	10,854,903	-	395,000	500,000	-
Efek-efek	6,866,506	-	845,793	695,650	1,447,670	1,814,975	2,062,418
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,599,955	-	1,599,955	-	-	-	-
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	68,742,299	-	2,769,948	2,888,315	4,367,406	9,180,417	49,536,213
Penyertaan saham	22	22	-	-	-	-	-
Aset lain-lain	47,041	-	42,664	92	50	60	4,175
Jumlah aset	96,933,970	7,928,266	16,113,263	3,584,057	6,210,126	11,495,452	51,602,806
Liabilitas							
Liabilitas segera	(15,323)	-	(13,655)	(1,668)	-	-	-
Bagi hasil yang belum dibagikan	(17,035)	-	(12,737)	(3,923)	(375)	-	-
Giro	(1,119,866)	(1,118,905)	(961)	-	-	-	-
Tabungan	(7,731,413)	(7,728,838)	(2,575)	-	-	-	-
Deposito berjangka dan deposito on call	(56,234,002)	-	(38,665,691)	(12,580,594)	(4,109,846)	(858,647)	(19,224)
Simpanan dari bank-bank lain	(14,394)	(14,394)	-	-	-	-	-
Liabilitas derivatif	(116,521)	-	(116,521)	-	-	-	-
Utang obligasi	(1,217,317)	-	(19,875)	-	-	(299,360)	(898,082)
Pinjaman yang diterima	(8,556,874)	-	(114,109)	-	(2,152,320)	(1,792,522)	(4,497,923)
Liabilitas lain-lain	(99,231)	(99,231)	-	-	-	-	-
Jumlah liabilitas	(75,121,976)	(8,961,368)	(38,946,124)	(12,586,185)	(6,262,541)	(2,950,529)	(5,415,229)
Aset (liabilitas) bersih	21,811,994	(1,033,102)	(22,832,861)	(9,002,128)	(52,415)	8,544,923	46,187,577

Tabel berikut ini menunjukkan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto dari liabilitas keuangan dan rekening administratif Bank berdasarkan periode tersisa sampai dengan jatuh tempo kontraktual:

The following table shows the contractual undiscounted cash flows of the Bank's financial liabilities and administrative accounts based on the remaining period to contractual maturity:

31 Desember/December 2019							
Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/Gross nominal inflow (outflow)	Hingga 1 bulan/ Up to 1 month	>1 - 3 bulan/ months	>3 - 12 bulan/ months	>1 - 2 tahun/ years	>2 tahun/ years	
Liabilitas non-derivatif							Non-derivative liabilities
Liabilitas segera	(18,268)	(18,268)	(18,268)	-	-	-	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	(21,861)	(21,861)	(14,473)	(6,294)	(1,094)	-	Undistributed revenue sharing
Giro	(14,374,956)	(14,682,160)	(14,682,160)	(783)	(2,435)	(507)	Current accounts
Tabungan	(9,958,771)	(10,227,599)	(10,223,874)	(783)	(2,435)	(507)	Saving deposits
Deposito berjangka dan deposito on call	(55,265,689)	(56,223,259)	(39,236,841)	(13,969,593)	(2,999,417)	(17,408)	Time deposits and deposits on call
Simpanan dari bank-bank lain	(11,690,555)	(11,716,794)	(8,849,763)	(2,867,031)	(143,264)	-	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi Surat utang jangka menengah	(1,306,441)	(1,328,263)	-	-	(1,328,263)	-	Acceptance payables
Utang obligasi	(1,910,473)	(2,218,261)	(17,014)	(19,131)	(1,008,435)	(76,526)	Bond payable
Pinjaman yang diterima	(38,188,926)	(39,793,169)	(77,513)	(207,486)	(5,197,113)	(33,292,842)	Borrowing
Pinjaman subordinasi	(6,045,193)	(7,144,075)	-	(49,727)	(149,181)	(198,908)	Subordinated loans
Liabilitas lain-lain	(582,809)	(582,809)	(582,809)	-	-	-	Other liabilities
	(140,252,401)	(144,844,977)	(74,240,479)	(17,327,476)	(10,829,202)	(33,586,191)	(8,861,629)
Liabilitas derivative	(894,947)						Derivative payables
Arus kas masuk	-	51,045,474	8,457,855	10,571,427	3,790,550	3,310,133	Cash inflow
Arus kas keluar	-	(53,075,857)	(8,574,916)	(10,851,750)	(4,175,379)	(3,752,219)	Cash Outflow
	(894,947)	(2,030,383)	(117,061)	(280,323)	(384,829)	(442,086)	(806,084)
L/C yang tidak dapat dibatalkan	-	(925,174)	(520,395)	(351,771)	(53,008)	-	Irrevocable L/C
Fasilitas kredit yang belum digunakan - committed	-	(8,433,080)	(10,000)	(550,000)	(3,653,169)	(198,321)	Unused credit facilities - committed
Garansi yang diterbitkan	-	(8,924,578)	(790,130)	(1,637,789)	(3,121,094)	(540,937)	Guarantees issued
	-	(18,282,832)	(1,320,525)	(2,539,560)	(6,827,271)	(739,258)	(6,856,218)
Jumlah	(141,147,348)	(165,158,192)	(75,678,065)	(20,147,359)	(18,041,302)	(34,767,535)	(16,523,931)

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto dari liabilitas keuangan dan rekening administratif Bank berdasarkan periode tersisa sampai dengan jatuh tempo kontraktual: (Lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The following table shows the contractual undiscounted cash flows of the Bank's financial liabilities and administrative accounts based on the remaining period to contractual maturity: (Continued)

31 Desember/December 2018						
Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/Gross nominal inflow (outflow)	Hingga 1 bulan/ Up to 1 month	>1 - 3 bulan/ months	>3 - 12 bulan/ months	>1 - 2 tahun/ years	>2 tahun/ years
Liabilitas non-derivatif						
Liabilitas segera	(15,323)	(15,323)	(15,323)	-	-	-
Bagi hasil yang belum dibagikan	(17,035)	(17,035)	(12,737)	(3,923)	(375)	-
Giro	(1,119,866)	(1,123,601)	(1,123,601)	-	-	-
Tabungan	(7,731,413)	(7,741,554)	(7,738,581)	(680)	(2,067)	(226)
Deposito berjangka dan deposito on call	(56,234,002)	(56,649,990)	(38,792,782)	(12,776,089)	(5,061,162)	(19,957)
Simpanan dari bank-bank lain	(14,394)	(42,998)	(42,998)	-	-	-
Utang obligasi	(1,217,317)	(1,353,000)	-	(22,875)	(62,625)	(367,500)
Pinjaman yang diterima	(8,556,874)	(9,047,684)	-	(138,390)	(5,573,328)	(2,654,115)
Liabilitas lain-lain	(99,231)	(99,231)	(99,231)	-	-	-
	(75,005,455)	(76,090,416)	(47,825,253)	(12,941,957)	(10,699,557)	(3,041,798)
	(116,521)	(116,521)	(116,521)	-	-	-
Liabilitas derivatif						
Garansi yang diterbitkan	-	(107,719)	-	(65,480)	(42,239)	-
	(75,121,976)	(76,314,656)	(47,941,774)	(13,007,437)	(10,741,796)	(3,041,798)
Jumlah	(75,121,976)	(76,314,656)	(47,941,774)	(13,007,437)	(10,741,796)	(3,041,798)
						(1,581,851)
						Total

Tabel di atas menyajikan arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan periode jatuh tempo kontraktual yang paling dekat. Arus kas yang diharapkan atas instrumen keuangan Perseroan mungkin berbeda dengan analisis ini. Sebagai contoh, simpanan diharapkan memiliki saldo yang stabil atau meningkat atau fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (committed) tidak seluruhnya diharapkan untuk segera digunakan.

Nilai nominal arus kas masuk/(keluar) yang diungkapkan pada tabel di atas menyajikan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan nilai pokok dan bunga dari liabilitas keuangan. Pengungkapan instrumen derivatif menunjukkan nilai bersih derivatif yang dapat diselesaikan secara neto, juga nilai bruto arus kas masuk dan keluar untuk derivatif yang diselesaikan secara bruto. Arus kas liabilitas derivatif seperti yang ditunjukkan di tabel di atas merupakan arus kas berdasarkan jatuh tempo kontraktual yang menurut Perseroan adalah penting untuk memahami jadwal dari arus kas.

Kebijakan yang dijalankan Bank dan Entitas Anak dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah:

- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank dan Entitas Anak.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai dan cukup mudah ditelusuri.

The above table shows the undiscounted cash flows on the Company financial liabilities on the basis of their earliest possible contractual maturity. The Company expected cash flows on these instruments may vary from this analysis. For example, deposits are expected to maintain a stable or increasing balance or unused credit facilities to customer-committed are not all expected to be drawn down immediately.

The nominal inflow/(outflow) disclosed in the above tables represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liabilities. The disclosure for derivatives shows the net amount of derivatives that are net settled, and a gross inflow and outflow amount for derivatives that have simultaneous gross settlement. The cash flows of derivatives liabilities in the table represent the cash flows based on contractual maturities which the Company believes is essential for an understanding of the timing of the cash flows.

Policies adopted by the Bank and Subsidiary in managing its liquidity risk include:

- Application of a liquidity risk control policy that is suited to the mission, business strategy, capital adequacy, human resources and appetite for risk of the Bank and Subsidiary.
- Application of a liquidity risk limit policies and procedures that are written, complete, adequate and easy to follow.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

- Menjaga cadangan likuiditas agar sesuai dengan rekomendasi ALCO.
- Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor secara bulanan oleh ALCO dan *Risk Management Committee* (RMC).
- Fungsi pengawasan yang independen dari satuan kerja manajemen risiko.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau fluktuasi arus kas di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

Secara keseluruhan, risiko pasar dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

(i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing timbul dari adanya posisi neraca dan komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet*) baik di sisi aset maupun liabilitas yang timbul melalui transaksi mata uang asing.

Bank mengukur risiko nilai tukar untuk melihat dampak perubahan nilai tukar pada pendapatan dan modal Bank. Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, pembatasan posisi secara internal ditetapkan jauh di bawah limit posisi devisa neto yang ditetapkan regulator. Bank juga memonitor *stop loss limit* untuk menjaga tingkat kerugian karena pergerakan nilai pasar tidak melebihi kisaran yang telah ditetapkan.

Entitas anak tidak memiliki aset maupun liabilitas keuangan dalam mata uang asing, maupun pada posisi diperdagangkan, sehingga entitas anak tidak memiliki risiko mata uang asing.

Posisi Devisa Neto

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015, perubahan keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003, tentang Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, maksimum PDN adalah 20% dari modal.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

- *Maintain liquidity reserves to match the ALCO's recommendation.*
- *Managing it's funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. It's monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC).*
- *The independent monitoring function of the risk management working unit.*

Market risk

Market risk is the potential loss in book value or future cash flows fluctuation due to changes in interest rates or exchange rates.

In overall, market risk is divided into two following risks:

(i) *Foreign currency risk*

Foreign exchange risk arises from on and off-balance sheet positions both on the asset and liability sides through transactions in foreign currencies.

The Bank measures the foreign exchange risk to understand the impact of the exchange rate movement on the Bank's revenue and capital. In order to manage and mitigate the foreign exchange risk, predefined limits are set below net open position limit that is defined by regulator. The Bank also monitors stop loss limit to maintain the loss rate caused by movement of market value do not not exceed the specified range.

The subsidiary does not have any assets or liabilities which denominated in foreign currencies, or held for trading, thus the subsidiary does not have foreign currency risk.

Net Open Position

Based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015, the fourth amendment made to PBI No. 5/13/PBI/2003, regarding Net Open Position (NOP) for Commercial Banks dated 1 July 2010, NOP is set to a maximum of 20% of capital.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko mata uang asing (lanjutan)

Posisi Devisa Neto (lanjutan)

PDN adalah jumlah dari nilai absolut selisih bersih aktiva dan pasiva dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing dan selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut adalah Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dalam mata uang (ekuivalen Rupiah). Nilai ini adalah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan harian.

Mata Uang	31 Desember/December 2019			Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Laporan posisi keuangan dan rekening administratif				
Dolar Amerika Serikat	84,803,983	84,816,091	12,108	United States Dollar
Yen Jepang	1,989,928	1,985,170	4,758	Japanese Yen
Dolar Singapura	56,694	49,033	7,661	Singapore Dollar
Euro Eropa	49,431	46,435	2,996	European Euro
Baht Thailand	15,955	14,275	1,680	Thailand Baht
Poundsterling Inggris	7,257	3,504	3,753	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	3,173	648	2,525	Australian Dollar
Yuan China	788	110	678	China Yuan
Dolar Hong Kong	449	266	183	Hong Kong Dollar
Franc Swiss	289	-	289	Swiss Franc
Rupece India	70	-	70	Indian Rupee
Jumlah			36,701	Total
Jumlah Modal Tier I dan II			30,948,624	Total Tier I and II Capital
Rasio PDN			0.12%	NOP Ratio

Mata Uang	31 Desember/December 2018			Currencies
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Laporan posisi keuangan dan rekening administratif				
Dolar Amerika Serikat	8,259,932	8,207,012	52,920	United States Dollar
Yen Jepang	1,160	54	1,106	Japanese Yen
Dolar Singapura	232	25	207	Singapore Dollar
Jumlah			54,233	Total
Jumlah Modal Tier I dan II*			13,666,506	Total Tier I and II Capital*
Rasio PDN			0.40%	NOP Ratio

Sensitivitas Bank terhadap mata uang asing diperhitungkan dengan menggunakan informasi selisih bersih aktiva dan pasiva dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing dan selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Bank (linier) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 atas perubahan nilai tukar mata uang asing yaitu:

	Menambah (mengurangi) laba bersih/Increase (decrease) net income	
	2019	2018
IDR melemah 1%	125	542
IDR menguat 1%	(125)	(542)

*) Setelah disajikan kembali (Catatan 48)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

(i) Foreign currency risk (continued)

Net Open Position (continued)

NOP is the sum of the absolute values of the net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency and the net difference of receivables and commitments and contingent liabilities in the administrative accounts for each foreign currency, which are all stated in Rupiah.

Below is the Net Open Position of Bank as of 31 December 2019 and 2018 in currency (Rupiah equivalent). These amounts are reported to Bank Indonesia on the statement of financial position's date as part of daily reporting.

Currencies	31 Desember/December 2019		
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
Statement of financial position and off-balance sheet			
United States Dollar	84,803,983	84,816,091	12,108
Japanese Yen	1,989,928	1,985,170	4,758
Singapore Dollar	56,694	49,033	7,661
European Euro	49,431	46,435	2,996
Thailand Baht	15,955	14,275	1,680
Great Britain Poundsterling	7,257	3,504	3,753
Australian Dollar	3,173	648	2,525
China Yuan	788	110	678
Hong Kong Dollar	449	266	183
Swiss Franc	289	-	289
Indian Rupee	70	-	70
Total			36,701
Total Tier I and II Capital			30,948,624
NOP Ratio			0.12%

Currencies	31 Desember/December 2018		
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
Statement of financial position and off-balance sheet			
United States Dollar	8,259,932	8,207,012	52,920
Japanese Yen	1,160	54	1,106
Singapore Dollar	232	25	207
Total			54,233
Total Tier I and II Capital*			13,666,506
NOP Ratio			0.40%

Bank's sensitivity to foreign currency is calculated using net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency and the net difference of receivables and commitments and contingent liabilities in the administrative accounts for each foreign currency information.

The table below shows the sensitivity of the Bank's net income (linear) to movement of foreign exchange rates as of 31 December 2019 and 2018 :

	Menambah (mengurangi) laba bersih/Increase (decrease) net income	
	2019	2018
IDR weakening by 1%	125	542
IDR strengthening by 1%	(125)	(542)

*) After restatement (Note 48)

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko mata uang asing (lanjutan)

Posisi Devisa Neto (lanjutan)

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa perubahan nilai tukar mata uang asing bergerak pada jumlah yang sama sehingga tidak mencerminkan perubahan potensial kepada laba atas perubahan beberapa nilai tukar mata uang asing sementara lainnya tidak berubah. Proyeksi juga mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan dan berdasarkan tanggal pelaporan yang konstan serta seluruh posisi hingga jatuh tempo.

(ii) Risiko tingkat bunga

Pendapatan Bank dan Entitas Anak yang berasal dari kegiatan konvensional merupakan selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aset dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan Bank dan Entitas Anak.

Risiko tingkat bunga berdampak pada fluktuasi arus kas di masa mendatang baik pada aset maupun liabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank maupun nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki Bank dan Entitas Anak.

Manajemen risiko tingkat bunga

Kebijakan yang dijalankan Bank dan Entitas Anak dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga:

- Melakukan pemantauan limit risiko suku bunga.
- Melakukan pengelolaan risiko suku bunga sesuai regulasi terkait dan kebijakan internal Bank.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur instrumen keuangan Bank dan Entitas Anak terhadap risiko tingkat suku bunga.

	31 Desember/December 2019											
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating rate instrument</i>				Bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>					Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	≤ 1 bulan/ <i>month</i>	1 - 3 bulan/ <i>months</i>	> 3 - 6 bulan/ <i>months</i>	> 6 - 12 bulan/ <i>months</i>	≤ 1 bulan/ <i>month</i>	1 - 3 bulan/ <i>months</i>	> 3 - 6 bulan/ <i>months</i>	> 6 - 12 bulan/ <i>months</i>	> 12 bulan/ <i>Months</i>			
Aset											Assets	
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,299,062	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	-	8,987,079	-	-	-	-	8,987,079	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank-bank lain	-	-	-	-	1,056,904	-	-	-	-	1,056,904	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	-	-	-	-	7,254,104	485,000	370,000	805,000	-	8,914,104	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	-	-	-	-	1,410,377	6,841,856	209,282	512,240	1,729,102	10,702,857	Marketable securities	
Tagihan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840,372	Derivative receivables	
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,692,460	Acceptance receivables	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	24,397,043	13,266,564	3,106,261	118,354	32,372,753	9,648,276	6,748,059	9,484,626	43,445,606	-	Loans and sharia financing/receivables	
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,522	Investment in shares	
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,188	Other assets	
Jumlah aset keuangan, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	24,397,043	13,266,564	3,106,261	118,354	51,081,217	16,975,132	7,327,341	10,801,866	45,174,708	5,031,604	177,280,090	Total financial assets before allowance for impairment losses

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

(i) Foreign currency risk (continued)

Net Open Position (continued)

The projection assumes that foreign exchange rates move by the same amount and, therefore, do not reflect the potential impact on profit of some rates changing while others remain unchanged. The projections also assume that all other variables are held constant and are based on a constant reporting date position and that all positions run to maturity.

(ii) Interest rate risk

The Bank and Subsidiary derive its conventional activities income from the difference between the interest generated on the asset side and the interest paid to third party funds. If not anticipated, changes in interest rates can result in a decrease in the Bank and Subsidiary's income.

Interest rate risk has an effect to future cash flow fluctuation of both assets and liabilities. It can affect the Bank and Subsidiary's interest income and fair value of the financial instruments.

Interest rate risk management

Policies adopted by the Bank and Subsidiary in managing its interest rate risk include:

- Monitoring of interest rate risk limit.
- Managing interest rate risk in accordance with relevant regulations and Bank's internal policies.

The tables below summarise the exposures of financial instruments of the Bank and Subsidiary to interest rate risks.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(ii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

Interest rate risk management (continued)

	31 Desember/December 2019											
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating rate instrument</i>				Bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>					Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>		Jumlah/ <i>Total</i>
	≤ 1 bulan/ <i>month</i>	1 - 3 bulan/ <i>Months</i>	> 3 - 6 bulan/ <i>months</i>	> 6 - 12 bulan/ <i>months</i>	≤ 1 bulan/ <i>month</i>	1 - 3 bulan/ <i>months</i>	> 3 - 6 bulan/ <i>months</i>	> 6 - 12 bulan/ <i>months</i>	> 12 bulan/ <i>months</i>			
Liabilitas											Liabilities	
Liabilitas segera	-	-	-	-	(868)	(8,756)	-	-	-	(8,644)	(18,268)	Obligation due immediately
Simpanan dari nasabah	-	-	-	-	(62,855,495)	(13,792,455)	(1,906,146)	(1,028,813)	(16,507)	-	(79,599,416)	Deposits from customer
Simpanan dari bank-bank lain	-	-	-	-	(8,857,355)	(2,833,200)	-	-	-	-	(11,690,555)	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(894,947)	(894,947)	Derivative payables
Liabilitas akseptasi Surat utang jangka menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(888,459)	(888,459)	Acceptance payables
Utang obligasi	-	-	-	-	(5,032)	-	(1,301,409)	-	-	-	(1,306,441)	Medium term notes
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	(21,254)	-	-	(898,987)	(990,232)	-	(1,910,473)	Bonds payable
Pinjaman subordinasi	(25,293,593)	(8,983,721)	-	(727,186)	-	-	(2,521,883)	-	(662,243)	-	(38,188,626)	Borrowings
Liabilitas lain-lain	-	(6,045,193)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,045,193)	Subordinated loans
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(582,809)	(582,809)	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	(25,293,593)	(15,028,914)	-	(727,186)	(71,740,004)	(16,634,411)	(5,729,438)	(1,927,800)	(1,668,982)	(2,374,859)	(141,125,187)	Total financial liabilities
Jumlah gap repricing suku bunga	(896,550)	(1,762,350)	3,106,261	(608,832)	(20,658,787)	(340,721)	1,597,903	8,874,066	43,505,726	2,656,745	36,154,903	Total interest repricing gap

	31 Desember/December 2018							
	Bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>					Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	≤ 1 bulan/ <i>month</i>	1 - 3 bulan/ <i>months</i>	> 3 - 6 bulan/ <i>months</i>	> 6 - 12 bulan/ <i>months</i>	> 12 bulan/ <i>months</i>			
Aset								Assets
Kas	-	-	-	-	-	1,838,136	1,838,136	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5,248,644	-	-	-	-	-	5,248,644	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	841,464	-	-	-	-	-	841,464	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	10,854,903	-	395,000	500,000	-	-	11,749,903	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	845,793	695,650	1,447,670	1,814,975	2,062,418	-	6,866,506	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1,599,955	-	-	-	-	1,599,955	Securities purchased under resale agreements
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	2,769,948	2,888,315	4,367,406	9,180,417	49,536,213	-	68,742,299	Loans and sharia financing/receivables
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	22	22	Investment in shares
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	47,041	47,041	Other assets
Jumlah aset keuangan, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	20,560,752	5,183,920	6,210,076	11,495,392	51,598,631	1,885,199	96,933,970	Total financial assets, before allowance for impairment losses
Liabilitas								Liabilities
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	(15,323)	(15,323)	Obligation due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	-	-	-	-	(17,035)	(17,035)	Undistributed revenue sharing
Giro	(1,119,866)	-	-	-	-	-	(1,119,866)	Current accounts
Tabungan	(7,731,413)	-	-	-	-	-	(7,731,413)	Saving deposits
Deposito berjangka dan deposito on call	(38,665,691)	(12,580,594)	(4,109,846)	(858,647)	(19,224)	-	(56,234,002)	Time deposits and deposits on call
Simpanan dari bank-bank lain	(14,394)	-	-	-	-	-	(14,394)	Deposits from other banks
Liabilitas derivative	-	-	-	-	-	(116,521)	(116,521)	Derivative payables
Efek-efek yang diterbitkan	-	-	-	(319,235)	(898,082)	-	(1,217,317)	Securities issued
Pinjaman yang diterima	-	-	(2,266,429)	(1,792,522)	(4,497,923)	-	(8,556,874)	Borrowings
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	(99,231)	(99,231)	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	(47,531,364)	(12,580,594)	(6,376,275)	(2,970,404)	(5,415,229)	(248,110)	(75,121,976)	Total financial liabilities
Jumlah gap repricing suku bunga	(26,970,612)	(7,396,674)	(166,199)	8,524,988	46,183,402	1,637,089	21,811,994	Total interest repricing gap

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 atas kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar, dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan asimetris di kurva imbal hasil:

	(Penurunan) peningkatan laba bersih/ <i>(Decrease) increase net income</i>	
	2019	2018
Peningkatan 100 bps	(129)	(389)
Penurunan 100 bps	111	389

Manajemen Risiko Permodalan

Modal regulasi

Tujuan manajemen permodalan Bank dan Entitas Anak adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank dan Entitas Anak mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Adequacy Maintained Assets (CEMA)*, Bank wajib melakukan perhitungan KPMM minimum berdasarkan profil risiko dan melakukan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*. Peraturan ini juga mengatur tentang pemenuhan rasio modal inti (*Tier 1*) paling rendah sebesar 6% dan rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5%, efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

Selain itu, POJK di atas juga mengatur perubahan struktur permodalan Bank yang berlaku 1 Januari 2015 dan Bank diwajibkan untuk membentuk penyangga modal (*buffer*) yang berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019.

Bank dan Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

(ii) *Interest rate risk* (continued)

Interest rate risk management (continued)

The table below shows the sensitivity of the Bank as of 31 December 2019 and 2018 to an increase or decrease in market interest rates, assuming no asymmetrical movement in curves:

	(Penurunan) peningkatan laba bersih/ <i>(Decrease) increase net income</i>	
	2019	2018
Peningkatan 100 bps	(129)	(389)
Penurunan 100 bps	111	389

Capital Risk Management

Regulatory capital

The Bank and Subsidiary capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investors, depositors, customers and market confidence. In managing its capital, the Bank and Subsidiary consider factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

According to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 dated 12 December 2013 regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) for Commercial Bank and SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 regarding Capital Adequacy Ratio based on Risk Profile and Fullfillment of Capital Adequacy Maintained Assets (CEMA), the Bank is required to calculate minimum CAR in accordance to its risk profile and to perform Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). This regulation also stipulates minimum Tier 1 ratio at the minimum of 6% and common equity Tier 1 ratio at the minimum of 4.5%, effective on 1 January 2014.

Moreover, the above stated OJK Regulation also stipulates changes in capital components effective on 1 January 2015 and Bank is required to set aside capital buffer which is imposed in stages from 1 January 2016 to 1 January 2019.

The Bank and Subsidiary have complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

Capital Risk Management (continued)

Modal regulasi (lanjutan)

Regulatory capital (continued)

Posisi permodalan Bank dan Entitas Anak berdasarkan peraturan OJK yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The Bank and Subsidiary regulatory capital position under the prevailing OJK regulation as of 31 December 2019 and 2018 were as follows:

	31 Desember/December		
	2019	2018*	
KONSOLIDASI			CONSOLIDATED
Aset tertimbang menurut risiko			Risk weighted assets
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	124,368,632	49,742,514	<i>With credit risk charge -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	142,780,626	67,077,208	<i>With credit, operational risk - charge</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	143,582,952	67,131,441	<i>With credit, operational and market - risk charge</i>
Modal			Capital
- Modal inti	27,259,773	15,898,538	<i>Core capital -</i>
- Modal pelengkap	7,543,294	622,526	<i>Supplementary capital -</i>
	<u>34,803,067</u>	<u>16,521,064</u>	
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum			Capital adequacy ratio
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	27.98%	33.21%	<i>With credit risk charge -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	24.38%	24.63%	<i>With credit, operational risk - charge</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	24.24%	24.61%	<i>With credit, operational and market - risk charge</i>
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to Less than 10%	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to Less than 10%	<i>Minimum capital adequacy ratio required by Bank Indonesia</i>
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	24.24%	24.61%	<i>Capital Adequacy Ratio -</i>
- Rasio CET 1	18.99%	23.68%	<i>CET 1 ratio -</i>
- Rasio tier 1	18.99%	23.68%	<i>Tier 1 ratio -</i>
- Rasio tier 2	5.25%	0.93%	<i>Tier 2 ratio -</i>
BANK			BANK
Aset tertimbang menurut risiko			Risk weighted assets
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	117,335,520	43,896,677	<i>With credit risk charge -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	131,011,596	57,601,216	<i>With credit, operational risk - charge</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	131,813,922	57,655,449	<i>With credit, operational and market - risk charge</i>
Modal			Capital
- Modal inti	23,521,707	13,109,731	<i>Core capital -</i>
- Modal pelengkap	7,465,961	549,549	<i>Supplementary capital -</i>
	<u>30,987,668</u>	<u>13,659,280</u>	
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum			Capital adequacy ratio
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	26.41%	31.12%	<i>With credit risk charge -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	23.65%	23.71%	<i>With credit, operational risk - charge</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	23.51%	23.69%	<i>With credit, operational and market - risk charge</i>
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to Less than 10%	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to Less than 10%	<i>Minimum capital adequacy ratio required by Bank Indonesia</i>
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	23.51%	23.69%	<i>Capital Adequacy Ratio -</i>
- Rasio CET 1	17.84%	22.74%	<i>CET 1 ratio -</i>
- Rasio tier 1	17.84%	22.74%	<i>Tier 1 ratio -</i>
- Rasio tier 2	5.66%	0.95%	<i>Tier 2 ratio -</i>

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

Capital Risk Management (continued)

Modal regulasi (lanjutan)

Regulatory capital (continued)

	31 Desember/December		
	2019	2018	
ENTITAS ANAK			SUBSIDIARY
Modal inti	5,138,209	3,816,289	Core capital
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	87,914	60,583	Supplementary capital (maximum at 100% from core capital)
Jumlah modal	5,226,123	3,876,872	Total capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			Risk Weighted Assets (RWA)
Risiko Kredit	6,988,540	5,838,095	Credit Risk
Risiko Operasional	4,737,446	3,635,727	Operational Risk
Rasio total	44.57%	40.92%	Total ratio
Rasio KPMM yang diwajibkan	9% - 10%	9% - 10%	Minimum CAR

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. BI's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement to available capital resources.

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

Fair value estimation of financial instruments

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, berikut ini adalah hirarki nilai wajar:

For financial assets and liabilities measured at fair value, the following is the hierarchy of the fair values:

a. Tingkat 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

a. Level 1

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

b. Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan harga); dan

b. Level 2

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is as prices) or indirectly (that is derived from prices); and

c. Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

c. Level 3

Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Bank dan Entitas Anak yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

The tables below show the Bank and Subsidiary's financial assets and liabilities that were measured at fair value as of 31 December 2019 and 2018:

	31 Desember/December 2019				Nilai wajar/ Fair value	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset						Assets
Efek-efek	5,679,762	-	5,679,762	-	5,679,762	Marketable securities
Tagihan derivatif	840,372	-	840,372	-	840,372	Derivative receivables
Penyertaan saham	22,522	-	-	22,522	22,522	Investments in shares
	6,542,656	-	6,520,134	22,522	6,542,656	
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas derivatif	894,947	-	894,947	-	894,947	Derivative payables

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)

Fair value estimation of financial instruments
(continued)

31 Desember/December 2018					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					
Efek-efek	1,545,494	-	1,545,494	-	1,545,494
Penyertaan saham	22	-	-	22	22
	<u>1,545,516</u>	<u>-</u>	<u>1,545,494</u>	<u>22</u>	<u>1,545,516</u>
Liabilitas					
Liabilitas derivatif	116,521	-	116,521	22	116,521

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya:

The table below summarises the carrying amounts and fair values of those financial instruments not stated at their fair values:

	31 Desember/December 2019		31 Desember/December 2018		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset					Assets
Giro pada Bank Indonesia	8,987,079	8,987,079	5,248,644	5,248,644	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	1,056,904	1,056,904	841,464	841,464	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,914,104	8,914,104	11,749,903	11,749,903	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	10,702,851	10,657,240	6,866,506	7,479,925	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	1,599,955	1,599,955	Securities purchased under resale agreement
Tagihan akseptasi	1,692,391	1,692,391	-	-	Acceptance receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	141,120,343	143,364,681	67,608,234	67,844,103	Loans and sharia financing/receivables
Aset lain-lain	177,188	177,188	47,041	47,041	Other assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segera	18,268	18,268	15,323	15,323	Obligation due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	21,861	21,861	17,035	17,035	Undistributed revenue sharing
Simpanan nasabah	79,599,416	79,599,416	65,085,281	65,085,281	Deposits from customers
Simpanan dari bank-bank lain	11,690,555	11,690,555	14,394	14,394	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	888,459	888,459	-	-	Acceptance payables
Surat utang jangka menengah	1,306,441	1,323,732	-	-	Medium term notes
Utang obligasi	1,910,473	1,921,161	1,217,317	1,202,490	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	38,188,926	38,218,199	8,556,874	8,531,195	Borrowings
Liabilitas lain-lain	582,809	582,809	116,266	116,266	Other liabilities

Nilai wajar dari efek-efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value for marketable securities, which maturity date is more than 1 year, are estimated using the last quoted market price (level 2 - fair value hierarchy).

Estimasi nilai wajar dari pinjaman yang diberikan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar (level 3 - hirarki nilai wajar).

The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current market rates to determine fair value (level 3 - fair value hierarchy).

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)

Fair value estimation of financial instruments
(continued)

Nilai tercatat dari pembiayaan Syariah merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar dikarenakan pinjaman tersebut memiliki tenor jangka pendek.

Carrying value of sharia financing approximates the estimates fair value since sharia financing have short-term tenure.

Nilai wajar surat utang jangka menengah dihitung menggunakan teknik penilaian berdasarkan model internal Bank yaitu model penilaian diskonto arus kas. Input dalam teknik penilaian termasuk arus kas yang akan diterima di masa datang dan suku bunga pasar (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value of medium term notes was calculated using valuation technique based on the Bank's internal model which is discounted cash flow valuation model. Inputs into the valuation technique include expected future cash flows and interest rates (level 2 - fair value hierarchy).

Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value of bonds payable is estimated by using the last quoted market price (level 2 - fair value hierarchy).

Nilai wajar dari pinjaman yang diterima dinilai dengan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pinjaman terakhir yang digunakan (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value of borrowings is estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lender for the last utilization of borrowings (level 2 – fair value hierarchy).

Nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya mendekati nilai wajarnya karena instrumen keuangan bersifat jangka pendek atau yang ditinjau ulang menggunakan harga pasar secara berkala.

The carrying amount of remaining financial assets and financial liabilities are reasonable approximation of fair value because they are short term in nature or re-price to current market rates frequently.

Perhitungan nilai wajar dilakukan hanya untuk kepentingan pengungkapan dan tidak berdampak pada pelaporan posisi atau kinerja keuangan Perseroan. Nilai wajar yang dihitung oleh Perseroan mungkin berbeda dengan jumlah aktual yang akan diterima/dibayar pada saat penyelesaian atau jatuh tempo instrumen keuangan. Mengingat kategori tertentu instrument keuangan yang tidak diperdagangkan, maka terdapat pertimbangan manajemen dalam perhitungan nilai wajar.

The fair values calculated are for disclosure purposes only and do not have any impact on the Company's reported financial performance or position. The fair values calculated by the Company may be different from the actual amount that will be received/paid on the settlement or maturity of the financial instrument. As certain categories of financial instruments are not traded, there is management judgment involved in calculating the fair values.

Risiko operasional

Operational risk

Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational risk is defined as the risks of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, systems failure and/or external events that impacted to the bank's operational activities.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Tata Kelola Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional dikelola melalui kerangka kerja, kebijakan dan prosedur dimana unit kerja lini bisnis dan fungsi pendukung yang disebut sebagai unit pemilik risiko (Risk Taking Unit) mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan risikonya. Struktur Tata Kelola Risiko Operasional mengadopsi model Three Lines of Defence atau Pertahanan Tiga Lapis. Risk Taking Unit (RTU), sebagai lapis pertahanan pertama, bertanggung jawab secara langsung untuk mengelola dan mengontrol risiko operasional di kegiatan bisnis mereka. Mereka bertanggungjawab untuk menjalankan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional. Pada tingkatan operasional, Bank telah membentuk fungsi Quality Assurance (QA) yang berperan membantu Risk Taking Unit (RTU) dalam memastikan pengelolaan risiko operasional sehari-hari.

Divisi ORM (Manajemen Risiko Operasional), sebagai lapis pertahanan kedua membuat kerangka kerja, kebijakan dan prosedur serta mengembangkan perangkat kerja ORM dan program-program lainnya untuk mengelola risiko operasional. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dikaji ulang minimal setahun sekali untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi Bank. Divisi ORM secara periodik melaporkan risiko operasional kepada Manajemen Senior dan Komite Manajemen Risiko.

Pelaksanaan kaji ulang independen juga dilakukan oleh Internal Audit sebagai lapis pertahanan ketiga secara berkala.

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait dengan praktek pengendalian internal Bank dilakukan melalui forum-forum maupun rapat secara periodik.

Pengelolaan Risiko Operasional

Bank dan Entitas Anak memiliki Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional untuk memastikan proses pengelolaan risiko operasional yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan secara terstruktur dan konsisten. Proses Pengelolaan Risiko Operasional diterapkan berdasarkan praktik terbaik yang efektif untuk Bank yang juga mencakup Business Continuity Management.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Operational Risk Management Governance

Operational risk is managed through a framework, policies and procedures where business and support function units called Risk Taking Unit (RTU) to identifies, measures, monitors, control and reports the risks. The Operational Risk Management Structure adopts the Three Lines of Defence model. Risk Taking Unit (RTU), as the first line of defence, is responsible directly to manage and control operational risk in their business activities. They responsible to implement the operational risk policy and procedures. At the operational level, the Bank has established a Quality Assurance (QA) function which has the role of assisting the Risk Taking Unit (RTU) in ensuring day-to-day operational risk management.

ORM (Operational Risk Management) Division, as the second line of defense, develop framework, policy and procedures, improve the ORM tools and other program to manage operational risk. Operational Risk Management Policy is reviewed at least once a year to ensure compliance with the Bank's conditions. ORM Division periodically report operational risks to the Senior Management and Risk Management Committee.

Independent review is also carried out by the Internal Audit as a third line of defense on a regular basis.

Alignment of work between parties related to the Bank's internal control practices is carried out through forums and meetings periodically.

Operational Risk Management

The Bank and Subsidiaries established an Operational Risk Management Policy to ensure the operational risk management process which consists of structured and consistent identification, measurement, monitoring and controlling of risks. The Operational Risk Management process is based on best practices that effective for the Bank which also includes Business Continuity Management.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Operasional dilakukan melalui Kajian Risiko Operasional atas setiap produk/proses/layanan yang baru atau berubah. Risiko-risiko operasional yang teridentifikasi dari setiap proses disusun ke dalam tabel PRC (*Process Risk Control*) dengan masing-masing tingkat risiko diukur dengan menggunakan RGM (*Risk Grading Matrix*).
2. Pengukuran Risiko Operasional dilakukan dengan KCSA (*Key Control Self Assessment*), dan Perhitungan Beban Modal untuk Risiko Operasional.
3. Pemantauan Risiko Operasional dilakukan dengan menganalisa pelaporan atas kejadian/kerugian risiko operasional, hasil pelaksanaan KCSA (*Key Control Self Assessment*), hasil temuan QA dan parameter yang sudah ditentukan oleh regulator di dalam Profil Risiko Operasional.
4. Pengendalian risiko operasional dilakukan melalui berbagai rencana tindakan dimanakah satunya adalah transfer risiko dengan perlindungan asuransi. Bank juga menerapkan kerangka kerja *Business Continuity Management (BCM)* sebagai bentuk pengendalian risiko operasional
5. Proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari baik di Bank maupun Entitas Anak dilakukan melalui ORMS (*Operational Risk Management System*) yang merupakan aplikasi *online real-time* untuk memudahkan pencatatan, analisis, dan pelaporan dari data risiko operasional, dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.
6. Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional Bank dan Entitas Anak dikaji ulang secara berkala agar sesuai dengan perkembangan kondisi eksternal dan internal Bank dan disetujui oleh Direksi melalui Komite Manajemen Risiko.
7. Perhitungan beban modal untuk risiko operasional yang dilakukan Bank dan Entitas Anak menggunakan Pendekatan Indikator Dasar. Selanjutnya perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dengan pendekatan standar akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh OJK.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Operational Risk Management (continued)

The process of identifying, measurement, monitoring and controlling operational risks as follows:

1. *Operational Risk Identification is carried out through operational risk assessment for each new/changes of product/process/services. Operational risk which identified from each process tabled into PRC (Process Risk Control) with each risk level measured by using RGM (Risk Grading Matrix).*
2. *Operational Risk Measurement is carried out with KCSA (Key Control Self Assessment) and Capital Charge Calculation for Operational Risk.*
3. *Operational Risk Monitoring is carried out with analyze report of operational risk event/loss, result of KCSA exercise (Key Control Self Assessment), QA Finding and parameter which defined by Regulator in Operational Risk Profile.*
4. *Operational risk control is carried out by various action plans where one is a risk transfer with insurance coverage. Bank also implement framework of Business Continuity Management (BCM) as one of operational risk control*
5. *The day-to-day operational risk management process both at the Bank and Subsidiary is carried out through an ORMS (Operational Risk Management System) which is a real-time online application to facilitate the recording, analysis and reporting of operational risk data, with the ability to identify risks, assessment/measurement, monitoring and control/mitigation carried out in an integrated manner, so as to increase the effectiveness of operational risk management.*
6. *Operational Risk Management Policy of Bank and Subsidiary is periodically reviewed to reflect the development of the Bank's external and internal conditions and is approved by the Board of Directors through the Risk Management Committee.*
7. *Calculation of capital charges for operational risks by the Bank and Subsidiary using the Basic Indicator Approach. Furthermore, the calculation of the Capital Adequacy Ratio (CAR) with standardized approach will be carried out in accordance with the schedule determined by OJK.*

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional sebagai berikut (lanjutan):

8. Bank dan Entitas Anak telah memiliki pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dan mengacu kepada standard industri ISO 22301, dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang dapat terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem pasokan listrik, hingga situasi bisnis yang kurang menguntungkan. Hal ini untuk memastikan kelangsungan layanan kepada nasabah tetap terjamin.

Program Manajemen Risiko Operasional

Beberapa inisiatif pokok yang masih terus dilaksanakan di Bank guna terus meningkatkan praktek pengelolaan risiko operasional, yaitu:

- Pengembangan kerangka kerja, kebijakan, prosedur serta perbaikan perangkat kerja ORM agar dapat membantu unit kerja dalam pengelolaan risiko operasional.
- Proses penilaian risiko yang berkaitan dengan pengembangan bisnis *Smart Digital Banking* dan *Laku Pandai*;
- Harmonisasi dan penggabungan dokumentasi atas *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Business Continuity Plan* (BCP);
- Konsolidasi Lokasi Alternatif Bank.
- Pelaksanaan Forum *Business Risk/QA* secara berkala.
- Implementasi *Key Operational Risk Indicator*.
- Implementasi *Significant Incident Notification Protocol* (SINP) dan *Risk and Control Meeting* (RCM).
- Peningkatan sistem keamanan informasi (*Information Security*) Bank.

Risiko non-keuangan lainnya

Bank dan Entitas Anak juga memonitor risiko non-keuangan sebagai berikut:

- (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan dalam aspek yuridis, contohnya apabila Bank dan Entitas Anak terlibat dalam perikatan yang lemah secara hukum, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Bank dan Entitas Anak tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan proses litigasi;

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Operational Risk Management (continued)

The process of identifying, measurement, monitoring and controlling operational risks as follows (continued):

8. The Bank and Subsidiary already have guidelines for comprehensive Business Continuity Management and refer to ISO 22301 industry standards, with the aim of anticipating operational risks that can occur from extreme / critical situations due to natural disasters such as floods, earthquakes and other factors such as fires, disruption to the electricity supply system, to unfavorable business situations. This is to ensure continuity of service to customers remains guaranteed.

Operational Risk Management Program

Some of the key initiatives that are still being implemented at the Bank are to continue improving operational risk management practices, namely:

- Development of framework, policies, procedures, improvement of ORM tools to support working unit to manage operational risks.
- The risk assessment process related to the business development of *Smart Digital Banking* and *Smart Practice*;
- Harmonisation and incorporation of documentation on *Business Impact Analysis* (BIA) and *Business Continuity Plan* (BCP);
- Consolidation of Alternate Site of the Bank.
- Implementation of the *Business Risk/QA* Forum regularly.
- Implementation of *Key Operational Risk Indicator*.
- Implementation of *Significant Incident Notification Protocol* (SINP) and *Risk and Control Meeting* (RCM).
- Improvement of *Bank Information Security System*.

Other non-financial risk

The Bank and Subsidiary also monitor non-financial risk as follows:

- (i) legal risks to minimise possible losses from lawsuits and/or weaknesses in juridical matters, for example if the Bank and Subsidiary being involved with weak legal arrangements, an absence and/or change of regulations, which causes a transaction done by the Bank and Subsidiary to become illegal and litigation process;

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko non-keuangan lainnya

Bank dan Entitas Anak juga memonitor risiko non-keuangan sebagai berikut (lanjutan):

- (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan Entitas Anak atau persepsi negatif terhadap Bank dan Entitas Anak;
- (iii) risiko strategis untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis yang gagal mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan
- (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Entitas Anak.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

- Risiko hukum dikelola dengan cara:
 - (i) Membentuk unit kerja khusus bidang hukum;
 - (ii) Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali;
 - (iii) Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah;
 - (iv) Mengidentifikasi risiko hukum yang mempengaruhi setiap aktivitas fungsional;
 - (v) Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif.
- Risiko reputasi dikelola dengan cara:
 - (i) Membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan pemangku kepentingan;
 - (ii) Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya;
 - (iii) Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
 - (iv) Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Other non-financial risk

The Bank and Subsidiary also monitor non-financial risk as follows (continued):

- (ii) reputation risks to minimise possible losses from negative publication relating to the business activities of the Bank and Subsidiary or negative perception about the Bank and Subsidiary;
- (iii) strategic risks to minimise possible losses arising from wrong decision and/or carrying out a strategic decision that fails to anticipate changes in the business environment; and
- (iv) compliance risks to minimise possible loss from non-compliance or failure to implement prevailing laws and regulations, including sharia principles for Subsidiary.

Initiatives taken to manage legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks as described above, include the following:

- Legal risks are managed by:
 - (i) Forming a legal division;
 - (ii) Establishing policies of legal risk controls, particularly risks affecting functional activities. Those policies are evaluated annually, at the minimum;
 - (iii) Identifying and controlling legal risks that were inherent to new products and activities before launching;
 - (iv) Identifying legal risks affecting all functional activities;
 - (v) Quantifying legal risks.
- Reputation risks are managed by:
 - (i) Forming a unit that is authorised and responsible to provide comprehensive information to customers and stakeholders;
 - (ii) Establishing communication policies to anticipate and handle any negative publication;
 - (iii) Identifying reputation risks in all functional activities;
 - (iv) Quantifying reputation risks.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko non-keuangan lainnya (lanjutan)

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah (lanjutan):

- Risiko strategis dikelola dengan cara:
 - (i) Menyusun rencana korporasi dan rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Bank yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan *review* minimal 2 kali per tahun;
 - (ii) Membangun Sistem Informasi Manajemen dengan pengukuran kinerja yang tepat yang melakukan pemantauan berkala atas *key initiatives* yang dilaksanakan oleh unit-unit untuk mencapai rencana bisnis sesuai dengan tenggat waktunya; dan
 - (iii) Menetapkan pedoman yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk rencana korporasi dan rencana bisnis.
- Risiko kepatuhan dikelola dengan cara:
 - (i) Membentuk unit kerja kepatuhan yang independen yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja lain secara berkala;
 - (ii) Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab dan *review* kepatuhan secara berkala;
 - (iii) Menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional;
 - (iv) Menetapkan sistem laporan risiko kepatuhan secara berkala minimal setiap bulan;
 - (v) Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Other non-financial risk (continued)

Initiatives taken to manage legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks as described above, include the following (continued):

- *Strategic risks are managed by:*
 - (i) *Setting up 3 (three) years corporate and business plan in accordance with the Bank's objectives and strategies that have been approved by Boards of Commissioners and Directors by considering the impact to capital, and reviewed at least semi-annually;*
 - (ii) *Setting up a Management Information System with an accurate performance measurement that periodically monitors key initiatives initiated by the Bank and Subsidiary units to achieve business plan goal within the prescribed time; and*
 - (iii) *Establishing guidance to set up and monitor the implementation of strategies including corporate and business plan.*
- *Compliance risks are managed by:*
 - (i) *Forming an independent compliance division which performs active monitoring to other divisions periodically;*
 - (ii) *Establishing procedure of compliance risk control, policies of responsibility and compliance review periodically;*
 - (i) *Establishing procedures to identify and assess compliance risks in all functional activities;*
 - (ii) *Establishing compliance risk report system periodically at the minimum once a month;*
 - (iii) *Setting up a clear segregation of duties between operational, risk control and risk monitoring unit.*

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

44. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

The balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follow :

ASET	2019	2018	ASSETS
Kas			Cash
Dolar Amerika Serikat	26,954	4,967	United States Dollar
Yen Jepang	1,664	-	Japanese Yen
	<u>28,618</u>	<u>4,967</u>	
Giro pada Bank Indonesia			Current accounts with Bank Indonesia
Dolar Amerika Serikat	3,643,053	615,759	United States Dollar
Giro pada bank-bank lain			Current accounts with other banks
Yen Jepang	575,604	1,160	Japanese Yen
Dolar Amerika Serikat	158,708	712,029	United States Dollar
Dolar Singapura	46,378	232	Singapore Dollar
Euro Eropa	35,410	-	European Euro
Baht Thailand	15,955	-	Thailand Baht
Poundsterling Inggris	7,257	-	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	3,173	-	Australian Dollar
Lain-lain	1,596	-	Others
	<u>844,081</u>	<u>713,421</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain			Placement with Bank Indonesia and other banks
Dolar Amerika Serikat	4,484,048	1,855,020	United States Dollar
Efek-efek			Marketable securities
Dolar Amerika Serikat	769,663	-	United States Dollar
Tagihan derivatif			Derivative receivables
Dolar Amerika Serikat	61,947	-	United States Dollar
Tagihan akseptasi			Acceptance receivables
Dolar Amerika Serikat	830,727	-	United States Dollar
Euro Eropa	13,811	-	European Euro
	<u>844,538</u>	<u>-</u>	
Pinjaman yang diberikan			Loans
Dolar Amerika Serikat	36,794,960	-	United States Dollar
Yen Jepang	943,701	-	Japanese Yen
	<u>37,738,661</u>	<u>-</u>	
Aset lain-lain			Other assets
Dolar Amerika Serikat	11,917	8	United States Dollar
Euro Eropa	210	-	European Euro
	<u>12,127</u>	<u>8</u>	
Jumlah aset	<u>48,426,826</u>	<u>3,189,175</u>	Total assets

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG
ASING (lanjutan)

44. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN
CURRENCIES (continued)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
LIABILITAS			LIABILITIES
Giro			<i>Current accounts</i>
Dolar Amerika Serikat	7,866,301	29,398	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	1,036,827	-	<i>Japanese Yen</i>
Lain-lain	40,075	-	<i>Others</i>
	<u>8,943,203</u>	<u>29,398</u>	
Tabungan			<i>Savings deposits</i>
Dolar Amerika Serikat	95,712	22,996	<i>United States Dollar</i>
Dolar Singapura	34,794	4	<i>Singapore Dollar</i>
Yen Jepang	17,854	54	<i>Japanese Yen</i>
	<u>148,360</u>	<u>23,054</u>	
Deposito berjangka dan deposito <i>on call</i>			<i>Time deposits and deposits on call</i>
Dolar Amerika Serikat	2,931,131	4,171,758	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	48,982	-	<i>Japanese Yen</i>
Dolar Singapura	-	21	<i>Singapore Dollar</i>
	<u>2,980,113</u>	<u>4,171,779</u>	
Simpanan dari bank lain			<i>Deposits from other banks</i>
Dolar Amerika Serikat	7,288,212	-	<i>United States Dollar</i>
Liabilitas derivatif			<i>Derivative payables</i>
Dolar Amerika Serikat	54,728	-	<i>United States Dollar</i>
Liabilitas akseptasi			<i>Acceptance payables</i>
Dolar Amerika Serikat	317,218	-	<i>United States Dollar</i>
Euro Eropa	13,811	-	<i>European Euro</i>
Yen Jepang	-	-	<i>Japanese Yen</i>
	<u>331,029</u>	<u>-</u>	
Pinjaman yang diterima			<i>Borrowings</i>
Dolar Amerika Serikat	31,193,978	8,268	<i>United States Dollar</i>
Pinjaman subordinasi			<i>Subordinated loans</i>
Dolar Amerika Serikat	6,038,888	-	<i>United States Dollar</i>
Liabilitas lain-lain			<i>Other liabilities</i>
Dolar Amerika Serikat	158,696	68,750	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	3,050	-	<i>Japanese yen</i>
	<u>161,746</u>	<u>68,750</u>	
Jumlah liabilitas	<u>57,140,257</u>	<u>8,247,481</u>	Total liabilities
Aset (liabilitas) bersih	(8,713,431)	(5,058,306)	Net assets (liabilities)

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), maka pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank.

Berdasarkan Surat Edaran No. 17 tahun 2019 tanggal 23 September 2019, simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 6,50% untuk simpanan dalam Rupiah dan 2,00% untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: 6,75% dan 2%).

Bank dan Entitas Anak adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Premi yang telah dibayarkan selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah Rp 189.114 dan Rp 124.121.

46. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Beberapa amandemen, penyesuaian dan interpretasi standar akuntansi telah terbit tetapi belum efektif untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan belum diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini.

PSAK berikut ini, yang akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020, memiliki pengaruh atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan di masa yang akan datang, dan mungkin akan membutuhkan penerapan secara retrospektif sebagaimana diatur dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan":

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"

45. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation as Substitution of Law No. 7 Year 2009 dated 13 January 2009 regarding with the Determination of Government Regulation as Substitution of Law No. 3 Year 2008, Deposit Insurance Agency ("LPS") was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criterias.

Based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS), the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp 2,000 per depositor per bank as of 31 December 2019 and 31 December 2018.

Based on Press Release Circular Letter No. 17 year 2019 dated 23 September 2019, customer deposits are only covered if the rate of interest is equal to or below 6.50% for deposits denominated in Rupiah and 2.00% for deposits denominated in foreign currency as of 31 December 2019 (31 December 2018: 6.75% and 2%, respectively).

The Bank and Subsidiary both are participants of the guarantee program. Premium paid for the years ended 31 December 2019 and 2018 was Rp 189,114 and Rp 124,121, respectively.

46. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Certain amendments, revisions and interpretations of accounting standards have been issued but are not yet effective for the year ended 31 December 2019, and have not been applied in preparing these consolidated financial statements.

The following PSAKs, which will become effective starting 1 January 2020, have an effect on the Company's future consolidated financial statements, and may require retrospective application under PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors":

- PSAK 71 "Financial Instruments"
- PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers"
- PSAK 73 "Leases"
- Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"
- Annual Improvement to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen telah menentukan dampak dari pengaruh retrospektif atas penerapan standar-standar di atas, dimana tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan, kecuali atas penerapan standar-standar berikut:

PSAK 71 “Instrumen Keuangan”

PSAK No. 71 menggantikan hampir semua ketentuan di PSAK No. 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Dalam PSAK ini terdapat ketentuan yang direvisi untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, metode kerugian kredit ekspektasian yang baru untuk menghitung penurunan nilai aset keuangan, persyaratan umum baru untuk akuntansi lindung nilai, dan tambahan pengungkapan. PSAK ini meneruskan ketentuan untuk pengakuan dan penghentian pengakuan instrumen keuangan yang diambil dari PSAK No. 55.

Penerapan secara retrospektif secara umum disyaratkan, kecuali untuk akuntansi lindung nilai. Untuk akuntansi lindung nilai, ketentuan secara umum diterapkan secara prospektif, dengan beberapa pengecualian yang terbatas. Saat ini Bank tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan akuntansi lindung nilai.

Penyajian kembali informasi komparatif tidak diwajibkan. Jika informasi komparatif tidak disajikan kembali, dampak kumulatif dicatat pada saldo awal ekuitas (saldo laba) pada tanggal penerapan awal.

i. Klasifikasi dan pengukuran – aset keuangan dan liabilitas

PSAK No. 71 ini mengatur klasifikasi baru untuk aset keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis dimana aset dikelola.

PSAK No. 71 mencakup tiga kategori untuk klasifikasi aset keuangan yaitu diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (“FVOCI”) dan nilai wajar melalui laba rugi (“FVTPL”). Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari kategori ini pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual; dan

**46. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING
STANDARDS (continued)**

As of the issuance of these consolidated financial statements, management has assessed the extent of the retrospective impact that the future adoption on the above standards, for which there are no significant impact to the Company’s financial position and operating results, except on the adoption of the following standards:

PSAK 71 “Financial Instruments”

PSAK No. 71 replaces most of the existing requirements in PSAK No. 55, “Financial Instruments: Recognition and Measurement”. It includes revised guidance on classification and measurement of financial instruments, a new expected credit loss model for calculating impairment on financial assets, new general hedge accounting requirements, and additional disclosures. It also carries forward the requirements on recognition and derecognition of financial instruments from PSAK No. 55.

Retrospective application is generally is required, except for hedge accounting. For hedge accounting, the requirements are generally applied prospectively, with some limited exceptions. Currently the Bank did not enter into transactions related to the hedging accounting.

Restatement of comparative information is not mandatory. If comparative information is not restated, the cumulative effect is recorded in opening equity (retained earnings) on initial implementation date.

i. Classification and measurement – financial assets and liabilities

PSAK No. 71 contains a new classification for financial assets based on their contractual cash flow characteristics and the business model in which assets are managed.

PSAK No. 71 includes three categories for financial assets which are measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income (“FVOCI”) and fair value through profit or loss (“FVTPL”). Financial asset is classified into one of these categories on initial recognition.

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows; and*

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

**46. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING
STANDARDS (continued)**

PSAK 71 “Instrumen Keuangan”

PSAK 71 “Financial Instruments”

**i. Klasifikasi dan pengukuran – aset keuangan
dan liabilitas (lanjutan)**

**i. Classification and measurement–financial
assets and liabilities (continued)**

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang

- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

Aset keuangan diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

A financial asset is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur pada FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Pada pengakuan awal atas instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, Bank dapat melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan perubahan selanjutnya dalam nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain. Pemilihan ini dilakukan dengan basis per investasi.

On initial recognition of an equity investment that is not held for trading, the Bank may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value in other comprehensive income. This election is made on an investment-by-investment basis.

PSAK No. 71 mempertahankan hampir semua kriteria sesuai dengan PSAK No. 55 untuk klasifikasi liabilitas keuangan.

PSAK No. 71 largely retains the existing requirements in PSAK No. 55 for the classification of financial liabilities.

Berdasarkan penilaian awal secara umum atas kemungkinan perubahan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2019, Bank memperkirakan perubahan terhadap klasifikasi dan pengukuran tidak akan memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Based on its preliminary high-level assessment of possible changes to the classification and measurement of financial assets held as at 31 December 2019, the Bank expects the change in classification and measurement will not have material impact to the consolidated financial statements.

ii. Penurunan nilai aset keuangan

ii. Impairment of financial assets

PSAK No. 71 menggantikan model kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) pada PSAK No. 55 dengan model kerugian kredit ekspektasian yang *forward looking (forward looking expected credit losses - “ECL”)*. Hal ini mengharuskan pertimbangan atas bagaimana keadaan ekonomi mempengaruhi ECL, yang akan ditentukan berdasarkan rata-rata probabilitas tertimbang.

PSAK No. 71 replaces the “incurred loss” model in PSAK No. 55 with a forward-looking expected credit loss (ECL). This will require considerable judgment over how changes in economic factors affect ECLs, which will be determined on a probability-weighted basis.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

PSAK 71 “Instrumen Keuangan” (lanjutan)

ii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Model penurunan nilai yang baru diterapkan untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak diukur pada FVTPL, termasuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan.

PSAK No. 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *12-month ECL* adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime ECL*, kecuali dalam kondisi berikut dimana cadangan kerugian sejumlah *12-month ECL* yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Risiko kredit belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal instrumen keuangan bersangkutan.

Kriteria penurunan nilai menurut PSAK No. 71 adalah kompleks dan memerlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi manajemen, terutama untuk area berikut:

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward looking* dalam pengukuran *ECL*.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Bank masih terus menyempurnakan model perhitungan *expected credit loss* dan proses operasional.

**46. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING
STANDARDS (continued)**

PSAK 71 “Financial Instruments” (continued)

ii. Impairment of financial assets (continued)

The new impairment model applies to the all financial instruments that are not measured at FVTPL, including loan commitments and financial guarantee contracts issued.

PSAK No. 71 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-month ECLs or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Bank will recognize loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except in the following cases, for which the amount recognized will be 12-month ECLs:

- *The financial instruments with low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the sovereign risk rating of Republic of Indonesia; and*
- *Financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The impairment requirements of PSAK No. 71 are complex and require management judgments, estimates and assumptions, particularly in the following areas:

- *Assessing whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and*
- *Incorporating forward-looking information into the measurement of ECLs.*

As at the authorization date of this consolidated financial statements, the Bank is still continuously refining the expected credit loss models and operational processes.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

**46. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING
STANDARDS (continued)**

PSAK 71 “Instrumen Keuangan” (lanjutan)

PSAK 71 “Financial Instruments” (continued)

iii. Pengungkapan

iii. Disclosures

PSAK No. 71 mengharuskan pengungkapan baru yang lebih luas, terutama risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian. Evaluasi Bank termasuk analisa data untuk mengidentifikasi data yang tidak dapat diidentifikasi dalam proses saat ini dan saat ini Bank sedang dalam tahap implementasi sistem dan perubahan pengendalian yang diyakini diperlukan untukmendapatkan data untuk pengungkapan.

PSAK No. 71 requires extensive new disclosures, in particular about credit risks and expected credit losses. The Bank’s assessment included an analysis to identify unidentified data in current processes and the Bank is currently implement the system and controls changes that believe will be necessary to capture the required data for disclosures.

PSAK 73 “Sewa”

PSAK 73 “Leases”

PSAK 73 memperkenalkan model tunggal pengakuan sewa di neraca untuk akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa untuk menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah.

PSAK 73 introduces a single, on-balance sheet lease accounting model for lessees. A lessee recognises a right-of-use asset representing its right to use the underlying asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value items.

PSAK 73 menggantikan PSAK 30 “Sewa”, ISAK 8 “Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa”, ISAK 23 “Sewa Operasi – Insentif”, dan ISAK 24 “Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa”.

PSAK 73 replaces existing leases guidance, including PSAK 30 “Leases”, ISAK 8 “Determining Whether an Arrangement Contains a Lease”, ISAK 23 “Operating Leases – Incentives”, and ISAK 24 “Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease”.

Bank telah melakukan penilaian awal atas dampak potensial terhadap laporan keuangannya, namun belum menyelesaikan penilaian terperinci. Dampak aktual penerapan PSAK 73 pada laporan keuangan pada periode penerapan awal akan tergantung pada kondisi ekonomi di masa depan, pengembangan portofolio sewa Bank, penilaian Bank apakah akan menggunakan pilihan untuk pembaruan sewa, dan sejauh mana Bank memilih untuk menggunakan tindakan praktis dan pengecualian pengakuan.

The Bank has completed an initial assessment of the potential impact on its financial statements, but has not yet completed its detailed assessment. The actual impact of applying PSAK 73 on the financial statements in the period of initial application will depend on future economic conditions, the development of the Bank’s lease portfolio, the Bank’s assessment of whether it will exercise any lease renewal options and the extent to which the Bank chooses to use practical expedients and recognition exemptions.

Bank akan mengakui aset dan liabilitas baru untuk sewa operasi gedung kantor dan kantor cabang. Pengakuan beban yang terkait dengan sewa ini akan berubah karena PSAK 73 menggantikan biaya sewa operasi dengan basis garis lurus dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

The Bank will recognize new assets and liabilities for its operating leases of office premises and branch. The nature of expenses related to these leases will change due to PSAK 73 replaces the straight-line operating lease expense with a depreciation charge for right-of-use assets and interest expense on lease liabilities.

Sebelumnya, Bank mengakui beban sewa operasi berdasarkan garis lurus selama masa sewa, dan mengakui aset dan liabilitas hanya sejauh ketika terdapat perbedaan waktu antara pembayaran sewa aktual dan beban yang diakui.

Previously, the Bank recognized operating lease expense on a straight-line basis over the term of the lease, and recognised assets and liabilities only to the extent that there was a timing difference between actual lease payments and the expense recognised.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank mengestimasi kenaikan kurang dari 1% atas total aset dikarenakan pengakuan aset hak-guna dan kenaikan kurang dari 1% atas total liabilitas dikarenakan penambahan liabilitas sewa.

As of 1 January 2020, Bank estimated the increase of total assets by less than 1% from recognition of right-of-use assets and increase of total liabilities by less than 1% from additional lease liabilities.

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. REKONSILIASI UTANG BERSIH

47. NET DEBT RECONCILIATION

	Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>	Utang obligasi/ <i>Bonds payable</i>	Surat utang jangka menengah/ <i>Medium term notes</i>	Pinjaman subordinasi/ <i>Subordinated Loans</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Utang bersih tanggal 1 Januari 2018	5,250,207	2,580,777	-	-	7,830,984	Net debt as of 1 January 2018
Arus kas	3,222,646	(1,350,000)	-	-	1,872,646	Cash flows
Perubahan lain*)	84,021	(13,460)	-	-	70,561	Other changes *)
Utang bersih tanggal 31 Desember 2018	8,556,874	1,217,317	-	-	9,774,191	Net debt as of 31 December 2018
Efek dari penggabungan usaha	30,221,176	-	1,314,228	6,108,270	37,643,674	Effect of merger
Arus kas	(559,079)	690,008	-	-	130,929	Cash flows
Perubahan lain*)	(30,045)	(13,074)	8,435	(63,077)	(97,761)	Other changes *)
Utang bersih tanggal 31 Desember 2019	38,188,926	1,894,251	1,322,663	6,045,193	47,451,033	Net debt as of 31 December 2019

*) Perubahan lain termasuk pergerakan non-kas yang merupakan dampak perubahan selisih kurs, amortisasi biaya transaksi, dan akrual beban bunga

*) Other changes include non-cash movements which are effect of exchange rate, amortisation of transaction cost, and accrued interest expenses

**48. PENYAJIAN KEMBALI INFORMASI
KOMPARATIF ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**48. RESTATEMENT OF THE COMPARATIVE
INFORMATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

Pada tahun 2019, Bank menemukan angka yang tidak akurat pada laporan keuangan konsolidasian Bank tahun 2018 dan sebelumnya, untuk akun beban dibayar dimuka asuransi kredit, beban asuransi kredit, dan saldo laba, yang disebabkan oleh revisi atas perhitungan biaya asuransi kredit pensiun dan proses rekonsiliasi atas beban dibayar dimuka asuransi kredit pensiun. Pada tanggal penyelesaian dan persetujuan untuk penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Bank telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah angka yang tidak akurat di akun-akun tersebut.

In 2019, the Bank found inaccurate figures in the consolidated financial statements of 2018 and before, for the prepayment of loans insurance, loan insurance expenses, and retained earnings accounts, which were due to the revision to calculation of loan insurance expenses and reconciliation process on prepayment of loans insurance. As of the completion and approval date of these consolidated financial statements, the Bank has taken the necessary steps to resolve the inaccurate figures on those accounts.

Tabel di bawah ini menyajikan penyesuaian terhadap informasi komparatif yang disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang berhubungan dengan ketidakakuratan seperti yang dijelaskan di atas:

The table below presents adjustments to the comparative information presented in these consolidated financial statements relating to the inaccuracies as described above:

31 Desember/December 2018			
	Dilaporkan sebelumnya/ <i>As previously reported</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustments</i>	Setelah penyajian kembali/ <i>As restated</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian			
<u>Aset</u>			
Beban dibayar dimuka	2,805,155	(578,077)	2,227,078
<u>Ekuitas</u>			
Saldo laba - belum dicadangkan	15,776,300	(578,077)	15,198,223
Tahun berakhir 31 Desember/Year ended 31 December 2018			
	Dilaporkan sebelumnya/ <i>As previously reported</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustments</i>	Setelah penyajian kembali/ <i>As restated</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian			
<u>Beban operasional lainnya</u>			
Beban umum dan administrasi	(2,597,094)	(129,820)	(2,726,914)

*Consolidated statement of
financial position*
Assets
Prepayments

Equity
*Retained earnings -
unappropriated*

*Consolidated statement of
profit or loss and other
comprehensive income*

Other operating expenses
*General and administrative
expenses*

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. PENYAJIAN KEMBALI INFORMASI
KOMPARATIF ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Informasi komparatif untuk laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2018 (yang berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017) juga disesuaikan untuk mencerminkan saldo yang disajikan kembali, sebagai berikut:

48. RESTATEMENT OF THE COMPARATIVE
INFORMATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)

Comparative information for the consolidated financial statements as of 1 January 2018 (which are derived from the consolidated financial statements as of 31 December 2017) is also adjusted to reflect the restated balance, as follows:

1 Januari/January 2018				
Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Penyesuaian/ Adjustments	Setelah penyajian kembali/ As restated		
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statement of financial position	
<u>Aset</u>			<u>Assests</u>	
Beban dibayar dimuka	2,733,440	(448,257)	2,285,183	Prepayments
<u>Ekuitas</u>			<u>Equity</u>	
Saldo laba - belum dicadangkan	14,227,025	(448,257)	13,778,768	Retained earnings - unappropriated

Penyajian kembali tidak mempengaruhi klasifikasi jumlah arus kas konsolidasian dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang dilaporkan sebelumnya, maupun mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta harga saham Bank di pasar.

The restatement neither affect the classification of the amount of consolidated cash flows from operating, investing and financing activities which were previously reported, nor affect the going concern of the Bank's business and the price of the Bank's shares in the market.

49. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif pada tanggal 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018/ 31 Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019.

49. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the comparative information as of 31 December 2018 and 1 January 2018/ 31 December 2017 have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated statement of financial position as of 31 December 2019.

31 Desember/December 2018				
Sebelum reklasifikasi/ Before reclassifications*	Reklasifikasi/ Reclassifications	Setelah reklasifikasi/ After reclassifications*		
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statement of financial position	
<u>Liabilitas</u>			<u>Liabilities</u>	
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	17.035	17.035	Undistributed revenue sharing
<u>Dana syirkah temporer</u>			<u>Temporary syirkah funds</u>	
Beban bagi hasil yang masih harus dibayar	17.035	(17.035)	-	Accrued profit sharing expenses
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian			Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income	
<u>Pendapatan operasional lainnya</u>			<u>Other operating income</u>	
Pendapatan operasional lainnya	755,937	28,424	784,361	Other operating income
Keuntungan (kerugian) dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	(155,033)	(29,189)	(184,222)	Net gain (loss) on foreign exchange and derivative transactions
<u>Beban operasional lainnya</u>			<u>Other operating expenses</u>	
Beban umum dan administrasi	(2,726,914)	(3,924)	(2,730,838)	General and administrative expenses
Beban operasional lainnya	(339,483)	3,924	(335,559)	Other operating expenses
<u>Pendapatan (beban) non-operasional</u>			<u>Non-operating income (expenses)</u>	
Pendapatan non-operasional	6,475	(1,353)	5,122	Non-operating income
Beban non-operasional	(35,568)	2,118	(33,450)	Non-operating expenses

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

PT BANK BTPN Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

49. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)

	1 Januari/January 2018/ 31 Desember/December 2017			
	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassifications*	Reklasifikasi/ Reclassifications	Setelah reklasifikasi/ After reclassifications*	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
<u>Liabilitas</u>				<u>Liabilities</u>
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	13.735	13.735	Undistributed revenue sharing
<u>Dana syirkah temporer</u>				<u>Temporary syirkah funds</u>
Beban bagi hasil yang masih harus dibayar	13.735	(13.735)	-	Accrued profit sharing expenses

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

50. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

50. SUBSEQUENT EVENT

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan telah mengadopsi PSAK 71 (Catatan 46) dan menerapkan perhitungan cadangan kerugian kredit ekspektasian yang *forward looking* ("ECL") atas aset keuangannya. Karena kejadian luar biasa terkait *Coronavirus Disease 2019* ("COVID-19"), di bulan Maret 2020, World Health Organization telah menyatakan pandemi, dan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian atas COVID-19 telah berlangsung di Indonesia. Situasi ini telah mengganggu aktivitas usaha dan ekonomi global, termasuk Indonesia. Perseroan terus memantau situasi terkait COVID-19 tersebut, menilai dan merespon secara aktif atas dampaknya ke posisi keuangan dan hasil operasi. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, penilaian tersebut masih berlangsung. Perseroan akan mempertimbangkan dampak dan tingkat probabilitas skenario ekonomi yang memburuk akibat situasi terkait COVID-19 tersebut ketika mengestimasi ECL pada tahun 2020.

Effective 1 January 2020, the company adopted PSAK 71 (Note 46) and applied forward-looking expected credit loss ("ECL") in determining impairment losses for its financial assets. Since the outbreak of *Coronavirus Disease 2019* ("COVID-19"), in March 2020, World Health Organization has declared a pandemic, and the prevention and control of the COVID-19 has been going on in Indonesia. The situation has distracted global, including Indonesia, business and economic activities. The company will keep continuous attention on the situation of the COVID-19, assess and react actively to its impacts on the financial position and operating results. Up to the date of the consolidated financial statements, the assessment is still in progress. The company will consider the impacts and likelihood of the downside economic scenarios following the situation of COVID-19 when estimating the ECL in 2020.

51. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

51. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Perseroan menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan PT Bank BTPN Tbk (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT Bank BTPN Tbk (Entitas Induk) (halaman 202-210) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak.

The Company issued the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of PT Bank BTPN Tbk (Parent Entity) which account for investments in Subsidiary using the cost method, have been prepared in order that the parent entity's results of operations can be analysed. The following supplementary financial information of PT Bank BTPN Tbk (Parent Entity) (pages 202-210) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT Bank BTPN Tbk and Subsidiary.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 1.1

APPENDIX 1.1

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018***

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018***

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2019	2018*	
ASET			ASSETS
Kas	1,587,729	1,422,553	Cash
Giro pada Bank Indonesia	8,528,677	4,850,092	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain:			Current accounts with other banks
- Pihak ketiga	317,982	804,578	Third parties -
- Pihak berelasi	725,450	21,912	Related parties -
	<u>1,043,432</u>	<u>826,490</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	6,189,876	9,203,619	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	218	846	Accrued interest income
	<u>6,190,094</u>	<u>9,204,465</u>	
Efek-efek			Marketable securities
- Pihak ketiga	8,496,766	5,775,718	Third parties -
- Pihak berelasi	86,105	-	Related parties -
	<u>8,582,871</u>	<u>5,775,718</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	33,397	52,738	Accrued interest income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6)	-	Less: Allowance for impairment losses
	<u>8,616,262</u>	<u>5,828,456</u>	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1,591,672	Securities purchased under resale agreements
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	8,283	Accrued interest/margin income
	<u>-</u>	<u>1,599,955</u>	
Tagihan derivatif			Derivative receivables
- Pihak ketiga	778,690	-	Third parties -
- Pihak berelasi	61,682	-	Related parties -
	<u>840,372</u>	<u>-</u>	
Tagihan akseptasi	1,692,460	-	Acceptance receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(69)	-	Less: Allowance for impairment losses
	<u>1,692,391</u>	<u>-</u>	
Pinjaman yang diberikan:			Loans:
- Pihak ketiga	130,627,900	60,840,986	Third parties -
- Pihak berelasi	2,132,709	18,632	Related parties -
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	737,758	523,380	Accrued interest income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,175,080)	(918,116)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>132,323,287</u>	<u>60,464,882</u>	
Penyertaan saham	1,303,643	1,283,192	Investment in shares
Beban dibayar dimuka	2,140,893	2,137,716	Prepayments
Pajak dibayar dimuka			Prepaid taxes:
- Pajak penghasilan	321,312	53,308	Corporate income tax -
Aset pajak tangguhan	-	116,150	Deferred tax assets
Aset tetap	3,201,234	2,899,291	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1,517,038)	(1,289,365)	Less: Accumulated depreciation
	<u>1,684,196</u>	<u>1,609,926</u>	
Aset tak berwujud	2,009,007	1,510,528	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(1,068,375)	(676,549)	Less: Accumulated amortisation
	<u>940,632</u>	<u>833,979</u>	
Aset lain-lain	279,814	320,329	Other assets
JUMLAH ASET	<u>167,492,734</u>	<u>90,551,493</u>	TOTAL ASSETS

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

LAMPIRAN 1.2

APPENDIX 1.2

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018***

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018***

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2019	2018*	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas segera	8,644	11,648	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah:			Deposits from customers :
- Pihak ketiga	76,954,291	62,235,033	Third parties -
- Pihak berelasi	538,639	997,564	Related parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar	210,601	233,429	Accrued interest expenses
	<u>77,703,531</u>	<u>63,466,026</u>	
Simpanan dari bank-bank lain:			Deposits from other banks:
- Pihak ketiga	4,368,251	42,975	Third parties -
- Pihak berelasi	7,291,425	-	Relate parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar	57,081	-	Accrued interest expenses
	<u>11,716,757</u>	<u>42,975</u>	
Liabilitas derivatif	894,947	116,521	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	888,459	-	Acceptance payables
Utang pajak:			Taxes payable:
- Pajak penghasilan	60,894	214,287	Income taxes -
- Pajak lain-lain	101,416	90,897	Other taxes -
	<u>162,310</u>	<u>305,184</u>	
Efek-efek yang diterbitkan:			Securities issued:
- Surat utang jangka menengah	1,301,409	-	Medium term notes -
- Utang obligasi	1,889,219	1,197,442	Bonds payable -
Beban bunga yang masih harus dibayar	26,286	19,875	Accrued interest expenses
	<u>3,216,914</u>	<u>1,217,317</u>	
Pinjaman yang diterima:			Borrowings:
- Pihak ketiga	6,868,795	7,386,939	Third parties -
- Pihak berelasi	31,193,978	1,078,500	Related parties -
Beban transaksi yang belum diamortisasi	(15,318)	(22,674)	Unamortised transaction costs
Beban bunga yang masih harus dibayar	141,471	114,109	Accrued interest expenses
	<u>38,188,926</u>	<u>8,556,874</u>	
Akrual	266,545	139,058	Accruals
Liabilitas imbalan kerja karyawan:			Employee benefits liabilities:
- Imbalan kerja jangka pendek	360,987	335,535	Short-term employee benefits -
- Imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya	26,436	22,791	Post-employment and other - long-term employees benefits
	<u>387,423</u>	<u>358,326</u>	
Liabilitas pajak tangguhan	53,052	-	Deferred tax liability
Pinjaman subordinasi	6,038,888	-	Subordinated loans
Beban bunga yang masih harus dibayar	6,305	-	Accrued interest expenses
	<u>6,045,193</u>	<u>-</u>	
Liabilitas lain-lain	661,432	326,105	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u>140,194,133</u>	<u>74,540,034</u>	TOTAL LIABILITIES

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 1.3

APPENDIX 1.3

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018***

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018***

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/December</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018*</u>	
EKUITAS			SHAREHOLDERS' EQUITY
Modal saham -			<i>Share capital -</i>
Modal dasar Rp 300.000			<i>Authorised capital of Rp 300,000</i>
terdiri dari:			<i>consists of:</i>
15.000.000.000 saham			<i>15,000,000,000 shares</i>
dengan nilai nominal			<i>with par value of</i>
Rp 20 (nilai penuh) per saham			<i>Rp 20 (full amount) per share</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar			<i>Issued and fully paid-up capital is</i>
8.148.928.869 saham			<i>8,148,928,869 shares</i>
(31 Desember 2018: 5.851.646.757 saham)	162,979	117,033	<i>(31 December 2018: 5,851,646,757 shares)</i>
Tambahan modal disetor	11,168,215	1,458,886	<i>Additional paid-in capital</i>
Cadangan revaluasi aset tetap	797,886	797,886	<i>Reserve on revaluation of fixed assets</i>
Cadangan pembayaran berbasis saham	244,012	281,748	<i>Share-based payment reserve</i>
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	12,079	3,033	<i>Unrealised gain on available for sale marketable securities</i>
Saldo laba			<i>Retained earnings</i>
- Dicadangkan	23,361	23,361	<i>Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan	15,152,473	13,591,916	<i>Unappropriated -</i>
	<u>27,561,005</u>	<u>16,273,863</u>	
Saham treasuri	<u>(262,404)</u>	<u>(262,404)</u>	<i>Treasury shares</i>
JUMLAH EKUITAS	<u>27,298,601</u>	<u>16,011,459</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>167,492,734</u>	<u>90,551,493</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

LAMPIRAN 2.1

APPENDIX 2.1

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018***

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018***

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>	
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA			INTEREST INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	14,627,058	10,679,385	Interest income
Beban bunga	(7,513,059)	(4,158,571)	Interest expense
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	<u>7,113,999</u>	<u>6,520,814</u>	NET INTEREST INCOME
Pendapatan operasional lainnya:			Other operating income:
Pendapatan komisi asuransi dan lain-lain	957,068	775,241	Insurance commission income and others
Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivative bersih	586,759	(184,222)	Net gain (loss) from spot and derivative transactions
	<u>1,543,827</u>	<u>591,019</u>	
Beban operasional lainnya:			Other operating expenses:
Beban kepegawaian	(2,230,610)	(1,911,974)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	(2,702,171)	(2,194,348)	General and administrative expenses
Kerugian penurunan nilai	(1,136,480)	(1,099,370)	Impairment losses
Beban operasional lain-lain	(437,110)	(260,933)	Other operating expenses
	<u>(6,506,371)</u>	<u>(5,466,625)</u>	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	<u>2,151,455</u>	<u>1,645,208</u>	NET OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional	3,084	2,537	Non-operating income
Beban non-operasional	(13,866)	(27,335)	Non-operating expenses
	<u>(10,782)</u>	<u>(24,798)</u>	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>2,140,673</u>	<u>1,620,410</u>	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	<u>(547,889)</u>	<u>(457,656)</u>	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	<u><u>1,592,784</u></u>	<u><u>1,162,754</u></u>	NET PROFIT FOR THE YEAR

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 2.2

APPENDIX 2.2

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018***
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
31 DECEMBER 2019 AND 2018***
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan revaluasi asset tetap	-	77,104	Gain on revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(42,969)	176,777	Remeasurements from employee benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	10,742	(44,195)	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss
	<u>(32,227)</u>	<u>209,686</u>	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	12,062	(9,037)	Unrealised gain (loss) on available for sale marketable securities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	(3,016)	(805)	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss
	<u>9,046</u>	<u>(9,842)</u>	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	<u>(23,181)</u>	<u>199,844</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	<u>1,569,603</u>	<u>1,362,598</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)			EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)
Dasar	<u>203</u>	<u>202</u>	Basic
Dilusian	<u>200</u>	<u>197</u>	Diluted

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITYLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018*
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018*
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital	Cadangan revaluasi aset tetap/ Reserve on revaluation of fixed assets	Pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealised gain on sale available for marketable securities	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya / Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated retained earnings	Saham treasury/ Treasury shares	Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as of 1 January 2019
Saldo tanggal 1 Januari 2019	117,033	1,458,886	797,886	281,748	3,033	23,361	13,591,916	(262,404)	16,011,459	Net profit for the year
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	1,592,784	-	1,592,784	Other comprehensive income: Changes in fair value of available for sale financial assets
Laba komprehensif lainnya: Perubahan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	12,062	-	-	-	12,062	Remeasurements of employee benefits
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	-	(42,969)	-	(42,969)	Liabilities
Efek pajak terkait	-	-	-	-	(3,016)	-	10,742	-	7,726	Related tax effect
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	-	-	9,046	-	1,560,557	-	1,569,603	Total comprehensive income during the year
Efek dari penggabungan usaha	45,937	9,708,197	-	-	-	-	-	-	9,754,134	Impact of merger
Opsi saham:										Share option:
Penerimaan dari penerbitan saham	9	1,132	-	-	-	-	-	-	1,141	Proceed from shares issued
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	(37,736)	-	-	-	-	(37,736)	Share-based payments
Saldo tanggal 31 Desember 2019	162,979	11,168,215	797,886	244,012	12,079	23,361	15,152,473	(262,404)	27,298,601	Balance as of 31 December 2019

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITYLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018*
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018*
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital	Cadangan revaluasi aset tetap/ Reserve on revaluation of fixed assets	Pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealised gain on sale available for marketable securities	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Saham treasury/ Treasury shares	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo tanggal 1 Januari 2018	116,806	1,429,385	720,782	254,496	12,875	23,361	13,319,346	(262,404)	15,614,647
Dampak penyajian kembali mengenai beban dibayar dimuka, setelah pajak penghasilan	-	-	-	-	-	-	(448,257)	-	(448,257)
Saldo tanggal 1 Januari 2018, setelah penyajian kembali	116,806	1,429,385	720,782	254,496	12,875	23,361	12,871,089	(262,404)	15,166,390
Laba bersih akhir tahun	-	-	-	-	-	-	1,162,754	-	1,162,754
Laba (rugi) komprehensif lainnya:									
Cadangan revaluasi aset tetap	-	-	77,104	-	-	-	-	-	77,104
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	(9,037)	-	-	-	(9,037)
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	-	176,777	-	176,777
Efek pajak terkait	-	-	-	-	(805)	-	(44,195)	-	(45,000)
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	77,104	-	(9,842)	-	1,295,336	-	1,362,598
Dividen	-	-	-	-	-	-	(574,509)	-	(574,509)
Opsi saham:									
Penerimaan dari penerbitan saham	227	29,501	-	-	-	-	-	-	29,728
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	27,252	-	-	-	-	27,252
Saldo tanggal 31 Desember 2018	117,033	1,458,886	797,886	281,748	3,033	23,361	13,591,916	(262,404)	16,011,459

*Setelah penyajian kembali (Catatan 48)

* After restatement (Note 48)

LAMPIRAN 4.1

APPENDIX 4.1

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan bunga	14,743,478	10,801,125	<i>Receipts of interest income</i>
Pembayaran beban bunga	(7,687,456)	(4,041,859)	<i>Payments of interest expense</i>
Penerimaan dari pendapatan provisi dan komisi	1,539,703	601,897	<i>Receipts from fee and commission income</i>
Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan	109,567	118,333	<i>Recovery from written-off loans</i>
Pembayaran beban kepegawaian	(2,282,217)	(1,677,007)	<i>Payments of personnel expenses</i>
Pembayaran beban operasional lainnya	(2,269,151)	(2,272,075)	<i>Payments of other operating expenses</i>
Pembayaran lain-lain	(6,631)	(23,643)	<i>Other payments</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan	(747,635)	(243,369)	<i>Payments of corporate income tax</i>
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	3,399,658	3,263,402	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
(Kenaikan) penurunan dalam aset operasional:			<i>(Increase) decrease in operating assets:</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,591,672	(79,664)	<i>Securities purchased under resale agreement</i>
Pinjaman yang diberikan	(4,980,410)	(2,520,514)	<i>Loans</i>
Tagihan derivatif	(53,974)	2,338	<i>Derivative receivables</i>
Tagihan akseptasi	966,125	-	<i>Acceptance receivables</i>
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasional:			<i>Increase (decrease) in operating liabilities:</i>
Liabilitas segera	(3,004)	(16,983)	<i>Obligation due immediately</i>
Simpanan nasabah	(15,804,325)	1,860,403	<i>Deposits from customers</i>
Simpanan dari bank-bank lain	4,822,718	(816,382)	<i>Deposits from other banks</i>
Liabilitas derivatif	(222,689)	113,635	<i>Derivative payables</i>
Liabilitas akseptasi	(1,086,023)	-	<i>Acceptance receivables</i>
Arus kas (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(11,370,252)	1,806,235	Net cash flows (used in) provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek	(28,997,061)	(8,669,075)	<i>Purchases of marketable securities</i>
Penerimaan dari pelepasan efek-efek	31,122,898	9,082,616	<i>Proceeds from disposal of marketable securities</i>
Pembelian aset tetap	(204,941)	(301,482)	<i>Purchases of fixed assets</i>
Perolehan aset takberwujud	(359,041)	(369,875)	<i>Acquisition of intangible assets</i>
Hasil dari penjualan aset tetap	3,864	1,415	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Pengalihan kas dan setara kas sehubungan dengan penggabungan usaha	11,289,137	-	<i>Cash and cash equivalents transfer due to merger</i>
Penambahan penyertaan saham	2,049	-	<i>Additional investment in shares</i>
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	12,856,905	(256,401)	Net cash flows provided from (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang obligasi	(300,000)	(1,350,000)	<i>Payments of bonds payable</i>
Penerimaan dari obligasi yang diterbitkan	1,000,000	-	<i>Proceeds from issuance of bonds</i>
Pembayaran biaya emisi obligasi	(9,992)	-	<i>Payments of bonds issuance cost</i>
Pembayaran biaya transaksi pinjaman	(7,077)	(7,297)	<i>Payments of borrowing transaction cost</i>
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	172,265,489	10,287,664	<i>Proceeds from borrowings</i>
Pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima	(172,817,491)	(7,065,018)	<i>Installment payments and settlement of borrowings</i>
Pembayaran dividen	-	(574,509)	<i>Payments of dividend</i>
Penerimaan dari penerbitan saham	1,141	29,728	<i>Proceeds from shares issued</i>
Akuisisi kepentingan pada Entitas Anak dari kepentingan non-pengendali	-	(550,045)	<i>Acquisition of Subsidiary from non-controlling shareholder</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	132,070	770,523	Net cash flows provided from financing activities

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 4.2

APPENDIX 4.2

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1,618,723	2,320,357	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(35,026)	(10,878)	EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>16,302,754</u>	<u>13,993,275</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u><u>17,886,451</u></u>	<u><u>16,302,754</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

	<u>31 Desember/December</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			<i>Cash and cash equivalents at end of year consists of:</i>
Kas	1,587,729	1,422,553	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	8,528,677	4,850,092	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank-bank lain	1,043,432	826,490	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	6,189,876	9,203,619	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Efek-efek	536,737	-	<i>Marketable securities</i>
	<u><u>17,886,451</u></u>	<u><u>16,302,754</u></u>	

INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS:

**SUPPLEMENTAL CASH FLOWS
INFORMATION:**

**AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI
ARUS KAS**

**ACTIVITIES NOT AFFECTING
CASH FLOWS**

Penerbitan modal saham sehubungan dengan penggabungan usaha	9,754,134	-	<i>Issuance of shares in relation with merger</i>
Cadangan pembayaran berbasis saham	37,736	27,252	<i>Share-based payment reserves</i>
Pembelian aset tetap yang masih terhutang	(1,402)	(1,979)	<i>Acquisition of fixed assets still unpaid</i>

Referensi SEOJK

NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

Keterangan		Halaman
I. Ketentuan Umum		
1.	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√
2.	Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√
3.	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√
4.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.	√
II. Bentuk Laporan Tahunan		
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√
2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√
3.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√
III. Isi Laporan Tahunan		
1.	Ketentuan Umum	
a.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	
1)	ikhtisar data keuangan penting;	6-9
2)	informasi saham (jika ada);	10-11
3)	laporan Direksi;	32-47
4)	laporan Dewan Komisaris;	24-31
5)	profil Emiten atau Perusahaan Publik;	52-105
6)	analisis dan pembahasan manajemen;	106-145
7)	tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	206-299
8)	tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	300-312
9)	laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	313-528
10)	surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	50-51
b.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;	√
2.	Uraian Isi Laporan Tahunan	
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	6-9
	Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	
1)	pendapatan/penjualan;	6
2)	laba bruto;	6
3)	laba (rugi);	6
4)	jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	6
5)	total laba (rugi) komprehensif;	6
6)	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	6
7)	laba (rugi) per saham;	6
8)	jumlah aset;	6
9)	jumlah liabilitas;	6
10)	jumlah ekuitas;	6
11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	7
12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	7
13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	7
14)	rasio lancar;	7
15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas;	7
16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	7
17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	7
b.	Informasi Saham	10-11
	Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	
1)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	
a)	jumlah saham yang beredar;	11
b)	kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	11
c)	harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	11
d)	volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	11
	Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;	√
	Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	√

	Keterangan	Halaman
2)	dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	
	a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	12
	b) rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham	12
	c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	12
	d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	12
3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	-
4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;	-
c.	Laporan Direksi	32-47
	Laporan Direksi paling sedikit memuat:	
	1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	
	a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	36
	b) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	35-36
	c) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	35-36
	2) gambaran tentang prospek usaha;	39
	3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	40
	4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	40
d.	Laporan Dewan Komisaris	24-31
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	
	1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	26
	2) pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	27
	3) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	29
	4) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	27
	5) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	28
	6) frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	27
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik	52-105
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	
	1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	54
	2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	55
	a) alamat;	55
	b) nomor telepon;	55
	c) nomor faksimile;	55
	d) alamat surat elektronik; dan	55
	e) alamat Situs Web;	55
	3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	56
	4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	64-65
	5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	60-61
	6) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	62-63
	7) profil Direksi, paling sedikit memuat:	
	a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	71-79
	b) foto terbaru;	71-79
	c) usia;	71-79
	d) kewarganegaraan;	71-79
	e) riwayat pendidikan;	71-79
	f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	71-79
	1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	71-79
	2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	71-79
	3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	71-79
	g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	95
	h) hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	71-79
	8) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	66-70
	a) nama;	66-70
	b) foto terbaru;	66-70
	c) usia;	66-70
	d) kewarganegaraan;	66-70
	e) riwayat pendidikan;	66-70
	f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	66-70
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	66-70
	(2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	66-70
	(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	66-70
	(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	66-70

Keterangan		Halaman
g)	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	94
h)	hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan	66-70
i)	pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	237
9)	dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	28
10)	jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;	92-93
11)	nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	
a)	pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	96
b)	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	97
c)	kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	96
12)	jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	101
a)	kepemilikan institusi lokal;	101
b)	kepemilikan institusi asing;	101
c)	kepemilikan individu lokal; dan	101
d)	kepemilikan individu asing;	101
13)	informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	98-99
14)	nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);	100
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	√
15)	kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	102
16)	kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);	103
17)	nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	104
18)	dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	104
19)	penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	20-21
a)	nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√
b)	badan atau lembaga yang memberikan; dan	√
c)	masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada);	√
f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen	106-145
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	√
1)	tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	112-125
a)	produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	112-125
b)	pendapatan/penjualan; dan	112-125
c)	profitabilitas;	112-125
2)	kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	126-145
a)	aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	128-129
b)	liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	130-131
c)	ekuitas;	132
d)	pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	132-133
e)	arus kas	133
3)	kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	134
4)	tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	134
5)	struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	135-136
6)	bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	136
a)	tujuan dari ikatan tersebut;	136
b)	sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	136
c)	mata uang yang menjadi denominasi; dan	136
d)	langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	136
7)	bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	136
a)	jenis investasi barang modal;	136
b)	tujuan investasi barang modal; dan	136
c)	nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	136
8)	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	136
9)	prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	137-138
10)	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	137
a)	pendapatan/penjualan;	137
b)	laba (rugi);	137
c)	struktur modal (capital structure);	137
d)	kebijakan dividen; atau	137
e)	hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	137
11)	target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	137

Keterangan		Halaman
	a) pendapatan/penjualan;	137
	b) laba (rug);	137
	c) struktur modal (capital structure);	137
	d) kebijakan dividen; atau	137
	e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	137
12)	aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	112-125
13)	uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	138
	a) kebijakan dividen;	138
	b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	138
	c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	138
	d) jumlah dividen per tahun yang dibayar;	138
14)	realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	141-142
	a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	141-142
	b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	141-142
15)	informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	143
	a) tanggal, nilai, dan objek transaksi;	143
	b) nama pihak yang melakukan transaksi;	143
	c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	143
	d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	143
	e) pemenuhan ketentuan terkait;	143
16)	perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	143
17)	perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	143
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	206-299
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1)	Direksi, mencakup antara lain:	238-243
	a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	241-242
	b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	239
	c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;	238
	d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	245-250
	e) informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	229-232
	(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	229-232
	(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;	229-232
	f) informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	219-226
	(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	221-226
	(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	221-226
	g) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	243
2)	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	233-237
	a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	235
	b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	234
	c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;	233
	d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;	245-246, 250
	e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	236
	(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	236
	(2) kriteria yang digunakan; dan	236
	(3) pihak yang melakukan penilaian;	236
	f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	237
	g) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	254-256
	(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan	254-256
	(2) prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	254-256
3)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	86
	a) nama;	86
	b) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	-
	c) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	-
4)	Komite Audit, mencakup antara lain:	
	a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	253
	b) usia;	253
	c) kewarganegaraan;	253
	d) riwayat pendidikan;	253

Keterangan		Halaman
e)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	253
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	253
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	253
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	253
f)	periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	253
g)	pernyataan independensi Komite Audit;	252
h)	kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	253
i)	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	94
j)	pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	253-254
5)	komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	
a)	nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	
b)	usia;	
c)	kewarganegaraan;	
d)	riwayat pendidikan;	
e)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
f)	periode dan masa jabatan anggota komite;	
g)	uraian tugas dan tanggung jawab;	
h)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	
i)	pernyataan independensi komite;	
j)	kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	
k)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	
l)	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	94
6)	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	277-280
a)	nama;	277
b)	domisili;	277
c)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	277
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	277
	(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	277
d)	riwayat pendidikan;	277
e)	pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	277
f)	uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	278
7)	Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	289-293
a)	nama kepala Unit Audit Internal;	289
b)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	289
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	289
	(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	289
c)	kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	291-292
d)	pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	291
e)	struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	290
f)	uraian tugas dan tanggung jawab;	290-291
g)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	291
h)	uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	292
8)	uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	293-295
a)	pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	293-294
b)	tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	295
9)	sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	148-193
a)	gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	149
b)	jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	153-193
c)	tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	153-193
10)	perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	295
a)	pokok perkara/gugatan;	295
b)	status penyelesaian perkara/gugatan; dan	295
c)	pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	295
11)	informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	295
12)	informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	295-296
a)	pokok-pokok kode etik;	296
b)	bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	296
c)	pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	296
13)	informasi mengenai budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	65

Keterangan		Halaman
14)	uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	138-141
a)	jumlah saham dan/atau opsi;	139-141
b)	jangka waktu pelaksanaan;	139-141
c)	persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	140
d)	harga pelaksanaan;	139-141
15)	uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	296-297
a)	cara penyampaian laporan pelanggaran;	297
b)	perlindungan bagi pelapor;	297
c)	penanganan pengaduan;	297
d)	pihak yang mengelola pengaduan; dan	297
e)	hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	
(1)	jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	297
(2)	tindak lanjut pengaduan;	297
16	penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	298-299
a)	pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	298-299
b)	penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	298-299
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	300-312
1)	Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	
a)	lingkungan hidup, antara lain:	308
(1)	penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;	308
(2)	sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;	308
(3)	mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan	308
(4)	sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	308
b)	praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	309-310
(1)	kesetaraan gender dan kesempatan kerja;	309
(2)	sarana dan keselamatan kerja;	310
(3)	tingkat perpindahan (turnover) karyawan;	310
(4)	tingkat kecelakaan kerja;	310
(5)	pendidikan dan/atau pelatihan;	309
(6)	remunerasi; dan	310
(7)	mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	310
c)	pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	
(1)	penggunaan tenaga kerja lokal;	312
(2)	pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;	312
(3)	perbaikan sarana dan prasarana sosial;	312
(4)	bentuk donasi lainnya; dan	312
(5)	komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	
d)	tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	311
(1)	kesehatan dan keselamatan konsumen;	311
(2)	informasi barang dan/atau jasa; dan	311
(3)	sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	311
2)	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan	308
3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;	308
i	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	314-528
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	
j	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	50-51
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	

Kriteria Annual Report Awards

Keterangan	Halaman
I. Umum	
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	√
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	√
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	√
4. Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:	√
a. Sampul muka	√
b. Samping	√
c. Sampul belakang	√
d. Setiap halaman	√
5. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan, mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting	
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk Perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, Informasi memuat antara lain:	6-9
a. Penjualan/pendapatan usaha	6
b. Laba (rugi):	6
Distribusikan kepada pemilik entitas induk	6
Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali	6
c. Penghasilan komprehensif periode berjalan :	6
Distribusikan kepada pemilik entitas induk	6
Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali	6
d. Laba (rugi) per saham.	6
Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total	
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, Informasi memuat antara lain:	6
a. Jumlah investasi pada entitas asosiasi	6
b. Jumlah aset	6
c. Jumlah liabilitas	6
d. Jumlah ekuitas.	6
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan	7
4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	10-11
a. Jumlah saham yang beredar	11
b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:	11
Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan	11
Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan	11
Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	11
c. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:	11
Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan	11
Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	11
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan	
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Informasi memuat:	12-13
a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding)	12-13
b. Tingkat bunga/imbalan	13
c. Tanggal jatuh tempo	13
d. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2018 dan 2019	13
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	
1. Laporan Dewan Komisaris, memuat hal-hal sebagai berikut:	24-31
a. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya	26
b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya	29
c. Pandangan atas penerapan/penyelenggaraan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut	27
d. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	28

Kriteria Annual Report Awards

Keterangan		Halaman
2.	Laporan Direksi memuat hal-hal sebagai berikut:	32-47
a.	Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:	
	Kebijakan strategis	36
	Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan	37-39
	Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya	35-36
b.	Analisis tentang prospek usaha	39
c.	Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan	40
d.	Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	40
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memuat hal-hal sebagai berikut:	50-51
a.	Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri	√
b.	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan	√
c.	Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya	√
d.	Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	√
IV. Profil Perusahaan		52-105
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan yang memuat informasi antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	54-55
2.	Riwayat singkat perusahaan, mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	56
3.	Bidang usaha yang memuat uraian mengenai antara lain:	60-61
a.	Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir	60
b.	Kegiatan usaha yang dijalankan	60
c.	Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	61
4.	Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.	62-63
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan yang mencakup:	64-65
a.	Visi perusahaan	64
b.	Misi perusahaan	65
c.	Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direview dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku	65
d.	Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	65
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris yang memuat Informasi antara lain:	66-70
a.	Nama	66-70
b.	Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain)	66-70
c.	Umur	66-70
d.	Domisili	66-70
e.	Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan)	66-70
f.	Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)	66-70
g.	Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	66-70
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi yang memuat informasi antara lain:	71-79
a.	Nama	71-79
b.	Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain)	71-79
c.	Umur	71-79
d.	Domisili	71-79
e.	Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan)	71-79
f.	Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)	71-79
g.	Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	71-79
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi, yang memuat informasi antara lain:	92-93
a.	Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi	92
b.	Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan	92
c.	Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian	92
d.	Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan	94
e.	Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	93
9.	Komposisi Pemegang saham yang mencakup antara lain	96-97
a.	Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;	96
b.	Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham	96
	Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	96
c.	Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.	97
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:	100
a.	Nama entitas anak dan/atau asosiasi	100
b.	Persentase kepemilikan saham	100
c.	Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi	100
d.	Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	100

Keterangan		Halaman
11.	Struktur grup perusahaan; Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	101
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku, Mencakup antara lain:	102
a.	Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action)	102
b.	Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action)	102
c.	Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.	102
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.		
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku, mencakup antara lain:	103
a.	Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;	103
b.	Nilai penawaran efek lainnya	103
c.	Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan	103
d.	Peringkat efek.	103
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.		
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang, informasi memuat antara lain:	104
a.	Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan	104
b.	Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik	104
c.	Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	104
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional, informasi memuat antara lain:	20-21
a.	Nama penghargaan dan/atau sertifikasi	20-21
b.	Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi	20-21
c.	Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi	20-21
d.	Nama penghargaan dan/atau sertifikasi	20-21
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada), memuat informasi antara lain:	100
a.	Nama dan alamat entitas anak; dan	100
b.	Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan	100
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.		
17.	Informasi pada Website Perusahaan, Meliputi paling kurang:	105
a.	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;	105
b.	Isi Kode Etik;	105
c.	Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	105
d.	Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	105
e.	Profil Dewan Komisaris dan Direksi	105
f.	Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	105
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal, Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):	
a.	Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris	94
b.	Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi	95
c.	Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit	-
d.	Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi	-
e.	Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya	-
f.	Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan	-
g.	Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku.	
Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan		
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		106-145
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian mengenai:	112-125
a.	Penjelasan masing-masing segmen usaha.	112-125
b.	Kinerja per segmen usaha, antara lain:	112-125
	Produksi	112-125
	Peningkatan/penurunan kapasitas produksi	112-125
	Penjualan/pendapatan usaha	112-125
	Profitabilitas.	112-125
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan, yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan atau akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:	126-145
a.	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset	128-129
b.	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas	130-131
c.	Ekuitas	132
d.	Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan	132-133
e.	Arus kas.	133
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan; Penjelasan tentang:	134
a.	Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang	134
b.	Tingkat kolektibilitas piutang.	134

Kriteria Annual Report Awards

Keterangan		Halaman
4.	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy), Penjelasan atas:	135-136
a.	Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas	136
b.	Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies)	135
c.	Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	135
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir, Penjelasan tentang:	136
a.	Nama pihak yang melakukan ikatan	136
b.	Tujuan dari ikatan tersebut	136
c.	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;	136
d.	Mata uang yang menjadi denominasi	136
e.	Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	136
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	
6.	Bahasan mengenai ikatan investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	136
	Penjelasan tentang:	
a.	Jenis investasi barang modal;	136
b.	Tujuan investasi barang modal; dan	136
c.	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	136
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan, Informasi memuat antara lain:	137
a.	Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi)	137
b.	Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	137
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.	136
	Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	137-138
10.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	112-125
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, Memuat uraian mengenai:	138
a.	Kebijakan pembagian dividen	138
b.	Total dividen yang dibagikan	138
c.	Jumlah dividen kas per saham	138
d.	Payout ratio	138
e.	Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun.	138
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	138
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku, Memuat uraian mengenai:	138-141
a.	Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya	139
b.	Jangka waktu	139-141
c.	Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak	140
d.	Harga exercise.	139-141
	Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana), Memuat uraian mengenai:	141-142
a.	Total perolehan dana	141-142
b.	Rencana penggunaan dana	141-142
c.	Rincian penggunaan dana	141-142
d.	Saldo dana	141-142
e.	Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	141-142
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi, memuat uraian mengenai:	143
a.	Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi	143
b.	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi	143
c.	Alasan dilakukannya transaksi	143
d.	Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir	143
e.	Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi	143
f.	Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.	143
	Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir, uraian memuat antara lain:	143
a.	Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	143
b.	Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	143
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	

Keterangan		Halaman
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir, uraian memuat antara lain:	143
	a. Perubahan kebijakan akuntansi	143
	b. Alasan perubahan kebijakan akuntansi	143
	c. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	143
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	
17.	Informasi kelangsungan usaha, pengungkapan informasi mengenai:	144-145
	a. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir	144
	b. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1	144
	c. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.	144
	Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	
VI.	Good Corporate Governance	206-299
1.	Uraian Dewan Komisaris, uraian memuat antara lain:	233-237
	a. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris	235
	b. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya	237
	c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	234
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris), meliputi antara lain:	237
	a. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan	237
	b. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	237
3.	Uraian Direksi yang memuat antara lain:	238-243
	a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi	241-242
	b. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada)	243
	c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	239
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi, memuat uraian mengenai:	298-299
	a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian	298
	b. Pihak yang melakukan penilaian	298
	c. Skor penilaian masing-masing kriteria	298
	d. Rekomendasi hasil penilaian	298-299
	e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.	298-299
	Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku, agar diungkapkan.	
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup antara lain:	273-277
	a. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris	273
	b. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi	276
	c. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;	274
	d. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi	277
	e. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi	276
	f. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).	275
	Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan), informasi memuat antara lain:	244-250
	a. Tanggal Rapat	244-250
	b. Peserta Rapat	244-250
	c. Agenda Rapat	244-250
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.	98-99
	Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, mencakup antara lain:	251
	a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;	251
	b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	251
	c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;	251
	d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan	251
	e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.	251
	Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	
9.	Komite Audit, mencakup penyampaian informasi antara lain:	252-253
	a. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;	253
	b. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;	253
	c. Independensi anggota komite audit;	252
	d. Uraian tugas dan tanggung jawab;	252
	e. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan	253-254
	f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	253

Kriteria Annual Report Awards

Keterangan		Halaman
10.	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi, penyampaian informasi antara lain:	254-256
a.	Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	255
b.	Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;	254
c.	Uraian tugas dan tanggung jawab;	254
d.	Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku;	255-256
e.	Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;	255
f.	Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan	254
g.	Kebijakan mengenai suksesi direksi.	243
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, penyampaian informasi antara lain:	256-257, 258-259, 259-260, 260-261, 261-263, 264-265, 266-269, 269-271, 271-272, 272-273, 273-277
a.	Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;	
b.	Independensi komite lain;	
c.	Uraian tugas dan tanggung jawab;	
d.	Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan	
e.	Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan, penyampaian informasi antara lain;	277-280
a.	Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;	277
b.	Domisili;	277
c.	Uraian tugas dan tanggung jawab; dan	277
d.	Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	278-280
13.	Uraian mengenai unit audit internal, penyampaian informasi antara lain	289-293
a.	Nama ketua unit audit internal;	289
b.	Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;	291
c.	Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	291-292
d.	Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;	290
e.	Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan	292
f.	Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	289
14.	Akuntan Publik, penyampaian informasi antara lain	288-289
a.	Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	288
b.	Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	288
c.	Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	289
Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan, mencakup antara lain:	148-193
a.	Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;	149
b.	Penjelasan mengenai hasil review yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;	153-193
c.	Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan	153-193
d.	Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	153-193
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern, penyampaian informasi antara lain	293-295
a.	Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;	293-294
b.	Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan	293-294
c.	Penjelasan mengenai hasil review yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	295
17.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait tatakelola Tanggung jawab sosial	300-312
a.	Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial	304
b.	Informasi mengenai metode dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan	304
c.	Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan	304
d.	Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan	304
e.	Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban	305
f.	Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder	305
g.	Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan	305
h.	Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	305
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Hak Asasi Manusia	306-307
a.	Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Asasi Manusia	306
b.	Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Asasi Manusia	306
c.	Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Asasi Manusia	306
d.	Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia	306
e.	Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia	306
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Operasi yang adil	307
a.	Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil	307
b.	Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil	307
c.	Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil	307
d.	Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	307
e.	Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	307

Keterangan		Halaman
20.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang ;	308
a.	Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan	308
b.	Informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan	308
c.	Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen;	308
d.	Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan	308
e.	Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup	308
f.	Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.	308
g.	Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	308
21.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang:	309-310
a.	Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan	309-310
b.	Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan	309-310
c.	Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan	309-310
d.	Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut	309-310
e.	Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	309-310
22.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Mencakup antara lain:	311
a.	Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan	311
b.	Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut	311
c.	Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanganan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	311
23.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang:	312
a.	Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan kemasyarakatan	312
b.	Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan	312
c.	Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan	312
d.	Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan	312
e.	Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen;	312
f.	Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan	312
g.	Biaya yang dikeluarkan	312
h.	Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	312
24.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan, mencakup antara lain:	295
a.	Pokok perkara/gugatan;	295
b.	Status penyelesaian perkara/gugatan;	295
c.	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan	295
d.	Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).	295
	Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	
25.	Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	295
26.	Bahasan mengenai kode etik, memuat uraian antara lain:	295-296
a.	Pokok-pokok kode etik;	296
b.	Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	296
c.	Penyebarluasan kode etik;	296
d.	Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	296
e.	Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	-
	Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	
27.	Pengungkapan mengenai whistleblowing system. Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:	296-297
a.	Penyampaian laporan pelanggaran;	297
b.	Perlindungan bagi whistleblower;	297
c.	Penanganan pengaduan;	297
d.	Pihak yang mengelola pengaduan; dan	297
e.	Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan	297
f.	Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.	297
	Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	
28	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.	243-244
	Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	

Kriteria Annual Report Awards

	Keterangan	Halaman
VII. Informasi Keuangan		
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	315
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan	317 (belum ada nomor)
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini, deskripsi memuat tentang:	318
a.	Nama dan tanda tangan;	318
b.	Tanggal Laporan Audit; dan	318
c.	Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	318
4.	Laporan keuangan yang lengkap, memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:	
a.	Laporan posisi keuangan;	319
b.	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	323-324
c.	Laporan perubahan ekuitas;	325-326
d.	Laporan arus kas;	327-329
e.	Catatan atas laporan keuangan;	330-519
f.	Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	√
g.	Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	√
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas, menampilkan perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	323-324
6.	Laporan Arus Kas, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:	
a.	Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;	
b.	Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;	
c.	Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan	327-329
d.	Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang meliputi sekurang-kurangnya:	
a.	Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;	
b.	Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;	
c.	Pajak penghasilan;	
d.	Imbalan kerja; dan	
e.	Instrumen Keuangan.	343-375
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi, dimana hal-hal yang diungkapkan antara lain:	
a.	Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	
b.	Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	
c.	Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	466-471
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan, Hal-hal yang harus diungkapkan:	
a.	Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	
b.	Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;	
c.	Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018;	
d.	Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan	369-370, 405-412
e.	Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap, hal-hal yang harus diungkapkan:	
a.	Metode penyusutan yang digunakan;	
b.	Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;	
c.	Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan	361-363, 413-415
d.	Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi dimana hal-hal yang harus diungkapkan:	
a.	Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;	
b.	Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;	
c.	Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan	472-476
d.	Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan, dimana hal-hal yang harus diungkapkan:	
a.	Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;	
b.	Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;	
c.	Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;	
d.	Kebijakan manajemen risiko; dan	
e.	Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	348-350, 502-504, 512-516
13.	Penerbitan laporan keuangan, hal-hal yang diungkapkan antara lain:	
a.	Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan	
b.	Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	316-318

LAPORAN TAHUNAN

2019

bank
btpn

A MEMBER OF
SMBC Group

ready for
**FUTURE
GROWTH**

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6
Jakarta 12950
Phone : +62 21 300 26 200
Fax : +62 21 300 26 309

btpn.com

